



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA
DENPASAR
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD.....	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan	13
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	16
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	33
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	36
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	37
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	37
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah.....	38
BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	76
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA.....	76
5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL	126
5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	127
5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	178
5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	213
5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	221
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	227
6.1. Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	227
6.2. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Denpasar	227
6.3. Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	228
BAB VII PENUTUP	230





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar	7
Tabel 2. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar	8
Tabel 2. 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar	8
Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar	8
Tabel 2. 5 Gini Ratio Kota Denpasar	9
Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia	10
Tabel 2. 7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar	10
Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar	11
Tabel 2. 9 Tingkat Inflasi Kota Denpasar	11
Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	12
Tabel 2. 11 APBD Tahun 2025	14
Tabel 2. 12 Data APBD untuk Tahun 2024 dan 2025	17
Tabel 2. 13 Perhitungan Belanja Pegawai Pada APBD TA 2025	21
Tabel 2. 14 Perhitungan Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pada APBD TA 2025	25
Tabel 2. 15 Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan Pada APBD TA 2025	26
Tabel 2. 16 Alokasi Penanganan Inflasi Pada APBD TA 2025	28
Tabel 2. 17 Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2025	31
Tabel 2. 18 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2025	32
Tabel 3. 1 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2025	33
Tabel 3. 2 Jumlah Sekolah Penerima Dana BOSP Tahun 2025	35
Tabel 3. 3 Ikhtisar Dana BOSP Tahun 2025	35
Tabel 4. 1 Batasan Minimal Jumlah Biaya Aset Tetap	56
Tabel 5. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024	76
Tabel 5. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024	77
Tabel 5. 3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	77
Tabel 5. 4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024	81
Tabel 5. 5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	83
Tabel 5. 6 Rincian Penerimaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	83
Tabel 5. 7 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024	84
Tabel 5. 8 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	87
Tabel 5. 9 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024	88
Tabel 5. 10 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024	88
Tabel 5. 11 Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024	89
Tabel 5. 12 Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024	89
Tabel 5. 13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan 2024	90
Tabel 5. 14 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024	91





Tabel 5. 15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024	92
Tabel 5. 16 Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024.....	92
Tabel 5. 17 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024.....	93
Tabel 5. 18 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	94
Tabel 5. 19 Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2025 dan 2024	94
Tabel 5. 20 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024	95
Tabel 5. 21 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	95
Tabel 5. 22 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....	96
Tabel 5. 23 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	99
Tabel 5. 24 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 dan 2024.....	102
Tabel 5. 25 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	102
Tabel 5. 26 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025	106
Tabel 5. 27 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024	106
Tabel 5. 28 Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	108
Tabel 5. 29 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024	108
Tabel 5. 30 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	109
Tabel 5. 31 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024.....	112
Tabel 5. 32 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024	113
Tabel 5. 33 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024	114
Tabel 5. 34 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	115
Tabel 5. 35 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024.....	116
Tabel 5. 36 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024.....	117
Tabel 5. 37 Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024.....	117
Tabel 5. 38 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	118
Tabel 5. 39 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	119
Tabel 5. 40 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024	119
Tabel 5. 41 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan 2024	120
Tabel 5. 42 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024.....	121
Tabel 5. 43 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024	121
Tabel 5. 44 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024.....	122
Tabel 5. 45 Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 dan 2024	122
Tabel 5. 46 SiLPA Tahun 2025 dan 2024	123
Tabel 5. 47 Rincian SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat Tahun 2025.....	123
Tabel 5. 48 Rincian Keberadaan SiLPA Tahun 2025.....	125
Tabel 5. 49 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024	126
Tabel 5. 50 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024	126
Tabel 5. 51 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024....	126
Tabel 5. 52 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024	127





Tabel 5. 53 Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024	127
Tabel 5. 54 Rincian Aset Tahun 2025 dan 2024	128
Tabel 5. 55 Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024	128
Tabel 5. 56 Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025 dan 2024	129
Tabel 5. 57 Kas di Kas Daerah Tahun 2025 dan 2024	129
Tabel 5. 58 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dan 2024	129
Tabel 5. 59 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan 2024	130
Tabel 5. 60 Kas di BLUD Tahun 2025 dan 2024	130
Tabel 5. 61 Rincian Hasil Audit Laporan Keuangan BLUD	131
Tabel 5. 62 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025 dan 2024	131
Tabel 5. 63 Kas Dana BOSP Tahun 2025 dan 2024	132
Tabel 5. 64 Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2025 dan 2024	132
Tabel 5. 65 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	132
Tabel 5. 66 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2025 dan 2024	134
Tabel 5. 67 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024	135
Tabel 5. 68 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	136
Tabel 5. 69 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024	138
Tabel 5. 70 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024	138
Tabel 5. 71 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	139
Tabel 5. 72 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	139
Tabel 5. 73 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024	140
Tabel 5. 74 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024	141
Tabel 5. 75 Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 dan 2024	142
Tabel 5. 76 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dan 2024	142
Tabel 5. 77 Rincian Beban Dibayar Dimuka - Sewa Tahun 2025 dan 2024	142
Tabel 5. 78 Rincian Beban Dibayar Dimuka - Asuransi Tahun 2025 dan 2024	143
Tabel 5. 79 Rincian Persediaan Tahun 2025 dan 2024	143
Tabel 5. 80 Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024	144
Tabel 5. 81 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2025 dan 2024	144
Tabel 5. 82 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2025 dan 2024	145
Tabel 5. 83 Nilai Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	146
Tabel 5. 84 Nilai Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma per 31 Desember 2025	147
Tabel 5. 85 Nilai Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma per 31 Desember 2025	148
Tabel 5. 86 Rincian Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024	149
Tabel 5. 87 Rincian Tanah TA 2025	149
Tabel 5. 88 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2025	150





Tabel 5. 89 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025	151
Tabel 5. 90 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025	152
Tabel 5. 91 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025	157
Tabel 5. 92 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025	157
Tabel 5. 93 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025	161
Tabel 5. 94 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025	161
Tabel 5. 95 Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2025	163
Tabel 5. 96 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025	163
Tabel 5. 97 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025	164
Tabel 5. 98 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025	165
Tabel 5. 99 Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2025	166
Tabel 5. 100 Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	166
Tabel 5. 101 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 dan 2024	167
Tabel 5. 102 Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2025	167
Tabel 5. 103 Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024	168
Tabel 5. 104 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud TA 2025	168
Tabel 5. 105 Rincian Aset Lain-lain TA 2025	168
Tabel 5. 106 Rincian Mutasi Aset Lain-lain TA 2025	169
Tabel 5. 107 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024	170
Tabel 5. 108 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	170
Tabel 5. 109 Rincian Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility TA 2025	171
Tabel 5. 110 Rincian Mutasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility Tahun 2025 dan 2024	171
Tabel 5. 111 Rincian Aset Properti Investasi TA 2025	171
Tabel 5. 112 Rincian Kewajiban Tahun 2025 dan 2024	172
Tabel 5. 113 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan 2024	172
Tabel 5. 114 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 dan 2024	172
Tabel 5. 115 Rincian Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024	173
Tabel 5. 116 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024	173
Tabel 5. 117 Mutasi Saldo Utang Pegawai Tahun 2025	175
Tabel 5. 118 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	175
Tabel 5. 119 Mutasi Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	176
Tabel 5. 120 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024	176
Tabel 5. 121 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 dan 2024	177
Tabel 5. 122 Rincian Ekuitas Tahun 2025 dan 2024	178
Tabel 5. 123 Rincian Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024	178
Tabel 5. 124 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024	179
Tabel 5. 125 Rincian Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024	179
Tabel 5. 126 Penjelasan Selisih Pajak Daerah pada LO dan LRA	182
Tabel 5. 127 Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024	182





Tabel 5. 128 Penjelasan Selisih Retribusi Daerah pada LO dan LRA	183
Tabel 5. 129 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024.....	184
Tabel 5. 130 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024	184
Tabel 5. 131 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA	188
Tabel 5. 132 Rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024.....	188
Tabel 5. 133 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024	188
Tabel 5. 134 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LO dan LRA	189
Tabel 5. 135 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024	190
Tabel 5. 136 Rincian Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024	190
Tabel 5. 137 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LO dan LRA	191
Tabel 5. 138 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024.....	191
Tabel 5. 139 Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024.....	191
Tabel 5. 140 Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah pada LO dan LRA.....	192
Tabel 5. 141 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024.....	194
Tabel 5. 142 Rincian Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	194
Tabel 5. 143 Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	195
Tabel 5. 144 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....	195
Tabel 5. 145 Penjelasan Selisih Beban Pegawai.....	197
Tabel 5. 146 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	197
Tabel 5. 147 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa.....	200
Tabel 5. 148 Rincian Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024.....	201
Tabel 5. 149 Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	201
Tabel 5. 150 Penjelasan Selisih Beban Hibah.....	202
Tabel 5. 151 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....	202
Tabel 5. 152 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024.....	203
Tabel 5. 153 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang.....	204
Tabel 5. 154 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	204
Tabel 5. 155 Rincian Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024	205
Tabel 5. 156 Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024.....	206
Tabel 5. 157 Penjelasan Selisih Transfer Bagi Hasil.....	206
Tabel 5. 158 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024	207
Tabel 5. 159 Penjelasan Selisih Beban Transfer Bantuan Keuangan.....	208
Tabel 5. 160 Rincian Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024	208
Tabel 5. 161 Rincian dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024.....	208
Tabel 5. 162 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024..	208
Tabel 5. 163 Rincian Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO Tahun 2025 dan 2024	209





Tabel 5. 164 Rincian Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024	210
Tabel 5. 165 Rincian Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024.....	210
Tabel 5. 166 Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024.....	211
Tabel 5. 167 Penjelasan Selisih Beban Luar Biasa	212
Tabel 5. 168 Rincian Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024	212
Tabel 5. 169 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	213
Tabel 5. 170 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	214
Tabel 5. 171 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	215
Tabel 5. 172 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024.....	216
Tabel 5. 173 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024.....	217
Tabel 5. 174 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024.....	217
Tabel 5. 175 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024.....	218
Tabel 5. 176 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	218
Tabel 5. 177 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	219
Tabel 5. 178 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	219
Tabel 5. 179 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024.....	219
Tabel 5. 180 Saldo Awal Tahun 2025 dan 2024	220
Tabel 5. 181 Koreksi SiLPA Tahun Lalu Tahun 2025 dan 2024.....	220
Tabel 5. 182 Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024	220
Tabel 5. 183 Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024	221
Tabel 5. 184 Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024.....	221
Tabel 5. 185 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024.....	221
Tabel 5. 186 Koreksi Ekuitas - Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024.....	222
Tabel 5. 187 Koreksi Ekuitas - Piutang Tahun 2025 dan 2024	222
Tabel 5. 188 Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dan 2024.....	222
Tabel 5. 189 Koreksi Ekuitas - Persediaan Tahun 2025 dan 2024	223
Tabel 5. 190 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024.....	223
Tabel 5. 191 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	224
Tabel 5. 192 Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan 2024	225
Tabel 5. 193 Ekuitas Akhir TA 2025 dan 2024	226





DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	76
Gambar 5. 2 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	95
Gambar 5. 3 Komposisi Neraca Tahun 2025	128
Gambar 5. 4 Komposisi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025	179
Gambar 5. 5 Komposisi Beban Daerah Tahun 2025	194
Gambar 5. 6 Komposisi Beban Operasi Tahun 2025	195





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1a	Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk <i>Mandatory Spending</i> Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1b	Belanja Wajib Yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1c	Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1d	Belanja Optimalisasi Pelaksanaan Pengetasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1e	Laporan Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
Lampiran 1f	Ikhtisar Dana Desa
Lampiran 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Lampiran 2a	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Lampiran 2b	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 2c	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi
Lampiran 2d	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Lampiran 2e	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Lampiran 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Lampiran 3a	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Lampiran 3b	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 3c	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Lampiran 3d	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Lampiran 3e	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran 3f	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Lampiran 4	Daftar Perhitungan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran 5	Kas di BLUD
Lampiran 5a	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Lampiran 6	Kas Dana BOSP - SD Negeri
Lampiran 6a	Kas Dana BOSP - SMP Negeri
Lampiran 6b	Kas Dana BOSP - Dana BOP PAUD dan Kesetaraan
Lampiran 7	Kas Dana BOK Puskesmas
Lampiran 8	Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Lampiran 9	Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Lampiran 9a	Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Lampiran 10	Piutang dan Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Lampiran 10a	Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
Lampiran 10b	Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Lampiran 11	Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
Lampiran 12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Lampiran 13	Beban Dibayar Dimuka - Sewa





Lampiran 13a	Beban Dibayar Dimuka - Asuransi
Lampiran 14	Persediaan
Lampiran 14a	Rincian Persediaan
Lampiran 15	Dana Bergulir kepada Koperasi dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran 16	Perhitungan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)
Lampiran 17	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran 17a	Daftar Nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel
Lampiran 17b	Rincian Perjanjian Pinjam Pakai
Lampiran 17c	Rincian Perjanjian BMD yang Disewakan Sebagian
Lampiran 17d	Rincian Penggunaan BMD yang Dioperasikan oleh Pihak Lain
Lampiran 18	Daftar Aset Tetap Tanah
Lampiran 18a	Daftar Penertiban Aset Tetap Tanah
Lampiran 19	Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin
Lampiran 20	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 21	Daftar Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Lampiran 22	Daftar Aset Tetap Lainnya
Lampiran 23	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 23a	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Akan Dilanjutkan dan Tidak Dilanjutkan
Lampiran 24	Bidang Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP/STUP) Diperoleh dari Pelaksanaan Konsolidasi Lahan (LC)
Lampiran 25	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
Lampiran 25a	Daftar Nilai Aset Lainnya Ekstrakomptabel
Lampiran 26	Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Lampiran 27	Daftar Aset Tidak Berwujud
Lampiran 28	Daftar Aset Lain-lain
Lampiran 29	Daftar Nilai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran 30	Rincian Properti Investasi Tanah
Lampiran 31	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran 32	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Barang Milik Daerah (Sewa Tanah)
Lampiran 32a	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Barang Milik Daerah (Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi)
Lampiran 32b	Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame
Lampiran 33	Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Lampiran 34	Rincian Utang Telepon, Utang Air, Utang Listrik dan Utang Internet
Lampiran 35	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
Lampiran 35a	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lampiran 35b	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lampiran 36	Rincian Penghapusan Barang Milik Daerah
Lampiran 37	Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga





ꦮꦭꦏꦺꦠꦤꦺꦤꦥꦱꦂꦠ
WALIKOTA DENPASAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Denpasar, 25 Mei 2026

WALIKOTA DENPASAR



I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	3.389.044.199.263,00	3.562.778.417.859,95	105,13	3.147.386.812.398,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	2.018.795.135.284,00	2.220.130.658.663,55	109,97	1.668.189.310.265,36
Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	1.710.000.000.000,00	1.874.480.094.512,48	109,62	1.399.865.377.619,51
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	170.848.224.286,00	194.129.093.014,51	113,63	156.369.987.668,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	100.261.240.483,00	100.261.240.483,21	100,00	75.729.806.844,40
Lain - lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	37.685.670.515,00	51.260.230.653,35	136,02	36.224.138.132,62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		2.018.795.135.284,00	2.220.130.658.663,55	109,97	1.668.189.310.265,36
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	1.368.783.619.229,00	1.341.300.762.159,00	97,99	1.458.044.839.972,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	1.182.434.690.784,00	1.166.472.213.110,00	98,65	1.168.962.054.175,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1.	0,00	0,00	0,00	1.077.007.016.175,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.2.	39.896.439.000,00	39.896.439.000,00	100,00	34.828.566.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3.	21.645.986.000,00	21.645.986.000,00	100,00	57.126.472.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.4.	129.886.054.000,00	120.563.983.700,00	92,82	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.5.	711.678.225.784,00	711.632.242.557,00	99,99	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.6.	279.327.986.000,00	272.733.561.853,00	97,64	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	186.348.928.445,00	174.828.549.049,00	93,82	289.082.785.797,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1.	161.198.928.445,00	152.659.650.049,00	94,70	287.528.478.089,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2.	25.150.000.000,00	22.168.899.000,00	88,15	1.554.307.708,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.368.783.619.229,00	1.341.300.762.159,00	97,99	1.458.044.839.972,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	21.152.662.161,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	16.481.457,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2.	0,00	0,00	0,00	21.136.180.704,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	21.152.662.161,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.389.044.199.263,00	3.562.778.417.859,95	105,13	3.147.386.812.398,36
BELANJA DAERAH	5.1.2.	4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89	88,48	2.866.446.655.427,21
BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	2.665.176.658.404,00	2.416.572.353.375,89	90,67	2.147.613.065.659,31
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	1.293.369.357.988,00	1.223.348.651.344,45	94,59	996.719.954.633,96
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1.101.918.742.705,00	930.635.532.570,44	84,46	937.807.065.343,50
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	46.800.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	262.080.097.711,00	255.155.766.733,00	97,36	205.187.176.852,85
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	7.761.660.000,00	7.432.402.728,00	95,76	7.820.868.829,00
Jumlah Belanja Operasi		2.665.176.658.404,00	2.416.572.353.375,89	90,67	2.147.613.065.659,31
BELANJA MODAL	5.1.2.2.	989.281.447.076,90	774.880.786.924,00	78,33	465.354.104.773,90
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	164.192.887.500,00	6.726.112.218,00	4,10	2.707.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	199.270.536.604,00	185.238.091.071,00	92,96	172.301.850.123,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	258.418.995.872,00	239.885.865.559,00	92,83	105.439.291.215,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	356.448.030.800,00	332.924.809.582,00	93,40	177.787.346.159,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	10.258.255.800,00	9.419.135.048,00	91,82	8.734.655.059,80
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00
Jumlah Belanja Modal		989.281.447.076,90	774.880.786.924,00	78,33	465.354.104.773,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	14.688.066.179,00	6.874.292.006,00	46,80	2.415.538.991,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	14.688.066.179,00	6.874.292.006,00	46,80	2.415.538.991,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		14.688.066.179,00	6.874.292.006,00	46,80	2.415.538.991,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	418.949.971.810,00	418.769.971.810,00	99,96	251.063.946.083,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	217.815.370.690,00	217.815.370.690,00	100,00	111.797.414.525,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	201.134.601.120,00	200.954.601.120,00	99,91	139.266.531.478,00
Jumlah Belanja Transfer		418.949.971.810,00	418.769.971.810,00	99,96	251.063.946.083,00
JUMLAH BELANJA		4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89	88,48	2.866.446.655.427,21
SURPLUS/DEFISIT		(699.051.944.206,00)	(54.318.986.255,94)	7,77	280.940.156.971,15

URAIAN	REF KALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3.	699.051.944.206,00	699.051.944.206,51	100,00	476.611.787.235,36
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.	757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1.	757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1.	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		699.051.944.206,00	699.051.944.206,51	100,00	476.611.787.235,36
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI		0,00	644.732.957.950,57	0,00	757.551.944.206,51
KOREKSI SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	5.1.4.	0,00	644.732.957.950,57	0,00	757.551.944.206,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	757.551.944.206,51	578.635.787.235,36
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2.	757.551.944.206,51	578.635.787.235,36
Subtotal		0,00	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51
Subtotal		644.732.957.950,57	757.551.944.206,51
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	0,00	0,00
Lain - Lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5.	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	2025	2024
ASET	5.3.1.	7.979.777.719.688,88	7.747.199.326.400,92
ASET LANCAR	5.3.1.1.	1.022.795.979.569,09	1.132.879.031.197,60
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	613.867.339.660,15	737.700.968.617,37
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.	0,00	419.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.	7.500.000,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.	29.729.278.233,44	13.740.861.427,36
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.	0,00	2.979.429.045,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.	671.941.578,98	754.600.894,78
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.	456.898.478,00	2.375.665.222,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.	719.537.716.373,92	650.922.238.047,20
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.	16.302.915.516,89	19.447.374.131,40
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4.	26.887.038.525,43	23.656.732.893,05
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5.	6.516.345.735,00	50.298.175.523,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.6.	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.7.	(463.995.783.488,20)	(436.260.907.857,13)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8.	6.740.795.833,34	4.948.700.833,34
Persediaan	5.3.1.1.9.	64.771.296.131,14	61.012.076.429,23
Jumlah Aset Lancar		1.022.795.979.569,09	1.132.879.031.197,60
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	984.614.508.131,00	907.546.549.551,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	984.614.508.131,00	907.546.549.551,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		984.614.508.131,00	907.546.549.551,00
ASET TETAP	5.3.1.3.	5.933.074.585.945,47	5.615.643.612.483,52
Tanah	5.3.1.3.1.	3.536.178.856.136,83	3.669.900.165.486,40
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	1.293.392.551.196,92	1.146.484.985.917,67
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	1.607.055.132.091,97	1.393.198.686.232,71
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4.	2.091.320.015.524,56	1.766.433.199.211,76
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	53.995.039.459,11	54.715.768.614,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	13.213.684.310,48	11.161.507.823,88
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(2.662.080.692.774,40)	(2.426.250.700.803,36)
Jumlah Aset Tetap		5.933.074.585.945,47	5.615.643.612.483,52
ASET LAINNYA	5.3.1.4.	32.880.146.043,32	84.717.633.168,80
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1.	933.379.950,00	2.354.564.893,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2.	12.745.973.385,00	12.177.149.939,00
Aset Lain - Lain	5.3.1.4.3.	132.549.276.231,87	137.064.753.644,78
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4.	(10.743.318.359,00)	(10.023.139.585,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.5.	(102.605.165.164,55)	(59.752.197.722,98)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.3.1.4.6.	0,00	2.896.502.000,00
Jumlah Aset Lainnya		32.880.146.043,32	84.717.633.168,80
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5.	6.412.500.000,00	6.412.500.000,00
Properti Investasi	5.3.1.5.	6.412.500.000,00	6.412.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
Jumlah Properti Investasi		6.412.500.000,00	6.412.500.000,00
JUMLAH ASET		7.979.777.719.688,88	7.747.199.326.400,92

URAIAN	REF KALK	2025	2024
KEWAJIBAN	5.3.2.	66.904.554.917,45	61.413.802.853,16
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	66.904.554.917,45	61.413.802.853,16
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.	4.406.719.317,95	3.704.269.987,32
Utang Belanja	5.3.2.1.2.	59.919.227.836,79	54.874.723.908,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3.	2.578.607.762,71	2.834.808.957,39
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		66.904.554.917,45	61.413.802.853,16
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		66.904.554.917,45	61.413.802.853,16
EKUITAS	5.3.3.	7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76
EKUITAS	5.3.3.	7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76
Ekuitas	5.3.3.	7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76
JUMLAH EKUITAS		7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.979.777.719.688,88	7.747.199.326.400,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



WALIKOTA DENPASAR



YUSUF NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF. CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.4.1.	3.603.767.077.397,83	3.185.248.129.809,74	418.518.947.588,09	13,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	5.4.1.1.	2.295.966.391.742,35	1.707.729.065.670,63	588.237.326.071,72	34,45
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	1.944.841.681.464,21	1.430.670.222.136,32	514.171.459.327,89	35,94
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2.	190.144.974.835,20	158.082.484.515,73	32.062.490.319,47	20,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3.	100.261.240.483,21	75.729.806.844,40	24.531.433.638,81	32,39
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	60.718.494.959,73	43.246.552.174,18	17.471.942.785,55	40,40
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		2.295.966.391.742,35	1.707.729.065.670,63	588.237.326.071,72	34,45
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2.	1.254.302.177.171,00	1.394.672.099.694,00	(140.369.922.523,00)	(10,06)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1.	1.123.655.857.910,00	1.115.044.141.175,00	8.611.716.735,00	0,77
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.	0,00	1.057.917.669.175,00	(1.057.917.669.175,00)	(100,00)
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1.	21.645.986.000,00	57.126.472.000,00	(35.480.486.000,00)	(62,11)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1.	117.667.481.700,00	0,00	117.667.481.700,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1.	711.632.242.557,00	0,00	711.632.242.557,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.2.1.	272.710.147.653,00	0,00	272.710.147.653,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2.	130.646.319.261,00	279.627.958.519,00	(148.981.639.258,00)	(53,28)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2.	108.877.820.261,00	279.076.088.951,00	(170.198.268.690,00)	(60,99)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2.	21.768.499.000,00	551.869.568,00	21.216.629.432,00	3.844,50
Jumlah Pendapatan Transfer-LO		1.254.302.177.171,00	1.394.672.099.694,00	(140.369.922.523,00)	(10,06)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3.	53.498.508.484,48	82.846.964.445,11	(29.348.455.960,63)	(35,42)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1.	53.498.508.484,48	61.710.783.741,11	(8.212.275.256,63)	(13,31)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2.	0,00	21.136.180.704,00	(21.136.180.704,00)	(100,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		53.498.508.484,48	82.846.964.445,11	(29.348.455.960,63)	(35,42)
JUMLAH PENDAPATAN		3.603.767.077.397,83	3.185.248.129.809,74	418.518.947.588,09	13,13
BEBAN	5.4.2.	3.094.549.878.679,47	2.578.324.616.874,33	516.225.259.805,14	20,03
BEBAN OPERASI	5.4.2.1.	2.744.317.340.355,47	2.362.089.236.871,33	382.228.103.484,14	16,18
Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	1.212.732.099.580,78	1.001.514.592.822,56	211.217.506.758,22	21,09
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2.	965.949.773.281,45	950.912.423.760,62	15.037.349.520,83	1,58
Beban Subsidi	5.4.2.1.3.	0,00	78.000.000,00	(78.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah	5.4.2.1.4.	261.270.327.505,57	200.493.397.769,85	60.776.929.735,72	30,31
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5.	7.432.402.728,00	7.820.868.829,00	(388.466.101,00)	(4,97)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6.	29.342.109.835,97	23.112.216.192,15	6.229.893.643,82	26,95
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7.	267.590.627.423,70	178.157.737.497,15	89.432.889.926,55	50,20
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2.	350.232.536.324,00	216.235.380.003,00	133.997.156.321,00	61,97
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1.	189.174.374.204,00	111.797.414.525,00	77.376.959.679,00	69,21
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2.	161.058.162.120,00	104.437.965.478,00	56.620.196.642,00	54,21
JUMLAH BEBAN		3.094.549.878.679,47	2.578.324.616.874,33	516.225.259.805,14	20,03
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		509.217.200.718,36	606.923.512.935,41	(97.706.312.217,05)	(16,10)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL		(3.028.052.269,51)	11.854.305.074,73	(14.882.357.344,24)	(125,54)
SURPLUS NON-OPERASIONAL	5.4.3.	20.175.192.784,90	22.804.203.464,48	(2.629.010.679,58)	(11,53)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3.1.	20.175.192.784,90	22.804.203.464,48	(2.629.010.679,58)	(11,53)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3.1.1.	1.607.234.204,90	0,00	1.607.234.204,90	100,00
Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	5.4.3.1.2.	18.567.958.580,00	22.804.203.464,48	(4.236.244.884,48)	(18,58)
DEFISIT NON-OPERASIONAL	5.4.4.	23.203.245.054,41	10.949.898.389,75	12.253.346.664,66	111,90
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.4.1.	23.203.245.054,41	10.949.898.389,75	12.253.346.664,66	111,90
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.4.4.1.	23.203.245.054,41	10.949.898.389,75	12.253.346.664,66	111,90
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL		(3.028.052.269,51)	11.854.305.074,73	(14.882.357.344,24)	(125,54)

URAIAN	REF. CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		506.189.148.448,85	618.777.818.010,14	(112.588.669.561,29)	(18,20)
POS LUAR BIASA	5.4.5.	(5.843.439.081,00)	(2.335.500.000,93)	(3.507.939.080,07)	150,20
Pendapatan Luar Biasa-LO	5.4.5.	0,00	0,00	0,00	100,00
Beban Luar Biasa	5.4.5.	5.843.439.081,00	2.335.500.000,93	3.507.939.080,07	150,20
POS LUAR BIASA	5.4.5.	(5.843.439.081,00)	(2.335.500.000,93)	(3.507.939.080,07)	150,20
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.6.	500.345.709.367,85	616.442.318.009,21	(116.096.608.641,36)	(18,83)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA DENPASAR



[Handwritten Signature]

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.	719.644.168.323,06	745.887.107.946,45
Arus Masuk Kas	5.5.1.1.	3.561.860.785.514,95	3.146.979.658.599,76
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.	1.874.480.094.512,48	1.399.865.377.619,51
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.	194.129.093.014,51	156.369.987.668,83
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.	100.261.240.483,21	75.729.806.844,40
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah	5.5.1.1.	50.342.598.308,35	35.816.984.334,02
Penerimaan Dana Perimbangan	5.5.1.1.	0,00	1.077.007.016.175,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.	39.896.439.000,00	34.828.566.000,00
Penerimaan Insentif Fisikal	5.5.1.1.	21.645.986.000,00	57.126.472.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.	120.563.983.700,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.	711.632.242.557,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.	272.733.561.853,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil	5.5.1.1.	152.659.650.049,00	287.528.478.089,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.	22.168.899.000,00	1.554.307.708,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.	1.346.997.037,40	16.481.457,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.	0,00	21.136.180.704,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.561.860.785.514,95	3.146.979.658.599,76
Arus Keluar Kas	5.5.1.2.	2.842.216.617.191,89	2.401.092.550.653,31
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.	1.223.348.651.344,45	996.719.954.633,96
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.	930.635.532.570,44	937.807.065.343,50
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.	0,00	78.000.000,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.	255.155.766.733,00	205.187.176.852,85
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.	7.432.402.728,00	7.820.868.829,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.	6.874.292.006,00	2.415.538.991,00
Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.	217.815.370.690,00	111.797.414.525,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.	200.954.601.120,00	139.266.531.478,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.842.216.617.191,89	2.401.092.550.653,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		719.644.168.323,06	745.887.107.946,45
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.	(832.463.154.579,00)	(566.970.950.975,30)
Arus Masuk Kas	5.5.2.1.	917.632.345,00	407.153.798,60
Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.2.1.	917.632.345,00	407.153.798,60
Jumlah Arus Masuk Kas		917.632.345,00	407.153.798,60
Arus Keluar Kas	5.5.2.2.	833.380.786.924,00	567.378.104.773,90
Perolehan Tanah	5.5.2.2.	6.726.112.218,00	2.707.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.	185.238.091.071,00	172.301.850.123,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.	239.885.865.559,00	105.439.291.215,00
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.	332.924.809.582,00	177.787.346.159,10
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.	9.419.135.048,00	8.734.655.059,80
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.	686.773.446,00	1.088.255.217,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.	58.500.000.000,00	102.024.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		833.380.786.924,00	567.378.104.773,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(832.463.154.579,00)	(566.970.950.975,30)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.	0,00	0,00
Arus Masuk Kas	5.5.4.1.	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Jumlah Arus Masuk Kas		221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2.	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Jumlah Arus Keluar Kas		221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5.	(112.818.986.255,94)	178.916.156.971,15
Saldo Awal Kas	5.5.6.	757.551.944.206,51	578.635.787.235,36
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7.	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.8.	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
Ekuitas Awal	5.6.1.	7.685.785.523.547,76	7.037.584.652.560,82
Surplus/(Defisit) - LO	5.6.2.	500.345.709.367,85	616.442.318.009,21
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3.	(273.258.068.144,18)	31.758.552.977,73
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	(2.926.012.799,27)	(16.289.776.589,31)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.2	39.934.203.792,00	78.701.463.961,78
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.3	(264.457.918.561,57)	(30.653.134.394,74)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.4	(45.808.340.575,34)	0,00
Ekuitas Akhir	5.6.4.	7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)





bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
4. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
7. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Denpasar;
8. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana; dan
9. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Beban, Saldo Anggaran Lebih, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor





- 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);





15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 36); dan
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 67).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)
 - 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5. Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6. Inflasi
 - 2.1.7. Struktur Perekonomian Kota Denpasar
- 2.2. Kebijakan Keuangan





- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.2. Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah
 - 4.4.1. Kas dan Setara Kas
 - 4.4.2. Piutang
 - 4.4.3. Persediaan
 - 4.4.4. Aset Investasi
 - 4.4.5. Aset Tetap
 - 4.4.6. Properti Investasi
 - 4.4.7. Aset Lainnya
 - 4.4.8. Kewajiban
 - 4.4.9. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 4.4.10. Belanja dan Beban
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)
 - 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerima Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Surplus Non Operasional-LO
 - 5.4.4. Defisit Non Operasional-LO
 - 5.4.5. Pos Luar Biasa





- 5.4.6. Surplus/(Defisit)-LO
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas
 - 5.5.6. Saldo Awal Kas
 - 5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu
 - 5.5.8. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup





BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar minimal mencakup:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 1,97%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,75%.
3. Gini Ratio sebesar 0,32.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,12.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,00%.
6. Tingkat Inflasi sebesar 2,35%.
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2024 sebesar Rp65.300,21 miliar.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata (%)
1	Kota (%)	2,68	2,59	2,16	2,48
2	Kota (Ribuan Orang)	27,69	27,27	23,20	26,05
3	Provinsi (%)	4,25	4,00	3,72	3,99
4	Nasional (%)	9,36	8,57	8,25	8,73
5	Peringkat Provinsi	2	2	2	2

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali dan BPS Indonesia, 2026





Persentase penduduk miskin Kota Denpasar pada Tahun 2023 sebesar 2,68%. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,59%, serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2025 sebesar 0,43% menjadi 2,16%. Meskipun persentase penduduk miskin Kota Denpasar tahun 2025 sudah berada di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan yang mengacu juga pada program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota	0,35	0,36	0,16	0,29
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,55	0,50	0,56	0,54
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,36	1,29	1,39
4	Peringkat Provinsi	9	7	9	8

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali dan BPS Indonesia, 2026

Tabel 2. 3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kota	0,10	0,08	0,03	0,07
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,10	0,09	0,12	0,10
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	0,30	0,33
4	Peringkat Provinsi	9	7	9	8

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali dan BPS Indonesia, 2026

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota (%)	2,85	2,11	1,41	2,12
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,69	1,79	1,49	1,99
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	5,03

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS ProvBali dan BPS Indonesia, 2026

Menurut data BPS, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Denpasar dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka sebesar 2,85%, kemudian menurun menjadi 2,11% pada tahun 2024, dan menurun kembali pada tahun 2025 sebesar 0,70% menjadi 1,41%. Pada tahun 2025, TPT





Kota Denpasar lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang pada tahun 2025 sebesar 1,49% dan lebih rendah dari TPT Nasional, yaitu sebesar 4,85%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Realisasi pencapaian Gini Ratio Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 *Gini Ratio* Kota Denpasar

No	<i>Gini Ratio</i>	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Kota	0,342	0,341	0,323	0,335
2	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	0,359
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,363	0,377
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2026

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,353. Pada tahun 2025, *Gini Ratio* Kota Denpasar sebesar 0,323 dimana lebih rendah 0,018 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2024 yang sebesar 0,341 serta lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional Tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,363.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (IPM< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (IPM>80)





Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebesar 85,63 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata
1	Kota	84,68	85,11	85,63	85,14
2	Provinsi	78,01	78,63	79,37	78,67
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	75,10
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2026

Realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar tahun 2025 adalah sebesar 85,63 poin, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,52 poin dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 85,11 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar

No	Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata
1	UHH (Tahun)	75,59	75,80	76,16	75,85
2	HLS (Tahun)	14,11	14,13	14,14	14,13
3	RLS (Tahun)	11,52	11,53	11,64	11,56
4	PNB per kapita (Rp000)	20.128	20.763	21.185	20.692

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali, 2026

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kota Denpasar pada tahun 2025 mencapai tahun 76,16, dimana lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 adalah 11,64 tahun dengan harapan lama sekolah 14,14 tahun. Sementara, Standar Hidup PNB per kapita per tahun 2025 (dalam ribuan rupiah) sebesar Rp21.185 atau meningkat Rp422 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kota Denpasar pada tahun 2025 berada pada urutan pertama dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.

2.1.5. Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.





Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyard Rp)	34.066,71	36.004,30	38.001,22	40.322,83
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,69	5,55	5,82

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2025

Selama kurun waktu Tahun 2022-Tahun 2025, perekonomian Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2022-Tahun 2023, pertumbuhan perekonomian Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 0,67%, menurun sebesar 0,14% pada kurun waktu Tahun 2023-Tahun 2024, dan meningkat kembali sebesar 0,27% dalam kurun waktu Tahun 2024-Tahun 2025.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*Creeping Inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun. (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Denpasar, Tingkat Inflasi Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebesar 3,45% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 Tingkat Inflasi Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	2,54	2,69	3,45	2,89
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	2,34	2,91	2,63
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92	2,37
4	Peringkat Provinsi	2	1	1	1
5	Peringkat Nasional	57	12	-	35

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2026

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Denpasar tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 3,45%, dimana lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024 dengan nilai sebesar 2,69%. Inflasi Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang pada tahun 2025 sebesar 2,92%. Adanya peningkatan inflasi di Kota





Denpasar berimplikasi terhadap dilaksanakannya kegiatan dalam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan pasar murah;
2. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan saluran irigasi;
3. Melaksanakan pelatihan serta pemberian media tanam, bibit ternak dan bibit tani;
4. Melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, maupun sosialisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah maupun satgas pangan;
5. Melaksanakan penataan parkir terkait angkutan barang;
6. Melaksanakan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; dan
7. Melaksanakan bazar pangan.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kota Denpasar

Struktur perekonomian Kota Denpasar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949,63	3.778,61	3.837,46
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	3.875,73	4.206,28	4.487,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	347,66	409,06	430,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	136,50	134,26	144,64
6	Konstruksi	6.689,59	6.820,64	7.409,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.041,48	6.453,32	7.107,08
8	Transportasi dan Pergudangan	1.773,63	1.918,71	2.083,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328,51	16.682,51	18.728,53
10	Informasi dan Komunikasi	2.844,64	2.975,12	3.105,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210,39	5.023,71	5.257,47
12	<i>Real Estate</i>	2.457,09	2.496,71	2.685,20
13	Jasa Perusahaan	1.225,42	1.345,52	1.506,74
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.997,35	3.254,19	3.626,83
15	Jasa Pendidikan	6.587,51	6.992,71	7.617,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636,17	1.700,83	1.848,93
17	Jasa Lainnya	999,00	1.108,03	1.223,51
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	60.100,30	65.300,21	71.099,12
19	PDRB Provinsi	274.358,18	298.441,51	324.148,94

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2026





2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan dengan mengacu pada arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas” dengan agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2025 mencakup: (1) Pendidikan dan Kesehatan; (2) Sosial dan Ketenagakerjaan; (3) Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Kebudayaan; (4) Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan; (5) Reformasi Birokrasi. Arah kebijakan keuangan daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berimplikasi pada adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah yang disertai dengan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Kondisi permasalahan yang ada bersifat dinamis,





sehingga tidak jarang diperlukan adanya penyesuaian dalam menanggulangi setiap permasalahan yang ada.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar melakukan delapan kali pergeseran anggaran. Hal ini dilaksanakan seiring dalam menanggulangi beberapa permasalahan, termasuk penanggulangan dampak inflasi. Berikut ini disajikan pergeseran dan perubahan anggaran Kota Denpasar TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 11 APBD Tahun 2025

(dalam rupiah)

Tanggal	Peraturan Walikota	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	Keterangan
17 Desember 2024	Perwali Nomor 50 Tahun 2024	3.107.718.714.567,00	3.590.924.704.365,00	483.205.989.798,00	Perwali Induk
17 Februari 2025	Perwali Nomor 4 Tahun 2025	3.107.809.914.567,00	3.591.015.904.365,00	483.205.989.798,00	Pergeseran I
17 Maret 2025	Perwali Nomor 13 Tahun 2025	3.107.809.914.567,00	3.591.015.904.365,00	483.205.989.798,00	Pergeseran II
25 Maret 2025	Perwali Nomor 16 Tahun 2025	3.107.809.914.567,00	3.591.015.904.365,00	483.205.989.798,00	Pergeseran III
11 April 2025	Perwali Nomor 17 Tahun 2025	3.107.809.914.567,00	3.591.015.904.365,00	483.205.989.798,00	Pergeseran IV
26 Agustus 2025	Perwali Nomor 31 Tahun 2025	3.386.937.195.263,00	4.085.989.139.469,00	699.051.944.206,00	Perwali Perubahan (Pergeseran V)
24 September 2025	Perwali Nomor 37 Tahun 2025	3.386.937.195.263,00	4.085.989.139.469,00	699.051.944.206,00	Pergeseran VI
8 Desember 2025	Perwali Nomor 56 Tahun 2025	3.389.044.199.263,00	4.088.096.143.469,00	699.051.944.206,00	Pergeseran VII
17 Desember 2025	Perwali Nomor 62 Tahun 2025	3.389.044.199.263,00	4.088.096.143.469,00	699.051.944.206,00	Pergeseran VIII

Dalam penyusunan APBD, kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2025 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

2.2.1.1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun 2025 diasumsikan mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2024. PAD diproyeksikan mengalami peningkatan dengan berbagai asumsi yang mencakup Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,00%, trend penerimaan PAD dalam tiga tahun selama rentang 2021, 2022, dan 2023 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 9,24%, dan asumsi pemulihan ekonomi pada tahun 2025. Sedangkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga diasumsikan mengalami peningkatan.

2.2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek





dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah dianggarkan atas penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat berupa hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transfer Pemerintah Pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa (DD).

Transfer Antar Daerah terdiri dari Transfer antar Daerah - Pendapatan bagi hasil dan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bantuan Keuangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi TA 2025. Sedangkan Pendapatan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer yang dapat berupa Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan alokasi belanja RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025, yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”, Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar;
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Denpasar; dan
6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2025 diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dengan masih terjadinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang belum juga mereda serta pengenaan sanksi terhadap Rusia yang menyebabkan gangguan pasokan energi





dan pangan global serta gangguan mata rantai pasokan global, yang mengakibatkan tingginya harga-harga komoditas, harga energi maupun harga pangan global, karena kurangnya pasokan menimbulkan risiko perlambatan ekonomi global dan karena kenaikan harga menimbulkan risiko terjadinya kenaikan inflasi di berbagai belahan dunia. Selain dari kondisi ekonomi global yang belum menentu, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan memberikan dampak yang cukup besar pada aktivitas konsumsi masyarakat. Hal ini disebabkan besarnya kontribusi dan suntikan dana pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara sekaligus, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

Seperti halnya tahun 2024, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Denpasar untuk Tahun 2025 tetap menitikberatkan pada sektor Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Pariwisata, Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi. Selain hal tersebut, untuk menjamin sinergitas arah pembangunan yang berkelanjutan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 dan juga kebijakan ekonomi nasional Tahun 2025.

Pelaksanaan upaya tersebut membutuhkan arah dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar melihat beberapa indikator ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Data APBD untuk tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Data APBD untuk Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	APBD TA 2024	APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4	Pendapatan Daerah	2.838.618.791.166,00	3.389.044.199.263,00	550.425.408.097,00	19,39
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.331.387.264.594,00	2.018.795.135.284,00	687.407.870.690,00	51,63
4.2	Pendapatan Transfer	1.484.171.690.572,00	1.368.783.619.229,00	(115.388.071.343,00)	(7,77)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	23.059.836.000,00	1.465.444.750,00	(21.594.391.250,00)	(93,65)
	Jumlah Pendapatan	2.838.618.791.166,00	3.389.044.199.263,00	550.425.408.097,00	19,39
5	Belanja Daerah	3.315.230.578.401,00	4.088.096.143.469,00	772.865.565.068,00	23,31
5.1	Belanja Operasi	2.484.555.899.484,00	2.665.176.658.404,00	180.620.758.920,00	7,27
5.2	Belanja Modal	551.464.104.068,00	989.281.447.076,00	437.817.343.008,00	79,39
5.3	Belanja Tidak Terduga	28.146.628.846,00	14.688.066.179,00	(13.458.562.667,00)	(47,82)
5.4	Transfer	251.063.946.003,00	418.949.971.810,00	167.886.025.807,00	66,87
	Jumlah Belanja	3.315.230.578.401,00	4.088.096.143.469,00	772.865.565.068,00	23,31
	Surplus/(Defisit)	(476.611.787.235,00)	(699.051.944.206,00)	(222.440.156.971,00)	46,67





No	Uraian	APBD TA 2024	APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	%
6	Pembiayaan Daerah	476.611.787.235,00	699.051.944.206,00	222.440.156.971,00	46,67
6.1	Penerimaan Pembiayaan	578.635.787.235,00	757.551.944.206,00	178.916.156.971,00	30,92
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	102.024.000.000,00	58.500.000.000,00	(43.524.000.000,00)	(42,66)
	Pembiayaan Netto	476.611.787.235,00	699.051.944.206,00	222.440.156.971,00	46,67

2.3.2. Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada lampiran Bagian 5 Hal Khusus Lainnya, Kebijakan Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:

2.3.2.1. Rekapitulasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*)

2.3.2.2.1. Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen). Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja Pendidikan pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp954.516.753.943,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp4.088.096.143.469,00 atau sebesar 23,35% serta realisasi mencapai Rp919.191.154.514,50 dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp3.617.097.404.115,89 atau 25,41%. Rincian Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam *Lampiran 1 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Anggaran fungsi pendidikan Kota Denpasar dialokasi untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan peningkatan prestasi olahraga. Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Rata-rata lama sekolah ditargetkan 11,78% dapat direalisasikan 11,64%;





2. Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,13% dapat direalisasikan 14,14%;
3. Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif ditargetkan 100% direalisasikan 100%; dan
4. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Event Olahraga ditargetkan 240 medali dapat direalisasikan 367 medali.

Adapun kendala/ tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Masih adanya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/ sederajat);
2. Kondisi sosial ekonomi keluarga, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, masih menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah;
3. Dinamika kependudukan akibat urbanisasi dan mobilitas penduduk berpotensi memengaruhi pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi kelompok penduduk pendatang dan masyarakat rentan;
4. Kecenderungan sebagian remaja untuk memasuki dunia kerja lebih awal, yang dapat berdampak pada keberlanjutan partisipasi sekolah; dan
5. Keterbatasan dan ketimpangan sarana dan prasarana olahraga pada beberapa cabang olahraga masih menjadi tantangan dalam mendukung pembinaan atlet secara optimal;

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain:

1. Meningkatkan akses dan sosialisasi program pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C setara SMA, bagi masyarakat dewasa dan pekerja;
2. Memperkuat program pencegahan putus sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan dan pendampingan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu;
3. Memperbaiki pendataan penduduk, termasuk penduduk pendatang, agar intervensi program pendidikan lebih tepat sasaran;
4. Meningkatkan peran desa/ kelurahan dan tokoh masyarakat dalam mendorong kesadaran pentingnya pendidikan dasar dan menengah;
5. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penajaman program bantuan pendidikan yang tepat sasaran, serta penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat; dan
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana olahraga, penguatan sistem pembinaan atlet berbasis sport science, serta peningkatan kompetensi pelatih dan tenaga pendukung.

2.3.2.2.2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/ atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/ atau desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.





Belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD TA berkenaan Perhitungan persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).

Perhitungan alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp1.832.989.220.309,00 dari nilai belanja daerah di luar belanja transfer sebesar Rp3.198.327.432.305,89 atau sebesar 47,25%. Rincian Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam *Lampiran 1a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Belanja infrastruktur pelayanan publik di Kota Denpasar dialokasikan sebagai pendukung capaian sasaran peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas penataan ruang, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang didukung fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai dan peningkatan tertib administrasi pertanahan. Adapun capaian tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Kualitas Infrastruktur ditargetkan 64,96% direalisasikan sebesar 83,65%;
2. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW ditargetkan 97,00% direalisasikan 97,91%;
3. Persentase berkurangnya permukiman yang tidak layak huni yang ditargetkan 94,53% direalisasikan 94,529%;
4. Persentase penurunan luas lingkungan permukiman kumuh ditargetkan 0,018% direalisasikan 0,039%; dan
5. Persentase PSU Perumahan yang terfasilitasi ditargetkan 100% direalisasikan 98,55%.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Permasalahan-permasalahan teknis terkait dengan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Masih memerlukan langkah-langkah koordinasi, edukasi dan persuasif kepada masyarakat/stakeholder dalam upaya memperlancar pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan;
3. Adanya potensi kegagalan penyelesaian pekerjaan terutama untuk pemenang lelang khususnya untuk penawaran dibawah 80%;
4. Kawasan kumuh yang ada di Kota Denpasar tidak hanya yang terletak di lahan milik pemerintah akan tetapi terdapat juga di lahan yang merupakan milik privat/pribadi; dan
5. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah daerahnya menjadi kawasan kumuh.

Adapun solusi yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memformulasikan pemecahan masalah dan melakukan kajian peraturan dan perundangan dalam upaya menindaklanjuti permasalahan.





2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas, efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas SDM aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas koordinasi, mediasi dan persuasi kepada masyarakat/ stakeholder serta instansi terkait.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
6. Meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemilihan penyedia barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Denpasar;
7. Melakukan perbaikan fisik di lahan kawasan kumuh yang ada juga dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif dan masif melalui sosialisasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ke daerah-daerah yang menjadi lokasi kawasan kumuh;
8. Mengaktifkan Aplikasi SIAP SELEM (Sistem Informasi Penataan Palemahan Berbasis Semeton Lembaga Adat) yang telah dioperasikan di Lurah/Desa di Kota Denpasar; dan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daerah-daerah yang disinyalir berpotensi untuk menjadi kawasan kumuh.

2.3.2.2.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Perhitungan alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp1.168.805.655.198,00 dari nilai belanja daerah di luar belanja transfer sebesar Rp4.088.096.143.469,00 atau sebesar 28,59% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 13 Perhitungan Belanja Pegawai Pada APBD TA 2025

Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	1.293.369.357.988,00	1.223.348.651.344,45
Belanja TPG PNSD	56.222.193.462,00	60.515.208.300,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	198.257.500,00	131.500.000,00
Belanja TPG PPPK	65.704.758.878,00	60.108.333.000,00
Belanja Tamsil Guru PPPK	2.438.492.950,00	1.565.500.000,00
Total Belanja Pegawai diluar TPG, Tamsil	1.168.805.655.198,00	1.101.028.110.044,45
Total Belanja Daerah	4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89
Persentase terhadap Belanja Daerah	28,59%	30,44%





2.3.2.2.4. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Pemerintah Kota Denpasar telah mengalokasikan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya yang terdiri dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah daerah dan badan usaha. Hasil penerimaan PAT paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. Serta Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak rokok.

Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dari PKB dianggarkan sebesar Rp237.500.000.000,00 serta dialokasikan sebesar Rp183.604.691.160,00 atau 77,31%. Realisasi penerimaan PKB sebesar Rp251.300.400.900,00 dengan alokasi realisasi Rp171.176.561.191,00 atau sebesar 68,12%. Untuk penyediaan penerangan jalan umum dari PBJT Tenaga Listrik dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 serta dialokasikan sebesar Rp136.869.750.000,00 atau 54,75%. Realisasi yang dicapai untuk penerimaan PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp257.035.821.724,00 dengan alokasi sebesar Rp130.973.805.433,00 atau 50,96%. Selanjutnya, dalam mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah dari anggaran penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan alokasi sebesar Rp13.970.380.000,00 atau 174,63%. Realisasi yang dicapai untuk Pajak Air Tanah sebesar Rp8.806.491.718,00 dengan alokasi sebesar Rp12.940.028.000,00, atau 146,94%. Serta dalam mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum dari pajak rokok yang dianggarkan sebesar Rp35.874.106.084,00 dialokasikan sebesar Rp35.025.764.304,00 atau 97,64%. Realisasi pajak rokok sebesar Rp34.732.820.333,00 dengan alokasi sebesar Rp29.014.855.703,92 atau 83,54%. Perhitungan alokasi belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam *Lampiran 1b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.





2.3.2.2.5. Kebijakan Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, pemerintah daerah dalam APBD TA 2025 wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai dengan memedomani antara lain:

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. SPM bidang pendidikan dianggarkan sebesar Rp131.209.628.476,00 dengan realisasi sebesar Rp120.440.288.538,00;
- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. SPM bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp4.935.125.402,00 dengan realisasi sebesar Rp4.294.087.010,00;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dianggarkan sebesar Rp8.959.119.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.850.534.000,00;
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dianggarkan sebesar Rp918.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp574.114.007,00;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat:
 - 1). Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2). Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3). Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.





SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum dianggarkan sebesar Rp4.432.175.400,00 dan realisasi sebesar Rp3.346.886.945,00.

- f. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM bidang sosial dialokasikan sebesar Rp154.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp142.129.600,00. Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam *Lampiran 1c Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

2. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Perhitungan alokasi anggaran penanganan kemiskinan dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp147.216.013.298,10. Belanja Optimalisasi Pelaksanaan pengetasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam *Lampiran 1d Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Angka kemiskinan di Kota Denpasar ditargetkan 1,97% namun realisasi 2,16%. Adapun Analisis Ketidaktercapaian sesuai target yang ditetapkan yakni sebagai berikut :

- a. Masih tingginya fungsi sosial yang terganggu di masyarakat serta belum optimalnya akurasi data kesejahteraan sosial;
- b. Bantuan belum optimal bagi luasan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang tinggi; dan
- c. Masih belum optimalnya pelatihan dan pengembangan usaha bagi kelompok kurang mampu dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Adapun Hambatannya dalam menanggulangi kemiskinan adalah kesulitan dalam pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial karena mobilitas penduduk yang tinggi. Adapun Solusi yang diberikan untuk mengurangi kemiskinan yakni sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN);
- b. Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi keluarga tidak mampu serta pembentukan usaha bersama stake holder lintas sektor dalam menangani hal tersebut.

3. Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara





Pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Perhitungan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp17.615.212.500,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp4.088.096.143.469,00 atau sebesar 0,43%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 14 Perhitungan Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pada APBD TA 2025

Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM	15.188.320.500,00	14.625.843.495,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat	2.426.892.000,00	2.074.481.015,00
Total Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan	17.615.212.500,00	16.700.324.510,00
Total Belanja Daerah	4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89
Persentase terhadap Belanja Daerah	0,43%	0,46%

Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Kota Denpasar bertujuan untuk mencapai sasaran terwujudnya ASN di Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Intensitas pelaksanaan pengembangan kompetensi pada Tahun 2025 tergolong tinggi, bahkan pada beberapa indikator melampaui target secara signifikan. Namun, capaian pada aspek tertentu seperti pengembangan karier dan dimensi kualifikasi belum sepenuhnya optimal, yang menunjukkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada kuantitas pelatihan, tetapi juga pada kualitas, relevansi, dan dampak pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengembangan kompetensi tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada peningkatan relevansi materi, kesesuaian dengan kebutuhan jabatan, serta evaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja ASN. Pendekatan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan dan manajemen talenta akan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

4. Alokasi Anggaran *Stunting*

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diantaranya penurunan *stunting*.

Adapun alokasi anggaran dan realisasi belanja penurunan *stunting* dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp219.561.160.954,05 dengan realisasi sebesar Rp204.492.248.527,73. Laporan tematik pencegahan dan percepatan





penurunan stunting disajikan dalam *Lampiran 1e Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Alokasi anggaran penanganan stunting di Kota Denpasar bertujuan untuk pencapaian sasaran peningkatan keluarga berkualitas dengan indikator kinerja indeks pembangunan keluarga (iBangga). iBangga Kota Denpasar tahun 2025 ditargetkan sebesar 67,95 dengan realisasi sebesar 81,10 yang berarti kualitas keluarga berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan masuk dalam kategori tangguh.

5. Fungsi Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kota Denpasar memiliki anggaran belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah.

Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi pengawasan dalam APBD TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp13.655.833.220,00 diluar gaji dan tunjangan ASN dari nilai belanja daerah sebesar Rp4.088.096.143.469,00 atau sebesar 0,33%. Adapun rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 15 Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan Pada APBD TA 2025

No	Uraian	Jumlah APBD TA 2025	Realisasi TA 2025
1	Total Belanja Daerah	4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89
2	Total Belanja Inspektorat	36.758.727.152,00	32.651.711.879,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.102.893.932,00	22.014.288.110,00
4	Total Belanja Pengawasan diluar Gaji ASN	13.655.833.220,00	10.637.423.769,00
	Rasio Terhadap Belanja	0,33%	0,29%

Alokasi fungsi pengawasan di Kota Denpasar digunakan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan target dan capaian indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

- Predikat SAKIP ditargetkan 73,35% dapat dicapai 76,98%;
- Opini BPK TA 2025 ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan capaian opini BPK TA 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian;
- Level Kapabilitas APIP ditargetkan Level 3 dengan capaian Level 2;
- Level Maturitas SPIP ditargetkan Level 3 dengan capaian Level 3; dan
- Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didampingi atau mendapatkan pendampingan sebesar 80% dengan capaian 100%.

Dalam pemenuhan capain ini tentunya ditemui kendala. Kendala tersebut yang dihadapi antara lain:

- Penilaian Predikat SAKIP dinilai berdasarkan beberapa komponen penilaian kinerja dari seluruh kluster SKPD baik kluster utama, pendukung, dan tambahan yang masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria penilaian;





- b. Masih perlunya waktu yang cukup lama dalam proses penyampaian permintaan data kepada obrik maupun proses penyiapan data oleh obrik untuk disampaikan kepada BPK selaku pengawas eksternal;
- c. Penerapan model penilaian baru yang diterapkan pada akhir tahun anggaran sehingga memerlukan waktu lebih untuk menganalisa setiap elemen dan indikator terbaru. Pemenuhan data dukung yang terbilang kompleks dan sulit diterapkan dengan sisa batas waktu pemenuhan yang minim karena penerapan metode penilaian baru mulai diberlakukan pada akhir periode tahun berjalan. Selain itu masih belum optimalnya dalam melakukan kinerja dikarenakan kurang optimalnya pengembangan SDM APIP serta jumlah SDM APIP yang masih kurang; dan
- d. Management waktu dalam pemenuhan data dikarenakan padatnya timeline program kerja pengawasan yang dilakukan selama setahun yang menjadi evaluasi pada tahun sebelumnya.

Adapun Solusi yang dilakukan antara lain:

- a. Kedepannya diharapkan agar seluruh satuan kerja perangkat daerah tentunya dapat memperbaiki kinerja melalui evaluasi secara menyeluruh di setiap sub bidang komponen penilaian serta dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja sebelumnya sehingga dapat menopang kualitas kinerja pemda untuk kedepannya agar menjadi lebih baik.
- b. Kerja sama pimpinan dan APIP dalam melakukan sinergi antar SKPD, bukan hanya staf namun pimpinan pun juga turun tangan membantu proses permintaan data sehingga penyampaian data dukung dapat dilakukan secara tepat dan efisien;
- c. Koordinasi yang lebih intens serta melakukan bimbingan kepada instansi Pembina, yaitu BPKP Perwakilan terkait pemenuhan indikator penilaian baik pada Penilaian Maturitas SPIP maupun Penilaian Kapabilitas APIP. Kemudian melakukan evaluasi serta pencermatan kembali terhadap proyeksi kebutuhan SDM serta menyusun kegiatan pengembangan kompetensi APIP melalui serangkaian Diklat dan Bimtek Pengawasan; dan
- d. Melakukan koordinasi dan pendekatan dengan SKPD secara lebih terstruktur terhadap penetapan target pemenuhan dokumen yang akan dilakukan kedepannya.

6. Pengendalian Inflasi

Perhitungan alokasi anggaran Penanganan Dampak Inflasi dalam APBD Induk TA 2025 Kota Denpasar dialokasikan sebesar Rp318.410.670.360,00 antara lain digunakan untuk ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Rincian disajikan dalam tabel berikut:





Tabel 2. 16 Alokasi Penanganan Inflasi Pada APBD TA 2025

No	SKPD/Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Sub Kegiatan	Persentase (%)
1	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	1.003.200.000,00	965.281.155,00	96,22
A	K1 - Ketersediaan Pasokan	1.003.200.000,00	965.281.155,00	96,22
	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.003.200.000,00	965.281.155,00	96,22
2	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	233.289.500,00	175.217.172,00	75,11
A	K1 - Ketersediaan Pasokan	209.939.000,00	152.771.540,00	72,77
	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	209.939.000,00	152.771.540,00	72,77
B	K2 - Keterjangkauan Harga	3.691.000,00	3.659.220,00	99,14
	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.691.000,00	3.659.220,00	99,14
C	K3 - Kelancaran Distribusi	4.700.000,00	4.026.322,00	85,67
	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.700.000,00	4.026.322,00	85,67
D	K4 - Komunikasi Efektif	14.959.500,00	14.760.090,00	98,67
	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.803.000,00	3.765.780,00	99,02
	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.156.500,00	10.994.310,00	98,55
3	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	285.767.220.760,00	268.371.780.111,00	93,91
A	K2 - Keterjangkauan Harga	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
B	K3 - Kelancaran Distribusi	276.043.155.980,00	259.358.453.481,00	93,96
	1.03.10.2.01.0031 - Penggantian Jembatan	3.599.136.000,00	3.445.371.401,00	95,73
	1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan	49.286.375.860,00	45.186.018.069,00	91,68
	1.03.10.2.01.0033 - Rekonstruksi Jalan	84.662.351.400,00	80.851.613.569,00	95,50
	1.03.10.2.01.0034 - Pemeliharaan Berkala Jalan	3.119.825.000,00	2.975.818.000,00	95,38
	1.03.10.2.01.0044 - Rehabilitasi Jalan	128.732.279.300,00	120.873.697.998,00	93,90
	1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan	6.643.188.420,00	6.025.934.444,00	90,71
4	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.100.264.200,00	1.031.681.414,00	93,77
A	K2 - Keterjangkauan Harga	1.049.082.950,00	984.283.853,00	93,82





No	SKPD/Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Sub Kegiatan	Persentase (%)
	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.450,00	91.466.866,00	91,47
	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	218.474.000,00	197.494.337,00	90,40
	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.249.500,00	34.179.500,00	96,96
	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	375.132.000,00	359.963.700,00	95,96
	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.576.000,00	91.941.400,00	89,63
	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	217.651.000,00	209.238.050,00	96,13
B	K4 - Komunikasi Efektif	51.181.250,00	47.397.561,00	92,61
	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	14.419.000,00	14.077.050,00	97,63
	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	16.456.500,00	16.147.050,00	98,12
	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	20.305.750,00	17.173.461,00	84,57
5	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA	64.700.000,00	64.100.000,00	99,07
A	K2 - Keterjangkauan Harga	64.700.000,00	64.100.000,00	99,07
	3.26.04.2.02.0011 - Fasilitas pemberian insentif	64.700.000,00	64.100.000,00	99,07
6	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN	7.489.570.600,00	7.054.938.242,00	94,20
A	K2 - Keterjangkauan Harga	2.703.182.000,00	2.458.831.837,00	90,96
	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	379.839.000,00	293.082.665,00	77,16
	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	798.364.500,00	743.486.048,00	93,13
	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	703.595.000,00	674.024.151,00	95,80
	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	265.169.000,00	222.382.259,00	83,86





No	SKPD/Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Sub Kegiatan	Persentase (%)
	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	402.014.000,00	375.023.892,00	93,29
	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63.000.500,00	62.482.822,00	99,18
	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	91.200.000,00	88.350.000,00	96,88
B	K3 - Kelancaran Distribusi	4.786.388.600,00	4.596.106.405,00	96,02
	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.786.388.600,00	4.596.106.405,00	96,02
7	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	22.688.137.300,00	17.772.597.911,00	78,33
A	K3 - Kelancaran Distribusi	22.688.137.300,00	17.772.597.911,00	78,33
	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.220.000.000,00	9.534.918.498,00	78,03
	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.188.951.300,00	7.311.264.214,00	89,28
	2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.188.134.000,00	851.993.199,00	38,94
	2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	91.052.000,00	74.422.000,00	81,74
8	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	37.958.000,00	33.056.900,00	87,09
A	K3 - Kelancaran Distribusi	37.958.000,00	33.056.900,00	87,09
	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	37.958.000,00	33.056.900,00	87,09
9	4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN PEREKONOMIAN	26.330.000,00	14.654.120,00	55,66
A	K4 - Komunikasi Efektif	26.330.000,00	14.654.120,00	55,66
	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.330.000,00	14.654.120,00	55,66
TOTAL		318.410.670.360,00	295.483.307.025,00	92,80

7. Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA





Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Induk TA 2025 Kota Denpasar sama dengan Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Pergeseran VIII TA 2025 Kota Denpasar, yaitu dialokasikan sebesar Rp83.478.384.000,00. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 17 Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2025

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD TA 2025	Anggaran pada Pergeseran VIII APBD TA 2025
1	Total Pajak Daerah	1.586.500.000.000,00	1.710.000.000.000,00
2	Total Retribusi Daerah	152.739.795.300,00	170.848.224.286,00
3	Total Retribusi Pelayanan Kesehatan	140.098.300.000,00	156.052.559.804,00
4	Total Retribusi Daerah Diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.641.495.300,00	14.795.664.482,00
5	Total Dana Alokasi Umum	711.709.633.000,00	711.678.225.784,00
6	Total Dana Bagi Hasil	123.614.735.000,00	129.886.054.000,00
7	Total DBH-CHT	540.528.000,00	572.261.000,00
8	Alokasi BHP 2025 (10% x Total Pajak Daerah)	158.650.000.000,00	171.000.000.000,00
9	Alokasi BHR 2025 (10% x Total Retribusi Daerah Diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan)	1.264.149.530,00	1.479.566.448,00
10	Alokasi ADD (10% x (DAU+DBH-DBH CHT))	83.478.384.000,00	83.478.384.000,00

Terdapat perubahan nilai anggaran dari APBD Induk TA 2025 ke APBD Pergeseran VIII TA 2025. Perubahan ini terjadi pada penurunan anggaran DAU sebesar Rp31.407.216,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023. Demikian halnya dengan DBH yang mengalami peningkatan sebesar Rp6.271.319.000,00, yang didalamnya mencakup peningkatan DBH-CHT sebesar Rp31.733.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Walaupun terdapat perubahan dalam anggaran DAU, DBH, dan DBH-CHT yang menjadi komponen dalam perhitungan ADD, Alokasi ADD dalam Pergeseran VIII APBD TA 2025 tetap sebesar ditetapkan dalam Induk APBD TA 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada poin 3.4.2.2 tentang Belanja Bantuan Keuangan Huruf i yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD dengan ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2025 yang dianggarkan





tersebut direalisasikan pada dua puluh tujuh desa di Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 18 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2025

No	Nama Desa	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dangin Puri Kaja	2.929.155.439	2.929.155.439	100,00
2	Dangin Puri Kangin	2.757.408.218	2.757.408.218	100,00
3	Dangin Puri Kauh	2.548.987.930	2.548.987.930	100,00
4	Dangin Puri Kelod	2.897.971.515	2.897.971.515	100,00
5	Dauh Puri Kaja	2.773.572.705	2.773.572.705	100,00
6	Dauh Puri Kangin	2.159.292.152	2.159.292.152	100,00
7	Dauh Puri Kauh	2.640.016.355	2.640.016.355	100,00
8	Dauh Puri Kelod	2.836.188.391	2.836.188.391	100,00
9	Kesiman Kertalangu	3.295.951.778	3.295.951.778	100,00
10	Kesiman Petilan	3.012.514.230	3.012.514.230	100,00
11	Padang Sambian Kaja	3.103.481.666	3.103.481.666	100,00
12	Padangsambian Kelod	3.429.385.358	3.429.385.358	100,00
13	Peguyangan Kaja	3.250.032.510	3.250.032.510	100,00
14	Peguyangan Kangin	3.645.249.110	3.645.249.110	100,00
15	Pemecutan Kaja	5.352.448.362	5.352.448.362	100,00
16	Pemecutan Kelod	3.957.617.537	3.957.617.537	100,00
17	Pemogan	4.357.738.216	4.357.738.216	100,00
18	Penatih Dangin Puri	3.024.982.104	3.024.982.104	100,00
19	Sanur Kaja	2.447.213.220	2.447.213.220	100,00
20	Sanur Kauh	2.820.263.648	2.820.263.648	100,00
21	Sidakarya	3.058.925.699	3.058.925.699	100,00
22	Sumerta Kaja	2.718.315.627	2.718.315.627	100,00
23	Sumerta Kauh	2.297.451.755	2.297.451.755	100,00
24	Sumerta Kelod	2.839.816.999	2.839.816.999	100,00
25	Tegal Harum	2.543.860.891	2.543.860.891	100,00
26	Tegal Kertha	3.194.804.046	3.194.804.046	100,00
27	Ubung Kaja	3.585.738.539	3.585.738.539	100,00
Jumlah		83.478.384.000,00	83.478.384.000,00	100,00

Fasilitasi dan sinkronisasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:

- a. Pengalokasian ADD untuk:
 - 1). Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2). Biaya Operasional Pemerintahan Desa;
 - 3). Tunjangan dan Jaminan Sosial;
 - 4). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5). Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. Pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai prioritas nasional.





BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan pengukuran kinerja keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1.1. Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan setelah perubahan, yaitu sebesar Rp3.389.044.199.263,00 terealisasi sebesar Rp3.562.778.417.859,95 atau 105,13%. Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp470.998.739.353,11, yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.088.096.143.469,00 terealisasi sebesar Rp3.617.097.404.115,89 atau 88,48%. Akibat dari jumlah realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, maka pada tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar mengalami defisit sebesar Rp(54.318.986.255,94).

Sementara realisasi pembiayaan neto TA 2025 adalah sebesar Rp699.051.944.206,51 atau 100,00% dari anggaran sebesar 699.051.944.206,00. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2025 sebesar Rp644.732.957.950,57. Saldo SILPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

3.1.2. Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025

Untuk TA 2025, Pemerintah Kota Denpasar tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan.

3.1.3. Ikhtisar Dana Desa di Kota Denpasar Tahun 2025

Dana Desa di Kota Denpasar TA 2025 dikelola oleh 27 desa dengan realisasinya sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2025

No.	Nama Desa	Pagu	Dana Desa Diterima di Kas Desa				Total
			Non Earmark		Earmark		
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	
1	Dangin Puri Kaja	1.456.260.000,00	21.765.000,00	14.510.000,00	851.991.000,00	567.994.000,00	1.456.260.000,00
2	Dangin Puri Kangin	1.107.064.000,00	0,00	0,00	664.238.400,00	442.825.600,00	1.107.064.000,00
3	Dangin Puri Kauh	1.204.801.000,00	115.887.000,00	77.258.000,00	606.993.600,00	404.662.400,00	1.204.801.000,00
4	Dangin Puri Kelod	1.379.271.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	803.562.600,00	535.708.400,00	1.379.271.000,00
5	Dauh Puri Kaja	1.907.880.000,00	0,00	0,00	1.144.728.000,00	763.152.000,00	1.907.880.000,00
6	Dauh Puri Kangin	887.567.000,00	17.100.000,00	11.400.000,00	515.440.200,00	343.626.800,00	887.567.000,00





No.	Nama Desa	Pagu	Dana Desa Diterima di Kas Desa				Total
			Non Earmark		Earmark		
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	
7	Dauh Puri Kauh	1.475.874.000,00	4.930.080,00	3.286.720,00	880.594.320,00	587.062.880,00	1.475.874.000,00
8	Dauh Puri Kelod	1.309.638.000,00	0,00	0,00	785.782.800,00	523.855.200,00	1.309.638.000,00
9	Kesiman Kertalangu	1.612.944.000,00	57.605.400,00	38.403.600,00	910.161.000,00	606.774.000,00	1.612.944.000,00
10	Kesiman Petilan	1.278.858.000,00	89.817.000,00	59.878.000,00	677.497.800,00	451.665.200,00	1.278.858.000,00
11	Padang Sambian Kaja	1.514.805.000,00	59.268.900,00	39.512.600,00	849.614.100,00	566.409.400,00	1.514.805.000,00
12	Padangsambian Kelod	1.541.325.000,00	9.723.240,00	6.482.160,00	915.071.760,00	610.047.840,00	1.541.325.000,00
13	Peguyangan Kaja	1.103.290.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	643.974.000,00	429.316.000,00	1.103.290.000,00
14	Peguyangan Kangin	1.930.443.000,00	26.187.000,00	17.458.000,00	1.132.078.800,00	754.719.200,00	1.930.443.000,00
15	Pemecutan Kaja	2.003.694.000,00	41.662.200,00	27.774.800,00	1.160.554.200,00	773.702.800,00	2.003.694.000,00
16	Pemecutan Kelod	2.402.514.000,00	36.302.580,00	24.201.720,00	1.405.205.820,00	936.803.880,00	2.402.514.000,00
17	Pemogan	2.036.574.000,00	448.033.500,00	298.689.000,00	773.910.900,00	515.940.600,00	2.036.574.000,00
18	Penatih Dangin Puri	1.077.193.000,00	339.801.600,00	226.534.400,00	306.514.200,00	204.342.800,00	1.077.193.000,00
19	Sanur Kaja	1.077.829.000,00	12.750.600,00	8.500.400,00	633.946.800,00	422.631.200,00	1.077.829.000,00
20	Sanur Kauh	1.504.710.000,00	202.032.000,00	134.688.000,00	700.794.000,00	467.196.000,00	1.504.710.000,00
21	Sidakarya	1.745.709.000,00	33.372.600,00	22.248.400,00	1.014.052.800,00	676.035.200,00	1.745.709.000,00
22	Sumerta Kaja	1.096.213.000,00	41.280.900,00	27.520.600,00	616.446.900,00	410.964.600,00	1.096.213.000,00
23	Sumerta Kauh	1.319.194.000,00	188.640.000,00	125.760.000,00	602.876.400,00	401.917.600,00	1.319.194.000,00
24	Sumerta Kelod	1.355.085.000,00	121.504.200,00	81.002.800,00	691.546.800,00	461.031.200,00	1.355.085.000,00
25	Tegal Harum	1.336.887.000,00	17.534.100,00	11.689.400,00	784.598.100,00	523.065.400,00	1.336.887.000,00
26	Tegal Kertha	1.538.046.000,00	4.890.000,00	3.260.000,00	917.937.600,00	611.958.400,00	1.538.046.000,00
27	Ubung Kaja	1.692.771.000,00	65.136.000,00	43.424.000,00	950.526.600,00	633.684.400,00	1.692.771.000,00
Jumlah		9.896.439.000,00	1.997.223.900,00	1.331.482.600,00	1.940.639.500,00	4.627.093.000,00	39.896.439.000,00

Rincian ikhtisar Dana Desa disajikan dalam *Lampiran 1f Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

3.1.4. Ikhtisar Dana BOSP Tahun 2025

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Denpasar TA 2025 dikelola oleh SD, SMP, serta TK/KB dan PKBM baik negeri maupun swasta. Dana BOSP terdiri dari Dana Bos Reguler, Dana BOS Kinerja, Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOP PAUD Kinerja, Dana BOP Kesetaraan Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja. Jumlah satuan pendidikan penerima BOSP sebagai berikut:



**Tabel 3. 2 Jumlah Sekolah Penerima Dana BOSP Tahun 2025**

No	Uraian	Tingkatan Pendidikan	Negeri	Swasta
1	Dana Bos Reguler	SD	166	50
		SMP	16	48
2	Dana BOS Kinerja	SD	35	19
		SMP	9	15
3	Dana BOP PAUD Reguler	TK/KB	4	248
4	Dana BOP PAUD Kinerja	TK/KB	0	16
5	Dana BOP Kesetaraan Reguler	PKBM	1	10
6	Dana BOP Kesetaraan Kinerja	PKBM	1	2

Adapun realisasi Dana BOS dan BOP Negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Ikhtisar Dana BOSP Tahun 2025

No	Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2025	Penambahan Karena Koreksi Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	BOS SD Negeri	466.040.989,72	1.217.078,97	59.343.830.402,00	59.533.457.840,50	277.630.630,19
2	BOS SMP Negeri	263.563.405,06	927,73	21.476.459.286,00	21.558.569.570,00	181.454.048,79
3	BOP PAUD Negeri	0,00	0,00	244.950.000,00	235.773.500,00	9.176.500,00
4	BOP Kesetaraan Negeri	24.996.500,00	0,00	451.511.000,00	272.827.100,00	203.680.400,00
Jumlah Dana BOS dan BOP Negeri		754.600.894,78	1.218.006,70	81.516.750.688,00	81.600.628.010,50	671.941.578,98
1	BOS SD Swasta	0,00	0,00	18.561.461.152,00	18.561.461.152,00	0,00
2	BOS SMP Swasta	0,00	0,00	23.260.657.099,00	23.260.657.099,00	0,00
3	BOP PAUD Swasta	0,00	0,00	10.734.429.500,00	10.657.327.500,00	77.102.000,00
4	BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00	2.734.362.550,00	2.613.965.350,00	120.397.200,00
Jumlah Dana BOS dan BOP Swasta		0,00	0,00	55.290.910.301,00	55.093.411.101,00	197.499.200,00

Jumlah penerimaan sesuai dengan jumlah yang tercatat pada DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler dan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja. Penambahan karena Koreksi Saldo Awal sejumlah Rp1.218.006,70 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp1.200.000,00. Selain itu, terdapat Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang merupakan kompensasi bunga dari bank sebesar Rp17.078,97 pada BOS SD Negeri (SD Negeri 1 Renon sebesar Rp6.552,49, SD Negeri 19 Pemecutan sebesar Rp10.474,70, dan SD Negeri 10 Kesiman sebesar Rp51,78) dan Rp927,73 pada BOS SMP Negeri (SMP Negeri 2 Denpasar sebesar Rp595,68 dan SMP Negeri 10 Denpasar sebesar Rp332,05). Saldo akhir kas negeri sejumlah Rp671.941.578,98 merupakan Silpa BOSP yang berada di Kas BOSP, sedangkan saldo akhir kas swasta sebesar Rp197.499.200,00 merupakan pengembalian Kas BOP PAUD sejumlah Rp77.102.000,00 dan BOP Kesetaraan sejumlah Rp120.397.200,00, yang akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara melalui kasda. Pengembalian ke kasda berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik





Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pasal 30.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tahun 2025 menjadi masa kembali berkembangnya sektor ekonomi di Kota Denpasar. Sektor-sektor unggulan mengalami kebangkitan dan menjalankan aktivitas yang berimplikasi terhadap pemulihan sektor perekonomian. Hal ini secara langsung yang berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan dan pelaksanaan APBD TA 2025. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan dibarengi dengan peningkatan kesadaran dari pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban, seperti melakukan pengurusan perizinan dan pembayaran pajak.

Tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar melakukan delapan kali pergeseran anggaran yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Akan tetapi dalam delapan kali pergeseran anggaran tersebut, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 105,13% untuk pendapatan dan 88,48% untuk belanja dan transfer.





BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar ada sebanyak 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar merupakan konsolidasian dari laporan keuangan SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar.

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan umumnya mempunyai ciri-ciri:

1. Entitas dibiayai oleh APBD;
2. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat.

Entitas pelaporan disini adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

4.1.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada Pemerintah Kota Denpasar terdapat dua belas BLUD yang menyusun laporannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun BLUD di Kota Denpasar terdiri atas:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;
2. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat;
3. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat;
4. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur;
5. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur;
6. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara;
7. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara;
8. UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara;
9. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan;
10. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Selatan;
11. UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan; dan
12. UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan

4.1.4. Perusahaan Daerah

Pada Pemerintah Kota Denpasar ada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;
2. Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma; dan
3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma.





Ketiga Perusahaan Daerah tersebut menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk diakomodir pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025 adalah:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis Kas (*Cash Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas (*Cash Basis*) digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK).

2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis Akrua (*Accrual Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Akrua digunakan dalam penyusunan Neraca, LO, LP-SAL, dan LPE.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara





pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas;
- 2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

2. Piutang

a. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.





b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintah

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- e) Piutang Transfer Lainnya;
- f) Piutang Bagi Hasil;
- g) Piutang Transfer Antar Daerah;
- h) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.





Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan Pembayaran. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.





Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan





Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan Pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan Pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat; dan
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah;
- 2) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya; dan
- 3) Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah di hapusbukukan, ada kemungkinan diterima Pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap





kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - a) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau





d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;





- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

f. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.





g. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 2) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 3) Jaminan atau sita jaminan jika ada;
- 4) Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, jumlah debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- 2) Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- 3) Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.





Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

3) Inventarisasi fisik persediaan atau *stock opname*

Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara *opname* persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out (FIFO)*, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

Dalam hal metode *FIFO* tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.





e. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

f. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

g. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- 1) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa/*expired*, atau rusak yang dikeluarkan dari persediaan.

4. Aset Investasi

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang investasi antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal pelaporan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:





a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan mencatat pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1) Pengukuran investasi jangka pendek:

a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- (1). Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya;
- (2). Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2) Pengukuran investasi jangka panjang:

a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi nonpermanen selain dana bergulir:

- (1). Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.





- (2). Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (3). Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (4). Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - (a). Penentuan kualitas dana bergulir dengan klasifikasi:
 - ✓ Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
 - ✓ Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
 - ✓ Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
 - ✓ Kualitas macet jika umur piutang di atas 5 (lima) tahun.
 - (b). Penentuan besaran penyisihan dana bergulir dengan klasifikasi:
 - ✓ Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - ✓ Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - ✓ Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - ✓ Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - (c). Pencatatan penyisihan dana bergulir pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi beban penyisihan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
 - (d). Pelaporan dana bergulir, yaitu penyajian beban penyisihan pada Laporan Operasional (LO) dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.
 - (e). Penghapusan dana bergulir meliputi:
 - ✓ Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - ✓ Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir. Penghapusan dana bergulir berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral)





yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1) Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.





f. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 3) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 4) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 5) Perubahan pos investasi.

5. **Aset Tetap**

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.





6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam CaLK dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

c. Pengakuan

Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak





memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Jalan, Jaringan, dan Irigasi diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan irigasi sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui





dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

6) Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Tabel 4. 1 Batasan Minimal Jumlah Biaya Aset Tetap

No Urut	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.1.1	Alat Besar Darat	10.000.000
2.1.2	Alat Besar Apung	500.000
2.1.3	Alat Bantu	500.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	500.000
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.16	Alat Peraga	500.000
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.18	Rambu – Rambu	500.000
2.19	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000





No Urut	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	500.000
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.000

Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progres fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau utang belanja dalam neraca.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- (3) bertambah volume, dan/atau
- (4) bertambah kapasitas produksi.

b) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.

d) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara.

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud di atas, maka penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

e. Penghentian/Penghapusan

1) Penghentian Aset Tetap

- a) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca;





- b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca;
- c) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD; dan
- d) Aset tetap rusak berat dan/atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi diusulkan penghapusan kepada Walikota. Mekanisme pelaksanaan penghapusan terlebih dahulu dilakukan cek fisik terhadap kondisi aset tetap yang rusak berat yang dituangkan dalam berita acara cek fisik lanjut dibuatkan berita acara reklasifikasi ke aset lain-lain. Penghapusan dilakukan setelah terbit SK Penghapusan dari Walikota.

f. Pengungkapan

Aset Tetap disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
 - c) Pengurangan; dan
 - d) Perubahan nilai, jika ada.
- 3) Kebijakan kapitalisasi dan penyusutan.

6. Dana Cadangan

a. Definisi

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Pengakuan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan dengan melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

c. Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS





terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset disisi aktiva.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke Rekening Dana Cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

7. **Properti Investasi**

a. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

b. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.





c. Pengukuran

1) Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkap dalam CaLK adalah:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode;
- 6) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk;
 - a). Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b). Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
 - c). Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 7) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 8) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
- 9) Properti investasi akan disajikan apabila sudah ada kode rekening dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode rekening.

8. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan





mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

- 1) Tagihan Jangka Panjang:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran; dan
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - a) Sewa;
 - b) Kerja sama Pemanfaatan;
 - c) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
 - d) Kerja sama Penyediaan Infrastruktur.
- 3) Aset Tak Berwujud:
 - a) *Goodwill*;
 - b) Lisensi dan *Franchise*;
 - c) Hak Cipta;
 - d) Hak Paten;
 - e) *Software*;
 - f) Kajian;
 - g) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
 - h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
 - i) Aset Tak Berwujud Lainnya.
- 4) Aset Lain-Lain
 - a) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
 - b) Aset Tetap yang Akan Dihilangkan;
 - c) Aset Lain-lain, Lainnya: Aset Rusak Berat; dan
 - d) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud diakui pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya diakui pada Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas:

 - a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah.
 - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan





perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit, yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya – Kerja sama Pemanfaatan.

c) Bangun Guna Serah

(1). Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak;

(2). BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan;

(3). Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerja sama dijelaskan secara memadai di CaLK;

(4). Pada akhir masa kerja sama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama;

(5). Dalam hal perjanjian kerja sama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerja sama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan; dan

(6). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)





- (1). Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut;
- (2). BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan;
- (3). BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan;
- (4). Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan; dan
- (5). Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.





e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

(1). Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

(2). Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi, yaitu:

(1). Dapat diidentifikasi;

(2). Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

(3). Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

(4). Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:

1) Tahap penelitian/riset:

Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;

b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;

c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; dan





- d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
- 2) Tahap pengembangan
Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini, yaitu:
 - a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
 - e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

- a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b) Kerja sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)





BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah





penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

d. Penghapusan

Penghapusan aset lainnya dilakukan jika dalam masa mendatang, aset dinilai sudah tidak memiliki masa manfaat secara ekonomis dengan pengajuan proses penghapusan oleh entitas sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) informasi lainnya yang penting.

9. Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - b) Utang Bunga;
 - c) Utang Pinjaman Jangka Pendek;
 - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - e) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - f) Utang Belanja; dan
 - g) Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 2) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;





- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka Panjang terdiri dari:

- a) Utang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- d) Utang kepada Masyarakat.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat:

- 1) besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- 2) dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- 3) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), yaitu ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan;
- 4) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*), yaitu ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma;
- 5) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*) ketika Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya;
- 6) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*), yaitu ketika Pemerintah Kota Denpasar memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah.

c. Pengukuran

- 1) Kewajiban Pemerintah Kota Denpasar dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
- 3) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kota Denpasar berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek, sebagai berikut:
 - a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Kota Denpasar menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut;





- b) Pengukuran Utang Transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Pengukuran Utang Bunga. Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 - d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
 - e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
 - f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- 4) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang dari Pemerintah Kota Denpasar, yaitu:
- a) Utang yang tidak diperjualbelikan. Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan;
 - b) Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah Kota Denpasar dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- 5) Jika sekuritas utang Pemerintah Kota Denpasar dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah Kota Denpasar dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
- d. Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan kewajiban adalah:
- 1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - 2) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - 3) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - 4) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 5) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) pengurangan pinjaman;
 - b) modifikasi persyaratan utang;
 - c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;





- d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) biaya pinjaman:
- a). perlakuan biaya pinjaman;
 - b). jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c). tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

10. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan di LRA berdasarkan:

- 1) Pendapatan BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP);
- 2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK);
- 3) Pendapatan Dana BOS berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H); dan
- 4) Pendapatan dana Desa berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD).





Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
 - b) Apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan. Apabila laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan koreksi di LPE dan akun ekuitas.
- 3) Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima.
- 5) Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD pelaksana, maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- 6) Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- 7) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.





- 8) Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kota Denpasar tidak diakui sebagai pendapatan-LO melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD Penerima.

c. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 5) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6) Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 2) penjelasan mengenai hibah aset tetap;
- 3) penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
- 4) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

11. Belanja dan Beban

a. Definisi

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban dan belanja diklasifikasi menurut:





- 1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah dan beban bantuan sosial, beban modal terdiri dari beban modal aset tetap tanah, beban modal aset tetap peralatan dan mesin, beban modal aset tetap gedung dan bangunan, beban modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, beban modal aset tetap lainnya, beban tak terduga dan beban transfer;
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja modal terdiri dari belanja modal aset tetap tanah, belanja modal aset tetap peralatan dan mesin, belanja modal aset tetap gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja tidak terduga dan transfer.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah daerah.
- 2) Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah persediaan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- 3) Dalam hal belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum daerah, maka belanja diakui berdasarkan:
 - a). Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP)





- b). Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB)
- c). Belanja Dana BOS diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)
- c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.
- d. Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

12. Pembiayaan

- a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 - 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- b. Pengakuan
 - 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pengukuran





Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar disajikan dalam laporan realisasi anggaran.





BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah

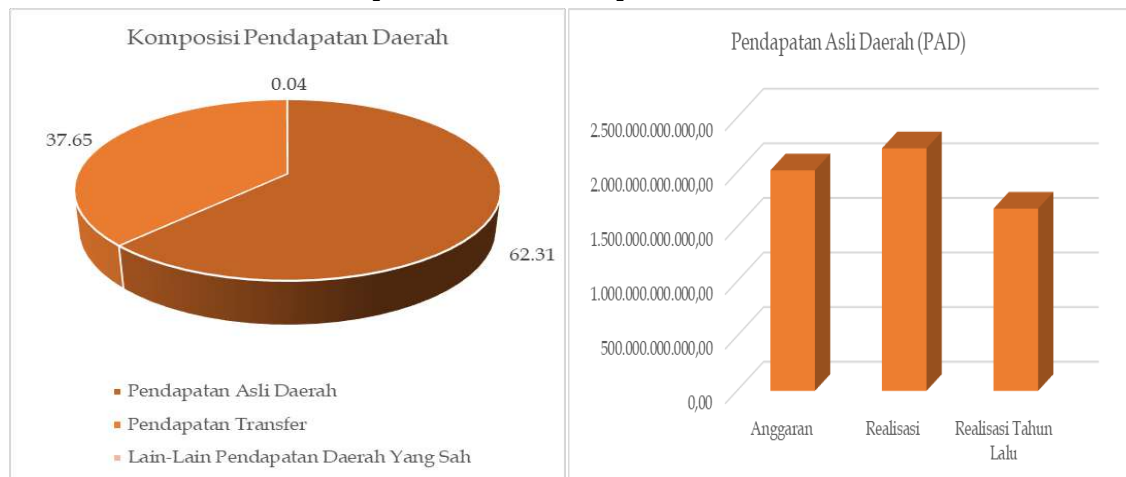
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

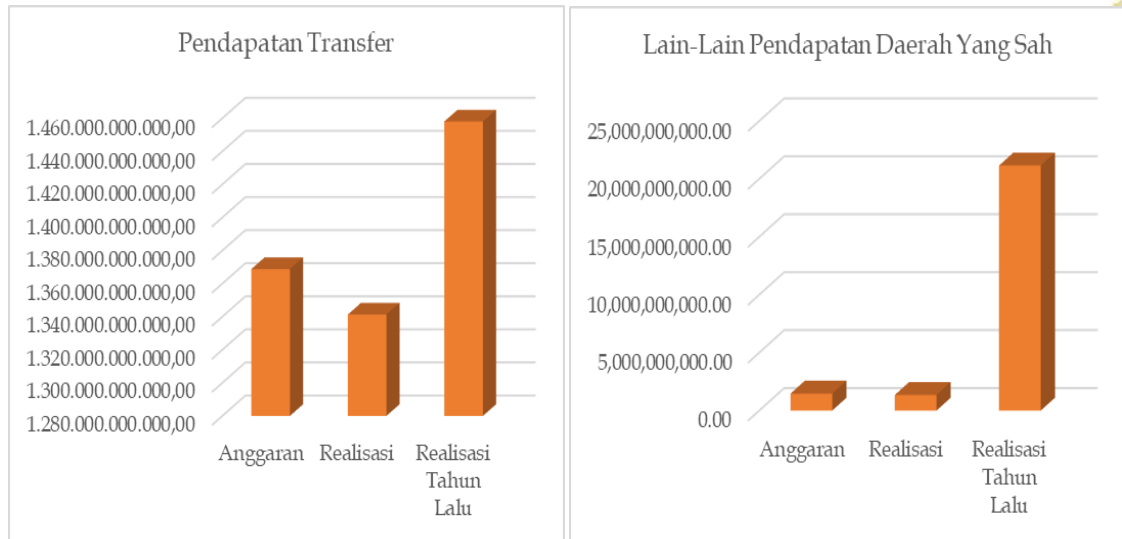
Tabel 5. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.018.795.135.284,00	2.220.130.658.663,55	109,97	1.668.189.310.265,36
Pendapatan Transfer	1.368.783.619.229,00	1.341.300.762.159,00	97,99	1.458.044.839.972,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	21.152.662.161,00
Jumlah	3.389.044.199.263,00	3.562.778.417.859,95	105,13	3.147.386.812.398,36

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5. 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025





5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	1.710.000.000.000,00	1.874.480.094.512,48	109,62	1.399.865.377.619,51
Retribusi Daerah	170.848.224.286,00	194.129.093.014,51	113,63	156.369.987.668,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.261.240.483,00	100.261.240.483,21	100,00	75.729.806.844,40
Lain-lain PAD yang Sah	37.685.670.515,00	51.260.230.653,35	136,02	36.224.138.132,62
Jumlah	2.018.795.135.284,00	2.220.130.658.663,55	109,97	1.668.189.310.265,36

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pajak Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Reklame	4.000.000.000,00	5.942.623.658,52	148,57	4.396.801.738,63
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.000.000.000,00	5.942.623.658,52	148,57	4.396.801.738,63
Pajak Air Tanah	8.000.000.000,00	8.806.491.718,00	110,08	9.232.735.902,00
Pajak Air Tanah	8.000.000.000,00	8.806.491.718,00	110,08	9.232.735.902,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	125.000.000.000,00	130.536.715.334,00	104,43	131.643.314.862,00
PBBP2	125.000.000.000,00	130.536.715.334,00	104,43	131.643.314.862,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	260.000.000.000,00	300.203.239.466,00	115,46	371.067.348.506,00
BPHTB-Pemindahan Hak	260.000.000.000,00	300.203.239.466,00	115,46	371.067.348.506,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	901.000.000.000,00	1.005.901.148.035,96	111,64	883.525.176.610,88
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	350.000.000.000,00	404.559.795.869,86	115,59	347.383.859.904,07
PBJT-Tenaga Listrik	250.000.000.000,00	257.035.821.724,00	102,81	234.622.379.925,00
PBJT-Jasa Perhotelan	245.000.000.000,00	278.900.768.097,00	113,84	247.799.277.189,12
PBJT-Jasa Parkir	6.000.000.000,00	7.750.517.503,00	129,18	7.036.423.390,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	50.000.000.000,00	57.654.244.842,10	115,31	46.683.236.202,69
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	237.500.000.000,00	251.300.400.900,00	105,81	0,00
Opsen PKB	237.500.000.000,00	251.300.400.900,00	105,81	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	174.500.000.000,00	171.789.475.400,00	98,45	0,00
Opsen BBNKB	174.500.000.000,00	171.789.475.400,00	98,45	0,00
Jumlah	1.710.000.000.000,00	1.874.480.094.512,48	109,62	1.399.865.377.619,51

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pajak Daerah pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pajak Reklame lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Capaian realisasi TA 2025 disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas pajak reklame di Kota Denpasar. Selain itu, realisasi ini dapat dicapai karena adanya:
 - 1) Program intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, penagihan serta pemeriksaan kepada wajib pajak yang terindikasi tidak taat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Integrasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengetahui permohonan perizinan baru yang berhubungan dengan pajak reklame; dan
 - 3) Sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara digital/non tunai melalui transfer, *virtual account* atau *mobile banking* serta *e-commerce* melalui GoPay.
 - b. Realisasi Pajak Air Tanah lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024. Capaian realisasi TA 2025 disebabkan oleh adanya:
 - 1) Program intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, penagihan serta pemeriksaan kepada wajib pajak yang terindikasi tidak taat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Proses validasi dan penagihan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar melalui Tim Validasi Internal Bapenda Kota Denpasar;
 - 3) Sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara digital/non tunai melalui transfer, *virtual account* atau *mobile banking* serta *e-commerce* melalui GoPay; dan
 - 4) Pemberian insentif fiskal berupa pembebasan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan





Pokok Pajak Tahun 2025 dan Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2024.

- c. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024. Capaian realisasi TA 2025 disebabkan oleh adanya:
- 1) Program intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, penagihan serta pemeriksaan kepada wajib pajak yang terindikasi tidak taat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk mengetahui potensi penerbitan sertifikat baru serta pemecahan tanah atau lahan baru sebagai dasar penambahan wajib pajak PBBP2, serta penerbitan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah berlangsung dari tahun 2024;
 - 3) Integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui permohonan perizinan baru yang berhubungan dengan PBBP2;
 - 4) Proses validasi dan penagihan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar melalui Tim Validasi Internal Bapenda Kota Denpasar;
 - 5) Pengembangan Simpada (Sistem Pajak Daerah) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar) sehingga wajib pajak diberikan kemudahan dari proses pendaftaran sampai dengan pembayaran dengan memanfaatkan satu aplikasi yang terintegrasi;
 - 6) Sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara digital/non tunai melalui transfer, *virtual account* atau *mobile banking* serta *e-commerce* melalui GoPay;
 - 7) Pemberian apresiasi dari Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank BPD Bali dengan menyiapkan *reward* 8 unit sepeda motor listrik, masing-masing 2 unit di setiap kecamatan. Reward diberikan untuk Wajib Pajak PBBP2 yg membayar melalui kanal digital, tanpa tunggakan dan tepat waktu sebelum jatuh tempo (31 Agustus 2025), sesuai mekanisme yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar;
 - 8) Kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan penilaian PBBP2; dan
 - 9) Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok dan denda PBBP2 berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Tahun 2025 dan Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2024.
- d. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024. Capaian realisasi TA 2025 disebabkan oleh adanya:
- 1) Melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk mengetahui potensi penerbitan sertifikat baru serta pemecahan tanah atau lahan baru, serta penerbitan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah berlangsung dari tahun 2024; dan





- 2) Sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara digital/non tunai melalui transfer, *virtual account* atau *mobile banking* serta *e-commerce* melalui GoPay.
 - e. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Capaian realisasi TA 2025 ini disebabkan oleh adanya:
 - 1) Program intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, penagihan serta pemeriksaan kepada wajib pajak yang terindikasi tidak taat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Penerapan digitalisasi pemantauan dan pengawasan pajak daerah dengan penciptaan Cluster Renon Digital Area, Melodi Sanur, Pak Ketut, Lapak Ketumbar, Paon Gatsu, dan Klaster Kladi 5B;
 - 3) Proses validasi dan penagihan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar melalui Tim Validasi Internal Bapenda Kota Denpasar;
 - 4) Pengembangan Simpada (Sistem Pajak Daerah) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar) sehingga wajib pajak diberikan kemudahan dari proses pendaftaran sampai dengan pembayaran dengan memanfaatkan satu aplikasi yang terintegrasi;
 - 5) Sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara digital/non tunai melalui transfer, *virtual account* atau *mobile banking* serta *e-commerce* melalui GoPay;
 - 6) Pembentukan Tim Pendataan Potensi Pajak Daerah Wilayah Desa/Kelurahan di Kota Denpasar;
 - 7) Kerja sama dengan Universitas Udayana terkait pemeriksaan pajak daerah;
 - 8) Pemberian insentif fiskal berupa pembebasan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2025;
 - 9) Optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box*, POS dan *cash register online*, serta alat rekam lainnya kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak, serta sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah;
 - 10) Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk melakukan proses penagihan Pajak Daerah; dan
 - 11) Pembentukan tim pemeriksa pajak daerah dan penyusunan kertas kerja pemeriksaan pajak daerah.
 - f. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan nomenklatur baru dengan penerimaan yang dimulai sejak 5 Januari 2025 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - g. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan nomenklatur baru dengan penerimaan yang dimulai sejak 5 Januari 2025 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Pemungutan Pajak Daerah dilandasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah





Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	157.852.559.804,00	177.247.808.499,51	112,29	142.304.920.197,83
Retribusi Pelayanan Kesehatan	156.052.559.804,00	176.865.445.499,51	113,34	140.728.756.197,83
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.800.000.000,00	382.363.000,00	21,24	1.576.164.000,00
Retribusi Jasa Usaha	2.995.664.482,00	4.376.745.379,00	146,10	3.309.141.440,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	741.924.910,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	1.158.784.530,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	650.000.000,00	799.415.450,00	122,99	983.145.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	486.880.000,00	741.243.500,00	152,24	398.764.500,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.858.784.482,00	2.836.086.429,00	152,58	26.522.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000.000,00	12.504.539.136,00	125,05	10.755.926.031,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	4.479.190.436,00	89,58	3.604.738.651,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000.000,00	8.025.348.700,00	160,51	7.151.187.380,00
Jumlah	170.848.224.286,00	194.129.093.014,51	113,63	156.369.987.668,83

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Retribusi Daerah pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Pada tahun 2025, puskesmas di Kota Denpasar sejumlah sebelas puskesmas juga berstatus sebagai BLUD; dan
 - 2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 disebabkan oleh terhentinya pemungutan retribusi akibat menunggu terbitnya peraturan walikota mengenai kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dan pihak ketiga berkaitan dengan pengelolaan sampah.
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi pada TA 2025. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2024 merupakan





penerimaan atas pemakaian ruangan pada Gedung Dharma Negara Alaya pada Dinas Pariwisata. Pada TA 2025, penerimaan tersebut dianggarkan dan direalisasikan pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;

- 2) Realisasi Retribusi Terminal tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi pada TA 2025. Retribusi Terminal pada TA 2024 terdiri atas Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum, Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang seluruhnya dianggarkan dan direalisasikan pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada TA 2025;
- 3) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2025, namun demikian realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024. Pelampauan realisasi ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pemotongan daging akibat tingginya permintaan termasuk pengiriman ke luar Pulau Bali;
- 4) Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penumpang terutama pada fase *high season*; dan
- 5) Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah merupakan penerimaan atas pemanfaatan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pemakaian Gedung Dharma Negara Alaya pada Dinas Pariwisata, penerimaan dari pemanfaatan aset di terminal pada Dinas Perhubungan, dan penerimaan atas sewa kantin pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi. Peningkatan realisasi retribusi ini disebabkan oleh adanya pemungutan atas pemanfaatan aset yang belum dipungut pada tahun sebelumnya, peningkatan penggunaan gedung, dan peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke terminal yang didukung oleh upaya penertiban dari Dinas Perhubungan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dari realisasi TA 2024. Tidak tercapainya realisasi yang melampaui anggaran disebabkan oleh rendahnya jumlah pemohon; dan
 - 2) Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja asing seiring penambahan perusahaan baru yang mempekerjakan tenaga kerja asing serta meningkatnya nilai kurs dolar terhadap mata uang rupiah.
2. Pemungutan Retribusi Daerah dilandasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





Tabel 5. 5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	100.261.240.483,00	100.261.240.483,21	100,00	75.729.806.844,40
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	71.670.486.314,00	71.670.486.314,21	100,00	51.731.070.121,40
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.305.313.847,00	2.305.313.847,00	100,00	532.935.831,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	26.285.440.322,00	26.285.440.322,00	100,00	23.465.800.892,00
Jumlah	100.261.240.483,00	100.261.240.483,21	100,00	75.729.806.844,40

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2025. Realisasi ini sesuai dengan perolehan keuntungan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda);
 - Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) berasal dari Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma. Pada TA 2025, realisasi mencapai anggaran yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan dari realisasi TA 2024; dan
 - Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma. Realisasi TA 2025 mencapai target anggaran TA 2025 serta lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Realisasi ini sesuai dengan perolehan keuntungan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah.
- Rincian penerimaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Rincian Penerimaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT BPD Bali	71.641.767.117,00	71.641.767.117,21	100,00	51.716.898.367,40
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	28.719.197,00	28.719.197,00	100,00	14.171.754,00
Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	2.305.313.847,00	2.305.313.847,00	100,00	532.935.831,00
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	26.285.440.322,00	26.285.440.322,00	100,00	23.465.800.892,00
Jumlah	100.261.240.483,00	100.261.240.483,21	100,00	75.729.806.844,40



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025



3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari Perumda diakui berdasarkan:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari PT BPD Bali diakui berdasarkan Berita Acara Nomor 0149/BA/DIR/OKA/2025 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2024;
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) diakui berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, SH Nomor 6 Tanggal 10 Maret 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda);
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma diakui berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2024 tanggal 26 Mei 2025 Nomor 900.1.13.2/05/KPM/2025 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2024; dan
 - d. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma diakui berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2024 tanggal 9 Juni 2025 Nomor 900.1.13.2/08/KPM/2025 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2024.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	739.290.495,00	917.632.345,00	124,12	407.153.798,60
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	739.290.495,00	917.632.345,00	124,12	407.153.798,60
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.058.923.487,00	1.565.765.996,00	147,86	1.195.057.996,00
Hasil Sewa BMD	1.058.923.487,00	1.565.765.996,00	147,86	1.195.057.996,00
Jasa Giro	5.210.680.325,00	10.573.848.556,82	202,93	7.314.363.031,06
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.210.680.325,00	10.573.848.556,82	202,93	7.314.363.031,06
Pendapatan Bunga	13.000.000.000,00	16.079.012.425,33	123,68	16.510.478.523,16
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	16.079.012.425,33	123,68	16.510.478.523,16
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	24.149.113,00	341.704.899,17	1.414,98	364.373.417,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	24.149.113,00	341.704.899,17	1.414,98	364.373.417,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.542.237.066,00	6.118.335.344,00	172,73	3.952.968.032,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	3.418,00	0,00	9.823.412,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	4.792.280,00	0,00	8.154.322,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.542.237.066,00	1.418.583.807,00	40,05	3.038.613.115,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	671.748.139,00	0,00	896.377.183,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	4.005.570.900,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	17.636.800,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.000.000,00	22.824.487,00	570,61	38.670.555,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	4.000.000,00	22.824.487,00	570,61	38.670.555,00
Pendapatan dari Pengembalian	14.096.352.029,00	14.158.821.261,43	100,44	5.674.676.186,04
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	12.878.956,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	84.080.420,00	94.719.248,00	112,65	168.691.922,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	82.519,00	82.519,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	81.315.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	188.976.274,00	188.976.274,87	100,00	398.037.860,60
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	155.156.854,00	155.156.854,00	100,00	326.500.482,46
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	202.112.602,00	202.112.602,81	100,00	405.247.103,27
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	153.160.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.288.744.881,00	12.293.418.561,56	100,04	194.164.044,23
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	74.865.629,00	0,00	0,00	7.145.417,38
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	6.404.981,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	6.643.125,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	753.734.986,00	753.734.986,00	100,00	1.704.164.071,06
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	238.665.000,00	238.665.000,00	100,00	1.792.005.708,15
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	16.110.578,08
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0,00	0,00	0,00	4.967.820,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	45.812.500,00	94.788.129,00	206,90	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.820.364,00	12.020.364,00	111,09	309.164.837,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	25.890.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	45.956.722,19	0,00	88.074.279,81
Pendapatan BLUD	0,00	1.472.247.338,60	0,00	743.091.593,76
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	1.139.747.487,00	0,00	587.748.344,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	332.499.851,60	0,00	155.343.249,76
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.038.000,00	10.038.000,00	100,00	23.305.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.038.000,00	10.038.000,00	100,00	23.305.000,00
Jumlah	37.685.670.515,00	51.260.230.653,35	136,02	36.224.138.132,62

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain PAD yang Sah pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi ini bersumber dari hasil penjualan barang, ekstrakomptabel, maupun sisa bongkaran.
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi ini bersumber dari hasil sewa lahan milik Pemerintah Kota Denpasar, yang dimanfaatkan untuk kantin, hasil sewa *basement*, hasil sewa kapal dan sewa utilitas LPJU.
3. Realisasi Jasa Giro lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi ini termasuk Jasa Giro BOK sebesar Rp15.188.844,00, bunga bank atas hibah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp82.000,00, bunga atas pengembalian hibah KONI sebesar Rp407.804.905,34 (Sisa jagir hibah KONI Tahun 2024 sebesar Rp8.849.643,19 dan bunga atas hibah KONI tahun 2025 sebesar Rp398.955.262,15), bunga atas pengembalian hibah





pramuka sebesar Rp6.840.526,15, bunga atas pengembalian hibah PMI sejumlah Rp3.715.391,00, dan bunga pada rekening bendahara baik RKUD maupun bendahara. Penerimaan jasa giro tidak dapat diprediksi karena tergantung dari dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank.

4. Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024 karena bergantung pada dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank. Pada tahun 2025, pendapatan bunga juga berasal dari remunerasi TDF sebesar Rp37.327.752,00 serta kompensasi bunga pada rekening dana BOSP dengan jumlah Rp18.006,70 dikarenakan terdapat keterlambatan proses pengiriman dana dari bank ke pihak rekanan.
5. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih rendah dari realisasi TA 2024. Realisasi ini berasal dari penerimaan dari pihak ketiga atas keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah, Pendapatan Denda PBBP2, Pendapatan Denda PBJT, Pendapatan Denda Opsen PKB, dan Pendapatan Denda Opsen BBNKB.
7. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih rendah dari realisasi TA 2024. Pada TA 2025, Pendapatan Denda Retribusi Daerah seluruhnya berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha yang berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
8. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi yang lebih tinggi disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran maupun terdapat temuan oleh pemeriksa yang telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian ke kas daerah.
9. Realisasi Pendapatan BLUD lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi ini pada TA 2025 berasal dari BLUD RSUD Wangaya dan Puskesmas se-Kota Denpasar. Realisasi ini berupa pendapatan BLUD dari hasil kerja sama pihak lain, jasa giro, pendapatan bunga, maupun pengembalian atas kelebihan belanja barang dan jasa pada BLUD.
10. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah seluruhnya berasal dari pendapatan kompensasi tanah pada lokasi konsolidasi. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2024, dimana untuk realisasi TA 2024 seluruhnya juga berasal dari pendapatan kompensasi tanah pada lokasi konsolidasi.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.182.434.690.784,00	1.166.472.213.110,00	98,65	1.168.962.054.175,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.348.928.445,00	174.828.549.049,00	93,82	289.082.785.797,00
Jumlah	1.368.783.619.229,00	1.341.300.762.159,00	97,99	1.458.044.839.972,00





5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.077.007.016.175,00
Dana Desa	39.896.439.000,00	39.896.439.000,00	100,00	34.828.566.000,00
Insentif Fiskal	21.645.986.000,00	21.645.986.000,00	100,00	57.126.472.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	129.886.054.000,00	120.563.983.700,00	92,82	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	711.678.225.784,00	711.632.242.557,00	99,99	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	279.327.986.000,00	272.733.561.853,00	97,64	0,00
Jumlah	1.182.434.690.784,00	1.166.472.213.110,00	98,65	1.168.962.054.175,00

Penjelasan:

1. Rincian Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	109.786.714.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	688.562.370.657,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	28.031.657.114,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	250.626.274.404,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.077.007.016.175,00

Pada TA 2025, dana-dana tersebut tidak dianggarkan pada dana perimbangan, melainkan dianggarkan pada masing-masing akun sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada TA 2025.

2. Dana Desa pada TA 2025 sebesar Rp39.896.439.000,00, telah dianggarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta telah terealisasi seluruhnya pada TA 2025.
3. Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp57.126.472.000,00. Pada TA 2025, dianggarkan pada Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp21.645.986.000,00 yang telah seluruhnya terealisasi. Nilai ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
4. Rincian Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:





Tabel 5. 11 Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak	128.995.876.000,00	119.672.597.700,00	92,77	0,00
DBH PBB	758.256.000,00	703.041.900,00	92,72	0,00
DBH PPh Pasal 21	118.238.355.000,00	109.166.335.500,00	92,33	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.427.004.000,00	9.230.959.300,00	97,92	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	572.261.000,00	572.261.000,00	100,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	890.178.000,00	891.386.000,00	100,14	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.779.000,00	2.987.000,00	167,90	0,00
DBH SDA Perikanan	888.399.000,00	888.399.000,00	100,00	0,00
Jumlah	129.886.054.000,00	120.563.983.700,00	92,82	0,00

DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH SDA Perikanan dianggarkan sebagaimana nilai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Seluruh komponen dana bagi hasil telah dianggarkan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 serta diakumulasi dengan adanya penyaluran kurang bayar DBH sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025. Adanya perbedaan yang menyebabkan realisasi terlampaui disebabkan oleh adanya penyaluran kurang bayar tahun sebelumnya, sedangkan perbedaan yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran disebabkan oleh adanya kurang bayar yang akan diperhitungkan dalam tahun-tahun yang akan datang.

Sedangkan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dianggarkan pada TA 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 936/04-E/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 serta seluruhnya sudah terealisasi pada TA 2025.

5. Rincian Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	541.781.121.784,00	541.735.148.333,00	99,99	0,00
DAU	541.781.121.784,00	541.735.148.333,00	99,99	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	169.897.104.000,00	169.897.094.224,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	85.528.634.000,00	85.528.624.224,00	99,99	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	66.544.131.000,00	66.544.131.000,00	100,00	0,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.624.339.000,00	14.624.339.000,00	100,00	0,00
Jumlah	711.678.225.784,00	711.632.242.557,00	99,99	0,00

DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dianggarkan pada TA 2025 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp541.812.529.000,00. Perbedaan dengan yang dianggarkan disebabkan oleh adanya pemotongan sebesar Rp31.407.216,00 sesuai dengan KMK 5/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023.

DAU yang Ditentukan Penggunaannya dianggarkan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

6. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik	13.536.578.000,00	13.298.904.178,00	98,24	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	493.828.000,00	491.423.945,00	99,51	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	11.518.000.000,00	11.316.580.233,00	98,25	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.524.750.000,00	1.490.900.000,00	97,78	0,00
DAK Non Fisik	265.791.408.000,00	259.434.657.675,00	97,61	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	106.182.875.000,00	107.049.627.100,00	100,82	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.858.750.000,00	1.149.500.000,00	61,84	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	288.270.000,00	288.270.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	230.468.000,00	57,52	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	121.080.400.000,00	119.974.157.939,00	99,09	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.668.250.000,00	2.668.250.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	10.940.390.000,00	10.739.379.500,00	98,16	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	270.000.000,00	240.000.000,00	88,89	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.283.830.000,00	3.050.873.550,00	92,91	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.229.406.000,00	5.143.728.208,00	71,15	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.027.657.000,00	3.651.991.778,00	60,59	0,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.334.720.000,00	5.022.211.600,00	94,14	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00	0,00
Jumlah	279.327.986.000,00	272.733.561.853,00	97,64	0,00

DAK Fisik yang dianggarkan pada TA 2025 sebesar Rp13.536.578.000,00, *sudah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Realisasi DAK Fisik tidak mencapai anggaran yang ditetapkan karena penyaluran DAK Fisik menggunakan sistem amprahan ke kementerian terkait sesuai dengan kontrak pekerjaan. Dalam hal anggaran telah ditentukan, namun demikian nilai kontrak pekerjaan di bawah anggaran yang telah ditetapkan, maka nilai penyaluran akan tercatat sebesar nilai kontrak.

DAK Non Fisik yang dianggarkan pada TA 2025 sebesar Rp265.791.408.000,00, sesuai dengan yang ditetapkan dalam dasar aturan. DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, dan DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian dianggarkan sesuai dengan KMK RI Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. Sedangkan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, dan DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	161.198.928.445,00	152.659.650.049,00	94,70	287.528.478.089,00
Bantuan Keuangan	25.150.000.000,00	22.168.899.000,00	88,15	1.554.307.708,00
Jumlah	186.348.928.445,00	174.828.549.049,00	93,82	289.082.785.797,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 5. 15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.278.087.380,00	20.139.942.124,00	99,32	92.353.333.925,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.980.535.194,00	17.656.160.922,00	98,20	84.090.463.541,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	86.771.162.439,00	79.786.124.479,00	91,95	76.724.338.787,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	295.037.348,00	344.602.191,00	116,80	293.593.619,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.874.106.084,00	34.732.820.333,00	96,82	34.066.748.217,00
Jumlah	161.198.928.445,00	152.659.650.049,00	94,70	287.528.478.089,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Bali. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kota Denpasar menerima Opsen PKB dan BBNKB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan didasarkan pada Surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali a.n. Gubernur Bali melalui Surat Nomor: B.31.900/6313/PADFE/BPKAD perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali a.n. Gubernur Bali melalui Surat Nomor: B.31.900/5341/PADFE/BPKAD perihal Kewajiban Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok didasarkan pada Surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali a.n. Gubernur Bali melalui Surat Nomor: B.31.900/6313/PADFE/BPKAD perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Rincian Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.150.000.000,00	7.380.791.000,00	72,72	1.554.307.708,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.150.000.000,00	7.380.791.000,00	72,72	1.554.307.708,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000.000,00	14.788.108.000,00	98,59	0,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000.000,00	14.788.108.000,00	98,59	0,00
Jumlah	25.150.000.000,00	22.168.899.000,00	88,15	1.554.307.708,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Bantuan Keuangan pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan dari realisasi TA 2024. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sesuai Surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali a.n. Gubernur Bali melalui Surat Nomor: B.31.900/33/PADFE/BPKAD perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat dua jenis BKK dari Pemerintah Provinsi Bali, yaitu BKK untuk Subak/Subak Abian yang telah disalurkan sebesar Rp150.000.000,00 dari pagu sebesar Rp150.000.000,00. Sedangkan BKK untuk Pengelolaan Sampah disalurkan sesuai dengan kontrak, yaitu sejumlah Rp7.230.791.000,00 dari total pagu Rp10.000.000.000,00; dan
- Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota lebih rendah dari anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sesuai dengan Surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung melalui Surat Nomor: 900/42/SETDA/BPKAD perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Badung T.A. 2025 dan digunakan dalam rangka Perbaikan Pura Tambang Badung. Adanya perbedaan anggaran dengan jumlah yang disalurkan disebabkan oleh penyaluran disesuaikan dengan kontrak.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 17 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	16.481.457,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	21.136.180.704,00
Jumlah	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	21.152.662.161,00

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





Tabel 5. 18 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.465.444.750,00	1.172.355.800,00	80,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.465.444.750,00	1.172.355.800,00	80,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	174.641.237,40	0,00	16.481.457,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	174.641.237,40	0,00	16.481.457,00
Jumlah	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	16.481.457,00

Penjelasan:

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hibah ini berasal dari Hibah CSR PT BPD Bali yang diperuntukkan untuk renovasi Gedung Graha Nawasena (Rumah Harapan Disabilitas Kota Denpasar) yang direalisasikan sesuai dengan kontrak pekerjaan.
2. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024, yang mana tidak dianggarkan pada TA 2025. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis berasal dari penerimaan yang masuk ke kas daerah yang berasal dari transfer tanpa keterangan yang tidak dapat teridentifikasi sebesar Rp500.000,00, adanya pembayaran nonkapitasi yang seharusnya dibayarkan BPJS ke rekening puskesmas namun ditransfer ke RKUD sebesar Rp12.977.100,00, serta pendapatan daerah lain yang salah ditransfer ke RKUD Kota Denpasar dengan jumlah total Rp161.164.137,40.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024, yaitu rincian saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 19 Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	21.136.180.704,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	21.136.180.704,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	21.136.180.704,00

Penjelasan:

1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak dianggarkan pada TA 2025 berkenaan dengan sudah berubahnya status puskesmas di Kota Denpasar menjadi BLUD.
2. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing FKTP dapat dilihat pada lampiran mutasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada *point 5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas*.





5.1.2. Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 20 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	2.665.176.658.404,00	2.416.572.353.375,89	90,67	2.147.613.065.659,31
Belanja Modal	989.281.447.076,00	774.880.786.924,00	78,33	465.354.104.773,90
Belanja Tidak Terduga	14.688.066.179,00	6.874.292.006,00	46,80	2.415.538.991,00
Belanja Transfer	418.949.971.810,00	418.769.971.810,00	99,96	251.063.946.003,00
Jumlah	4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89	88,48	2.866.446.655.427,21

5.1.2.1. Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 21 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.293.369.357.988,00	1.223.348.651.344,45	94,59	996.719.954.633,96
Belanja Barang dan Jasa	1.101.918.742.705,00	930.635.532.570,44	84,46	937.807.065.343,50
Belanja Subsidi	46.800.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
Belanja Hibah	262.080.097.711,00	255.155.766.733,00	97,36	205.187.176.852,85
Belanja Bantuan Sosial	7.761.660.000,00	7.432.402.728,00	95,76	7.820.868.829,00
Jumlah	2.665.176.658.404,00	2.416.572.353.375,89	90,67	2.147.613.065.659,31

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5. 2 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025





Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 22 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	618.175.345.071,00	583.478.044.209,00	94,39	439.941.960.369,00
Belanja Gaji Pokok ASN	424.095.838.941,00	415.221.380.282,00	97,91	334.351.500.296,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.738.014.278,00	36.943.912.990,00	88,51	30.020.204.647,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.371.157.838,00	4.910.683.420,00	91,43	5.309.380.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.252.833.048,00	26.152.396.194,00	95,96	25.242.419.723,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	9.172.088.682,00	8.638.990.551,00	94,19	4.072.097.850,00
ASN				
Belanja Tunjangan Beras ASN	25.482.155.118,00	22.445.975.339,00	88,09	17.080.344.346,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.376.067.754,00	32.626.081.860,00	75,22	7.101.089.161,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.561.062,00	6.301.631,00	65,91	4.677.918,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	36.274.563.574,00	33.004.643.068,00	90,99	13.998.991.172,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	937.348.604,00	881.929.882,00	94,09	690.316.676,00
ASN				
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.773.455.526,00	2.645.748.992,00	95,40	2.070.938.580,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.692.260.646,00	0,00	0,00	0,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	565.041.748.629,00	532.905.000.330,00	94,31	345.376.994.196,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	403.293.400.000,00	376.807.694.021,00	93,43	345.376.994.196,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.609.646.200,00	4.467.460.141,00	67,59	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	155.138.702.429,00	151.629.846.168,00	97,74	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	126.708.728.431,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	22.149.622.160,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	482.895.019,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	57.986.563.699,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	202.800.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	16.884.901.153,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	419.320.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	26.568.396.400,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	2.014.230.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.397.192.216,00	43.722.406.839,00	98,48	43.209.581.618,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	998.445.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	137.200.000,00	121.745.400,00	88,74	122.236.800,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	150.960.000,00	115.582.320,00	76,56	122.969.160,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.501.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.447.745.250,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.822.100,00	113.822.100,00	100,00	103.788.825,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.069.500,00	30.373.875,00	58,33	28.851.375,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.893.900.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.969.800.000,00	1.969.800.000,00	100,00	1.308.300.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	980.000.000,00	878.981.268,00	89,69	829.428.326,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	20.418.428.112,00	20.414.219.376,00	99,98	20.257.700.382,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.947.600.004,00	9.594.000.000,00	96,45	9.613.500.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.430.000,00	0,00	0,00	397.215.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.752.465.634,00	1.145.759.240,00	41,63	1.033.944.514,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	119.925.000,00	101.400.000,00	84,55	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.056.000,00	90,06	7.056.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	7.097.160,00	87,50	7.097.160,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	4.255.510,00	1.937.480,00	45,53	1.950.514,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Khusus KDH/WKDH				
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	360,00	12,86	360,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.641.272,00	5.483.520,00	97,20	5.483.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	112.320,00	97,56	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	336.960,00	97,56	336.960,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.505.497.400,00	924.055.440,00	36,88	859.027.680,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.421.312.600,00	3.420.920.000,00	99,99	2.164.490.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.028.192.600,00	3.027.800.000,00	99,99	1.804.130.000,00
Belanja Pegawai BLUD	59.581.293.838,00	58.676.520.726,45	98,48	38.284.255.505,96
Belanja Pegawai BLUD	59.581.293.838,00	58.676.520.726,45	98,48	38.284.255.505,96
Jumlah	1.293.369.357.988,00	1.223.348.651.344,45	94,59	996.719.954.633,96

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 disebabkan adanya peningkatan realisasi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN. Namun demikian, terdapat penurunan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 pada Belanja Tunjangan Jabatan ASN. Selain itu, tidak terdapat realisasi dalam Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
 - b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN serta terdapat realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang tidak ada realisasinya pada TA 2024 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (kode rekening 5.1.01.02.06) yang pada TA 2024 dianggarkan pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN namun dalam kode rekening yang berbeda (kode rekening 5.1.01.03);
 - c. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024, dikarenakan pada TA 2025 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN;





- d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Uang Representasi DPRD, Belanja Uang Paket DPRD, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Reses DPRD, Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun demikian, terdapat penurunan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 pada Belanja Tunjangan Keluarga DPRD, Belanja Tunjangan Beras DPRD, Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dan Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
 - e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH, dan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah. Namun demikian, terdapat penurunan pada realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan TA 2024 terjadi pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - g. Realisasi Belanja Pegawai BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun realisasi TA 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 23 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	294.830.040.598,00	236.745.865.462,00	80,30	211.395.936.078,62
Belanja Barang Pakai Habis	293.773.582.598,00	235.997.955.509,00	80,33	211.220.486.078,62
Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.550.000,00	18.099.982,00	59,25	173.800.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.025.908.000,00	729.809.971,00	71,14	1.650.000,00
Belanja Jasa	422.431.720.594,00	357.312.711.919,17	84,58	413.763.947.733,00
Belanja Jasa Kantor	293.797.775.334,00	253.270.078.997,00	86,21	315.997.442.760,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	66.662.154.710,00	55.407.434.367,17	83,12	57.495.750.494,00
Belanja Sewa Tanah	3.600.000,00	3.596.400,00	99,90	120.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.286.152.200,00	18.884.266.975,00	69,21	15.901.521.015,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.265.300.000,00	3.135.171.341,00	59,54	5.898.140.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	898.900.000,00	895.164.311,00	99,58	733.280.425,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	838.100.000,00	763.738.600,00	91,13	651.034.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.836.820.000,00	1.770.188.277,00	96,37	1.351.041.050,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.293.510.850,00	2.075.291.980,00	90,49	1.727.358.595,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	8.305.750.000,00	8.305.750.000,00	100,00	2.873.675.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.719.657.500,00	12.366.239.670,00	84,01	10.756.803.894,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	524.000.000,00	435.791.001,00	83,17	257.900.000,00
Belanja Pemeliharaan	72.047.016.249,00	62.581.364.977,00	86,86	39.082.519.196,61
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.601.616.856,00	13.004.280.658,00	69,91	14.456.627.968,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.776.590.539,00	18.812.167.065,00	90,55	13.684.567.108,61
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.313.808.854,00	30.519.431.762,00	94,45	10.436.599.120,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	117.975.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	257.000.000,00	147.485.492,00	57,39	386.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	41.827.492.950,00	17.712.504.129,00	42,35	42.357.101.284,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.661.791.000,00	17.269.730.815,00	51,30	41.453.576.424,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.165.701.950,00	442.773.314,00	5,42	903.524.860,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95.746.528.759,00	86.242.783.490,00	90,07	73.478.890.470,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.833.585.000,00	24.111.828.300,00	93,34	21.054.685.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.912.943.759,00	62.130.955.190,00	88,87	52.424.205.470,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	64.308.677.923,84
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	64.308.677.923,84
Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.372.100.151,00	65.881.685.094,50	99,26	711.894.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	65.687.310.151,00	65.389.584.494,50	99,55	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	244.950.000,00	235.773.500,00	96,25	233.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	439.840.000,00	256.327.100,00	58,28	478.304.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.221.284.000,00	4.837.790.069,00	92,66	4.539.213.328,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.221.284.000,00	4.837.790.069,00	92,66	4.539.213.328,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.442.559.404,00	99.320.827.429,77	96,02	88.168.885.329,43
Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.442.559.404,00	99.320.827.429,77	96,02	88.168.885.329,43
Jumlah	1.101.918.742.705,00	930.635.532.570,44	84,46	937.807.065.343,50





Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Barang lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Namun demikian, terdapat penurunan dalam Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - b. Realisasi Belanja Jasa lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi TA 2025 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, dan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan. Namun demikian terdapat peningkatan pada realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud;
 - c. Realisasi Belanja Pemeliharaan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Namun demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud;
 - d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi TA 2025 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - e. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS lebih rendah realisasi TA 2024. Hal ini dikarenakan belanja ini dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa BOSP berkaitan dengan adanya perubahan nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOS menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi secara signifikan disebabkan oleh perubahan nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOS menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - h. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi TA 2024; dan
 - i. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi TA 2024.





2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Subsidi TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada BUMD	46.800.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD pada TA 2025 lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dikarenakan tidak terdapat realisasi belanja subsidi pada TA 2025; dan
 - Belanja subsidi kepada BUMD tahun 2025 tidak direalisasikan karena audit eksternal terhadap calon penerima subsidi belum dilaksanakan.
- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2c Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	8.274.715.735,00	82,75	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	8.274.715.735,00	82,75	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	193.970.307.711,00	190.079.699.897,00	97,99	150.063.615.873,85
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.378.567.711,00	59.032.552.647,00	97,77	59.111.764.401,85
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	594.000.000,00	594.000.000,00	100,00	800.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	132.997.740.000,00	130.453.147.250,00	98,09	89.520.271.472,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	631.580.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	42.480.670.000,00	41.822.118.251,00	98,45	40.270.678.330,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	42.480.670.000,00	41.822.118.251,00	98,45	40.270.678.330,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.707.940.000,00	1.707.940.000,00	100,00	1.639.370.001,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.707.940.000,00	1.707.940.000,00	100,00	1.639.370.001,00
Belanja Hibah Dana BOSP	13.921.180.000,00	13.271.292.850,00	95,33	13.213.512.648,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	10.965.440.000,00	10.657.327.500,00	97,19	10.252.291.080,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.955.740.000,00	2.613.965.350,00	88,44	2.961.221.568,00
Jumlah	262.080.097.711,00	255.155.766.733,00	97,36	205.187.176.852,85

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan dalam realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Belanja ini baru dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada TA 2025 memiliki realisasi yang lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi terjadi pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Sedangkan terdapat penurunan dalam realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Dana BOS terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Realisasi TA 2025 lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik memiliki realisasi sesuai dengan anggaran TA 2025 dan lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/787/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2024-2029; dan
 - Belanja Hibah Dana BOSP pada TA 2025 memiliki realisasi yang lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Pada TA 2025, terjadi peningkatan realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sedangkan terjadi penurunan realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat seluruhnya merupakan Belanja Hibah Barang yang digunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Polsek Denpasar Selatan Polresta Denpasar





yang direalisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/857/HK/2025 tentang Penerima Hibah Berupa Barang Kepada Pemerintah Pusat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp8.274.715.735,00.

3. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:
 - 1) Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Kota Denpasar yang direalisasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/2135/HK/2025 tentang Seminar Pekan Dedikasi dan Karya Pemuda Indonesia sejumlah Rp100.000.000,00;
 - 2) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar yang direalisasikan pada Dinas Kesehatan sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3/123/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Palang Merah Indonesia dengan jumlah Rp3.867.426.847,00;
 - 3) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Denpasar yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/201/HK/2025 dan 100.3.3.3/1649/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Denpasar dengan jumlah total Rp52.438.228.200,00;
 - 4) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/215/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar dengan jumlah Rp936.000.600,00;
 - 5) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang direalisasikan pada Dinas Sosial sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/39/HK/2025 tentang Penerima Hibah Uang Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Denpasar dengan jumlah Rp199.997.000,00;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diberikan kepada RSU Prima Medika Denpasar yang direalisasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Surat Pernyataan Walikota Denpasar Nomor 400.13.1/2910/DP3AP2KB/2024 Perihal Arahan Kebijakan Usulan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana (KB) TA 2025 dengan jumlah Rp1.490.900.000,00;
 - c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar:
 - 1) Yayasan Sisyaadhika Suraksa SMP Pemecutan Denpasar yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/337/HK/2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah total Rp350.000.000,00;
 - 2) Yayasan Pembangunan Banjar Pegok yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor





- 100.3.3.3/723/HK/2025 tentang Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga/ Organisasi Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dengan jumlah Rp175.000.000,00;
- 3) Muaythai Indonesia Family Fighter sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/637/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Muaythai Indonesia Family Fighter dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- 4) Yayasan SD Mustika sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/468/HK/2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah Rp19.000.000,00;
- d. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan:
- 1) Banjar Adat, Pengempon Pura, Yayasan dan Sejenisnya yang direalisasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/342/HK/2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1620/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/342/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan jumlah total Rp11.735.700.000,00;
- 2) Lembaga adat/budaya yang direalisasikan pada Dinas Kebudayaan sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/386/HK/2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat dengan jumlah total Rp4.637.400.000,00 dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1585/HK/2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat dengan jumlah total Rp6.603.000.000,00;
- 3) Pasar Penatih, Desa Adat Penatih, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur dan Pasar Batan Kendal, Banjar Suwung Batan Kendal Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan yang direalisasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/115/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kota Denpasar dengan jumlah Rp305.390.000,00;
- 4) Perumahan dalam Menunjang Fungsi Hunian yang direalisasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sesuai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1626/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/347/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan jumlah Rp84.369.250.000,00;
- e. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan:
- 1) Lembaga adat berupa hibah sepeda motor operasional yang direalisasikan pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/2069/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kota Denpasar dengan jumlah Rp1.364.717.250,00; dan





- 2) Merajan/pura di dalam/luar Kota Denpasar yang direalisasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1627/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/348/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan jumlah Rp21.262.490.000,00.
4. Belanja Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan dasar swasta selama TA 2025 yang disalurkan secara langsung ke masing-masing satuan pendidikan.
5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2024-2029 yang didasarkan pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/787/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2024-2029, dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025

Partai Politik	Tahun 2025
	Jumlah
DPC Partai Demokrat	87.470.000,00
DPC Partai Gerindra	320.570.000,00
DPD Partai Nasdem	57.835.000,00
DPD Partai Solidaritas Indonesia	106.495.000,00
DPD Partai Gelora	46.780.000,00
DPD Partai Golkar	250.305.000,00
DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	838.485.000,00
Jumlah	1.707.940.000,00

6. Belanja Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada lembaga pendidikan PAUD dan Kesetaraan.
7. Rincian Belanja Hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2d Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 27 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.002.160.000,00	2.933.175.000,00	97,70	2.325.125.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.002.160.000,00	2.933.175.000,00	97,70	2.325.125.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.600.000.000,00	3.459.727.728,00	96,10	3.371.418.829,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.600.000.000,00	3.459.727.728,00	96,10	3.371.418.829,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.159.500.000,00	1.039.500.000,00	89,65	2.124.325.000,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.159.500.000,00	1.039.500.000,00	89,65	2.124.325.000,00
Jumlah	7.761.660.000,00	7.432.402.728,00	95,76	7.820.868.829,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Realisasi ini seluruhnya berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu;
 - b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Realisasi ini seluruhnya berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga; dan
 - c. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Realisasi ini seluruhnya merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direalisasikan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/189/HL/2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Siswa Miskin, 100.3.3.3/503/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Direncanakan Kepada Individu, 100.3.3.3/1677/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Siswa Miskin, dan 100.3.3.3/2142/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Direncanakan Kepada Individu.
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direalisasikan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang digunakan dalam rangka Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/398/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan 100.3.3.3/1635/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor. 100.3.3.3/398/HK/2025 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direalisasikan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1660/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Denpasar.
5. Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2e Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2. Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025



direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	164.192.887.500,00	6.726.112.218,00	4,10	2.707.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.270.536.604,00	185.238.091.071,00	92,96	172.301.850.123,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	258.418.995.872,00	239.885.865.559,00	92,83	105.439.291.215,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	356.448.030.800,00	332.924.809.582,00	93,40	177.787.346.159,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.258.255.800,00	9.419.135.048,00	91,82	8.734.655.059,80
Belanja Modal Aset Lainnya	692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00
Jumlah	989.281.447.076,00	774.880.786.924,00	78,33	465.354.104.773,90

Penjelasan:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	164.192.887.500,00	6.726.112.218,00	4,10	2.707.000,00
Belanja Modal Tanah Persil	7.242.907.500,00	6.726.112.218,00	92,86	2.707.000,00
Belanja Modal Lapangan	156.949.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	164.192.887.500,00	6.726.112.218,00	4,10	2.707.000,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Pada TA 2025, realisasi ini berasal dari pembuatan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Denpasar dengan jumlah Rp984.000,00 serta Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Layanan RSUD Wangaya dengan jumlah Rp6.725.128.218,00; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan baru dianggarkan pada TA 2025 namun demikian tidak terealisasi pada TA 2025. Belanja Modal ini dianggarkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang rencananya diadakan untuk menindaklanjuti kajian Kepala BPKAD Kota Denpasar terkait SE Gubernur Bali No.B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DLHK tentang Penghentian Operasional *Open Dumping* TPA Regional Sarbagita Suwung. Pemerintah Kota Denpasar telah menganggarkan pembelian tanah untuk penanganan sampah di sekitar wilayah TPA Suwung. Namun realisasi terkendala waktu yang dibutuhkan pada proses pengadaan





tanah untuk pengelolaan persampahan di sekitar wilayah TPA Suwung tidak mencukupi karena tidak semua pemilik lahan sepakat untuk menjual tanahnya.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	33.676.676.500,00	31.377.451.437,00	93,17	15.359.820.500,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	31.506.200.000,00	29.272.549.937,00	92,91	14.935.250.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	2.170.476.500,00	2.104.901.500,00	96,98	424.570.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan	62.951.020.000,00	60.458.600.363,00	96,04	78.764.180.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	61.906.020.000,00	59.525.351.129,00	96,15	77.749.430.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	660.000.000,00	559.999.234,00	84,85	1.014.750.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	385.000.000,00	373.250.000,00	96,95	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.477.500.000,00	1.393.583.400,00	94,32	1.087.330.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.437.500.000,00	1.375.363.000,00	95,68	1.086.930.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	40.000.000,00	18.220.400,00	45,55	400.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.576.018.970,00	18.634.756.508,00	86,37	18.803.022.018,00
Belanja Modal Alat Kantor	3.098.338.970,00	2.835.879.833,00	91,53	3.900.218.016,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.399.153.000,00	15.729.679.725,00	85,49	14.841.704.002,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	78.527.000,00	69.196.950,00	88,12	61.100.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.718.437.220,00	8.101.151.710,00	83,36	6.892.512.404,00
Belanja Modal Alat Studio	8.371.310.500,00	6.831.649.976,00	81,61	6.014.912.404,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	1.086.626.720,00	1.022.426.733,00	94,09	877.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	235.500.000,00	222.075.001,00	94,30	0,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.447.629.857,00	21.541.652.241,00	95,96	15.928.081.228,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	22.447.629.857,00	21.541.652.241,00	95,96	15.910.281.228,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.169.720.476,00	1.092.399.026,00	93,39	1.038.171.180,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.102.920.476,00	1.035.919.450,00	93,93	981.716.180,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	66.800.000,00	56.479.576,00	84,55	43.055.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
Belanja Modal Komputer	14.989.637.500,00	13.755.864.860,00	91,77	16.164.877.446,00
Belanja Modal Komputer Unit	10.522.988.000,00	9.762.959.007,00	92,78	11.222.073.460,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.466.649.500,00	3.992.905.853,00	89,39	4.942.803.986,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	54.365.000,00	47.298.994,00	87,00	0,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Sumur	54.365.000,00	47.298.994,00	87,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	966.780.000,00	865.402.000,00	89,51	625.600.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	927.780.000,00	842.092.000,00	90,76	508.600.000,00
Belanja Modal Alat SAR	39.000.000,00	23.310.000,00	59,77	117.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	12.923.100.000,00	11.289.061.773,00	87,36	2.490.982.647,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	12.923.100.000,00	11.289.061.773,00	87,36	2.490.982.647,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	11.803.415.738,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	11.803.415.738,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.794.422.716,00	12.659.262.216,00	98,94	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	12.771.172.716,00	12.642.762.216,00	98,99	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	23.250.000,00	16.500.000,00	70,97	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.525.228.365,00	4.021.606.543,00	88,87	3.290.156.962,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.525.228.365,00	4.021.606.543,00	88,87	3.290.156.962,00
Jumlah	199.270.536.604,00	185.238.091.071,00	92,96	172.301.850.123,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Modal Alat Besar lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat dan realisasi Belanja Modal Alat Bantu. Peningkatan signifikan karena pembelian mesin pengolah sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan pembelian *portable pump* sebagai alat sedot banjir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor. Namun demikian, terdapat peningkatan realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, yaitu pembelian kendaraan bus listrik di Dinas Perhubungan sebagai moda transportasi anak sekolah yang ramah lingkungan untuk menunjang Kawasan Rendah Emisi Sanur sesuai implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur dan pembelian kendaraan di Sekretariat Daerah;
 - Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dan Belanja Modal Alat Ukur;
 - Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Alat Kantor. Sedangkan realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga dan Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat mengalami peningkatan;





- e. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Studio, Belanja Modal Alat Komunikasi, Belanja Modal Peralatan Pemancar, dan Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi. Peningkatan signifikan karena pembelian *videotron outdoor* di Badan Pendapatan sebagai media penyebaran informasi terkait pajak yang dipasang di seluruh kecamatan;
- f. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan signifikan disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran, yaitu pembelian *High Power Holmium Laser*, *USG Radiologi* dan *Dental Panoramic* di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;
- g. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dan Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah. Sedangkan realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika tidak dianggarkan di TA 2025;
- h. Realisasi Belanja Modal Komputer lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer;
- i. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini dikarenakan tidak terdapat realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian pada TA 2024, sedangkan pada TA 2025 terdapat realisasi berupa Belanja Modal Sumur;
- j. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Pelindung walaupun terdapat penurunan dalam Belanja Modal Alat SAR;
- k. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, yaitu pembelian kamera PTZ (*Pan-Tilt-Zoom*) di Dinas Perhubungan untuk memantau pergerakan lalu lintas dan dipasang di seluruh kecamatan;
- l. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS lebih rendah realisasi TA 2024. Hal ini dikarenakan belanja ini dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP berkaitan dengan adanya perubahan nomenklatur Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;
- m. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Peningkatan realisasi secara signifikan disebabkan oleh perubahan nomenklatur Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan





- n. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun demikian, realisasi TA 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	235.818.952.872,00	218.863.626.724,00	92,81	99.887.799.681,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	235.818.952.872,00	218.863.626.724,00	92,81	99.887.799.681,00
Belanja Modal Monumen	12.000.000.000,00	11.660.049.799,00	97,17	485.620.340,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	12.000.000.000,00	11.660.049.799,00	97,17	485.620.340,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.489.043.000,00	6.053.488.636,00	93,29	1.885.820.124,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.489.043.000,00	6.053.488.636,00	93,29	1.885.820.124,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.111.000.000,00	3.308.700.400,00	80,48	3.180.051.070,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.111.000.000,00	3.308.700.400,00	80,48	3.180.051.070,00
Jumlah	258.418.995.872,00	239.885.865.559,00	92,83	105.439.291.215,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi Belanja Modal Gedung disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, yaitu termasuk pembangunan gedung tempat pendidikan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, pembangunan TPS3R Desa Pemecutan Kaja dan penataan akses dan lobi Gedung Graha Sewaka Dharma di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Realisasi Belanja Modal Monumen lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Namun demikian realisasi TA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2024 yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, yaitu Rekonstruksi Monumen Puputan Badung di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - c. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 serta realisasi TA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2024 yang





disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, yaitu pembangunan tembok penyengker sekolah di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan

- d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024.
2. Dari seluruh Belanja Modal TA 2025 terdapat *Detail Engineering Design* (DED) yang masih tercatat di Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.351.766.948,60.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3c Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	275.643.964.142,00	259.228.056.193,00	94,04	156.674.223.313,00
Belanja Modal Jalan	272.044.828.142,00	255.782.684.792,00	94,02	148.319.953.423,00
Belanja Modal Jembatan	3.599.136.000,00	3.445.371.401,00	95,73	8.354.269.890,00
Belanja Modal Bangunan Air	59.345.174.658,00	56.951.868.467,00	95,97	14.918.383.158,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	58.561.500.000,00	56.203.384.941,00	95,97	14.914.971.018,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	683.322.658,00	650.245.526,00	95,16	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	100.352.000,00	98.238.000,00	97,89	3.412.140,00
Belanja Modal Instalasi	15.246.792.000,00	11.422.948.283,00	74,92	4.416.208.502,10
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	64.503.000,00	36.261.344,00	56,22	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.459.789.000,00	1.350.524.600,00	92,52	1.690.876.752,10
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.997.500.000,00	793.626.841,00	39,73	229.948.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	11.725.000.000,00	9.242.535.498,00	78,83	2.495.383.750,00
Belanja Modal Jaringan	6.016.000.000,00	5.274.708.939,00	87,68	1.678.532.186,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.220.000.000,00	1.798.113.000,00	81,00	909.261.050,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	3.796.000.000,00	3.476.595.939,00	91,59	642.951.636,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	126.319.500,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	196.100.000,00	47.227.700,00	24,08	99.999.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	196.100.000,00	47.227.700,00	24,08	99.999.000,00
Jumlah	356.448.030.800,00	332.924.809.582,00	93,40	177.787.346.159,10

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:





- a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Jalan walaupun terdapat penurunan dalam Belanja Modal Jembatan;
 - b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dan Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
 - c. Realisasi Belanja Modal Instalasi lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku, Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah, dan Belanja Modal Instalasi Lain. Sedangkan Belanja Modal Instalasi Air Kotor mengalami penurunan;
 - d. Realisasi Belanja Modal Jaringan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Jaringan Air Minum dan Belanja Modal Jaringan Listrik. Sedangkan realisasi Belanja Modal Jaringan Telepon tidak dianggarkan di TA 2025; dan
 - e. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2025 lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3d Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	231.700.000,00	185.947.588,00	80,25	22.000.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	30.000.000,00	29.850.000,00	99,50	22.000.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	31.700.000,00	30.847.588,00	97,31	0,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	170.000.000,00	125.250.000,00	73,68	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.530.149.500,00	1.386.282.196,00	90,60	1.592.185.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.487.737.500,00	1.344.013.196,00	90,34	1.502.185.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	42.412.000,00	42.269.000,00	99,66	90.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	5.367.000.000,00	4.787.224.564,00	89,20	3.328.016.495,80
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	5.367.000.000,00	4.787.224.564,00	89,20	3.328.016.495,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.792.453.564,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.792.453.564,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.129.406.300,00	3.059.680.700,00	97,77	0,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	3.129.406.300,00	3.059.680.700,00	97,77	0,00
Jumlah	10.258.255.800,00	9.419.135.048,00	91,82	8.734.655.059,80

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, dan Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan;
 - b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
 - c. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024;
 - d. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS lebih rendah realisasi TA 2024. Hal ini dikarenakan belanja ini dianggarkan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP berkaitan dengan adanya perubahan nomenklatur Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
 - e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025. Peningkatan realisasi secara signifikan disebabkan oleh perubahan nomenklatur Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3e Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00
Jumlah	692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah





Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi TA 2025 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3f Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024, yaitu saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 35 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	14.688.066.179,00	6.874.292.006,00	46,80	2.415.538.991,00

Penjelasan:

1. Anggaran Belanja Tidak Terduga mengalami fluktuasi akibat beberapa kondisi yang terjadi. Belanja Tidak Terduga semula dianggarkan sebesar Rp20.031.400.000,00 dalam APBD Induk TA 2025. Dalam pergeseran I, anggaran BTT sebesar Rp3.059.794.502,00. Kemudian mengalami kenaikan dalam APBD Pergeseran II dan APBD Pergeseran III masing-masing menjadi sebesar Rp226.367.952.642,00 dan Rp209.503.118.942,00. Selanjutnya mengalami penurunan dan kenaikan dalam APBD Pergeseran IV dan APBD Pergeseran V (APBD Perubahan) menjadi Rp21.021.937.736,00 dan Rp39.143.141.667,00. Serta secara berturut-turut mengalami penurunan pada APBD Pergeseran VI, APBD Pergeseran VII, dan terakhir dalam APBD Pergeseran VIII dengan anggaran masing-masing sebesar Rp18.990.723.179,00, Rp18.044.166.179,00, dan Rp14.688.066.179,00.
2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu Realisasi Belanja Tidak Terduga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 sejalan dengan adanya peningkatan kondisi yang perlu dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bantuan pasca bencana, restitusi pajak dan retribusi, pengembalian dana BOP Paud dan TK Tahun 2024, bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat, pengembalian sisa dana BKK ke Pemerintah Provinsi Bali, santunan duka cita, maupun belanja tidak terduga lainnya terutama berkaitan dengan bencana banjir di Kota Denpasar pada tahun 2025. Pengeluaran belanja tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer yang dianggarkan





dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	217.815.370.690,00	217.815.370.690,00	100,00	111.797.414.525,00
Belanja Bantuan Keuangan	201.134.601.120,00	200.954.601.120,00	99,91	139.266.531.478,00
Jumlah	418.949.971.810,00	418.769.971.810,00	99,96	251.063.946.003,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	215.645.287.957,00	215.645.287.957,00	100,00	110.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.170.082.733,00	2.170.082.733,00	100,00	1.797.414.525,00
Jumlah	217.815.370.690,00	217.815.370.690,00	100,00	111.797.414.525,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bagi Hasil pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sesuai dengan anggaran TA 2025 serta mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2024 karena adanya peningkatan alokasi anggaran pendapatan pajak daerah; dan
 - b. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sesuai dengan anggaran TA 2025 serta mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2024 karena adanya peningkatan alokasi anggaran pendapatan retribusi daerah.
2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa disalurkan kepada 27 desa yang didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, serta mengacu pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1897/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/664/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2025 terdiri dari alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 dan pembayaran kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 dan 2024 atas temuan Inspektorat Provinsi Bali, dengan jumlah masing-masing untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 adalah sebesar Rp14.658.750.195,00, Rp29.986.537.762,00, dan Rp171.000.000.000,00. Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:





Tabel 5. 38 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

No	Nama Desa	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa			Total Transfer
		Transfer 2025 atas TA 2023	Transfer 2025 atas TA 2024	Transfer 2025 atas TA 2025	
1	Dangin Puri Kaja	469.936.152,00	949.908.068,00	5.114.141.394,00	6.533.985.614,00
2	Dangin Puri Kangin	363.339.508,00	715.572.724,00	4.279.384.287,00	5.358.296.519,00
3	Dangin Puri Kauh	338.560.528,00	712.506.701,00	4.000.894.692,00	5.051.961.921,00
4	Dangin Puri Kelod	558.044.986,00	943.519.379,00	5.729.299.611,00	7.230.863.976,00
5	Dauh Puri Kaja	463.361.852,00	830.496.922,00	4.683.774.141,00	5.977.632.915,00
6	Dauh Puri Kangin	329.006.062,00	714.841.432,00	3.931.378.338,00	4.975.225.832,00
7	Dauh Puri Kauh	611.005.012,00	993.964.525,00	6.013.470.585,00	7.618.440.122,00
8	Dauh Puri Kelod	1.187.278.692,00	1.434.577.343,00	8.222.001.251,00	10.843.857.286,00
9	Kesiman Kertalangu	464.149.679,00	1.151.374.819,00	6.999.131.028,00	8.614.655.526,00
10	Kesiman Petilan	338.937.252,00	1.009.457.236,00	5.246.525.336,00	6.594.919.824,00
11	Padang Sambian Kaja	699.686.385,00	1.291.621.760,00	7.211.155.420,00	9.202.463.565,00
12	Padangsambian Kelod	742.283.435,00	1.704.849.158,00	10.071.010.860,00	12.518.143.453,00
13	Peguyangan Kaja	338.156.884,00	788.664.901,00	4.473.777.541,00	5.600.599.326,00
14	Peguyangan Kangin	338.889.237,00	861.681.968,00	4.896.250.434,00	6.096.821.639,00
15	Pemecutan Kaja	671.266.086,00	1.343.190.287,00	7.443.077.652,00	9.457.534.025,00
16	Pemecutan Kelod	1.197.461.080,00	1.802.709.418,00	11.524.701.486,00	14.524.871.984,00
17	Pemogan	469.359.484,00	1.564.247.176,00	7.254.642.502,00	9.288.249.162,00
18	Penatih Dangin Puri	327.398.909,00	837.138.770,00	4.758.706.813,00	5.923.244.492,00
19	Sanur Kaja	873.329.470,00	1.615.804.187,00	9.522.608.150,00	12.011.741.807,00
20	Sanur Kauh	774.829.840,00	2.014.984.733,00	11.180.164.259,00	13.969.978.832,00
21	Sidakarya	342.250.166,00	874.272.768,00	6.734.008.908,00	7.950.531.842,00
22	Sumerta Kaja	339.517.399,00	696.935.316,00	4.033.229.160,00	5.069.681.875,00
23	Sumerta Kauh	328.561.130,00	682.722.455,00	3.961.613.831,00	4.972.897.416,00
24	Sumerta Kelod	955.168.110,00	1.810.448.992,00	9.089.318.827,00	11.854.935.929,00
25	Tegal Harum	368.339.314,00	793.709.422,00	4.372.509.915,00	5.534.558.651,00
26	Tegal Kertha	347.149.407,00	749.664.440,00	4.338.694.074,00	5.435.507.921,00
27	Ubung Kaja	421.484.136,00	1.097.672.862,00	5.914.529.505,00	7.433.686.503,00
Jumlah		14.658.750.195,00	29.986.537.762,00	171.000.000.000,00	215.645.287.957,00

3. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 27 desa yang didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa serta mengacu pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1897/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/664/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2025 terdiri dari alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025 dan pembayaran kekurangan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023 dan 2024 atas temuan Inspektorat Provinsi Bali, dengan jumlah masing-masing untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 adalah sebesar Rp208.999.122,00, Rp481.517.163,00, dan Rp1.479.566.448,00. Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:





**Tabel 5. 39 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
Tahun 2025**

No	Nama Desa	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa			Total Transfer
		Transfer 2025 atas TA 2023	Transfer 2025 atas TA 2024	Transfer 2025 atas TA 2025	
1	Dangin Puri Kaja	7.039.754,00	18.701.742,00	50.537.024,00	76.278.520,00
2	Dangin Puri Kangin	6.827.967,00	26.822.110,00	50.841.506,00	84.491.583,00
3	Dangin Puri Kauh	6.296.115,00	16.368.905,00	49.855.672,00	72.520.692,00
4	Dangin Puri Kelod	6.516.092,00	15.249.389,00	48.046.323,00	69.811.804,00
5	Dauh Puri Kaja	5.099.926,00	17.327.914,00	44.945.883,00	67.373.723,00
6	Dauh Puri Kangin	4.889.943,00	12.306.107,00	40.017.637,00	57.213.687,00
7	Dauh Puri Kauh	8.965.052,00	13.566.618,00	45.574.629,00	68.106.299,00
8	Dauh Puri Kelod	5.391.915,00	12.921.711,00	46.244.809,00	64.558.435,00
9	Kesiman Kertalangu	12.399.056,00	15.967.583,00	62.050.618,00	90.417.257,00
10	Kesiman Petilan	5.770.467,00	14.296.657,00	53.683.258,00	73.750.382,00
11	Padang Sambian Kaja	8.251.910,00	19.122.467,00	59.808.613,00	87.182.990,00
12	Padangsambian Kelod	11.575.415,00	23.420.336,00	61.303.417,00	96.299.168,00
13	Peguyangan Kaja	6.016.768,00	15.635.467,00	46.304.549,00	67.956.784,00
14	Peguyangan Kangin	6.117.918,00	15.231.549,00	47.266.436,00	68.615.903,00
15	Pemecutan Kaja	11.627.838,00	37.998.302,00	80.948.179,00	130.574.319,00
16	Pemecutan Kelod	13.052.125,00	20.832.099,00	81.203.350,00	115.087.574,00
17	Pemogan	10.149.635,00	37.193.499,00	95.448.040,00	142.791.174,00
18	Penatih Dangin Puri	5.232.787,00	13.735.865,00	46.083.007,00	65.051.659,00
19	Sanur Kaja	8.119.008,00	11.442.110,00	52.575.048,00	72.136.166,00
20	Sanur Kauh	7.499.832,00	11.717.449,00	63.465.422,00	82.682.703,00
21	Sidakarya	8.006.250,00	25.882.497,00	60.420.391,00	94.309.138,00
22	Sumerta Kaja	6.576.752,00	13.739.303,00	42.338.205,00	62.654.260,00
23	Sumerta Kauh	4.958.183,00	12.660.887,00	40.592.669,00	58.211.739,00
24	Sumerta Kelod	9.896.799,00	14.012.057,00	47.363.883,00	71.272.739,00
25	Tegal Harum	6.400.014,00	14.863.621,00	49.636.192,00	70.899.827,00
26	Tegal Kertha	6.816.608,00	15.049.634,00	48.883.067,00	70.749.309,00
27	Ubung Kaja	9.504.993,00	15.451.285,00	64.128.621,00	89.084.899,00
Jumlah		208.999.122,00	481.517.163,00	1.479.566.448,00	2.170.082.733,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	14.029.778.120,00	14.029.778.120,00	100,00	0,00
Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	14.029.778.120,00	14.029.778.120,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00	12.800.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00	12.800.000.000,00





Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.604.823.000,00	149.424.823.000,00	99,88	126.466.531.478,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.604.823.000,00	149.424.823.000,00	99,88	126.466.531.478,00
Jumlah	201.134.601.120,00	200.954.601.120,00	99,91	139.266.531.478,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi pada TA 2025 terealisasi seluruhnya. Realisasi ini sekaligus lebih tinggi dibandingkan TA 2024, karena tidak terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi pada TA 2024. Belanja ini merupakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kota Denpasar kepada Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota terealisasi seluruhnya dan lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kota Denpasar kepada Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem; dan
 - c. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2025 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Peningkatan realisasi TA 2025 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kota Denpasar dalam menyalurkan dana Belanja Bantuan Keuangan didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Adat, Banjar Adat dan *Sekaa Teruna*.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5. 41 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36
Pengeluaran Pembiayaan	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00
Jumlah	699.051.944.206,00	699.051.944.206,51	100,00	476.611.787.235,36

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 5. 42 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36

Penjelasan:

Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sesuai dengan anggaran TA 2025. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dikarenakan terdapat peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024, yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian				Tahun 2025			Tahun 2024
				Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD				269.024.927.034,00	269.024.927.034,51	100,00	148.638.366.955,36
Pelampauan	Penerimaan	PAD-Pajak Daerah		231.895.412.781,00	231.895.412.781,15	100,00	116.777.676.808,36
Pelampauan	Penerimaan	PAD-Retribusi Daerah		17.138.934.014,00	17.138.934.014,36	100,00	2.089.991.211,00
Pelampauan	Penerimaan	PAD-Lain-lain PAD yang Sah		19.990.580.239,00	19.990.580.239,00	100,00	29.770.698.936,00
Pelampauan	Penerimaan	Pendapatan		39.726.612.744,00	39.726.612.744,00	100,00	3.752.574.106,00
Transfer							
Pelampauan	Penerimaan	Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat		13.768.545.216,00	13.768.545.216,00	100,00	3.752.574.106,00
Pelampauan	Penerimaan	Pendapatan Transfer antar Daerah		25.958.067.528,00	25.958.067.528,00	100,00	0,00
Pelampauan	Penerimaan	Lain-Lain		16.481.457,00	16.481.457,00	100,00	0,00
Pendapatan Daerah yang Sah							
Pelampauan	Penerimaan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah		16.481.457,00	16.481.457,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja				448.783.922.971,00	448.783.922.971,00	100,00	426.244.846.174,00
Penghematan	Belanja	Belanja Operasi		336.942.833.823,00	336.942.833.823,00	100,00	280.547.336.816,00
Penghematan	Belanja	Belanja Modal		86.109.999.293,00	86.109.999.293,00	100,00	64.653.577.442,00
Sisa Penggunaan	Belanja	Tidak Terduga		25.731.089.855,00	25.731.089.855,00	100,00	81.033.931.916,00
Sisa Belanja	Transfer			0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah				757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36





5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00

Penjelasan:

Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sesuai dengan anggaran TA 2025. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dikarenakan terdapat peningkatan Penyertaan Modal Daerah.

5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
PT BPD Bali	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	85.524.000.000,00
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2025 telah melakukan penyertaan modal pada:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma sebesar Rp7.500.000.000,00. Penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pencairan Dana dan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Tahun Anggaran 2025;
2. PT BPD Bali sebesar Rp50.000.000.000,00 atau sebanyak 50.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 12,15% pada TA 2025. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp300.000.000.000,00. Penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025; dan





3. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebanyak 1000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp4.500.000.000,00. Namun demikian, jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar yang diakui oleh PT Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 1,51% dari keseluruhan modal PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 masih dicatat sebagai Utang Setoran Modal Pemegang Saham dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) per 31 Desember 2025 karena belum disahkan dalam RUPS.

5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5. 46 SiLPA Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah	3.389.044.199.263,00	3.562.778.417.859,95	105,13	3.147.386.812.398,36
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.018.795.135.284,00	2.220.130.658.663,55	109,97	1.668.189.310.265,36
Pendapatan Transfer	1.368.783.619.229,00	1.341.300.762.159,00	97,99	1.458.044.839.972,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.465.444.750,00	1.346.997.037,40	91,92	21.152.662.161,00
Belanja Daerah	4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89	88,48	2.866.446.655.427,21
Belanja Operasi	2.665.176.658.404,00	2.416.572.353.375,89	90,67	2.147.613.065.659,31
Belanja Modal	989.281.447.076,00	774.880.786.924,00	78,33	465.354.104.773,90
Belanja Tidak Terduga	14.688.066.179,00	6.874.292.006,00	46,80	2.415.538.991,00
Belanja Transfer	418.949.971.810,00	418.769.971.810,00	99,96	251.063.946.003,00
Pembiayaan Daerah	699.051.944.206,00	699.051.944.206,51	100,00	476.611.787.235,36
Penerimaan Pembiayaan	757.551.944.206,00	757.551.944.206,51	100,00	578.635.787.235,36
Pengeluaran Pembiayaan	58.500.000.000,00	58.500.000.000,00	100,00	102.024.000.000,00
Jumlah	0,00	644.732.957.950,57	0,00	757.551.944.206,51

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp644.732.957.950,57 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Rincian SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat Tahun 2025

Uraian	Nilai
Dana SiLPA Terikat	91.303.961.465,87
a. Dana pada Kas di BLUD	29.729.278.233,44
b. Dana pada Kas Dana BOSP	671.941.578,98
c. Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	456.898.478,00
d. Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran yang didalamnya memuat dana:	0,00
1). Pajak Pusat yang belum dibayarkan	0,00
2). Belanja yang belum disampaikan kepada penerima/objek belanja	0,00
e. Dana pada Kas Lainnya yang didalamnya memuat dana:	0,00





Uraian	Nilai
1). Pajak Pusat yang belum dibayarkan	0,00
f. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	55.638.498.306,45
1). Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	49.809.203.161,45
a). Pendapatan Diterima Dimuka	4.406.719.317,95
b). Kewajiban pembayaran Utang Bunga	0,00
c). Kewajiban pembayaran Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
d). Kewajiban pembayaran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
e). Kewajiban pembayaran Utang Belanja	43.224.420.080,79
f). Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	2.178.063.762,71
2). Sisa Dana Transfer Pusat-DAK Fisik yang terdiri dari:	0,00
a). DAK Fisik Bidang Pendidikan	0,00
b). DAK Fisik Bidang Kesehatan	0,00
c). DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana	0,00
3). Sisa Dana Transfer Pusat-DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	3.696.207.745,00
a). Dana Non Fisik-TPG PNSD	2.170.163.140,00
b). DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	230.500.450,00
c). DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.063.207.686,00
d). DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	21.124.800,00
e). DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	32.083.949,00
f). Dana Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	176.277.720,00
g). DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	2.850.000,00
h). DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	13.304.534,00
i). DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	8.300.000,00
j). DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	24.323.500,00
4). Sisa Dana Insentif Fiskal	2.133.087.400,00
a). Dana Insentif Daerah sampai dengan 2025	2.133.087.400,00
g. Dana Alokasi Umum <i>Spesific Grant</i> terdiri dari:	4.349.450.239,00
1). Dana Alokasi Umum-Bidang Pendidikan	854.929.615,00
2). Dana Alokasi Umum-Bidang Kesehatan	3.141.432.158,00
3). Dana Alokasi Umum-Bidang Pekerjaan Umum	129.441.059,00
4). Dana Alokasi Umum-Pendanaan Kelurahan	223.647.407,00
h. Dana Bagi Hasil terdiri dari :	56.344.630,00
1). Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (CHT)	56.344.630,00
i. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :	401.550.000,00
1). Bantuan Keuangan Khusus-Provinsi Bali-Subak dan Subak Abian	1.150.000,00
2). Bantuan Keuangan Khusus-Provinsi Bali-Pengelolaan Sampah	400.400.000,00
Dana SiLPA Non-Terikat	553.428.996.484,70
a. Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
b. Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (BOS Pendamping)	7.500.000,00
c. Dana pada Kas di BLUD	0,00
d. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	555.822.160.074,70
1). Pelampauan Pajak Daerah	164.480.094.512,48
2). Pelampauan Retribusi Daerah	23.280.868.728,51
3). Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,21
4). Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah	13.574.560.138,35
5). Pelampauan Pendapatan Hibah	0,00
6). Pelampauan Dana Darurat	0,00





Uraian	Nilai
7). Pelampauan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
8). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
9). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH PPh Pasal 21	0,00
10). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
11). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00
12). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Minyak Bumi	0,00
13). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Gas Bumi	0,00
14). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00
15). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
16). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
17). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	0,00
18). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	0,00
19). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi	0,00
20). Sisa Dana Transfer Pusat-DBH SDA Perikanan	0,00
21). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU	0,00
22). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00
23). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00
24). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
25). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00
26). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
27). Sisa Dana Transfer Pusat-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
28). Penghematan Belanja	352.085.973.105,15
Jumlah	644.732.957.950,57

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5. 48 Rincian Keberadaan SiLPA Tahun 2025

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	613.867.339.660,15
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.500.000,00
Kas di BLUD	29.729.278.233,44
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOSP	671.941.578,98
Kas Dana BOK Puskesmas	456.898.478,00
Jumlah	644.732.957.950,57

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.8. Saldo Akhir Kas* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir*.





5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Denpasar (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Sisa Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 49 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	737.700.968.617,37	561.810.684.155,39
Kas di Bendahara Penerimaan	419.000,00	32.873.999,38
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.740.861.427,36	12.352.372.623,35
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.979.429.045,00	2.741.495.713,62
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	754.600.894,78	668.207.376,62
Kas Dana BOK Puskesmas	2.375.665.222,00	1.030.153.367,00
Jumlah	757.551.944.206,51	578.635.787.235,36

Saldo di atas merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 50 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	757.551.944.206,51	578.635.787.235,36

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tidak mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 dikarenakan tidak adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *poin 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya*.

5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 51 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024





Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2026 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir*.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 52 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 53 Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	613.867.339.660,15	737.700.968.617,37
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	419.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.500.000,00	0,00
Kas di BLUD	29.729.278.233,44	13.740.861.427,36
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	2.979.429.045,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	671.941.578,98	754.600.894,78
Kas Dana BOK Puskesmas	456.898.478,00	2.375.665.222,00
Jumlah	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)*.

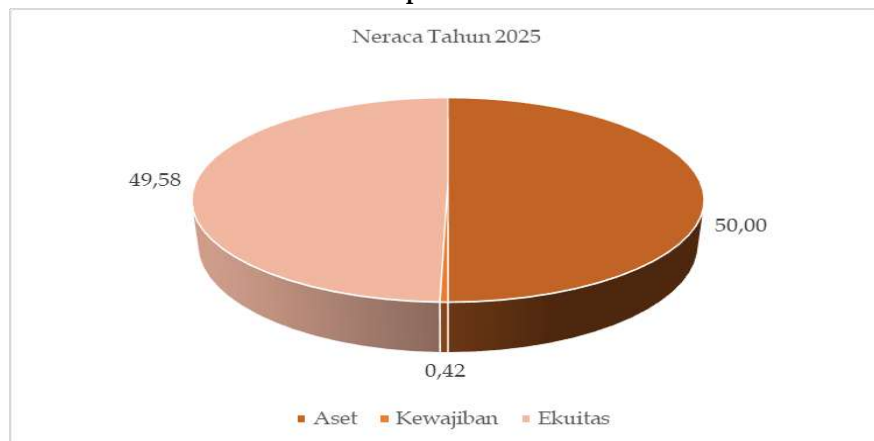
5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kota Denpasar untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:





Gambar 5. 3 Komposisi Neraca Tahun 2025



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Rincian Aset Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	1.022.795.979.569,09	1.132.879.031.197,60	(110.083.051.628,51)	(9,72)
Investasi Jangka Panjang	984.614.508.131,00	907.546.549.551,00	77.067.958.580,00	8,49
Aset Tetap	5.933.074.585.945,47	5.615.643.612.483,52	317.430.973.461,95	5,65
Aset Lainnya	32.880.146.043,32	84.717.633.168,80	(51.837.487.125,48)	(61,19)
Properti Investasi	6.412.500.000,00	6.412.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	7.979.777.719.688,88	7.747.199.326.400,92	232.578.393.287,96	3,00

5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas dan Setara Kas	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51	(112.818.986.255,94)	(14,89)
Piutang Pajak Daerah	719.537.716.373,92	650.922.238.047,20	68.615.478.326,72	10,54
Piutang Retribusi Daerah	16.302.915.516,89	19.447.374.131,40	(3.144.458.614,51)	(16,17)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	26.887.038.525,43	23.656.732.893,05	3.230.305.632,38	13,65
Piutang Transfer Antar Daerah	6.516.345.735,00	50.298.175.523,00	(43.781.829.788,00)	(87,04)
Piutang Lainnya	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(463.995.783.488,20)	(436.260.907.857,13)	(27.734.875.631,07)	6,36
Beban Dibayar Dimuka	6.740.795.833,34	4.948.700.833,34	1.792.095.000,00	36,21
Persediaan	64.771.296.131,14	61.012.076.429,23	3.759.219.701,91	6,16
Jumlah	1.022.795.979.569,09	1.132.879.031.197,60	(110.083.051.628,51)	(9,72)





5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	613.867.339.660,15	737.700.968.617,37	(123.833.628.957,22)	(16,79)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	419.000,00	(419.000,00)	(100,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Kas di BLUD	29.729.278.233,44	13.740.861.427,36	15.988.416.806,08	116,36
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	2.979.429.045,00	(2.979.429.045,00)	(100,00)
Kas Dana BOSP	671.941.578,98	754.600.894,78	(82.659.315,80)	(10,95)
Kas Dana BOK Puskesmas	456.898.478,00	2.375.665.222,00	(1.918.766.744,00)	(80,77)
Jumlah	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51	(112.818.986.255,94)	(14,89)

Penjelasan :

1. Kas di Kas Daerah

Berikut ini merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Tabel 5. 57 Kas di Kas Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	613.867.339.660,15	737.700.968.617,37	(123.833.628.957,22)	(16,79)

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT BPD Bali Cabang Denpasar dengan nomor rekening giro, yaitu 011.01.05.00001-2. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Denpasar yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)*.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Berikut ini merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Tabel 5. 58 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	419.000,00	(419.000,00)	(100,00)

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki saldo kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Berikut ini merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:





Tabel 5. 59 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00

Pemerintah Kota Denpasar memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan kas pada rekening BOS Pendamping SDN 4 Peguyangan yang ditempatkan pada PT BPD Bali Cabang Denpasar dengan nomor rekening giro, yaitu 011.01.05.00520-6. Daftar perhitungan sisa kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada *Lampiran 4 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*. Kas pada rekening BOS Pendamping tersebut telah disetorkan ke kas daerah tanggal 17 Maret 2026 dengan STS Nomor 400.3.10/225/SDN4 PGY/III.

4. Kas di BLUD

Pemerintah Kota Denpasar menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 60 Kas di BLUD Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di BLUD		29.729.278.233,44	13.740.861.427,36	15.988.416.806,08	116,36
Kas di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya		20.644.718.019,01	13.740.861.427,36	6.903.856.591,65	50,24
Kas di Rekening BLUD	011.01.00.02561-6	20.596.715.915,87	13.630.857.161,51	6.965.858.754,36	51,10
Kas di Rekening escrow	011.01.05.00631-6	0,00	105,40	(105,40)	(100,00)
Kas di Bendahara Uang Tunai Penerimaan		48.002.103,14	110.004.160,45	(62.002.057,31)	(56,36)
Kas di BLUD Puskesmas		9.084.560.214,43	0,00	9.084.560.214,43	100,00
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	011.01.05.00597-0	924.069.332,58	0,00	924.069.332,58	100,00
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	011.01.05.00598-3	1.103.575.042,35	0,00	1.103.575.042,35	100,00
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00594-5	824.161.923,10	0,00	824.161.923,10	100,00
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00595-7	844.004.556,12	0,00	844.004.556,12	100,00
UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00596-9	827.801.161,37	0,00	827.801.161,37	100,00
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00601-6	594.164.690,91	0,00	594.164.690,91	100,00
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00602-8	532.684.643,49	0,00	532.684.643,49	100,00
UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00603-1	583.478.624,52	0,00	583.478.624,52	100,00





Uraian	Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00604-2	917.530.247,50	0,00	917.530.247,50	100,00
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	011.01.05.00599-5	1.217.031.463,85	0,00	1.217.031.463,85	100,00
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	011.01.05.00600-4	716.058.528,64	0,00	716.058.528,64	100,00

Saldo Kas di BLUD sesuai dengan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dan Puskesmas se Kota Denpasar. BLUD Rumah Sakit Umum Wangaya dan Puskesmas memiliki saldo kas di rekening BLUD yang ditempatkan pada PT BPD Bali. Rincian saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 5 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Laporan keuangan BLUD telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Hasil Audit Laporan Keuangan BLUD

BLUD	Kantor Akuntan Publik	Nomor Laporan Auditor Independen	Opini
Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Ketut Budiarta dan Anggiriawan	00015/2.1266/AU.5/11/1612-3/1/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	I Gede Oka & Rekan	00048/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	I Gede Oka & Rekan	00049/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara	I Gede Oka & Rekan	00043/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	I Gede Oka & Rekan	00044/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	I Gede Oka & Rekan	00045/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	I Gede Oka & Rekan	00050/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	I Gede Oka & Rekan	00051/2.1274/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	I Gede Oka & Rekan	00052/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	I Gede Oka & Rekan	00053/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	I Gede Oka & Rekan	00046/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	I Gede Oka & Rekan	00047/2.1516/AU.5/11/0463-1/0/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian

5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Berikut ini merupakan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Tabel 5. 62 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	2.979.429.045,00	(2.979.429.045,00)	(100,00)





Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025. Mutasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada dan Lampiran 5a Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025.

6. Kas Dana BOSP

Berikut ini merupakan saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Tabel 5. 63 Kas Dana BOSP Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana BOSP	671.941.578,98	754.600.894,78	(82.659.315,80)	(10,95)

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 yang tersebar pada 187 sekolah negeri di seluruh Kota Denpasar, dengan rincian 166 (seratus enam puluh enam) Sekolah Dasar, 16 (enam belas) Sekolah Menengah Pertama, dan 5 (lima) TK/KB/PKBM. Saldo Kas Dana BOSP pada SD sebesar Rp277.630.630,19, SMP sebesar Rp181.454.048,79, dan TK/KB/PKBM sebesar Rp212.856.900,00. Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada *Lampiran 6, Lampiran 6a, dan Lampiran 6b Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

7. Kas Dana BOK Puskesmas

Berikut ini merupakan saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Tabel 5. 64 Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana BOK Puskesmas	456.898.478,00	2.375.665.222,00	(1.918.766.744,00)	(80,77)

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp456.898.478,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *Lampiran 7 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Pajak Reklame	341.894.225,80	154.218.316,50	187.675.909,30	121,69
Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	341.894.225,80	154.218.316,50	187.675.909,30	121,69
Piutang Pajak Air Tanah	9.085.295.611,00	8.919.927.667,00	165.367.944,00	1,85
Piutang Pajak Air Tanah	9.085.295.611,00	8.919.927.667,00	165.367.944,00	1,85
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	613.637.887.086,00	585.393.214.584,00	28.244.672.502,00	4,82
Piutang PBBP2	613.637.887.086,00	585.393.214.584,00	28.244.672.502,00	4,82
Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	96.472.639.451,12	56.454.877.479,70	40.017.761.971,42	70,88





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	48.079.200.710,63	28.397.701.855,21	19.681.498.855,42	69,31
Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	40.824.749.257,79	23.098.743.593,79	17.726.005.664,00	76,74
Piutang PBJT-Jasa Parkir	4.774.110.366,00	4.010.022.291,00	764.088.075,00	19,05
Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.794.579.116,70	948.409.739,70	1.846.169.377,00	194,66
Jumlah	719.537.716.373,92	650.922.238.047,20	68.615.478.326,72	10,54

Penjelasan :

- Peningkatan Piutang Pajak Reklame dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp187.675.909,30 yang disebabkan oleh:
 - Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Pajak Reklame sebesar Rp6.027.488.823,82;
 - Penurunan nilai piutang akibat pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp5.942.623.658,52; dan
 - Penambahan nilai piutang akibat penyesuaian pokok piutang sebesar Rp102.810.744,00.
- Peningkatan Piutang Pajak Air Tanah dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp165.367.944,00 yang disebabkan oleh:
 - Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Pajak Air Tanah sebesar Rp8.846.774.454,00;
 - Penurunan nilai piutang akibat pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp8.806.491.718,00;
 - Penambahan nilai piutang akibat peningkatan pergerakan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah sebesar Rp20.824,00; dan
 - Penambahan nilai piutang akibat penyesuaian pokok piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp125.064.384,00.
- Peningkatan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp28.244.672.502,00 yang disebabkan oleh:
 - Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp160.547.091.360,00;
 - Penurunan nilai piutang akibat pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp130.536.715.334,00;
 - Penambahan nilai piutang akibat pengakuan lebih bayar pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.660.510,00; dan
 - Penambahan nilai piutang akibat penyesuaian pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp125.064.384,00.
- Peningkatan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp40.017.761.971,42 yang disebabkan oleh:
 - Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp1.046.109.134.904,18;
 - Penurunan nilai piutang akibat pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp1.005.901.148.035,96;
 - Penurunan nilai piutang akibat penurunan pergerakan Utang Kelebihan Pembayaran PBJT sebesar Rp394.679.011,30; dan
 - Penambahan nilai piutang akibat penyesuaian pokok piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp204.454.114,50 yang terdiri dari:





- 1) Penurunan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp25.033.361,70;
 - 2) Peningkatan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp248.144.242,20;
 - 3) Penurunan Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp216.000,00; dan
 - 4) Penurunan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp18.440.766,00.
5. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian pokok Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.336.034.791,50 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penyesuaian tambah pada Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp102.810.744,00 merupakan penyesuaian tambah karena penetapan pajak daerah sebelum TA 2025 sebesar Rp118.863.505,00 dan penyesuaian kurang karena adanya kesalahan sistem sebesar Rp16.052.761,00;
 - b. Penyesuaian tambah pada Piutang Air Tanah sebesar Rp125.064.384,00 karena adanya kesalahan sistem;
 - c. Penyesuaian kurang Piutang PBBP2 sebesar Rp1.768.364.034,00 merupakan penyesuaian ketetapan pajak sebelum TA 2025 karena permohonan dari Wajib Pajak berupa keberatan, pengurangan, pemecahan dan pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - d. Penyesuaian kurang pada Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp25.033.361,70 karena adanya kesalahan sistem;
 - e. Penyesuaian tambah pada Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp248.144.242,20 karena adanya kesalahan sistem;
 - f. Penyesuaian kurang pada Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp216.000,00 karena adanya kesalahan sistem; dan
 - g. Penyesuaian kurang pada Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp18.440.766,00 karena adanya kesalahan sistem.
6. Secara lebih rinci Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 8 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Rincian Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Retribusi Jasa Umum	16.201.623.586,89	19.298.441.431,40	(3.096.817.844,51)	(16,05)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.158.473.586,89	19.140.823.431,40	(2.982.349.844,51)	(15,58)
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	43.150.000,00	157.618.000,00	(114.468.000,00)	(72,62)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	101.291.930,00	148.932.700,00	(47.640.770,00)	(31,99)
Piutang Retribusi Terminal	101.291.930,00	148.932.700,00	(47.640.770,00)	(31,99)
Jumlah	16.302.915.516,89	19.447.374.131,40	(3.144.458.614,51)	(16,17)

Penjelasan:

1. Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp16.158.473.586,89 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Wangaya yang terdiri dari Piutang Umum, Piutang IKS, Piutang BPJS, dan Piutang Covid-19 sejumlah Rp16.099.549.186,89 dan Piutang Retribusi Pelayanan





Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp58.924.400,00. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan piutang macet dari tahun 2011 sebesar Rp43.150.000,00. Penurunan Piutang Retribusi Jasa Umum dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp3.096.817.844,51 yang terdiri dari:

- Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp131.497.766.785,69;
 - Penambahan nilai piutang akibat koreksi piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp696.684.687,30;
 - Penurunan nilai piutang akibat pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp135.235.725.717,50;
 - Penambahan piutang akibat penetapan ketetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp58.924.400,00; dan
 - Penurunan nilai piutang akibat pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp114.468.000,00;
2. Piutang Retribusi Jasa Usaha merupakan Piutang Retribusi Terminal sebesar Rp101.291.930,00. Penurunan Piutang Retribusi Jasa Usaha dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp47.640.770,00 yang terdiri dari:
- Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Retribusi Terminal sebesar Rp185.675.760,00; dan
 - Penurunan nilai piutang akibat pelunasan piutang Retribusi Terminal sebesar Rp233.316.530,00.
3. Secara lebih rinci Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 9 dan 9a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.1.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-lain PAD yang Sah per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.106.666,67	0,00	2.106.666,67	100,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	26.723.717.999,26	23.544.924.804,88	3.178.793.194,38	13,50
Piutang Denda Retribusi Daerah	77.771.147,00	100.395.634,00	(22.624.487,00)	(22,54)
Piutang Pendapatan BLUD	83.442.712,50	11.412.454,17	72.030.258,33	631,15
Jumlah	26.887.038.525,43	23.656.732.893,05	3.230.305.632,38	13,65

Penjelasan:

- Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Piutang Hasil Sewa BMD Sewa Kantin yang terdiri dari:
 - Kantin di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan sebesar Rp1.666.666,67 berdasarkan Perjanjian Sewa antara UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan dengan Warung Umi Nomor 100.3.12/282.1/Pusk IV D.S.2024 / Nomor 001/WARUNG UMI/2024 dengan jangka waktu 1 tahun, yaitu mulai 5 Maret 2024 sampai 5 Maret 2025;





- b. Kantin di UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara sebesar Rp440.000,00. Berdasarkan Perjanjian Sewa antara UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara dengan Penyewa Kantin Nomor 000.2.3.2/219/Pusk III DU/2024 dengan jangka waktu 5 tahun, yaitu mulai 15 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2029.

Rincian selengkapnya Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan seperti tercantum pada *Lampiran 10 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

2. Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.898.930,00	10.092.356,00	(4.193.426,00)	(41,55)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.689.846.974,00	1.743.871.954,00	(54.024.980,00)	(3,10)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	25.027.972.095,26	21.790.960.494,88	3.237.011.600,38	14,85
Jumlah	26.723.717.999,26	23.544.924.804,88	3.178.793.194,38	13,50

Penjelasan:

- a. Penurunan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp4.193.426,00 yang disebabkan oleh:
- 1) Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp209.992,00;
 - 2) Penurunan nilai piutang akibat Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp3.418,00; dan
 - 3) Penurunan nilai piutang akibat koreksi kurang Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp4.400.000,00;
- b. Penurunan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp54.024.980,00 yang disebabkan oleh:
- 1) Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp70.811.014,00;
 - 2) Penurunan nilai piutang akibat Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp4.792.280,00;
 - 3) Penambahan nilai piutang karena pengakuan kelebihan pembayaran dari Pendapatan Denda Pajak Air Tanah yang tidak akan direstitusi atau kompensasi sebesar Rp10.300,00; dan
 - 4) Penurunan nilai piutang akibat koreksi kurang piutang Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp120.054.014,00.
- c. Peningkatan Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp 3.237.011.600,38 yang disebabkan oleh:
- 1) Penambahan nilai piutang akibat penetapan ketetapan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp9.845.176.453,00 yang terdiri dari:
 - a) Piutang Denda atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman berkurang sebesar Rp5.278.389.027,00;
 - b) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Perhotelan berkurang sebesar Rp3.589.352.556,00;
 - c) Piutang Denda atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir berkurang sebesar Rp424.972.827,00; dan





- d) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan berkurang sebesar Rp552.462.043.
- 2) Penurunan nilai piutang akibat Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp671.748.139,00 yang terdiri dari:
 - a) Piutang Denda atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman berkurang sebesar Rp342.710.122,00;
 - b) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Perhotelan berkurang sebesar Rp222.939.045,00;
 - c) Piutang Denda atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir berkurang sebesar Rp45.425.641,00; dan
 - d) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan berkurang sebesar Rp60.673.331,00.
- 3) Penambahan nilai piutang karena pengakuan kelebihan pembayaran dari pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang tidak akan direstitusi atau kompensasi sebesar Rp1.637.505,00 yang terdiri dari:
 - a) Piutang Denda atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman berkurang sebesar Rp351.918,00;
 - b) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Perhotelan berkurang sebesar Rp1.261.582,00; dan
 - c) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan berkurang sebesar Rp24.005,00.
- 4) Penurunan nilai piutang akibat koreksi kurang Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp5.816.391.263,62 yang terdiri dari:
 - a) Piutang Denda atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman berkurang sebesar Rp2.833.677.495,00;
 - b) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Perhotelan berkurang sebesar Rp2.815.183.604,00;
 - c) Piutang Denda atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir berkurang sebesar Rp121.662.955,00; dan
 - d) Piutang Denda atas PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan berkurang sebesar Rp167.530.164,62.

Secara lebih rinci Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025**.

3. Piutang Denda Retribusi Daerah merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar Rp77.771.147,00. Secara lebih rinci Piutang Denda Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025**.
4. Piutang Pendapatan BLUD merupakan piutang atas Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada RSUD Wangaya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Sehat Rumah Sakit Umum Wangaya Kota Denpasar dengan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar Nomor 09/KS/VI/2025 dan 100.3.7/3954/RSUDW tentang Pemanfaatan Lahan Rumah Sakit untuk Usaha Koperasi Pegawai Negeri Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dengan jangka waktu mulai tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2026. Secara lebih rinci Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dapat dilihat pada **Lampiran 11 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025**.

5.3.1.1.5. Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai





kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 69 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	6.516.345.735,00	50.298.175.523,00	(43.781.829.788,00)	(87,04)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	138.145.256,00	19.551.106.321,00	(19.412.961.065,00)	(99,29)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	324.374.272,00	17.061.878.515,00	(16.737.504.243,00)	(98,10)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.025.018.098,00	13.635.679.644,00	(7.610.661.546,00)	(55,81)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	28.808.109,00	49.511.043,00	(20.702.934,00)	(41,81)
Jumlah	6.516.345.735,00	50.298.175.523,00	(43.781.829.788,00)	(87,04)

Penjelasan:

Pengakuan piutang berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/1147/PADFE/BPKAD tanggal 18 Februari 2026 tentang Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2025. Saldo Piutang Bagi Hasil PKB dan BBNKB per 31 Desember 2025 merupakan piutang atas hak bagi hasil pajak provinsi yang berasal dari masa pajak sebelum implementasi kebijakan Opsen Pajak (1-4 Januari 2025). Hal ini sejalan dengan masa transisi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana piutang ini mencerminkan bagian hak Pemerintah Kota atas penerimaan pajak provinsi.

5.3.1.1.6. Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Lainnya	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	0,00	0,00
Jumlah	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	0,00	0,00

Penjelasan :

1. Piutang Lainnya terdiri atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp897.130.991,00 tersebut berasal dari temuan Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan jenis kasus pajak/retribusi tidak disetor atas nama I Wayan Renda dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. I Wayan Renda telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Mei 2010 Nomor 1306/PID.SUS/2010/PN.Dps. Atas hal tersebut, I Wayan Renda telah menjalankan hukuman berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan berupa hukuman





kurungan dan denda ganti rugi. I Wayan Renda juga sudah menerima hukuman diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;

- b. Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp405.566.000,00 tersebut berasal dari temuan BPK yang status penyelesaiannya masih dalam proses atas kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang atas nama A.A Ngurah Oka Yuda dengan status Non Pegawai;
2. Rincian selengkapanya untuk Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 12 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.1.7. Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 71 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	(462.693.086.497,20)	(434.958.210.866,13)	(27.734.875.631,07)	6,38
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(431.711.714.701,52)	(404.388.919.854,52)	(27.322.794.847,00)	6,76
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(7.353.092.336,14)	(8.794.537.012,27)	1.441.444.676,13	(16,39)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(23.628.279.459,54)	(21.774.753.999,34)	(1.853.525.460,20)	8,51
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	0,00
Jumlah	(463.995.783.488,20)	(436.260.907.857,13)	(27.734.875.631,07)	6,36

Penjelasan:

1. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	(32.048.152,69)	(33.441.111,90)	1.392.959,21	(4,17)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(7.664.053.584,81)	(7.462.444.749,28)	(201.608.835,53)	2,70
Penyisihan Piutang PBBP2	(402.523.643.085,06)	(382.014.666.324,50)	(20.508.976.760,56)	5,37
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(8.463.858.081,33)	(4.386.787.737,61)	(4.077.070.343,72)	92,94
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	(75.640.675,50)	(6.844.523,10)	(68.796.152,40)	1.005,13
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	(8.167.902.140,74)	(7.186.814.537,21)	(981.087.603,53)	13,65
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	(342.088.517,34)	(274.432.738,09)	(67.655.779,25)	24,65
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	(1.559.526.384,96)	(901.437.807,51)	(658.088.577,45)	73,00





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	(2.397.658.498,70)	(1.782.830.838,96)	(614.827.659,74)	34,49
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	(3.275.454,00)	(1.637.727,00)	(1.637.727,00)	100,00
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	(13.389.500,50)	(7.844.750,10)	(5.544.750,40)	70,68
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	(64.661.309,01)	(24.020.859,27)	(40.640.449,74)	169,19
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	(207.188.987,05)	(165.868.805,03)	(41.320.182,02)	24,91
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	(196.780.329,83)	(139.847.344,96)	(56.932.984,87)	40,71
Jumlah	(431.711.714.701,52)	(404.388.919.854,52)	(27.322.794.847,00)	6,76

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 8 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 73 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	(1.195.269,50)	0,00	(1.195.269,50)	100,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(7.211.612.086,64)	(8.611.068.107,27)	1.399.456.020,63	(16,25)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(43.150.000,00)	(43.722.340,00)	572.340,00	(1,31)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(97.134.980,00)	(139.746.565,00)	42.611.585,00	(30,49)
Jumlah	(7.353.092.336,14)	(8.794.537.012,27)	1.441.444.676,13	(16,39)

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada *Lampiran 9 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025* serta Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 9a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:



**Tabel 5. 74 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD	(683.033,33)	0,00	(683.033,33)	(100,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron	(1.656.016,16)	(3.659.314,00)	2.003.297,84	(54,75)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	(1.671.630.666,60)	(1.725.105.904,50)	53.475.237,90	(3,10)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(77.771.147,00)	(100.395.634,00)	22.624.487,00	(22,54)
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	(21.516.299,44)	(9.815.748,10)	(11.700.551,34)	119,20
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(9.475.661.390,61)	(8.108.572.193,76)	(1.367.089.196,85)	16,86
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	(8.918.541,40)	(8.850.929,00)	(67.612,40)	0,76
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	(7.630.102.476,02)	(7.701.573.900,62)	71.471.424,60	(0,93)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	(300.190.157,80)	(267.852.167,80)	(32.337.990,00)	12,07
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	(1.888.453.919,28)	(1.783.743.805,78)	(104.710.113,50)	5,87
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	(1.891.002.069,10)	(1.591.264.048,06)	(299.738.021,04)	18,84
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	(7.977.952,50)	(7.084.090,20)	(893.862,30)	12,62
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	(38.819.075,00)	(38.819.075,00)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	(287.438.424,20)	(133.061.142,30)	(154.377.281,90)	116,02





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	(144.504.947,50)	(109.191.598,00)	(35.313.349,50)	32,34
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	(181.953.343,60)	(185.764.448,22)	3.811.104,62	(2,05)
Jumlah	(23.628.279.459,54)	(21.774.753.999,34)	(1.853.525.460,20)	8,51

Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan perhitungan kualitas piutang, yang diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu macet, diragukan, kurang lancar, dan lancar. Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada *Lampiran 10, Lampiran 10a, dan Lampiran 10b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut.

Tabel 5. 75 Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	0,00

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 12 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.1.8. Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Beban Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 76 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Dibayar Dimuka - Sewa	6.391.107.618,34	4.601.816.666,67	1.789.290.951,67	38,88
Beban Dibayar Dimuka - Asuransi	349.688.215,00	346.884.166,67	2.804.048,33	0,81
Jumlah	6.740.795.833,34	4.948.700.833,34	1.792.095.000,00	36,21

Penjelasan:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka- Sewa sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Rincian Beban Dibayar Dimuka - Sewa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Sewa Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)
Sewa Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.750.000,00	93.750.000,00	(25.000.000,00)	(26,67)





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Sewa Gedung Arsip pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
Sewa Tanah Garase Mobil Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	16.666.666,67	41.666.666,67	(25.000.000,00)	(60,00)
Sewa Videotron Pada Kantor Walikota, Bagian Umum Sekretariat Daerah	0,00	202.500.000,00	(202.500.000,00)	(100,00)
Sewa Kendaraan Toyota Zenix G Hybird sejumlah 36 Unit	4.312.473.210,00	4.203.900.000,00	108.573.210,00	2,58
Bangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Sewa Google Drive 2 Terabyte pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.238.575,00	0,00	1.238.575,00	100,00
Sewa Gedung Kelurahan Sumerta pada Kecamatan Denpasar Timur	1.941.979.166,67	0,00	1.941.979.166,67	100,00
Jumlah	6.391.107.618,34	4.601.816.666,67	1.789.290.951,67	38,88

Rincian Beban Dibayar Dimuka - Sewa Tahun 2025 seperti tercantum pada *Lampiran 13 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka- Asuransi sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Beban Dibayar Dimuka - Asuransi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Gedung Dharma Negara Alaya	78.340.577,08	176.925.833,33	(98.585.256,25)	(55,72)
Kantor Sekretariat Daerah dan Gedung Kantor Sewaka Dharma	179.680.971,25	78.291.666,67	101.389.304,58	129,50
Asuransi Pohon Perindang	91.666.666,67	91.666.666,67	0,00	0,00
Jumlah	349.688.215,00	346.884.166,67	2.804.048,33	0,81

Rincian Beban Dibayar Dimuka - Asuransi tahun 2025 seperti tercantum pada *Lampiran 13a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.1.9. Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Rincian Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Barang Pakai Habis	64.771.296.131,14	61.012.076.429,23	3.759.219.701,91	6,16
Bahan	20.645.595.570,15	17.454.157.170,62	3.191.438.399,53	18,28
Suku Cadang	5.185.870.984,67	8.241.827.741,43	(3.055.956.756,76)	(37,08)





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.926.116.429,03	8.663.470.293,00	2.262.646.136,03	26,12
Obat-obatan	18.018.683.194,29	14.346.724.301,98	3.671.958.892,31	25,59
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	9.486.852.603,00	12.009.581.922,00	(2.522.729.319,00)	(21,01)
Natura dan Pakan	508.177.350,00	296.315.000,00	211.862.350,00	71,50
Jumlah	64.771.296.131,14	61.012.076.429,23	3.759.219.701,91	6,16

Penjelasan:

Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara *stock opname*. Pada tahun 2025 dilakukan koreksi pencatatan atas saldo awal persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya sebesar Rp2.943.629,12 yang merupakan penyesuaian pencatatan persediaan. Selain itu terdapat persediaan kedaluwarsa yang tercatat pada UPTD Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp352.110.897,90. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara *stock opname* persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rincian Persediaan dapat dilihat pada *Lampiran 14 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025* dan untuk rincian lengkap Persediaan tahun 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 14a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5. 80 Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	984.614.508.131,00	907.546.549.551,00	77.067.958.580,00	8,49
Jumlah	984.614.508.131,00	907.546.549.551,00	77.067.958.580,00	8,49

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Bergulir kepada Koperasi	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	(161.000.000,00)	(161.000.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian perhitungan Dana Bergulir kepada Koperasi dan Penyisihan Dana Bergulir dapat dilihat pada *Lampiran 15 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.





5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
PT BPD Bali	350.000.000.000,00	300.000.000.000,00	50.000.000.000,00	16,67
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	381.416.732.487,00	351.407.926.335,00	30.008.806.152,00	8,54
Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	239.542.415.959,00	244.005.044.311,00	(4.462.628.352,00)	(1,83)
Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	9.155.359.685,00	8.633.578.905,00	521.780.780,00	6,04
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	28,57
Jumlah	984.614.508.131,00	907.546.549.551,00	77.067.958.580,00	8,49

Penjelasan :

1. PT BPD Bali

PT BPD Bali didirikan berdasarkan akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap notaris. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490). Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum bank dari perseroan terbatas menjadi perusahaan daerah melalui Surat No. 6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Selanjutnya diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep. 110/025/65 tanggal 2 November 1965. Pemerintah Kota Denpasar melakukan penyertaan modal pada PT BPD Bali per 31 Desember 2025 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar pada PT BPD Bali sebesar 12,15% dari keseluruhan modal PT BPD Bali. Penyertaan pada PT BPD Bali sebesar Rp300.000.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kota Denpasar kepada PT BPD Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT BPD Bali sebesar Rp50.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan PT BPD Bali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/1/1/2026;

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 tanggal 18 Desember 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2019 serta diundangkan dalam





Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 7, PDAM Kota Denpasar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma. Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma per 31 Desember 2025 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Nilai Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Modal Hibah dari Pihak Ketiga	1.557.950.100,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2000	9.955.952.434,36
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2009	4.547.485.222,98
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2010	5.317.802.548,66
5.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2012	6.633.688.849,00
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013	21.000.000.000,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2014	6.232.306.437,00
8.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2015	11.022.952.795,00
9.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016	78.067.774.805,00
10.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2017	14.493.356.701,00
11.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2018	6.694.864.606,00
12.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2019	7.161.785.146,00
13.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2020	4.122.716.442,00
14.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021	9.235.757.688,00
15.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2022	0,00
16.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2023	81.635.071.803,00
17.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2024	17.201.552.390,00
18.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025	7.500.000.000,00
Sub Jumlah		292.381.017.968,00
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	37.124.433.345,00
Sub Jumlah		37.124.433.345,00
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Laba (Rugi) Ditahan	35.231.940,00
2.	Laba (Rugi) Tahun 2025	51.876.049.234,00
Sub Jumlah		51.911.281.174,00
Jumlah		381.416.732.487,00

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma berupa uang sebesar Rp7.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pencairan Dana dan Penyerahan Barang Dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Tahun Anggaran 2025. Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma dalam Laporan keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00003/2.1266/AU.8/04/1612-2/1/II/2026.





3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Kota Daerah Tingkat II, yang kemudian ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019, Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma. Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma per 31 Desember 2025 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Nilai Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013	1.177.356.064,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016	70.517.045.383,00
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2023	167.693.657.351,00
4.	Modal Hibah	3.956.414.563,00
5.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2024	19.392.605.374,00
Sub Jumlah		262.737.078.735,00
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	2.881.569.164,00
Sub Jumlah		2.881.569.164,00
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Selisih Likuidasi	1.639.295.610,00
2.	Laba (Rugi) Ditahan	(22.716.285.708,00)
3.	Laba (Rugi) Tahun 2025	(4.999.241.842,00)
Sub Jumlah		(26.076.231.940,00)
Jumlah		239.542.415.959,00

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar tidak melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Tahun Anggaran 2025. Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma dalam Laporan keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00043/2.1151/AU.8/05/0332-1/1/IV/2026.

4. Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 dan dicatat dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 serta disahkan pada 11 November 2023. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2019, Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma. Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma per 31 Desember 2025 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:





Tabel 5. 85 Nilai Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Modal Sumbangan Pemerintah tahun 2005	137.421.000,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar tahun 2018	1.534.000.000,00
Sub Jumlah		1.671.421.000,00
Cadangan-Cadangan		
1.	Cadangan Dana	760.329.393,00
Sub Jumlah		760.329.393,00
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Laba (Rugi) Tahun 2025	6.723.609.292,00
Sub Jumlah		6.723.609.292,00
Jumlah		9.155.359.685,00

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00017/2.1151/AU.2/05/0332-1/1/III/2026.

5. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 21 November 2010 yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59685.AH.01.01 tahun 2010. Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar pada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) per 31 Desember 2025 yang disajikan berdasarkan metode biaya. Penyertaan pada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp3.500.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kota Denpasar kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang sudah disahkan. Berdasarkan jumlah setoran modal yang telah disahkan, persentase kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar pada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) menjadi 1,51% dari keseluruhan modal PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Namun atas penyertaan ini masih dicatat sebagai Utang Setoran Modal Pemegang Saham dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) per 31 Desember 2025. Laporan keuangan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00012/3.0225/AU.1/09/1756-4/1/II/2026.

Perhitungan Perhitungan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) dapat dilihat pada *Lampiran 16 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.





5.3.1.3. Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Intrakomptabel (Barang yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi) per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 86 Rincian Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah	3.536.178.856.136,83	3.669.900.165.486,40	(133.721.309.349,57)	(3,64)
Peralatan dan Mesin	1.293.392.551.196,92	1.146.484.985.917,67	146.907.565.279,25	12,81
Gedung dan Bangunan	1.607.055.132.091,97	1.393.198.686.232,71	213.856.445.859,26	15,35
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.091.320.015.524,56	1.766.433.199.211,76	324.886.816.312,80	18,39
Aset Tetap Lainnya	53.995.039.459,11	54.715.768.614,46	(720.729.155,35)	(1,32)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.213.684.310,48	11.161.507.823,88	2.052.176.486,60	18,39
Akumulasi Penyusutan	(2.662.080.692.774,40)	(2.426.250.700.803,36)	(235.829.991.971,04)	9,72
Jumlah	5.933.074.585.945,47	5.615.643.612.483,52	317.430.973.461,95	5,65

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 17 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Selain Aset Tetap Intrakomptabel, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola Aset Tetap Ekstrakomptabel (Barang yang mempunyai nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi). Rincian Aset Tetap Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp16.503.873.893,90 dan jumlah barang sebanyak 69.827 unit, rincian Aset Tetap Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.288.219.935,01 dengan jumlah barang sebanyak 531 unit, dan rincian Aset Tetap Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.352.141.375,33 dengan jumlah barang sebanyak 222.569 unit. Daftar Nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 17a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Pemerintah Kota Denpasar juga memiliki Aset Tetap yang digunakan pihak lain dengan rincian perjanjian pinjam pakai yang dapat dilihat pada *Lampiran 17b Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*, perjanjian BMD yang disewakan sebagian dapat dilihat di *Lampiran 17c Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025* serta rincian penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain dapat dilihat pada *Lampiran 17d Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.1. Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Tanah TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Tanah	3.536.178.856.136,83	3.669.900.165.486,40	(133.721.309.349,57)	(3,64)

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:





Tabel 5. 88 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	3.669.900.165.486,40
Penambahan:	
a. Belanja Modal	6.726.112.218,00
b. Penerimaan Hibah TA 2025	2.960.000.000,00
c. Mutasi Masuk Antar SKPD	43.295.791.136,00
d. Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	325.050.000,00
e. Kapitalisasi Biaya ke Induknya	984.000,00
f. Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya	32.361.006.000,00
Jumlah Penambahan	85.668.943.354,00
Pengurangan:	
a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	175.768.427.567,57
b. Mutasi Keluar Antar SKPD	43.295.791.136,00
c. Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	325.050.000,00
d. Kapitalisasi Biaya ke Induknya	984.000,00
Jumlah Pengurangan	219.390.252.703,57
Saldo Akhir per 31 Desember	3.536.178.856.136,83

2. Belanja Modal sebesar Rp6.726.112.218,00 merupakan pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp6.725.128.218,00 dan biaya pensertifikatan Tanah untuk Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp754.000,00 serta biaya pensertifikatan Tanah untuk Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp230.000,00 yang direalisasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Terdapat Hibah Tanah TA 2025 dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp2.960.000.000,00 yang dicatatkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp43.295.791.136,00 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Tanah antar perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, terdiri dari:
 - a. Mutasi aset dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Dinas Perikanan sebesar Rp11.102.175.000,00;
 - b. Mutasi aset dari Dinas Pertanian ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola) sebesar Rp147.200.000,00; dan
 - c. Mutasi aset sebesar Rp32.046.416.136,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola) ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.724.463.848,46;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp791.382.787,54;
 - 3) Dinas Pertanian sebesar Rp1.002.618.500,00;
 - 4) Dinas Pariwisata sebesar Rp7.819.241.000,00;
 - 5) Dinas Perikanan sebesar Rp4.361.880.000,00;
 - 6) Dinas Kebudayaan sebesar Rp147.756.000,00;
 - 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.450.000.000,00;
 - 8) Dinas Sosial sebesar Rp947.324.000,00; dan
 - 9) Sekretariat Daerah sebesar Rp9.801.750.000,00.





5. Mutasi masuk dan keluar internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp325.050.000,00 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Cabdiknas Denpasar Barat ke TK Negeri. Mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan, penggunaan, dan penatausahaan aset daerah guna mendukung tertib administrasi serta kesesuaian pencatatan barang milik daerah berdasarkan perubahan penguasaan atau pemanfaatan aset.
6. Kapitalisasi biaya masuk dan keluar ke induknya sebesar Rp984.000,00 berupa Tanah Untuk Tempat Kerja merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari penggabungan biaya-biaya terkait ke dalam nilai aset induk selama TA 2025, sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan, sehingga mencerminkan nilai perolehan aset secara lebih tepat berdasarkan pengeluaran yang dapat dikapitalisasi.
7. Mutasi tambah nonbelanja modal lainnya sebesar Rp32.361.006.000,00 terdiri dari pencatatan Tanah fasos fasum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp31.627.300.000,00 dan pencatatan Tanah ruas jalan sebesar Rp733.706.000,00 tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
8. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp175.768.427.567,57 merupakan pemindahan nilai aset dari kelompok Aset Tetap ke kelompok Aset Lainnya selama TA 2025, yang terdiri atas reklasifikasi akibat kondisi barang rusak berat sebesar Rp170.400.000.000,00 serta reklasifikasi karena aset akan dihibahkan sebesar Rp5.368.427.567,57, sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.

Daftar Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada *Lampiran 18 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025* dan daftar penertiban Aset Tetap Tanah sebanyak 9 bidang tanah dapat dilihat pada *Lampiran 18a Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 89 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Alat Besar	163.180.745.043,23	148.249.198.114,43	14.931.546.928,80	10,07
Alat Angkutan	264.918.030.820,13	212.107.536.530,13	52.810.494.290,00	24,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.247.892.601,85	11.099.168.564,85	1.148.724.037,00	10,35
Alat Pertanian	19.783.099.251,00	22.039.541.699,50	(2.256.442.448,50)	(10,24)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	287.655.908.350,36	254.492.721.980,06	33.163.186.370,30	13,03
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	46.842.991.754,35	40.089.074.357,19	6.753.917.397,16	16,85
Alat Kedokteran dan Kesehatan	219.542.177.251,12	212.359.196.799,75	7.182.980.451,37	3,38
Alat Laboratorium	29.746.226.097,28	29.392.219.711,71	354.006.385,57	1,20
Alat Persenjataan	840.038.990,00	873.263.930,00	(33.224.940,00)	(3,80)
Komputer	167.489.660.283,87	156.655.460.776,32	10.834.199.507,55	6,92
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.298.994,00	19.000.000,00	31.298.994,00	164,73
Alat Keselamatan Kerja	2.874.501.156,00	2.351.184.756,00	523.316.400,00	22,26





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Alat Peraga	36.446.250,00	36.446.250,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Rambu-rambu	73.176.704.132,73	52.794.771.811,73	20.381.932.321,00	38,61
Peralatan Olahraga	5.003.830.221,00	3.922.200.636,00	1.081.629.585,00	27,58
Jumlah	1.293.392.551.196,92	1.146.484.985.917,67	146.907.565.279,25	12,81

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 90 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	1.146.484.985.917,67
Penambahan:	
a. Belanja Modal	185.238.091.071,00
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap	19.732.097.730,05
c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya	4.088.821.768,00
d. Hibah Perolehan TA 2025	6.460.380.357,00
e. Hibah Perolehan Sebelum TA 2025	1.779.640.000,00
f. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	963.123.000,00
g. Mutasi Masuk Antar SKPD	12.418.253.356,58
h. Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	115.744.685,80
i. Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya	440.250.000,00
Jumlah Penambahan	231.236.401.968,43
Pengurangan:	
a. Koreksi Saldo Awal Reklasifikasi ke Aset Lainnya	48.947.000,00
b. Koreksi Saldo Awal Mutasi Kurang Lainnya	62.099.878,00
c. Reklasifikasi ke Aset Tetap	121.025.518,00
d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	69.054.956.513,30
e. Mutasi Keluar Antar SKPD	12.418.253.356,58
f. Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	115.744.685,80
g. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan TA 2025	2.502.609.737,50
h. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan Sebelum TA 2025	5.200.000,00
Jumlah Pengurangan	84.328.836.689,18
Saldo Akhir per 31 Desember	1.293.392.551.196,92

2. Belanja modal sebesar Rp185.238.091.071,00 merupakan pengadaan tahun 2025.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp19.732.097.730,05 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pemindahan pencatatan antar kelompok Aset Tetap selama TA 2025 yang terdiri dari reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.067.765.086,05, reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.594.203.298,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.400.000,00 serta reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp47.729.346,00 yang berdasarkan hasil penyesuaian klasifikasi aset sesuai dengan sifat, fungsi, kondisi, dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga penyajian aset dalam laporan keuangan menjadi lebih tepat.





4. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp4.088.821.768,00 merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari pemindahan aset dari kelompok Aset Lainnya ke Aset Tetap selama TA 2025 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi karena perubahan kondisi aset dari rusak berat menjadi kondisi baik sebesar Rp1.734.256.875,00 terdiri dari:
 - 1) Mebel berupa meja dan kursi sebesar Rp1.100.856.875,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2) Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp50.000.000,00 dan Hauler sebesar Rp332.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - 3) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp85.000.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) Alat Kantor Lainnya berupa CCTV sebesar Rp166.400.000,00 pada Dinas Perhubungan; dan
 - b. Reklasifikasi dari aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebesar Rp2.354.564.893,00, sesuai dengan hasil penyesuaian klasifikasi dan kondisi aset berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
5. Hibah Perolehan TA 2025 sebesar Rp6.460.380.357,00 yang terdiri dari:
 - a. Hibah dari Bank Indonesia ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp111.000.000,00;
 - b. Hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp5.168.160.000,00;
 - c. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp1.850.000,00;
 - d. Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp502.819.100,00. Di dalam Hibah ini terdapat Hibah Revitalisasi sebesar Rp76.729.100,00 ke beberapa sekolah yang terdiri dari:
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 12 Dauh Puri sebesar Rp8.659.500,00;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumerta sebesar Rp30.019.600,00;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 7 Kesiman sebesar Rp38.050.000,00.
 - e. Hibah dari Komite Sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp230.261.000,00;
 - f. Hibah dari PT Pertamina Training & Consulting ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp244.212.000,00;
 - g. Hibah dari PT Cyber Network Indonesia ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp47.490.000,00;
 - h. Hibah dari PT Pertamina ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp7.500.000,00;
 - i. Hibah dari PT PLN ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.005.400,00;
 - j. Hibah dari BPBD Provinsi Bali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp38.105.000,00;
 - k. Hibah dari PT BPD Bali ke Dinas Kesehatan sebesar Rp86.136.000,00;
 - l. Hibah dari PT Pertamina ke Dinas Sosial Kota Denpasar sebesar Rp3.841.857,00; dan
 - m. Hibah dari PT PLN, Bank BRI dan Kelompok Masyarakat/Perorangan ke Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp8.000.000,00.





6. Hibah Peralatan dan Mesin sebelum TA 2025 sebesar Rp1.779.640.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Hibah dari Paguyuban Guru ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp2.000.000,00;
 - b. Hibah dari Komite Sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp110.550.000,00;
 - c. Hibah dari Bank Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sebesar Rp328.400.000,00;
 - d. Hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.092.990.000,00;
 - e. Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar sebesar Rp181.760.000,00;
 - f. Hibah CSR dari PT Canning Indonesia Products ke Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp7.290.000,00; dan
 - g. Hibah dari PT PLN, Bank BRI dan Kelompok Masyarakat/Perorangan ke Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp56.650.000,00.
7. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp963.123.000,00 merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari pengalihan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa menjadi Aset Tetap selama TA 2025, karena pengeluaran tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
8. Mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp12.418.253.356,58 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin antar perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, terdiri dari:
 - a. Mutasi aset sebesar Rp1.764.800.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola) ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp285.000.000,00;
 - 2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp54.800.000,00;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp285.000.000,00;
 - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp855.000.000,00;
 - 5) Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp285.000.000,00;
 - b. Mutasi aset sebesar Rp336.200.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya) sebesar Rp301.300.000,00;
 - 2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp32.600.000,00;
 - 3) Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.300.000,00;
 - c. Mutasi aset sebesar Rp968.594.800,00 dari Badan Pendapatan Daerah ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya) sebesar Rp511.570.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.889.800,00;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp155.870.000,00;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp85.000.000,00;
 - 5) Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp67.265.000,00;
 - d. Mutasi aset sebesar Rp4.626.990.000,00 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp806.390.000,00;





- 2) Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp974.390.000,00;
 - 3) Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp1.468.910.000,00;
 - 4) Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp1.377.300.000,00;
 - e. Mutasi aset sebesar Rp3.824.888.506,58 dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp46.090.000,00;
 - 2) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp456.430.498,32;
 - 3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp184.627.500,64;
 - 4) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebesar Rp196.274.998,09;
 - 5) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.107.573.485,77;
 - 6) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp126.850.000,24;
 - 7) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebesar Rp217.774.997,64;
 - 8) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp318.970.500,04;
 - 9) Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah sebesar Rp229.476.500,24;
 - 10) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar Rp940.820.025,60;
 - f. Mutasi aset sebesar Rp85.506.000,00 dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp25.435.000,00;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp31.711.000,00;
 - 3) Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp28.360.000,00;
 - g. Mutasi aset sebesar Rp188.774.050,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp161.568.550,00;
 - 2) Dinas Pariwisata sebesar Rp27.205.500,00;
 - h. Mutasi aset dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp17.500.000,00;
 - i. Mutasi aset dari Kecamatan Denpasar Utara ke Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp320.000.000,00; dan
 - j. Mutasi aset dari Kecamatan Denpasar Barat ke Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp285.000.000,00.
9. Mutasi masuk dan keluar internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp115.744.685,80 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang teridiri dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke TK Negeri sebesar Rp4.744.685,80 dan dari SMP ke TK Negeri sebesar Rp111.000.000,00. Mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan, penggunaan, dan penatausahaan aset daerah guna mendukung tertib administrasi serta kesesuaian pencatatan barang milik daerah berdasarkan perubahan penguasaan atau pemanfaatan aset.
10. Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya sebesar Rp440.250.000,00 terdiri dari:
- a. Pencatatan Gergaji Chain Saw pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sebesar Rp11.700.000,00;
 - b. Pencatatan Gergaji Chain Saw pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar sebesar Rp23.400.000,00;
 - c. Pencatatan Gergaji Chan Saw beserta AC pada Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebesar Rp42.250.000,00;





- d. Pencatatan Gergaji Chain Saw pada Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar sebesar Rp5.850.000,00; dan
- e. Pencatatan Mobil Toyota Hilux pada Dinas Kesehatan sebesar Rp357.050.000,00. Terdapat kesalahan penghapusan barang berupa kendaraan Toyota Hilux sebesar Rp357.050.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar karena kesalahan pencatatan (Double Pencatatan) dengan SK Penghapusan Nomor: 188.4/1670/BPKAD/2022. Namun secara kondisi tidak ada *double* pencatatan sehingga pada Tahun 2025 kendaraan Toyota Hilux tersebut telah dilakukan pencatatan kembali sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kota Denpasar, dan akan diterbitkan SK Perubahan Penghapusan atas SK Penghapusan Nomor: 188.4/1670/BPKAD/2022.
11. Koreksi saldo awal reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp48.947.000,00 dilakukan atas aset yang dikategorikan sebagai kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa berupa Lampu Penerangan Jalan Umum. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyesuaikan pencatatan aset sesuai dengan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga nilai aset disajikan secara tepat dalam kelompok Aset Lainnya guna mendukung tertib administrasi dan keakuratan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar.
12. Koreksi saldo awal mutasi kurang lainnya sebesar Rp62.099.878,00 dilakukan karena aset tersebut diklasifikasikan masuk ke dalam Ekstrakomptabel. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan nilai aset sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi atau pencatatan Intrakomptabel direklasifikasi ke daftar Ekstrakomptabel guna mendukung tertib administrasi serta keakuratan penyajian laporan keuangan daerah.
13. Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp121.025.518,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap yang terjadi akibat pemindahan pencatatan ke suatu kelompok Aset Tetap Lain selama tahun anggaran berjalan yang terdiri dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp24.817.700,00 dan Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp96.207.818,00 yang berdasarkan hasil penyesuaian klasifikasi aset sesuai dengan sifat, fungsi, kondisi, dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga penyajian aset dalam laporan keuangan menjadi lebih tepat.
14. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp69.054.956.513,30 merupakan pengurangan nilai aset yang terjadi akibat pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap ke kelompok Aset Lain-lain dikarenakan kondisi rusak berat selama TA 2025, sehingga penyajian nilai aset mencerminkan kondisi dan status pemanfaatannya secara lebih tepat.
15. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel perolehan TA 2025 sebesar Rp2.502.609.737,50 merupakan pengurangan nilai aset yang dilakukan melalui pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap ke daftar Ekstrakomptabel atas perolehan TA 2025, karena nilai atau karakteristik aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
16. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel perolehan sebelum TA 2025 sebesar Rp5.200.000,00 merupakan pengurangan nilai aset yang dilakukan melalui pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap ke daftar Ekstrakomptabel atas aset yang diperoleh sebelum TA 2025, karena berdasarkan hasil penyesuaian nilai dan klasifikasi, aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.





Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada *Lampiran 19 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Bangunan Gedung	1.554.051.132.301,05	1.359.802.959.110,57	194.248.173.190,48	14,29
Monumen	19.547.656.013,71	7.975.741.016,60	11.571.914.997,11	145,09
Bangunan Menara	1.213.706.000,00	1.213.706.000,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	32.242.637.777,21	24.206.280.105,54	8.036.357.671,67	33,20
Jumlah	1.607.055.132.091,97	1.393.198.686.232,71	213.856.445.859,26	15,35

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 92 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	1.393.198.686.232,71
Penambahan:	
a. Belanja Modal	239.885.865.559,00
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap	6.756.265.818,00
c. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.340.219.849,00
d. Reklasifikasi dari Aset Lainnya	1.594.061.472,61
e. Hibah Perolehan TA 2025	6.055.309.820,00
f. Hibah Perolehan Sebelum TA 2025	1.393.584.750,00
g. Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.650.205.093,64
h. Mutasi Masuk Antar SKPD	27.012.092.328,51
i. Reklasifikasi dan Kapitalisasi dari Ekstrakomptabel	311.207.000,00
j. Reklasifikasi dan Kapitalisasi ke Gedung Induk	1.666.483.802,00
k. Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya	4.099.640.869,00
Jumlah Penambahan	293.764.936.361,76
Pengurangan :	
a. Koreksi saldo awal Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	457.200,00
b. Belanja Modal TA 2025 Tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.351.766.948,60
c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.522.780.822,99
d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	27.763.492.676,98
e. Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.650.205.093,64
f. Mutasi Keluar Antar SKPD	27.012.092.328,51
g. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan TA 2025	233.974.682,78
h. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan Sebelum TA 2025	373.720.749,00
Jumlah Pengurangan	79.908.490.502,50
Saldo Akhir per 31 Desember	1.607.055.132.091,97

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp239.885.865.559,00 merupakan penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari realisasi pengeluaran pemerintah daerah





- selama TA 2025 untuk perolehan, pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi Gedung dan Bangunan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.756.265.818,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pemindahan pencatatan antar kelompok Aset Tetap selama tahun anggaran berjalan yang terdiri dari reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.420.802.000,00, reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.207.818,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.239.256.000,00 yang berdasarkan hasil penyesuaian klasifikasi aset sesuai dengan sifat, fungsi, kondisi, dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga penyajian nilai aset dalam laporan keuangan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 4. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.340.219.849,00 merupakan penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemindahan pencatatan aset dari kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan setelah pembangunan atau pekerjaan selesai dilaksanakan dan aset telah siap digunakan, sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan serta pengelolaan barang milik daerah.
 5. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.594.061.472,61 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Lain-lain ke kelompok aset terkait selama TA 2025, berdasarkan hasil penyesuaian klasifikasi, perubahan kondisi, atau status pemanfaatan aset sehingga kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
 6. Hibah Perolehan TA 2025 sebesar Rp6.055.309.820,00 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp10.000.000,00;
 - b. Penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp2.477.356.520,00 yang merupakan Hibah Revitalisasi ke beberapa sekolah yang terdiri dari:
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 12 Dauh Puri sebesar Rp153.171.920,00;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumerta sebesar Rp400.564.161,00;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 7 Kesiman sebesar Rp231.817.359,00;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama 13 Denpasar sebesar Rp1.691.803.080,00.
 - c. Penerimaan hibah dari Komite Sekolah sebesar Rp102.287.300,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar;
 - d. Penerimaan hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp3.457.944.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan
 - e. Penerimaan hibah dari PT Pertamina sebesar Rp7.722.000,00 pada Dinas Sosial Kota Denpasar.
 7. Hibah perolehan sebelum TA 2025 sebesar Rp1.393.584.750,00 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan hibah dari Komite Sekolah sebesar Rp1.309.387.750,00 ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar; dan
 - b. Penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp84.197.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
 8. Mutasi masuk dan keluar internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.650.205.093,64 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang





- terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke TK Negeri sebesar Rp2.561.625.093,64 dan dari Cabdiknas Denpasar Utara ke TK Negeri sebesar Rp88.580.000,00. Mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan, penggunaan, dan penatausahaan aset daerah guna mendukung tertib administrasi serta kesesuaian pencatatan barang milik daerah berdasarkan perubahan penguasaan atau pemanfaatan aset.
9. Mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp27.012.092.328,51 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan antar perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, terdiri dari:
- a. Mutasi aset sebesar Rp20.745.978.863,51 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola) ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Cabdiknas Denpasar Utara) sebesar Rp1.063.000.750,00;
 - 2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Cabdiknas Denpasar Barat) sebesar Rp497.646.113,51;
 - 3) Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp19.185.332.000,00;
 - b. Mutasi aset sebesar Rp5.542.710.000,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp296.821.500,00;
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp996.834.000,00;
 - 3) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.038.056.000,00;
 - 4) Dinas Pariwisata sebesar Rp2.854.924.500,00;
 - 5) Dinas Kebudayaan sebesar Rp356.074.000,00;
 - c. Mutasi aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp545.600.000,00;
 - d. Mutasi aset sebesar Rp177.803.465,00 dari Dinas Kesehatan ke SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp98.476.000,00; dan
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp79.327.465,00.
10. Reklasifikasi dan kapitalisasi dari Ekstrakomptabel sebesar Rp311.207.000,00 merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari pemindahan pencatatan aset dari daftar Ekstrakomptabel ke kelompok Aset Tetap serta pengakuan kembali nilai aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi selama TA 2025, sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
11. Reklasifikasi dan kapitalisasi ke gedung induk sebesar Rp1.666.483.802,00 merupakan penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemindahan pencatatan serta penggabungan nilai pengeluaran atau aset pendukung ke dalam aset gedung induk selama TA 2025, sehingga nilai perolehan gedung induk mencerminkan keseluruhan biaya yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
12. Mutasi tambah Nonbelanja Modal Lainnya sebesar Rp4.099.640.869,00 terdiri dari:
- a. Pencatatan Gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebesar Rp698.640.869,00; dan
 - b. Pencatatan Gedung pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebesar Rp3.401.000.000,00.
13. Koreksi saldo awal Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp457.200,00 merupakan penyesuaian pencatatan atas pengembalian biaya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat





Daerah Kota Denpasar. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset sesuai kondisi yang sebenarnya serta memastikan tertib administrasi dan keakuratan penyajian laporan keuangan daerah.

14. Belanja Modal TA 2025 tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.351.766.948,60 merupakan realisasi pengeluaran belanja modal selama TA 2025 yang masih dalam proses pembangunan atau penyelesaian dan belum dapat diakui sebagai Aset Tetap definitif, sehingga dicatat terlebih dahulu sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
15. Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.522.780.822,99 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pemindahan pencatatan aset ke kelompok Aset Tetap Lainnya di luar Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 yang terdiri dari reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.067.765.086,05 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.455.015.736,94 yang berdasarkan hasil penyesuaian klasifikasi aset sesuai dengan sifat, fungsi, dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
16. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp27.763.492.676,98 merupakan pengurangan nilai aset yang dilakukan melalui pemindahan pencatatan dari kelompok Aset Tetap ke kelompok Aset Lainnya selama TA 2025, yang terdiri atas reklasifikasi karena kondisi barang rusak berat sebesar Rp26.879.059.726,98 serta reklasifikasi ke aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebesar Rp884.432.950,00, sesuai dengan hasil penyesuaian kondisi, status pemanfaatan, dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
17. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel perolehan TA 2025 sebesar Rp233.974.682,78 merupakan pengurangan nilai aset yang dilakukan melalui pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap ke daftar ekstrakomptabel atas perolehan tahun anggaran 2025, karena berdasarkan nilai, sifat, atau karakteristiknya aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
18. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel perolehan sebelum TA 2025 sebesar Rp373.720.749,00 merupakan pengurangan nilai aset yang dilakukan melalui pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap ke daftar ekstrakomptabel atas aset yang diperoleh sebelum tahun 2025, karena berdasarkan hasil penyesuaian nilai, kondisi, atau klasifikasi, aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.

Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada *Lampiran 20 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:



**Tabel 5. 93 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Jalan dan Jembatan	1.740.998.289.135,00	1.470.873.340.580,19	270.124.948.554,81	18,36
Bangunan Air	291.599.217.823,72	251.857.868.856,32	39.741.348.967,40	15,78
Instalasi	25.919.877.989,14	20.422.661.904,67	5.497.216.084,47	26,92
Jaringan	32.802.630.576,70	23.279.327.870,58	9.523.302.706,12	40,91
Jumlah	2.091.320.015.524,56	1.766.433.199.211,76	324.886.816.312,80	18,39

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 94 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	1.766.433.199.211,76
Penambahan:	
a. Belanja Modal	332.924.809.582,00
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap	10.479.833.436,94
c. Hibah Perolehan TA 2025	475.964.059,00
d. Hibah Perolehan Sebelum TA 2025	15.000.000,00
e. Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	72.270.898,00
f. Reklasifikasi dan Kapitalisasi ke Induk	341.988.293,75
g. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00
Jumlah Penambahan	344.319.866.269,69
Pengurangan:	
a. Belanja Modal TA 2025 Tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.924.511.654,00
b. Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.015.005.298,00
c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.421.262.106,89
d. Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	72.270.898,00
Jumlah Pengurangan	19.433.049.956,89
Saldo Akhir per 31 Desember	2.091.320.015.524,56

2. Belanja Modal sebesar Rp332.924.809.582,00 merupakan pengadaan TA 2025. Sepanjang tahun 2025, terdapat penambahan sebanyak 307 ruas jalan.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp10.479.833.436,94 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pemindahan pencatatan antar kelompok Aset Tetap ke kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama TA 2025 yang terdiri dari reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.817.700,00 dan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.455.015.736,94 yang berdasarkan hasil penyesuaian klasifikasi aset sesuai dengan sifat, fungsi, kondisi, serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga penyajian nilai aset menjadi lebih tepat.
4. Hibah Perolehan TA 2025 sebesar Rp475.964.059,00 terdiri dari:
 - a. Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp426.264.795,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Di dalam hibah ini terdapat Hibah Revitalisasi sebesar Rp415.474.795,00 ke beberapa sekolah yang terdiri dari:
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 10 Dauh Puri sebesar Rp144.743.870,00;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 12 Dauh Puri sebesar Rp148.609.129,00;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 7 Kesiman sebesar Rp15.924.876,00;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama 13 Denpasar sebesar Rp106.196.920,00; dan





- b. Hibah dari Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp49.699.264,00.
5. Hibah Perolehan sebelum TA 2025 sebesar Rp15.000.000,00 dari Komite Sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
 6. Mutasi masuk dan keluar internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp72.270.898,00 merupakan perpindahan Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke TK Negeri. Mutasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan aset berdasarkan perubahan penggunaan, penguasaan, atau pengelolaan aset daerah guna mendukung tertib administrasi serta keakuratan penyajian nilai aset daerah.
 7. Reklasifikasi dan kapitalisasi ke induk sebesar Rp341.988.293,75 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pemindahan pencatatan serta penggabungan nilai pengeluaran atau aset pendukung ke dalam aset induk Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama TA 2025, sehingga nilai perolehan aset induk mencerminkan keseluruhan biaya yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
 8. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.000.000,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap yang berasal dari pengalihan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa menjadi aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama TA 2025, karena pengeluaran tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah.
 9. Belanja Modal TA 2025 Tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.924.511.654,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap yang terjadi akibat pemindahan pencatatan aset ke kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025, karena aset tersebut masih dalam proses pembangunan, pengembangan, atau belum sepenuhnya selesai dan belum siap digunakan, sehingga sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 10. Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp16.015.005.298,00 merupakan penyesuaian pencatatan aset yang dilakukan melalui pemindahan nilai antar kelompok Aset Tetap selama TA 2025 yang terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.420.802.000,00 dan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.594.203.298,00, berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi, fungsi, dan kondisi aset sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah, sehingga penyajian aset dalam laporan keuangan menjadi lebih tepat dan akurat.
 11. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.421.262.106,89 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap yang terjadi akibat pemindahan pencatatan ke kelompok Aset Lainnya selama TA 2025, dikarenakan kondisi aset mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan serta pengelolaan barang milik daerah.

Daftar Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dilihat pada *Lampiran 21 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan





persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Bahan Perpustakaan	18.267.753.447,20	18.997.018.922,55	(729.265.475,35)	(3,84)
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	11.219.453.614,00	10.466.496.118,00	752.957.496,00	7,19
Tanaman	15.536.712.270,11	15.538.132.270,11	(1.420.000,00)	(0,01)
Aset Tetap Dalam Renovasi	8.971.120.127,80	9.714.121.303,80	(743.001.176,00)	(7,65)
Jumlah	53.995.039.459,11	54.715.768.614,46	(720.729.155,35)	(1,32)

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	54.715.768.614,46
Penambahan:	
a. Belanja Modal	9.419.135.048,00
b. Hibah Perolehan TA 2025	30.223.000,00
c. Hibah Perolehan Sebelum TA 2025	24.300.000,00
d. Mutasi Antar SKPD	8.275.077.312,65
Jumlah Penambahan	17.748.735.360,65
Pengurangan:	
a. Belanja Modal TA 2025 Tercatat Sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.624.485.938,00
b. Reklasifikasi ke Aset Tetap	2.261.656.000,00
c. Kapitalisasi dari Aset Renovasi ke Induknya	1.666.483.802,00
d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	4.600.301.875,35
e. Mutasi Keluar Antar SKPD	8.275.077.312,65
f. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan TA 2025	41.459.588,00
Jumlah Pengurangan	18.469.464.516,00
Saldo Akhir per 31 Desember	53.995.039.459,11

2. Belanja Modal sebesar Rp9.419.135.048,00 Pengadaan Tahun 2025.
3. Hibah perolehan TA 2025 sebesar Rp30.223.000,00 terdiri dari hibah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp4.923.000,00 dan Komite Sekolah sebesar Rp25.300.000,00 ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
4. Hibah perolehan sebelum TA 2025 sebesar Rp24.300.000,00 dari Komite Sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
5. Mutasi masuk dan keluar antar SKPD sebesar Rp8.275.077.312,65 untuk Aset Tetap Lainnya merupakan perpindahan aset antar Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Mutasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan aset berdasarkan perubahan penggunaan, penguasaan, atau pengelolaan antar SKPD sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung tertib administrasi dan keakuratan penyajian aset daerah.
6. Belanja Modal TA 2025 tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.624.485.938,00 karena hingga akhir periode pelaporan aset masih dalam proses





pembangunan dan belum selesai sehingga belum memenuhi kriteria untuk direklasifikasi sebagai Aset Tetap. Pencatatan dilakukan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, serta akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap setelah pekerjaan konstruksi selesai dan memenuhi persyaratan kapitalisasi.

7. Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp2.261.656.000,00 merupakan penyesuaian pencatatan Aset Tetap dalam kelompok Aset Tetap Lain di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.400.000,00 dan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.239.256.000,00. Reklasifikasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian klasifikasi aset berdasarkan jenis, fungsi, dan kondisi aktual, sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tidak memengaruhi total nilai Aset Tetap, namun hanya mengubah kelompok atau akun pencatatan aset yang bersangkutan.
8. Kapitalisasi dari Aset Renovasi ke Induknya sebesar Rp1.666.483.802,00 merupakan pengakuan penambahan nilai Aset Tetap induk yang berasal dari kegiatan renovasi/rehabilitasi yang telah selesai dan memenuhi kriteria kapitalisasi. Kapitalisasi dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah dan basis akrual, dimana pengeluaran renovasi yang meningkatkan kapasitas, masa manfaat, atau nilai ekonomis aset direklasifikasi dan ditambahkan ke nilai aset induk terkait.
9. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp4.600.301.875,35 dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang mengalami kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi normalnya. Reklasifikasi ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian kondisi aset dan sesuai ketentuan pengelolaan BMD, dimana aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap aktif dipindahkan ke akun Aset Lain-lain untuk selanjutnya dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan TA 2025 sebesar Rp41.459.588,00 merupakan pengalihan pencatatan aset dari Aset Tetap menjadi aset ekstrakomptabel karena memenuhi kriteria nilai dan/atau karakteristik tertentu sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 22 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 97 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	4.956.100.033,00	(4.956.100.033,00)	(100,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	167.663.794,00	71.665.000,00	95.998.794,00	133,95
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	8.523.233.714,60	3.483.498.889,00	5.039.734.825,60	144,67
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.522.786.801,88	2.650.243.901,88	1.872.542.900,00	70,66
Jumlah	13.213.684.310,48	11.161.507.823,88	2.052.176.486,60	18,39





Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	11.161.507.823,88
Penambahan:	
a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.351.766.948,60
b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.924.511.654,00
c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.624.485.938,00
d. Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	477.765.000,00
Jumlah Penambahan	7.378.529.540,60
Pengurangan:	
a. Reklasifikasi dan kapitalisasi ke aset induknya	2.729.937.488,75
b. Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	477.765.000,00
c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.118.650.565,25
Jumlah Pengurangan	5.326.353.054,00
Saldo Akhir per 31 Desember	13.213.684.310,48

2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.351.766.948,60 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan penyesuaian pencatatan atas aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai pada akhir periode pelaporan. Reklasifikasi dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis akrual, dimana aset belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap dan akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap setelah pekerjaan konstruksi selesai.
3. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.924.511.654,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan penyesuaian pencatatan atas aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai pada akhir periode pelaporan. Reklasifikasi dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis akrual, dimana aset belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap dan akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap setelah pekerjaan konstruksi selesai.
4. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.624.485.938,00 dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan karena aset terkait masih dalam proses pembangunan dan belum selesai pada akhir periode pelaporan. Pencatatan dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berbasis akrual, dan akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap setelah pekerjaan selesai serta memenuhi kriteria kapitalisasi.
5. Mutasi masuk dan keluar internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp477.765.000,00 merupakan perpindahan Barang Milik Daerah antar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke SMP berupa Konstruksi dalam Pekerjaan. Mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan, penggunaan, dan penatausahaan aset daerah.
6. Reklasifikasi keluar kapitalisasi ke induknya sebesar Rp2.729.937.488,75 merupakan pemindahan pencatatan aset yang telah dikapitalisasi ke akun aset induk yang sesuai, sebagai bentuk penyesuaian agar penyajian laporan keuangan mencerminkan klasifikasi yang tepat.
7. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp2.118.650.565,25 dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang mengalami kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi normalnya. Reklasifikasi ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian kondisi aset dan sesuai ketentuan pengelolaan BMD, dimana aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset





Tetap aktif dipindahkan ke akun Aset Lain-lain untuk selanjutnya dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada *Lampiran 23 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*. Selain itu, terdapat Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dilanjutkan sebesar Rp13.213.684.310,48 dan daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dilanjutkan dan tidak dilanjutkan sebesar Rp2.812.672.565,25 dapat dilihat pada *Lampiran 23a Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Selain mengelola Aset Tetap tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola beberapa aset yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu sebanyak 79 bidang Tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP/STUP) yang diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi lahan (LC) dengan rincian pada *Lampiran 24 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 99 Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(864.865.449.413,32)	(805.674.357.916,67)	(59.191.091.496,65)	7,35
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(321.030.109.356,55)	(309.485.706.169,00)	(11.544.403.187,55)	3,73
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.461.846.381.042,53)	(1.296.662.106.290,69)	(165.184.274.751,84)	12,74
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.338.752.962,00)	(14.428.530.427,00)	89.777.465,00	(0,62)
Jumlah	(2.662.080.692.774,40)	(2.426.250.700.803,36)	(235.829.991.971,04)	9,72

Daftar Nilai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tidak dapat dilihat pada *Lampiran 29 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5. 100 Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	933.379.950,00	2.354.564.893,00	(1.421.184.943,00)	(60,36)
Aset Tidak Berwujud	12.745.973.385,00	12.177.149.939,00	568.823.446,00	4,67
Aset Lain-lain	132.549.276.231,87	137.064.753.644,78	(4.515.477.412,91)	(3,29)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.743.318.359,00)	(10.023.139.585,00)	(720.178.774,00)	7,19
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(102.605.165.164,55)	(59.752.197.722,98)	(42.852.967.441,57)	71,72
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.896.502.000,00	(2.896.502.000,00)	(100,00)
Jumlah	32.880.146.043,32	84.717.633.168,80	(51.837.487.125,48)	(61,19)





Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 25 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

Selain Aset Lainnya Intrakomptabel, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola Aset Lainnya Ekstrakomptabel (Barang yang mempunyai nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.326.753.701,34 sebanyak 627.574 unit dan rincian Daftar Nilai Aset Lainnya Ekstrakomptabel dapat dilihat pada *Lampiran 25a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut.

Tabel 5. 101 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Sewa	933.379.950,00	0,00	933.379.950,00	100,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	2.354.564.893,00	(2.354.564.893,00)	(100,00)
Jumlah	933.379.950,00	2.354.564.893,00	(1.421.184.943,00)	(60,36)

Penjelasan :

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp933.379.950,00 terdiri dari sewa berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.947.000,00 dan sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp884.432.950,00 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Rincian Mutasi Sewa TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 102 Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2025

Uraian	31 Desember 2025
Saldo Awal per 1 Januari	2.354.564.893,00
Penambahan :	
a. Sewa Lampu Penerangan Jalan Umum	48.947.000,00
b. Sewa Kios Terminal Ubung	884.432.950,00
Jumlah Penambahan :	933.379.950,00
Pengurangan :	
a. Pengembalian Sewa Kapal Laut KM Banawa Nusantara 63	2.354.564.893,00
Jumlah Pengurangan	2.354.564.893,00
Saldo Akhir per 31 Desember	933.379.950,00

2. Penambahan karena terdapat sewa Lampu Penerangan Jalan Umum sebesar Rp48.947.000,00 dan sewa Kios Terminal Ubung sebesar Rp884.432.950,00 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
3. Pengurangan karena pengembalian Sewa Kapal Laut KM Banawa Nusantara 63 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebesar Rp2.354.564.893,00.

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 26 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan





persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 5. 103 Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Lisensi dan Franchise	25.341.200,00	25.341.200,00	0,00	0,00
Hak Cipta	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
Software	12.572.564.185,00	12.003.490.739,00	569.073.446,00	4,74
Kajian	148.068.000,00	148.068.000,00	0,00	0,00
Jumlah	12.745.973.385,00	12.177.149.939,00	568.823.446,00	4,67

Penjelasan :

1. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari	12.177.149.939,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal TA 2025	686.773.446,00
Jumlah Penambahan	686.773.446,00
Pengurangan:	
Penghapusan	117.950.000,00
Jumlah Pengurangan	117.950.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember	12.745.973.385,00

2. Penambahan nilai pada Aset Tidak Berwujud TA 2025 dikarenakan adanya penambahan sebanyak 4 Software sebesar Rp686.773.446,00.
3. Penghapusan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp117.950.000,00 merupakan pengurangan nilai aset yang dilakukan pada TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi dan penatausahaan aset, karena aset tersebut sudah tidak memberikan manfaat ekonomis maupun manfaat pelayanan, sehingga dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.

Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 27 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lain-lain sebagai berikut.

Tabel 5. 105 Rincian Aset Lain-lain TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Rusak Berat/Usang	132.549.276.231,87	137.064.753.644,78	(4.515.477.412,91)	(3,29)

Penjelasan:

1. Aset Lain-lain terdiri atas Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp129.443.224.231,87 dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp3.106.052.000,00. Seluruhnya tercatat dalam Aset Rusak Berat/Usang pada neraca.
2. Rincian Mutasi Aset Lain-lain TA 2025 dijelaskan sebagai berikut :





Tabel 5. 106 Rincian Mutasi Aset Lain-lain TA 2025

Uraian	Nilai
Aset Rusak Berat/Usang	
Saldo Awal Per 1 Januari	82.823.063.524,78
Penambahan:	
a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	69.054.956.513,30
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	26.879.059.726,98
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.421.262.106,89
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	4.600.301.875,35
e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.118.650.565,25
Jumlah Penambahan	104.074.230.787,77
Pengurangan:	
a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.734.256.875,00
b. Penghapusan Aset berupa Peralatan dan Mesin	22.434.768.679,32
c. Penghapusan Aset yang Dihilangkan berupa Peralatan dan Mesin	6.142.345.000,00
d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.594.061.472,61
e. Koreksi Pencatatan karena Pengembalian Belanja berupa Gedung dan Bangunan	753.734.984,47
f. Penghapusan Aset berupa Gedung dan Bangunan	10.532.055.339,79
g. Koreksi Pencatatan karena Pengembalian Belanja berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	238.665.000,00
h. Penghapusan Aset berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.119.900,00
i. Koreksi Pencatatan Karena Pengembalian Belanja berupa Aset Tetap Lainnya	4.300.000,00
j. Penghapusan Aset berupa Aset Tetap Lainnya	5.890.687.100,49
k. Penghapusan Aset yang Dihilangkan berupa Aset Tetap Lainnya	363.666.500,00
l. Penghapusan aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.763.409.229,00
Jumlah Pengurangan	57.454.070.080,68
Saldo Akhir Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember	129.443.224.231,87
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	
Saldo awal per 1 Januari	54.241.690.120,00
Penambahan:	
a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	175.768.427.567,57
Jumlah Penambahan	175.768.427.567,57
Pengurangan:	
a. Penghapusan Aset yang Dihilangkan berupa Tanah	5.250.167.567,57
b. Penghapusan Aset yang menjadi Penyertaan Modal berupa Tanah	118.260.000,00
c. Penghapusan aset berupa Tanah	221.535.638.120,00
Jumlah Pengurangan	226.904.065.687,57
Saldo Akhir Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025	3.106.052.000,00
Saldo Akhir Aset Lain-lain per 31 Desember	132.549.276.231,87

3. Selama TA 2025 Pemerintah Kota Denpasar menghibahkan Barang Milik Daerah berupa:
- Tanah seluas 400 m² kepada Banjar Adat Semawang sebesar Rp5.250.167.567,57 untuk kegiatan sosial, budaya dan keagamaan, berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1148/HK/2025;
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.142.345.000,00, terdiri dari:
 - Hibah kepada Kejaksaan Negeri Denpasar sebesar Rp320.530.000,00 berupa station wagon berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/150/HK/2025;
 - Hibah kepada Desa Adat Denpasar sebesar Rp4.875.000,00 berupa sepeda motor berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/151/HK/2025;





- 3) Hibah kepada kepada Majelis Desa Adat sebesar Rp568.350.000,00 berupa sofa, rak penyimpanan, station wagon, dan *pick up* berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/282/HK/2025;
- 4) Hibah kepada Palang Merah Indonesia sebesar Rp85.000.000,00 berupa Station Wagon berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/283/HK/2025;
- 5) Hibah kepada Desa Tegal Kertha sebesar Rp104.445.000,00 berupa mesin penghalus dan alat prosesing berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/284/HK/2025;
- 6) Hibah Kepada kepada Desa Sumerta Kaja sebesar Rp134.145.000,00 berupa *Belt Conveyor*, Mesin Penghalus, Alat Tangki Pengapungan dan Alat Prosesing Lainnya berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/285/HK/2025;
- 7) Hibah kepada Parum Bendesa Adat Kota Denpasar sebesar Rp4.900.000.000,00 berupa 35 *pick up* berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/286/HK/2025;
- 8) Hibah kepada Banjar Beraban sebesar Rp25.000.000,00 berupa tangga air berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1851/HK/2025; dan
- c. Aset Tetap Lainnya kepada Banjar Adat Buana Kubu sebesar Rp363.666.500,00 berupa Alat Musik Tradisional, berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1773/HK/2025.

Daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 28 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 107 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.743.318.359,00)	(10.023.139.585,00)	(720.178.774,00)	7,19

Daftar Nilai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tidak dapat dilihat pada *Lampiran 29 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 108 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(102.605.165.164,55)	(59.752.197.722,98)	(42.852.967.441,57)	71,72

Daftar Nilai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tidak dapat dilihat pada *Lampiran 29 Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025*.





5.3.1.4.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 109 Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.896.502.000,00	(2.896.502.000,00)	(100,00)

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5. 110 Rincian Mutasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)
Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	31 Desember 2025
Saldo Awal per 1 Januari	2.896.502.000,00
Penambahan:	
a. Penyaluran DBH melalui TDF	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan:	
a. Pencairan TDF ke Kas Daerah	2.896.502.000,00
Jumlah Pengurangan	2.896.502.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember	0,00

2. Penyaluran Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* pada TA 2024 seluruhnya telah dicairkan pada TA 2025. Penyaluran Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) didasarkan pada surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 hal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.

5.3.1.5. Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Properti Investasi per tanggal Neraca, yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5. 111 Rincian Properti Investasi TA 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Properti Investasi Tanah	6.412.500.000,00	6.412.500.000,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak adanya penambahan dan pengurangan pada Properti Investasi selama tahun 2024 dan tahun 2025. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar memiliki Properti Investasi berupa Tanah sebesar Rp6.412.500.000,00.

Rincian Properti Investasi Tanah dapat dilihat pada rincian *Lampiran 30 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.





5.3.2. Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Rincian Kewajiban Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kewajiban Jangka Pendek	66.904.554.917,45	61.413.802.853,16	5.490.752.064,29	8,94

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Diterima Dimuka	4.406.719.317,95	3.704.269.987,32	702.449.330,63	18,96
Utang Belanja	59.919.227.836,79	54.874.723.908,45	5.044.503.928,34	9,19
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.578.607.762,71	2.834.808.957,39	(256.201.194,68)	(9,04)
Jumlah	66.904.554.917,45	61.413.802.853,16	5.490.752.064,29	8,94

Daftar Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada *Lampiran 31 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	1.583.103.286,04	1.275.092.592,20	308.010.693,84	24,16
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	1.256.909.333,35	866.578.833,37	390.330.499,98	45,04
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.193.952,69	408.513.758,83	(82.319.806,14)	(20,15)
Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	2.823.616.031,91	2.429.177.395,12	394.438.636,79	16,24
Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	2.823.616.031,91	2.429.177.395,12	394.438.636,79	16,24
Jumlah	4.406.719.317,95	3.704.269.987,32	702.449.330,63	18,96

Penjelasan:

1. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah sebesar Rp1.256.909.333,35 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang masa pemanfaatan aset setelah 31 Desember 2025 sebesar Rp3.110.000,00 yaitu pemanfaatan lahan untuk kantin pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dan pemanfaatan lahan untuk kantin di lingkungan Sekretariat Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama yang masa pemanfaatan aset setelah 31 Desember 2025 sebesar Rp365.500.000,00 merupakan kerja sama RSUD Wangaya dengan PT Bank





Pembangunan Daerah Bali untuk pemanfaatan Gedung Pelayanan Kesehatan Hemodialisa, Ruang Capem BPD Bali, dan Rumah ATM; dan

- c. Lain-lain PAD yang Sah Hasil Sewa BMD yang masa pemanfaatan aset setelah 31 Desember 2025 sebesar Rp888.299.333,35 yang pemanfaatan lahan untuk ATM dan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemanfaatan lahan untuk ATM Sekretariat Daerah di Jalan Gajah Mada, pemanfaatan lahan oleh BUMDes Saka Mandiri, dan pemanfaatan lahan untuk kantin pada sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Barang Milik Daerah (Sewa Tanah) dapat dilihat pada *Lampiran 32 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

2. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp326.193.952,69 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang masa pemanfaatan aset setelah 31 Desember 2025 sebesar Rp139.720.877,50 yaitu pemanfaatan Utilitas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Dinas Perhubungan; dan
 - b. Lain-lain PAD yang Sah Hasil Sewa BMD yang masa pemanfaatan aset setelah 31 Desember 2025 sebesar Rp186.473.075,19 yang pemanfaatan Utilitas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan.

Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Barang Milik Daerah (Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi) dapat dilihat pada *Lampiran 32a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*

3. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame merupakan penerimaan Pajak Reklame yang memiliki masa pajak di atas 31 Desember 2025. Rincian pendapatan diterima dimuka atas pembayaran pajak reklame dapat dilihat pada *Lampiran 32b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.3.2.1.2. Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Rincian Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Belanja Pegawai	17.756.522.152,00	29.020.390.254,67	(11.263.868.102,67)	(38,81)
Utang Belanja Barang dan Jasa	25.467.897.928,79	25.854.333.653,78	(386.435.724,99)	(1,49)
Utang Belanja Bagi Hasil	16.694.807.756,00	0,00	16.694.807.756,00	100,00
Jumlah	59.919.227.836,79	54.874.723.908,45	5.044.503.928,34	9,19

Penjelasan:

1. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Pegawai serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.451.139,00	3.121.748,00	248.329.391,00	7.954,82
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.254.521.273,00	28.844.862.286,67	(11.590.341.013,67)	(40,18)





Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	250.549.740,00	172.406.220,00	78.143.520,00	45,33
Jumlah	17.756.522.152,00	29.020.390.254,67	(11.263.868.102,67)	(38,81)

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Pegawai sebagai berikut:

- Kenaikan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan oleh kenaikan Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp42.131.336,00, Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp5.519.386,00, Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp720.000,00, Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp1.095.000,00, Utang Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp2.607.120,00, Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp3.992.888,00, Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp1.434,00, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp90.263.824,00, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp101.944.160,00, Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp13.557,00, dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp40.686,00. Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tujuh SKPD sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 33 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*;
- Penurunan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang disebabkan oleh penurunan Utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp8.761.781.500,00, Utang Belanja TPG PPPK sebesar Rp4.559.114.000,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB sebesar Rp465.595.912,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebesar Rp63.838.585,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp61.000.000,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp289.000.000,00, dan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal sebesar Rp41.743.404,00. Sedangkan bagian dari Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang mengalami peningkatan mencakup Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2 sebesar Rp455.625.000,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp900.000.000,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp14.491.755,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp45.566.248,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan sebesar Rp1.125.000,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp675.000,00, dan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.234.249.384,33. Utang ini tercatat pada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- Kenaikan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH disebabkan oleh peningkatan Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp78.143.520,00 pada Sekretariat Daerah; dan





d. Mutasi saldo utang pegawai sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Mutasi Saldo Utang Pegawai Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Penambahan (Pengakuan Beban)	Pengurangan (Pembayaran Utang)	Saldo Akhir
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.121.748,00	251.451.139,00	3.121.748,00	251.451.139,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.844.862.286,67	17.254.521.273,00	28.844.862.286,67	17.254.521.273,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.406.220,00	250.549.740,00	172.406.220,00	250.549.740,00
Jumlah	29.020.390.254,67	17.756.522.152,00	29.020.390.254,67	17.756.522.152,00

Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dapat dilihat pada *Lampiran 33 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Barang dan Jasa serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 118 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Belanja Barang	18.094.721.067,39	20.212.459.041,25	(2.117.737.973,86)	(10,48)
Utang Belanja Jasa	4.560.130.526,00	3.930.682.287,13	629.448.238,87	16,01
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	28.432.500,00	(28.432.500,00)	100,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.813.046.335,40	1.682.759.825,40	1.130.286.510,00	67,17
Jumlah	25.467.897.928,79	25.854.333.653,78	(386.435.724,99)	(1,49)

Penjelasan:

- a. Penurunan Utang Belanja Barang sebesar Rp2.117.737.973,86 disebabkan oleh penurunan Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan sebesar Rp2.008.019.623,86 dan Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp111.689.850,00. Sedangkan terdapat peningkatan dalam Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.569.000,00 dan Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp402.500,00;
- b. Kenaikan Utang Belanja Jasa sebesar Rp629.448.238,87 disebabkan oleh kenaikan Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp691.580.180,87, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp64.068.123,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp1.846.929,00, dan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp22.400,00. Sedangkan bagian dari Utang Belanja Jasa yang mengalami penurunan yaitu Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp2.332.703,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp7.626.309,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp9.182.545,00, Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp106.980.393,00, Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp865.531,00, dan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi





Non ASN sebesar Rp1.081.913,00. Utang Belanja Jasa hampir dimiliki oleh seluruh SKPD karena termasuk utang tagihan listrik, telepon, air dan internet. Rincian Utang Telepon, Utang Air, Utang Listrik dan Utang Internet dapat dilihat pada *Lampiran 34 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*;

- c. Penurunan Utang Belanja Pemeliharaan disebabkan oleh penurunan Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp28.432.500,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- d. Kenaikan Utang Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disebabkan oleh penurunan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp1.130.286.510,00. Seluruh nilai ini merupakan kewajiban RSUD Wangaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pihak ketiga namun belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025; dan
- e. Mutasi saldo Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Mutasi Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Penambahan (Pengakuan Beban)	Pengurangan (Pembayaran Utang)	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang	20.212.459.041,25	18.094.721.067,39	20.212.459.041,25	18.094.721.067,39
Utang Belanja Jasa	3.930.682.287,13	4.560.130.526,00	3.930.682.287,13	4.560.130.526,00
Utang Belanja Pemeliharaan	28.432.500,00	0,00	28.432.500,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.682.759.825,40	2.813.046.335,40	1.682.759.825,40	2.813.046.335,40
Jumlah	25.854.333.653,78	25.467.897.928,79	25.854.333.653,78	25.467.897.928,79

Daftar Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada *Lampiran 31 dan 34 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Bagi Hasil serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 120 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.448.009.452,00	0,00	16.448.009.452,00	100,00
Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.798.304,00	0,00	246.798.304,00	100,00
Jumlah	16.694.807.756,00	0,00	16.694.807.756,00	100,00

Penjelasan:

Utang Belanja Bagi Hasil diakui karena adanya pelampauan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di luar Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025. Utang Belanja Bagi Hasil TA 2025 akan dibayarkan di tahun 2026 sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2026.





5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.980.708.562,71	2.660.723.957,39	(680.015.394,68)	(25,56)
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	1.849.066.069,71	2.653.578.540,01	(804.512.470,30)	(30,32)
Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	131.498.493,00	7.145.417,38	124.353.075,62	1.740,32
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	597.899.200,00	174.085.000,00	423.814.200,00	243,45
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	197.499.200,00	174.085.000,00	23.414.200,00	13,45
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah	400.400.000,00	0,00	400.400.000,00	100,00
Jumlah	2.578.607.762,71	2.834.808.957,39	(256.201.194,68)	(9,04)

Penjelasan:

1. Utang Kelebihan Pembayaran PAD sejumlah Rp1.980.708.562,71 terdiri atas:
 - a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp1.849.066.069,71 yang terjadi karena adanya kelebihan pembayaran pajak yang belum ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, yaitu kelebihan pembayaran PBJT-Restoran, PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering, PBJT-Hotel, PBJT-Pondok Wisata, PBJT-Wisma Pariwisata, PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi, PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa, Air Tanah, dan BPHTB.
Rincian selengkapnya atas Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah, Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dapat dilihat pada *Lampiran 35, 35a dan 35b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*;
 - b. Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi sebesar Rp144.000,00 yang terjadi karena kelebihan pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara yang akan direstitusi pada tahun 2026; dan
 - c. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp131.498.493,00 terdiri atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler yang merupakan pengembalian dana yang diterima Satuan Pendidikan tahun 2024 yang akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Kas Umum





Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

2. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp597.899.200,00 terdiri dari:
 - a. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp197.499.200,00 yang merupakan pengembalian Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler, Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja, dan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler dari satuan pendidikan yang tidak bersedia menerima dana transfer sehingga dana tersebut yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - b. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah sebesar Rp400.400.000,00 yang merupakan sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi yang harus dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan surat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor B.24.600.4/1068/SEKRET/DKLH tanggal 5 Maret 2025.

5.3.3. Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca, yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan Ekuitas sebagai berikut.

Tabel 5. 122 Rincian Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas	7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76	227.087.641.223,67	2,95

Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *point 5.6.4. Saldo Ekuitas Akhir*.

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Rincian Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	2.295.966.391.742,35	1.707.729.065.670,63	588.237.326.071,72
Pendapatan Transfer-LO	1.254.302.177.171,00	1.394.672.099.694,00	(140.369.922.523,00)





Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	53.498.508.484,48	82.846.964.445,11	(29.348.455.960,63)
Jumlah	3.603.767.077.397,83	3.185.248.129.809,74	418.518.947.588,09

Gambar 5. 4 Komposisi Pendapatan Tahun 2025



5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 124 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pajak Daerah-LO	1.944.841.681.464,21	1.430.670.222.136,32	514.171.459.327,89
Retribusi Daerah-LO	190.144.974.835,20	158.082.484.515,73	32.062.490.319,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	100.261.240.483,21	75.729.806.844,40	24.531.433.638,81
Lain-lain PAD yang Sah-LO	60.718.494.959,73	43.246.552.174,18	17.471.942.785,55
Jumlah	2.295.966.391.742,35	1.707.729.065.670,63	588.237.326.071,72

5.4.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 125 Rincian Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pajak Reklame-LO	5.633.050.187,03	4.087.692.838,64	1.545.357.348,39
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	5.633.050.187,03	4.087.692.838,64	1.545.357.348,39
Pajak Air Tanah-LO	8.846.774.454,00	8.285.665.442,00	561.109.012,00
Pajak Air Tanah-LO	8.846.774.454,00	8.285.665.442,00	561.109.012,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	160.549.751.870,00	148.632.063.038,00	11.917.688.832,00
PBBP2-LO	160.549.751.870,00	148.632.063.038,00	11.917.688.832,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	300.613.093.749,00	370.364.558.625,00	(69.751.464.876,00)





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	300.613.093.749,00	370.364.558.625,00	(69.751.464.876,00)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	1.046.109.134.904,18	899.300.242.192,68	146.808.892.711,50
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	424.175.845.532,08	357.057.650.304,30	67.118.195.227,78
PBJT-Tenaga Listrik-LO	257.035.821.724,00	234.622.379.925,00	22.413.441.799,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	296.639.720.993,00	254.666.934.747,69	41.972.786.245,31
PBJT-Jasa Parkir-LO	8.589.361.670,00	7.591.985.749,00	997.375.921,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	59.668.384.985,10	45.361.291.466,69	14.307.093.518,41
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	251.300.400.900,00	0,00	251.300.400.900,00
Opsen PKB-LO	251.300.400.900,00	0,00	251.300.400.900,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	171.789.475.400,00	0,00	171.789.475.400,00
Opsen BBNKB-LO	171.789.475.400,00	0,00	171.789.475.400,00
Jumlah	1.944.841.681.464,21	1.430.670.222.136,32	514.171.459.327,89

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp514.171.459.327,89 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Kenaikan nilai Pajak Reklame-LO sebesar Rp1.545.357.348,39 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari pendapatan pajak reklame-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.545.821.919,89;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang pajak reklame dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp297.362.329,30;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan koreksi piutang pajak reklame dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp136.323.740,00;
 - 4) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan pendapatan diterima di muka sebesar Rp161.503.160,80;
 - b. Kenaikan nilai Pajak Air Tanah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp561.109.012,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan dari pendapatan Pajak Air Tanah-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp426.244.184,00;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Pajak Air Tanah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.098.569.432,00;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan koreksi piutang Pajak Air Tanah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp119.526.684,00;
 - 4) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka sebesar Rp8.310.448,00;
 - c. Kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp11.917.688.832,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.106.599.528,00;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp30.347.192.544,00;
 - 3) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat penurunan koreksi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.031.032.097,00;





- 4) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp18.353.936.281,00;
- d. Penurunan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp69.751.464.876,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan dari pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp70.864.109.040,00;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.112.644.164,00;
- e. Kenaikan nilai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp146.808.892.711,50 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp122.375.971.425,08, terdiri dari:
 - a) Kenaikan pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp57.175.935.965,79;
 - b) Kenaikan pendapatan PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp22.413.441.799,00;
 - c) Kenaikan pendapatan PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp31.101.490.907,88;
 - d) Kenaikan pendapatan PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp714.094.113,00;
 - e) Kenaikan pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp10.971.008.639,41;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp26.448.123.012,81, terdiri dari:
 - a) Kenaikan piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp13.544.080.302,22;
 - b) Kenaikan piutang PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp9.840.486.868,59;
 - c) Kenaikan piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp2.929.283.222,00;
 - d) Kenaikan piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp134.272.620,00;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan koreksi piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp3.186.958.447,70, terdiri dari:
 - a) Penurunan koreksi piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp113.125,30;
 - b) Kenaikan koreksi piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp3.205.728.339,00;
 - c) Penurunan koreksi piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp18.440.766,00;
 - d) Penurunan koreksi piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp216.000,00;
 - 4) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.171.756.721,31 terdiri dari:
 - a) Penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp532.943.374,21;
 - b) Penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp101.659.268,10;
 - c) Penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp388.360.891,00;





- d) Penurunan pergerakan pendapatan diterima di muka PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp148.793.188,00;
- f. Kenaikan nilai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp251.300.400.900,00 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025; dan
- g. Kenaikan nilai Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp171.789.475.400,00 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025.
2. Pengakuan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp70.361.586.951,73 (Rp1.944.841.681.464,21 - Rp1.874.480.094.512,48). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Penjelasan Selisih Pajak Daerah pada LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	70.361.586.951,73
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengakuan Pendapatan-LO dari saldo Piutang Pajak atas ketetapan Tahun 2025	719.537.716.373,92
Pengakuan Pendapatan-LO atas Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024	5.082.755.935,13
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengurangan Pendapatan-LO atas pembayaran Piutang Pajak Tahun 2024	649.586.203.255,70
Pengurangan Pendapatan-LO atas Pendapatan diterima dimuka tahun 2025	4.672.682.101,62
Jumlah Penjelasan Selisih	70.361.586.951,73

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 127 Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Jasa Umum-LO	173.454.161.967,70	144.067.247.819,73	29.386.914.147,97
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	173.186.266.967,70	142.485.603.819,73	30.700.663.147,97
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	267.895.000,00	1.581.644.000,00	(1.313.749.000,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	4.186.273.731,50	3.259.310.665,00	926.963.066,50
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	741.924.910,00	(741.924.910,00)
Retribusi Terminal-LO	0,00	1.108.953.755,00	(1.108.953.755,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	799.415.450,00	983.145.000,00	(183.729.550,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	741.243.500,00	398.764.500,00	342.479.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.645.614.781,50	26.522.500,00	2.619.092.281,50
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	12.504.539.136,00	10.755.926.031,00	1.748.613.105,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	4.479.190.436,00	3.604.738.651,00	874.451.785,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	8.025.348.700,00	7.151.187.380,00	874.161.320,00
Jumlah	190.144.974.835,20	158.082.484.515,73	32.062.490.319,47





Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp32.062.490.319,47 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Kenaikan nilai Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp29.386.914.147,97 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp34.942.888.301,68;
 - 2) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan piutang Retribusi Jasa Umum dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp22.243.121.275,91;
 - 3) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat penurunan koreksi piutang Retribusi Jasa Umum dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp16.687.291.122,20;
 - 4) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum sebesar Rp144.000,00;
 - b. Perubahan nilai Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp926.963.066,50 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.067.603.939,00;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Retribusi Jasa Usaha dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.190.005,00;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan pendapatan diterima di muka sebesar Rp142.830.877,50; dan
 - c. Perubahan nilai Retribusi Perizinan Tertentu-LO sebesar Rp1.748.613.105,00 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025.
2. Pengakuan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp3.984.118.179,31 (Rp190.144.974.835,20 - Rp194.129.093.014,51). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 128 Penjelasan Selisih Retribusi Daerah pada LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	(3.984.118.179,31)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengakuan Pendapatan-LO atas Piutang Retribusi Tahun 2025	16.302.915.516,89
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	142.830.877,50
Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum Tahun 2025	144.000,00
Pengurangan Pendapatan-LO atas pembayaran Piutang Retribusi Tahun 2024	20.144.058.818,70
Jumlah Penjelasan Selisih	(3.984.118.179,31)

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





Tabel 5. 129 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	71.670.486.314,21	51.731.070.121,40	19.939.416.192,81
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	2.305.313.847,00	532.935.831,00	1.772.378.016,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	26.285.440.322,00	23.465.800.892,00	2.819.639.430,00
Jumlah	100.261.240.483,21	75.729.806.844,40	24.531.433.638,81

Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 dari tahun 2024 sebesar Rp24.531.433.638,81 disebabkan hal-hal berikut:
 - Peningkatan penerimaan dividen yang berasal dari kenaikan dividen PT BPD Bali sebesar Rp19.924.868.749,81;
 - Peningkatan penerimaan dividen yang berasal dari kenaikan dividen PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp14.547.443,00;
 - Peningkatan penerimaan dividen yang berasal dari kenaikan dividen Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sebesar Rp2.819.639.430,00; dan
 - Peningkatan penerimaan dividen yang berasal dari kenaikan dividen dari Perumda Bhukti Praja Sewakadarma sebesar Rp1.772.378.016,00.
- Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025.

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 130 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	917.632.345,00	407.153.798,60	510.478.546,40
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	917.632.345,00	407.153.798,60	510.478.546,40
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.770.026.179,67	1.773.562.012,94	(3.535.833,27)
Hasil Sewa BMD-LO	1.770.026.179,67	1.773.562.012,94	(3.535.833,27)
Jasa Giro-LO	10.573.848.556,82	7.314.363.031,06	3.259.485.525,76
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	10.573.848.556,82	7.314.363.031,06	3.259.485.525,76
Pendapatan Bunga-LO	16.079.012.425,33	16.510.478.523,16	(431.466.097,83)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	16.079.012.425,33	16.510.478.523,16	(431.466.097,83)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	341.704.899,17	364.373.417,00	(22.668.517,83)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	341.704.899,17	364.373.417,00	(22.668.517,83)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	15.359.636.771,00	10.301.137.850,00	5.058.498.921,00





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	209.992,00	4.179.260,00	(3.969.268,00)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	70.821.314,00	138.690.869,00	(67.869.555,00)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.418.583.807,00	3.038.613.115,00	(1.620.029.308,00)
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	9.846.813.958,00	7.119.654.606,00	2.727.159.352,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	4.005.570.900,00	0,00	4.005.570.900,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	17.636.800,00	0,00	17.636.800,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	200.000,00	139.066.189,00	(138.866.189,00)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	200.000,00	139.066.189,00	(138.866.189,00)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	14.034.468.185,81	5.667.530.768,66	8.366.937.417,15
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	0,00	12.878.956,00	(12.878.956,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	94.719.248,00	168.691.922,00	(73.972.674,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	82.519,00	0,00	82.519,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	81.315.000,00	(81.315.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	188.976.274,87	398.037.860,60	(209.061.585,73)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	155.156.854,00	326.500.482,46	(171.343.628,46)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	202.112.602,81	405.247.103,27	(203.134.500,46)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	49.000.000,00	153.160.000,00	(104.160.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	12.293.418.561,56	194.164.044,23	12.099.254.517,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-LO	0,00	6.404.981,00	(6.404.981,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	0,00	6.643.125,00	(6.643.125,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	753.734.986,00	1.704.164.071,06	(950.429.085,06)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	238.665.000,00	1.792.005.708,15	(1.553.340.708,15)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	0,00	16.110.578,08	(16.110.578,08)





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO	0,00	4.967.820,00	(4.967.820,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-LO	7.145.417,38	0,00	7.145.417,38
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	1.200.000,00	309.164.837,00	(307.964.837,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	45.956.722,19	88.074.279,81	(42.117.557,62)
Pendapatan dari BLUD-LO	1.631.927.596,93	745.581.583,76	886.346.013,17
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.299.427.745,33	590.238.334,00	709.189.411,33
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	332.499.851,60	155.343.249,76	177.156.601,84
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	10.038.000,00	23.305.000,00	(13.267.000,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	10.038.000,00	23.305.000,00	(13.267.000,00)
Jumlah	60.718.494.959,73	43.246.552.174,18	17.471.942.785,55

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp17.471.942.785,55 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Kenaikan nilai Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp510.478.546,40 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025;
 - b. Penurunan nilai Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp3.535.833,27 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp370.708.000,00;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.106.666,67;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan pendapatan diterima di muka sebesar Rp378.183.833,28;
 - 4) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan koreksi pendapatan diterima dimuka dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.833.333,34;





- c. Kenaikan nilai Jasa Giro-LO sebesar Rp3.259.485.525,76 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari Jasa Giro-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025;
 - d. Penurunan nilai Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp431.466.097,83 yang disebabkan oleh penurunan penerimaan dari Bunga-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025;
 - e. Penurunan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp22.668.517,83 yang disebabkan oleh penurunan penerimaan dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025;
 - f. Kenaikan nilai Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO sebesar Rp5.058.498.921,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.165.367.312,00;
 - 2) Peningkatan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Denda Pajak Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp9.440.890.603,56;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan koreksi piutang sebesar Rp6.547.758.994,56;
 - g. Penurunan nilai Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar Rp138.866.189,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp15.846.068,00;
 - 2) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan piutang Denda Retribusi Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp123.020.121,00.
 - h. Kenaikan nilai Pendapatan dari Pengembalian-LO sebesar Rp8.366.937.417,15 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari Pendapatan dari Pengembalian-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp8.484.145.075,39;
 - 2) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp117.207.658,24;
 - i. Kenaikan nilai Pendapatan BLUD-LO sebesar Rp886.346.013,17 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari Pendapatan BLUD-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp729.155.744,84;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan piutang Pendapatan BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp17.444.593.613,66;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan koreksi piutang dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp17.375.053.345,33;
 - 4) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan pendapatan diterima dimuka dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp365.500.000,00;
 - 5) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan koreksi pendapatan diterima dimuka dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp453.150.000,00; dan
 - j. Penurunan nilai Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO sebesar Rp13.267.000,00 yang disebabkan oleh penurunan penerimaan dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025.
2. Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Lain-lain PAD yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp9.458.264.306,38 (Rp60.718.494.959,73 – Rp51.260.230.653,35). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang





mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-lain PAD yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	9.458.264.306,38
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengakuan Pendapatan-LO atas piutang Tahun 2025	26.887.038.525,43
Pengakuan Pendapatan-LO atas pendapatan diterima dimuka tahun 2024	1.730.075.925,54
Penambahan Pendapatan-LO atas koreksi saldo piutang sampai tahun 2024	6.062.508.232,62
Pengurangan Pendapatan-LO atas Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah 2024	7.145.417,38
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengurangan Pendapatan-LO atas Piutang pembayaran piutang sampai dengan tahun 2024	23.656.732.893,05
Pengurangan Pendapatan-LO atas pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2025	1.440.272.408,54
Pengurangan Pendapatan-LO atas Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah 2025	131.498.493,00
Jumlah Penjelasan Selisih	9.458.264.306,38

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 132 Rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.123.655.857.910,00	1.115.044.141.175,00	8.611.716.735,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	130.646.319.261,00	279.627.958.519,00	(148.981.639.258,00)
Jumlah	1.254.302.177.171,00	1.394.672.099.694,00	(140.369.922.523,00)

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 133 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Dana Perimbangan-LO	0,00	1.057.917.669.175,00	(1.057.917.669.175,00)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	90.871.452.000,00	(90.871.452.000,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	688.562.370.657,00	(688.562.370.657,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	28.031.657.114,00	(28.031.657.114,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	250.452.189.404,00	(250.452.189.404,00)





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Insentif Fiskal-LO	21.645.986.000,00	57.126.472.000,00	(35.480.486.000,00)
Insentif Fiskal-LO	0,00	57.126.472.000,00	(57.126.472.000,00)
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	21.645.986.000,00	0,00	21.645.986.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	117.667.481.700,00	0,00	117.667.481.700,00
DBH Pajak-LO	116.777.303.700,00	0,00	116.777.303.700,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	890.178.000,00	0,00	890.178.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	711.632.242.557,00	0,00	711.632.242.557,00
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	541.735.148.333,00	0,00	541.735.148.333,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	169.897.094.224,00	0,00	169.897.094.224,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	272.710.147.653,00	0,00	272.710.147.653,00
DAK Fisik-LO	13.298.904.178,00	0,00	13.298.904.178,00
DAK Non Fisik-LO	259.411.243.475,00	0,00	259.411.243.475,00
Jumlah	1.123.655.857.910,00	1.115.044.141.175,00	8.611.716.735,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp8.611.716.735,00 disebabkan oleh:
 - Penurunan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp7.557.714.065,00 yang disebabkan oleh penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025;
 - Kenaikan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO karena penurunan pergerakan TDF dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp16.018.760.000,00; dan
 - Penurunan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO karena penurunan Utang Kelebihan Dana Transfer sebesar Rp150.670.800,00.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp42.816.355.200,00 (Rp1.123.655.857.910,00 - Rp1.166.472.213.110,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	(42.816.355.200,00)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengakuan utang kelebihan pembayaran dana transfer pemerintah pusat tahun 2024	174.085.000,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengurangan Pendapatan-LO karena pencairan <i>Treasury Deposit Facility</i> Tahun 2024 ke Kas Daerah	2.896.502.000,00
Pengurangan Pendapatan-LO karena Dana Desa yang tidak diakui dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kota	39.896.439.000,00
Pengakuan utang kelebihan pembayaran dana transfer pemerintah pusat tahun 2025	197.499.200,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(42.816.355.200,00)





5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 135 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Bagi Hasil-LO	108.877.820.261,00	279.076.088.951,00	(170.198.268.690,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	108.877.820.261,00	279.076.088.951,00	(170.198.268.690,00)
Bantuan Keuangan-LO	21.768.499.000,00	551.869.568,00	21.216.629.432,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6.980.391.000,00	551.869.568,00	6.428.521.432,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	14.788.108.000,00	0,00	14.788.108.000,00
Jumlah	130.646.319.261,00	279.627.958.519,00	(148.981.639.258,00)

Penjelasan :

1. Penurunan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp148.981.639.258,00 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penurunan nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp170.198.268.690,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan dari Pendapatan Bagi Hasil-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp134.868.828.040,00;
 - 2) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan pergerakan Piutang Bagi Hasil dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp35.329.440.650,00.
 - b. Kenaikan nilai Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp21.216.629.432,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari Bantuan Keuangan-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp20.614.591.292,00;
 - 2) Kenaikan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.002.438.140,00; dan
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan pergerakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp400.400.000,00.
2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp108.877.820.261,00 terdiri dari:

Tabel 5. 136 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	726.981.059,00	89.410.959.433,00	(88.683.978.374,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	918.656.679,00	82.187.483.978,00	(81.268.827.299,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	72.175.462.933,00	73.135.482.841,00	(960.019.908,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	323.899.257,00	275.414.482,00	48.484.775,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	34.732.820.333,00	34.066.748.217,00	666.072.116,00
Jumlah	108.877.820.261,00	279.076.088.951,00	(170.198.268.690,00)





3. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp44.182.229.788,00 (Rp130.646.319.261,00- Rp174.828.549.049,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	(44.182.229.788,00)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Penambahan Pendapatan-LO atas pengakuan piutang Tahun 2025	6.516.345.735,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pengurangan Pendapatan-LO atas pembayaran piutang Tahun 2024	50.298.175.523,00
Penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Antar Daerah Tahun 2025	400.400.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih:	(44.182.229.788,00)

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah-LO	53.498.508.484,48	61.710.783.741,11	(8.212.275.256,63)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	21.136.180.704,00	(21.136.180.704,00)
Jumlah	53.498.508.484,48	82.846.964.445,11	(29.348.455.960,63)

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	12.650.022.408,12	19.401.188.628,00	(6.751.166.219,88)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	34.613.784.950,96	31.625.877.874,11	2.987.907.076,85
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	427.397.564,00	0,00	427.397.564,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.339.503.700,00	10.667.235.782,00	(8.327.732.082,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	3.467.799.861,40	16.481.457,00	3.451.318.404,40
Jumlah	53.498.508.484,48	61.710.783.741,11	(8.212.275.256,63)





Penjelasan:

1. Penurunan nilai Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 sebesar Rp8.212.275.256,63 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penurunan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp6.751.166.219,88 yang disebabkan oleh penurunan penerimaan hibah berupa persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp176.161.138,88 dan penurunan penerimaan hibah berupa Barang Milik Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp6.575.005.081,00;
 - b. Kenaikan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp2.987.907.076,85 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan berupa persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp3.973.802.076,85;
 - 2) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan berupa Barang Milik Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp985.895.000,00;
 - c. Kenaikan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp427.397.564,00 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan berupa Barang Milik Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025;
 - d. Penurunan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp8.327.732.082,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Peningkatan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.172.355.800,00;
 - 2) Penambahan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan berupa persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp90.426.053,00;
 - 3) Penurunan nilai pendapatan-LO akibat penurunan penerimaan berupa Barang Milik Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp9.917.058.935,00;
 - 4) Penambahan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan berupa belanja pemeliharaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp326.545.000,00;
 - e. Kenaikan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp3.451.318.404,40 yang disebabkan oleh:
 - 1) Peningkatan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis -LRA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp158.159.780,40; dan
 - 2) Penambahan nilai pendapatan-LO akibat peningkatan penerimaan berupa persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp3.293.158.624,00.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp52.151.511.447,08 (Rp53.498.508.484,48 - Rp1.346.997.037,40). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah pada LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	52.151.511.447,08
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Hibah Obat dari Kementerian Kesehatan (Persediaan)	612.554.993,12
Hibah dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (KIB B)	5.168.160.000,00
Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Peralatan dan Mesin)	426.090.000,00





Uraian	Nilai
Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Dasar (Peralatan dan Mesin)	76.729.100,00
Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Gedung dan Bangunan)	2.477.356.520,00
Hibah dari Kementerian PUPR (Gedung dan Bangunan)	3.457.944.000,00
Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Jalan, Jaringan, dan Irigasi)	10.790.000,00
Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Jalan, Jaringan, dan Irigasi)	415.474.795,00
Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Aset Tetap Lainnya)	4.923.000,00
Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Persediaan)	31.459.707.856,96
Hibah Obat dari BKKBN Provinsi Bali (Persediaan)	143.518.094,00
Hibah dari BPBD Provinsi Bali (Persediaan)	12.454.000,00
Hibah dari Provinsi Bali (Tanah)	2.960.000.000,00
Hibah dari BPBD Provinsi Bali (Peralatan dan Mesin)	38.105.000,00
Hibah dari Komite Sekolah (Peralatan dan Mesin)	230.261.000,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan (Peralatan dan Mesin)	1.850.000,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan (Peralatan dan Mesin)	8.000.000,00
Hibah dari Komite Sekolah (Gedung dan Bangunan)	102.287.300,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan (Gedung dan Bangunan)	10.000.000,00
Hibah dari Komite Sekolah (Jalan, Jaringan, dan Irigasi)	49.699.264,00
Hibah dari Komite Sekolah (Aset Tetap Lainnya)	25.300.000,00
Hibah Pemeliharaan Genzet dari Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Pemeliharaan)	326.545.000,00
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri (Persediaan)	321.695.643,00
Hibah dari PT Cyber Network Indonesia (Peralatan dan Mesin)	47.490.000,00
Hibah dari Bank Indonesia (Peralatan dan Mesin)	111.000.000,00
Hibah dari PT Pertamina Training & Consulting (Peralatan dan Mesin)	244.212.000,00
Hibah dari PT BPD Bali (Peralatan dan Mesin)	86.136.000,00
Hibah dari Pertamina (Peralatan dan Mesin)	7.500.000,00
Hibah dari PLN (Peralatan dan Mesin)	11.005.400,00
Hibah dari Pertamina (Peralatan dan Mesin)	3.841.857,00
Hibah dari Pertamina (Peralatan dan Mesin)	7.722.000,00
Sumbangan dari masyarakat berupa alat bantu jalan/mobilitas untuk pasien dengan gangguan gerak	9.860.000,00
Sumbangan dari masyarakat berupa sembako	3.000.000,00
Sumbangan dari masyarakat berupa bahan kebutuhan pokok untuk korban banjir	3.280.298.624,00
Jumlah Penjelasan Selisih	52.151.511.447,08

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu saldo rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:





Tabel 5. 141 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	21.136.180.704,00	(21.136.180.704,00)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh penurunan penerimaan Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp21.136.180.704,00;
 - b. Pengakuan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LO Tahun 2025 ini *sama dengan* saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LRA TA 2025 yang mana pendapatan ini sudah tidak ada pada TA 2025 berkaitan dengan sudah berubahnya status puskesmas di Kota Denpasar menjadi BLUD.

5.4.2. Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

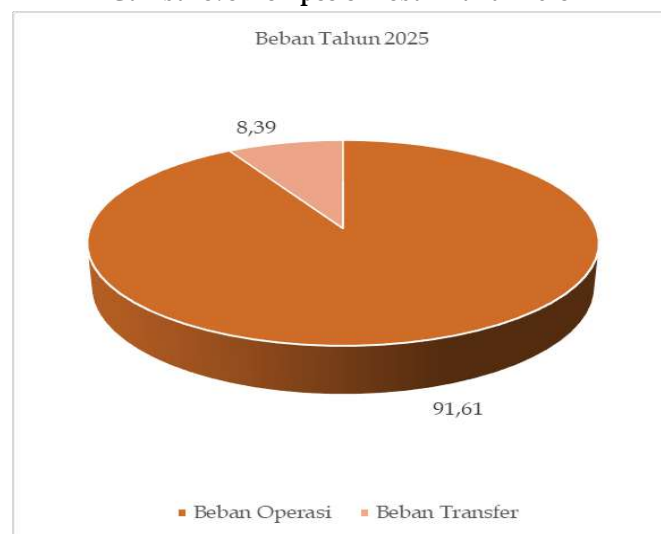
Tabel 5. 142 Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Operasi	2.744.317.340.355,47	2.362.089.236.871,33	382.228.103.484,14
Beban Transfer	350.232.536.324,00	216.235.380.003,00	133.997.156.321,00
Jumlah	3.094.549.876.679,47	2.578.324.616.874,33	516.225.259.805,14

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Denpasar digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5. 5 Komposisi Beban Tahun 2025





5.4.2.1. Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Pegawai	1.212.732.099.580,78	1.001.514.592.822,56	211.217.506.758,22
Beban Barang dan Jasa	965.949.773.281,45	950.912.423.760,62	15.037.349.520,83
Beban Subsidi	0,00	78.000.000,00	(78.000.000,00)
Beban Hibah	261.270.327.505,57	200.493.397.769,85	60.776.929.735,72
Beban Bantuan Sosial	7.432.402.728,00	7.820.868.829,00	(388.466.101,00)
Beban Penyisihan Piutang	29.342.109.835,97	23.112.216.192,15	6.229.893.643,82
Beban Penyusutan dan Amortisasi	267.590.627.423,70	178.157.737.497,15	89.432.889.926,55
Jumlah	2.744.317.340.355,47	2.362.089.236.871,33	382.228.103.484,14

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Denpasar digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5. 6 Komposisi Beban Operasi Tahun 2025



5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	584.391.242.939,00	439.939.110.284,00	144.452.132.655,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	521.297.106.316,33	345.384.412.041,00	175.912.694.275,33
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	131.541.149.559,60	(131.541.149.559,60)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	43.722.406.839,00	43.209.581.618,00	512.825.221,00





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.223.902.760,00	991.593.814,00	232.308.946,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.420.920.000,00	2.164.490.000,00	1.256.430.000,00
Beban Pegawai BLUD	58.676.520.726,45	38.284.255.505,96	20.392.265.220,49
Jumlah	1.212.732.099.580,78	1.001.514.592.822,56	211.217.506.758,22

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan nilai Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp144.452.132.655,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp143.536.083.840,00;
 - 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp251.179.476,00;
 - 3) Penambahan nilai beban akibat pergerakan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa ke Beban Pegawai sebesar Rp664.869.339,00;
 - b. Peningkatan nilai Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp175.912.694.275,33 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp187.528.006.134,00;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp11.597.758.858,67;
 - 3) Penurunan nilai beban akibat penurunan koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp17.553.000,00;
 - c. Penurunan nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp131.541.149.559,60 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp126.708.728.431,00;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar Rp4.832.421.128,60;
 - d. Peningkatan nilai Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp512.825.221,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp512.825.221,00;
 - e. Peningkatan nilai Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp232.308.946,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Peningkatan nilai beban akibat peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp111.814.726,00;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp120.494.220,00;





- f. Peningkatan nilai Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp1.256.430.000,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp1.256.430.000,00; dan
 - g. Peningkatan Beban Pegawai BLUD sebesar Rp20.392.265.220,49 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp20.392.265.220,49.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp10.616.551.763,67 (Rp1.212.732.099.580,78 - Rp1.223.348.651.344,45). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Penjelasan Selisih Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	(10.616.551.763,67)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Penambahan beban LO karena pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	17.756.522.152,00
Penambahan beban LO karena Reklasifikasi Beban Pegawai dari Beban Barang dan Jasa	664.869.339,00
Pengurangan Beban LO:	
Pengurangan beban LO karena koreksi Utang Belanja Pegawai	17.553.000,00
Pengurangan beban LO karena Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	29.020.390.254,67
Jumlah Penjelasan Selisih	(10.616.551.763,67)

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Barang	354.766.848.573,92	293.742.830.099,21	61.024.018.474,71
Beban Jasa	408.728.186.023,53	469.755.118.439,74	(61.026.932.416,21)
Beban Pemeliharaan	83.193.749.008,00	56.572.105.987,61	26.621.643.020,39
Beban Perjalanan Dinas	17.805.051.162,00	42.567.440.240,00	(24.762.389.078,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.618.148.445,00	83.735.715.666,06	12.882.432.778,94
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.837.790.069,00	4.539.213.328,00	298.576.741,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah	965.949.773.281,45	950.912.423.760,62	15.037.349.520,83

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan nilai Beban Barang sebesar Rp61.024.018.474,71 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Barang dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp25.349.929.383,38;





- 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp5.408.002.744,16;
- 3) Penambahan nilai beban akibat penurunan pergerakan persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp18.517.502.929,31;
- 4) Penurunan nilai beban akibat penurunan koreksi saldo awal persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp62.323.369,02;
- 5) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Utang Belanja Barang dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp12.177.417.349,25;
- 6) Penambahan nilai beban akibat peningkatan penggunaan persediaan obat yang bersumber dari hibah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp4.478.311.937,97;
- 7) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp835.932.925,00;
- 8) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Aset Tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.479.085.972,71;
- 9) Pengurangan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Aset Tetap karena memenuhi batas kapitalisasi aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp963.123.000,00;
- 10) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari aset tetap karena kesalahan penganggaran dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp180.208.200,00;
- 11) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp17.338.324.500,45;
- b. Penurunan nilai Beban Jasa sebesar Rp61.026.932.416,21 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan Belanja Jasa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp56.451.235.813,83;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp5.336.969.382,50;
 - 3) Penambahan nilai beban akibat penurunan pergerakan Beban Dibayar Dimuka atas sewa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.658.150.715,00;
 - 4) Penurunan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Beban Dibayar Dimuka atas asuransi dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp4.919.881,67;
 - 5) Penambahan nilai beban akibat peningkatan koreksi saldo awal Beban Dibayar Dimuka dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp3.778.789.166,67;
 - 6) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Utang Belanja Jasa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.709.499.866,23;
 - 7) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp46.600.000,00;
 - 8) Penurunan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Aset Tetap karena memenuhi batas kapitalisasi aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 9) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp7.751.977.747,11;
 - 10) Penurunan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Beban Pegawai dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp664.869.339,00;
- c. Peningkatan nilai Beban Pemeliharaan sebesar Rp26.621.643.020,39 yang disebabkan oleh:





- 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Pemeliharaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp23.498.845.780,39;
- 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp790.254.809,00;
- 3) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Utang Belanja Pemeliharaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp70.722.000,00;
- 4) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp148.320.000,00;
- 5) Penambahan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi ke Aset Tetap karena memenuhi batas kapitalisasi aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp48.800.000,00;
- 6) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.738.155.431,00;
- 7) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pengakuan beban pemeliharaan yang bersumber dari hibah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp326.545.000,00;
- d. Penurunan nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp24.762.389.078,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan Belanja Perjalanan Dinas dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp24.644.597.155,00;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp175.000,00;
 - 3) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp117.616.923,00;
- e. Peningkatan nilai Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebesar Rp12.882.432.778,94 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp12.763.893.020,00;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat peningkatan pergerakan persediaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp231.575.000,00;
 - 3) Peningkatan nilai beban akibat penurunan pergerakan Beban Dibayar Dimuka atas asuransi dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp4.583.333,34;
 - 4) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Utang Belanja Pemeliharaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp162.175.413,40;
 - 5) Penambahan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi ke Aset Tetap karena memenuhi batas kapitalisasi aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp99.500.000,00;
 - 6) Penurunan nilai beban akibat penurunan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp54.943.161,00;
- f. Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp0,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan Belanja Barang dan Jasa BOS dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp64.308.677.923,84;
 - 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp64.308.677.923,84;
- g. Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp0,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Barang dan Jasa BOSP dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp65.169.791.094,50;





- 2) Pengurangan nilai beban akibat pengurangan reklasifikasi ke Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp65.169.791.094,50;
- h. Peningkatan nilai Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp298.576.741,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp298.576.741,00;
- i. Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp0,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Barang dan Jasa BLUD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp11.151.942.100,34; dan
 - 2) Pengurangan nilai beban akibat pengurangan reklasifikasi ke Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp11.151.942.100,34.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp35.314.240.711,01 (Rp965.949.773.281,45 – Rp930.635.532.570,44). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	35.314.240.711,01
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Penambahan beban LO karena penggunaan persediaan tahun 2024	55.166.267.268,23
Penambahan beban LO karena pengakuan atas Beban dibayar dimuka atas sewa tahun 2024	4.601.816.666,67
Penambahan beban LO karena pengakuan atas Beban dibayar dimuka atas asuransi tahun 2024	346.884.166,67
Penambahan beban LO atas utang persediaan tahun 2025	18.094.721.067,39
Penambahan beban LO karena pengakuan beban atas utang belanja barang dan jasa tahun 2025	7.373.176.861,40
Penambahan beban LO karena penggunaan persediaan atas hibah obat	32.215.780.944,08
Penambahan beban LO karena belanja modal yang masuk dari Ekstrakomptabel	2.778.044.008,28
Penambahan beban LO karena reklasifikasi dari BTT	1.030.852.925,00
Penambahan beban LO karena pengakuan beban atas penggunaan hibah pemeliharaan	326.545.000,00
Penambahan beban LO karena koreksi saldo awal beban dibayar dimuka atas sewa	2.168.229.166,67
Penambahan beban LO karena koreksi saldo awal beban dibayar dimuka atas Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.610.560.000,00
Pengurangan Beban LO:	
Pengurangan beban LO karena pengakuan persediaan tahun 2025	56.162.571.908,14
Pengurangan beban LO karena pengakuan Beban dibayar dimuka atas sewa tahun 2025	6.391.107.618,34
Pengurangan beban LO karena pengakuan Beban dibayar dimuka atas asuransi tahun 2025	349.688.215,00





Uraian	Nilai
Pengurangan beban LO karena utang persediaan tahun 2024 yang sudah diakui bebannya tahun 2024	20.212.459.041,25
Pengurangan beban LO karena utang barang dan jasa tahun 2024 yang sudah diakui bebannya tahun 2024	5.641.874.612,53
Pengurangan beban LO karena reklasifikasi ke Beban Pegawai	664.869.339,00
Pengurangan beban LO karena reklasifikasi saldo awal persediaan	2.943.629,12
Pengurangan beban LO karena reklasifikasi keluar ke aset tetap	973.123.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	35.314.240.711,01

5.4.2.1.3. Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Rincian Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Subsidi kepada BUMD	0,00	78.000.000,00	(78.000.000,00)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Subsidi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh penurunan Belanja Subsidi kepada BUMD dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp78.000.000,00; dan
2. Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2025 ini *sama dengan* saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2025, yaitu sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4. Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	204.468.976.404,57	145.369.836.790,85	59.099.139.613,72
Beban Hibah Dana BOS	41.822.118.251,00	40.270.678.330,00	1.551.439.921,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.707.940.000,00	1.639.370.001,00	68.569.999,00
Beban Hibah Dana BOSP	13.271.292.850,00	13.213.512.648,00	57.780.202,00
Jumlah	261.270.327.505,57	200.493.397.769,85	60.776.929.735,72

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan nilai Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp59.099.139.613,72 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp48.290.799.758,15;





- 2) Penambahan nilai beban akibat penurunan pergerakan persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Persediaan Hibah) dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.956.499.811,00;
 - 3) Penambahan nilai beban akibat peningkatan penggunaan persediaan yang bersumber dari hibah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.702.913.677,00;
 - 4) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi dari Aset Tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp5.148.926.367,57;
 - b. Peningkatan nilai Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp1.551.439.921,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Hibah Dana BOS dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.551.439.921,00;
 - c. Peningkatan nilai Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp68.569.999,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp68.569.999,00; dan
 - d. Peningkatan nilai Beban Hibah Dana BOSP sebesar Rp57.780.202,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Hibah Dana BOSP dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp57.780.202,00.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp6.114.560.772,57 (Rp261.270.327.505,57 – Rp255.155.766.733,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Penjelasan Selisih Beban Hibah

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	6.114.560.772,57
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Penambahan beban LO karena penggunaan persediaan TA 2024	5.845.809.161,00
Penambahan beban LO atas hibah CSR	3.627.308.267,00
Penambahan beban LO atas reklasifikasi masuk dari belanja modal	5.250.167.567,57
Pengurangan Beban LO:	
Pengurangan beban LO karena persediaan TA 2025	8.608.724.223,00
Jumlah Penjelasan Selisih	6.114.560.772,57

5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.933.175.000,00	2.325.125.000,00	608.050.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	3.459.727.728,00	3.371.418.829,00	88.308.899,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.039.500.000,00	2.124.325.000,00	(1.084.825.000,00)
Jumlah	7.432.402.728,00	7.820.868.829,00	(388.466.101,00)





Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pergerakan angka Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu pada LRA 2024 ke 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp608.050.000,00;
 - b. Pergerakan angka Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga pada LRA 2024 ke 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp88.308.899,00; dan
 - c. Pergerakan angka Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) mengalami penurunan sebesar Rp1.084.825.000,00.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025, yaitu sebesar Rp7.432.402.728,00.

5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	27.324.187.806,21	28.420.228.717,29	(1.096.040.911,08)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.195.269,50	923.571.255,82	(922.375.986,32)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.016.726.760,26	(6.231.583.780,96)	8.248.310.541,22
Jumlah	29.342.109.835,97	23.112.216.192,15	6.229.893.643,82

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penurunan nilai Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.096.040.911,08 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp17.256.502.410,71;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan penghapusan piutang dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp18.353.936.281,00;
 - 3) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.392.959,21;
 - b. Penurunan nilai Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp922.375.986,32 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp2.365.015.931,95;
 - 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.442.639.945,63;
 - c. Penambahan nilai Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp8.248.310.541,22 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp8.085.109.241,16; dan





- 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan reklasifikasi ke Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp163.201.300,06.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.607.234.204,90 [Rp29.342.109.835,97 – (Rp463.995.783.488,20 – Rp436.260.907.857,13)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	1.607.234.204,90
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang:	
Reklasifikasi Beban Penyisihan ke Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.607.234.204,90
Jumlah Penjelasan Selisih	1.607.234.204,90

5.4.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.655.145.474,31	64.394.256.184,53	20.260.889.289,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.624.929.568,55	31.683.139.367,00	(15.058.209.798,45)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.185.199.268,84	80.840.190.312,62	84.345.008.956,22
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	287.224.338,00	471.198.288,00	(183.973.950,00)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	838.128.774,00	768.953.345,00	69.175.429,00
Jumlah	267.590.627.423,70	178.157.737.497,15	89.432.889.926,55

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.260.889.289,78 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Penyusutan Peralatan dan Mesin dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp4.954.362.242,79;
 - 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan penghapusan aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp15.306.527.046,99;
 - b. Penurunan nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.058.209.798,45 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Penyusutan Gedung dan Bangunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp13.755.345.682,45;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan penghapusan aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp1.302.864.116,00;
 - c. Peningkatan nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp84.345.008.956,22 yang disebabkan oleh:





- 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp84.532.411.880,22;
- 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan penghapusan aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp187.402.924,00;
- d. Penurunan nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp183.973.950,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penambahan nilai beban akibat peningkatan pergerakan Penyusutan Aset Tetap Lainnya dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp226.540.247,00;
 - 2) Penurunan nilai beban akibat penurunan penghapusan aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp410.514.197,00;
- e. Peningkatan nilai Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp69.175.429,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Penurunan nilai beban akibat penurunan pergerakan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp48.774.571,00; dan
 - 2) Penambahan nilai beban akibat peningkatan penghapusan aset dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp117.950.000,00.
2. Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada **point 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan** serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 **point 5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** sebesar Rp31.040.456.678,66 (Rp267.590.627.423,70 - [Rp235.829.991.971,04 + Rp720.178.774,00]). Hal tersebut disebabkan adanya Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi atas Barang Milik Daerah yang dihapuskan tahun 2025 sebesar Rp31.040.456.678,66.
3. Rincian penghapusan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 36 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025**.

5.4.2.2. Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Rincian Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Bagi Hasil	189.174.374.204,00	111.797.414.525,00	77.376.959.679,00
Beban Bantuan Keuangan	161.058.162.120,00	104.437.965.478,00	56.620.196.642,00
Jumlah	350.232.536.324,00	216.235.380.003,00	133.997.156.321,00

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:





Tabel 5. 156 Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	187.448.009.452,00	110.000.000.000,00	77.448.009.452,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.726.364.752,00	1.797.414.525,00	(71.049.773,00)
Jumlah	189.174.374.204,00	111.797.414.525,00	77.376.959.679,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp77.448.009.452,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Peningkatan nilai Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp105.645.287.957,00;
 - 2) Penurunan nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa karena adanya koreksi Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp44.645.287.957,00;
 - 3) Peningkatan nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa karena pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2025 sebesar Rp16.448.009.452,00;
 - b. Penurunan nilai Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp71.049.773,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Peningkatan nilai Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp372.668.208,00;
 - 2) Penurunan nilai Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa karena adanya koreksi Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp690.516.285,00; dan
 - 3) Peningkatan nilai Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa karena pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2025 sebesar Rp246.798.304,00.
2. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Bagi Hasil dalam LRA TA 2025 sebesar Rp28.640.996.486,00 (Rp189.174.374.204,00 - Rp217.815.370.690,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bagi Hasil dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Penjelasan Selisih Transfer Bagi Hasil

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	28.640.996.486,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO	
Pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2025	16.448.009.452,00
Pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.798.304,00
Pengurangan Beban LO:	
Koreksi Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2023 dan 2024	44.645.287.957,00





Uraian	Nilai
Koreksi Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2023 dan 2024	690.516.285,00
Jumlah Penjelasan Selisih	28.640.996.486,00

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	14.029.778.120,00	0,00	14.029.778.120,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000.000,00	12.800.000.000,00	24.700.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	109.528.384.000,00	91.637.965.478,00	17.890.418.522,00
Jumlah	161.058.162.120,00	104.437.965.478,00	56.620.196.642,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Peningkatan nilai Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp14.029.778.120,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp14.029.778.120,00;
 - Peningkatan nilai Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp24.700.000.000,00 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp24.700.000.000,00;
 - Peningkatan nilai Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp17.890.418.522,00 yang disebabkan oleh:
 - Penambahan nilai beban akibat peningkatan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp22.958.291.522,00; dan
 - Penurunan nilai beban akibat peningkatan Dana Desa yang seharusnya tidak merupakan beban pemda karena disalurkan langsung ke Pemerintahan Desa dan pengelolaan dana desa ada pada masing-masing desa dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp5.067.873.000,00.
- Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp39.896.439.000 (Rp161.058.162.120,00 – Rp200.954.601.120,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



**Tabel 5. 159 Penjelasan Selisih Beban Bantuan Keuangan**

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(39.896.439.000,00)
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan Beban LO:	
Pengurangan beban LO atas Dana Desa yang seharusnya tidak merupakan beban pemda karena pengelolaan dana desa ada pada Desa masing-masing	39.896.439.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(39.896.439.000,00)

5.4.3. Surplus Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Rincian Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	20.175.192.784,90	22.804.203.464,48	(2.629.010.679,58)

5.4.3.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Rincian dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.607.234.204,90	0,00	1.607.234.204,90
Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	18.567.958.580,00	22.804.203.464,48	(4.236.244.884,48)
Jumlah	20.175.192.784,90	22.804.203.464,48	(2.629.010.679,58)

5.4.3.1.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.607.234.204,90	0,00	1.607.234.204,90

Penjelasan:

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp1.392.959,21, Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp1.442.639.945,63 dan Penyisihan Piutang





Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp163.201.300,06. Rincian masing-masing penyisihan piutang sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah
 - a. Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 1.392.959,21
2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
 - a. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.399.456.020,63
 - b. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 572.340,00
 - c. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 42.611.585,00
3. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
 - a. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel 71.471.424,60
 - b. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 3.811.104,62
 - c. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 53.475.237,90
 - d. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 2.003.297,84
 - e. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 22.624.487,00
 - f. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.815.748,10

5.4.3.1.2. Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	18.567.958.580,00	22.804.203.464,48	(4.236.244.884,48)
Jumlah	18.567.958.580,00	22.804.203.464,48	(4.236.244.884,48)

Penjelasan:

Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO merupakan Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi terdiri dari:

1. Penambahan Nilai Investasi Permanen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Tahun 2025 sebesar Rp22.508.806.152,00 sesuai dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan pada Laporan Auditor Independen nomor 00003/2.1266/AU.8/04/1612-2/1/II/2026;





2. Penurunan Nilai Investasi Permanen Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Tahun 2025 sebesar Rp4.462.628.352,00 sesuai dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto pada Laporan Auditor Independen nomor 00043/2.1151/AU.8/05/0332-1/1/IV/2026; dan
3. Penambahan Nilai Investasi Permanen Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Tahun 2025 sebesar Rp521.780.780,00 sesuai dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto pada Laporan Auditor Independen nomor 00017/2.1151/AU.2/05/0332-1/1/III/2026.

5.4.4. Defisit Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 164 Rincian Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	23.203.245.054,41	10.949.898.389,75	12.253.346.664,66

5.4.4.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos enjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024, yaitu rincian atas saldo Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Rincian Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	23.203.245.054,41	10.949.898.389,75	12.253.346.664,66

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2025 dari TA 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan nilai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO karena peningkatan penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp2.829.587.859,66;
 - b. Penurunan nilai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO karena peningkatan penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp3.933.348.374,49;
 - c. Penambahan nilai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO karena peningkatan penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp220.944.097,00;
 - d. Penambahan nilai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO karena peningkatan penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp5.372.753.853,49; dan
 - e. Penambahan nilai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO karena peningkatan penghapusan aset lain-lain sebesar Rp7.763.409.229,00.
2. Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Pemerintah Kota Denpasar TA 2025 sebesar Rp23.203.245.054,41 merupakan nilai buku penghapusan BMD yang terdiri dari:
 - a. Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp3.113.059.701,66 terdiri dari:





- 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 107.413.815,00
 - 2) Dinas Kesehatan 1.888.579.504,66
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17.083.333,00
 - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 843.334,00
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 123.369.010,00
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.200.158,00
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 462.500,00
 - 8) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 396.710.834,00
 - 9) Sekretariat DPRD 486.857.138,00
 - 10) Kecamatan Denpasar Timur 1.852.500,00
 - 11) Kecamatan Denpasar Selatan 222.750,00
 - 12) Kecamatan Denpasar Utara 116.283,00
 - 13) Sekretariat Daerah 64.348.542,00
 - b. Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp6.205.263.943,26 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 5.102.382.150,26
 - 2) Dinas Kesehatan 912.316.110,00
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 67.955.760,00
 - 4) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 46.933.333,00
 - 5) Kecamatan Denpasar Barat 75.676.590,00
 - c. Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp239.860.383,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.195.383,00
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 238.665.000,00
 - d. Penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp5.881.651.797,49 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 3.175.905.855,79
 - 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.556.491.882,70
 - 3) Dinas Kebudayaan 149.254.059,00
 - e. Penghapusan aset lain-lain berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.763.409.229,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Rincian penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 36 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.4.5. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024, yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 166 Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.843.439.081,00	2.335.500.000,93	3.507.939.080,07
Jumlah	(5.843.439.081,00)	(2.335.500.000,93)	(3.507.939.080,07)

Penjelasan:

1. Penurunan nilai Pos Luar Biasa TA 2025 dari TA 2024 disebabkan hal-hal berikut:





- Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa-LO pada TA 2025 dan 2024;
 - Penambahan nilai Beban Luar Biasa akibat peningkatan Belanja Tidak Terduga dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp4.458.753.015,00;
 - Penurunan nilai Beban Luar Biasa akibat terdapat reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp1.030.852.925,00; dan
 - Penambahan nilai Beban Luar Biasa akibat penurunan pergerakan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah yang dibayarkan menggunakan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp80.038.990,07.
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.030.852.925,00 (Rp5.843.439.081,00 – Rp6.874.292.006,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Penjelasan Selisih Beban Luar Biasa

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	(1.030.852.925,00)
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan Beban dalam LO:	
Pengurangan beban LO karena reklasifikasi Beban Tidak Terduga penanganan banjir ke Beban Barang dan Jasa	1.030.852.925,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.030.852.925,00)

5.4.6. Surplus/(Defisit)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/ (Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5. 168 Rincian Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	2.295.966.391.742,35	1.707.729.065.670,63	588.237.326.071,72
Pajak Daerah-LO	1.944.841.681.464,21	1.430.670.222.136,32	514.171.459.327,89
Retribusi Daerah-LO	190.144.974.835,20	158.082.484.515,73	32.062.490.319,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	100.261.240.483,21	75.729.806.844,40	24.531.433.638,81
Lain-lain PAD yang Sah-LO	60.718.494.959,73	43.246.552.174,18	17.471.942.785,55
Pendapatan Transfer-LO	1.254.302.177.171,00	1.394.672.099.694,00	(140.369.922.523,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.123.655.857.910,00	1.115.044.141.175,00	8.611.716.735,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	130.646.319.261,00	279.627.958.519,00	(148.981.639.258,00)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	53.498.508.484,48	82.846.964.445,11	(29.348.455.960,63)
Pendapatan Hibah-LO	53.498.508.484,48	61.710.783.741,11	(8.212.275.256,63)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	21.136.180.704,00	(21.136.180.704,00)
Beban			
Beban Operasi	2.744.317.340.355,47	2.362.089.236.871,33	382.228.103.484,14
Beban Pegawai	1.212.732.099.580,78	1.001.514.592.822,56	211.217.506.758,22
Beban Barang dan Jasa	965.949.773.281,45	950.912.423.760,62	15.037.349.520,83
Beban Subsidi	-	78.000.000,00	(78.000.000,00)
Beban Hibah	261.270.327.505,57	200.493.397.769,85	60.776.929.735,72





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Sosial	7.432.402.728,00	7.820.868.829,00	(388.466.101,00)
Beban Penyisihan Piutang	29.342.109.835,97	23.112.216.192,15	6.229.893.643,82
Beban Penyusutan dan Amortisasi	267.590.627.423,70	178.157.737.497,15	89.432.889.926,55
Beban Transfer	350.232.536.324,00	216.235.380.003,00	133.997.156.321,00
Beban Bagi Hasil	189.174.374.204,00	111.797.414.525,00	77.376.959.679,00
Beban Bantuan Keuangan	161.058.162.120,00	104.437.965.478,00	56.620.196.642,00
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non-Operasional			
Surplus Non Operasional-LO			
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	20.175.192.784,90	22.804.203.464,48	(2.629.010.679,58)
Defisit Non Operasional			
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	23.203.245.054,41	10.949.898.389,75	12.253.346.664,66
Pos Luar Biasa			
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.843.439.081,00	2.335.500.000,93	3.507.939.080,07
Jumlah	500.345.709.367,85	616.442.318.009,21	(116.096.608.641,36)

Jumlah saldo Surplus/(Defisit)-LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit)-LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *poin 5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO*.

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kota Denpasar untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	3.561.860.785.514,95	3.146.979.658.599,76
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.842.216.617.191,89	2.401.092.550.653,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	719.644.168.323,06	745.887.107.946,45

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari





Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Pajak Daerah	1.874.480.094.512,48	1.399.865.377.619,51
Pajak Reklame	5.942.623.658,52	4.396.801.738,63
Pajak Air Tanah	8.806.491.718,00	9.232.735.902,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	130.536.715.334,00	131.643.314.862,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.203.239.466,00	371.067.348.506,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.005.901.148.035,96	883.525.176.610,88
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	251.300.400.900,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	171.789.475.400,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	194.129.093.014,51	156.369.987.668,83
Retribusi Jasa Umum	177.247.808.499,51	142.304.920.197,83
Retribusi Pelayanan Kesehatan	176.865.445.499,51	140.728.756.197,83
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	382.363.000,00	1.576.164.000,00
Retribusi Jasa Usaha	4.376.745.379,00	3.309.141.440,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	741.924.910,00
Retribusi Terminal	0,00	1.158.784.530,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	799.415.450,00	983.145.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	741.243.500,00	398.764.500,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.836.086.429,00	26.522.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	12.504.539.136,00	10.755.926.031,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.479.190.436,00	3.604.738.651,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8.025.348.700,00	7.151.187.380,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.261.240.483,21	75.729.806.844,40
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	71.670.486.314,21	51.731.070.121,40
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.305.313.847,00	532.935.831,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	26.285.440.322,00	23.465.800.892,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	50.342.598.308,35	35.816.984.334,02
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.565.765.996,00	1.195.057.996,00
Jasa Giro	10.573.848.556,82	7.314.363.031,06
Pendapatan Bunga	16.079.012.425,33	16.510.478.523,16
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	346.378.579,17	364.373.417,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.118.335.344,00	3.952.968.032,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.824.487,00	38.670.555,00
Pendapatan dari Pengembalian	14.154.147.581,43	5.674.676.186,04
Pendapatan BLUD	1.472.247.338,60	743.091.593,76
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.038.000,00	23.305.000,00





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	1.166.472.213.110,00	1.168.962.054.175,00
Dana Perimbangan	0,00	1.077.007.016.175,00
Dana Desa	39.896.439.000,00	34.828.566.000,00
Insentif Fiskal	21.645.986.000,00	57.126.472.000,00
Dana Bagi Hasil	120.563.983.700,00	0,00
Dana Alokasi Umum	711.632.242.557,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	272.733.561.853,00	0,00
Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	174.828.549.049,00	289.082.785.797,00
Pendapatan Bagi Hasil	152.659.650.049,00	287.528.478.089,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.139.942.124,00	92.353.333.925,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.656.160.922,00	84.090.463.541,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.786.124.479,00	76.724.338.787,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	344.602.191,00	293.593.619,00
Pendapatan sBagi Hasil Pajak Rokok	34.732.820.333,00	34.066.748.217,00
Bantuan Keuangan	22.168.899.000,00	1.554.307.708,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.380.791.000,00	1.554.307.708,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	14.788.108.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	1.346.997.037,40	16.481.457,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.172.355.800,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	174.641.237,40	16.481.457,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	21.136.180.704,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	21.136.180.704,00
Jumlah	3.561.860.785.514,95	3.146.979.658.599,76

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Belanja Pegawai	1.223.348.651.344,45	996.719.954.633,96
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	583.478.044.209,00	439.941.960.369,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	532.905.000.330,00	345.376.994.196,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	126.708.728.431,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43.722.406.839,00	43.209.581.618,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.145.759.240,00	1.033.944.514,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.420.920.000,00	2.164.490.000,00
Belanja Pegawai BLUD	58.676.520.726,45	38.284.255.505,96
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	930.635.532.570,44	937.807.065.343,50
Belanja Barang	236.745.865.462,00	211.395.936.078,62
Belanja Jasa	357.312.711.919,17	413.763.947.733,00
Belanja Pemeliharaan	62.581.364.977,00	39.082.519.196,61
Belanja Perjalanan Dinas	17.712.504.129,00	42.357.101.284,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	86.242.783.490,00	73.478.890.470,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	64.308.677.923,84
Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.881.685.094,50	711.894.000,00





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.837.790.069,00	4.539.213.328,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.320.827.429,77	88.168.885.329,43
Pembayaran Belanja Subsidi	0,00	78.000.000,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	78.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	255.155.766.733,00	205.187.176.852,85
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.274.715.735,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	190.079.699.897,00	150.063.615.873,85
Belanja Hibah Dana BOS	41.822.118.251,00	40.270.678.330,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.707.940.000,00	1.639.370.001,00
Belanja Hibah Dana BOSP	13.271.292.850,00	13.213.512.648,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.432.402.728,00	7.820.868.829,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.933.175.000,00	2.325.125.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.459.727.728,00	3.371.418.829,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.039.500.000,00	2.124.325.000,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	6.874.292.006,00	2.415.538.991,00
Belanja Tidak Terduga	6.874.292.006,00	2.415.538.991,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil	217.815.370.690,00	111.797.414.525,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	215.645.287.957,00	110.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.170.082.733,00	1.797.414.525,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	200.954.601.120,00	139.266.531.478,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	14.029.778.120,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000.000,00	12.800.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.424.823.000,00	126.466.531.478,00
Jumlah	2.842.216.617.191,89	2.401.092.550.653,31

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 172 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	917.632.345,00	407.153.798,60
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	833.380.786.924,00	567.378.104.773,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(832.463.154.579,00)	(566.970.950.975,30)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:





5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	917.632.345,00	407.153.798,60
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	917.632.345,00	407.153.798,60
Jumlah	917.632.345,00	407.153.798,60

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5. 174 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Tanah	6.726.112.218,00	2.707.000,00
Belanja Modal Tanah Persil	6.726.112.218,00	2.707.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	185.238.091.071,00	172.301.850.123,00
Belanja Modal Alat Besar	31.377.451.437,00	15.359.820.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan	60.458.600.363,00	78.764.180.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.393.583.400,00	1.087.330.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	53.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.634.756.508,00	18.803.022.018,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.101.151.710,00	6.892.512.404,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.541.652.241,00	15.928.081.228,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.092.399.026,00	1.038.171.180,00
Belanja Modal Komputer	13.755.864.860,00	16.164.877.446,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	47.298.994,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	865.402.000,00	625.600.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	11.289.061.773,00	2.490.982.647,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	11.803.415.738,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.659.262.216,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.021.606.543,00	3.290.156.962,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	239.885.865.559,00	105.439.291.215,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	218.863.626.724,00	99.887.799.681,00
Belanja Modal Monumen	11.660.049.799,00	485.620.340,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.053.488.636,00	1.885.820.124,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.308.700.400,00	3.180.051.070,00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.924.809.582,00	177.787.346.159,10
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	259.228.056.193,00	156.674.223.313,00
Belanja Modal Bangunan Air	56.951.868.467,00	14.918.383.158,00
Belanja Modal Instalasi	11.422.948.283,00	4.416.208.502,10
Belanja Modal Jaringan	5.274.708.939,00	1.678.532.186,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	47.227.700,00	99.999.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.419.135.048,00	8.734.655.059,80
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	185.947.588,00	22.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.386.282.196,00	1.592.185.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	4.787.224.564,00	3.328.016.495,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	3.792.453.564,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.059.680.700,00	0,00





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Aset Lainnya	686.773.446,00	1.088.255.217,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	686.773.446,00	1.088.255.217,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	686.773.446,00	988.255.217,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	100.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	58.500.000.000,00	102.024.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	58.500.000.000,00	102.024.000.000,00
Jumlah	833.380.786.924,00	567.378.104.773,90

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kota Denpasar. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:



**Tabel 5. 177 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai	40.275.083.205,00	24.231.638.042,00
Pajak Penghasilan	55.710.754.967,00	52.361.259.275,00
Pajak Pertambahan Nilai	117.321.076.145,00	76.199.638.952,00
Asuransi Kesehatan	4.353.095.495,00	13.748.129.237,00
PFK Lainnya	3.543.658.689,00	2.761.704.538,00
Jumlah	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5. 178 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai	40.275.083.205,00	24.231.638.042,00
Pajak Penghasilan	55.710.754.967,00	52.361.259.275,00
Pajak Pertambahan Nilai	117.321.076.145,00	76.199.638.952,00
Asuransi Kesehatan	4.353.095.495,00	13.748.129.237,00
PFK Lainnya	3.543.658.689,00	2.761.704.538,00
Jumlah	221.203.668.501,00	169.302.370.044,00

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *Lampiran 37 Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025*.

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	719.644.168.323,06	745.887.107.946,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(832.463.154.579,00)	(566.970.950.975,30)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	(112.818.986.255,94)	178.916.156.971,15





5.5.6. Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 180 Saldo Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	737.700.968.617,37	561.810.684.155,39
Kas di Bendahara Penerimaan	419.000,00	32.873.999,38
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.740.861.427,36	12.352.372.623,35
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.979.429.045,00	2.741.495.713,62
Kas Dana BOSP	754.600.894,78	668.207.376,62
Kas Dana BOK Puskesmas	2.375.665.222,00	1.030.153.367,00
Jumlah	757.551.944.206,51	578.635.787.235,36

5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 181 Koreksi SiLPA Tahun Lalu Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	0,00	0,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *poin 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya*.

5.5.8. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 182 Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	613.867.339.660,15	737.700.968.617,37
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	419.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.500.000,00	0,00
Kas di BLUD	29.729.278.233,44	13.740.861.427,36
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	2.979.429.045,00
Kas Dana BOSP	671.941.578,98	754.600.894,78
Kas Dana BOK Puskesmas	456.898.478,00	2.375.665.222,00
Jumlah	644.732.957.950,57	757.551.944.206,51

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *poin 5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)*.





5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 183 Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	7.685.785.523.547,76	7.037.584.652.560,82

Pemerintah Kota Denpasar menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 184 Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit)-LO	500.345.709.367,85	616.442.318.009,21

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kota Denpasar masing-masing memiliki surplus atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *poin 5.4.5. Surplus/(Defisit)-LO*.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

**Tabel 5. 185 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	(2.926.012.799,27)	(16.289.776.589,31)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	39.934.203.792,00	78.701.463.961,78
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(264.457.918.561,57)	(30.653.134.394,74)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	(45.808.340.575,34)	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	(273.258.068.144,18)	31.758.552.977,73

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun





kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar melakukan penyesuaian.

5.6.3.1. Koreksi Ekuitas - Aset Lancar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Ekuitas-Aset Lancar yang terdiri dari:

Tabel 5. 186 Koreksi Ekuitas - Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Piutang	(6.701.858.336,82)	(16.349.156.329,21)
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar dimuka	3.778.789.166,67	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	(2.943.629,12)	59.379.739,90
Jumlah Dampak Kumulatif	(2.926.012.799,27)	(16.289.776.589,31)

Penjelasan:

1. Rincian Koreksi Ekuitas - Piutang TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 187 Koreksi Ekuitas - Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	(1.336.034.791,50)	(3.747.811.566,20)
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah	696.684.687,30	17.383.975.809,50
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(6.062.508.232,62)	(29.985.320.572,51)
Jumlah Dampak Kumulatif	(6.701.858.336,82)	(16.349.156.329,21)

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Piutang diantaranya, yaitu:

- a. Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah sampai dengan tahun 2025 yang disebabkan adanya penyesuaian pokok piutang pajak daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp1.336.034.791,50;
 - b. Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp696.684.687,30 pada Dinas Kesehatan (BLUD-RSUD Wangaya) merupakan koreksi atas piutang Covid-19 berdasarkan hasil Reviu BPKP Nomor KU.04.01/D.VII.3/553/2025; dan
 - c. Koreksi Ekuitas - Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.062.508.232,62, yaitu koreksi piutang Denda PBJT pada Badan Pendapatan Daerah.
2. Rincian Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 5. 188 Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka - Sewa Bangunan Kantor	2.168.229.166,67	0,00
Koreksi Ekuitas atas Beban Dibayar Dimuka - Iuran BPJS	1.610.560.000,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	3.778.789.166,67	0,00

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Beban dibayar dimuka, yaitu:

- a. Koreksi saldo awal Beban Dibayar Dimuka pada Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp2.168.229.166,67 atas kurang pencatatan beban dibayar dimuka sewa Gedung Kelurahan Sumerta selama 10 tahun berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 yang dibayarkan keseluruhan di tahun 2024 sebesar Rp2.262.500.000,00; dan
- b. Koreksi saldo awal Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.610.560.000,00 atas kurang pencatatan beban dibayar dimuka Beban Bantuan Iuran





Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Perlakuan Kompensasi Atas Kelebihan Pembayaran Bantuan Iuran BPJS Kesehatan kantor Cabang Denpasar dengan Pemerintah Kota Denpasar Nomor 11832/BA/XI-01/1124/400.2.3/17273/Dikes tanggal 5 November 2024.

3. Rincian Koreksi Ekuitas - Persediaan yang terdiri dari:

Tabel 5. 189 Koreksi Ekuitas - Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Persediaan	(2.943.629,12)	59.379.739,90
Jumlah Dampak Kumulatif	(2.943.629,12)	59.379.739,90

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Persediaan, yaitu koreksi saldo awal persediaan pada Dinas Kesehatan (RSUD Wangaya) sebesar Rp2.943.629,12 atas koreksi persediaan obat.

5.6.3.2. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Ekuitas-Aset Tetap yang terdiri dari:

Tabel 5. 190 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Tanah	32.361.006.000,00	70.456.118.999,00
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	2.103.643.122,00	446.116.300,00
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	5.430.254.670,00	7.988.233.062,78
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	24.041.000,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	24.300.000,00	(213.045.400,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	39.934.203.792,00	78.701.463.961,78

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset Tetap diantaranya, yaitu:

- Koreksi Ekuitas - Tanah sebesar Rp32.361.006.000,00 merupakan koreksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 733.706.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 31.627.300.000,00
- Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.103.643.122,00 merupakan koreksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 45.250.122,00
 - Dinas Kesehatan 357.050.000,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi 328.400.000,00
 - Dinas Pariwisata 181.760.000,00
 - Dinas Perhubungan 1.044.043.000,00
 - Kecamatan Denpasar Barat 18.990.000,00
 - Kecamatan Denpasar Timur 23.400.000,00
 - Kecamatan Denpasar Selatan 98.900.000,00
 - Kecamatan Denpasar Utara 5.850.000,00
- Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.430.254.670,00 merupakan koreksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga 1.992.864.870,00
 - Dinas Kesehatan 3.401.000.000,00





- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 10.710.000,00
- d. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 13.900.000,00
- e. Dinas Pariwisata (71.960.000,00)
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 84.197.000,00
- g. Sekretariat DPRD (457.200,00)
- 4. Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp15.000.000,00 merupakan koreksi pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- 5. Koreksi Ekuitas - Aset tetap Lainnya sebesar Rp24.300.000,00 merupakan koreksi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Ekuitas Aset Lainnya yang terdiri dari:

Tabel 5. 191 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	48.947.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	0,00	4.000.000,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain	(221.653.898.120,00)	(3.427.089.026,93)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(42.852.967.441,57)	(27.230.045.367,81)
Jumlah Dampak Kumulatif	(264.457.918.561,57)	(30.653.134.394,74)

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset Lainnya diantaranya, yaitu :

1. Koreksi Ekuitas - Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp48.947.000,00 merupakan koreksi pada Dinas Perhubungan.
2. Koreksi Ekuitas - Aset Lain-Lain sebesar Rp221.653.898.120,00 merupakan koreksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (150.000.000,00)
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (170.250.000.000,00)
 - c. Kecamatan Denpasar Barat (51.114.000.000,00)
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (139.898.120,00)
3. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp42.852.967.441,57 merupakan koreksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (6.997.414.475,95)
 - b. Dinas Kesehatan (19.119.962.309,85)
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1.341.165.282,75)
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (3.051.984.668,00)
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (1.641.495.850,52)
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.466.949.275,70
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja (582.805.050,00)
 - h. Dinas Sosial (360.723.000,00)
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (173.480.000,00)
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 57.881.666,00
 - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (10.492.296.566,00)
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (206.123.130,00)





m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(55.175.000,00)
n. Dinas Perhubungan	(231.085.144,00)
o. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	(79.726.500,00)
p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	(99.662.953,00)
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	731.565.114,00
r. Dinas Kebudayaan	(341.419.633,84)
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	277.677.125,00
t. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	(185.006.794,00)
u. Dinas Pariwisata	(329.625.935,00)
v. Dinas Pertanian	(453.710.813,00)
w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(309.258.004,00)
x. Sekretariat Daerah	(1.779.274.794,00)
y. Sekretariat DPRD	(686.572.287,00)
z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(992.244.584,00)
aa. Badan Pendapatan Daerah	(34.875.000,00)
bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.150.257.084,00
cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(194.478.180,00)
dd. Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.760.000,00
ee. Inspektorat	(383.556.693,00)
ff. Kecamatan Denpasar Barat	(407.383.289,36)
gg. Kecamatan Denpasar Timur	15.592.693,00
hh. Kecamatan Denpasar Selatan	(331.020.821,00)
ii. Kecamatan Denpasar Utara	(715.123.641,00)

5.6.3.4. Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

Tabel 5. 192 Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	(454.983.333,34)	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	(45.353.357.242,00)	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	(45.808.340.575,34)	0,00

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Kewajiban diantaranya, yaitu :

1. Koreksi Ekuitas - Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp454.983.333,34 merupakan koreksi pada Dinas Kesehatan (RSUD Wangaya) sebesar Rp453.150.000,00 atas pendapatan sewa BMD yang diterima tahun 2024 dengan jangka waktu sampai 30 September 2029 dan koreksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.833.333,34 atas pendapatan sewa BMD yang diterima tahun 2024 dengan jangka waktu sampai 12 Februari 2029;
2. Koreksi Ekuitas - Utang Belanja sebesar Rp45.353.357.242,00 merupakan koreksi utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.553.000,00 atas kelebihan pencatatan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2024 dan koreksi Utang Belanja Bagi Hasil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp45.335.804.242,00, yaitu Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa





sebesar Rp44.645.287.957,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp690.516.285,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.193 Ekuitas Akhir TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Akhir	7.912.873.164.771,43	7.685.785.523.547,76

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point 5.3.3. Ekuitas*.





BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada TA 2025, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan satu aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan secara penuh dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tanpa menggunakan aplikasi pendamping. Selain itu, untuk pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD.

6.2. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Denpasar

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2025 ini dilengkapi dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, dan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2025. Entitas akuntansi di Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025 sebanyak 36 Entitas (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kebudayaan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD





27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Badan Riset dan Inovasi Daerah
32. Inspektorat
33. Kecamatan Denpasar Barat
34. Kecamatan Denpasar Timur
35. Kecamatan Denpasar Selatan
36. Kecamatan Denpasar Utara

6.3. Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Program yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2025 masih berfokus dalam pengendalian dampak inflasi. Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup:

1. Pelaksanaan pasar murah dan pemberian subsidi kepada BUMD yang direalisasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan, pemberian bibit tanaman dan benih ikan, serta pengadaan cadangan pangan beras yang direalisasikan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
3. Pengembangan area dan pengembangan komoditas pertanian yang direalisasikan pada Dinas Pertanian;
4. Survei dan pemetaan irigasi, perbaikan saluran irigasi, dan perbaikan sarana dan prasarana subak yang direalisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Pengaspalan di area angkutan barang yang direalisasikan pada Dinas Perhubungan;
6. Pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
7. Pelaksanaan pasar murah, pembagian bibit dan benih, serta pembagian alat dan barang pendukung pertanian pada setiap kelurahan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025, antara lain:

1. Terhadap potensi ketertagihan piutang Pemerintah Kota Denpasar yang material kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 - a. Atas piutang pajak tetap dilakukan upaya penagihan secara aktif tetap dilakukan melalui mediasi melalui telepon dan penyampaian surat pemberitahuan dan surat teguran sebagai bentuk himbauan untuk melunasi pembayaran pajak daerah yang lancar maupun tertunggak, di samping melakukan penagihan langsung dengan memberdayakan dan mengintensifkan tim validasi penagihan piutang pajak daerah secara maksimal *by name, by address* dengan bekerja sama dengan kepala lingkungan setempat. Upaya lainnya yang dilakukan adalah pendataan, penagihan, dan pemeriksaan kepada WP yang tidak taat dalam pembayaran pajak. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk mengetahui permohonan perizinan baru yang berhubungan dengan pajak daerah, dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk penagihan pajak





daerah, kerja sama dengan BPN Denpasar dalam upaya pendataan dan peningkatan realisasi pajak. Disamping itu, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak dilakukan dengan optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box*, POS dan *cash register online* kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak, serta sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah, pemberian stimulus insentif fiskal, pembangunan Sistem Pajak Daerah (Simpada) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar), serta sosialisasi terkait pembayaran pajak secara digital. Selain itu melakukan kerja sama dengan desa/kelurahan untuk pendataan potensi pajak;

- b. Atas piutang retribusi akan selalu dilakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerja sama dengan Wajib Retribusi serta dilakukan upaya penagihan dengan menyurati yang bersangkutan di samping melakukan penagihan langsung.
2. Terhadap utang yang belum terbayar pada tahun 2025, dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2026 sesuai ketersediaan dana. Apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, maka akan dianggarkan pada APBD Tahun 2027.





BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2025. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA DENPASAR

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA



LAMPIRAN

(CaLK)



**REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SKPD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	433.482.545.842,00	422.360.816.063,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.783.209.460,00	5.365.585.717,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Mebel Sekolah	6.166.230.500,00	5.453.143.507,00
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	704.608.000,00	549.985.822,00
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.272.978.292,00	4.150.066.047,00
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	68.853.114,00	40.678.166,00
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.400.000,00	5.400.000,00
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.281.779.226,00	80.605.937.242,50
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.179.200,00	8.720.648,00
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15.600.000,00	14.025.600,00
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.343.700,00	3.683.343,00
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	99.756.100,00	96.927.000,00
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3.600.000,00	3.600.000,00
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000,00	279.324.269,00
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	109.116.778.500,00	103.033.936.732,00
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	433.165.878,00	397.802.000,00
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	226.196.300,00	220.027.100,00
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.232.625.000,00	6.479.424.202,00
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.202.267.200,00	818.969.506,00
20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	493.828.000,00	491.423.945,00
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	57.663.753.311,00	57.025.843.500,00
22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.000.000,00	350.000.000,00
23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2.045.805.000,00	1.890.997.100,00
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.053.152.000,00	3.867.686.000,00
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.518.059.000,00	1.506.570.750,00
26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	54.000.000,00	53.190.000,00
27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	848.000.000,00	800.673.000,00
28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Mebel Sekolah	2.311.930.000,00	2.272.021.892,00
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.555.558.500,00	3.318.935.000,00
30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	636.883.750,00	586.713.123,00
31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	549.107.576,00	497.473.374,00
32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	222.053.906,00	216.301.630,00
33	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	87.355.500,00	54.838.000,00
34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.560.786.591,00	45.080.645.569,00
35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66.533.000,00	36.365.000,00
36	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.344.000,00	25.873.755,00
37	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.001.000,00	5.317.500,00
38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.939.500,00	14.195.500,00
39	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.937.000,00	7.522.000,00
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	357.967.000,00	331.051.000,00
41	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.527.533.000,00	2.448.853.100,00
42	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	16.589.670,00	15.038.716,00
43	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	283.600.000,00	201.444.860,00
44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	318.000.000,00	309.563.000,00
45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.734.429.000,00	1.683.419.382,00
46	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	548.455.000,00	537.197.868,00
47	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Mebel PAUD	98.048.000,00	89.244.419,00

9

NO	SKPD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.414.848.080,00	3.390.506.638,00
49	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	31.421.642,00	19.785.388,00
50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	74.085.000,00	64.192.654,00
51	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.217.526.000,00	10.899.992.600,00
52	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	25.823.000,00	21.983.930,00
53	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.756.500,00	27.887.190,00
54	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21.621.000,00	20.510.000,00
55	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.243.000,00	10.763.250,00
56	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	81.002.000,00	42.126.770,00
57	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	616.859.900,00	503.691.506,00
58	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	75.397.000,00	73.098.648,00
59	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	223.073.000,00	207.327.325,00
60	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	858.290.500,00	804.957.370,00
61	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.419.794.500,00	2.887.657.950,00
62	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	13.161.000,00	5.423.464,00
63	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	71.624.000,00	13.790.000,00
64	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	18.349.500,00	12.516.684,00
65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	19.016.000,00	14.721.501,00
66	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	36.207.000,00	22.486.425,00
67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	39.103.500,00	26.451.250,00
68	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	23.340.500,00	12.387.835,00
69	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	243.903.500,00	148.900.618,00
70	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.554.012.600,00	1.408.773.060,00
71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	21.391.821.000,00	17.817.775.339,00
72	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	53.793.228.200,00	52.488.228.200,00
73	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.037.778.000,00	936.000.600,00
74	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.629.500,00	26.270.360,00
75	Dinas Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	555.866.300,00	532.236.385,00
76	Dinas Kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	636.858.800,00	348.243.578,00
77	Puskesmas I Denpasar Timur	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	960.000,00	960.000,00
78	Puskesmas I Denpasar Timur	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.200.000,00	8.200.000,00
79	Puskesmas II Denpasar Timur	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.720.000,00	2.720.000,00
80	Puskesmas II Denpasar Timur	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.317.500,00	19.677.500,00
81	Puskesmas I Denpasar Barat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.200.000,00	1.200.000,00
82	Puskesmas I Denpasar Barat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.975.200,00	15.020.000,00
83	Puskesmas II Denpasar Barat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.200.000,00	2.400.000,00
84	Puskesmas II Denpasar Barat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.478.000,00	3.640.000,00
85	Puskesmas I Denpasar Selatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000,00	200.000,00
86	Puskesmas I Denpasar Selatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.808.000,00	4.808.000,00
87	Puskesmas II Denpasar Selatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	3.200.000,00
88	Puskesmas II Denpasar Selatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.587.000,00	4.460.776,00
89	Puskesmas III Denpasar Selatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	480.000,00	480.000,00
90	Puskesmas III Denpasar Selatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.573.000,00	2.740.000,00
91	Puskesmas IV Denpasar Selatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.240.000,00	1.240.000,00
92	Puskesmas IV Denpasar Selatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.649.400,00	4.649.400,00
93	Puskesmas I Denpasar Utara	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	640.000,00	640.000,00
94	Puskesmas I Denpasar Utara	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.587.000,00	4.587.000,00
95	Puskesmas II Denpasar Utara	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	520.000,00	320.000,00
96	Puskesmas II Denpasar Utara	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.560.000,00	4.559.020,00
97	Puskesmas III Denpasar Utara	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.920.000,00	3.920.000,00
98	Puskesmas III Denpasar Utara	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.292.250,00	12.292.250,00
99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	300.000,00	-
100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	78.817.000,00	75.434.798,00
101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	164.284.000,00	141.593.659,00

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
102	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	135.264.000,00	111.993.215,00
103	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	52.073.000,00	42.314.000,00
104	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	374.490.000,00	295.570.270,00
105	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.000.000,00	10.500.000,00
106	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.180.424.000,00	1.116.968.555,00
107	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7.800.000,00	7.710.000,00
108	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	845.200.000,00	828.706.800,00
109	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	46.701.600,00	46.029.300,00
110	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	56.800.000,00	54.220.650,00
111	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	21.170.000,00	16.245.774,00
112	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.825.000,00	4.825.000,00
113	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.974.750,00	6.974.750,00
114	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.220.000,00	25.763.000,00
115	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	123.419.650,00
116	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	18.000.000,00	18.000.000,00
117	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.400.000,00	50.400.000,00
118	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	220.304.000,00	211.127.130,00
119	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.623.680.000,00	2.363.953.920,00
120	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.041.990.000,00	812.021.348,00
121	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	278.525.000,00	258.458.214,00
122	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.235.000,00	3.225.002,00
123	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	228.910.000,00	227.024.489,00
124	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	85.243.000,00	77.470.612,00
125	Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	725.399.000,00	670.725.584,00
126	Dinas Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	214.040.000,00	184.097.655,00
127	Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.637.801.400,00	14.107.164.503,00
128	Dinas Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	521.435.000,00	514.738.500,00
129	Dinas Kebudayaan	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	235.200.000,00	234.432.000,00
130	Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	42.862.839.200,00	41.982.315.450,00
131	Dinas Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	516.562.000,00	372.256.844,00
132	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	547.800.000,00	479.011.376,00
133	Dinas Kebudayaan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	564.997.000,00	523.113.900,00
134	Dinas Kebudayaan	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.109.233.000,00	1.084.360.493,00
135	Dinas Kebudayaan	Pendaftar Objek Diduga Cagar Budaya	75.190.000,00	74.686.421,00
136	Dinas Kebudayaan	Penetapan Cagar Budaya	266.860.000,00	254.046.078,00
137	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.928.600,00	29.429.208,00
138	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	109.950.000,00	108.010.053,00
139	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	285.882.000,00	272.708.790,00
140	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	96.409.500,00	93.353.120,00
141	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	256.413.205,00	232.609.188,00
142	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	69.021.500,00	63.338.546,00

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
143	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	225.040.000,00	220.284.400,00
144	Dinas Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	391.618.000,00	373.426.475,00
145	Dinas Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	688.907.000,00	686.599.752,00
146	Dinas Pariwisata	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000,00	199.999.999,00
147	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	185.650.000,00	184.048.750,00
148	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	91.850.000,00	91.697.850,00
149	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	95.071.500,00	85.245.960,00
150	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.789.000,00	80.817.086,00
151	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pembentukan Paskibraka	2.665.523.200,00	2.561.633.986,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)			954.516.753.943,00	919.191.154.514,50
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)			4.088.096.143.469,00	3.617.097.404.115,89
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)			23,35	25,41



**REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	955.316.000,00	701.513.361,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.840.500,00	38.361.489,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	294.368.000,00	220.057.589,00
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.506.000,00	4.506.000,00
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.272.000.000,00	1.251.400.966,00
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.437.000,00
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.919.404.680,00	5.594.987.911,00
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.150.000,00	321.194.382,00
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.610.000,00	239.628.904,00
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.899.320.000,00	776.314.000,00
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.783.209.460,00	5.365.585.717,00
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Mebel Sekolah	6.166.230.500,00	5.453.143.507,00
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.400.000,00	5.400.000,00
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.179.200,00	8.720.648,00
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15.600.000,00	14.025.600,00
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	109.116.778.500,00	103.033.936.732,00
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.232.625.000,00	6.479.424.202,00
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	493.828.000,00	491.423.945,00
20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	57.663.753.311,00	57.025.843.500,00
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.000.000,00	350.000.000,00
22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2.045.805.000,00	1.890.997.100,00
23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.053.152.000,00	3.867.686.000,00
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.518.059.000,00	1.506.570.750,00
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	54.000.000,00	53.190.000,00
26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	848.000.000,00	800.673.000,00
27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Mebel Sekolah	2.311.930.000,00	2.272.021.892,00
28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	87.355.500,00	54.838.000,00
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66.533.000,00	36.365.000,00
30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.344.000,00	25.873.755,00
31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.527.533.000,00	2.448.853.100,00
32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	318.000.000,00	309.563.000,00
33	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.734.429.000,00	1.683.419.382,00
34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	548.455.000,00	537.197.868,00
35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Mebel PAUD	98.048.000,00	89.244.419,00
36	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	74.085.000,00	64.192.654,00
37	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	25.823.000,00	21.983.930,00
38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	75.397.000,00	73.098.648,00
39	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	223.073.000,00	207.327.325,00
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	18.349.500,00	12.516.684,00
41	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.554.012.600,00	1.408.773.060,00
42	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.037.778.000,00	936.000.600,00
43	Dinas Kesehatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.200.742.990,00	2.421.104.308,00
44	Dinas Kesehatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	233.639.400,00	134.935.694,00
45	Dinas Kesehatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.346.887.800,00	1.041.829.100,00
46	Dinas Kesehatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.517.000,00	58.332.650,00
47	Dinas Kesehatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000,00	5.100.000,00
48	Dinas Kesehatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.114.289.000,00	1.470.480.541,00
49	Dinas Kesehatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.967.240.150,00	6.341.855.685,00
50	Dinas Kesehatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.577.338.000,00	1.223.340.106,00
51	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	555.000.000,00	530.857.000,00

NO	SKPD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.629.984.000,00	2.398.281.280,00
53	Dinas Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.255.238.807,00	5.461.802.456,00
54	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	510.000.000,00	450.673.984,00
55	Dinas Kesehatan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	159.995.000,00	2.250.000,00
56	Dinas Kesehatan	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4.196.087.961,00	4.075.569.601,00
57	Dinas Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.025.000,00	6.019.500,00
58	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.681.000,00	9.530.000,00
59	Puskesmas I Denpasar Timur	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.848.718.787,00	3.059.778.133,00
60	Puskesmas I Denpasar Timur	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.736.000,00	132.207.309,00
61	Puskesmas II Denpasar Timur	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.396.306.874,00	2.133.310.824,39
62	Puskesmas II Denpasar Timur	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.192.500,00	114.896.939,00
63	Puskesmas I Denpasar Barat	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.616.145.882,00	3.034.860.983,00
64	Puskesmas I Denpasar Barat	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.162.800,00	135.834.621,00
65	Puskesmas II Denpasar Barat	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.547.528.819,00	3.131.784.696,00
66	Puskesmas II Denpasar Barat	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.752.000,00	183.268.753,00
67	Puskesmas I Denpasar Selatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.631.355.634,00	2.367.841.481,00
68	Puskesmas I Denpasar Selatan	Operasional Pelayanan Puskesmas	135.102.000,00	134.633.552,00
69	Puskesmas II Denpasar Selatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.982.716.838,00	1.690.848.033,45
70	Puskesmas II Denpasar Selatan	Operasional Pelayanan Puskesmas	138.485.000,00	133.253.114,00
71	Puskesmas III Denpasar Selatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.881.644.851,00	1.669.064.920,00
72	Puskesmas III Denpasar Selatan	Operasional Pelayanan Puskesmas	96.115.000,00	88.389.332,00
73	Puskesmas IV Denpasar Selatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.516.357.837,00	2.024.814.074,00
74	Puskesmas IV Denpasar Selatan	Operasional Pelayanan Puskesmas	81.281.600,00	74.215.714,00
75	Puskesmas I Denpasar Utara	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.426.569.149,00	1.985.294.446,00
76	Puskesmas I Denpasar Utara	Operasional Pelayanan Puskesmas	115.500.000,00	106.384.901,00
77	Puskesmas II Denpasar Utara	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.830.781.144,00	2.215.944.096,00
78	Puskesmas II Denpasar Utara	Operasional Pelayanan Puskesmas	119.169.000,00	100.121.889,00
79	Puskesmas III Denpasar Utara	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.437.194.365,00	2.914.934.450,00
80	Puskesmas III Denpasar Utara	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.200.750,00	139.732.329,00
81	BLUD RSUD Wangaya	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	140.740.861.427,00	139.146.406.662,38
82	BLUD RSUD Wangaya	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.226.509.646,00	24.702.344.517,00
83	BLUD RSUD Wangaya	Pengembangan Rumah Sakit	127.500.000,00	126.360.429,00
84	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.062.595.000,00	19.359.413.501,00
85	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.836.000,00	94.346.000,00
86	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.420.000,00	130.175.000,00
87	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.280.000,00	8.280.000,00
88	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Bahan/Material	4.919.943.000,00	4.717.316.886,00
89	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.000.000,00	469.677.848,00
90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.336.225.390,00	10.288.460.514,00
91	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.548.860.000,00	2.605.154.638,00
92	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	551.000.000,00	493.679.694,00
93	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000,00	437.247.786,00
94	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.250.000,00	67.553.875,00
95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00
96	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.318.094.000,00	1.799.301.000,00
97	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00
98	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	58.561.500.000,00	56.203.384.941,00
99	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	22.497.806.080,00	22.210.123.966,00
100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	135.340.000,00	133.797.550,00
101	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	43.856.970.000,00	37.013.712.193,00
102	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	989.371.090,00	977.624.747,00
103	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00
104	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan Leger Jalan	300.000.000,00	239.512.400,00
105	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penggantian Jembatan	3.599.136.000,00	3.445.371.401,00
106	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	49.286.375.860,00	45.186.018.069,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
107	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan	84.662.351.400,00	80.851.613.569,00
108	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.119.825.000,00	2.975.818.000,00
109	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin Jembatan	760.000.000,00	692.691.000,00
110	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	612.000.000,00	512.767.580,00
111	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	128.732.279.300,00	120.873.697.998,00
112	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.643.188.420,00	6.025.934.444,00
113	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	103.150.000,00	101.283.562,00
114	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	102.800.000,00	100.938.119,00
115	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	46.750.000,00	41.348.950,00
116	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	34.654.000,00	31.520.550,00
117	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	3.404.000,00	3.402.689,00
118	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyusunan Peta Dasar	340.050.000,00	304.855.200,00
119	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	111.350.000,00	105.791.520,00
120	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	43.590.000,00	33.165.465,00
121	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	611.000.000,00	589.135.340,00
122	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	438.150.000,00	415.814.579,00
123	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	185.719.350,00	167.068.260,00
124	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	65.950.000,00	57.264.000,00
125	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	345.292.000,00	304.634.589,00
126	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penilaian Perwujudan RTR	106.500.000,00	104.259.920,00
127	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.307.500,00	275.387.500,00
128	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	219.634.350,00	213.401.350,00
129	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.840.000,00	10.828.000,00
130	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.500.000,00	105.797.850,00
131	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pengadaan Mebel	51.500.000,00	50.750.000,00
132	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.692.000,00	157.823.000,00
133	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000,00	192.571.050,00
134	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.424.385.856,00	1.363.660.058,00
135	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432.370.000,00	375.710.675,00
136	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	9.999.990,00
137	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	82.210.000,00	70.651.825,00
138	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	614.000.000,00	604.596.686,00
139	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.300.000,00	49.809.219,00
140	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	300.000,00	-
141	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	375.000,00	375.000,00
142	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	50.900.000,00	49.453.719,00
143	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	300.000,00	-
144	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	580.300.000,00	325.949.000,00
145	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	85.300.000,00	-
146	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	401.125.000,00	396.873.300,00
147	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	32.300.000,00	29.797.766,00
148	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	51.350.000,00	50.041.022,00
149	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	2.617.700.000,00	2.458.399.655,00
150	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.703.000.000,00	3.562.228.128,00
151	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	78.817.000,00	75.434.798,00
152	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	130.269.750.000,00	128.377.039.000,00
153	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100.450.000,00	99.106.000,00
154	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.050.000,00	7.575.000,00
155	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	164.489.657.500,00	7.126.301.862,00
156	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.657.300,00	90.716.097,00
157	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	344.535.600,00	223.312.600,00
158	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.175.000,00	117.450.000,00
159	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.090.000,00	28.206.000,00
160	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.600.000,00	20.200.000,00
161	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Mebel	13.392.000,00	12.980.000,00
162	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.215.000,00	214.858.750,00
163	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.000.000,00	170.381.037,00
164	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.680.794.000,00	2.577.510.413,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
165	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	784.144.000,00	589.615.327,00
166	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.300.000,00	188.845.701,00
167	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.000.000,00	153.566.122,00
168	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.770.000,00	27.521.320,00
169	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	58.500.000,00	58.410.650,00
170	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	725.000.000,00	645.745.200,00
171	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	135.264.000,00	111.993.215,00
172	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	333.474.000,00	74.625.000,00
173	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	626.495.400,00	511.370.400,00
174	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	93.000.000,00	91.530.600,00
175	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	183.749.000,00	180.912.002,00
176	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	130.777.300,00	90.315.491,00
177	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.310.850,00	230.807.670,00
178	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.854.500,00	11.672.752,00
179	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.640.000,00	9.394.000,00
180	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	316.000.000,00	306.847.218,00
181	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.950.000,00	163.915.410,00
182	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.649.082.992,00	2.275.319.751,00
183	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.117.872.000,00	808.797.377,00
184	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan Mebel	1.280.000,00	-
185	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	81.850.000,00	43.066.698,00
186	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.851.000,00	111.145.648,00
187	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	176.813.250,00	164.158.600,00
188	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.500.000,00	15.292.000,00
189	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.200.000,00	18.430.607,00
190	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.880.000,00	20.880.000,00
191	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.680.000,00	159.299.998,00
192	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.200.000,00	183.518.083,00
193	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.948.698.000,00	2.826.311.501,00
194	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.594.036.000,00	912.291.012,00
195	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.110.000,00	54.718.000,00
196	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	383.304.000,00	379.048.206,00
197	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.740.000,00	22.123.250,00
198	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	699.640.000,00	503.360.914,00
199	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	342.845.000,00	155.122.341,00
200	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	422.245.000,00	404.918.847,00
201	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	13.676.243.000,00	13.143.227.658,00
202	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	150.000.000,00	27.405.000,00
203	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	52.073.000,00	42.314.000,00
204	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	374.490.000,00	295.570.270,00
205	Dinas Sosial	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.354.750,00	440.479.554,00
206	Dinas Sosial	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.616.000,00	34.899.000,00
207	Dinas Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.650.000,00	30.220.000,00
208	Dinas Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	3.420.000,00
209	Dinas Sosial	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.600.000,00	229.264.753,00
210	Dinas Sosial	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.627.018.178,00	2.735.116.354,00
211	Dinas Sosial	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382.744.000,00	301.835.212,00
212	Dinas Sosial	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.020.000,00	113.679.050,00
213	Dinas Sosial	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.668.444.750,00	1.371.809.868,00
214	Dinas Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	42.315.000,00	37.945.977,00
215	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.200.000,00	46.129.640,00
216	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.532.600,00	20.745.900,00
217	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.739.100,00	39.997.200,00
218	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.190.500,00	67.344.810,00
219	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	186.413.594,00
220	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.400.000,00	90.420.581,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
221	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.941.000,00	182.905.000,00
222	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.479.365,00	888.388.949,00
223	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.740.000,00	247.921.583,00
224	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.850.000,00	45.600.090,00
225	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.400.000,00	127.817.819,00
226	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	3.505.001,00
227	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	236.457.500,00	232.870.000,00
228	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	209.338.000,00	204.535.000,00
229	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	445.083.500,00	403.769.931,00
230	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.288.000,00	18.937.215,00
231	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.326.000,00	64.026.000,00
232	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.240.000,00	38.000.930,00
233	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.600.000,00	93.098.290,00
234	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.504.316.500,00	1.358.541.978,00
235	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00
236	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	517.050.000,00	480.063.217,00
237	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan Mebel	4.400.000,00	4.400.000,00
238	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.140.000,00	80.399.096,00
239	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.000.000,00	118.651.856,00
240	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.000.000,00	48.995.868,00
241	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.825.000,00	4.825.000,00
242	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.810.900,00	14.810.900,00
243	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	41.550.000,00	41.450.000,00
244	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.570.000,00	21.518.100,00
245	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59.950.000,00	59.661.000,00
246	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	21.750.000,00	21.750.000,00
247	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	48.800.000,00	48.800.000,00
248	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	101.400.000,00	101.400.000,00
249	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.560.000,00	9.560.000,00
250	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	104.978.861,00
251	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.689.400.000,00	3.689.400.000,00
252	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.487.443.830,00	1.255.804.214,00
253	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.799.000,00	35.455.704,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
254	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.937.300,00	71.151.061,00
255	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	970.586.000,00	612.887.112,00
256	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.998.486.375,00	44.317.872.126,00
257	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.145.000,00	9.505.200,00
258	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	485.470.000,00	386.961.914,00
259	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.030.000,00	138.889.080,00
260	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	71.500.000,00	69.217.275,00
261	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	289.040.950,00	227.302.994,00
262	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	250.162.000,00	236.504.902,00
263	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.687.892.500,00	15.020.403.873,00
264	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	12.551.559.000,00	11.501.436.377,00
265	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	114.800.000,00	111.750.670,00
266	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	140.785.000,00	100.389.967,00
267	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100.405.086.150,00	70.543.231.152,00
268	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Penganganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	14.804.989.000,00	2.312.303.830,00
269	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.917.888.800,00	1.714.527.324,00
270	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.068.000,00	37.690.368,00
271	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.644.000,00	4.644.000,00
272	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.744.272,00	1.566.094.236,00
273	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.570.000,00	219.003.625,00
274	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Mebel	9.125.000,00	7.525.006,00
275	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.840.000,00	58.310.024,00
276	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.753.600,00	234.518.600,00
277	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.838.800,00	56.620.400,00
278	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.140.000,00	13.140.000,00
279	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	655.894.000,00	629.749.720,00
280	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.600.000,00	130.753.469,00
281	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.934.773.275,00	1.902.944.277,00
282	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.232.000,00	319.611.285,00
283	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.884.000,00
284	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.760.000,00	69.995.532,00
285	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.500.000,00	416.501.588,00
286	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.628.000,00	56.560.900,00
287	Dinas Perhubungan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.039.261.660,00	8.116.993.194,00
288	Dinas Perhubungan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.452.000,00	31.843.000,00
289	Dinas Perhubungan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	157.643.000,00	99.274.000,00
290	Dinas Perhubungan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.580.000,00	33.660.000,00
291	Dinas Perhubungan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	-
292	Dinas Perhubungan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	824.500.000,00	479.305.757,00
293	Dinas Perhubungan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	578.083.000,00	454.473.035,00
294	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.820.000,00	99.163.356,00
295	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.970.000,00	189.753.255,00
296	Dinas Perhubungan	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.220.000.000,00	9.534.918.498,00
297	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.560.955.450,00	26.520.909.804,00
298	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	25.420.677.000,00	20.787.792.609,00
299	Dinas Perhubungan	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.986.900.000,00	1.671.473.723,00
300	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	725.148.650,00	689.701.520,00
301	Dinas Perhubungan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.210.035.500,00	1.838.624.126,00
302	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	432.699.776,00	390.763.387,00
303	Dinas Perhubungan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.729.050.000,00	4.549.328.334,00
304	Dinas Perhubungan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	298.034.950,00	191.287.372,00
305	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	17.525.000,00	17.450.000,00
306	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.250.360.500,00	1.215.037.064,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
307	Dinas Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.188.951.300,00	7.311.264.214,00
308	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.188.134.000,00	851.993.199,00
309	Dinas Perhubungan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	91.052.000,00	74.422.000,00
310	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.817.031.358,00	1.849.794.509,00
311	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.959.280,00	60.748.376,00
312	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.715.950,00	30.502.101,00
313	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630.615.700,00	492.125.362,00
314	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.480.000,00	57.004.472,00
315	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	286.825.000,00	253.977.002,00
316	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	186.064.000,00	106.041.036,00
317	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	174.250.000,00	144.369.004,00
318	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	107.200.000,00	55.410.000,00
319	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.832.175.000,00	2.153.803.101,00
320	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	34.600.000,00	30.500.000,00
321	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	62.650.000,00	61.624.999,00
322	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	184.219.000,00	166.765.854,00
323	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.400.000,00	138.738.947,00
324	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.436.850,00	138.094.884,00
325	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.947.000,00	16.122.000,00
326	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.352.000,00	17.352.000,00
327	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Pengadaan Mebel	155.450.000,00	147.896.950,00
328	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.850.000,00	178.250.001,00
329	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.400.000,00	92.738.777,00
330	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.601.688,00	705.499.477,00
331	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.800.000,00	182.472.941,00
332	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Pemeliharaan Mebel	-	-
333	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.750.000,00	37.135.000,00
334	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	416.040.000,00	411.518.805,00
335	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000,00	15.762.000,00
336	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	470.035.000,00	468.457.689,00
337	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	565.815.000,00	550.360.749,00
338	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.060.000,00	4.612.500,00
339	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	547.351.700,00	504.136.185,00
340	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	434.562.000,00	392.993.810,00
341	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.345.000,00	26.975.955,00
342	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.760.000,00	38.760.000,00
343	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.350.000,00	53.708.400,00
344	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.279.000.000,00	1.124.073.982,00
345	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.434.488.916,00	3.329.737.928,00
346	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.400.000,00	381.990.809,00
347	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.301.866.200,00	1.238.519.300,00
348	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	26.464.000,00	23.435.600,00
349	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	592.200.000,00	576.506.805,00
350	Dinas Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00
351	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.990.140,00	279.034.317,00
352	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.185.900,00	47.211.000,00
353	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.650.000,00	24.000.000,00
354	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.652.550,00	100.288.990,00
355	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	12.600.000,00
356	Dinas Kebudayaan	Pengadaan Mebel	143.902.000,00	138.260.401,00
357	Dinas Kebudayaan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	980.680.000,00	800.538.546,00
358	Dinas Kebudayaan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	292.180.000,00
359	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.200.000,00	160.546.063,00
360	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.448.884.540,00	1.600.171.510,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
361	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00
362	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.804.000,00	232.688.051,00
363	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan Mebel	20.874.000,00	8.125.200,00
364	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.140.000,00	67.482.000,00
365	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.000.000,00	78.000.000,00
366	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-
367	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.916.000,00	189.397.623,00
368	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	555.642.004,00	527.979.130,00
369	Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	725.399.000,00	670.725.584,00
370	Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.637.801.400,00	14.107.164.503,00
371	Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	42.862.839.200,00	41.982.315.450,00
372	Dinas Kebudayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	547.800.000,00	479.011.376,00
373	Dinas Kebudayaan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	564.997.000,00	523.113.900,00
374	Dinas Kebudayaan	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.109.233.000,00	1.084.360.493,00
375	Dinas Kebudayaan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	75.190.000,00	74.686.421,00
376	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.678.500,00	89.330.477,00
377	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	168.902.500,00	140.956.000,00
378	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.140.750,00	27.178.329,00
379	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,00	18.000.000,00
380	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000,00	26.337.993,00
381	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000,00	115.687.869,00
382	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.800.000,00	10.326.009,00
383	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.297.723.204,00	1.262.865.747,00
384	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.520.000,00	214.792.840,00
385	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.600.000,00	30.550.000,00
386	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.403.885,00
387	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.590.000,00	109.550.105,00
388	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	109.950.000,00	108.010.053,00
389	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	16.456.500,00	16.147.050,00
390	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	7.449.500,00	7.213.997,00
391	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	63.920.802,00	56.376.154,00
392	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	188.913.000,00	169.538.701,00
393	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.024.000,00	33.783.000,00
394	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.773.100,00	209.753.413,00
395	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.710.400,00	133.882.319,00
396	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.517.000,00	11.526.187,00
397	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.151.090.800,00	999.271.161,00
398	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	292.818.000,00	279.515.498,00
399	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.380.000,00	45.463.192,00
400	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.060.000,00	112.121.342,00
401	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	69.021.500,00	63.338.546,00
402	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	375.132.000,00	359.963.700,00
403	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	217.651.000,00	209.238.050,00
404	Dinas Pariwisata	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544.300.000,00	511.769.295,00
405	Dinas Pariwisata	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	380.665.200,00	352.312.300,00
406	Dinas Pariwisata	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.868.000,00	35.337.000,00
407	Dinas Pariwisata	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	2.942.000,00
408	Dinas Pariwisata	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	801.400.000,00	645.030.720,00
409	Dinas Pariwisata	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.273.805.264,00	5.109.502.453,00
410	Dinas Pariwisata	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.864.000,00	175.876.319,00
411	Dinas Pariwisata	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.586.136,00	1.206.358.357,00
412	Dinas Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	391.618.000,00	373.426.475,00
413	Dinas Pariwisata	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	190.954.000,00	190.568.490,00
414	Dinas Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	402.488.000,00	348.308.747,00
415	Dinas Pertanian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.068.000,00	5.976.240,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
416	Dinas Pertanian	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	404.336.000,00	393.019.911,00
417	Dinas Pertanian	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.940.000,00	43.722.331,00
418	Dinas Pertanian	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,00	10.440.000,00
419	Dinas Pertanian	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.000.000,00	157.721.172,00
420	Dinas Pertanian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000,00	287.359.692,00
421	Dinas Pertanian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.910.618.945,00	1.799.692.192,00
422	Dinas Pertanian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.013.000,00	363.146.589,00
423	Dinas Pertanian	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	324.800.000,00	323.460.822,00
424	Dinas Pertanian	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.080.000,00	70.141.250,00
425	Dinas Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	379.839.000,00	293.082.665,00
426	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.786.388.600,00	4.596.106.405,00
427	Dinas Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	703.595.000,00	674.024.151,00
428	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	770.897.000,00	591.433.224,00
429	Dinas Pertanian	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.173.500,00	75.083.719,00
430	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	402.014.000,00	375.023.892,00
431	Dinas Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63.000.500,00	62.482.822,00
432	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	306.240.000,00	306.223.000,00
433	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-
434	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-
435	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.700.000,00	4.026.322,00
436	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.156.500,00	10.994.310,00
437	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Peningkatan Citra Produk Ekspor	31.995.000,00	30.991.550,00
438	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	162.589.984,00	144.162.656,00
439	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	6.789.000,00	6.699.060,00
440	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.834.500,00	143.902.690,00
441	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.904.000,00	15.852.021,00
442	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.374.000,00	18.115.316,00
443	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.800.000,00	129.255.948,00
444	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.600.000,00	77.229.095,00
445	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.615.400,00	106.425.271,00
446	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.362.546.040,00	1.330.764.776,00
447	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.018.000,00	295.920.715,00
448	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.910.000,00	29.401.996,00
449	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.570.000,00	3.485.000,00
450	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	277.855.000,00	265.559.510,00
451	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4.750.000,00	4.665.000,00
452	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	84.300.000,00	81.249.099,00
453	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	28.678.000,00	12.210.199,00
454	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.461.000,00	3.374.178,00
455	Bagian Organisasi	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25.600.000,00	24.647.000,00
456	Bagian Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.664.839.500,00	27.342.439.822,00
457	Bagian Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.150.000,00	67.737.800,00
458	Bagian Umum	Pemeliharaan Mebel	95.009.000,00	51.447.390,00
459	Bagian Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.587.040.000,00	972.193.327,00
460	Bagian Umum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.067.795.000,00	1.814.380.368,00
461	Bagian Administrasi Pembangunan	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	16.550.000,00	11.594.264,00
462	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14.271.550,00	12.770.639,00
463	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185.350.000,00	182.650.000,00
464	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	147.750.000,00	147.750.000,00
465	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	148.088.000,00	97.257.953,00
466	Sekretariat DPRD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.898.331.750,00	1.467.184.386,00
467	Sekretariat DPRD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.282.500,00	66.181.641,00
468	Sekretariat DPRD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.273.200,00	185.413.260,00
469	Sekretariat DPRD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.400.000,00	54.706.478,00
470	Sekretariat DPRD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	696.946.000,00	688.666.000,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
471	Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.400.000,00	343.479.069,00
472	Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.008.228.306,00	1.779.677.453,00
473	Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385.352.000,00	282.384.899,00
474	Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	658.030.000,00	203.114.891,00
475	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.060.000,00	127.969.572,00
476	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645.980.000,00	577.129.221,00
477	Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.071.175.000,00	1.127.315.130,00
478	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.200.750,00	388.875.893,00
479	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.900.000,00	157.356.103,00
480	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.617.576,00	488.783.071,00
481	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	531.096.840,00	423.595.426,00
482	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.707.140,00	79.729.642,00
483	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.049.980,00	335.006.808,00
484	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2.311.049.500,00	1.882.194.735,00
485	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	543.663.280,00	515.578.781,00
486	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	76.877.140,00	73.878.587,00
487	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	58.365.640,00	55.969.040,00
488	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	27.732.570,00	26.477.670,00
489	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	327.425.000,00	320.735.795,00
490	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	92.845.570,00	69.939.670,00
491	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	89.220.490,00	70.668.840,00
492	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.775.250,00	210.550.686,00
493	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.435.000,00	38.972.000,00
494	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.383.400,00	209.703.150,00
495	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000,00	14.450.400,00
496	Badan Pendapatan Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	7.945.551.709,00	6.848.440.340,00
497	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	646.960.000,00	466.005.039,00
498	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.854.734.274,00	2.735.240.795,00
499	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	929.688.000,00	826.668.680,00
500	Badan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.695.000,00	143.959.300,00
501	Badan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00
502	Badan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	366.900.000,00	364.717.100,00
503	Badan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.945.000,00
504	Badan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
505	Badan Pendapatan Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	557.100.000,00	525.502.560,00
506	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.477.500,00	150.334.532,00
507	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.347.000,00	33.929.336,00
508	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.380.000,00	95.503.200,00
509	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.480.000,00	13.741.800,00
510	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	6.660.000,00
511	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.915.000,00	-
512	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	601.800.000,00	563.669.018,00
513	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000,00	193.972.327,00
514	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.517.858.982,00	1.470.787.860,17
515	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.900.000,00	33.000.000,00
516	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	371.620.000,00	285.127.513,00
517	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.150.000,00	89.408.950,00
518	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	557.600.000,00	540.480.626,00
519	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	49.661.000,00	-
520	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80.400.000,00	5.400.000,00
521	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.781.000,00	10.103.088,00
522	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	111.119.900,00	101.844.713,00
523	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	25.779.000,00	15.175.000,00
524	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	521.914.000,00	370.574.999,00
525	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	767.850.000,00	352.284.502,00
526	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.279.450,00	172.142.434,00

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
527	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.254.750,00	78.229.000,00
528	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.220.000,00	11.220.000,00
529	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	844.553.000,00	644.326.453,00
530	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.000.000,00	107.570.143,00
531	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.591.115,00	567.237.696,00
532	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.836.000,00	226.663.703,00
533	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	82.750.000,00	24.718.533,00
534	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.865.000,00	104.582.288,00
535	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	95.000.000,00	93.684.000,00
536	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.359.600,00	117.016.014,00
537	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	205.335.050,00	166.592.100,00
538	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	126.265.000,00	86.805.440,00
539	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.440.000,00	10.260.000,00
540	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Pengadaan Mebel	134.536.550,00	85.021.900,00
541	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	358.860.000,00	309.714.794,00
542	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.400.000,00	113.808.867,00
543	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.060.000,00	19.251.985,00
544	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.728.410,00	708.561.305,00
545	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00
546	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.800.000,00	111.541.935,00
547	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.256.000,00	-
548	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	188.356.216,00
549	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	91.850.000,00	91.697.850,00
550	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	120.275.000,00	114.617.930,00
551	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	340.258.000,00	316.055.375,00
552	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	19.650.000,00	18.781.265,00
553	Inspektorat	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.619.500,00	89.452.800,00
554	Inspektorat	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	132.496.230,00	98.538.375,00
555	Inspektorat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.788.250,00	123.577.250,00
556	Inspektorat	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.651.000,00	88.354.509,00
557	Inspektorat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	9.720.000,00
558	Inspektorat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.035.895.000,00	2.111.606.027,00
559	Inspektorat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.800.000,00	129.991.079,00
560	Inspektorat	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.560.000,00	83.130.000,00
561	Inspektorat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.505.549.240,00	1.226.337.390,00
562	Inspektorat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.300.000,00	25.033.200,00
563	Inspektorat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.780.000,00	281.500.519,00
564	Inspektorat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.750.760.000,00	3.313.463.419,00
565	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.933.300,00	201.763.378,00
566	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.009.400,00	20.551.740,00
567	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.215.000,00	24.744.214,00
568	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000,00	10.620.000,00
569	Kecamatan Denpasar Barat	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.767.000,00	138.805.000,00
570	Kecamatan Denpasar Barat	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	321.841.961,00	275.127.115,00
571	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.600.000,00	85.327.692,00
572	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.665.000,00
573	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.320.288,00	839.418.564,00
574	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.790.000,00	42.621.301,00
575	Kecamatan Denpasar Barat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.662.000,00	132.921.817,00
576	Kecamatan Denpasar Barat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.617.009,00	230.729.484,00
577	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.219.950,00	195.118.950,00
578	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.398.000,00	21.337.500,00
579	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.194.000,00	31.722.040,00
580	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.679.000,00	28.679.000,00
581	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000,00	3.780.000,00
582	Kelurahan Pemecutan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	382.301.500,00	346.977.006,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
583	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000,00	39.177.841,00
584	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.614.538.188,00	1.614.450.988,00
585	Kelurahan Pemecutan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.392.000,00	134.656.153,00
586	Kelurahan Pemecutan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.650.000,00	151.611.021,00
587	Kelurahan Pemecutan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	679.760.000,00	667.052.281,00
588	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.384.250,00	104.721.400,00
589	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.449.000,00	43.401.000,00
590	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.470.000,00	44.220.000,00
591	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.322.000,00	17.372.000,00
592	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00
593	Kelurahan Padangsambian	Pengadaan Mebel	3.000.000,00	2.941.500,00
594	Kelurahan Padangsambian	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000,00	46.949.430,00
595	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000,00	43.669.792,00
596	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.323.684.595,00	1.321.157.490,00
597	Kelurahan Padangsambian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.500.000,00	39.187.499,00
598	Kelurahan Padangsambian	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.530.000,00	25.235.346,00
599	Kelurahan Padangsambian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	373.368.000,00	333.743.000,00
600	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.287.550,00	116.567.440,00
601	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.245.000,00	16.353.850,00
602	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.040.000,00	19.590.000,00
603	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.263.000,00	8.584.055,00
604	Kelurahan Dauh Puri	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.090.000,00	364.841.096,00
605	Kelurahan Dauh Puri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	8.884.100,00
606	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.083.000,00	46.308.061,00
607	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	974.061.676,00	953.530.282,00
608	Kelurahan Dauh Puri	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.536.000,00	95.059.975,00
609	Kelurahan Dauh Puri	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.010.000,00	23.609.231,00
610	Kelurahan Dauh Puri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	30.000.000,00	16.639.522,00
611	Kecamatan Denpasar Timur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	395.679.450,00	272.755.000,00
612	Kecamatan Denpasar Timur	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00
613	Kecamatan Denpasar Timur	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.699.700,00	48.554.450,00
614	Kecamatan Denpasar Timur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.978.520,00	168.423.401,00
615	Kecamatan Denpasar Timur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.360.000,00	95.497.827,00
616	Kecamatan Denpasar Timur	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.059.758.934,00	912.453.572,00
617	Kecamatan Denpasar Timur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.150.000,00	179.354.375,00
618	Kecamatan Denpasar Timur	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	273.915.000,00	251.988.882,00
619	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.496.500,00	279.984.458,00
620	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.649.000,00	6.315.300,00
621	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.049.500,00	32.999.500,00
622	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	3.480.000,00
623	Kelurahan Kesiman	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,00	16.000.000,00
624	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.600.000,00	18.895.451,00
625	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.393.900,00	134.314.000,00
626	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.340.027.640,00	1.334.854.638,00
627	Kelurahan Kesiman	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.429.000,00	54.187.771,00
628	Kelurahan Kesiman	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.330.000,00	12.972.620,00
629	Kelurahan Kesiman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	446.298.000,00	377.168.004,00
630	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.717.600,00	82.963.360,00
631	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.754.800,00	18.214.474,00
632	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.624.000,00	22.925.000,00
633	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	3.420.000,00
634	Kelurahan Sumerta	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.854.000,00	99.739.999,00
635	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	19.839.726,00
636	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.009.900,00	115.920.999,00
637	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.250.804.480,00	1.236.291.706,00
638	Kelurahan Sumerta	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.203.000,00	59.816.497,00
639	Kelurahan Sumerta	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	-
640	Kelurahan Sumerta	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.560.000,00	64.025.000,00

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
641	Kelurahan Sumerta	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	535.054.250,00	529.084.377,00
642	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.301.000,00	53.757.780,00
643	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.670.500,00	8.975.000,00
644	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.097.000,00	16.092.089,00
645	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000,00	3.480.000,00
646	Kelurahan Dangin Puri	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.346.000,00	157.648.442,00
647	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.200.000,00	45.596.220,00
648	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.391.350,00	85.336.350,00
649	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	854.587.920,00	842.996.202,00
650	Kelurahan Dangin Puri	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.940.000,00	68.465.836,00
651	Kelurahan Dangin Puri	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.946.000,00	97.218.000,00
652	Kelurahan Dangin Puri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.000.000,00	58.400.000,00
653	Kelurahan Penatih	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.751.000,00	153.917.564,00
654	Kelurahan Penatih	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.505.000,00	14.582.720,00
655	Kelurahan Penatih	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	6.375.000,00
656	Kelurahan Penatih	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.738.000,00	14.342.000,00
657	Kelurahan Penatih	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	4.920.000,00
658	Kelurahan Penatih	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	22.465.990,00
659	Kelurahan Penatih	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.359.600,00	104.841.750,00
660	Kelurahan Penatih	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.172.601.800,00	1.151.610.846,00
661	Kelurahan Penatih	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.194.000,00	42.480.698,00
662	Kelurahan Penatih	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.500.000,00	9.000.000,00
663	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.837.450,00	185.237.951,00
664	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.073.000,00	28.335.120,00
665	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000,00	8.640.000,00
666	Kecamatan Denpasar Selatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443.310.518,00	434.486.504,00
667	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.900.000,00	97.760.811,00
668	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	854.758.130,00	815.709.049,00
669	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.972.000,00	42.143.811,00
670	Kecamatan Denpasar Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.454.000,00	115.406.047,00
671	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	374.900.000,00	368.602.764,00
672	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.010.000,00	45.262.620,00
673	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.761.800,00	132.191.642,00
674	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.678.000,00	21.381.933,00
675	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00
676	Kelurahan Pedungan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000,00	171.442.098,00
677	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.049.000,00	57.024.957,00
678	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.200.000,00	2.155.620,00
679	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.205.676,00	1.334.082.816,00
680	Kelurahan Pedungan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.958.000,00	62.644.218,00
681	Kelurahan Pedungan	Pemeliharaan Mebel	1.400.000,00	1.400.000,00
682	Kelurahan Pedungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.468.000,00	184.934.647,00
683	Kelurahan Pedungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.510.000,00	18.055.000,00
684	Kelurahan Pedungan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	320.698.062,00
685	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.335.150,00	190.023.423,00
686	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.267.000,00	22.253.443,00
687	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00
688	Kelurahan Sesetan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.116.000,00	182.653.003,00
689	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	55.877.895,00
690	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00
691	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.471.744.238,00	1.470.766.226,00
692	Kelurahan Sesetan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.066.000,00	60.971.416,00
693	Kelurahan Sesetan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.427.500,00	151.978.758,00
694	Kelurahan Sesetan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.460.000,00	12.368.550,00
695	Kelurahan Sesetan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	380.000.000,00	364.280.507,00
696	Kelurahan Serangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.237.000,00	128.328.454,00
697	Kelurahan Serangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.230.000,00	24.388.092,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
698	Kelurahan Serangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00
699	Kelurahan Serangan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.568.000,00	204.986.052,00
700	Kelurahan Serangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	37.347.946,00
701	Kelurahan Serangan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	999.999,00
702	Kelurahan Serangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.895.390,00	786.795.384,00
703	Kelurahan Serangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.035.000,00	79.363.501,00
704	Kelurahan Serangan	Pemeliharaan Mebel	2.160.000,00	-
705	Kelurahan Serangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.000.000,00	415.429.715,00
706	Kelurahan Serangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.220.000,00	32.012.400,00
707	Kelurahan Serangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	301.700.000,00	293.447.474,00
708	Kelurahan Panjer	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.269.984,00	116.160.723,00
709	Kelurahan Panjer	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.065.750,00	37.137.756,00
710	Kelurahan Panjer	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000,00	3.420.000,00
711	Kelurahan Panjer	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	34.031.475,00
712	Kelurahan Panjer	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00
713	Kelurahan Panjer	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	855.549.774,00	855.549.733,00
714	Kelurahan Panjer	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.185.000,00	39.695.496,00
715	Kelurahan Panjer	Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	6.499.994,00
716	Kelurahan Panjer	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.410.000,00	200.134.317,00
717	Kelurahan Panjer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	383.600.000,00	369.746.774,00
718	Kelurahan Renon	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.914.102,00	76.826.500,00
719	Kelurahan Renon	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.759.600,00	9.172.100,00
720	Kelurahan Renon	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.440.000,00	10.440.000,00
721	Kelurahan Renon	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.994.000,00	136.990.543,00
722	Kelurahan Renon	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.800.000,00	40.462.532,00
723	Kelurahan Renon	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.798.000,00	30.404.745,00
724	Kelurahan Renon	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.437.814,00	727.385.420,00
725	Kelurahan Renon	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.681.000,00	66.312.299,00
726	Kelurahan Renon	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.460.000,00	19.756.224,00
727	Kelurahan Renon	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.150.000,00	31.883.192,00
728	Kelurahan Renon	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	374.072.158,00	354.654.026,00
729	Kelurahan Sanur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.086.642,00	109.395.000,00
730	Kelurahan Sanur	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.846.000,00	20.872.988,00
731	Kelurahan Sanur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	3.480.000,00
732	Kelurahan Sanur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.053.000,00	167.665.500,00
733	Kelurahan Sanur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.100.000,00	48.760.110,00
734	Kelurahan Sanur	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.660.000,00	1.560.000,00
735	Kelurahan Sanur	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890.256.158,00	881.197.379,00
736	Kelurahan Sanur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.487.000,00	43.650.405,00
737	Kelurahan Sanur	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.624.444,00	49.717.623,00
738	Kelurahan Sanur	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.210.000,00	25.624.350,00
739	Kelurahan Sanur	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	524.189.500,00	500.208.456,00
740	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.908.650,00	242.388.387,00
741	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.689.000,00	23.981.000,00
742	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.341.000,00	32.604.500,00
743	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.548.000,00	9.548.000,00
744	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.400.000,00	139.457.448,00
745	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	960.726.456,00	720.254.272,00
746	Kecamatan Denpasar Utara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.558.000,00	158.132.647,00
747	Kecamatan Denpasar Utara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	428.660.000,00	391.458.694,00
748	Kelurahan Tonja	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	317.618.550,00	299.612.485,00
749	Kelurahan Tonja	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.605.000,00	15.069.501,00
750	Kelurahan Tonja	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.576.000,00	13.176.000,00
751	Kelurahan Tonja	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	3.960.000,00
752	Kelurahan Tonja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.800.000,00	71.668.544,00
753	Kelurahan Tonja	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.388.990,00	905.189.986,00
754	Kelurahan Tonja	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.348.000,00	61.259.038,00
755	Kelurahan Tonja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.310.000,00	61.356.041,00
756	Kelurahan Tonja	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	471.740.842,00	381.813.500,00

9

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
757	Kelurahan Ubung	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.121.300,00	236.809.900,00
758	Kelurahan Ubung	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.073.600,00	17.634.807,00
759	Kelurahan Ubung	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.035.000,00	11.448.850,00
760	Kelurahan Ubung	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	3.960.000,00
761	Kelurahan Ubung	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	33.375.569,00
762	Kelurahan Ubung	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.261.760,00	724.091.610,00
763	Kelurahan Ubung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.150.000,00	52.402.788,00
764	Kelurahan Ubung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.970.000,00	53.399.540,00
765	Kelurahan Ubung	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	554.309.100,00	546.000.700,00
766	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.948.800,00	347.797.496,00
767	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.472.800,00	34.355.000,00
768	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.500.000,00	42.710.000,00
769	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	4.920.000,00
770	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000,00	47.039.309,00
771	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.153.603.504,00	1.136.056.673,00
772	Kelurahan Peguyangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.156.000,00	46.136.485,00
773	Kelurahan Peguyangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.870.000,00	34.559.629,00
774	Kelurahan Peguyangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	239.591.500,00	237.962.500,00
775	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.354.050,00	9.183.050,00
776	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.156.500,00	75.169.150,00
777	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.008.000,00	13.152.166,00
778	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.441.000,00	12.145.142,00
779	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000,00	5.280.000,00
780	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pengadaan Mebel	37.875.000,00	35.500.000,00
781	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.407.500,00	175.537.101,00
782	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.400.000,00	107.460.425,00
783	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.234.564,00	803.136.122,00
784	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.380.000,00	191.188.596,00
785	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.351.200,00
786	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.490.000,00	114.406.255,00
787	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	146.502.835,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)			1.832.989.220.309,00	1.511.160.850.177,39
TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER(Rp.)			3.669.146.171.659,00	3.198.327.432.305,89
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)			49,96	47,25



**BELANJA WAJIB YANG DIDANAI DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO (1)	SKPD (2)	SUB KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)
PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (OPSEN PKB)				
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penggantian Jembatan	3.599.136.000,00	3.445.371.401,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	49.286.375.860,00	45.186.018.069,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	128.732.279.300,00	120.873.697.998,00
4	Dinas Perhubungan	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.986.900.000,00	1.671.473.723,00
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN OPSEN PKB (Rp)			183.604.691.160,00	171.176.561.191,00
TOTAL PENDAPATAN OPSEN PKB (Rp)			237.500.000.000,00	251.300.400.900,00
PERSENTASE ALOKASI OPSEN PKB MINIMAL 10%			77,31%	68,12%
PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU-TENAGA LISTRIK				
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	115.269.750.000,00	113.588.931.000,00
2	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	21.600.000.000,00	17.384.874.433,00
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PBJT-TENAGA LISTRIK (Rp)			136.869.750.000,00	130.973.805.433,00
TOTAL PENDAPATAN PBJT-TENAGA LISTRIK (Rp.)			250.000.000.000,00	257.035.821.724,00
PERSENTASE ALOKASI PBJT-TENAGA LISTRIK MINIMAL 10%			54,75	50,96
PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH				
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	7.329.355.000,00	7.329.355.000,00
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH (Rp)			13.970.380.000,00	12.940.028.000,00
TOTAL PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH (Rp)			8.000.000.000,00	8.806.491.718,00
PERSENTASE ALOKASI PAJAK AIR TANAH MINIMAL 10%			174,63	146,94
PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK				
1	Dinas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	21.582.000,00	12.949.200,00
2	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	207.295.000,00	193.593.178,22
3	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.774.850,00	16.067.720,00
4	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	983.901.050,00	638.457.772,00
5	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	617.555.750,00	585.119.558,00
6	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.102.479.520,00	980.210.597,00
7	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.500.000,00	7.093.950,00
8	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	428.135.000,00	428.000.733,00
9	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	264.720.000,00	264.720.000,00
10	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	211.812.000,00	197.337.129,63
11	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	153.488.550,00	148.088.650,00
12	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	352.605.000,00	253.793.034,08
13	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	83.125.000,00	80.817.000,00
14	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.972.000.000,00	23.042.786.371,91
15	Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	73.150.000,00	67.068.100,00
16	Dinas Kesehatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	287.950.000,00	287.950.000,00
17	Dinas Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.397.380.334,00	1.246.664.011,00
18	Dinas Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.025.000,00	6.019.500,00
19	Dinas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	233.461.450,00	228.486.450,00
20	Dinas Kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	602.823.800,00	329.632.749,07
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (Rp)			35.025.764.304,00	29.014.855.703,92
TOTAL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (Rp)			35.874.106.084,00	34.732.820.333,00
TOTAL PERSENTASE ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (%)			97,64	83,54



REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. SPM Bidang Pendidikan				
1	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.756.500,00	27.887.190,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	616.859.900,00	503.691.506,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.414.848.080,00	3.390.506.638,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	13.161.000,00	5.423.464,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	71.624.000,00	13.790.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	19.016.000,00	14.721.501,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.343.700,00	3.683.343,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	109.116.778.500,00	103.033.936.732,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000,00	279.324.269,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.202.267.200,00	818.969.506,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.232.625.000,00	6.479.424.202,00
Total		125.023.279.880,00	114.571.358.351,00	
2	Literasi dan Numerasi	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	433.165.878,00	397.802.000,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15.600.000,00	14.025.600,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.179.200,00	8.720.648,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	493.828.000,00	491.423.945,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	68.853.114,00	40.678.166,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.272.978.292,00	4.150.066.047,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	226.196.300,00	220.027.100,00
		Total		5.519.800.784,00
3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3.600.000,00	3.600.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.400.000,00	5.400.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	16.589.670,00	15.038.716,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.937.000,00	7.522.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	87.355.500,00	54.838.000,00
		Total		120.882.170,00
4	Kekhususan PAUD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	81.002.000,00	42.126.770,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.243.000,00	10.763.250,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	25.823.000,00	21.983.930,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	74.085.000,00	64.192.654,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	223.073.000,00	207.327.325,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	31.421.642,00	19.785.388,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	75.397.000,00	73.098.648,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21.621.000,00	20.510.000,00
		Total		545.665.642,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			131.209.628.476,00	120.440.288.538,00
B. SPM Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	225.720.000,00	202.083.350,00
Total		225.720.000,00	202.083.350,00	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	284.120.000,00	283.769.794,00
Total		284.120.000,00	283.769.794,00	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	459.885.000,00	459.875.278,00
Total		459.885.000,00	459.875.278,00	
4	Pelavanan Kesehatan Balita	Pencelolaaan Pelavanan Kesehatan Balita	75.594.000,00	75.594.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Total			75.594.000,00	75.594.000,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	707.320.232,00	641.675.038,00
Total			707.320.232,00	641.675.038,00
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	67.639.000,00	55.825.000,00
Total			67.639.000,00	55.825.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	209.039.000,00	195.221.903,00
Total			209.039.000,00	195.221.903,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.774.850,00	16.067.720,00
Total			18.774.850,00	16.067.720,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	983.901.050,00	638.457.772,00
Total			983.901.050,00	638.457.772,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	99.777.000,00	87.227.000,00
Total			99.777.000,00	87.227.000,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	700.875.750,00	658.079.558,00
Total			700.875.750,00	658.079.558,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.102.479.520,00	980.210.597,00
Total			1.102.479.520,00	980.210.597,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			4.935.125.402,00	4.294.087.010,00
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.318.094.000,00	1.239.861.000,00
Total			2.318.094.000,00	1.239.861.000,00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00
Total			6.641.025.000,00	5.610.673.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			8.959.119.000,00	6.850.534.000,00
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	580.300.000,00	325.949.000,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.375.000,00	99.311.700,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	375.000,00	375.000,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	300.000,00	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	300.000,00	-
Total			681.650.000,00	425.635.700,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	85.300.000,00	-
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.300.000,00	49.809.219,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.675.000,00	49.215.369,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	50.900.000,00	49.453.719,00
Total			237.175.000,00	148.478.307,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			918.825.000,00	574.114.007,00
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	120.282.000,00	119.913.000,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.800.000,00	-
Total			129.082.000,00	119.913.000,00
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	164.284.000,00	141.593.659,00
Total			164.284.000,00	141.593.659,00
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	135.264.000,00	111.993.215,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	725.000.000,00	645.745.200,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	58.500.000,00	58.410.650,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	103.225.000,00	92.862.149,00
Total			1.021.989.000,00	909.011.214,00
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	626.495.400,00	511.370.400,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	93.000.000,00	91.530.600,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	333.474.000,00	74.625.000,00
Total			1.052.969.400,00	677.526.000,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	374.490.000,00	295.570.270,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	52.073.000,00	42.314.000,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	699.640.000,00	503.360.914,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	422.245.000,00	404.918.847,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	172.558.000,00	97.556.700,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	342.845.000,00	155.122.341,00
Total			2.063.851.000,00	1.498.843.072,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			4.432.175.400,00	3.346.886.945,00
F. SPM Bidang Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.000.000,00	10.500.000,00
		Penyediaan Permakanan	18.000.000,00	18.000.000,00
		Penyediaan Sandang	109.200.000,00	97.879.600,00
Total			139.200.000,00	126.379.600,00
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	15.750.000,00	15.750.000,00
Total			15.750.000,00	15.750.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			154.950.000,00	142.129.600,00



**BELANJA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGETASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SKPD	NO SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	420.749.688,00	390.680.617,80
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	32.732.440.500,00	30.907.996.869,60
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.451.598.600,00	1.112.206.029,00
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	931.200.000,00	882.753.000,00
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	303.600.000,00	302.591.700,00
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	756.300.000,00	733.059.300,00
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23.573.236.222,80	23.382.791.877,75
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	29.490.000,00	29.377.500,00
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.587.308.100,00	398.130.003,00
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.747.508.250,00	1.631.049.000,00
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.595.286.807,30	13.451.528.000,70
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	14.850.000,00	13.725.000,00
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.363.117.000,00	3.267.930.300,00
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.697.790.000,00	1.435.146.225,00
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.250.000,00	2.250.000,00
16	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.375.000,00	3.375.000,00
17	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.910.000,00	20.910.000,00
18	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.562.500,00	9.562.500,00
19	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.300.000,00	9.300.000,00
20	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.675.000,00	15.675.000,00
21	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.375.000,00	14.475.000,00
22	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.000.000,00	6.647.200,00
23	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.410.000,00	1.410.000,00
24	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	232.040.000,00	230.002.500,00
25	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	201.592.000,00	195.847.000,00
26	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.000.000,00	2.797.500,00
27	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	87.655.500,00	87.618.153,30
28	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.012.500,00	7.012.500,00
29	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.637.801.600,00	1.402.957.199,00
30	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.199.121.000,00	23.224.619.400,00
31	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.840.000,00	5.840.000,00
32	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.240.000,00	21.720.000,00
33	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.160.000,00	5.160.000,00
34	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.640.000,00	2.640.000,00
35	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.486.500,00	47.673.150,00
36	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.680.000,00	3.680.000,00
37	Puskesmas I Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.152.000,00	9.992.000,00
38	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.640.000,00	15.640.000,00
39	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.420.000,00	14.420.000,00
40	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	12.000.000,00
41	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.900.000,00	3.900.000,00
42	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.440.000,00	20.666.436,90
43	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.560.000,00	2.560.000,00
44	Puskesmas II Denpasar Timur	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.080.000,00	12.728.000,00
45	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.820.000,00	6.500.000,00
46	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	13.200.000,00
47	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.680.000,00	1.680.000,00
48	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.600.000,00	1.600.000,00
49	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60.727.500,00	48.927.600,00
50	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.440.000,00	1.440.000,00
51	Puskesmas I Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.850.000,00	8.834.000,00
52	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.240.000,00	8.240.000,00
53	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.860.000,00	24.000.000,00
54	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.600.000,00	1.600.000,00
55	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.400.000,00	11.220.000,00
56	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	46.004.700,00	26.147.700,00
57	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	320.000,00	320.000,00
58	Puskesmas II Denpasar Barat	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.969.400,00	13.620.000,00

NO	SKPD	NO SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
59	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.500.000,00	11.500.000,00
60	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.960.000,00	8.960.000,00
61	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.200.000,00	1.200.000,00
62	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.080.000,00	2.080.000,00
63	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.309.100,00	30.964.200,00
64	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.600.000,00	1.600.000,00
65	Puskesmas I Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.152.000,00	23.152.000,00
66	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.800.000,00	8.800.000,00
67	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.280.000,00	21.280.000,00
68	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.440.000,00	1.440.000,00
69	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.640.000,00	2.640.000,00
70	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.200.500,00	34.609.500,00
71	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	800.000,00	800.000,00
72	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.535.200,00	21.056.000,00
73	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.220.000,00	4.220.000,00
74	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.140.000,00	7.060.000,00
75	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	960.000,00	960.000,00
76	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.960.000,00	3.960.000,00
77	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	37.985.700,00	37.457.100,00
78	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	800.000,00	800.000,00
79	Puskesmas III Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.520.000,00	8.088.000,00
80	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.400.000,00	14.400.000,00
81	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.820.000,00	4.720.000,00
82	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000,00	9.600.000,00
83	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.840.000,00	2.480.000,00
84	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.330.900,00	13.217.550,00
85	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.840.000,00	3.840.000,00
86	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.955.000,00	8.846.000,00
87	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.000.000,00	2.000.000,00
88	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.280.000,00	10.720.000,00
89	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.200.000,00	2.200.000,00
90	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000,00	6.600.000,00
91	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.033.600,00	41.862.900,00
92	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.400.000,00	2.400.000,00
93	Puskesmas I Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.176.000,00	8.168.000,00
94	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.780.000,00	2.780.000,00
95	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.640.000,00	12.640.000,00
96	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00
97	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.920.000,00	1.920.000,00
98	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31.979.400,00	31.934.100,00
99	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.560.000,00	4.560.000,00
100	Puskesmas II Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.976.000,00	8.728.000,00
101	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.920.000,00	7.920.000,00
102	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.400.000,00	13.300.000,00
103	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00
104	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.080.000,00	2.080.000,00
105	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.478.200,00	48.408.600,00
106	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.640.000,00	5.640.000,00
107	Puskesmas III Denpasar Utara	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15.720.000,00	15.640.000,00
108	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.800.450.000,00	1.730.313.864,00
109	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.532.350.000,00	25.163.704.600,00
110	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	15.000.000,00	14.850.001,80
111	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	291.647.700,00	234.985.200,00
112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	46.500.000,00	45.765.300,00
113	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	77.089.400,00	77.067.892,00
114	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	9.000.000,00	9.000.000,00
115	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.000.000,00	5.250.000,00
116	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	29.160.000,00	29.160.000,00

NO	SKPD	NO SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
117	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	241.615.000,00	215.186.950,00
118	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	258.000.000,00	258.000.000,00
119	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16.125.000,00	16.125.000,00
120	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	69.000.000,00	45.000.000,00
121	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	411.775.000,00	400.047.039,00
122	Dinas Sosial	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	7.875.000,00	7.875.000,00
123	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8.700.000,00	7.923.000,00
124	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.780.000,00	3.780.000,00
125	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	750.000,00	652.500,00
126	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4.837.500,00	2.970.000,00
127	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	600.000,00	600.000,00
128	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	15.497.000,00	13.880.891,20
129	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.630.000,00	4.630.000,00
130	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	16.575.400,00	15.017.676,00
131	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300.000,00	300.000,00
132	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	11.722.000,00	11.074.000,00
133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	243.551.800,00	237.559.730,80
134	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	183.201.200,00	178.799.226,60
135	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.209.161.000,00	1.957.726.034,10
136	Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	107.140.200,00	102.324.442,20
137	Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.186.600,00	5.175.000,00
138	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5.625.000,00	4.950.000,00
139	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.410.000,00	38.271.870,00
140	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.982.800,00	8.860.000,00
141	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	17.500.000,00	16.150.000,00
142	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	13.350.000,00	13.350.000,00
143	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	14.350.000,00	13.819.800,00
144	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.650.000,00	10.590.000,00
145	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	29.896.000,00	28.559.500,00
146	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.950.000,00	84.630.000,00
147	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.969.200,00	59.607.855,00
148	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000,00	23.568.750,00
149	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.400.000,00	3.400.000,00
150	Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.434.422.580,00	1.377.363.634,50
151	Dinas Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.812.800,00	141.464.903,00
152	Dinas Pertanian	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	57.436.200,00	45.761.400,00
153	Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7.681.950,00	7.673.943,30
JUMLAH				147.216.013.298,10	136.718.570.215,55



**LAPORAN TEMATIK
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
1	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31.753.840.206,70	30.078.766.537,20	94,72
	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	55.082.491,20	32.542.532,80	59,08
	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	868.740,00	736.668,60	84,80
	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.951.220,00	19.385.400,00	97,16
	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	27.279.194.625,00	25.758.484.183,00	94,43
	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	113.098.150,00	110.013.550,00	97,27
	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.200.200,00	1.063.500,00	88,61
	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.587.900,00	2.839.100,00	79,13
	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	137.113.750,00	134.299.467,00	97,95
	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	853.712.020,00	847.626.659,50	99,29
	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.855.410,50	4.946.347,00	62,97
	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	18.521.250,00	16.048.163,50	86,65
	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.804.381.500,00	2.724.998.150,00	97,17
	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.351.300,00	5.577.438,00	87,82
	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4.324.200,00	4.102.000,00	94,86
	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.632.200,00	1.084.692,80	41,21
	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.820.000,00	12.540.000,00	74,55
	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	429.145.250,00	402.478.685,00	93,79
2	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.282.228,00	15.194.637,40	93,32
	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	906.800,00	418.920,00	46,20
	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.375.428,00	14.775.717,40	96,10
3	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	163.517.670.623,33	155.636.693.060,92	95,18
	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.563.809.701,75	1.365.450.614,00	87,32
	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.062.865.087,38	4.489.379.341,65	74,05
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.400.000,00	49.363.350,00	99,93
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	284.120.000,00	283.769.794,00	99,88
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	459.885.000,00	459.875.278,00	100,00
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.594.000,00	75.594.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	317.472.185,60	311.804.030,40	98,21
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	54.111.200,00	44.660.000,00	82,53
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.627.000,00	85.600.146,60	99,97
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	52.944.000,00	52.944.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	85.534.900,00	79.689.591,00	93,17
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	71.025.000,00	51.121.368,80	71,98
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.672.559.267,00	2.108.105.439,40	78,88
	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.744.999.392,00	3.908.837.670,70	82,38
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	313.637.000,00	313.625.000,00	100,00
	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.154.000,00	2.146.776,00	99,66
	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	17.390.000,00	15.709.822,00	90,34
	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.632.500,00	4.632.500,00	100,00
	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	34.214.000,00	31.889.298,00	93,21
	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	138.966.575,00	133.059.096,25	95,75
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	127.371.760,00	69.648.715,60	54,68
	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.556.627.411,50	6.175.586.129,25	94,19
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	112.592.689.141,60	111.326.986.129,90	98,88
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.680.000,00	12.800.000,00	109,59
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.584.000,00	38.848.000,00	109,17
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.991.000,00	34.748.600,00	99,31
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.080.000,00	4.240.000,00	103,92
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.195.600,00	5.632.000,00	108,40
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.152.000,00	10.552.000,00	103,94
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	107.052.000,00	100.355.481,75	93,74

9

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.384.000,00	5.464.000,00	101,49
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.560.000,00	360.000,00	23,08
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.640.000,00	1.832.000,00	111,71
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.078.975.029,60	2.474.931.370,40	80,38
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.280.000,00	31.280.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.072.000,00	23.072.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.960.000,00	13.777.624,60	60,01
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.430.400,00	3.184.000,00	92,82
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.640.000,00	3.920.000,00	84,48
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.080.000,00	12.728.000,00	97,31
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	105.144.375,00	86.172.704,25	81,96
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.263.200,00	14.260.000,00	99,98
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	760.000,00	80.000,00	10,53
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.263.500,00	3.935.500,00	92,31
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.917.045.499,20	1.706.648.659,51	89,02
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.640.000,00	13.000.000,00	95,31
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.120.000,00	24.960.000,00	118,18
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.485.000,00	32.618.400,00	80,57
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.240.400,00	2.240.000,00	99,98
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.504.000,00	15.504.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.850.000,00	8.834.000,00	99,82
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	108.122.100,00	103.900.965,75	96,10
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.174.800,00	13.168.000,00	99,95
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	320.000,00	200.000,00	62,50
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.395.040,00	3.004.000,00	68,35
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.892.916.705,60	2.499.968.730,40	86,42
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.480.000,00	17.000.000,00	103,16
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.376.000,00	38.400.000,00	92,81
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.669.800,00	17.431.800,00	56,84
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.472.000,00	5.472.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.304.000,00	5.680.000,00	90,10
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.969.400,00	13.620.000,00	97,50
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	142.314.000,00	145.611.564,75	102,32
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.272.000,00	19.272.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000,00	240.000,00	60,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.495.600,00	728.000,00	48,68
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.838.023.055,20	2.505.427.756,80	88,28
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.336.000,00	14.336.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.539.400,00	20.642.800,00	87,69
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.143.400,00	1.136.000,00	99,35
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	272.000,00	272.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.152.000,00	23.152.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	101.326.500,00	100.975.164,00	99,65
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.149.200,00	20.136.000,00	99,93
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	961.600,00	961.600,00	100,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.105.084.507,20	1.894.273.184,80	89,99
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.600.000,00	20.540.000,00	116,70
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.048.000,00	34.048.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.467.000,00	31.929.000,00	136,06
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.248.000,00	3.648.000,00	112,32
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	712.000,00	1.024.000,00	143,82
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.535.200,00	21.056.000,00	97,77
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	103.863.750,00	99.939.835,50	96,22
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.260.000,00	17.260.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	125.000,00	120.000,00	96,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	917.400,00	892.155,20	97,25
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.586.173.470,40	1.352.678.426,76	85,28
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.424.000,00	11.296.000,00	98,88
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25.323.800,00	24.971.400,00	98,61
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.122.000,00	3.120.000,00	99,94
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.936.000,00	3.936.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.520.000,00	8.088.000,00	94,93
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	72.086.250,00	66.291.999,00	91,96
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.058.000,00	10.856.000,00	98,17
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.280.000,00	880.000,00	68,75
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	714.600,00	548.000,00	76,69
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.505.315.880,80	1.585.063.752,00	105,30
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.800.000,00	31.200.000,00	108,33
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.712.000,00	9.312.000,00	120,75
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18.220.600,00	9.067.700,00	49,77

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.536.000,00	3.472.000,00	98,19
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.955.000,00	8.846.000,00	80,75
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	60.961.200,00	67.612.817,25	110,91
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.912.000,00	2.912.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	404.000,00	160.000,00	39,60
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	929.880,00	929.880,00	100,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.013.086.269,60	1.771.883.458,40	88,02
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.000.000,00	5.140.000,00	128,50
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.048.000,00	17.152.000,00	95,04
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.022.400,00	27.908.600,00	87,15
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.777.000,00	1.776.000,00	99,94
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.168.000,00	6.168.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.176.000,00	8.168.000,00	99,90
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	86.625.000,00	79.788.675,75	92,11
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.332.000,00	13.322.000,00	99,92
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.040.000,00	720.000,00	69,23
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	917.400,00	917.400,00	100,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.941.255.319,20	1.588.235.556,80	81,81
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.560.000,00	5.940.000,00	106,83
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.224.000,00	20.224.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.319.600,00	29.243.405,00	137,17
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.828.000,00	3.824.000,00	99,90
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.496.000,00	8.992.000,00	94,69
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.976.000,00	8.728.000,00	97,24
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	89.376.750,00	75.091.416,75	84,02
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.524.000,00	15.518.000,00	99,96
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.560.000,00	240.000,00	9,38
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	912.000,00	911.804,00	99,98
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.264.624.915,20	1.950.587.991,20	86,13
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.840.000,00	21.150.000,00	133,52
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.440.000,00	25.888.000,00	120,75
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.318.800,00	32.272.400,00	99,86
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.544.000,00	4.544.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.899.000,00	4.896.000,00	99,94
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15.720.000,00	15.640.000,00	99,49
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	111.900.562,50	104.799.246,75	93,65
	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.806.400,00	10.804.000,00	99,98
	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	160.000,00	160.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.458.450,00	2.458.450,00	100,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.749.755.492,00	2.688.987.692,00	97,79
4	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.900.036.000,00	3.255.161.750,00	83,46
	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	579.523.500,00	449.825.250,00	77,62
	1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	3.320.512.500,00	2.805.336.500,00	84,49
5	1.04.2.10.2.11.02.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	20.090.000,00	19.821.200,00	98,66
	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20.090.000,00	19.821.200,00	98,66
6	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.584.410,00	13.333.907,60	71,75
	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.870.810,00	1.836.610,00	98,17
	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.713.600,00	11.497.297,60	68,79
7	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.972.200,00	8.051.105,20	80,74
	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.972.200,00	8.051.105,20	80,74
8	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	62.250.000,00	50.118.751,50	80,51
	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
	1.06.05.2.02.0002 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.850.000,00	35.718.751,50	74,65
9	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	4.012.200,00	2.672.296,80	66,60
	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.012.200,00	2.672.296,80	66,60
10	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.094.390.800,00	1.061.735.002,50	97,02
	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24.840.000,00	24.840.000,00	100,00
	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	956.810.000,00	937.428.270,00	97,97
	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	65.000.000,00	52.489.430,50	80,75
	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.590.800,00	13.827.302,00	94,77
11	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	11.654.307.315,00	7.382.983.091,40	63,35
	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	104.199.000,00	81.202.134,80	77,93

9

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.040.508.615,00	7.054.323.115,20	70,26
	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.480.498.900,00	231.230.383,00	15,62
	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.100.800,00	16.227.458,40	55,76
12	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	683.597.994,12	638.883.131,85	93,46
	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	9.168.200,00	8.884.396,40	96,90
	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30.196.200,00	27.298.400,00	90,40
	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	190.294,12	189.706,00	99,69
	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	57.227.500,00	56.756.122,25	99,18
	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	87.980.200,00	81.973.534,80	93,17
	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	493.831.600,00	459.869.524,80	93,12
	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.004.000,00	3.911.447,60	78,17
13	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	31.420.400,00	29.233.604,00	93,04
	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.420.400,00	29.233.604,00	93,04
14	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	43.004.884,00	32.026.855,36	74,47
	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.403.200,00	11.922.156,40	72,68
	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	26.601.684,00	20.104.698,96	75,58
15	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	137.304.100,00	131.841.538,60	96,02
	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5.677.500,00	5.677.500,00	100,00
	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	3.880.000,00	3.831.380,00	98,75
	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	7.591.600,00	6.611.380,00	87,09
	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	113.163.000,00	110.072.149,80	97,27
	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.992.000,00	5.649.128,80	80,79
16	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.365.400,00	22.026.242,40	90,40
	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.292.800,00	4.687.120,00	88,56
	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	17.048.600,00	15.494.122,40	90,88
	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.012.000,00	922.500,00	91,16
	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.012.000,00	922.500,00	91,16
17	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN	14.276.800,00	9.256.288,80	64,83
	2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.776.800,00	3.756.288,80	42,80
18	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.936.400,00	5.304.283,80	48,50
	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.936.400,00	5.304.283,80	48,50
19	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	153.249.647,90	137.113.828,90	89,47
	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	53.541.600,00	46.676.931,20	87,18
	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.000.112,50	22.866.716,50	91,47
	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5.971.675,00	5.850.010,00	97,96
	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.784.160,40	11.275.230,80	88,20
	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.288.000,00	45.970.700,00	89,63
	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.664.100,00	4.474.240,40	95,93
20	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN	30.911.700,00	29.162.011,60	94,34
	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	13.968.000,00	13.586.647,20	97,27
	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	12.600.100,00	12.496.564,40	99,18
	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.343.600,00	3.078.800,00	70,88
21	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.348.000,00	3.908.984,00	73,09
	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.960.000,00	1.862.984,00	62,94
	3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.388.000,00	2.046.000,00	85,68
22	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	33.961.200,00	14.374.094,20	42,33
	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.961.200,00	14.374.094,20	42,33
23	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.593.200,00	1.389.016,00	38,66
	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.593.200,00	1.389.016,00	38,66
24	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.414.800,00	7.225.373,80	53,86
	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.414.800,00	7.225.373,80	53,86
25	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.818.600,00	7.936.063,60	67,15
	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.818.600,00	7.936.063,60	67,15

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
26	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	30.715.800,00	26.802.374,80	87,26
	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	18.370.000,00	18.339.570,00	99,83
	5.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.345.800,00	8.462.804,80	68,55
27	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	198.217.200,00	196.572.595,20	99,17
	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	198.217.200,00	196.572.595,20	99,17
28	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	31.123.600,00	6.125.729,60	19,68
	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.123.600,00	6.125.729,60	19,68
29	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DENPASAR BARAT	1.496.438.850,00	1.454.106.444,10	97,17
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.990.000,00	5.770.000,00	96,33
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76.070.400,00	71.940.882,40	94,57
	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.431.000,00	4.280.524,00	96,60
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	67.976.000,00	66.705.228,10	98,13
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	554.481.610,00	547.365.757,20	98,72
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.336.800,00	33.374.300,00	89,39
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	477.496.040,00	467.035.917,00	97,81
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.000.000,00	1.663.952,20	55,47
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269.657.000,00	255.969.883,20	94,92
30	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DENPASAR TIMUR	1.228.930.875,00	1.162.164.524,50	94,57
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.280.000,00	17.451.524,00	69,03
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.476.000,00	53.095.997,60	86,37
	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.537.000,00	5.877.000,00	89,90
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.704.000,00	4.500.000,00	58,41
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	44.629.800,00	37.716.800,40	84,51
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.935.800,00	291.549.600,40	97,20
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	53.505.425,00	52.908.437,70	98,88
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.795.200,00	219.859.626,00	96,52
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18.000.000,00	5.840.000,00	32,44
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	271.509.650,00	264.286.802,00	97,34
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000,00	900.000,00	85,71
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	211.508.000,00	208.178.736,40	98,43
31	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN DENPASAR SELATAN	2.277.438.175,80	2.039.346.660,50	89,55
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.660.450,00	7.630.450,00	99,61
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82.452.400,00	74.529.660,80	90,39
	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.525.000,00	3.135.000,00	88,94
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.046.000,00	777.968,40	74,38
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	35.000.000,00	32.069.806,20	91,63
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418.186.370,00	372.155.361,00	88,99
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.194.780,00	1.154.390,80	96,62
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	38.000.000,00	36.428.050,70	95,86
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	413.994.600,00	397.211.247,60	95,95
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.074.000,00	518.306,00	48,26
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	30.170.000,00	29.344.747,40	97,26
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	278.743.040,00	200.086.400,00	71,78
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	692.040,00	691.887,60	99,98
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	38.360.000,00	36.974.677,40	96,39
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	284.509.210,00	276.565.518,20	97,21
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	820.000,00	819.790,00	99,97
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.407.215,80	35.465.402,60	94,81
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.149.040,00	236.545.392,40	94,56
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	460.000,00	360.000,00	78,26
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	52.418.950,00	50.020.845,60	95,43
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	301.575.080,00	246.861.757,80	81,86
32	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	1.049.657.344,20	1.012.917.541,60	96,50
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.183.000,00	17.796.992,00	97,88
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.192.000,00	64.190.560,00	100,00
	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.280.000,00	6.130.000,00	97,61
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	602.400,00	592.724,40	98,39
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	47.174.084,20	38.181.350,00	80,94
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	225.124.600,00	221.904.026,40	98,57
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.240.000,00	1.180.000,00	95,16
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	55.430.910,00	54.600.070,00	98,50
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.493.200,00	162.064.920,40	95,62
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	780.000,00	780.000,00	100,00
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	23.959.150,00	23.796.250,00	99,32
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	437.198.000,00	421.700.648,40	96,46
	TOTAL	219.561.160.954,05	204.492.248.527,73	93,14

9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
IKHTISAR DANA DESA
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	KODE	NAMA DESA	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	JUMLAH PENYALURAN	PENGUNAAN DANA DESA					JUMLAH	SISA DANA
							BIDANG 01 (PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA)	BIDANG 02 (PEMBANGUNAN DESA)	BIDANG 03 (PEMBINAAN KEMASYARAKATAN)	BIDANG 04 (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)	BIDANG 05 (BIDANG TIDAK TERDUGA)		
1	01.2007	PEMERINTAH DESA SIDAKARYA	100.893.950,00	-	100.893.950,00	1.745.709.000,00	40.291.500,00	1.086.426.200,00	-	390.056.650,00	57.600.000,00	1.574.374.350,00	272.228.600,00
2	01.2008	PEMERINTAH DESA PEMOGAN	79.213.158,91	-	79.213.158,91	2.036.574.000,00	39.228.000,00	1.050.375.795,00	-	570.000.000,00	201.600.000,00	1.861.203.795,00	254.583.363,91
3	01.2009	PEMERINTAH DESA SANUR KAJA	36.876.607,53	-	36.876.607,53	1.077.829.000,00	-	787.103.000,00	-	221.226.000,00	25.200.000,00	1.033.529.000,00	81.176.607,53
4	01.2010	PEMERINTAH DESA SANUR KAUH	71.220.400,95	-	71.220.400,95	1.504.710.000,00	19.498.000,00	831.428.100,00	-	649.878.000,00	63.900.000,00	1.564.704.100,00	11.226.300,95
5	02.2001	PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KELOD	188.581.981,82	-	188.581.981,82	1.379.271.000,00	5.760.000,00	972.063.000,00	-	275.966.500,00	205.200.000,00	1.458.989.500,00	108.863.481,82
6	02.2002	PEMERINTAH DESA SUMERTA KELOD	111.400.139,45	-	111.400.139,45	1.355.085.000,00	2.000.000,00	685.482.502,00	-	271.100.000,00	201.600.000,00	1.160.182.502,00	306.302.637,45
7	02.2004	PEMERINTAH DESA KESIMAN PETILAN	138.807.587,61	-	138.807.587,61	1.278.858.000,00	-	913.535.250,00	-	256.015.200,00	126.000.000,00	1.295.550.450,00	122.115.137,61
8	02.2005	PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU	206.531.300,00	-	206.531.300,00	1.612.944.000,00	-	931.395.000,00	-	373.212.500,00	162.000.000,00	1.466.607.500,00	352.867.800,00
9	02.2007	PEMERINTAH DESA SUMERTA KAJA	43.987.330,90	-	43.987.330,90	1.096.213.000,00	19.759.000,00	708.430.060,00	-	232.537.500,00	111.300.000,00	1.072.026.560,00	68.173.770,90
10	02.2008	PEMERINTAH DESA SUMERTA KAUH	213.822.900,00	-	213.822.900,00	1.319.194.000,00	-	553.465.800,00	-	574.142.000,00	97.200.000,00	1.224.807.800,00	308.209.100,00
11	02.2015	PEMERINTAH DESA PENATIH DANGIN PURI	250.875.187,09	-	250.875.187,09	1.077.193.000,00	-	647.907.400,00	-	259.240.000,00	158.400.000,00	1.065.547.400,00	262.520.787,09
12	03.2001	PEMERINTAH DESA PADANGSAMBAN KELOD	39.683.084,00	-	39.683.084,00	1.541.325.000,00	8.000.000,00	1.017.490.000,00	-	311.500.000,00	90.000.000,00	1.426.990.000,00	154.018.084,00
13	03.2002	PEMERINTAH DESA PEMECUTAN KELOD	113.635.446,43	-	113.635.446,43	2.402.514.000,00	-	1.392.720.200,00	-	565.632.700,00	360.000.000,00	2.318.352.900,00	197.796.546,43
14	03.2003	PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH	116.456.416,84	-	116.456.416,84	1.475.874.000,00	-	827.980.800,00	-	498.674.800,00	219.600.000,00	1.546.255.600,00	46.074.816,84
15	03.2004	PEMERINTAH DESA DAUH PURI KELOD	276.674.174,26	-	276.674.174,26	1.309.638.000,00	-	805.106.400,00	-	510.165.874,00	180.000.000,00	1.495.272.274,00	91.039.900,26
16	03.2006	PEMERINTAH DESA DAUH PURI KANGIN	228.196.278,23	-	228.196.278,23	887.567.000,00	-	632.808.000,00	-	247.555.000,00	72.000.000,00	952.363.000,00	163.400.278,23
17	03.2008	PEMERINTAH DESA TEGAL HARUM	296.141.445,03	-	296.141.445,03	1.336.887.000,00	-	1.008.654.948,00	10.500.450,00	276.342.900,00	104.400.000,00	1.399.898.298,00	233.130.147,03
18	03.2009	PEMERINTAH DESA TEGAL KERTHA	57.582.491,24	-	57.582.491,24	1.538.046.000,00	-	839.124.780,00	-	308.030.000,00	208.800.000,00	1.355.954.780,00	239.673.711,24
19	03.2011	PEMERINTAH DESA PADANG SAMBIAN KAJA	292.969.273,30	-	292.969.273,30	1.514.805.000,00	4.455.000,00	599.405.950,00	-	578.856.913,00	100.800.000,00	1.283.517.863,00	524.256.410,30
20	04.2001	PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KANGIN	21.454.500,00	-	21.454.500,00	1.107.064.000,00	-	843.957.500,00	-	231.589.500,00	39.000.000,00	1.114.547.000,00	13.971.500,00
21	04.2002	PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAUH	222.774.812,00	-	222.774.812,00	1.204.801.000,00	-	791.150.000,00	-	327.065.250,00	180.000.000,00	1.298.215.250,00	129.360.562,00
22	04.2003	PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAJA	47.671.252,49	-	47.671.252,49	1.456.260.000,00	-	906.893.893,00	-	291.715.000,00	216.000.000,00	1.414.608.893,00	89.322.359,49
23	04.2005	PEMERINTAH DESA PEMECUTAN KAJA	635.330.610,04	-	635.330.610,04	2.003.694.000,00	39.237.500,00	1.099.685.860,00	6.804.000,00	933.358.800,00	230.400.000,00	2.309.486.160,00	329.538.450,04
24	04.2006	PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAJA	93.895.400,00	14.616.411,00	108.511.811,00	1.907.880.000,00	-	1.108.938.500,00	-	544.663.000,00	277.200.000,00	1.930.801.500,00	85.590.311,00
25	04.2008	PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA	28.832.730,00	-	28.832.730,00	1.692.771.000,00	-	1.296.069.400,00	-	341.895.000,00	64.800.000,00	1.702.764.400,00	18.839.330,00
26	04.2010	PEMERINTAH DESA PEGUYANGAN KAJA	37.369.358,10	-	37.369.358,10	1.103.290.000,00	-	691.066.000,00	-	367.000.000,00	79.200.000,00	1.137.266.000,00	3.393.358,10
27	04.2011	PEMERINTAH DESA PEGUYANGAN KANGIN	135.543.522,42	-	135.543.522,42	1.930.443.000,00	-	1.142.182.000,00	-	534.978.522,00	21.600.000,00	1.698.760.522,00	367.226.000,42
JUMLAH			4.086.421.338,64	14.616.411,00	4.101.037.749,64	39.896.439.000,00	178.229.000,00	24.170.846.338,00	17.304.450,00	10.942.397.609,00	3.853.800.000,00	39.162.577.397,00	4.834.899.352,64

9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	Anggaran					Realisasi				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	433.482.545.842,00	122.597.496.700,00	-	111.576.856.200,00	4.161.660.000,00	422.360.816.063,00	113.000.735.974,50	-	109.061.639.901,00	3.972.675.000,00
2	Dinas Kesehatan	250.016.774.686,00	226.146.678.495,00	-	3.972.814.511,00	-	242.866.537.712,45	199.901.679.360,77	-	3.867.426.847,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.795.374.407,00	68.219.835.970,00	-	10.000.000.000,00	-	30.174.073.384,00	62.544.533.659,00	-	8.274.715.735,00	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	13.022.123.025,00	25.796.890.306,00	-	107.239.250.000,00	3.600.000.000,00	11.584.414.709,00	24.952.930.227,00	-	105.631.740.000,00	3.459.727.728,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.580.725.086,00	7.207.272.600,00	-	-	-	9.539.444.995,00	6.077.205.116,00	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.018.276.194,00	5.700.884.342,00	-	-	-	19.870.758.591,00	4.817.368.632,00	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.255.337.250,00	9.148.363.750,00	-	-	-	14.149.731.875,00	7.144.467.798,00	-	-	-
8	Dinas Sosial	10.522.536.611,00	11.261.839.678,00	-	199.997.000,00	-	9.275.170.929,00	9.699.433.832,00	-	199.997.000,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	6.989.705.503,00	4.410.367.365,00	-	-	-	6.315.624.649,00	4.026.159.967,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.263.339.681,00	10.925.694.150,00	-	1.524.750.000,00	-	8.410.491.179,00	10.417.312.363,00	-	1.490.900.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	42.874.626.800,00	144.881.080.105,00	-	-	-	39.959.219.866,00	95.875.195.464,00	-	-	-
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14.210.583.028,00	12.552.194.072,00	-	-	-	12.927.742.330,00	11.363.724.077,00	-	-	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.535.471.536,00	7.534.691.175,00	-	-	-	5.715.311.927,00	7.118.722.566,00	-	-	-
14	Dinas Perhubungan	38.718.980.322,00	61.969.134.786,00	-	-	-	34.131.637.921,00	51.185.333.254,00	-	-	-
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	9.840.564.763,00	8.267.770.688,00	-	-	-	8.937.190.328,00	5.815.343.631,00	-	-	-
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	8.576.831.617,00	5.405.294.538,00	-	-	-	7.534.779.875,00	5.056.582.728,00	-	-	-
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.152.114.585,00	8.817.731.766,00	-	-	-	15.319.347.772,00	8.295.397.950,00	-	-	-
18	Dinas Kebudayaan	9.111.538.805,00	53.251.112.034,00	-	13.137.400.000,00	-	8.553.380.465,00	50.860.537.942,00	-	12.605.117.250,00	-
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11.294.638.772,00	3.175.952.254,00	-	-	-	9.988.413.007,00	2.871.654.681,00	-	-	-
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	10.018.090.221,00	4.171.194.127,00	-	-	-	8.869.561.113,00	3.809.938.807,00	-	-	-
21	Dinas Pariwisata	11.899.535.699,00	21.915.661.500,00	-	-	-	11.052.716.232,00	21.155.262.262,00	-	-	-
22	Dinas Pertanian	13.067.118.651,00	13.052.559.865,00	-	-	-	11.746.463.741,00	12.112.213.244,00	-	-	-
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	11.704.215.892,00	4.818.019.924,00	46.800.000,00	305.390.000,00	-	10.828.647.881,00	4.224.801.564,00	-	305.390.000,00	-
24	Sekretariat Daerah	56.415.840.382,00	91.985.586.534,00	-	11.785.700.000,00	-	47.782.417.488,00	75.218.059.874,00	-	11.735.700.000,00	-
25	Sekretariat Dprd	54.825.147.116,00	37.869.832.356,00	-	-	-	53.927.553.754,00	14.745.656.577,00	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.426.759.063,00	5.951.189.476,00	-	-	-	8.279.333.914,00	4.930.771.785,00	-	-	-
27	Badan Pendapatan Daerah	44.525.514.341,00	13.300.651.524,00	-	-	-	41.835.180.664,00	11.932.541.721,00	-	-	-
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.532.115.638,00	7.310.301.882,00	-	-	-	12.483.633.804,00	6.035.472.996,17	-	-	-
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.594.570.204,00	17.468.704.815,00	-	-	-	11.934.251.658,00	16.327.157.908,00	-	-	-
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.335.440.700,00	2.632.924.560,00	-	-	-	6.825.864.215,00	2.302.164.862,00	-	-	-
31	Inspektorat	23.102.893.932,00	7.419.938.220,00	-	-	-	22.014.288.110,00	5.707.421.326,00	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	11.691.470.683,00	14.786.075.756,00	-	180.000.000,00	-	10.929.917.125,00	14.232.554.415,00	-	175.200.000,00	-
33	Kecamatan Denpasar Timur	14.684.942.278,00	15.990.037.574,00	-	-	-	13.225.508.888,00	14.554.886.985,00	-	-	-
34	Kecamatan Denpasar Selatan	16.074.922.599,00	22.529.332.468,00	-	-	-	14.692.789.684,00	20.693.621.680,00	-	-	-
35	Kecamatan Denpasar Utara	13.316.812.476,00	11.818.418.410,00	-	-	-	12.804.768.876,00	10.904.479.602,00	-	-	-
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.891.879.600,00	11.628.028.940,00	-	2.157.940.000,00	-	6.501.666.620,00	10.724.207.740,00	-	1.807.940.000,00	-
Jumlah		1.293.369.357.988,00	1.101.918.742.705,00	46.800.000,00	262.080.097.711,00	7.761.660.000,00	1.223.348.651.344,45	930.635.532.570,44	-	255.155.766.733,00	7.432.402.728,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

NO	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	618.175.345.071,00	583.478.044.209,00	94,39	439.941.960.369,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	236.801.770.442,00	230.652.008.899,00	97,40	206.753.869.009,00
2	Dinas Kesehatan	120.553.828.009,00	116.499.597.969,00	96,64	89.474.544.998,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.506.680.856,00	16.842.367.447,00	91,01	7.929.891.877,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	6.521.144.141,00	5.567.797.918,00	85,38	3.551.925.910,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.283.382.236,00	4.814.389.512,00	91,12	2.484.490.431,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.371.366.700,00	9.807.054.733,00	94,56	6.930.306.157,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.760.809.010,00	7.310.668.102,00		4.092.955.522,00
8	Dinas Sosial	5.588.582.145,00	4.741.902.048,00	84,85	2.467.954.658,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	3.235.545.275,00	2.942.380.909,00	90,94	1.985.402.796,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.268.283.581,00	3.827.627.779,00	89,68	3.001.892.789,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	23.020.318.900,00	22.055.415.573,00	95,81	12.259.799.967,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.810.129.572,00	6.071.349.197,00	89,15	3.648.252.277,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.112.259.646,00	2.655.418.488,00	85,32	1.707.251.647,00
14	Dinas Perhubungan	21.582.662.331,00	19.154.683.038,00	88,75	7.807.395.288,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	4.874.317.762,00	4.453.459.800,00	91,37	2.076.886.371,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	3.977.402.553,00	3.302.408.677,00	83,03	2.308.117.809,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.919.129.097,00	7.173.162.706,00	90,58	4.557.416.444,00
18	Dinas Kebudayaan	4.767.185.680,00	4.431.748.287,00	92,96	2.318.055.482,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.084.138.291,00	4.609.835.227,00	90,67	3.306.275.237,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	4.851.687.649,00	4.213.205.725,00	86,84	3.261.013.632,00
21	Dinas Pariwisata	6.045.445.648,00	5.449.239.815,00	90,14	3.078.715.024,00
22	Dinas Pertanian	6.054.637.791,00	5.471.595.989,00	90,37	4.038.584.268,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.855.047.162,00	5.296.533.768,00	90,46	3.419.695.267,00
24	Sekretariat Daerah	23.252.401.354,00	20.654.379.536,00	88,83	12.645.104.861,00
25	Sekretariat Dprd	4.847.061.300,00	4.685.080.288,00	96,66	3.403.373.824,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.211.965.429,00	3.497.313.423,00	83,03	2.351.277.861,00
27	Badan Pendapatan Daerah	9.966.753.700,00	8.689.120.458,00	87,18	5.225.555.664,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.259.288.164,00	5.706.092.491,00	91,16	3.370.761.630,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.391.049.830,00	4.998.255.970,00	92,71	3.784.144.468,00
30	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	3.504.463.900,00	3.228.542.790,00	92,13	2.453.747.260,00
31	Inspektorat	8.768.771.204,00	8.131.937.210,00	92,74	5.814.026.009,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	5.341.616.908,00	4.888.788.660,00	91,52	3.576.300.002,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	6.949.457.958,00	6.102.367.812,00	87,81	4.055.402.585,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	7.309.251.647,00	6.605.713.195,00	90,37	4.505.410.499,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	6.182.320.600,00	5.887.911.775,00	95,24	4.418.859.870,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.345.188.600,00	3.058.688.995,00	91,44	1.877.302.976,00
II	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	565.041.748.629,00	532.905.000.330,00	94,31	345.376.994.196,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	196.680.775.400,00	191.708.807.164,00	97,47	59.611.526.091,00
2	Dinas Kesehatan	69.881.652.839,00	67.690.419.017,00	96,86	54.126.903.718,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.288.693.551,00	13.331.705.937,00	87,20	10.683.495.658,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	6.500.978.884,00	6.016.616.791,00	92,55	5.678.575.362,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.297.342.850,00	4.725.055.483,00	89,20	4.202.494.474,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.646.909.494,00	10.063.703.858,00	94,52	10.326.663.585,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.494.528.240,00	6.839.063.773,00		6.218.649.940,00
8	Dinas Sosial	4.933.954.466,00	4.533.268.881,00	91,88	4.192.867.984,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	3.754.160.228,00	3.373.243.740,00	89,85	3.163.188.684,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.995.056.100,00	4.582.863.400,00	91,75	4.995.380.105,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	19.854.307.900,00	17.903.804.293,00	90,18	15.731.501.450,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.400.453.456,00	6.856.393.133,00	92,65	6.583.043.588,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.423.211.890,00	3.059.893.439,00	89,39	2.969.779.964,00
14	Dinas Perhubungan	17.136.317.991,00	14.976.954.883,00	87,40	11.444.652.599,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	4.966.247.001,00	4.483.730.528,00	90,28	3.688.043.340,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	4.599.429.064,00	4.232.371.198,00	92,02	4.051.853.362,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.232.985.488,00	8.146.185.066,00	88,23	7.803.139.813,00
18	Dinas Kebudayaan	4.344.353.125,00	4.121.632.178,00	94,87	3.851.956.214,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.210.500.481,00	5.378.577.780,00	86,60	5.386.385.817,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	5.166.402.572,00	4.656.355.388,00	90,13	5.042.893.209,00
21	Dinas Pariwisata	5.854.090.051,00	5.603.476.417,00	95,72	4.965.068.848,00
22	Dinas Pertanian	7.012.480.860,00	6.274.867.752,00	89,48	6.422.224.065,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.849.168.730,00	5.532.114.113,00	94,58	5.429.166.406,00
24	Sekretariat Daerah	27.382.780.794,00	22.954.478.712,00	83,83	22.305.192.111,00
25	Sekretariat Dprd	5.187.773.600,00	5.126.946.627,00	98,83	5.008.732.425,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.214.793.634,00	4.782.020.491,00	91,70	4.684.046.619,00

NO	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
27	Badan Pendapatan Daerah	34.558.760.641,00	33.146.060.206,00	95,91	4.704.734.922,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.272.827.474,00	6.777.541.313,00	93,19	6.509.520.531,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.203.520.374,00	6.935.995.688,00	96,29	7.171.799.779,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	3.830.976.800,00	3.597.321.425,00	93,90	3.715.824.221,00
31	Inspektorat	14.334.122.728,00	13.882.350.900,00	96,85	14.098.516.679,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	6.349.853.775,00	6.041.128.465,00	95,14	5.957.925.766,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	7.735.484.320,00	7.123.141.076,00	92,08	6.920.554.576,00

NO	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
34	Kecamatan Denpasar Selatan	8.765.670.952,00	8.087.076.489,00	92,26	7.814.223.326,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	7.134.491.876,00	6.916.857.101,00	96,95	6.687.967.001,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.546.691.000,00	3.442.977.625,00	97,08	3.228.501.964,00
III	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	126.708.728.431,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	-	-	-	86.774.490.099,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	17.073.455.247,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-	31.750.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	-	-	1.250.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	3.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	2.250.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	3.000.000,00
8	Dinas Sosial	-	-	-	1.250.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	201.720.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	3.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-	-	-	4.250.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	3.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	3.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	-	-	-	84.978.114,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	-	-	-	3.000.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	-	-	-	3.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	3.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan	-	-	-	6.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	3.000.000,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	3.000.000,00
21	Dinas Pariwisata	-	-	-	5.500.000,00
22	Dinas Pertanian	-	-	-	14.290.311,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	4.102.500,00
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	284.570.000,00
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	3.000.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	3.000.000,00
27	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	22.151.372.160,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	4.000.000,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	4.250.000,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	-	-	-	3.000.000,00
31	Inspektorat	-	-	-	3.000.000,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	6.000.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	-	-	-	3.000.000,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	1.250.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	4.000.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	3.000.000,00
IV	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.397.192.216,00	43.722.406.839,00	98,48	43.209.581.618,00
1	Sekretariat DPRD	44.397.192.216,00	43.722.406.839,00	98,48	43.209.581.618,00
V	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.752.465.634,00	1.145.759.240,00	41,63	1.033.944.514,00
1	Sekretariat Daerah	2.752.465.634,00	1.145.759.240,00	41,63	1.033.944.514,00
VI	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.421.312.600,00	3.420.920.000,00	99,99	2.164.490.000,00
1	Sekretariat Daerah	3.028.192.600,00	3.027.800.000,00	99,99	1.804.130.000,00
2	Sekretariat DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00
VII	Belanja Pegawai BLUD	59.581.293.838,00	58.676.520.726,45	98,48	38.284.255.505,96
1	Dinas Kesehatan	59.581.293.838,00	58.676.520.726,45	98,48	38.284.255.505,96
	Jumlah Seluruh Belanja Pegawai	1.293.369.357.988,00	1.223.348.651.344,45	94,59	996.719.954.633,96



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Barang	294.830.040.598,00	236.745.865.462,00	80,30	211.395.936.078,62
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	16.777.670.710,00	11.783.583.517,00	70,23	11.432.612.336,00
2	Dinas Kesehatan	37.916.495.983,00	28.980.202.049,00	76,43	33.163.299.702,62
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.820.205.590,00	12.792.513.798,00	86,32	15.271.916.300,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	21.628.634.450,00	21.237.882.300,00	98,19	967.455.450,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.233.278.600,00	1.612.288.623,00	72,19	1.889.873.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.071.830.350,00	1.701.037.775,00	82,10	1.658.209.010,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.513.774.750,00	3.293.410.752,00		1.958.880.008,00
8	Dinas Sosial	2.929.090.750,00	2.746.597.426,00	93,77	3.096.770.700,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	993.707.200,00	826.645.218,00	83,19	832.564.930,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.550.104.650,00	2.414.941.538,00	94,70	2.843.996.702,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	63.923.294.230,00	41.473.289.764,00	64,88	46.479.270.467,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.283.425.800,00	2.045.509.089,00	89,58	1.840.993.750,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.893.143.900,00	2.761.080.623,00	95,44	2.719.059.684,00
14	Dinas Perhubungan	20.727.183.526,00	17.181.628.586,00	82,89	11.205.078.550,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	999.577.710,00	791.893.166,00	79,22	708.419.300,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	885.650.850,00	811.063.024,00	91,58	703.136.590,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.611.748.650,00	1.461.409.185,00	90,67	1.560.749.041,00
18	Dinas Kebudayaan	2.131.091.090,00	1.896.588.774,00	89,00	2.860.492.550,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.143.747.050,00	997.577.674,00	87,22	1.015.671.150,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	2.048.339.927,00	1.916.727.005,00	93,57	1.429.862.650,00
21	Dinas Pariwisata	1.055.219.700,00	973.324.719,00	92,24	6.505.296.052,00
22	Dinas Pertanian	9.313.912.920,00	8.649.060.996,00	92,86	2.469.425.885,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.286.273.900,00	1.073.293.338,00	83,44	1.138.670.150,00
24	Sekretariat Daerah	36.529.017.050,00	31.388.586.639,00	85,93	30.718.306.972,00
25	Sekretariat DPRD	3.828.295.800,00	2.031.014.899,00	53,05	3.723.239.762,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.124.669.946,00	937.077.778,00	83,32	1.006.016.109,00
27	Badan Pendapatan Daerah	1.889.596.250,00	1.746.315.786,00	92,42	1.446.632.025,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.861.808.900,00	1.479.370.468,00	79,46	1.506.039.698,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	795.120.200,00	594.201.045,00	74,73	674.003.000,00
30	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	910.172.150,00	755.440.975,00	83,00	755.109.930,00
31	Inspektorat	1.764.122.980,00	1.294.770.995,00	73,39	1.214.304.800,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	6.165.155.200,00	5.876.333.974,00	95,32	3.030.463.242,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	5.943.949.550,00	5.405.382.937,00	90,94	3.095.383.890,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	8.861.488.728,00	7.865.128.002,00	88,76	3.767.513.800,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	5.156.975.700,00	4.852.006.614,00	94,09	3.076.031.400,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.262.265.858,00	3.098.686.411,00	94,99	3.631.186.893,00
II	Belanja Jasa	422.431.720.594,00	357.312.711.919,17	84,58	413.763.947.733,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	21.282.333.528,00	18.618.808.650,00	87,48	31.339.232.621,00
2	Dinas Kesehatan	73.397.654.128,00	61.250.224.464,00	83,45	68.997.055.537,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.250.007.530,00	17.796.864.808,00	92,45	22.519.822.400,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.039.878.856,00	1.890.618.236,00	92,68	2.598.289.487,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.060.222.000,00	2.894.361.611,00	94,58	4.701.749.557,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.010.222.992,00	2.593.723.914,00	86,16	4.973.191.040,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.476.727.000,00	3.258.815.024,00		5.321.496.140,00
8	Dinas Sosial	5.876.038.178,00	4.820.113.340,00	82,03	5.775.069.271,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	2.217.459.165,00	2.073.407.750,00	93,50	3.083.331.588,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.886.925.500,00	5.537.011.957,00	94,06	5.560.475.834,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	63.658.886.375,00	41.365.294.341,00	64,98	46.219.573.439,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.329.981.272,00	1.290.745.249,00	97,05	2.517.188.729,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.172.435.275,00	2.039.053.127,00	93,86	2.386.667.666,00
14	Dinas Perhubungan	32.665.921.260,00	27.647.288.486,00	84,64	36.557.915.250,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	6.042.104.978,00	4.255.546.924,00	70,43	6.018.676.734,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	1.746.003.688,00	1.592.867.803,00	91,23	1.672.484.903,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.776.288.916,00	4.529.066.179,00	94,82	6.386.550.505,00
18	Dinas Kebudayaan	46.006.446.940,00	44.215.869.324,00	96,11	37.096.695.484,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.213.443.204,00	1.104.727.814,00	91,04	1.868.128.727,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	1.338.357.200,00	1.137.299.449,00	84,98	1.916.867.937,00
21	Dinas Pariwisata	5.627.249.264,00	5.314.068.976,00	94,43	7.981.590.392,00
22	Dinas Pertanian	2.757.773.945,00	2.545.322.670,00	92,30	3.376.452.372,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.890.698.024,00	1.691.907.619,00	89,49	3.057.891.305,00
24	Sekretariat Daerah	34.905.348.684,00	29.774.563.605,00	85,30	32.832.195.182,00
25	Sekretariat DPRD	9.273.491.806,00	5.029.892.122,00	54,24	6.268.505.309,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.286.930.530,00	3.018.281.324,00	91,83	3.760.625.839,00

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
27	Badan Pendapatan Daerah	4.562.009.274,00	4.093.579.263,00	89,73	6.583.170.847,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.537.108.982,00	2.293.699.477,17	90,41	3.832.022.510,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.164.641.615,00	14.606.988.718,00	96,32	8.961.251.468,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	1.126.418.410,00	1.065.351.285,00	94,58	1.404.817.892,00
31	Inspektorat	3.764.649.240,00	3.092.836.884,00	82,15	2.638.418.988,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	6.861.591.547,00	6.697.958.966,00	97,62	6.224.895.783,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	8.601.134.774,00	7.825.758.596,00	90,99	9.890.221.659,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	11.160.381.240,00	10.632.017.369,00	95,27	9.443.983.303,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	5.369.592.710,00	4.815.743.730,00	89,69	4.864.737.465,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.095.362.564,00	4.903.032.865,00	96,23	5.132.704.570,00
III	Belanja Pemeliharaan	72.047.016.249,00	62.581.364.977,00	86,86	39.082.519.196,61
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	4.701.927.000,00	3.951.609.324,00	84,04	1.427.607.193,00
2	Dinas Kesehatan	3.423.716.500,00	3.046.969.381,00	89,00	2.825.575.967,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.280.936.850,00	29.775.761.232,00	95,19	8.499.883.792,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	752.330.000,00	724.645.708,00	96,32	413.877.780,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.017.510.000,00	738.042.044,00	72,53	590.795.140,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	172.830.000,00	94.057.467,00	54,42	102.215.900,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	955.214.000,00	424.595.630,00		658.169.070,00
8	Dinas Sosial	1.793.464.750,00	1.485.488.918,00	82,83	223.993.958,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	282.890.000,00	239.648.405,00	84,71	393.380.625,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	299.640.000,00	291.611.858,00	97,32	353.102.536,81
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	5.682.862.500,00	3.812.094.915,00	67,08	4.399.044.845,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	156.525.000,00	130.946.679,00	83,66	200.678.240,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	531.260.000,00	521.255.119,00	98,12	285.283.000,00
14	Dinas Perhubungan	4.865.378.000,00	4.351.837.021,00	89,44	5.063.498.685,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	482.960.000,00	212.411.278,00	43,98	286.850.400,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	525.970.000,00	496.826.290,00	94,46	506.499.164,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.786.200,00	1.131.186.130,00	94,20	935.981.355,00
18	Dinas Kebudayaan	515.332.004,00	460.630.936,00	89,39	462.455.018,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	189.230.000,00	173.911.026,00	91,90	191.731.310,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	155.130.000,00	143.682.092,00	92,62	158.480.190,00
21	Dinas Pariwisata	1.232.529.936,00	1.136.013.492,00	92,17	1.694.916.985,00
22	Dinas Pertanian	306.925.000,00	290.731.578,00	94,72	492.467.242,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	91.660.000,00	46.401.539,00	50,62	271.554.500,00
24	Sekretariat Daerah	3.517.594.000,00	2.697.656.107,00	76,69	2.503.684.749,80
25	Sekretariat Dprd	698.840.000,00	382.404.191,00	54,72	1.043.082.180,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	282.060.000,00	174.241.030,00	61,77	204.620.220,00
27	Badan Pendapatan Daerah	2.200.680.000,00	1.609.539.033,00	73,14	1.383.817.531,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	489.030.000,00	406.141.240,00	83,05	616.861.534,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	219.875.000,00	138.862.011,00	63,15	345.441.115,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	83.466.000,00	24.101.985,00	28,88	119.168.900,00
31	Inspektorat	690.880.000,00	574.042.003,00	83,09	199.072.745,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	616.247.009,00	532.219.452,00	86,36	407.091.555,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	607.581.000,00	519.420.228,00	85,49	274.507.450,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	1.107.895.500,00	979.747.586,00	88,43	825.318.083,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	624.690.000,00	584.788.764,00	93,61	347.639.952,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	291.170.000,00	277.843.285,00	95,42	374.170.286,00
IV	Belana Perjalanan Dinas	41.827.492.950,00	17.712.504.129,00	42,35	42.357.101.284,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	176.334.000,00	60.584.389,00	34,36	549.059.395,00
2	Dinas Kesehatan	250.571.000,00	231.066.500,00	92,22	3.384.869.308,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	569.176.000,00	201.491.335,00	35,40	251.393.643,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	47.047.000,00	40.632.000,00	86,36	124.946.786,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.462.000,00	150.569.788,00	74,74	342.107.742,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	60.001.000,00	50.395.526,00	83,99	96.355.552,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.048.000,00	27.468.940,00		209.597.470,00
8	Dinas Sosial	9.940.000,00	-	-	6.703.792,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	20.061.000,00	13.361.484,00	66,60	38.470.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	126.334.000,00	111.266.510,00	88,07	629.843.024,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	278.002.000,00	185.898.570,00	66,87	548.699.996,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	42.762.000,00	29.220.560,00	68,33	151.071.732,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	281.202.000,00	245.916.718,00	87,45	1.457.052.465,00
14	Dinas Perhubungan	181.752.000,00	144.787.169,00	79,66	361.759.533,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	176.878.000,00	129.216.132,00	73,05	211.449.220,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	83.890.000,00	75.273.700,00	89,73	164.246.684,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	52.608.000,00	29.775.236,00	56,60	226.847.596,00
18	Dinas Kebudayaan	680.842.000,00	471.737.908,00	69,29	1.989.858.641,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	76.032.000,00	44.671.419,00	58,75	472.172.430,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	66.782.000,00	49.759.260,00	74,51	139.222.116,00
21	Dinas Pariwisata	339.075.400,00	310.290.694,00	91,51	1.299.528.945,00
22	Dinas Pertanian	17.218.000,00	13.894.000,00	80,69	143.859.436,00

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	355.428.000,00	268.973.148,00	75,68	309.840.528,00
24	Sekretariat Daerah	10.324.726.800,00	5.465.725.289,00	52,94	8.290.191.701,00
25	Sekretariat Dprd	23.478.164.750,00	6.924.586.565,00	29,49	10.796.334.320,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	571.549.000,00	115.428.962,00	20,20	445.676.400,00
27	Badan Pendapatan Daerah	62.066.000,00	47.447.640,00	76,45	1.095.380.068,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	209.854.000,00	93.644.661,00	44,62	611.997.262,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	165.578.000,00	79.856.134,00	48,23	431.977.011,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	77.568.000,00	53.973.000,00	69,58	88.989.198,00
31	Inspektorat	556.286.000,00	297.863.194,00	53,54	248.036.553,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	68.632.000,00	54.214.054,00	78,99	1.155.289.280,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	91.606.000,00	75.507.420,00	82,43	1.227.007.112,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	123.603.000,00	100.205.188,00	81,07	1.361.748.870,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	66.550.000,00	53.224.536,00	79,98	1.069.303.220,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.903.864.000,00	1.464.576.500,00	76,93	2.426.214.255,00
V	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95.746.528.759,00	86.242.783.490,00	90,07	73.478.890.470,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	13.287.131.311,00	12.704.465.000,00	95,61	10.721.645.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.494.397.480,00	2.234.599.468,00	89,58	1.904.460.968,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.299.510.000,00	1.977.902.486,00	86,01	3.407.746.648,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.329.000.000,00	1.059.151.983,00	79,70	1.014.793.366,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	694.800.000,00	681.943.050,00	98,15	467.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	386.000.000,00	378.153.950,00	97,97	455.000.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	168.600.000,00	140.177.452,00		311.060.000,00
8	Dinas Sosial	653.306.000,00	647.234.148,00	99,07	714.200.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	896.250.000,00	873.097.110,00	97,42	631.346.350,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.062.690.000,00	2.062.480.500,00	99,99	2.106.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	11.338.035.000,00	9.038.617.874,00	79,72	3.661.731.509,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.739.500.000,00	7.867.302.500,00		6.890.420.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.656.650.000,00	1.551.416.979,00	93,65	1.367.770.000,00
14	Dinas Perhubungan	3.528.900.000,00	1.859.791.992,00	52,70	1.605.381.000,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	566.250.000,00	426.276.131,00	75,28	235.305.940,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	2.163.780.000,00	2.080.551.911,00	96,15	1.156.200.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.176.300.000,00	1.143.961.220,00	97,25	881.538.200,00
18	Dinas Kebudayaan	3.917.400.000,00	3.815.711.000,00	97,40	2.581.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	553.500.000,00	550.766.748,00	99,51	216.223.456,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	562.585.000,00	562.471.001,00	99,98	287.750.000,00
21	Dinas Pariwisata	13.661.587.200,00	13.421.564.381,00	98,24	12.010.697.745,00
22	Dinas Pertanian	656.730.000,00	613.204.000,00	93,37	367.500.000,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.193.960.000,00	1.144.225.920,00	95,83	1.342.070.000,00
24	Sekretariat Daerah	6.708.900.000,00	5.891.528.234,00	87,82	4.601.528.944,00
25	Sekretariat Dprd	591.040.000,00	377.758.800,00	63,91	177.280.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	685.980.000,00	685.742.691,00	-	1.789.187.900,00
27	Badan Pendapatan Daerah	4.586.300.000,00	4.435.659.999,00	96,72	3.632.478.422,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.212.500.000,00	1.762.617.150,00	79,67	1.990.593.300,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.123.490.000,00	907.250.000,00	-	783.736.472,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	435.300.000,00	403.297.617,00	-	135.000.000,00
31	Inspektorat	644.000.000,00	447.908.250,00	69,55	219.372.250,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	1.074.450.000,00	1.071.827.969,00	99,76	753.500.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	745.766.250,00	728.817.804,00	97,73	602.560.000,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	1.275.964.000,00	1.116.523.535,00	87,50	930.790.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	600.610.000,00	598.715.958,00	99,68	561.920.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.075.366.518,00	980.068.679,00	91,14	2.964.103.000,00
VI	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	64.308.677.923,84
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	-	-	-	64.308.677.923,84
VII	Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.372.100.151,00	65.881.685.094,50	99,26	711.894.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	66.372.100.151,00	65.881.685.094,50	99,26	711.894.000,00
VIII	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.221.284.000,00	4.837.790.069,00	92,66	4.539.213.328,00
1	Dinas Kesehatan	5.221.284.000,00	4.837.790.069,00	92,66	4.539.213.328,00
IX	Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.442.559.404,00	99.320.827.429,77	96,02	88.168.885.329,43
1	Dinas Kesehatan	103.442.559.404,00	99.320.827.429,77	96,02	88.168.885.329,43
Jumlah Seluruh Belanja Barang dan Jasa		1.101.918.742.705,00	930.635.532.570,44	84,46	937.807.065.343,50

9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SUBSIDI
TAHUN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Subsidi kepada BUMD	46.800.000,00	-	-	78.000.000,00
I	Belanja Subsidi kepada BUMD	46.800.000,00	-	-	78.000.000,00
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46.800.000,00	-	-	78.000.000,00
	Jumlah Seluruh Belanja Bantuan Sosial	46.800.000,00	-	-	78.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	TA 2025		%	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
A	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	8.274.715.735,00	82,75	-
I	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	8.274.715.735,00	82,75	-
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.000.000.000,00	8.274.715.735,00	82,75	-
B	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	193.970.307.711,00	190.079.699.897,00	97,99	150.063.615.873,85
I	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.378.567.711,00	59.032.552.647,00	97,77	59.111.764.401,85
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	54.581.006.200,00	53.374.228.800,00	97,79	15.715.835.586,00
2	Dinas Kesehatan	3.972.814.511,00	3.867.426.847,00	97,35	3.054.128.325,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-	5.705.315.673,00
4	Dinas Sosial	199.997.000,00	199.997.000,00	100,00	-
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.524.750.000,00	1.490.900.000,00	97,78	-
6	Dinas Pertanian	-	-	-	1.520.684.817,85
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	33.115.800.000,00
II	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	594.000.000,00	594.000.000,00	100,00	800.000.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	594.000.000,00	594.000.000,00	100,00	800.000.000,00
III	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	132.997.740.000,00	130.453.147.250,00	98,09	89.520.271.472,00
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	107.239.250.000,00	105.631.740.000,00	98,50	68.996.966.472,00
2	Dinas Kebudayaan	13.137.400.000,00	12.605.117.250,00	95,95	11.272.325.000,00
3	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	150.580.000,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	305.390.000,00	305.390.000,00	100,00	250.000.000,00
5	Sekretariat Daerah	11.785.700.000,00	11.735.700.000,00	99,58	8.676.700.000,00
6	Kecamatan Denpasar Barat	180.000.000,00	175.200.000,00	97,33	173.700.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	350.000.000,00	-	-	-
IV	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	631.580.000,00
1	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	-	-	-	575.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	56.580.000,00
C	Belanja Hibah Dana BOS	42.480.670.000,00	41.822.118.251,00	98,45	40.270.678.330,00

No.	SKPD	TA 2025		%	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
I	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	42.480.670.000,00	41.822.118.251,00	98,45	40.270.678.330,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	42.480.670.000,00	41.822.118.251,00	98,45	40.270.678.330,00
D	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.707.940.000,00	1.707.940.000,00	100,00	1.639.370.001,00
I	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.707.940.000,00	1.707.940.000,00	100,00	1.639.370.001,00
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.707.940.000,00	1.707.940.000,00	100,00	1.639.370.001,00
E	Belanja Hibah Dana BOSP	13.921.180.000,00	13.271.292.850,00	95,33	13.213.512.648,00
I	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	10.965.440.000,00	10.657.327.500,00	97,19	10.252.291.080,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	10.965.440.000,00	10.657.327.500,00	97,19	10.252.291.080,00
II	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.955.740.000,00	2.613.965.350,00	88,44	2.961.221.568,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	2.955.740.000,00	2.613.965.350,00	88,44	2.961.221.568,00
Jumlah Seluruh Belanja Hibah		262.080.097.711,00	255.155.766.733,00	97,36	205.187.176.852,85



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.002.160.000,00	2.933.175.000,00	97,70	2.325.125.000,00
I	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.002.160.000,00	2.933.175.000,00	97,70	2.325.125.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	3.002.160.000,00	2.933.175.000,00	97,70	2.325.125.000,00
B	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.600.000.000,00	3.459.727.728,00	96,10	3.371.418.829,00
I	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.600.000.000,00	3.459.727.728,00	96,10	3.371.418.829,00
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	3.600.000.000,00	3.459.727.728,00	96,10	3.371.418.829,00
C	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.159.500.000,00	1.039.500.000,00	89,65	2.124.325.000,00
I	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.159.500.000,00	1.039.500.000,00	89,65	2.124.325.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.159.500.000,00	1.039.500.000,00	89,65	2.124.325.000,00
Jumlah Seluruh Belanja Bantuan Sosial		7.761.660.000,00	7.432.402.728,00	95,76	7.820.868.829,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	Anggaran						Realisasi					
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	-	22.800.586.716,00	188.514.528.960,00	1.515.000.000,00	4.304.406.300,00	100.000.000,00	-	21.857.474.917,00	179.819.807.727,00	401.166.000,00	4.208.666.896,00	99.086.536,00
2	Dinas Kesehatan	-	36.235.897.848,00	4.711.000.000,00	663.600.000,00	-	-	-	34.058.363.109,00	3.798.848.317,00	227.063.109,00	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	19.511.300.000,00	40.042.270.000,00	330.762.139.700,00	4.426.000.000,00	-	-	18.904.036.898,00	33.861.310.038,00	311.871.006.669,00	3.863.741.938,00	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	164.067.887.500,00	220.192.000,00	2.825.040.000,00	2.610.000.000,00	-	-	6.725.128.218,00	208.573.000,00	2.773.416.194,00	2.449.801.655,00	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	669.607.000,00	-	5.000.000,00	20.000.000,00	-	-	643.548.750,00	-	4.961.000,00	20.000.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	316.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	306.847.218,00	-	4.934.302,00	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	12.668.060.000,00	321.600.000,00	15.000.000,00	-	-	-	12.365.114.002,00	295.586.004,00	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	-	32.450.000,00	190.000.000,00	-	42.740.500,00	-	-	25.407.900,00	186.413.594,00	-	-	41.936.910,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	36.740.000,00	-	2.500.000,00	-	-	-	35.600.000,00	-	2.400.930,00	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-	42.160.360.000,00	13.950.000.000,00	3.750.000.000,00	-	200.000.000,00	-	39.102.076.881,00	13.370.257.149,00	3.666.680.139,00	-	200.000.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	141.354.500,00	-	5.000.000,00	-	-	-	117.006.650,00	-	-	-	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	650.894.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	625.085.500,00	-	4.664.220,00	-	-
14	Dinas Perhubungan	-	25.999.785.000,00	1.907.696.000,00	12.066.000.000,00	500.000.000,00	-	-	23.919.205.055,00	991.223.740,00	9.561.151.690,00	488.260.629,00	-
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	-	852.904.000,00	-	-	-	-	-	811.577.845,00	-	-	-	-
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	-	302.300.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	280.246.951,00	-	-	-	45.900.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	58.350.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	53.708.400,00	-	4.930.760,00	-	-
18	Dinas Kebudayaan	-	1.124.582.000,00	423.000.000,00	10.000.000,00	300.000.000,00	-	-	938.798.947,00	418.670.843,00	9.867.197,00	292.180.000,00	-
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	26.500.000,00	-	2.500.000,00	61.700.000,00	-	-	26.337.993,00	-	-	60.697.588,00	-
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	-	226.673.100,00	30.060.000,00	10.000.000,00	-	-	-	209.308.991,00	28.877.442,00	9.879.422,00	-	-
21	Dinas Pariwisata	-	454.876.000,00	-	-	-	-	-	446.558.509,00	-	-	-	-
22	Dinas Pertanian	-	139.000.000,00	-	25.000.000,00	266.000.000,00	-	-	132.950.002,00	-	24.771.170,00	265.565.997,00	-
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	156.800.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	129.255.948,00	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	16.447.800.000,00	32.088.000,00	-	192.412.000,00	-	-	14.559.358.633,00	31.302.000,00	-	147.650.000,00	-
25	Sekretariat DPRD	-	1.545.981.650,00	-	-	20.000.000,00	-	-	1.242.639.081,00	-	-	19.869.000,00	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	207.842.000,00	-	7.500.000,00	-	-	-	164.280.976,00	-	-	-	-
27	Badan Pendapatan Daerah	-	7.194.939.720,00	650.611.989,00	-	-	300.000.000,00	-	6.748.590.340,00	-	-	-	299.850.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	125.000.000,00	396.800.000,00	270.000.000,00	205.000.000,00	-	-	984.000,00	361.401.599,00	269.132.738,00	202.267.419,00	-	-
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	844.553.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	644.326.453,00	-	4.902.612,00	-	-
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	488.396.550,00	190.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	394.736.694,00	188.356.216,00	-	-	-
31	Inspektorat	-	3.035.895.000,00	3.200.000.000,00	-	-	-	-	2.111.606.027,00	2.818.396.416,00	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	995.323.500,00	289.976.961,00	895.628.000,00	-	-	-	940.976.846,00	243.828.121,00	848.223.676,00	-	-
33	Kecamatan Denpasar Timur	-	1.351.558.020,00	108.500.000,00	196.460.000,00	-	-	-	1.073.412.338,00	97.213.582,00	191.324.610,00	-	-
34	Kecamatan Denpasar Selatan	-	1.324.082.000,00	742.583.962,00	2.381.061.658,00	-	-	-	1.242.918.771,00	674.027.766,00	2.269.036.302,00	-	-
35	Kecamatan Denpasar Utara	-	485.608.000,00	20.040.000,00	1.270.641.442,00	-	-	-	398.225.746,00	19.197.672,00	1.165.776.700,00	-	-
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	166.545.000,00	-	-	167.737.500,00	-	-	158.534.101,00	-	-	52.503.000,00	-
Jumlah		164.192.887.500,00	199.270.536.604,00	258.418.995.872,00	356.448.030.800,00	10.258.255.800,00	692.740.500,00	6.726.112.218,00	185.238.091.071,00	239.885.865.559,00	332.924.809.582,00	9.419.135.048,00	686.773.446,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

NO	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Modal Tanah	164.192.887.500,00	6.726.112.218,00	4,10	2.707.000,00
A	Belanja Modal Tanah Persil	7.242.907.500,00	6.726.112.218,00	92,86	2.707.000,00
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7.117.907.500,00	6.725.128.218,00	94,48	-
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	125.000.000,00	984.000,00	0,79	2.707.000,00
B	Belanja Modal Lapangan	156.949.980.000,00	-	-	-
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	156.949.980.000,00	-	-	-
				-	
Jumlah Seluruh Belanja Modal Tanah		164.192.887.500,00	6.726.112.218,00	4,10	2.707.000,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

NO.	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA MODAL ALAT BESAR	33.676.676.500,00	31.377.451.437,00	93,17	15.359.820.500,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.786.800.000,00	3.731.397.997,00	98,54	3.615.100.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	29.591.600.000,00	27.387.517.445,00	92,55	11.695.800.000,00
3	Dinas Perhubungan	-	-	-	14.675.000,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.500.000,00	4.349.999,00	96,67	-
5	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	9.900.000,00	9.435.000,00	95,30	-
6	Sekretariat Daerah	211.900.000,00	196.470.000,00	92,72	17.245.500,00
7	Sekretariat DPRD	31.900.000,00	24.900.000,00	78,06	-
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1.500.000,00
9	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	-	-	-	2.850.000,00
10	Kecamatan Denpasar Barat	30.701.500,00	15.499.996,00	50,49	3.000.000,00
11	Kecamatan Denpasar Selatan	9.375.000,00	7.881.000,00	84,06	9.650.000,00
II	BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN	62.951.020.000,00	60.458.600.363,00	96,04	78.764.180.000,00
1	Dinas Kesehatan	4.958.000.000,00	4.837.200.630,00	97,56	1.440.650.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.000.000.000,00	13.543.380.001,00	96,74	11.708.300.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	385.000.000,00	373.250.000,00	96,95	337.250.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	2.709.900.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	11.328.600.000,00	11.235.599.999,00	99,18	10.752.500.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	1.396.640.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	11.810.000.000,00	11.216.117.234,00	94,97	32.185.290.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	1.098.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	8.656.460.000,00	8.629.248.499,00	99,69	8.734.000.000,00
10	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	-	-	-	191.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	10.221.180.000,00	9.163.130.001,00	89,65	-
12	Sekretariat DPRD	-	-	-	643.700.000,00
13	Badan Pendapatan Daerah	1.281.780.000,00	1.279.999.999,00	99,86	795.000.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	6.015.500.000,00
15	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	57.950.000,00
16	Kecamatan Denpasar Timur	310.000.000,00	180.674.000,00	58,28	-
17	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	249.500.000,00
18	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	178.500.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	270.000.000,00
III	BELANJA MODAL ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.477.500.000,00	1.393.583.400,00	94,32	1.087.330.000,00
1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	180.000.000,00	161.136.000,00	89,52	24.760.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.500.000,00	4.301.000,00	57,35	-

NO.	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	2	3	4	5	6
3	Dinas Perhubungan	1.255.000.000,00	1.206.126.000,00	96,11	1.006.470.000,00
4	Dinas Kebudayaan	5.000.000,00	1.970.400,00	39,41	-
5	Dinas Pertanian	-	-	-	48.000.000,00
6	Inspektorat	25.000.000,00	16.250.000,00	65,00	400.000,00
7	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	4.950.000,00
8	Kecamatan Denpasar Timur	5.000.000,00	3.800.000,00	76,00	-
9	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	2.750.000,00
IV	BELANJA MODAL ALAT PERTANIAN	-	-	-	53.700.000,00
1	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	8.400.000,00
2	Dinas Pertanian	-	-	-	42.400.000,00
3	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	2.900.000,00
V	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	21.576.018.970,00	18.634.756.508,00	86,37	18.803.022.018,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	8.720.536.000,00	7.953.664.194,00	91,21	9.082.932.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.385.057.650,00	1.060.245.943,00	76,55	648.093.570,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	317.000.000,00	310.556.700,00	97,97	152.375.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	76.600.000,00	73.008.000,00	95,31	135.250.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.392.000,00	64.371.250,00	90,17	80.255.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	77.000.000,00	76.599.979,00	99,48	111.040.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	267.680.000,00	159.812.006,00	59,70	900.962.500,00
8	Dinas Sosial	-	-	-	1.800.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	32.450.000,00	25.407.900,00	78,30	57.300.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	36.740.000,00	35.600.000,00	96,90	75.384.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	431.860.000,00	190.437.996,00	44,10	368.621.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	74.735.000,00	68.145.150,00	91,18	31.500.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	245.465.000,00	232.994.502,00	94,92	28.800.000,00
14	Dinas Perhubungan	1.037.850.000,00	979.691.325,00	94,40	156.550.000,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	40.000.000,00	29.399.993,00	73,50	62.400.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	186.300.000,00	170.146.950,00	91,33	67.096.932,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.350.000,00	24.908.400,00	87,86	38.650.000,00
18	Dinas Kebudayaan	317.082.000,00	298.328.550,00	94,09	47.400.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	22.000.000,00	21.987.994,00	99,95	391.467.498,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	38.273.100,00	35.749.998,00	93,41	76.411.500,00
21	Dinas Pariwisata	281.876.000,00	281.078.509,00	99,72	217.295.000,00
22	Dinas Pertanian	21.000.000,00	20.200.000,00	96,19	30.450.000,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	134.800.000,00	107.499.948,00	79,75	203.500.000,00
24	Sekretariat Daerah	3.618.905.000,00	3.153.343.632,00	87,14	1.219.384.500,00
25	Sekretariat DPRD	786.641.650,00	578.247.092,00	73,51	274.868.240,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	159.842.000,00	118.659.976,00	74,24	117.150.000,00
27	Badan Pendapatan Daerah	361.858.000,00	317.927.342,00	87,86	2.600.890.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	75.000.000,00	70.374.000,00	93,83	237.670.000,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	564.553.000,00	422.736.454,00	74,88	147.600.000,00

NO.	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	2	3	4	5	6
30	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	244.536.550,00	192.003.700,00	78,52	40.750.000,00
31	Inspektorat	679.510.000,00	524.813.998,00	77,23	76.267.778,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	188.167.000,00	162.830.919,00	86,54	328.192.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	394.694.020,00	315.816.238,00	80,02	124.375.000,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	375.907.000,00	355.140.773,00	94,48	231.190.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	236.858.000,00	161.427.097,00	68,15	190.299.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.500.000,00	41.600.000,00	91,43	248.851.000,00
VI	BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	9.718.437.220,00	8.101.151.710,00	83,36	6.892.512.404,00
1	Dinas Kesehatan	699.070.000,00	560.140.000,00	80,13	55.232.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	330.000.000,00	295.837.200,00	89,65	3.485.000.000,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	32.875.000,00	31.300.000,00	95,21	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.000.000,00	62.460.000,00	96,09	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	98.000.000,00	97.995.240,00	100,00	
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	89.250.000,00
7	Dinas Sosial	-	-	-	102.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	54.216.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-	-	-	14.300.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.765.500,00	12.193.500,00	95,52	-
11	Dinas Perhubungan	446.825.000,00	417.287.257,00	93,39	846.550.000,00
12	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	255.900.000,00	246.452.001,00	96,31	89.100.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	50.000.000,00	47.400.000,00	94,80	-
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	284.700.000,00
15	Dinas Kebudayaan	765.000.000,00	602.500.000,00	78,76	78.900.000,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	48.880.000,00
17	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	18.500.000,00	17.800.000,00	96,22	
18	Dinas Pariwisata	52.800.000,00	47.480.000,00	89,92	7.000.000,00
19	Dinas Pertanian	-	-	-	12.150.000,00
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	5.750.000,00
21	Sekretariat Daerah	846.815.000,00	680.164.993,00	80,32	578.500.000,00
22	Sekretariat DPRD	247.000.000,00	167.319.989,00	67,74	7.400.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	3.904.301.720,00	3.603.420.001,00	92,29	113.350.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	27.800.000,00	26.307.000,00	94,63	7.300.000,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	369.622.000,00
27	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	-	-	-	-
28	Inspektorat	1.504.385.000,00	839.940.029,00	55,83	47.896.500,00
29	Kecamatan Denpasar Barat	50.000.000,00	44.430.000,00	88,86	17.550.000,00
30	Kecamatan Denpasar Timur	27.150.000,00	27.000.000,00	99,45	2.475.000,00
31	Kecamatan Denpasar Selatan	264.000.000,00	260.850.000,00	98,81	27.000.000,00
32	Kecamatan Denpasar Utara	20.250.000,00	12.874.500,00	63,58	-

NO.	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	2	3	4	5	6
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	548.390.904,00
VII	BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	22.447.629.857,00	21.541.652.241,00	95,96	15.928.081.228,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	-	-	-	2.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	22.178.415.857,00	21.300.254.842,00	96,04	15.916.481.228,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-	-	-	-
5	Sekretariat Daerah	230.000.000,00	215.999.999,00	93,91	
6	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	1.800.000,00
7	Kecamatan Denpasar Timur	39.214.000,00	25.397.400,00	64,77	7.000.000,00
VIII	BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM	1.169.720.476,00	1.092.399.026,00	93,39	1.038.171.180,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	66.800.000,00	56.479.576,00	84,55	80.455.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.102.920.476,00	1.035.919.450,00	93,93	939.216.180,00
3	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	7.500.000,00
4	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	11.000.000,00
IX	BELANJA MODAL KOMPUTER	14.989.637.500,00	13.755.864.860,00	91,77	16.164.877.446,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.218.828.000,00	1.188.068.931,00	97,48	3.289.620.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.387.205.500,00	1.242.995.701,00	89,60	894.319.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.077.500.000,00	1.022.865.000,00	94,93	984.675.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	110.717.000,00	104.265.000,00	94,17	151.800.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148.215.000,00	143.467.500,00	96,80	122.250.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	141.000.000,00	132.251.999,00	93,80	177.800.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	105.000.000,00	104.299.997,00	99,33	200.750.000,00
8	Dinas Sosial	-	-	-	140.900.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	185.850.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	268.150.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	146.900.000,00	146.868.206,00	99,98	296.130.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	53.854.000,00	36.668.000,00	68,09	1.804.205.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	397.929.000,00	387.789.998,00	97,45	81.392.000,00
14	Dinas Perhubungan	1.680.550.000,00	1.397.790.201,00	83,17	932.868.346,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	557.004.000,00	535.725.851,00	96,18	501.198.460,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	66.000.000,00	62.700.001,00	95,00	114.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	28.800.000,00	96,00	41.500.000,00
18	Dinas Kebudayaan	37.500.000,00	35.999.997,00	96,00	136.686.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	252.100.000,00
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	160.000.000,00	146.323.993,00	91,45	133.526.000,00
21	Dinas Pariwisata	120.200.000,00	118.000.000,00	98,17	291.594.640,00
22	Dinas Pertanian	118.000.000,00	112.750.002,00	95,55	91.900.000,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	22.000.000,00	21.756.000,00	98,89	17.000.000,00
24	Sekretariat Daerah	1.319.000.000,00	1.150.250.008,00	87,21	1.824.450.000,00
25	Sekretariat DPRD	480.440.000,00	472.172.000,00	98,28	166.442.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.000.000,00	45.621.000,00	95,04	178.945.000,00

NO.	SKPD	TA 2025			TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	2	3	4	5	6
27	Badan Pendapatan Daerah	1.647.000.000,00	1.547.242.998,00	93,94	1.167.420.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	294.000.000,00	264.720.599,00	90,04	233.544.000,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	280.000.000,00	221.589.999,00	79,14	101.145.000,00
30	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	243.860.000,00	202.732.994,00	83,13	79.500.000,00
31	Inspektorat	827.000.000,00	730.602.000,00	88,34	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	694.590.000,00	686.916.937,00	98,90	174.376.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	553.000.000,00	504.724.700,00	91,27	204.581.000,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	674.800.000,00	619.046.998,00	91,74	225.950.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	228.500.000,00	223.924.149,00	98,00	401.361.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	121.045.000,00	116.934.101,00	96,60	296.949.000,00
X	BELANJA MODAL ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN	54.365.000,00	47.298.994,00	87,00	-
1	Kecamatan Denpasar Barat	31.865.000,00	31.298.994,00	98,22	-
2	Kecamatan Denpasar Timur	22.500.000,00	16.000.000,00	71,11	-
XI	BELANJA MODAL ALAT KESELAMATAN KERJA	966.780.000,00	865.402.000,00	89,51	625.600.000,00
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	117.000.000,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	966.780.000,00	865.402.000,00	89,51	508.600.000,00
XII	BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU	12.923.100.000,00	11.289.061.773,00	87,36	2.490.982.647,00
1	Dinas Perhubungan	12.923.100.000,00	11.289.061.773,00	87,36	2.490.982.647,00
XIII	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS	-	-	-	11.803.415.738,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	-	-	-	11.803.415.738,00
XIV	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOSP	12.794.422.716,00	12.659.262.216,00	98,94	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	12.794.422.716,00	12.659.262.216,00	98,94	-
XV	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD	4.525.228.365,00	4.021.606.543,00	88,87	3.290.156.962,00
1	Dinas Kesehatan	4.525.228.365,00	4.021.606.543,00	88,87	3.290.156.962,00
JUMLAH SELURUH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		199.270.536.604,00	185.238.091.071,00	92,96	172.301.850.123,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Modal Bangunan Gedung	235.818.952.872,00	218.863.626.724,00	92,81	99.887.799.681,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	183.166.295.960,00	174.835.383.576,00	95,45	61.664.147.334,00
2	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	490.147.917,00	81,69	79.327.465,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.042.270.000,00	33.861.310.038,00	84,56	30.942.295.417,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.575.000.000,00	2.525.516.000,00	98,08	5.219.637.584,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	321.600.000,00	295.586.004,00	91,91	
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	190.000.000,00	186.413.594,00	98,11	-
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.750.000.000,00	1.511.288.350,00	86,36	1.435.727.462,00
8	Dinas Perhubungan	1.907.696.000,00	991.223.740,00	51,96	34.307.000,00
9	Dinas Kebudayaan	220.000.000,00	219.200.103,00	99,64	-
10	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	30.060.000,00	28.877.442,00	96,07	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-		-	58.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	32.088.000,00	31.302.000,00	97,55	
13	Badan Pendapatan Daerah	650.611.989,00	-	-	246.585.600,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	270.000.000,00	269.132.738,00	99,68	19.385.649,00
15	Badan Riset dan Inovasi Daerah	190.000.000,00	188.356.216,00	99,13	
16	Inspektorat	3.200.000.000,00	2.818.396.416,00	88,07	-
17	Kecamatan Denpasar Barat	289.976.961,00	243.828.121,00	84,09	106.626.570,00
18	Kecamatan Denpasar Timur	108.500.000,00	97.213.582,00	89,60	
19	Kecamatan Denpasar Selatan	254.813.962,00	251.253.215,00	98,60	81.759.600,00
20	Kecamatan Denpasar Utara	20.040.000,00	19.197.672,00	95,80	-
	Belanja Modal Monumen	12.000.000.000,00	11.660.049.799,00	97,17	485.620.340,00
1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	12.000.000.000,00	11.660.049.799,00	97,17	485.620.340,00
2	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	485.620.340,00
II	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.489.043.000,00	6.053.488.636,00	93,29	1.885.820.124,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	5.348.233.000,00	4.984.424.151,00	93,20	1.157.671.576,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-		-	334.614.306,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	250.040.000,00	247.900.194,00	99,14	252.792.242,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	200.000.000,00	198.919.000,00	99,46	-

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
5	Dinas Kebudayaan	203.000.000,00	199.470.740,00	98,26	
6	Badan Pendapatan Daerah			-	14.292.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-		-	99.450.000,00
8	Kecamatan Denpasar Selatan	487.770.000,00	422.774.551,00	86,67	27.000.000,00
III	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.111.000.000,00	3.308.700.400,00	80,48	3.180.051.070,00
1	Dinas Kesehatan	4.111.000.000,00	3.308.700.400,00	80,48	3.180.051.070,00
Jumlah Seluruh Belanja Modal Gedung dan Bangunan		258.418.995.872,00	239.885.865.559,00	92,83	105.439.291.215,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	7
I	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	275.643.964.142,00	259.228.056.193,00	94,04	156.674.223.313,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	268.870.639.700,00	252.863.559.728,00	94,05	153.618.705.495,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.600.000.000,00	2.440.699.655,00	93,87	99.354.102,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	750.000.000,00	693.750.000,00	92,50	-
4	Kecamatan Denpasar Barat	863.128.000,00	816.095.281,00	94,55	816.095.221,00
5	Kecamatan Denpasar Timur	68.608.000,00	67.056.000,00	97,74	125.402.018,00
6	Kecamatan Denpasar Selatan	1.575.736.000,00	1.525.694.429,00	96,82	1.342.248.508,00
7	Kecamatan Denpasar Utara	915.852.442,00	821.201.100,00	89,67	672.417.969,00
II	Belanja Modal Bangunan Air	59.345.174.658,00	56.951.868.467,00	95,97	14.918.383.158,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	58.561.500.000,00	56.203.384.941,00	95,97	14.849.809.404,00
2	Kecamatan Denpasar Timur	100.352.000,00	98.238.000,00	97,89	3.412.140,00
3	Kecamatan Denpasar Selatan	683.322.658,00	650.245.526,00	95,16	30.718.984,00
4	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	34.442.630,00
III	Belanja Modal Instalasi	15.246.792.000,00	11.422.948.283,00	74,92	4.416.208.502,10
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.515.000.000,00	401.166.000,00	26,48	-
2	Dinas Kesehatan	197.500.000,00	179.835.409,00	91,06	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.110.000.000,00	1.005.949.000,00	90,63	826.807.175,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	10.000.000,00	9.102.000,00	91,02	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00	4.961.000,00	99,22	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000,00	4.934.302,00	98,69	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.000.000,00	-	-	-
8	Dinas Sosial	15.000.000,00	-	-	-
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000,00	2.400.930,00	96,04	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.000.000,00	4.664.220,00	93,28	-
12	Dinas Perhubungan	11.740.000.000,00	9.257.346.940,00	78,85	2.495.383.750,00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	4.930.760,00	98,62	-
14	Dinas Kebudayaan	10.000.000,00	9.867.197,00	98,67	-
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.500.000,00	-	-	-
16	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	10.000.000,00	9.879.422,00	98,79	-
17	Dinas Pertanian	25.000.000,00	24.771.170,00	99,08	226.181.550,10
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.000.000,00	-	-	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.500.000,00	-	-	-
20	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.000.000,00	2.406.369,00	48,13	-
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00	4.902.612,00	98,05	-
22	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	5.000.000,00	-	-	-
23	Kecamatan Denpasar Barat	32.500.000,00	32.128.395,00	98,86	-
24	Kecamatan Denpasar Timur	27.500.000,00	26.030.610,00	94,66	-
25	Kecamatan Denpasar Selatan	122.003.000,00	93.096.347,00	76,31	654.056.188,00
26	Kecamatan Denpasar Utara	354.789.000,00	344.575.600,00	97,12	213.779.839,00
IV	Belanja Modal Jaringan	6.016.000.000,00	5.274.708.939,00	87,68	1.678.532.186,00
1	Dinas Kesehatan	270.000.000,00	-	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.220.000.000,00	1.798.113.000,00	81,00	909.261.050,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.000.000.000,00	2.972.930.139,00	99,10	225.713.436,00
4	Dinas Perhubungan	326.000.000,00	303.804.750,00	93,19	237.144.730,00
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	200.000.000,00	199.861.050,00	99,93	-
6	Kecamatan Denpasar Timur	-	-	-	25.665.000,00
7	Sekretariat Daerah	-	-	-	38.000.000,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	-	-	59.319.500,00

No	SKPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	7
9	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	183.428.470,00
V	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	196.100.000,00	47.227.700,00	24,08	99.999.000,00
1	Dinas Kesehatan	196.100.000,00	47.227.700,00	24,08	99.999.000,00
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	356.448.030.800,00	332.924.809.582,00	93,40	177.787.346.159,10



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
TAHUN 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	TA 2025		%	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	231.700.000,00	185.947.588,00	80,25	22.000.000,00
1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	61.700.000,00	60.697.588,00	98,38	22.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	170.000.000,00	125.250.000,00	73,68	-
B	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.530.149.500,00	1.386.282.196,00	90,60	1.592.185.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.000.000.000,00	979.330.196,00	97,93	494.259.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00	292.180.000,00	97,39	826.501.000,00
4	Sekretariat Daerah	22.412.000,00	22.400.000,00	99,95	160.000.000,00
5	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	19.869.000,00	99,35	-
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	167.737.500,00	52.503.000,00	31,30	111.425.000,00
C	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	5.367.000.000,00	4.787.224.564,00	89,20	3.328.016.495,80
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	175.000.000,00	169.656.000,00	96,95	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	67.636.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.426.000.000,00	3.863.741.938,00	87,30	-
4	Dinas Perhubungan	500.000.000,00	488.260.629,00	97,65	335.008.423,00
5	Dinas Pertanian	266.000.000,00	265.565.997,00	99,84	189.995.920,80
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	-	-	1.319.372.000,00
7	Inspektorat	-	-	-	1.416.003.302,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.129.406.300,00	3.059.680.700,00	97,77	3.792.453.564,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	3.129.406.300,00	3.059.680.700,00	97,77	3.792.453.564,00
Jumlah Seluruh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		10.258.255.800,00	9.419.135.048,00	91,82	8.734.655.059,80



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA
TAHUN 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	TA 2025		%	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	100.000.000,00	99.086.536,00	99,09	-
2	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	42.740.500,00	41.936.910,00	98,12	-
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	-	-	98.795.217,00
4	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	300.000.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	50.000.000,00	45.900.000,00	91,80	99.600.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	300.000.000,00	299.850.000,00	99,95	589.860.000,00
Jumlah Seluruh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		692.740.500,00	686.773.446,00	99,14	1.088.255.217,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR PERHITUNGAN SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PERIODE 1 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	SP2D UP/GU/TU/LS	BOS/JKN/BLUD/DANA DESA	Pengembalian GU/TU/LS	Total Belanja	Belanja LRA	Total Pembiayaan	Sisa UP	STS UP Bendahara	Sisa Kas	Keterangan
		1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7 = 4-5	8	9 = 7-8	10
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAHA	611.187.818.871,00	244.893.166.211,50	1.258.474.688,00	854.822.510.394,50	854.789.569.014,50	-	32.941.380,00	25.441.380,00	7.500.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	320.544.884.675,00	170.945.641.321,22	6.769.376.531,00	484.721.149.465,22	484.719.918.455,22	-	1.231.010,00	1.231.010,00	-	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	471.105.754.846,00	-	1.477.614.412,00	469.628.140.434,00	469.493.418.321,00	-	134.722.113,00	134.722.113,00	-	
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.288.338.599,00	-	2.256.362,00	16.286.082.237,00	16.285.159.861,00	-	922.376,00	922.376,00	-	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	157.864.679.835,00	-	78.218.544,00	157.786.461.291,00	157.785.731.731,00	-	729.560,00	729.560,00	-	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.008.755.335,00	-	2.937.760,00	25.005.817.575,00	24.999.908.743,00	-	5.908.832,00	5.908.832,00	-	
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	33.967.193.290,00	-	-	33.967.193.290,00	33.954.899.679,00	-	12.293.611,00	12.293.611,00	-	
8	DINAS SOSIAL	19.191.708.723,00	-	1.650.000,00	19.190.058.723,00	19.174.601.761,00	-	15.456.962,00	15.456.962,00	-	
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	10.595.699.870,00	-	-	10.595.699.870,00	10.595.543.020,00	-	156.850,00	156.850,00	-	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.360.720.465,00	-	3.860.010,00	20.356.860.455,00	20.356.704.472,00	-	155.983,00	155.983,00	-	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	193.422.048.925,00	-	405.423.584,00	193.016.625.341,00	192.173.429.499,00	-	843.195.842,00	843.195.842,00	-	
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	24.551.608.626,00	-	2.500.000,00	24.549.108.626,00	24.408.473.057,00	-	140.635.569,00	140.635.569,00	-	
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.472.866.841,00	-	-	13.472.866.841,00	13.463.784.213,00	-	9.082.628,00	9.082.628,00	-	
14	DINAS PERHUBUNGAN	120.414.799.476,00	-	92.494.057,00	120.322.305.419,00	120.276.812.289,00	-	45.493.130,00	45.493.130,00	-	
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	15.575.502.072,00	-	-	15.575.502.072,00	15.564.111.804,00	-	11.390.268,00	11.390.268,00	-	
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	12.919.458.620,00	-	1.500.000,00	12.917.958.620,00	12.917.509.554,00	-	449.066,00	449.066,00	-	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.706.607.451,00	-	9.420.505,00	23.697.186.946,00	23.673.384.882,00	-	23.802.064,00	23.802.064,00	-	
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.424.264.871,00	-	665.764,00	13.423.599.107,00	13.374.386.675,00	-	49.212.432,00	49.212.432,00	-	
19	DINAS KEBUDAYAAN	73.992.315.842,00	-	212.583.000,00	73.779.732.842,00	73.678.552.644,00	-	101.180.198,00	101.180.198,00	-	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.950.469.614,00	-	555.000,00	12.949.914.614,00	12.947.103.269,00	-	2.811.345,00	2.811.345,00	-	
21	DINAS PERIKATANAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.940.629.218,00	-	6.482.900,00	12.934.146.318,00	12.927.565.775,00	-	6.580.543,00	6.580.543,00	-	
22	DINAS PARIWISATA	32.820.739.579,00	-	1.571.120,00	32.819.168.459,00	32.654.537.003,00	-	164.631.456,00	164.631.456,00	-	
23	DINAS PERTANIAN	24.287.893.274,00	-	434.430,00	24.287.458.844,00	24.281.964.154,00	-	5.494.690,00	5.494.690,00	-	
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.679.027.707,00	-	412.664,00	15.678.615.043,00	15.488.095.393,00	-	190.519.650,00	190.519.650,00	-	
25	INSPEKTORAT	32.651.910.031,00	-	-	32.651.910.031,00	32.651.711.879,00	-	198.152,00	198.152,00	-	
26	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	9.715.144.297,00	-	1.110.000,00	9.714.034.297,00	9.711.121.987,00	-	2.912.310,00	2.912.310,00	-	
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	61.079.367.068,00	-	200.370.000,00	60.878.997.068,00	60.816.162.725,00	-	62.834.343,00	62.834.343,00	-	
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	405.756.402.884,00	39.896.439.000,00	649.806.213,83	445.003.035.670,17	444.997.156.372,17	58.500.000.000,00	5.879.298,00	5.879.298,00	-	
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.964.141.769,00	-	29.286.000,00	28.934.855.769,00	28.910.638.631,00	-	24.217.138,00	24.217.138,00	-	
30	SEKRETARIAT DAERAH	149.810.961.446,00	-	137.869.140,00	149.673.092.306,00	149.474.487.995,00	-	198.604.311,00	198.604.311,00	-	
31	SEKRETARIAT DPRD	70.656.473.714,00	-	1.772.816,00	70.654.700.898,00	69.935.718.412,00	-	718.982.486,00	718.982.486,00	-	
32	KECAMATAN DENPASAR BARAT	27.477.926.521,00	-	16.876.248,00	27.461.050.273,00	27.370.700.183,00	-	90.350.090,00	90.350.090,00	-	
33	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	29.293.053.861,00	-	336.900,00	29.292.716.961,00	29.142.346.403,00	-	150.370.558,00	150.370.558,00	-	
34	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	39.711.935.141,00	-	24.244.164,00	39.687.690.977,00	39.572.394.203,00	-	115.296.774,00	115.296.774,00	-	
35	KECAMATAN DENPASAR UTARA	25.352.529.806,00	-	26.432.500,00	25.326.097.306,00	25.292.448.596,00	-	33.648.710,00	33.648.710,00	-	
36	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.308.837.503,00	-	185.000,00	19.308.652.503,00	19.244.851.461,00	-	63.801.042,00	63.801.042,00	-	
		3.176.052.470.666,00	455.735.246.532,72	11.416.720.312,83	3.620.370.996.885,89	3.617.104.904.115,89	58.500.000.000,00	3.266.092.770,00	3.258.592.770,00	7.500.000,00	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KAS DI BLUD
PER 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Awal Kas di BLUD Tahun 2025	Reklas Masuk dari Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5+6-7
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	011.01.05.00597-0	0,00	241.969.467,00	3.716.960.848,58	3.034.860.983,00	924.069.332,58
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	011.01.05.00598-3	0,00	377.124.067,00	3.858.235.671,35	3.131.784.696,00	1.103.575.042,35
3	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00594-5	0,00	305.502.214,00	2.503.954.155,10	1.985.294.446,00	824.161.923,10
4	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00595-7	0,00	241.790.205,00	2.818.158.447,12	2.215.944.096,00	844.004.556,12
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00596-9	0,00	339.504.623,00	3.403.230.988,37	2.914.934.450,00	827.801.161,37
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00601-6	0,00	173.770.514,00	2.788.235.657,91	2.367.841.481,00	594.164.690,91
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00602-8	0,00	167.566.853,58	2.055.965.823,36	1.690.848.033,45	532.684.643,49
8	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00603-1	0,00	133.999.546,56	2.118.543.997,96	1.669.064.920,00	583.478.624,52
9	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00604-2	0,00	278.030.930,00	2.664.313.391,50	2.024.814.074,00	917.530.247,50

Lampiran 5
Hal. 2 dari 2

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Awal Kas di BLUD Tahun 2025	Reklas Masuk dari Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5+6-7
10	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	011.01.05.00599-5	0,00	379.212.598,00	3.897.596.998,85	3.059.778.133,00	1.217.031.463,85
11	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	011.01.05.00600-4	0,00	340.958.026,86	2.508.411.326,17	2.133.310.824,39	716.058.528,64
12	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	011.01.00.02561-6	13.740.861.427,36	0,00	146.050.263.254,03	139.146.406.662,38	20.644.718.019,01
Jumlah			13.740.861.427,36	2.979.429.045,00	178.383.870.560,30	165.374.882.799,22	29.729.278.233,44



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KAS DANA KAPITASI PADA FKTP
PER 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025	Reklas ke Kas di BLUD	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6= 4-5
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	011.01.05.00597-0	241.969.467,00	241.969.467,00	0,00
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	011.01.05.00598-3	377.124.067,00	377.124.067,00	0,00
3	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00594-5	305.502.214,00	305.502.214,00	0,00
4	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00595-7	241.790.205,00	241.790.205,00	0,00
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	011.01.05.00596-9	339.504.623,00	339.504.623,00	0,00
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00601-6	173.770.514,00	173.770.514,00	0,00
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00602-8	167.566.853,58	167.566.853,58	0,00
8	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00603-1	133.999.546,56	133.999.546,56	0,00
9	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	011.01.05.00604-2	278.030.930,00	278.030.930,00	0,00
10	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	011.01.05.00599-5	379.212.598,00	379.212.598,00	0,00
11	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	011.01.05.00600-4	340.958.026,86	340.958.026,86	0,00
Jumlah			2.979.429.045,00	2.979.429.045,00	0,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KAS DANA BOSP - SD NEGERI
PER 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
1	SD NEGERI 4 PANJER	DENSEL	034.01.05.00016-4	37,01	445.200.000,00	444.990.498,00	209.539,01
2	SD NEGERI 1 PANJER	DENSEL	034.01.05.00016.3	0,28	296.800.000,00	296.800.000,00	0,28
3	SD NEGERI 1 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00012-5	613.000,29	408.547.000,00	408.311.510,00	848.490,29
4	SD NEGERI 1 RENON	DENSEL	034.01.05.00015-8	38.752,98	590.387.799,49	590.396.607,00	29.945,47
5	SD NEGERI 1 SANUR	DENSEL	027.01.05.00010-4	18.262.858,87	323.357.142,00	327.557.705,00	14.062.295,87
6	SD NEGERI 1 SESETAN	DENSEL	029.01.05.00012-0	95.344,00	348.644.656,00	348.740.000,00	-
7	SD NEGERI 10 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00011-5	616.160,00	380.163.840,00	380.549.020,00	230.980,00
8	SD NEGERI 10 SANUR	DENSEL	027.01.05.00011-0	0,12	549.080.000,00	549.080.000,00	0,12
9	SD NEGERI 11 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00011-6	3.682.220,30	531.617.780,00	532.856.700,00	2.443.300,30
10	SD NEGERI 11 SANUR	DENSEL	027.01.05.00011-1	610.671,39	183.829.329,00	184.440.000,00	0,39
11	SD NEGERI 11 SESETAN	DENSEL	029.01.05.00011-7	71.699,62	360.328.301,00	360.246.828,00	153.172,62
12	SD NEGERI 12 SANUR	DENSEL	027.01.05.00011-2	14.759,89	284.065.240,00	284.079.615,00	384,89
13	SD NEGERI 12 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00002-1	3.862.272,94	354.177.727,00	358.034.008,00	5.991,94
14	SD NEGERI 13 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00010-0	0,66	429.299.989,00	429.050.000,00	249.989,66
15	SD NEGERI 13 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00011-0	165.522,44	410.036.433,00	410.193.079,00	8.876,44
16	SD NEGERI 14 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00013-1	197.769,15	369.982.231,00	330.867.957,00	39.312.043,15
17	SD NEGERI 18 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00008-2	9.360.959,62	216.419.040,00	223.163.061,00	2.616.938,62
18	SD NEGERI 2 PANJER	DENSEL	034.01.05.00015-6	4.310,06	279.835.690,00	279.695.900,00	144.100,06
19	SD NEGERI 2 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00012-6	6.027.400,68	370.752.600,00	376.769.550,00	10.450,68
20	SD NEGERI 2 SANUR	DENSEL	027.01.05.00011-7	10.098.157,35	213.581.843,00	214.649.089,00	9.030.911,35
21	SD NEGERI 2 SERANGAN	DENSEL	049.01.05.00004-4	0,78	310.580.000,00	310.580.000,00	0,78
22	SD NEGERI 2 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00003-2	18.400.000,46	665.319.999,00	683.719.997,00	2,46

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
23	SD NEGERI 3 PANJER	DENSEL	034.01.05.00015-5	203.166,28	344.536.834,00	344.073.846,00	666.154,28
24	SD NEGERI 3 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00011-4	0,13	372.060.000,00	370.802.313,00	1.257.687,13
25	SD NEGERI 3 RENON	DENSEL	034.01.05.00015-7	0,26	286.440.000,00	286.440.000,00	0,26
26	SD NEGERI 3 SANUR	DENSEL	027.01.05.00010-5	263.945,27	215.976.055,00	214.980.500,00	1.259.500,27
27	SD NEGERI 3 SERANGAN	DENSEL	049.01.05.00005-6	24.800,58	208.795.200,00	208.819.839,00	161,58
28	SD NEGERI 3 SESETAN	DENSEL	034.01.05.00016-0	0,92	629.640.000,00	629.640.000,00	0,92
29	SD NEGERI 4 SANUR	DENSEL	027.01.05.00011-4	1.226.325,09	549.973.675,00	551.162.379,00	37.621,09
30	SD NEGERI 4 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00007-1	34.054,61	414.425.945,00	414.430.082,00	29.917,61
31	SD NEGERI 5 PANJER	DENSEL	034.01.05.00015-4	0,65	233.200.000,00	233.156.290,00	43.710,65
32	SD NEGERI 5 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00012-3	8.800.000,15	615.040.000,00	623.840.000,00	0,15
33	SD NEGERI 5 SANUR	DENSEL	027.01.05.00011-5	847.620,41	219.632.380,00	220.473.346,00	6.654,41
34	SD NEGERI 6 PANJER	DENSEL	034.01.05.00016-2	400.588,00	407.699.411,00	407.347.432,00	752.567,00
35	SD NEGERI 6 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00013-0	0,38	426.120.000,00	426.120.000,00	0,38
36	SD NEGERI 6 SANUR	DENSEL	027.01.05.00010-6	3.606.949,22	239.013.051,00	231.320.000,00	11.300.000,22
37	SD NEGERI 6 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00012-3	408.889,65	478.581.111,00	478.593.250,00	396.750,65
38	SD NEGERI 7 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00013-7	6.400.000,84	539.500.000,00	545.900.000,00	0,84
39	SD NEGERI 7 SESETAN	DENSEL	034.01.05.00015-9	576.264,57	392.683.736,00	393.234.236,00	25.764,57
40	SD NEGERI 8 SANUR	DENSEL	027.01.05.00010-8	0,37	205.640.000,00	205.640.000,00	0,37
41	SD NEGERI 9 PEDUNGAN	DENSEL	029.01.05.00012-7	7.238.700,63	542.121.300,00	548.932.770,00	427.230,63
42	SD NEGERI 9 SESETAN	DENSEL	049.01.05.00009-4	70.518,07	623.209.482,00	623.079.917,00	200.083,07
43	SD NEGERI 17 DAUH PURI	DENUT	050.01.05.00006-5	8.928.605,00	637.491.395,00	646.420.000,00	-
44	SD NEGERI 1 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00033-2	4.518,86	448.615.481,00	448.613.842,00	6.157,86
45	SD NEGERI 1 TONJA	DENUT	037.01.05.00013-5	193,97	224.719.806,00	224.719.956,00	43,97
46	SD NEGERI 1 UBUNG	DENUT	050.01.05.00001-5	66,31	600.199.934,00	600.199.693,00	307,31
47	SD NEGERI 10 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00032-8	-	305.280.000,00	305.062.740,00	217.260,00
48	SD NEGERI 11 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00030-9	669,89	255.459.331,00	219.126.186,00	36.333.814,89
49	SD NEGERI 12 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00030-5	40,17	289.619.960,00	289.616.779,00	3.221,17
50	SD NEGERI 12 PEMECUTAN	DENUT	011.01.05.00620-8	6.500,38	332.833.500,00	332.838.769,00	1.231,38

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
51	SD NEGERI 14 PEMECUTAN	DENUT	039.01.05.00029-6	0,74	341.319.999,00	341.319.407,00	592,74
52	SD NEGERI 17 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00022-8	684,63	185.499.315,00	185.487.000,00	12.999,63
53	SD NEGERI 18 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00024-0	66.800,05	399.553.200,00	399.620.000,00	0,05
54	SD NEGERI 18 PEMECUTAN	DENUT	039.01.05.00023-4	19.700.000,04	451.950.000,00	471.650.000,00	0,04
55	SD NEGERI 2 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00024-2	0,31	563.920.000,00	563.920.000,00	0,31
56	SD NEGERI 2 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00033-0	0,65	269.240.000,00	269.240.000,00	0,65
57	SD NEGERI 2 TONJA	DENUT	028.01.05.00031-9	0,91	253.339.999,00	253.339.999,00	0,91
58	SD NEGERI 2 UBUNG	DENUT	050.01.05.00005-3	4.000.009,03	550.359.991,00	553.557.504,00	802.496,03
59	SD NEGERI 20 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00014-7	2.001.242,07	222.718.758,00	224.719.787,00	213,07
60	SD NEGERI 21 DANGIN PURI	DENUT	011.01.05.00620-2	13.200.385,50	169.639.614,00	182.518.500,00	321.499,50
61	SD NEGERI 21 PEMECUTAN	DENUT	039.01.05.00026-1	0,31	379.720.000,00	379.720.000,00	0,31
62	SD NEGERI 22 DAUH PURI	DENUT	028.01.05.00030-4	133,71	590.659.866,00	590.659.579,00	420,71
63	SD NEGERI 23 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00028-8	3.500.000,06	345.820.000,00	349.298.163,00	21.837,06
64	SD NEGERI 24 PEMECUTAN	DENUT	039.01.05.00032-5	1.541.022,38	369.458.884,00	370.935.695,00	64.211,38
65	SD NEGERI 28 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00025-5	23.550.000,81	373.895.000,00	397.445.000,00	0,81
66	SD NEGERI 29 PEMECUTAN	DENUT	011.01.05.00621-7	5.200.000,68	495.360.000,00	500.560.000,00	0,68
67	SD NEGERI 3 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00031-7	0,76	307.399.999,00	307.387.236,00	12.763,76
68	SD NEGERI 3 TONJA	DENUT	028.01.05.00033-1	0,20	220.480.000,00	220.480.000,00	0,20
69	SD NEGERI 3 UBUNG	DENUT	050.01.05.00008-9	0,89	394.320.000,00	394.320.000,00	0,89
70	SD NEGERI 33 DANGIN PURI	DENUT	037.01.05.00025-2	115.101,68	375.124.899,00	374.838.278,00	401.722,68
71	SD NEGERI 4 DAUH PURI	DENUT	039.01.05.00034-9	0,39	241.680.000,00	241.680.000,00	0,39
72	SD NEGERI 4 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00031-6	0,25	222.600.000,00	222.600.000,00	0,25
73	SD NEGERI 4 PEMECUTAN	DENUT	039.01.05.00028-4	0,20	393.260.000,00	393.260.000,00	0,20
74	SD NEGERI 4 TONJA	DENUT	028.01.05.00032-0	1.353.003,24	477.766.997,00	479.120.000,00	0,24
75	SD NEGERI 4 UBUNG	DENUT	050.01.05.00002-7	40,61	408.983.902,00	408.983.942,00	0,61
76	SD NEGERI 5 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00040-0	1.540,34	414.698.460,00	413.295.470,00	1.404.530,34
77	SD NEGERI 5 TONJA	DENUT	028.01.05.00030-3	8.700.000,85	523.060.000,00	531.760.000,00	0,85
78	SD NEGERI 5 UBUNG	DENUT	050.01.05.00007-7	0,26	389.260.000,00	389.260.000,00	0,26

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
79	SD NEGERI 6 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00030-8	0,69	226.840.000,00	226.840.000,00	0,69
80	SD NEGERI 6 UBUNG	DENUT	050.01.05.00003-9	600.000,68	407.800.000,00	408.399.942,00	58,68
81	SD NEGERI 7 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00031-0	1.400.324,66	227.559.675,00	226.953.169,00	2.006.830,66
82	SD NEGERI 8 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00030-1	210.109,78	327.329.890,00	327.539.999,00	0,78
83	SD NEGERI 8 PEMECUTAN	DENUT	039.01.05.00018-0	42.564,57	303.357.435,00	293.263.719,00	10.136.280,57
84	SD NEGERI 9 DAUH PURI	DENUT	039.01.05.00020-8	307.013,37	400.372.987,00	400.680.000,00	0,37
85	SD NEGERI 9 PEGUYANGAN	DENUT	028.01.05.00032-9	0,20	222.600.000,00	222.005.500,00	594.500,20
86	SD NEGERI TULANGAMPIANG	DENUT	011.01.05.00620-4	32.500,91	645.747.500,00	645.780.000,00	0,91
87	SD NEGERI 1 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00620-3	301.027,46	523.338.973,00	523.447.426,00	192.574,46
88	SD NEGERI 1 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00015-5	45.679,79	394.274.320,00	394.314.906,00	5.093,79
89	SD NEGERI 10 DAUH PURI	DENBAR	039.01.05.00027-2	40.930,27	200.299.070,00	197.523.518,00	2.816.482,27
90	SD NEGERI 10 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00621-5	13.400.000,08	365.980.000,00	376.338.350,00	3.041.650,08
91	SD NEGERI 10 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00030-0	10.100.089,78	425.700.000,00	435.800.000,00	89,78
92	SD NEGERI 11 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00013-5	1.385.714,61	184.114.285,00	184.926.204,00	573.795,61
93	SD NEGERI 11 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00621-4	19.100.150,59	635.239.849,00	654.245.000,00	94.999,59
94	SD NEGERI 11 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00022-2	11.213.698,60	456.806.469,00	468.018.696,00	1.471,60
95	SD NEGERI 12 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00013-4	8.800.000,56	223.900.000,00	227.900.000,00	4.800.000,56
96	SD NEGERI 12 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00620-9	164.552,12	443.975.448,00	443.489.341,00	650.659,12
97	SD NEGERI 13 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00012-9	0,89	196.100.000,00	196.100.000,00	0,89
98	SD NEGERI 13 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00005-2	1.526.023,86	376.893.976,00	376.296.476,00	2.123.523,86
99	SD NEGERI 14 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00012-2	2.500,41	196.097.500,00	196.099.430,00	570,41
100	SD NEGERI 14 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00620-5	49.999,90	483.310.000,00	483.358.283,00	1.716,90
101	SD NEGERI 15 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00013-6	0,32	206.700.000,00	206.700.000,00	0,32
102	SD NEGERI 15 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00011-7	3.199.999,13	193.960.000,00	196.503.904,00	656.095,13
103	SD NEGERI 16 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00017-9	3.500.000,51	257.140.000,00	260.640.000,00	0,51
104	SD NEGERI 17 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00622-2	50,95	269.181.450,00	269.181.500,00	0,95
105	SD NEGERI 17 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00008-8	218.937,97	382.441.062,00	377.714.468,00	4.945.531,97
106	SD NEGERI 18 PADANGSAMBIAN	DENBAR	029.01.05.00012-1	17.209.909,76	393.070.091,00	409.252.305,00	1.027.695,76

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
107	SD NEGERI 19 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00012-4	6.800.000,73	196.340.000,00	203.140.000,00	0,73
108	SD NEGERI 19 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00007-6	-	660.260.474,70	660.250.000,00	10.474,70
109	SD NEGERI 2 DAUH PURI	DENBAR	039.01.05.00019-3	0,15	205.640.000,00	205.640.000,00	0,15
110	SD NEGERI 2 PADANG SAMBIAN	DENBAR	050.01.05.00004-0	8.800.000,99	432.720.000,00	441.471.902,00	48.098,99
111	SD NEGERI 2 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00010-5	5.162.909,87	402.917.091,00	406.232.870,00	1.847.130,87
112	SD NEGERI 21 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00011-8	0,81	180.200.000,00	180.200.000,00	0,81
113	SD NEGERI 23 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00031-3	6.962.698,01	340.997.302,00	347.749.108,00	210.892,01
114	SD NEGERI 24 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00011-9	1.597.500,32	347.282.500,00	347.602.000,00	1.278.000,32
115	SD NEGERI 25 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00013-0	40.052,39	342.134.247,00	341.954.500,00	219.799,39
116	SD NEGERI 26 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00016-7	4.500.000,00	707.260.000,00	711.760.000,00	-
117	SD NEGERI 27 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00014-3	0,29	656.140.000,00	656.140.000,00	0,29
118	SD NEGERI 3 PADANG SAMBIAN	DENBAR	029.01.05.00012-8	11.541.706,64	364.872.893,00	372.800.000,00	3.614.599,64
119	SD NEGERI 3 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00025-8	75.750,50	415.444.250,00	388.377.977,50	27.142.023,00
120	SD NEGERI 32 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00021-1	2.688.813,61	331.334.351,00	333.599.870,00	423.294,61
121	SD NEGERI 5 DAUH PURI	DENBAR	029.01.05.00013-2	8.800.000,52	188.920.000,00	197.652.840,00	67.160,52
122	SD NEGERI 5 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00621-2	227,69	623.279.772,00	622.947.432,00	332.567,69
123	SD NEGERI 6 DAUH PURI	DENBAR	039.01.05.00033-7	0,60	215.180.000,00	215.176.000,00	4.000,60
124	SD NEGERI 6 PADANGSAMBIAN	DENBAR	029.01.05.00013-3	6.499,99	363.573.500,00	363.579.890,00	109,99
125	SD NEGERI 7 DAUH PURI	DENBAR	039.01.05.00006-4	0,09	398.560.000,00	398.559.747,00	253,09
126	SD NEGERI 7 PEMECUTAN	DENBAR	039.01.05.00024-6	10.500.000,08	369.420.000,00	379.790.400,00	129.600,08
127	SD NEGERI 8 DAUH PURI	DENBAR	039.01.05.00009-1	5.904.655,65	612.435.360,00	567.498.180,00	50.841.835,65
128	SD NEGERI 8 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00621-3	0,69	573.460.000,00	572.660.000,00	800.000,69
129	SD NEGERI 9 PADANG SAMBIAN	DENBAR	011.01.05.00620-7	5.400.183,90	696.419.817,00	701.820.000,00	0,90
130	SD NEGERI 1 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00019-7	17.133.689,58	447.826.310,00	461.686.337,00	3.273.662,58
131	SD NEGERI 1 PENATIH	DENTIM	028.01.05.00029-6	0,16	340.500.000,00	340.500.000,00	0,16
132	SD NEGERI 1 KESIMAN	DENTIM	037.01.05.00023-3	26.000,12	381.574.000,00	381.580.140,00	19.860,12
133	SD NEGERI 10 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00003-2	0,31	396.440.051,78	396.440.000,00	52,09
134	SD NEGERI 10 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00015-9	0,86	280.900.000,00	280.888.216,00	11.784,86

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
135	SD NEGERI 11 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00003-3	1.400.464,48	199.999.536,00	201.398.221,00	1.779,48
136	SD NEGERI 11 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00024-1	1.076.809,02	206.683.191,00	207.273.724,00	486.276,02
137	SD NEGERI 12 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00003-4	-	279.840.000,00	279.840.000,00	-
138	SD NEGERI 13 KESIMAN	DENTIM	037.01.05.00019-0	5.131.269,97	325.588.730,00	330.713.290,00	6.709,97
139	SD NEGERI 14 DANGIN PURI	DENTIM	037.01.05.00018-8	9.891,65	218.350.108,00	218.258.220,00	101.779,65
140	SD NEGERI 14 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00004-3	1.602.694,14	198.732.570,00	200.312.673,00	22.591,14
141	SD NEGERI 15 DANGIN PURI	DENTIM	037.01.05.00012-3	1.818.329,99	192.161.670,00	193.979.627,00	372,99
142	SD NEGERI 16 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00003-9	0,52	345.800.000,00	345.508.506,00	291.494,52
143	SD NEGERI 17 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00004-2	7.010,58	405.972.990,00	405.980.000,00	0,58
144	SD NEGERI 19 DANGIN PURI	DENTIM	037.01.05.00020-2	0,41	166.420.000,00	166.420.000,00	0,41
145	SD NEGERI 2 KESIMAN	DENTIM	037.01.05.00024-8	8.424.566,80	295.415.434,00	303.840.000,00	0,80
146	SD NEGERI 2 PENATIH	DENTIM	037.01.05.00022-2	4.303.909,88	395.136.091,00	399.413.430,00	26.570,88
147	SD NEGERI 2 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00010-9	0,10	194.220.000,00	194.216.789,00	3.211,10
148	SD NEGERI 22 DANGIN PURI	DENTIM	037.01.05.00021-4	1.009,85	181.258.990,00	181.253.500,00	6.499,85
149	SD NEGERI 26 DANGIN PURI	DENTIM	037.01.05.00022-6	9.200.092,40	348.379.908,00	357.579.548,00	452,40
150	SD NEGERI 29 DANGIN PURI	DENTIM	037.01.05.00017-3	115,65	396.439.885,00	396.440.000,00	0,65
151	SD NEGERI 3 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00004-5	7.789.990,43	410.490.010,00	393.005.570,00	25.274.430,43
152	SD NEGERI 3 PENATIH	DENTIM	028.01.05.00031-8	16.590,66	213.043.410,00	213.059.982,00	18,66
153	SD NEGERI 4 PENATIH	DENTIM	045.01.05.00004-1	2.458.800,40	356.636.200,00	359.092.100,00	2.900,40
154	SD NEGERI 4 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00017-7	45.000,45	205.595.000,00	204.135.608,00	1.504.392,45
155	SD NEGERI 5 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00003-5	10.379.060,16	210.207.440,00	220.586.500,00	0,16
156	SD NEGERI 5 PENATIH	DENTIM	028.01.05.00030-7	0,24	294.920.000,00	294.920.000,00	0,24
157	SD NEGERI 5 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00018-5	5.300.000,36	368.560.000,00	373.860.000,00	0,36
158	SD NEGERI 6 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00003-7	300,61	344.499.699,00	344.499.998,00	1,61
159	SD NEGERI 6 PENATIH	DENTIM	028.01.05.00029-5	13.000,18	228.127.000,00	228.120.000,00	20.000,18
160	SD NEGERI 6 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00017-5	16.055,50	201.383.944,00	201.310.104,00	89.895,50
161	SD NEGERI 7 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00004-0	18.657.495,02	354.682.505,00	373.340.000,00	0,02
162	SD NEGERI 7 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00016-0	931,18	201.399.069,00	201.400.000,00	0,18

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
163	SD NEGERI 8 KESIMAN	DENTIM	037.01.05.00024-4	5.250.000,50	275.629.922,00	280.879.922,00	0,50
164	SD NEGERI 8 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00018-9	0,23	182.320.000,00	182.320.000,00	0,23
165	SD NEGERI 9 KESIMAN	DENTIM	045.01.05.00004-4	11.102,25	205.868.898,00	205.874.750,00	5.250,25
166	SD NEGERI 9 SUMERTA	DENTIM	037.01.05.00020-0	239.728,04	207.520.272,00	207.285.384,00	474.616,04
	JUMLAH			466.040.989,72	59.345.047.480,97	59.533.457.840,50	277.630.630,19



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KAS DANA BOSP - SMP NEGERI
PER 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 + 6) - 7
1	SMP NEGERI 1 DENPASAR	DENPASAR	037.01.05.00021-2	45.022.819	1.292.402.182,00	1.236.820.236,00	100.604.764,72
2	SMP NEGERI 2 DENPASAR	DENPASAR	011.01.05.00620-6	20.404.530	1.818.296.065,68	1.838.597.891,00	102.704,79
3	SMP NEGERI 3 DENPASAR	DENPASAR	037.01.05.00023-8	29.126.900	1.457.200.000,00	1.437.986.300,00	48.340.600,01
4	SMP NEGERI 4 DENPASAR	DENPASAR	011.01.05.00621-8	19.638.903	1.579.161.098,00	1.587.316.297,00	11.483.703,95
5	SMP NEGERI 5 DENPASAR	DENPASAR	028.01.05.00030-6	59.271.909	1.127.408.092,00	1.185.600.000,00	1.080.001,45
6	SMP NEGERI 6 DENPASAR	DENPASAR	049.01.05.00006-8	10.055.577	1.799.744.423,00	1.803.607.500,00	6.192.500,05
7	SMP NEGERI 7 DENPASAR	DENPASAR	039.01.05.00012-9	6.911.959	1.479.306.642,00	1.481.542.300,00	4.676.300,71
8	SMP NEGERI 8 DENPASAR	DENPASAR	037.01.05.00045-8	27.127.470	1.370.144.530,00	1.397.255.385,00	16.615,26
9	SMP NEGERI 9 DENPASAR	DENPASAR	027.01.05.00011-9	3.087.950	1.386.812.237,00	1.388.400.000,00	1.500.186,61
10	SMP NEGERI 10 DENPASAR	DENPASAR	028.01.05.00029-1	18.629.714	1.502.470.619,05	1.520.780.026,00	320.306,56
11	SMP NEGERI 11 DENPASAR	DENPASAR	049.01.05.00013-5	5.656.894	1.135.443.106,00	1.141.027.240,00	72.759,54
12	SMP NEGERI 12 DENPASAR	DENPASAR	028.01.05.00030-2	788.000	1.407.112.000,00	1.407.891.711,00	8.289,14
13	SMP NEGERI 13 DENPASAR	DENPASAR	011.01.05.00631-5	8.299.800	1.112.700.200,00	1.116.606.500,00	4.393.500,00
14	SMP NEGERI 14 DENPASAR	DENPASAR	037.01.05.00004-4	4.500.000	1.251.900.000,00	1.256.400.000,00	-
15	SMP NEGERI 15 DENPASAR	DENPASAR	011.01.05.00646-8	5.861	1.046.394.139,00	1.043.829.000,00	2.571.000,00
16	SMP NEGERI 16 DENPASAR	DENPASAR	049.01.05.00018-5	5.035.120	709.964.880,00	714.909.184,00	90.816,00
	JUMLAH			263.563.405,06	21.476.460.213,73	21.558.569.570,00	181.454.048,79



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KAS DANA BOSP - DANA BOP PAUD DAN KESETARAAN
PER 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Awal BOSP Tahun 2025	Pendapatan BOSP Tahun 2025	Belanja BOSP Tahun 2025	Saldo Akhir Kas BOSP Per 31 Desember 2025
1	2	4	5	6	7	8= (5 + 6) - 7
1	TK SPNF SKB KOTA DENPASAR	011.01.05.00346-6	-	85.910.000,00	85.910.000,00	-
2	KB SPNF SKB KOTA DENPASAR	011.01.05.00341-6	-	12.780.000,00	3.616.500,00	9.163.500,00
3	TK NEGERI PEMBINA DENPASAR	011.01.05.00129-8	-	90.170.000,00	90.163.500,00	6.500,00
4	TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA	011.01.05.00185-8	-	56.090.000,00	56.083.500,00	6.500,00
5	SPNF SKB KOTA DENPASAR	011.01.05.00374-0	24.996.500	451.511.000,00	272.827.100,00	203.680.400,00
	JUMLAH		24.996.500,00	696.461.000,00	508.600.600,00	212.856.900,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KAS DANA BOK PUSKESMAS
PER 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Awal Dana BOK Tahun 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7= 4+5-6
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	1590081669	296.869.836,00	346.019.164,00	586.556.621,00	56.332.379,00
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	1590081692	213.216.223,00	496.983.777,00	617.537.753,00	92.662.247,00
3	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Utara	1590081658	233.416.551,00	273.682.449,00	475.874.901,00	31.224.099,00
4	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	1590081614	192.339.147,00	309.009.853,00	475.057.909,00	26.291.091,00
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	1590081647	182.120.311,00	421.463.689,00	589.196.579,00	14.387.421,00
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	1590081625	190.961.325,00	353.908.675,00	529.815.552,00	15.054.448,00
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	1590081636	207.756.670,00	358.883.330,00	554.448.890,00	12.191.110,00
8	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	1590081603	155.472.295,00	257.528.705,00	398.926.332,00	14.074.668,00

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Awal Dana BOK Tahun 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7= 4+5-6
9	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	1590081591	254.601.241,00	99.531.759,00	287.993.614,00	66.139.386,00
10	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	1590081681	153.854.137,00	428.889.863,00	548.667.809,00	34.076.191,00
11	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	1590081670	295.057.486,00	306.090.514,00	506.682.562,00	94.465.438,00
Jumlah			2.375.665.222,00	3.651.991.778,00	5.570.758.522,00	456.898.478,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Jenis Pajak	Saldo Akhir Pokok per 31 Desember 2024	Penyesuaian Pokok	Penghapusan Piutang	Saldo Pokok Setelah Penyesuaian	Ketetapan Pokok	Pembayaran Pokok	Piutang Pokok per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8	9	10 = (7+8-9)
1	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Jasa Perhotelan	23.098.743.593,79	248.144.242,20	-	23.346.887.835,99	296.639.720.993,00	279.161.859.571,20	40.824.749.257,79
		PBJT hotel	19.740.806.042,21	264.279.842,20	-	20.005.085.884,41	267.685.603.551,00	251.271.595.026,20	36.419.094.409,21
		PBJT pondok wisata	400.189.442,00	-	-	400.189.442,00	3.416.708.108,00	3.352.292.882,00	464.604.668,00
		PBJT wisma pariwisata	2.957.748.109,58	(16.135.600,00)	-	2.941.612.509,58	25.537.409.334,00	24.537.971.663,00	3.941.050.180,58
2	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	28.397.701.855,21	(25.033.361,70)	-	28.372.668.493,51	424.175.845.532,08	404.469.313.314,96	48.079.200.710,63
		PBJT Restoran	28.383.399.724,21	(27.883.261,70)	-	28.355.516.462,51	420.078.124.698,08	400.437.208.730,96	47.996.432.429,63
		PBJT penyedia Jasa Boga/ Katering	14.302.131,00	2.849.900,00	-	17.152.031,00	4.097.720.834,00	4.032.104.584,00	82.768.281,00
3	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	948.409.739,70	(18.440.766,00)	-	929.968.973,70	59.555.458.485,10	57.690.848.342,10	2.794.579.116,70
		PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.275.454,00	-	-	3.275.454,00	14.911.026.859,00	14.911.026.859,00	3.275.454,00
		PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	13.389.501,00	-	-	13.389.501,00	5.922.379.883,00	5.922.379.883,00	13.389.501,00
		PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	237.861.372,80	-	-	237.861.372,80	17.940.829.537,10	17.102.724.409,10	1.075.966.500,80
		PBJT-Paniti Pijat dan Pijat Refleksi	271.536.093,40	(18.440.766,00)	-	253.095.327,40	4.285.002.214,00	3.813.362.524,00	724.735.017,40
		PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	422.347.318,50	-	-	422.347.318,50	16.496.219.992,00	15.941.354.667,00	977.212.643,50
4	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Air Tanah	8.919.927.667,00	125.064.384,00	-	9.044.992.051,00	8.846.774.454,00	8.806.470.894,00	9.085.295.611,00
5	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	154.218.316,50	102.810.744,00	-	257.029.060,50	6.027.488.823,82	5.942.623.658,52	341.894.225,80
6	Badan Pendapatan Daerah	PBB P2	585.393.214.584,00	(1.768.364.034,00)	-	583.624.850.550,00	160.547.091.360,00	130.534.054.824,00	613.637.887.086,00
7	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.010.022.291,00	(216.000,00)	-	4.009.806.291,00	8.589.361.670,00	7.825.057.595,00	4.774.110.366,00
		Jumlah	650.922.238.047,20	(1.336.034.791,50)	-	649.586.203.255,70	964.381.741.318,00	894.430.228.199,78	719.537.716.373,92

No	SKPD	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Pokok per 31 Desember 2025	Piutang Bersih Per 31 Desember 2025
			Macet > 5 tahun (100%)	Diragukan > 2 tahun (50%)	Kurang Lancar 1 - 2 tahun (10%)	Lancar < 1 tahun (0,5%)		
1	2	3	11	12	13	14	15 = (11+12+13+14)	16 = (10-15)
1	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Jasa Perhotelan	8.423.826.782,40	832.342.534,61	694.385.830,52	118.961.895,51	10.069.517.043,04	30.755.232.214,75
		PBJT hotel	7.185.231.899,00	205.683.449,61	666.183.488,50	110.803.303,63	8.167.902.140,74	28.251.192.268,47
		PBJT pondok wisata	290.924.496,00	49.296.602,00	1.570.510,00	296.909,34	342.088.517,34	122.516.150,66
		PBJT wisma pariwisata	947.670.387,40	577.362.483,00	26.631.832,02	7.861.682,54	1.559.526.384,96	2.381.523.795,62
2	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.743.081.495,61	1.055.478.617,40	573.487.193,60	167.451.450,22	8.539.498.756,83	39.539.701.953,80
		PBJT Restoran	6.673.716.845,61	1.049.304.051,90	573.385.943,60	167.451.240,22	8.463.858.081,33	39.532.574.348,30
		PBJT penyedia Jasa Boga/ Katering	69.364.650,00	6.174.565,50	101.250,00	210,00	75.640.675,50	7.127.605,50
3	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	409.785.480,50	41.016.017,60	24.189.762,40	10.304.319,89	485.295.580,39	2.309.283.536,31
		PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.275.454,00	-	-	-	3.275.454,00	-
		PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	13.389.500,00	0,50	-	-	13.389.500,50	0,50
	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	40.498.042,60	7.051.849,60	12.636.413,70	4.475.003,11	64.661.309,01	1.011.305.191,79
		PBJT-Paniti Pijat dan Pijat Refleksi	167.685.595,40	36.467.775,00	647.418,20	2.388.198,45	207.188.987,05	517.546.030,35
		PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	184.936.888,50	(2.503.607,50)	10.905.930,50	3.441.118,33	196.780.329,83	780.432.313,67
4	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Air Tanah	6.550.349.853,00	1.099.292.973,00	13.398.905,00	1.011.853,81	7.664.053.584,81	1.421.242.026,19
5	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	20.021.422,50	-	10.965.648,60	1.061.081,59	32.048.152,69	309.846.073,11
6	Badan Pendapatan Daerah	PBB P2	332.625.415.518,00	60.053.949.564,50	9.515.531.726,70	328.746.275,86	402.523.643.085,06	211.114.244.000,94
7	Badan Pendapatan Daerah	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.701.091.400,00	590.851.700,00	101.325.074,60	4.390.324,10	2.397.658.498,70	2.376.451.867,30
		Jumlah	356.473.571.952,01	63.672.931.407,11	10.933.284.141,42	631.927.200,98	431.711.714.701,52	287.826.001.672,40



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	Unit SKPD	Jenis Piutang	Saldo Akhir Piutang (per 31 Desember 2024)	Koreksi Saldo Awal Piutang	Saldo Awal (per 31 Desember 2024) setelah koreksian	Penambahan per 31 Desember 2025	Pengurangan per 31 Desember 2025	Total Piutang per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	Piutang BPJS	-	-	-	7.926.300,00	-	7.926.300,00
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	Piutang BPJS	-	-	-	3.830.000,00	-	3.830.000,00
3	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	Piutang BPJS	-	-	-	5.369.200,00	-	5.369.200,00
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	Piutang BPJS	-	-	-	10.790.000,00	-	10.790.000,00
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	Piutang BPJS	-	-	-	934.200,00	-	934.200,00
6	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	Piutang BPJS	-	-	-	8.921.300,00	-	8.921.300,00
7	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	Piutang BPJS	-	-	-	20.168.400,00	-	20.168.400,00
8	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	Piutang BPJS	-	-	-	985.000,00	-	985.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang Umum	5.287.471.550,81	3.923.905,80	5.291.395.456,61	7.348.364.472,39	7.256.566.367,39	5.383.193.561,61
10	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang IKS	3.122.117.750,59	(1.881.918,50)	3.120.235.832,09	5.672.377.920,30	5.611.274.327,11	3.181.339.425,28
11	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang BPJS	8.406.239.230,00	-	8.406.239.230,00	118.477.024.393,00	119.348.247.423,00	7.535.016.200,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang Covid-19	2.324.994.900,00	694.642.700,00	3.019.637.600,00	-	3.019.637.600,00	-
		Jumlah	19.140.823.431,40	696.684.687,30	19.837.508.118,70	131.556.691.185,69	135.235.725.717,50	16.158.473.586,89

No	Unit SKPD	Jenis Piutang	Kualitas Piutang (Berdasarkan Umur Piutang)				Total Penyisihan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Piutang Bersih per 31 Desember 2025 (Rp)
			Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)		
			S.d. 1 Bulan	didas 1 s.d. 3 bulan	didas 3 s.d. 12 bulan	Lebih dari 12 bulan		
			0,5%	10%	50%	100%		
1	2	3	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=9-14
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Barat	Piutang BPJS	37.646,00	39.710,00	-	-	77.356,00	7.848.944,00
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat	Piutang BPJS	19.150,00	-	-	-	19.150,00	3.810.850,00
3	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Utara	Piutang BPJS	14.360,50	249.710,00	-	-	264.070,50	5.105.129,50
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	Piutang BPJS	53.950,00	-	-	-	53.950,00	10.736.050,00
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	Piutang BPJS	2.285,50	47.710,00	-	-	49.995,50	884.204,50
6	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	Piutang BPJS	44.606,50	-	-	-	44.606,50	8.876.693,50
7	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur	Piutang BPJS	70.296,00	610.920,00	-	-	681.216,00	19.487.184,00
8	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur	Piutang BPJS	4.925,00	-	-	-	4.925,00	980.075,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang Umum	166.191,22	4.267.823,99	156.126.990,42	4.995.023.097,21	5.155.584.102,84	227.609.458,77
10	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang IKS	1.145.904,94	33.368.153,36	634.638.060,21	1.349.200.784,29	2.018.352.902,80	1.162.986.522,48
11	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang BPJS	37.675.081,00	-	-	-	37.675.081,00	7.497.341.119,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Piutang Covid-19	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	39.234.396,66	38.584.027,35	790.765.050,63	6.344.223.881,50	7.212.807.356,14	8.945.666.230,75

9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Jenis Piutang Retribusi				Total Piutang per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan	Piutang Bersih per 31 Desember 2025
			Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan / Penghapusan 2025		Macet bulan (100%) >12	Diragukan >3 bulan (50%)	Kurang Lancar >1 bulan (10%)	Lancar bulan (0,5%) < 1		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5-6)	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=7-12
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	43.150.000,00			43.150.000,00	43.150.000,00				43.150.000,00	-
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (dari PDAM)	114.468.000,00		114.468.000,00	-					-	-
3	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	148.932.700,00	185.675.760,00	233.316.530,00	101.291.930,00	94.597.430,00	2.385.000,00	150.450,00	2.100,00	97.134.980,00	4.156.950,00
Jumlah			306.550.700,00	185.675.760,00	347.784.530,00	144.441.930,00	137.747.430,00	2.385.000,00	150.450,00	2.100,00	140.284.980,00	4.156.950,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Jenis Piutang	Piutang Pokok					Total Piutang per 31 Desember 2025
			Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Piutang Setelah Koreksi	Penambahan 2025	Pengurangan / Penghapusan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Hasil Sewa BMD Sewa Kantin UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	-	-	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Hasil Sewa BMD Sewa Kantin UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	-	-	-	440.000,00	-	440.000,00
Jumlah			-	-	-	2.106.666,67	-	2.106.666,67

No	SKPD	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan per 31 Desember 2025	Piutang Bersih per 31 Desember 2025
			Macet >12 bulan (100%)	Diragukan >3 bulan (50%)	Kurang Lancar >1 bulan (10%)	Lancar < 1 bulan (0,5%)		
1	2	3	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=9-14
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Hasil Sewa BMD Sewa Kantin UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan	-	500.000,00	50.000,00	833,33	550.833,33	1.115.833,34
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Hasil Sewa BMD Sewa Kantin UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Denpasar Utara	-	120.000,00	12.000,00	200,00	132.200,00	307.800,00
Jumlah			-	620.000,00	62.000,00	1.033,33	683.033,33	1.423.633,34



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Jenis Pajak	Saldo Akhir Denda per 31 Desember 2024	Penyesuaian Denda	Penghapusan Denda	Saldo Denda Setelah Penyesuaian	Ketetapan Denda	Pembayaran Denda	Piutang Denda per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8	9	10 = (7+8-9)
1	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Jasa Perhotelan	10.387.984.538,40	(2.815.183.604,00)	-	7.572.800.934,40	3.589.352.556,00	221.677.463,00	10.940.476.027,40
		Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	8.220.159.504,42	(2.575.521.753,00)		5.644.637.751,42	3.113.864.636,00	116.143.204,00	8.642.359.183,42
		Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	284.343.174,00	(8.469.467,00)		275.873.707,00	87.444.859,00	37.008.321,00	326.310.245,00
		Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	1.883.481.859,98	(231.192.384,00)		1.652.289.475,98	388.043.061,00	68.525.938,00	1.971.806.598,98
2	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.218.284.530,86	(2.833.677.495,00)	-	6.384.607.035,86	5.278.389.027,00	342.358.204,00	11.320.637.858,86
		Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	9.209.428.728,86	(2.833.677.495,00)		6.375.751.233,86	5.277.922.720,00	341.999.799,00	11.311.674.154,86
		Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.855.802,00			8.855.802,00	466.307,00	358.405,00	8.963.704,00
3	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	511.678.719,62	(167.530.164,62)	-	344.148.555,00	552.462.043,00	60.649.326,00	835.961.272,00
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.972.665,00			7.972.665,00	10.575,00		7.983.240,00
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	38.819.075,00			38.819.075,00	291.182,00	291.182,00	38.819.075,00
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olamlaga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Permainan	146.485.307,00	(13.917.347,00)		132.567.960,00	298.952.859,00	24.250.742,00	407.270.077,00
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	118.860.451,00	(75.927.140,00)		42.933.311,00	124.095.497,00	2.612.616,00	164.416.192,00
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	199.541.221,62	(77.685.677,62)		121.855.544,00	129.111.930,00	33.494.786,00	217.472.688,00
4	Badan Pendapatan	Denda Pajak Air Tanah	1.743.871.954,00	(120.054.014,00)		1.623.817.940,00	70.811.014,00	4.781.980,00	1.689.846.974,00
5	Badan Pendapatan	Denda Pajak Reklame	10.092.356,00	(4.400.000,00)		5.692.356,00	209.992,00	3.418,00	5.898.930,00
6	Badan Pendapatan	Denda PBBP2	-			-			-
7	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.673.012.706,00	(121.662.955,00)		1.551.349.751,00	424.972.827,00	45.425.641,00	1.930.896.937,00
		Jumlah	23.544.924.804,88	(6.062.508.232,62)	-	17.482.416.572,26	9.916.197.459,00	674.896.032,00	26.723.717.999,26

No	SKPD	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Denda per 31 Desember 2025	Saldo Piutang Denda Setelah Penyisihan Per 31 Desember 2025
			Macet > 5 tahun (100%)	Diragukan > 2 tahun (50%)	Kurang Lancar 1 - 2 tahun (10%)	Lancar < 1 tahun (0,5%)		
1	2	3	11	12	13	14	15 = (11+12+13+14)	16 = (10-15)
1	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Jasa Perhotelan	8.900.173.044,40	893.179.013,00	25.394.495,70	-	9.818.746.553,10	1.121.729.474,30
		Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	6.775.073.453,42	835.375.562,00	19.653.460,60	-	7.630.102.476,02	1.012.256.707,40
		Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	286.871.493,00	11.718.487,00	1.600.177,80	-	300.190.157,80	26.120.087,20
		Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	1.838.228.097,98	46.084.964,00	4.140.857,30	-	1.888.453.919,28	83.352.679,70
2	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.051.330.651,86	1.382.898.419,00	50.350.851,90	9,25	9.484.579.932,01	1.836.057.926,85
		Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	8.042.439.833,86	1.382.872.875,50	50.348.672,00	9,25	9.475.661.390,61	1.836.012.764,25
		Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.890.818,00	25.543,50	2.179,90	-	8.918.541,40	45.162,60
3	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.831.924,00	157.936.105,00	1.925.713,80	-	660.693.742,80	175.267.529,20
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.972.665,00	5.287,50	-	-	7.977.952,50	5.287,50
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	38.819.075,00	-	-	-	38.819.075,00	-

9

Lampiran 10a
Hal. 2 dari 2

No	SKPD	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Denda per 31 Desember 2025	Saldo Piutang Denda Setelah Penyisihan Per 31 Desember 2025
			Macet > 5 tahun (100%)	Diragukan > 2 tahun (50%)	Kurang Lancar 1 - 2 tahun (10%)	Lancar < 1 tahun (0,5%)		
1	2	3	11	12	13	14	15 = (11+12+13+14)	16 = (10-15)
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kesehatan	171.000.613,00	116.013.581,00	424.230,20	-	287.438.424,20	119.831.652,80
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	129.035.507,00	14.914.215,00	555.225,50	-	144.504.947,50	19.911.244,50
		Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	154.004.064,00	27.003.021,50	946.258,10	-	181.953.343,60	35.519.344,40
4	Badan Pendapatan	Denda Pajak Air Tanah	1.657.368.476,00	13.767.926,00	494.264,60	-	1.671.630.666,60	18.216.307,40
5	Badan Pendapatan	Denda Pajak Reklame	-	1.357.590,50	297.375,70	1.049,96	1.656.016,16	4.242.913,84
6	Badan Pendapatan	Denda PBBP2	-	-	-	-	-	-
7	Badan Pendapatan	Denda PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.856.395.274,00	33.945.786,00	661.009,10	-	1.891.002.069,10	39.894.867,90
		Jumlah	20.966.099.370,26	2.483.084.839,50	79.123.710,80	1.059,21	23.528.308.979,77	3.195.409.019,49



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Jenis Piutang	Piutang Denda			Total Piutang per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan per 31 Desember 2025	Piutang Bersih per 31 Desember 2025
			Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan / Penghapusan 2025		Macet >12 bulan (100%)	Diragukan >3 bulan (50%)	Kurang Lancar >1 bulan (10%)	Lancar < 1 bulan (0,5%)		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5-6)	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=7-12
1	Dinas Perhubungan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	100.395.634,00		22.624.487,00	77.771.147,00	77.771.147,00	-	-	-	77.771.147,00	-
Jumlah			100.395.634,00	-	22.624.487,00	77.771.147,00	77.771.147,00	-	-	-	77.771.147,00	-



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN BLUD DARI HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Jenis Piutang	Piutang Pokok					Total Piutang per 31 Desember 2025
			Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Piutang Setelah Koreksi	Penambahan 2025	Pengurangan / Penghapusan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8
1	Dinas Kesehatan	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	11.412.454,17		11.412.454,17	83.442.712,50	11.412.454,17	83.442.712,50
Jumlah			11.412.454,17	-	11.412.454,17	83.442.712,50	11.412.454,17	83.442.712,50

No	SKPD	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan per 31 Desember 2025	Piutang Bersih per 31 Desember 2025
			Macet >12 bulan (100%)	Diragukan >3 bulan (50%)	Kurang Lancar >1 bulan (10%)	Lancar < 1 bulan (0,5%)		
1	2	3	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=9-14
1	Dinas Kesehatan	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	17.880.581,25	3.576.116,25	59.601,94	21.516.299,44	61.926.413,06
Jumlah			-	17.880.581,25	3.576.116,25	59.601,94	21.516.299,44	61.926.413,06



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama/NIP/TTL	Jabatan dan Unit Kerja	Status Pegawai	Jenis Kasus	Keterangan Jenis Kasus	Tahun Kejadian	Nilai Kasus	Nilai Angsuran	Sisa Angsuran	Belum Ditindakanjuti	Total Piutang TGR 2025	Penyisihan Piutang TGR	Piutang Bersih 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tuntutan Perbendaharaan (TP)												
1	I Wayan Renda / 19681222 199403 1 005 / Badung, 22 Desember 1964	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar	Diberhentikan dengan tidak hormat	Pajak/Retribusi Tidak Disetor	Penggelapan Pajak Reklame	2009	1.290.557.591,00	#####	#####	0,00	897.130.991,00	(897.130.991,00)	0,00
	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)												
2	A.A. Ngurah Oka Yuda	-	Non Pegawai	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Kerugian Daerah	2009	405.566.000,00	0,00	0,00	405.566.000,00	405.566.000,00	(405.566.000,00)	0,00
	Jumlah						1.696.123.591,00	#####	#####	405.566.000,00	1.302.696.991,00	(1.302.696.991,00)	0,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BEBAN DIBAYAR DIMUKA - SEWA
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTRAK	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DIBAYARKAN		SEWA DIBAYAR DIMUKA (Rp)	
							KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DESEMBER 2025/BULAN	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=9X10	12=7-10	13=9X12
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	Jalan Gatot Subroto IV / J Denpasar	500.17.2/6399/DPUPR	1 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026	24	20.000.000,00	833.333,33	18	15.000.000,00	6	5.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	Jalan Gatot Subroto VII/ H Denpasar	500.17.2/11547/DPUPR	7 Oktober 2024 s.d 7 Oktober 2028	48	100.000.000,00	2.083.333,33	15	31.250.000,00	33	68.750.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Sewa Gedung Arsip	Jalan Ahmad Yani, Peguyangan Denpasar Utara	000.3.2/833/DPMTSP/2025	10 Juni 2025 s.d 10 Juni 2026	12	108.000.000,00	9.000.000,00	7	63.000.000,00	5	45.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	Sewa Tanah Garase Mobil Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Jl. Kenyeri III Gang III No. 2 Denpasar	593.1/102/11/PPK/IX/2021	26 September 2021 s.d 26 September 2026	60	125.000.000,00	2.083.333,33	52	108.333.333,33	8	16.666.666,67
5	Sekretariat Daerah	Sewa Kendaraan Toyota Zenix G Hybird sejumlah 37 Unit	Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar	000.1.4/1398/Um	1 Oktober 2025 s.d 01 Oktober 2026	12	5.749.964.280,00	479.163.690,00	3	1.437.491.070,00	9	4.312.473.210,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Google Drive 2 Terra Bite	JL. Mataram No. 2 Denpasar	428/UP/XI/BKPSDM/2025	3 Nopember 2025 s.d 3 Nopember 2026	12	1.486.290,00	123.857,50	2	247.715,00	10	1.238.575,00
7	Kecamatan Denpasar Timur	Sewa Gedung Kelurahan Sumerta	Jl. WR. Supratman No. 109, Br. Abian Kapas Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur	Akta Nomor 05	26 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2034	120	2.262.500.000,00	18.854.166,67	17	320.520.833,33	103	1.941.979.166,67
		TOTAL					8.366.950.570,00	512.141.714,17		1.975.842.951,66		6.391.107.618,34



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BEBAN DIBAYAR DIMUKA - ASURANSI
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	JENIS ASURANSI	JUMLAH BARANG/UNIT	KONTRAK					YANG SUDAH DIBAYARKAN		ASURANSI DIBAYAR DIMUKA	
				NOMOR	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA (BULAN)	NILAI KESELURUHAN	NILAI PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DESEMBER 2025/BULAN	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=9X10	12=7-10	13=9X12
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Gedung Kantor Walikota Denpasar	1 unit Gedung Kantor Walikota	000.2.3.2/116/PPK/BMD/BPKAD/2025	30 Mei 2025 s.d 30 Mei 2026	12	188.017.385,00	15.668.115,42	7	109.676.807,92	5	78.340.577,08
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Gedung Kantor Dharma Negara Alaya Denpasar	1 unit Gedung Dharma Negara Alaya	000.2.3.2/388/PPK/BMD/BPKAD/2025	3 Desember 2025 s.d 3 Desember 2026	12	196.015.605,00	16.334.633,75	1	16.334.633,75	11	179.680.971,25
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Asuransi Pohon Perindang	-	No. Polis 10510082512000014	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	100.000.000,00	8.333.333,33	1	8.333.333,33	11	91.666.666,67
		TOTAL					484.032.990,00	40.336.082,50		134.344.775,00		349.688.215,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SISA PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025
				PEMBELIAN	PENERIMAAN HIBAH	PENGUNAAN	PENGELUARAN HIBAH	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	21.175.100,00		9.827.148.517,00	-	9.828.904.555,00	-	19.419.062,00
	Dinas Kesehatan	24.874.223.548,98		44.621.920.219,23	32.193.962.379,08	48.760.336.221,53	22.168.369.640,93	30.761.400.284,83
2	Dinas Kesehatan (Wangaya)	5.337.787.195,95	(2.943.629,12)	55.265.240.465,14	21.818.565,00	51.329.116.961,40	3.971.610.824,27	5.321.174.811,30
	Total Dinas Kesehatan	30.212.010.744,93	(2.943.629,12)	99.887.160.684,37	32.215.780.944,08	100.089.453.182,93	26.139.980.465,20	36.082.575.096,13
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.570.505.294,30		20.925.268.733,83	-	19.805.607.055,56	-	11.690.166.972,57
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	314.928.987,00		1.320.889.623,00	12.454.000,00	1.284.222.490,00	35.027.000,00	329.023.120,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	4.658.000,00		130.329.350.028,00	-	130.323.212.028,00	-	10.796.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.203.000,00		2.395.704.756,00	-	2.358.608.350,00	-	38.299.406,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	488.000,00		516.254.526,00	-	515.121.126,00	-	1.621.400,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	36.505.000,00		1.476.487.775,00	-	1.503.607.810,00	-	9.384.965,00
9	Dinas Sosial	240.000,00		2.746.597.426,00	3.614.854.267,00	2.746.428.426,00	3.398.766.267,00	216.497.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	5.134.000,00		694.000.218,00	-	698.101.118,00	-	1.033.100,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.600.000,00		1.319.762.528,00	-	1.322.062.528,00	-	2.300.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.508.845.600,00		41.473.289.764,00	-	42.915.394.486,21	-	7.066.740.877,79
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	384.709.950,00		1.954.963.488,00	-	1.734.206.500,00	-	605.466.938,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.715.500,00		572.586.095,00	-	574.038.595,00	-	5.263.000,00
15	Dinas Perhubungan	4.241.832.707,00		16.149.525.589,00	-	13.661.489.612,00	-	6.729.868.684,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	28.605.400,00		500.105.182,00	-	492.616.122,00	-	36.094.460,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.310.000,00		535.620.058,00	-	472.015.116,00	-	67.914.942,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.678.500,00		1.369.384.185,00	-	1.355.969.813,00	-	48.092.872,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.119.200,00		753.937.778,00	-	788.347.870,00	-	31.709.108,00
20	Dinas Kebudayaan	19.876.600,00		2.578.553.149,00	-	2.583.767.393,00	-	14.662.356,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.605.000,00		815.958.635,00	-	813.292.035,00	-	6.271.600,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	409.091.000,00		1.753.877.005,00	-	1.535.244.955,00	-	627.723.050,00
23	Dinas Pariwisata	5.296.563.591,00		842.989.719,00	-	5.987.493.052,00	-	152.060.258,00
24	Dinas Pertanian	52.340.300,00		8.519.280.996,00	-	8.479.064.401,00	-	92.556.895,00

NO.	SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SISA PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025
				PEMBELIAN	PENERIMAAN HIBAH	PENGUNAAN	PENGELUARAN HIBAH	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.243.550,00		903.988.337,27	-	912.662.387,27	-	5.569.500,00
26	Inspektorat	12.738.000,00		1.067.235.995,00	-	1.060.895.224,43	-	19.078.770,57
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	62.354.700,00		611.328.000,00	-	589.712.906,00	-	83.969.794,00
28	Badan Pendapatan Daerah	143.353.480,00		1.617.885.786,00	-	1.543.875.700,00	-	217.363.566,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.405.000,00		1.479.370.468,00	-	1.500.462.969,00	-	4.312.499,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.115.750,00		496.356.045,00	-	487.828.345,00	-	50.643.450,00
31	Sekretariat Daerah	297.152.693,00		25.497.038.058,35	-	25.535.160.667,71	-	259.030.083,64
32	Sekretariat DPRD	67.569.844,00		2.031.014.899,00	-	1.982.970.018,56	-	115.614.724,44
33	Kecamatan Denpasar Barat	28.346.298,00		5.543.108.974,00	-	5.534.117.768,00	-	37.337.504,00
34	Kecamatan Denpasar Timur	10.964.100,00		4.659.307.937,00	-	4.660.327.687,00	-	9.944.350,00
35	Kecamatan Denpasar Selatan	56.906.040,00		5.652.210.398,00	-	5.651.863.607,00	-	57.252.831,00
36	Kecamatan Denpasar Utara	22.185.500,00		4.159.506.614,00	-	4.156.054.218,00	-	25.637.896,00
TOTAL		61.012.076.429,23	- 2.943.629,12	402.977.047.969,82	35.843.089.211,08	405.484.200.117,67	29.573.773.732,20	64.771.296.131,14



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan-Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Angkutan	Suku Cadang Alat Besar	Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	6.442.782,00	-	2.951.000,00	500.000,00	-	2.670.900,00
	Dinas Kesehatan	607.725,00	6.828.015.603,36	929.983.000,00	5.828.102.620,22	-	-	3.203.278.158,67	-	409.317.171,81	-	273.767.077,00	27.960.000,00	237.641.484,00	128.710.733,00
2	Dinas Kesehatan (Wangaya)	-	-	18.880.000,00	-	-	-	-	-	12.540.050,00	-	12.005.500,00	-	-	-
	Total Dinas Kesehatan	607.725,00	6.828.015.603,36	948.863.000,00	5.828.102.620,22	-	-	3.203.278.158,67	-	421.857.221,81	-	285.772.577,00	27.960.000,00	237.641.484,00	128.710.733,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.905.600.537,57	-	391.050.000,00	-	-	-	88.800,00	43.895.200,00	-	2.431.700,00	970.000,00	55.950.000,00	-	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	89.182.944,00	4.698.300,00	-	-	17.166.000,00	-	117.000,00	-	19.217.800,00	-	980.000,00	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117.000,00	-	-	7.000.000,00	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	25.150.000,00	-	-	-	-	-	1.071.917,00	-	-	-	10.599.989,00	443.500,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	-	-	-	-	-	-	-	-	156.000,00	-	-	1.390.000,00	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	3.227.000,00	-	375.000,00	2.500.000,00	914.000,00	633.300,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000,00	-	150.000,00	50.000,00	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	116.000,00	-	17.100,00	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	2.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	3.161.693.640,00	-	1.519.164.134,00	446.173.892,00	-	-	22.306.877,68	-	11.533.990,25	7.700.000,00	225.941.867,61	1.137.855.801,60
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	477.000,00	-	-	-	-	57.403.932,00	-	127.037.100,00	14.840.000,00	402.074.906,00	1.061.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	1.573.500,00	-	810.000,00	150.000,00	-	-
15	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	12.525.000,00	-	-	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	7.153.795,00	-	3.632.447,00	5.000.000,00	15.635.011,00	2.587.008,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	3.700.000,00	-	-	-	-	-	223.000,00	-	63.741.942,00	250.000,00	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	1.150.000,00	-	-	-	-	18.645.900,00	1.197.000,00	2.916.972,00	1.410.000,00	21.205.000,00	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	10.600.000,00	-	-	-	-	-	2.339.300,00	-	4.119.905,00	400.000,00	5.480.002,00	4.974.500,00
20	Dinas Kebudayaan	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	4.075.650,00	-	250.006,00	-	4.025.000,00	1.846.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.760.000,00	-	-	500.000,00	2.351.600,00	160.000,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	2.550.000,00	108.590.000,00	-	-	-	-	2.018.500,00	-	470.000,00	920.000,00	4.176.200,00	-
23	Dinas Pariwisata	-	-	20.200.000,00	840.000,00	-	-	-	-	1.637.500,00	-	56.753.835,00	1.596.000,00	1.547.000,00	-
24	Dinas Pertanian	-	-	61.600.000,00	-	-	-	-	-	736.257,00	-	8.964.818,00	300.000,00	659.340,00	212.630,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	838.500,00	-	2.580.000,00	1.350.000,00	-	-
26	Inspektorat	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	7.928.165,00	-	-	-	8.522.738,57	1.062.933,00
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	62.730.000,00	-	-	-	-	-	11.017.476,00	-	3.945.000,00	2.720.000,00	2.833.830,00	-
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	119.850.000,00	-	-	-	-	-	26.074.410,00	-	33.221.150,00	930.000,00	30.748.006,00	1.375.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	1.400.000,00	-	-	-	-	-	1.032.600,00	-	348.000,00	150.000,00	337.839,00	257.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	7.700.000,00	-	-	-	-	-	3.752.627,00	-	25.687.090,00	400.000,00	8.210.819,00	193.141,00
31	Sekretariat Daerah	-	-	22.510.000,00	-	-	-	-	-	84.895.101,05	-	109.983.723,00	1.140.000,00	32.889.989,59	-
32	Sekretariat DPRD	-	-	2.900.000,00	1.445.000,00	-	-	-	-	18.029.730,50	-	9.499.750,00	2.800.000,00	35.674.920,00	5.153.272,94
33	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	16.689.200,00	-	-	-	-	-	2.631.000,00	-	521.811,00	-	1.815.000,00	25.530,00
34	Kecamatan Denpasar Timur	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	3.953.910,00	-	547.000,00	1.240.000,00	1.536.440,00	827.800,00
35	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	10.981.272,00	-	2.820.032,00	4.500.000,00	4.083.204,00	14.084.988,00
36	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	11.610.500,00	-	2.342.000,00	200.000,00	5.241.996,00	3.985.000,00
	TOTAL	2.906.208.262,57	6.828.015.603,36	4.965.768.784,00	5.945.602.920,22	1.519.164.134,00	446.173.892,00	3.220.444.158,67	88.800,00	793.354.624,04	1.197.000,00	779.591.748,25	88.050.000,00	1.119.218.981,77	1.313.843.237,54

NO.	Perangkat Daerah	Alat Listrik	Suvenir/Cendera Mata	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya (Obat Lainnya dan Obat Hibah)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Natura	Pakan	Perlengkapan Dinas (PDH, PDL, Pakaian Penyelamatan)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Persediaan Hibah)	TOTAL PERSEDIaan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	1.346.000,00	-	508.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.419.062,00
	Dinas Kesehatan	104.505.532,78	-	56.055.956,00	4.164.146.503,23	8.569.308.719,76	-	-	-	-	-	-	-	30.761.400.284,83
2	Dinas Kesehatan (Wangaya)	1.460.000,00	-	20.389.840,00	5.108.811.540,50	147.087.880,80	-	-	-	-	-	-	-	5.321.174.811,30
	Total Dinas Kesehatan	105.965.532,78	-	76.445.796,00	9.272.958.043,73	8.716.396.600,56	-	-	-	-	-	-	-	36.082.575.096,13
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	15.465.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.690.166.972,57
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	9.404.700,00	-	78.077.640,00	-	-	-	14.430.536,00	-	8.274.715.735,00	329.023.120,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	-	-	2.679.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.796.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	605.000,00	-	429.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.299.406,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	-	-	75.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.621.400,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	547.671,00	-	1.187.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.384.965,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.088.000,00	216.497.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.100,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.375.000,00	10.489.500,00	482.730.434,65	-	-	-	39.775.740,00	-	-	-	-	-	7.066.740.877,79
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	646.000,00	-	1.927.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605.466.938,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	262.000,00	-	467.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.263.000,00
15	Dinas Perhubungan	5.832.193.684,00	-	124.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	760.275.000,00	-	6.729.868.684,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	1.581.195,00	-	505.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.094.460,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.914.942,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	526.000,00	-	1.042.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.092.872,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.875.401,00	-	1.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.709.108,00
20	Dinas Kebudayaan	965.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.062.356,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.271.600,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	821.000,00	-	-	-	-	469.119.350,00	39.058.000,00	-	-	-	627.723.050,00
23	Dinas Pariwisata	3.436.005,00	66.049.918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.060.258,00
24	Dinas Pertanian	160.000,00	-	-	17.315.850,00	2.608.000,00	-	-	-	-	-	-	-	92.556.895,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.569.500,00
26	Inspektorat	1.064.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.078.770,57
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	144.488,00	-	579.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.969.794,00
28	Badan Pendapatan Daerah	3.525.000,00	-	1.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.363.586,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	135.000,00	-	162.060,00	-	-	-	-	-	-	490.000,00	-	-	4.312.499,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	633.366,00	-	675.657,00	-	-	-	-	-	-	3.390.750,00	-	-	50.643.450,00
31	Sekretariat Daerah	7.611.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.030.083,64
32	Sekretariat DPRD	8.465.801,00	31.607.250,00	39.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.614.724,44
33	Kecamatan Denpasar Barat	136.000,00	-	692.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.826.048,00	37.337.504,00
34	Kecamatan Denpasar Timur	908.000,00	-	31.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.944.350,00
35	Kecamatan Denpasar Selatan	1.058.385,00	-	12.078.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.346.240,00	57.252.831,00
36	Kecamatan Denpasar Utara	1.786.400,00	-	472.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.637.896,00
	TOTAL	5.976.953.832,78	108.146.668,00	727.449.050,65	9.299.678.593,73	8.719.004.600,56	78.077.640,00	39.775.740,00	469.119.350,00	39.058.000,00	18.311.286,00	760.275.000,00	8.608.724.223,00	64.771.296.131,14



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Surat Perjanjian				Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Dana Bergulir Tahun 2025 (Rp)	Pokok Dana Bergulir yang Ditarik Tahun 2024 (Rp)	Dana Bergulir Beredar 31 Desember 2025	Penyisihan	Saldo Akhir Dana Bergulir 31 Desember 2025
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Penerima						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10	11=9+10
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	10/KUD.MCK/XII/2006	15/12/2006	100.000.000,00	KUD Mina Cipta Karya	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
2	53/AS/XII/2006	15/12/2006	50.000.000,00	KSP Arta Sedana	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
3	7/KSU.GA/XII/2006	15/12/2006	50.000.000,00	KSU Guna Karya	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-
4	12/KSP.SKA/XII/2006	15/12/2006	50.000.000,00	KSP Sekar Karang Ayu	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-
5	29/KSPPJ/XII/2006	15/12/2006	50.000.000,00	KSP Purnadi Jaya	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
6	37/XII/WM/2006	15/12/2006	50.000.000,00	KSP Wahana Mandiri	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-
7	12/KSP.APD/XII/2006	15/12/2006	50.000.000,00	KSP Akshaya Patra Dana	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
8	117/KSP-UB/IV/2008	04/04/2008	50.000.000,00	KSP Usaha Bersama	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-
9	17/KASM/VI/2009	03/12/2009	50.000.000,00	KSU Arta Sastra Manungga	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	(21.000.000,00)	-
10	3/VI/AGD/2009	03/12/2009	50.000.000,00	KSU Adi Guna Dharma	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-
	Jumlah				161.000.000,00	-	-	161.000.000,00	(161.000.000,00)	-



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERHITUNGAN NILAI INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN (PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH)
PER 31 DESEMBER 2025

No	Lembaga/Pihak Ketiga	Nilai Investasi Permanen Awal Tahun 2025	Penyertaan Modal Tahun 2025	Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024	Modal Hibah	Cadangan Dana	Selisih Likwidasi	Laba (Rugi) Ditahan	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas	Nilai Investasi Permanen Akhir Tahun 2025	Penambahan/Penurunan Nilai Investasi Permanen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	300.000.000.000,00	50.000.000.000,00							350.000.000.000,00	350.000.000.000,00	50.000.000.000,00	Nilai Investasi Permanen Akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dengan Cost Method
2.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	351.407.926.335,00	7.500.000.000,00	283.323.067.868,00	1.557.950.100,00	37.124.433.345,00		35.231.940,00	51.876.049.234,00	381.416.732.487,00	381.416.732.487,00	30.008.806.152,00	Nilai Investasi Permanen Akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2025 setelah audit dengan Equity Method
3.	Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	244.005.044.311,00	-	258.780.664.172,00	3.956.414.563,00	2.881.569.164,00	1.639.295.610,00	(22.716.285.708,00)	(4.999.241.842,00)	239.542.415.959,00	239.542.415.959,00	(4.462.628.352,00)	Nilai Investasi Permanen Akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2025 setelah audit dengan Equity Method
4.	Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	8.633.578.905,00	-	1.534.000.000,00	137.421.000,00	760.329.393,00			6.723.609.292,00	9.155.359.685,00	9.155.359.685,00	521.780.780,00	Nilai Investasi Permanen Akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2025 setelah audit dengan Equity Method. Nilai Investasi Permanen Akhir telah mengakomodir perubahan penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) Tahun 2025.
5.	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00							4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	1.000.000.000,00	Nilai Investasi Permanen Akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dengan Cost Method
		907.546.549.551,00	58.500.000.000,00	543.637.732.040,00	5.651.785.663,00	40.766.331.902,00	1.639.295.610,00	(22.681.053.768,00)	53.600.416.684,00	984.614.508.131,00	984.614.508.131,00	77.067.958.580,00	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Jenis Aset tetap Daerah	Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir Tahun	Nilai Penyusutan Tahun 2025	Saldo Setelah Penyusutan Tahun 2025
					2025		
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6+7
1	Tanah	3.669.900.165.486,40	85.668.943.354,00	219.390.252.703,57	3.536.178.856.136,83		3.536.178.856.136,83
2	Peralatan dan Mesin	1.146.484.985.917,67	231.236.401.968,43	84.328.836.689,18	1.293.392.551.196,92	(864.865.449.413,32)	428.527.101.783,60
3	Gedung dan Bangunan	1.393.198.686.232,71	293.764.936.361,76	79.908.490.502,50	1.607.055.132.091,97	(321.030.109.356,55)	1.286.025.022.735,42
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.766.433.199.211,76	344.319.866.269,69	19.433.049.956,89	2.091.320.015.524,56	(1.461.846.381.042,53)	629.473.634.482,03
5	Aset Tetap Lainnya	54.715.768.614,46	17.748.735.360,65	18.469.464.516,00	53.995.039.459,11	(14.338.752.962,00)	39.656.286.497,11
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.161.507.823,88	7.378.529.540,60	5.326.353.054,00	13.213.684.310,48		13.213.684.310,48
	Jumlah	8.041.894.313.286,88	980.117.412.855,13	426.856.447.422,14	8.595.155.278.719,87	(2.662.080.692.774,40)	5.933.074.585.945,47



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR NILAI ASET TETAP EKSTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	NILAI PERALATAN DAN MESIN	NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN	NILAI ASET TETAP LAINNYA
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.835.809.101,87	4.824.037.135,92	3.184.095.904,17
2	Dinas Kesehatan	1.883.519.407,70	187.150.500,00	89.753.693,75
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.106.022.748,00	43.892.100,00	3.680.750,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.192.499,00	-	1.350.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	49.426.280,00	7.500.000,00	3.960.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.416.000,00	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	42.803.799,00	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	109.625.415,00	89.497.000,00	2.060.200,00
9	Dinas Sosial	59.892.700,00	7.722.000,00	5.925.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	46.645.000,00	14.800.000,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	52.417.569,00	9.000.000,00	1.415.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.709.515.472,50	56.146.600,00	214.805.173,05
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	103.717.689,00	-	610.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42.690.080,00	6.007.445,73	750.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.374.423.607,00	54.750.000,00	1.388.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	133.477.729,00	-	6.621.060,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	43.477.500,00	-	2.500.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47.744.999,00	-	200.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.946.000,00	94.189.655,00	75.000,00
20	Dinas Kebudayaan	17.900.000,00	29.239.000,00	72.744.250,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	121.468.850,00	7.250.000,00	434.561.666,36
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	30.835.660,00	30.500.054,36	-
23	Dinas Pariwisata	64.786.938,00	71.960.000,00	250.000,00
24	Dinas Pertanian	130.015.367,00	121.358.500,00	558.400,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	130.505.350,00	1.650.000,00	180.000,00
26	Inspektorat	44.111.586,00	-	2.100.425,00
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	32.580.375,00	-	29.950.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	169.572.531,00	195.725.700,00	1.200.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.910.614,00	71.291.000,00	31.565.190,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	101.067.260,00	-	25.127.040,00
31	Sekretariat DPRD	68.060.500,00	-	8.285.000,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	60.090.069,00	24.000.000,00	38.335.063,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	159.168.681,33	49.000.000,00	56.037.570,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	91.571.803,00	128.738.124,00	112.519.950,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	137.349.284,00	85.320.120,00	2.615.000,00
36	Sekretariat Daerah	440.115.429,50	77.495.000,00	16.922.040,00
Jumlah		16.503.873.893,90	6.288.219.935,01	4.352.141.375,33



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI
PER 31 DESEMBER 2025

No	Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Register	Harga
	Nomor	Tanggal							
1	028/1168/BPKAD B-2009/Kk.18.09/KS.01.5/04/2023	18-Apr-2023	Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Kota Denpasar Dengan Kementerian Agama Kota Denpasar	5	Peralatan dan Mesin	Kendaraan roda 4 Toyota Avanza 1300 G	1.3.2.2.1.1.3	42	147.600.000,00
2	000.2.3.2/4396/BPKAD	8-Jul-2025	Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Kota Denpasar Dengan Pemerintah Provinsi Bali	5	Tanah	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.1.1.4.26	3	1.400.000.000,00
3	028/1270/BPKAD 551-11/93/2023/perumda BPS	18-Apr-2023	Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Kota Denpasar Dengan Bhukti Praja Sewaka Dharma Kota Denpasar	5	Peralatan dan Mesin	Kendaraan roda 4 Toyota Innova	1.3.2.2.1.1.3	12	245.450.000,00
4	000.2.3.2/6294/BPKAD	22 agustus 2024	Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Kota Denpasar Dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar	5	Peralatan dan Mesin	Kendaraan Roda 4 Toyota Innova	1.3.2.2.1.1.3	25	320.530.000,00
5	028/1165/BPKAD B-2555/Kk.18.1.1/04/2022	19-Apr-2022	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Agama Kota Denpasar	5	Tanah	Tanah di Jalan Gatot Subroto VIIJ Atas Nama Pemerintah Kota Denpasar	1.3.1.1.1.4.1	24	268.414.860,00
Total									2.381.994.860,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PERJANJIAN BMD YANG DISEWAKAN SEBAGIAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
1	030/3354/BPKAD 007/PS.Bumdes.SM/XI/2022	08-Nov-22	Pengelola (Sewa Antara Pemerintah Kota Denpasar Dengan BUMDES Saka Mandiri)	5	Tanah	Tanah Lapangan di jalan Made Pica Seluas 300 M2	1.3.1.01.003.019.001	1	1.063.800.000,00	3.936.000,00
2	030/461/BPKAD 008/PS.Bumdes.SM/1/2023	08-Nov-23	Pengelola (Sewa Antara Pemerintah Kota Denpasar Dengan BUMDES Saka Mandiri)	5	Tanah	Tanah Lapangan di jalan Made Pica Seluas 300 M2	1.3.1.01.003.001.025	1	8.741.593.000,00	3.936.000,00
3	000.2.3.2/1141/BPKAD	12-Feb-23	Perjanjian Sewa Antara BPKAD dengan Penyewa Luh Tina Resmayanti	5	Tanah	Tanah Kantor BPKAD Seluas 2 M2	1.3.1.01.001.004.001	36	2.818.200.000,00	500.000,00
4	011/19/11/PPK/II/2022, Nomor : 1311/DPS/DOC/2022	11/04/2022	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar	5	Bangunan	Bangunan ATM seluas 14,076 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	118.376.000,00	26.250.000,00
5	028/645/DPMTSP/2023	3 April 2023	Perjanjian Sewa Menyewa Antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Dengan Koperasi Pegawai Negeri Dharma Wiguna	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Koperasi Pegawai Negeri Dharma Wiguna	1.3.3.01.001.001.001	1	61.466.971.739,71	12.500.000,00
6	100.3.7/4140/DLHK/2025 14.01/X/KOP.TBG/2025	24 Oktober 2025	Perjanjian sewa antara DLHK dengan Pkoperasi Konsumen Tri Bhoga Gandamayu	1	Tanah	Tanah seluas 56 M2	1.3.1.01.001.004.001	1	743.250.000,00	1.000.000,00
7	415.4/736/DPMTSP/2022	12 Mei 2022	Pemanfaatan Sewa Bangunan Atas Penempatan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Di Gedung Sewakadarma	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	1.3.3.01.001.001.001	1	61.466.971.739,71	112.500.000,00
8	100.3.12/2263BAPPEDA/2025	02-Jan-24	Perjanjian Sewa Antara BAPPEDA dengan Penyewa Ni Wayan Kardiani	1	Tanah	Tanah Kantor Bappeda Seluas 14 M2	1.3.1.01.001.004.001	1	1.680.800.160,00	500.000,00
9	000.3/101/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ika Welastiningrum	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
10	000.3/102/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Pande Wayan Suditha	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
11	000.3/103/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Dewi Sukmawati	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
12	000.3/104/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusti Ayu Arian	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
13	000.3/105/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Kompyang Wirawan	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
14	000.3/106/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nyoman Adi Wardika	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
15	000.3/107/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Komang Pastari	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
16	000.3/108/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Wayan Riwasih	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
17	000.3/109/Disdikpora	8 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Kadek Eka Mahendra	1	Tanah	Tanah SMPN 6 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.556.200.000,00	2.400.000,00
18	000.3/159/Disdikpora 500.3.10.2/07/KPN-SW/2025	04 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan Ketua KPN Sedana Werdhi a.n. I Ketut Merta, S.Pd.SD., M.Pd	1	Gedung	Gedung SDN 2 Sesetan seluas 33,12m2	1.3.3.01.001.010.001	3	32.400.000,00	6.000.000,00
19	000.3/100/Disdikpora 01 / KSY / I / 2025	24 Januari 2024	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan Ketua KPN Sedana Yoga a.n. I Nyoman Sukarja, S.Pd, M.Pd.H	1	Gedung	Tanah Cabdin Dikdas Kec. Denpasar Barat seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	2	570.849.113,51	2.500.000,00
20	000.3/343/Disdikpora	18 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Sukrinawati	1	Tanah	Tanah SDN 4 Tonja seluas 9,43m2	1.3.1.01.001.004.002	2	169.685.700,00	7.320.000,00
21	000.3/344/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Erny Pertamawati	1	Tanah	Tanah SDN 9 Dauh Puri seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.090.350,00	4.000.000,00
22	000.3/345/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sulastri	1	Tanah	Tanah SDN 9 Dauh Puri seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.090.350,00	4.000.000,00
23	000.3/346/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Wartini	1	Tanah	Tanah SDN 21 Pemecutan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	218.023.300,00	12.000.000,00
24	000.3/347/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Suriati	1	Tanah	Tanah SDN 1 Ubung seluas 24,75m2	1.3.1.01.001.004.002	1	4.903.692.300,00	10.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
25	000.3/284/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusi Kompiang Susanawati	1	Tanah	Tanah SDN 1 Sanur seluas 21m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.080.000,00	2.000.000,00
26	000.3/348/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Dwi Jayanti	1	Tanah	Tanah SDN 23 Dangin Puri seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	2	737.535.200,00	4.200.000,00
27	000.3/349/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Eka Sari Yuliawati	1	Tanah	Tanah SDN 4 Dauh Puri seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1, 2	232.452.000,00	5.000.000,00
28	000.3/350/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Suratni	1	Tanah	Tanah SDN 1 Sanur seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.080.000,00	1.000.000,00
29	000.3/357/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Rapiani	1	Tanah	Tanah SDN 29 Pemecutan seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	644.034.100,00	15.000.000,00
30	000.3/358/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nyoman Arya	1	Tanah	Tanah SDN 6 Peguyangan seluas 97,2m2	1.3.1.01.001.004.002	1	959.358.900,00	4.000.000,00
31	000.3/359/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Leliani	1	Tanah	Tanah SDN Tulangampiang seluas 2,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	12.948.494.600,00	10.000.000,00
32	000.3/360/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Leliani	1	Tanah	Tanah SDN Tulangampiang seluas 3,48m2	1.3.1.01.001.004.002	1	12.948.494.600,00	10.000.000,00
33	000.3/361/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Indra Dewi	1	Tanah	Tanah SDN 4 Panjer seluas 54m2	1.3.1.01.001.004.002	1	591.058.000,00	8.400.000,00
34	000.3/362/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Sujana	1	Tanah	Tanah SDN 4 Sesetan seluas 7,1m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.101.058.000,00	4.500.000,00
35	000.3/365/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Meka Ariati	1	Tanah	Tanah SDN 16 Pemecutan seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.290.350,00	4.000.000,00
36	000.3/367/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Tini	1	Tanah	Tanah SDN 12 Sesetan seluas 33m2	1.3.1.01.001.004.002	1	875.000.000,00	5.720.000,00
37	000.3/368/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sang Ayu Putu Permastari	1	Tanah	Tanah SDN 13 Pedungan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	2	501.058.000,00	12.000.000,00
38	000.3/369/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Sidhi Adnyana	1	Tanah	Tanah SDN 3 Sanur seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.342.000.000,00	6.000.000,00
39	000.3/370/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Fatima	1	Tanah	Tanah SDN 11 Sanur seluas 2m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.090.350,00	5.000.000,00
40	000.3/371/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Nevi Ruspita Dewi	1	Tanah	Tanah SDN 6 Panjer seluas 15m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.051.794.800,00	8.400.000,00
41	000.3/372/Disdikpora	19 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Adi Dhamayanti	1	Tanah	Tanah SDN 18 Pemecutan seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	573.623.300,00	12.000.000,00
42	000.3/373/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Siti Zulaikah	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	10.800.000,00
43	000.3/374/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Murniasih	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	8.100.000,00
44	000.3/375/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Muliani	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	8.100.000,00
45	000.3/376/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Siti Raudhatul Novita	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	5.400.000,00
46	000.3/377/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sri Sartini	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	5.400.000,00
47	000.3/378/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Mariani	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	10.800.000,00
48	000.3/379/Disdikpora	20 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Jero Menuh	1	Tanah	Tanah SDN 12 Pemecutan seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	226.190.350,00	10.000.000,00
49	000.3/380/Disdikpora	21 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Winarta	1	Tanah	Tanah SDN 11 Peguyangan seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	945.000.000,00	5.000.000,00
50	000.3/502/Disdikpora	24 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Wiradi, S.Pd.	1	Tanah	Tanah SDN 8 Dauh Puri seluas 122,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.250.990.350,00	8.000.000,00
51	000.3/516/Disdikpora	25 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Sukarini	1	Tanah	Tanah SDN 3 Pemecutan seluas 8,3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	405.770.350,00	5.000.000,00
52	000.3/517/Disdikpora	25 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Diah Irma Savitri	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 10,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	15.500.000,00
53	000.3/518/Disdikpora	25 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ngatno	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 9,9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	15.500.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
54	000.3/519/Disdikpora	25 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Dewa Ayu Meiniawati	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 14,4m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	15.500.000,00
55	000.3/520/Disdikpora	25 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Ariyati	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	14.500.000,00
56	000.3/521/Disdikpora	25 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Widiastini	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 11,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	14.500.000,00
57	000.3/605/Disdikpora	27 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Putri Andriani	1	Tanah	Tanah SDN 24 Pemecutan seluas 10,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.701.149.300,00	15.000.000,00
58	000.3/1206/Disdikpora	28 Februari 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nyoman Suri	1	Tanah	Tanah SDN 11 Pemecutan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	362.612.350,00	3.500.000,00
59	000.3/1447/Disdikpora	3 Maret 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Komang Cintya Paramita	1	Tanah	Tanah SDN 2 Dangin Puri seluas 5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.900.686.700,00	6.600.000,00
60	000.3/1991/Disdikpora	17 April 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Putu Candrawati	1	Tanah	Tanah SDN 28 Dangin Puri seluas 2,5m2	1.3.1.01.001.004.002	3	4.100.356.900,00	5.000.000,00
61	000.3/1992/Disdikpora	17 April 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nyoman Tapayasa	1	Tanah	Tanah SDN 33 Dangin Puri seluas 10,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.307.845.100,00	2.400.000,00
62	000.2.3.2/16100/Disdikpora	05 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Sudiani	1	Tanah	Tanah SDN 2 Sumerta seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	3	473.943.000,00	3.500.000,00
63	000.2.3.2/16101/Disdikpora	05 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Sujana	1	Tanah	Tanah SDN 4 Sesetan seluas 7,1m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.101.058.000,00	3.500.000,00
64	000.2.3.2/16102/Disdikpora	05 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Dewa Gede Astika Putra	1	Tanah	Tanah SDN 2 Penatih seluas 7,25m2	1.3.1.01.001.004.002	1	407.006.500,00	3.000.000,00
65	000.2.3.2/16103/Disdikpora	05 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Sariati	1	Tanah	Tanah SDN 2 Penatih seluas 7,25m2	1.3.1.01.001.004.002	1	407.006.500,00	3.000.000,00
66	000.2.3.2/16104/Disdikpora	06 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Rapi	1	Tanah	Tanah SDN 1 Renon seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.259.785.000,00	1.000.000,00
67	000.2.3.2/16105/Disdikpora	06 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Putu Srintiti	1	Tanah	Tanah SDN 2 Kesiman seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	230.798.700,00	1.500.000,00
68	000.2.3.2/16106/Disdikpora	06 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusi Kompiang Susanawati	1	Tanah	Tanah SDN 1 Sanur seluas 21m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.080.000,00	750.000,00
69	000.2.3.2/16107/Disdikpora	07 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Ariani	1	Tanah	Tanah SDN 4 Sumerta seluas 14m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.200.734.300,00	6.000.000,00
70	000.2.3.2/16108/Disdikpora	07 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Suparmi	1	Tanah	Tanah SDN 10 Sumerta seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	593408600	6.000.000,00
71	000.2.3.2/16109/Disdikpora	07 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Yesi Mariani	1	Tanah	Tanah SDN 12 Sesetan seluas 33m2	1.3.1.01.001.004.002	1	875000000	2.000.000,00
72	000.2.3.2/16110/Disdikpora	07 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Kadek Suadnyana	1	Tanah	Tanah SDN 3 Penatih seluas 52,2m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571009340	5.500.000,00
73	000.2.3.2/16111/Disdikpora	07 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Rai	1	Tanah	Tanah SDN 6 Penatih seluas 4,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	495.709.460,00	5.500.000,00
74	000.2.3.2/16112/Disdikpora	10 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Luh Made Santini	1	Tanah	Tanah SDN 7 Sesetan seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	1	476.028.600,00	3.600.000,00
75	000.2.3.2/16113/Disdikpora	10 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Desak Putu Anna Costariani	1	Tanah	Tanah SDN 19 Dangin Puri seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	473.534.000,00	2.500.000,00
76	000.2.3.2/16114/Disdikpora	10 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Gusti Ayu Nik Setiati	1	Tanah	Tanah SDN 1 Renon seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.259.785.000,00	1.000.000,00
77	000.2.3.2/16115/Disdikpora	10 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Wardana	1	Tanah	Tanah SDN 7 Sumerta seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	1	260.871.900,00	5.000.000,00
78	000.2.3.2/16116/Disdikpora	11 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Ketut Ardana	1	Tanah	Tanah SDN 6 Sesetan seluas 24m2	1.3.1.01.001.004.002	2	502.038.000,00	6.000.000,00
79	000.2.3.2/16117/Disdikpora	11 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sagung Anniek Anom Sari	1	Tanah	Tanah SDN 9 Sesetan seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	625.927.500,00	4.560.000,00
80	000.2.3.2/16118/Disdikpora	11 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Siti Fadilatin	1	Tanah	Tanah SDN 3 Sesetan seluas 30m2	1.3.1.01.001.004.002	1	626.246.700,00	12.000.000,00
81	000.2.3.2/16119/Disdikpora	11 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Sri Purnama Sari	1	Tanah	Tanah SDN 1 Penatih seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	857.366.620,00	3.310.000,00
82	000.2.3.2/16120/Disdikpora	12 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ayu Trisna Juniati	1	Tanah	Tanah SDN 11 Sumerta seluas 6,25m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.500.873.700,00	6.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
83	000.2.3.2/16121/Disdikpora	12 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Suci	1	Tanah	Tanah SDN 3 Renon seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.004.600,00	500.000,00
84	000.2.3.2/16122/Disdikpora	12 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Dewa Ayu Nyoman Arniti	1	Tanah	Tanah SDN 13 Sesetan seluas 19m2	1.3.1.01.001.004.002	1	441.058.000,00	6.000.000,00
85	000.2.3.2/16123/Disdikpora	12 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Padmini	1	Tanah	Tanah SDN 5 Pedungan seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.058.000,00	2.500.000,00
86	000.2.3.2/16124/Disdikpora	12 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Mulyanto	1	Tanah	Tanah SDN 5 Pedungan seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.058.000,00	2.500.000,00
87	000.2.3.2/16125/Disdikpora	12 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Sumariani	1	Tanah	Tanah SDN 7 Pedungan seluas 20m2	1.3.1.01.001.004.002	1	543.918.600,00	3.500.000,00
88	000.2.3.2/16126/Disdikpora	13 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Sugiantini	1	Tanah	Tanah SDN 1 Sesetan seluas 18,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	210.716.960,00	5.000.000,00
89	000.2.3.2/16127/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi	1	Tanah	Tanah SDN 7 Dauh Puri seluas 9,53m2	1.3.1.01.001.004.002	1	257.290.200,00	5.000.000,00
90	000.2.3.2/16128/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Misrikatin	1	Tanah	Tanah SDN 19 Dauh Puri seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	4.228.932.000,00	3.500.000,00
91	000.2.3.2/16129/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Komang Tirtawati	1	Tanah	Tanah SDN 5 Sumerta seluas 20,9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.033.900,00	5.000.000,00
92	000.2.3.2/16130/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Misrikatin	1	Tanah	Tanah SDN 14 Dauh Puri seluas 4m2	1.3.1.01.001.004.002	1	482.184.000,00	2.500.000,00
93	000.2.3.2/16131/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Nana Ariyani	1	Tanah	Tanah SDN 6 Dauh Puri seluas 14,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.820.970.350,00	3.000.000,00
94	000.2.3.2/16132/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Anjasmara	1	Tanah	Tanah SDN 9 Sumerta seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	390.958.980,00	5.000.000,00
95	000.2.3.2/16133/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Ketut Sumadi Putra	1	Tanah	Tanah SDN 11 Pedungan seluas 12,26m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.158.350,00	6.000.000,00
96	000.2.3.2/16134/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Gatra	1	Tanah	Tanah SDN 11 Pedungan seluas 16,64m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.158.350,00	6.000.000,00
97	000.2.3.2/16135/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Fatima	1	Tanah	Tanah SDN 11 Sanur seluas 2m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.090.350,00	1.500.000,00
98	000.2.3.2/16136/Disdikpora	14 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Suji	1	Tanah	Tanah SDN 7 Pedungan seluas 20m2	1.3.1.01.001.004.002	1	543.918.600,00	3.500.000,00
99	000.2.3.2/16137/Disdikpora	17 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Merta	1	Tanah	Tanah SDN 11 Dauh Puri seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	486.136.000,00	2.500.000,00
100	000.2.3.2/16138/Disdikpora	17 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sang Ayu Putu Permastari	1	Tanah	Tanah SDN 13 Pedungan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.058.000,00	3.000.000,00
101	000.2.3.2/16139/Disdikpora	17 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Ariyani	1	Tanah	Tanah SDN 18 Sesetan seluas 30m2	1.3.1.01.001.004.002	1	451.155.300,00	2.400.000,00
102	000.2.3.2/16140/Disdikpora	17 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Luh Suwini	1	Tanah	Tanah SDN 8 Sumerta seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	300.878.100,00	5.000.000,00
103	000.2.3.2/16141/Disdikpora	21 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Gusti Ayu Wiadnyani	1	Tanah	Tanah SDN 12 Dauh Puri seluas 5,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	692.290.350,00	2.500.000,00
104	000.2.3.2/16142/Disdikpora	21 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Erik Harpenas Putra	1	Tanah	Tanah SDN 23 Pemecutan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.601.230.350,00	5.000.000,00
105	000.2.3.2/16143/Disdikpora	21 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Komang Dianawati	1	Tanah	Tanah SDN 1 Pemecutan seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	6.575.927.850,00	2.500.000,00
106	000.2.3.2/16144/Disdikpora	21 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Sri	1	Tanah	Tanah SDN 11 Sesetan seluas 27m2	1.3.1.01.001.004.002	1	626.361.100,00	4.800.000,00
107	000.2.3.2/16145/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Srinathi	1	Tanah	Tanah SDN 24 Dauh Puri seluas 6,1m2	1.3.1.01.001.004.002	1	395.850.350,00	2.500.000,00
108	000.2.3.2/16146/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Iin Marliyah	1	Tanah	Tanah SDN 6 Sumerta seluas 8,75m2	1.3.1.01.001.004.002	1	601.022.300,00	1.500.000,00
109	000.2.3.2/16147/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. i Wayan Suardana Sana	1	Tanah	Tanah SDN 24 Dauh Puri seluas 6,1m2	1.3.1.01.001.004.002	1	395.850.350,00	2.500.000,00
110	000.2.3.2/16148/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Srinathi	1	Tanah	Tanah SDN 5 Dauh Puri seluas 7m2	1.3.1.01.001.004.002	1	217.260.000,00	3.000.000,00
111	000.2.3.2/16149/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Widyawati	1	Tanah	Tanah SDN 13 Pemecutan seluas 12,9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.250.970.440,00	5.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
112	000.2.3.2/16150/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nengah Tusti Yasa	1	Tanah	Tanah SDN 2 Sesetan seluas 52,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.243.085.200,00	14.040.000,00
113	000.2.3.2/16151/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nengah Metri	1	Tanah	Tanah SDN 32 Pemecutan seluas 16,7m2	1.3.1.01.001.004.002	1	697.639.000,00	4.800.000,00
114	000.2.3.2/16152/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nyoman Pujana	1	Tanah	Tanah SDN 27 Pemecutan seluas 20m2	1.3.1.01.001.004.002	1	954.995.000,00	3.150.000,00
115	000.2.3.2/16153/Disdikpora	24 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Ayun Sukarini	1	Tanah	Tanah SDN 5 Penatih seluas 13,2m2	1.3.1.01.001.004.002	1	453.591.500,00	5.000.000,00
116	000.2.3.2/16154/Disdikpora	25 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nyoman Sena	1	Tanah	Tanah SDN 2 Sesetan seluas 26,28m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.243.085.200,00	5.850.000,00
117	000.2.3.2/16155/Disdikpora	25 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Choirun Nisa Indah Istikomah	1	Tanah	Tanah SDN 21 Dauh Puri seluas 14m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.359.200,00	2.500.000,00
118	000.2.3.2/16156/Disdikpora	25 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Wiasih	1	Tanah	Tanah SDN 10 Dauh Puri seluas 4m2	1.3.1.01.001.004.002	1	701.415.700,00	2.500.000,00
119	000.2.3.2/16157/Disdikpora	25 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusti Ayu Riskariyanti	1	Tanah	Tanah SDN 14 Padangsambian seluas 13,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.190.000,00	7.000.000,00
120	000.2.3.2/16158/Disdikpora	25 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Asrini	1	Tanah	Tanah SDN 5 Padangsambian seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.190.000,00	7.000.000,00
121	000.2.3.2/16159/Disdikpora	26 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nyoman Indawati	1	Tanah	Tanah SDN Tulangampiang seluas 2,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	12.948.494.600,00	7.500.000,00
122	000.2.3.2/16160/Disdikpora	26 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nengah Yuniari	1	Tanah	Tanah SDN 16 Pemecutan seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.290.350,00	2.000.000,00
123	000.2.3.2/16161/Disdikpora	26 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Lutfi Ayu Wagianingsih	1	Tanah	Tanah SDN 25 Pemecutan seluas 5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	286.044.000,00	4.880.000,00
124	000.2.3.2/16162/Disdikpora	26 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Wati	1	Tanah	Tanah SMPN 10 Denpasar seluas 30m2	1.3.1.01.001.004.002	1	94.248.040.000,00	12.500.000,00
125	000.2.3.2/16163/Disdikpora	27 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Putu Fajarwathi	1	Tanah	Tanah SDN 3 Tonja seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.090.350,00	4.800.000,00
126	000.2.3.2/16164/Disdikpora	27 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Desak Made Oka	1	Tanah	Tanah SDN 15 Pemecutan seluas 10,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	860.750.350,00	1.750.000,00
127	000.2.3.2/16165/Disdikpora	27 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Sri Wahyuni	1	Tanah	Tanah SDN 4 Penatih seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.012.540,00	3.500.000,00
128	000.2.3.2/16166/Disdikpora	27 November 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Suratni	1	Tanah	Tanah SDN 1 Sanur seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.080.000,00	350.000,00
129	000.2.3.2/16167/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Gede Rini	1	Tanah	Tanah SDN 18 Padangsambian seluas 85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	539.210.000,00	3.000.000,00
130	000.2.3.2/16168/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Sudiarti	1	Tanah	Tanah SDN 5 Panjer seluas 14,39m2	1.3.1.01.001.004.002	1	638.574.866,00	2.500.000,00
131	000.2.3.2/16169/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Primawati	1	Tanah	Tanah SDN 8 Kesiman seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.041.100,00	5.000.000,00
132	000.2.3.2/16170/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Suardika	1	Tanah	Tanah SDN 1 Pedungan seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	451.601.900,00	3.000.000,00
133	000.2.3.2/16171/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Putu Arini	1	Tanah	Tanah SDN 10 Pedungan seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.198.000,00	6.500.000,00
134	000.2.3.2/16172/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Rumi	1	Tanah	Tanah SDN 3 Pedungan seluas 10,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	462.646.280,00	2.400.000,00
135	000.2.3.2/16173/Disdikpora	01 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Putri Suriani	1	Tanah	Tanah SDN 9 Peguyangan seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	428.915.700,00	2.400.000,00
136	000.2.3.2/16174/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ida Bagus Putu Wardana	1	Tanah	Tanah SMPN 9 Denpasar seluas 36m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.348.503.400,00	5.000.000,00
137	000.2.3.2/16175/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Muryati	1	Tanah	Tanah SDN 13 Kesiman seluas 41,25m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.029.500,00	10.000.000,00
138	000.2.3.2/16176/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ngakan Kompiang Artawan	1	Tanah	Tanah SDN 7 Pemecutan seluas 10m2	1.3.1.01.001.004.002	1	420.608.170,00	6.000.000,00
139	000.2.3.2/16177/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Resni	1	Tanah	Tanah SDN 10 Peguyangan seluas 15,03m2	1.3.1.01.001.004.002	1	405.000.000,00	4.200.000,00
140	000.2.3.2/16178/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Anak Agung Adi Dharmawati	1	Tanah	Tanah SDN 12 Peguyangan seluas 6,7m2	1.3.1.01.001.004.002	1	400.415.700,00	4.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
141	000.2.3.2/16179/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Gst Kompiang Sariani	1	Tanah	Tanah SDN 2 Sanur seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	301.070.350,00	4.000.000,00
142	000.2.3.2/16180/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Rusminingsih	1	Tanah	Tanah SDN 2 Tonja seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	542.724.600,00	4.880.000,00
143	000.2.3.2/16181/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ketut Sritami	1	Tanah	Tanah SDN 20 Dangin Puri seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	458.261.700,00	3.000.000,00
144	000.2.3.2/16182/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gede Yuda Swastika Putra	1	Tanah	Tanah SDN 3 Ubung seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	1	598.500.000,00	6.000.000,00
145	000.2.3.2/16183/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Sukerni	1	Tanah	Tanah SDN 12 Sanur seluas 6,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	285.000.000,00	1.000.000,00
146	000.2.3.2/16184/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ayu Adi Prabawati	1	Tanah	Tanah SDN 12 Sanur seluas 6,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	285.000.000,00	1.000.000,00
147	000.2.3.2/16185/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Suliasih	1	Tanah	Tanah SDN 26 Dangin Puri seluas 22,94m2	1.3.1.01.001.004.002	1	781.951.300,00	3.500.000,00
148	000.2.3.2/16186/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Karyati	1	Tanah	Tanah SDN 3 Peguyangan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	881.250.000,00	5.000.000,00
149	000.2.3.2/16187/Disdikpora	02 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Picahyanti	1	Tanah	Tanah SDN 8 Padangsambian seluas 10m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.037.500,00	4.800.000,00
150	000.2.3.2/16188/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Pande Komang Juliantari	1	Tanah	Tanah SDN 10 Sanur seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	535.800.000,00	1.500.000,00
151	000.2.3.2/16189/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Nevi Ruspita Dewi	1	Tanah	Tanah SDN 6 Panjer seluas 15m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.051.794.800,00	3.000.000,00
152	000.2.3.2/16190/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Pradnya Dwi Anggraeni	1	Tanah	Tanah SDN 11 Kesiman seluas 15m2	1.3.1.01.001.004.002	1	654.264.100,00	6.000.000,00
153	000.2.3.2/16191/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ngurah Putu Susma Ari Surya, S.H	1	Tanah	Tanah SDN 22 Dauh Puri seluas 49m2	1.3.1.01.001.004.002	1	250.140.000,00	10.000.000,00
154	000.2.3.2/16192/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Soka	1	Tanah	Tanah SDN 17 Dangin Puri seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.257.003.420,00	3.600.000,00
155	000.2.3.2/16193/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Made Wageati	1	Tanah	Tanah SDN 18 Dangin Puri seluas 10m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.036.700,00	7.000.000,00
156	000.2.3.2/16194/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ida Ayu Dodi Widiastri	1	Tanah	Tanah SDN 2 Padangsambian seluas 34,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.048.900,00	5.000.000,00
157	000.2.3.2/16195/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Putu Putri Astariyanti	1	Tanah	Tanah SDN 2 Peguyangan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	352.915.700,00	4.880.000,00
158	000.2.3.2/16196/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Muchlis Nurrahmansyah	1	Tanah	Tanah SDN 33 Dangin Puri seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.307.845.100,00	2.400.000,00
159	000.2.3.2/16197/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ida Ayu Oka Karmini	1	Tanah	Tanah SDN 6 Sanur seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	375.990.350,00	4.000.000,00
160	000.2.3.2/16198/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Winarta	1	Tanah	Tanah SDN 11 Peguyangan seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	945.000.000,00	2.500.000,00
161	000.2.3.2/16199/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Sariani	1	Tanah	Tanah SDN 2 Ubung seluas 28,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.039.500,00	5.000.000,00
162	000.2.3.2/16200/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Darmiati	1	Tanah	Tanah SDN 3 Pedungan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	2	462.646.280,00	2.400.000,00
163	000.2.3.2/16201/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Simpen	1	Tanah	Tanah SDN 4 Ubung seluas 13,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	712.500.000,00	8.000.000,00
164	000.2.3.2/16202/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Murni	1	Tanah	Tanah SDN 6 Padangsambian seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	570.000.000,00	3.000.000,00
165	000.2.3.2/16203/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Kerti	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00
166	000.2.3.2/16204/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusti Ayu Putri Pramita	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00
167	000.2.3.2/16205/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Kadek Daysi Olivera M.	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00
168	000.2.3.2/16206/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Seriasih	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00
169	000.2.3.2/16207/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ketut Cindi Lestiana	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
170	000.2.3.2/16208/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusti Made Januriati	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00
171	000.2.3.2/16209/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Rindiasih	1	Tanah	Tanah SMPN 4 Denpasar seluas 10,85m2	1.3.1.01.001.004.002	1	21.637.600.740,00	3.000.000,00
172	000.2.3.2/16210/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nyoman Budiarta	1	Tanah	Tanah SDN 8 Peguyangan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	589.801.300,00	4.200.000,00
173	000.2.3.2/16211/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Suriati	1	Tanah	Tanah SDN 1 Ubung seluas 24,75m2	1.3.1.01.001.004.002	1	4.903.692.300,00	5.000.000,00
174	000.2.3.2/16212/Disdikpora	03 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Sulandri	1	Tanah	Tanah SDN 6 Pedungan seluas 19,65m2	1.3.1.01.001.004.002	1	701.058.000,00	14.400.000,00
175	000.2.3.2/16213/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Wayan Eka Sidhi Adnyana	1	Tanah	Tanah SDN 3 Sanur seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	2	6.342.000.000,00	1.500.000,00
176	000.2.3.2/16214/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Lenny Irawati	1	Tanah	Tanah SMPN 12 Denpasar seluas 5,7m2	1.3.1.01.001.004.002	1	531.292.300,00	2.000.000,00
177	000.2.3.2/16215/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Wiwik Widiani	1	Tanah	Tanah SDN 26 Pemecutan seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	699.680.350,00	6.000.000,00
178	000.2.3.2/16216/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Dwi Jayanti	1	Tanah	Tanah SDN 23 Dangin Puri seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	2	737.535.200,00	2.100.000,00
179	000.2.3.2/16217/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Sumartini	1	Tanah	Tanah SDN 5 Tonja seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.606.607.800,00	7.320.000,00
180	000.2.3.2/16218/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nyoman Arya	1	Tanah	Tanah SDN 6 Peguyangan seluas 97,2m2	1.3.1.01.001.004.002	1	959.358.900,00	1.500.000,00
181	000.2.3.2/16219/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Darni	1	Tanah	Tanah SDN 1 Pedungan seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	451.601.900,00	3.000.000,00
182	000.2.3.2/16220/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sri Ngatin	1	Tanah	Tanah SDN 5 Ubung seluas 40m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.018.100,00	7.630.000,00
183	000.2.3.2/16221/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Ketut Tantra	1	Tanah	Tanah SDN 9 Padangsambian seluas 14,3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	883.481.850,00	2.500.000,00
184	000.2.3.2/16222/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Intan Rusmayanti	1	Tanah	Tanah SMPN 11 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	770.831.600,00	2.000.000,00
185	000.2.3.2/16223/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nyoman Sukreni	1	Tanah	Tanah SMPN 11 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	770.831.600,00	2.000.000,00
186	000.2.3.2/16224/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Komang Eka Kumala Sari	1	Tanah	Tanah SMPN 11 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	770.831.600,00	2.000.000,00
187	000.2.3.2/16225/Disdikpora	04 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Putu Aryangga	1	Tanah	Tanah SMPN 11 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	770.831.600,00	2.500.000,00
188	000.2.3.2/16226/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Nyoman Suandendra	1	Tanah	Tanah SMPN 14 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	14.647.316,00	2.500.000,00
189	000.2.3.2/16227/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Martini	1	Tanah	Tanah SMPN 12 Denpasar seluas 12,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	531.292.300,00	2.500.000,00
190	000.2.3.2/16228/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Dewik Adnyani	1	Tanah	Tanah SMPN 12 Denpasar seluas 5,7m2	1.3.1.01.001.004.002	1	531.292.300,00	2.000.000,00
191	000.2.3.2/16229/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Wersiwi	1	Tanah	Tanah SDN 3 Panjer seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	439.485.676,00	6.000.000,00
192	000.2.3.2/16230/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ketut Wahyu Suprayoga	1	Tanah	Tanah SMPN 2 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	30.240.050.000,00	2.400.000,00
193	000.2.3.2/16231/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Wani	1	Tanah	Tanah SMPN 2 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	30.240.050.000,00	2.400.000,00
194	000.2.3.2/16232/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Sri Maryati	1	Tanah	Tanah SMPN 2 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	30.240.050.000,00	2.400.000,00
195	000.2.3.2/16233/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Komang Rastini	1	Tanah	Tanah SMPN 2 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	30.240.050.000,00	2.400.000,00
196	000.2.3.2/16234/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nuraini Sari	1	Tanah	Tanah SMPN 2 Denpasar seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	2	30.240.050.000,00	2.400.000,00
197	000.2.3.2/16235/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Gusti Ngurah Ardana	1	Tanah	Tanah SDN 10 Padangsambian seluas 15m2	1.3.1.01.001.004.002	1	451.117.820,00	5.490.000,00
198	000.2.3.2/16236/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Gusti Nyoman Yulastini	1	Tanah	Tanah SDN 28 Dangin Puri seluas 2,5m2	1.3.1.01.001.004.002	3	4.100.356.900,00	5.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
199	000.2.3.2/16237/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Muhamad Basiru	1	Tanah	Tanah SDN 9 Padangsambian seluas 14,3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	883.481.850,00	2.500.000,00
200	000.2.3.2/16238/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Gusti Ayu Agung Lestari	1	Tanah	Tanah SDN 7 Peguyangan seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	701.645.200,00	3.600.000,00
201	000.2.3.2/16239/Disdikpora	05 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Winiadi	1	Tanah	Tanah SDN 9 Padangsambian seluas 14,3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	883.481.850,00	2.500.000,00
202	000.2.3.2/16240/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Sundari Astuti	1	Tanah	Tanah SDN 14 Kesiman seluas 5,72m2	1.3.1.01.001.004.002	1	870.104.300,00	4.500.000,00
203	000.2.3.2/16241/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Wirni	1	Tanah	Tanah SDN 22 Dangin Puri seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	605.433.000,00	1.500.000,00
204	000.2.3.2/16242/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Joni Astiti	1	Tanah	Tanah SMPN 1 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	9.100.050.000,00	8.000.000,00
205	000.2.3.2/16243/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Pande Wayan Suciari	1	Tanah	Tanah SDN 4 Sanur seluas 65m2	1.3.1.01.001.004.002	1	938.940.350,00	5.000.000,00
206	000.2.3.2/16244/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Hariani	1	Tanah	Tanah SDN 4 Sanur seluas 35m2	1.3.1.01.001.004.002	1	938.940.350,00	5.000.000,00
207	000.2.3.2/16245/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Sudani	1	Tanah	Tanah SDN 10 Sanur seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	535.800.000,00	1.500.000,00
208	000.2.3.2/16246/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Damiyanti	1	Tanah	Tanah SDN 10 Sanur seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	535.800.000,00	1.500.000,00
209	000.2.3.2/16247/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Anak Agung Bagus Manik	1	Tanah	Tanah SDN 10 Sanur seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	535.800.000,00	1.500.000,00
210	000.2.3.2/16248/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ngakan Gede Bagus Bargawa	1	Tanah	Tanah SMPN 14 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	14.647.316,00	2.500.000,00
211	000.2.3.2/16249/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Parwati	1	Tanah	Tanah SMPN 14 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	14.647.316,00	2.500.000,00
212	000.2.3.2/16250/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Emy Pertamawati	1	Tanah	Tanah SDN 9 Dauh Puri seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.090.350,00	2.000.000,00
213	000.2.3.2/16251/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sulastri	1	Tanah	Tanah SDN 9 Dauh Puri seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	571.090.350,00	2.000.000,00
214	000.2.3.2/16252/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. A. A. Made Widya Guna Dewi	1	Tanah	Tanah SMPN 12 Denpasar seluas 7,84m2	1.3.1.01.001.004.002	1	531.292.300,00	2.000.000,00
215	000.2.3.2/16253/Disdikpora 75/K.SD/XII/2025	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan ketua KPN Satya Dharma a.n. Drs. I Made Sastrawan, M.Si	1	Tanah	Tanah SDN 14 Dangin Puri seluas 56m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.097.415.700,00	3.600.000,00
216	000.2.3.2/16254/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Didik Catur Aswan	1	Tanah	Tanah SMPN 3 Denpasar seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	2	1.037.550.000,00	2.500.000,00
217	000.2.3.2/16255/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Seri Widiani	1	Tanah	Tanah SMPN 3 Denpasar seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	2	1.037.550.000,00	2.500.000,00
218	000.2.3.2/16256/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Tia Paramita Dewi	1	Tanah	Tanah SMPN 7 Denpasar seluas 7,2m2	1.3.1.01.001.004.002	2	3.080.900.000,00	2.400.000,00
219	000.2.3.2/16257/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ali Padi	1	Tanah	Tanah SMPN 7 Denpasar seluas 7,7m2	1.3.1.01.001.004.002	2	3.080.900.000,00	2.400.000,00
220	000.2.3.2/16258/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nengah Kariasih	1	Tanah	Tanah SMPN 7 Denpasar seluas 7,99m2	1.3.1.01.001.004.002	2	3.080.900.000,00	2.400.000,00
221	000.2.3.2/16259/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Puspawati	1	Tanah	Tanah SMPN 7 Denpasar seluas 15,6m2	1.3.1.01.001.004.002	2	3.080.900.000,00	2.400.000,00
222	000.2.3.2/16260/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Suwamba	1	Tanah	Tanah SMPN 1 Denpasar seluas 15m2	1.3.1.01.001.004.002	2	9.100.050.000,00	10.000.000,00
223	000.2.3.2/16261/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Gusti Ayu Komang Alit Arista	1	Tanah	Tanah SMPN 1 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	9.100.050.000,00	8.000.000,00
224	000.2.3.2/16262/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Putu Iriantono	1	Tanah	Tanah SMPN 1 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	9.100.050.000,00	8.000.000,00
225	000.2.3.2/16263/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Arif Hidayat	1	Tanah	Tanah SMPN 1 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	9.100.050.000,00	8.000.000,00
226	000.2.3.2/16264/Disdikpora	08 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sulasmi	1	Tanah	Tanah SMPN 1 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	9.100.050.000,00	8.000.000,00
227	000.2.3.2/16265/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Anak Agung Kompiang Tika Juniati	1	Tanah	Tanah SDN 11 Padangsambian seluas 37m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.141.510.000,00	5.250.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
228	000.2.3.2/16266/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nengah Wirati	1	Tanah	Tanah SDN 14 Dangin Puri seluas 11,34m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.097.415.700,00	7.000.000,00
229	000.2.3.2/16267/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Anak Agung Putu Sriasih	1	Tanah	Tanah SDN 12 Padangsambian seluas 4m2	1.3.1.01.001.004.002	1	508.486.350,00	4.300.000,00
230	000.2.3.2/16268/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Putu Aris Sutyanan	1	Tanah	Tanah SDN 17 Padangsambian seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	721.050.000,00	2.200.000,00
231	000.2.3.2/16269/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Sekarini	1	Tanah	Tanah SMPN 12 Denpasar seluas 12,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	531.292.300,00	2.500.000,00
232	000.2.3.2/16270/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Komang Putra Kamajaya	1	Tanah	Tanah SMPN 3 Denpasar seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	2	1.037.550.000,00	2.500.000,00
233	000.2.3.2/16271/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nurudin	1	Tanah	Tanah SMPN 3 Denpasar seluas 11,4m2	1.3.1.01.001.004.002	2	1.037.550.000,00	2.500.000,00
234	000.2.3.2/16272/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Nilawati	1	Tanah	Tanah SMPN 7 Denpasar seluas 7,76m2	1.3.1.01.001.004.002	2	3.080.900.000,00	2.400.000,00
235	000.2.3.2/16273/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Achmad Baliono Sugito	1	Tanah	Tanah SMPN 7 Denpasar seluas 7,92m2	1.3.1.01.001.004.002	2	3.080.900.000,00	2.400.000,00
236	000.2.3.2/16274/Disdikpora	09 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Sekarini	1	Tanah	Tanah SDN 4 Peguyangan seluas 10,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	801.520.200,00	3.600.000,00
237	000.2.3.2/16275/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Suarmiti	1	Tanah	Tanah SDN 10 Sanur seluas 3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	535.800.000,00	1.500.000,00
238	000.2.3.2/16276/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Rafiah	1	Tanah	Tanah SDN 9 Pedungan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.001.736.000,00	4.800.000,00
239	000.2.3.2/16277/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. A.A. Kt. Gd. Santika	1	Tanah	Tanah SDN 9 Pedungan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.001.736.000,00	4.800.000,00
240	000.2.3.2/16278/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Luh Ayu Sri Lestari	1	Tanah	Tanah SDN 12 Kesiman seluas 37,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	75.000.000,00	8.000.000,00
241	000.2.3.2/16279/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Komang Lilayanti	1	Tanah	Tanah SMPN 12 Denpasar seluas 7,84m2	1.3.1.01.001.004.002	1	531.292.300,00	2.000.000,00
242	000.2.3.2/16280/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ngakan Gede Bagus Bargawa	1	Tanah	Tanah SMPN 3 Denpasar seluas 16m2	1.3.1.01.001.004.002	2	1.037.550.000,00	2.500.000,00
243	000.2.3.2/16281/Disdikpora	10 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Luh Putu Marta Diana	1	Tanah	Tanah SMPN 2 Denpasar seluas 7,5m2	1.3.1.01.001.004.002	2	30.240.050.000,00	2.400.000,00
244	000.2.3.2/16282/Disdikpora	11 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Nyoman Suastini	1	Tanah	Tanah SDN 17 Dauh Puri seluas 17,28m2	1.3.1.01.001.004.002	1	788.025.000,00	10.000.000,00
245	000.2.3.2/16283/Disdikpora	11 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Mariati	1	Tanah	Tanah SDN 6 Kesiman seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	775.228.100,00	10.000.000,00
246	000.2.3.2/16284/Disdikpora	12 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Komang Sandra Lestari	1	Tanah	Tanah SDN 10 Kesiman seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	425.976.500,00	6.000.000,00
247	000.2.3.2/16285/Disdikpora	12 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Indra Dewi	1	Tanah	Tanah SDN 4 Panjer seluas 54m2	1.3.1.01.001.004.002	1	591.058.000,00	4.500.000,00
248	000.2.3.2/16286/Disdikpora	16 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Tutik Rasmini	1	Tanah	Tanah SDN 1 Kesiman seluas 6,175m2	1.3.1.01.001.004.002	1	813.364.300,00	7.200.000,00
249	000.2.3.2/16287/Disdikpora	17 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Desak Putu Rijasawitri	1	Tanah	Tanah SDN 2 Panjer seluas 32m2	1.3.1.01.001.004.002	1	791.058.000,00	4.000.000,00
250	000.2.3.2/16288/Disdikpora	17 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Dewa Ayu Putu Sari Kantini	1	Tanah	Tanah SDN 17 Kesiman seluas 18m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.526.243.340,00	6.000.000,00
251	000.2.3.2/16289/Disdikpora	18 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Wariati	1	Tanah	Tanah SDN 16 Kesiman seluas 20m2	1.3.1.01.001.004.002	1	501.045.500,00	5.000.000,00
252	000.2.3.2/16290/Disdikpora	19 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Indah Maha Sari	1	Tanah	Tanah SDN 7 Kesiman seluas 6,25m2	1.3.1.01.001.004.002	1	373.598.900,00	8.000.000,00
253	000.2.3.2/16291/Disdikpora	19 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Eka Sari Yuliawati	1	Tanah	Tanah SDN 4 Dauh Puri seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1,2	232.452.000,00	2.500.000,00
254	000.2.3.2/16292/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Adi Dhamayanti	1	Tanah	Tanah SDN 18 Pemecutan seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	573.623.300,00	7.500.000,00
255	000.2.3.2/16293/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Siti Zulaikah	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	4.000.000,00
256	000.2.3.2/16294/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Murniasih	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	3.000.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
257	000.2.3.2/16295/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Ketut Muliani	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	3.000.000,00
258	000.2.3.2/16296/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Siti Raudhatul Novita	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	2.000.000,00
259	000.2.3.2/16297/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Sri Sartini	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	2.000.000,00
260	000.2.3.2/16298/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Wayan Mariani	1	Tanah	Tanah SMPN 5 Denpasar seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	891.469.400,00	4.000.000,00
261	000.2.3.2/16299/Disdikpora	26 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Sukrinawati	1	Tanah	Tanah SDN 4 Tonja seluas 9,43m2	1.3.1.01.001.004.002	2	169.685.700,00	4.500.000,00
262	000.2.3.2/16300/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Made Raplani	1	Tanah	Tanah SDN 29 Pemecutan seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	644.034.100,00	7.500.000,00
263	000.2.3.2/16301/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Jero Menuh	1	Tanah	Tanah SDN 12 Pemecutan seluas 6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	226.190.350,00	5.000.000,00
264	000.2.3.2/16302/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Anggara Kusuma Anka	1	Tanah	Tanah SDN 24 Pemecutan seluas 8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	3.701.149.300,00	5.000.000,00
265	000.2.3.2/16303/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Sukarini	1	Tanah	Tanah SDN 3 Pemecutan seluas 8,3m2	1.3.1.01.001.004.002	1	405.770.350,00	2.000.000,00
266	000.2.3.2/16304/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. I Made Wiradi, S.Pd.	1	Tanah	Tanah SDN 8 Dauh Puri seluas 122,5m2	1.3.1.01.001.004.002	1	2.250.990.350,00	8.000.000,00
267	000.2.3.2/16305/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Nyoman Wartini	1	Tanah	Tanah SDN 21 Pemecutan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	218.023.300,00	7.200.000,00
268	000.2.3.2/16306/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Diah Irma Savitri	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 10,8m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	7.750.000,00
269	000.2.3.2/16307/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Siti Aisyah	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 9,9m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	7.750.000,00
270	000.2.3.2/16308/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Desak Nyoman Sriwati	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 14,4m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	7.750.000,00
271	000.2.3.2/16309/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Putu Ariyati	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 9,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	7.250.000,00
272	000.2.3.2/16310/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Ni Kadek Widiastini	1	Tanah	Tanah SMPN 8 Denpasar seluas 11,6m2	1.3.1.01.001.004.002	1	1.300.542.000,00	7.250.000,00
273	000.2.3.2/16311/Disdikpora	29 Desember 2025	Perjanjian sewa antara Disdikpora dengan penyewa kantin a.n. Made Warsini	1	Tanah	Tanah SDN 11 Pemecutan seluas 12m2	1.3.1.01.001.004.002	1	362.612.350,00	1.500.000,00
274	500.11.9.3/819/DISHUB	10 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang UD. Bali Megah Mulia a/n Kanggo Sucipta (Gedung D)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 76,72 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,75	1.150.000,00
275	500.11.9.3/1457/DISHUB	17 Juni 2025	Perjanjian Sewa gudang UD. Prima Kencana a/n I Ketut Warga (Gedung E)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 75, 35 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,76	1.130.250,00
276	500.11.9.3/824/DISHUB	17 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang CV. Wahyu Mandiri Trans a/n Fajar Edi Santoso (Gedung F)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 75, 35 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,77	1.130.250,00
277	500.11.9.3/1458/DISHUB	06 Juli 2025	Perjanjian Sewa gudang UD. Prima Kencana a/n I Ketut Warga (Gedung G)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 75, 35 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,78	1.130.250,00
278	500.11.9.3/820/DISHUB	10 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang CV. Purnama Bali a/n Ni Putu Sudiani (Gedung H)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 69,87 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,79	1.048.050,00
279	500.11.9.3/1456/DISHUB	25 Juni 2025	Perjanjian Sewa gudang CV. Sanjaya Transport a/n I Wayan Suta Wijaya (Gedung I)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 78,96 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,80	1.184.400,00
280	551.11.9.2/282/II/2025/DISHUB	10 Februari 2025	Perjanjian Sewa gudang CV. Sanjaya Transport a/n I Wayan Suta Wijaya (Gedung J)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 84,6 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,81	1.269.000,00
281	500.11.9.3/825/DISHUB	17 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang PT. Puri Emas Logistic a/n Ni Made Sriasih, S.Sn (Gedung K)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar a Permanen	Bangunan gudang dengan luas 84,6 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,82	1.269.000,00

No	Nomor Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai Perolehan Barang	Nilai Sewa
	Nomor	Tanggal								
282	500.11.9.3/821/DISHUB	10 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang CV. Sari Sedana Transport a/n I Made Sueda (Gedung L)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Bangunan gudang dengan luas 69,87 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,83	1.269.000,00
283	500.11.9.3/821/DISHUB	10 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang CV. Sari Sedana Transport a/n I Made Sueda (Gedung M)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Bangunan gudang dengan luas 69,87 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,84	1.269.000,00
284	500.11.9.3/823/DISHUB	10 Mei 2025	Perjanjian Sewa gudang Jaya Raya Express a/n I Komang Darmayasa (Gedung N)	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Bangunan gudang dengan luas 203,816 m2	1.3.3.01.001.001.001	1	17.620.625,85	3.057.240,00
Total									956.163.385.806,73	1.436.508.440,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PENGGUNAAN BMD YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SK Penetapan		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai	Nomor Perjanjian
	Nomor	Tanggal								
1	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	66	5.500.000,00	028/1702/DPMD
2	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	23	14.995.000,00	028/1702/DPMD
3	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	13	196.000.000,00	028/1702/DPMD
4	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	42	27.140.000,00	028/1702/DPMD
5	188.45/1394/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kangin	5	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	2	67.500.000,00	028/1704/DPMD
6	188.45/1394/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kangin	5	Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	1	243.507.600,00	028/1704/DPMD
7	188.45/1394/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	67	5.500.000,00	028/1704/DPMD
8	188.45/1394/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	24	14.995.000,00	028/1704/DPMD
9	188.45/1394/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kangin	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	10	196.000.000,00	028/1704/DPMD
10	188.45/1394/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	44	27.140.000,00	028/1704/DPMD
11	188.45/1393/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kauh	5	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	5	161.820.000,00	028/1703/DPMD
12	188.45/1393/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kauh	5	Peralatan mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	68	5.500.000,00	028/1703/DPMD
13	188.45/1393/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kauh	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	23	40.000.000,00	028/1703/DPMD
14	188.45/1393/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kauh	5	Peralatan mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	26	14.995.000,00	028/1703/DPMD
15	188.45/1393/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri Kauh	5	Peralatan mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	38	27.140.000,00	028/1703/DPMD
16	188.45/1368/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	64	5.500.000,00	028/1687/DPMD
17	188.45/1368/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	21	14.995.000,00	028/1687/DPMD
18	188.45/1368/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri kelod	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	11	72.000.000,00	028/1687/DPMD
19	188.45/1368/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dangin Puri kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	45	27.140.000,00	028/1687/DPMD
20	188.45/1373/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	71	5.500.000,00	028/1701/DPMD
21	188.45/1373/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	29	14.995.000,00	028/1701/DPMD
22	188.45/1373/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	15	166.326.700,00	028/1701/DPMD
23	188.45/1373/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	39	27.140.000,00	028/1701/DPMD
24	188.45/1369/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri kangin	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	3	60.000.000,00	028/1690/DPMD
25	188.45/1369/HK/2024	3 Juni 2023	Desa Dauh Puri kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	63	27.140.000,00	028/1690/DPMD
26	188.45/1370/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	75	5.500.000,00	028/1689/DPMD
27	188.45/1370/HK/2024	3 Juni 2023	Desa Dauh Puri kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.001.003	17	144.900.000,00	028/1689/DPMD
28	188.45/1370/HK/2025	4 Juni 2023	Desa Dauh Puri kauh	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.004.001	35	14.995.000,00	028/1689/DPMD
29	188.45/1370/HK/2026	5 Juni 2023	Desa Dauh Puri kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	56	27.140.000,00	028/1689/DPMD
30	188.45/1375/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri Kelod	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	6	85.000.000,00	028/1691/DPMD
31	188.45/1375/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Dauh Puri Kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	57	27.140.000,00	028/1691/DPMD
32	188.45/1371/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Kesiman Kertalangu	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	65	5.500.000,00	028/1688/DPMD
33	188.45/1371/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Kesiman Kertalangu	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	21	72.000.000,00	028/1688/DPMD
34	188.45/1371/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Kesiman Kertalangu	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	22	14.995.000,00	028/1688/DPMD
35	188.45/1371/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Kesiman Kertalangu	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	49	27.140.000,00	028/1688/DPMD
36	188.45/1372/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Kesiman Petilan	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	12	196.000.000,00	028/1683/DPMD
37	188.45/1372/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Kesiman Petilan	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	48	27.140.000,00	028/1683/DPMD
38	188.45/1377/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Padangsambian Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	33	14.995.000,00	028/1692/DPMD

9

No.	SK Penetapan		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai	Nomor Perjanjian
	Nomor	Tanggal								
39	188.45/1377/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Padangsambian Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	58	27.140.000,00	028/1692/DPMD
40	188.45/1377/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Padangsambian Kaja	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	20	72.000.000,00	028/1692/DPMD
41	188.45/1380/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Padangsambian Kelod	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	11	196.000.000,00	028/1693/DPMD
42	188.45/1380/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Padangsambian Kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	60	27.140.000,00	028/1693/DPMD
43	188.45/1376/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Peguyangan Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	72	5.500.000,00	028/1698/DPMD
44	188.45/1376/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Peguyangan Kaja	5	Peralatan Mesin	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1.3.2.02.001.001.006	1	129.250.000,00	028/1698/DPMD
45	188.45/1376/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Peguyangan Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	30	14.995.000,00	028/1698/DPMD
46	188.45/1376/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Peguyangan Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	37	27.140.000,00	028/1698/DPMD
47	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa peguyangan kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	73	5.500.000,00	028/1699/DPMD
48	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa peguyangan kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	31	14.995.000,00	028/1699/DPMD
49	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa peguyangan kangin	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	8	196.000.000,00	028/1699/DPMD
50	188.45/1392/HK/2023	2 Juni 2023	Desa peguyangan kangin	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	40	27.140.000,00	028/1699/DPMD
51	188.45/1379/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemecutan Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	41	27.140.000,00	028/1700/DPMD
52	188.45/1379/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemecutan Kaja	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	14	196.000.000,00	028/1700/DPMD
53	188.45/1378/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemecutan Kelod	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	22	144.900.000,00	028/1694/DPMD
54	188.45/1378/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemecutan Kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	36	14.995.000,00	028/1694/DPMD
55	188.45/1378/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemecutan Kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	59	27.140.000,00	028/1694/DPMD
56	188.45/1378/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemecutan Kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	78	5.000.000,00	028/1694/DPMD
57	188.45/1385/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemogan	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	77	4.000.000,00	028/1706/DPMD
58	188.45/1385/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemogan	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	32	14.995.000,00	028/1706/DPMD
59	188.45/1385/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemogan	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	11.3.2.02.001.001.003	9	196.000.000,00	028/1706/DPMD
60	188.45/1385/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Pemogan	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	55	27.140.000,00	028/1706/DPMD
61	188.45/1381/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Penatih Dangin Puri	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	79	5.500.000,00	028/1682/DPMD
62	188.45/1381/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Penatih Dangin Puri	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	10	72.000.000,00	028/1682/DPMD
63	188.45/1381/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Penatih Dangin Puri	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	80	14.995.000,00	028/1682/DPMD
64	188.45/1381/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Penatih Dangin Puri	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	51	27.140.000,00	028/1682/DPMD
65	188.45/1383/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kaja	5	Tanah	Tanah lapangan Penimbun Sampah	01.01.13.03.003	1	197.000.000,00	028/1708/DPMD
66	188.45/1383/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kaja	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	19	102.000.000,00	028/1708/DPMD
67	188.45/1383/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	54	27.140.000,00	028/1708/DPMD
68	188.45/1384/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	69	5.500.000,00	028/1707/DPMD
69	188.45/1384/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kauh	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	5	60.000.000,00	028/1707/DPMD
70	188.45/1384/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	27	14.995.000,00	028/1707/DPMD
71	188.45/1384/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	52	27.140.000,00	028/1707/DPMD
72	188.45/1384/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sanur Kauh	5	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	3	225.750.000,00	028/1707/DPMD
73	188.45/1382/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sidakarya	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	76	4.550.000,00	028/1705/DPMD
74	188.45/1382/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sidakarya	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	2	148.889.800,00	028/1705/DPMD
75	188.45/1382/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sidakarya	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	25	14.995.000,00	028/1705/DPMD
76	188.45/1382/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sidakarya	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	53	27.140.000,00	028/1705/DPMD
77	188.45/1386/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kaja	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	9	85.000.000,00	028/1684/DPMD
78	188.45/1386/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	50	27.140.000,00	028/1684/DPMD
79	188.45/1386/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kaja	5	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	1	40.000.000,00	028/1684/DPMD
80	188.45/1388/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kauh	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	8	72.000.000,00	028/1685/DPMD
81	188.45/1388/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kauh	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	47	27.140.000,00	028/1685/DPMD

No.	SK Penetapan		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Nomer Register	Nilai	Nomor Perjanjian
	Nomor	Tanggal								
82	188.45/1387/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kelod	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	7	72.000.000,00	028/1686/DPMD
83	188.45/1387/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Sumerta Kelod	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	46	27.140.000,00	028/1686/DPMD
84	188.45/1391/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Harum	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	18	85.000.000,00	028/1696/DPMD
85	188.45/1391/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Harum	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	62	27.140.000,00	028/1696/DPMD
86	188.45/1389/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Kertha	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	74	5.500.000,00	028/1695/DPMD
87	188.45/1389/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Kertha	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	34	14.995.000,00	028/1695/DPMD
88	188.45/1389/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Kertha	5	Peralatan Mesin	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	4	60.000.000,00	028/1695/DPMD
89	188.45/1389/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Kertha	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	61	27.140.000,00	028/1695/DPMD
90	188.45/1389/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Kertha	5	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	4	429.630.000,00	028/1695/DPMD
91	188.45/1389/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Tegal Kertha	5	Candi Hindu(Padmasana)	Padmasana	03.12.03.01.001	1	2.500.000,00	028/1695/DPMD
92	188.45/1390/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Ubung Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	70	5.500.000,00	028/1697/DPMD
93	188.45/1390/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Ubung Kaja	5	Peralatan Mesin	Station Wagon	11.3.2.02.001.001.003	16	102.000.000,00	028/1697/DPMD
94	188.45/1390/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Ubung Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	28	14.995.000,00	028/1697/DPMD
95	188.45/1390/HK/2023	2 Juni 2023	Desa Ubung Kaja	5	Peralatan Mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	43	27.140.000,00	028/1697/DPMD
96	188.45/938/HK/2023	12-Apr-23	Bawaslu	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	9	85.000.000,00	028/68.a/BKBP/2023
97	188.45/938/HK/2023	12-Apr-23	Bawaslu	5	Peralatan mesin	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	15	11.905.920,00	028/68.a/BKBP/2023
98	188.45/943/HK/2023	12-Apr-23	Koni	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	11	219.250.000,00	028/6601/Disdikpora/2023
99	188.45/937/HK/2023	12-Apr-23	Kpoids	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	18	161.250.000,00	000.2.3.2/20999.b/Dikes
100	188.45/937/HK/2023	12-Apr-23	Kpoids	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	16	54.800.000,00	000.2.3.2/20999.b/Dikes
101	188.45/940/HK/2023	12-Apr-23	KPU	5	Bangunan	Bangunan Kantor KPU Kota Denpasar	1.3.3.01.001.001.001	37	3.270.874.000,00	028/143.a/BKBP/2023
102	188.45/406/HK/2023	17-Feb-23	KPU	5	Peralatan mesin	Pick Up	1.3.2.02.001.003.002	2	104.000.000,00	028/143.a/BKBP/2023
103	188.45/939/HK/2023	12-Apr-23	PGRI	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	8	147.600.000,00	028/6600/Disdikpora/2023
104	188.45/939/HK/2023	12-Apr-23	PGRI	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	10	65.000.000,00	028/6600/Disdikpora/2023
105	188.45/942/HK/2023	45028	PMI	5	Tanah Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.001.001	2	6.854.309.910,00	000.2.3.2/20999.a/Dikes
106	188.45/942/HK/2023	12-Apr-23	PMI	5	Tanah Dan Bangunan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	1	315.570.000,00	000.2.3.2/20999.a/Dikes
107	188.45/944/HK/2023	12-Apr-23	PPTI	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	17	161.250.000,00	000.2.3.2/20999.c/Dikes
108	188.45/941/HK/2023	12-Apr-23	Pramuka	5	Peralatan mesin	Station Wagon	1.3.2.02.001.001.003	9	115.000.000,00	028/6602/Disdikpora/2023
109	100.3.3.3/1390/HK/2024	16 Agustus 2024	DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KOTA DENPASAR berupa bangunan seluas 2,7 X 4,8 M	5	Bangunan	Bangunan di Kantor Dinas Koperasi	1.3.3.01.001.001.001	1	2.959.465.925,76	100.3.3.3/797/Diskop UMKM/2024
110	100.3.3.3/1391/HK/2024	17 Agustus 2024	Gedung Balai Pertemuan Dengan TK Kumara Bhuana III Denpasar	5	Gedung dan Bangunan	Balai Tempat Pertemuan	1.3.3.01.001.009.007	1	21.060.000,00	000.2.3.2/95.g/BPKAD
Total									19.984.804.855,76	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DAFTAR ASET TETAP TANAH

PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah						
			Belanja Modal	Reklas dari RB	Penerimaan Hibah TA 2025	Mutasi Masuk Antar SKPD	Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kapitalisasi Biaya ke Induknya	Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	339.344.285.636,00	-	-	-	3.724.463.848,46	325.050.000,00	-	-
2	Dinas Kesehatan	30.831.908.612,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.503.934.727.331,40	-	-	-	-	-	-	733.706.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	48.397.267.680,00	6.725.128.218,00	-	-	-	-	-	31.627.300.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.215.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	914.151.000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	947.324.000,00	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	218.105.000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	627.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	280.826.707.950,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.121.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	52.471.351.300,00	-	-	-	3.450.000.000,00	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.324.779.000,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.465.000,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.680.800.160,00	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Kebudayaan	9.251.773.501,00	-	-	-	147.756.000,00	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.762.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	3.019.500.000,00	-	-	-	15.464.055.000,00	-	-	-
23	Dinas Pariwisata	53.036.771.000,00	-	-	-	7.819.241.000,00	-	-	-
24	Dinas Pertanian	19.223.150.000,00	-	-	-	1.002.618.500,00	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.586.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat	1.829.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	2.931.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	284.398.217.536,00	984.000,00	-	2.960.000.000,00	938.582.787,54	-	984.000,00	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	372.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31	Sekretariat DPRD	3.256.515.860,00	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	5.546.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Denpasar Timur	9.577.809.920,00	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Denpasar Selatan	5.705.629.000,00	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Denpasar Utara	1.091.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-
36	Sekretariat Daerah	163.125.000,00	-	-	-	9.801.750.000,00	-	-	-
Jumlah		3.669.900.165.486,40	6.726.112.218,00	-	2.960.000.000,00	43.295.791.136,00	325.050.000,00	984.000,00	32.361.006.000,00

No	SKPD	Mutasi Kurang					Saldo Akhir Tahun 2025
		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Pengeluaran Hibah)	Mutasi Keluar Antar SKPD	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kapitalisasi Biaya ke Induknya	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	-	-	-	325.050.000,00	-	343.068.749.484,46
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	30.831.908.612,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	2.504.668.433.331,40
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	-	-	11.102.175.000,00	-	-	75.647.520.898,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	2.215.410.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	914.151.000,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	947.324.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-	-	218.105.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	627.340.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	170.250.000.000,00	-	-	-	-	110.576.707.950,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	1.121.700.000,00
15	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	55.921.351.300,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	1.324.779.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	89.465.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	1.680.800.160,00
20	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	9.399.529.501,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	4.762.000.000,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	18.483.555.000,00
23	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	60.856.012.000,00
24	Dinas Pertanian	-	-	147.200.000,00	-	-	20.078.568.500,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	1.586.205.000,00
26	Inspektorat	-	-	-	-	-	1.829.100.000,00
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	2.931.680.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	5.368.427.567,57	32.046.416.136,00	-	984.000,00	250.882.940.619,97
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	372.330.000,00
31	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	3.256.515.860,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	-	-	5.546.900.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	-	-	-	-	-	9.577.809.920,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	-	-	5.705.629.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	-	-	1.091.460.000,00
36	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	9.964.875.000,00
Jumlah		170.400.000.000,00	5.368.427.567,57	43.295.791.136,00	325.050.000,00	984.000,00	3.536.178.856.136,83



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR PENERTIBAN ASET TETAP TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	Kode Barang	Register	Harga	ALAMAT	DASAR KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	URAIAN PERMASALAHAN	Progress Tindak Lanjut 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SDN 5 Kesiman	1.3.1.1.1.4.2	0001	200.000.000,00	Jl. Waribang, Kesiman Petilian	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Masyarakat	Masih berproses di Kantor Pertanahan, sempat terkendala saat proses sidang pemeriksaan tanah tetapi sudah diselesaikan, selanjutnya menunggu penerbitan sertifikat
2	SDN 1 Tonja	1.3.1.1.1.4.3	0002	263.625.000,00	Jl. Seroja, Tonja	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Desa Adat Tonja	sudah terbit sertifikat NIB : 22.09.000033106.0 Tonja (sempat terkendala karena ada pihak yang mengklaim)
3	Puskesmas II Denpasar Selatan	1.3.1.1.1.4.1	0001	285.000.000,00	Jl. Danau Buyan, Sanur	BAST Puskesmas Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	1993	BAST Puskesmas Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Yayasan Pembangunan Sanur	Proses pembuatan perjanjian pinjam pakai dengan pihak Yayasan sebagai Pemilik Lahan (proses penghapusan)
4	SDN 15 Dauh Puri	1.3.1.1.1.4.2	0001	1.047.540.000,00	Jl. PB Sudirman, Dauh Puri	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Kodam Udayana	Proses pembuatan perjanjian pinjam pakai dengan pihak Kodam sebagai Pemilik Lahan (proses penghapusan)
5	Pustu Ubung Kaja	1.3.1.1.1.4.1	0001	57.000.000,00	Jl. Kertanegara, Ubung Kaja	BAST Puskesmas Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	1993	BAST Puskesmas Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Desa Adat Poh Gading	Proses pembuatan perjanjian pinjam pakai dengan pihak Desa Adat Poh Gading sebagai Pemilik Lahan (proses penghapusan)
6	SDN 2 Dauh Puri	1.3.1.1.1.4.2	0001	205.275.000,00	Jl. Nusa Kambangan, Dauh Puri Kauh	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim 4 Banjar (Jematang, Penghisan, Beraban & Sumuh)	proses pensertifikatan a.n Pemerintah Kota Denpasar (sudah tahap sidang pemeriksaan tanah)
7	SDN 1 Padangsambian	1.3.1.1.1.4.2	0001	789.572.250,00	Jl. Gunung Sanghyang, Padang Sambian	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Desa Adat Padangsambian	sudah terbit sertifikat NIB : 22.09.000033335.0 Padangsambian (sempat terkendala karena ada pihak yang mengklaim)
8	SDN 4 Pemecutan	1.3.1.1.1.4.2	0001	2.362.500.000,00	Jl. Setia Budi Pemecutan Kaja	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Pura Maospahit	Sesuai BAST Prov. Bali tanah milik Pengempon Pura Maospahit (proses penghapusan)
9	SDN No. 2 Pemecutan	1.3.1.1.1.4.2	0001	715.000.000,00	Jl. Imam Bonjol, Pemecutan, Kelod	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	2006	BAST Sekolah Dasar Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar	Tanah Diklaim Masyarakat	proses pensertifikatan a.n Pemerintah Kota Denpasar (sudah tahap sidang pemeriksaan tanah)



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah										
			Belanja Modal	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Penerimaan Hibah	Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	Mutasi Masuk Antar SKPD	Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan	Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya			
						Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025						
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	178.116.206.120,95	21.857.474.917,00	2.291.791.797,65	1.100.856.875,00	6.305.792.100,00	112.550.000,00	956.685.000,00	285.000.000,00	115.744.685,80	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	323.966.750.672,46	34.058.363.109,00	-	-	86.136.000,00	-	-	812.870.000,00	-	-	-	357.050.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.413.869.187,02	18.904.036.898,00	558.105.200,00	-	-	-	-	148.889.800,00	-	-	-	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.761.627.446,24	643.548.750,00	-	-	56.610.400,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	8.073.332.463,68	208.573.000,00	76.195.062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	26.460.052.175,52	12.365.114.002,00	-	-	-	-	-	104.900.000,00	-	-	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4.675.493.352,84	158.534.101,00	-	-	-	-	-	285.000.000,00	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	9.292.136.090,52	306.847.218,00	-	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	5.037.492.170,76	-	-	-	3.841.857,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	2.983.040.309,85	25.407.900,00	-	-	-	328.400.000,00	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.784.562.242,08	35.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	155.243.626.116,20	39.102.076.881,00	-	382.000.000,00	-	-	-	317.438.550,00	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	13.532.831.850,68	117.006.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.056.414.202,84	625.085.500,00	-	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	100.006.281.422,61	23.919.205.055,00	9.582.647.844,00	2.520.964.893,00	-	1.092.990.000,00	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	24.131.773.856,13	811.577.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.788.224.972,84	280.246.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.874.189.867,44	53.708.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.187.404.519,84	164.280.976,00	-	-	-	-	-	46.090.000,00	-	-	-	-
20	Dinas Kebudayaan	5.091.190.485,84	938.798.947,00	-	-	-	-	-	2.300.000,00	-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.110.074.981,19	26.337.993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	4.070.921.731,68	209.308.991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Pariwisata	20.448.065.189,11	446.558.509,00	7.200.957.826,40	-	-	181.760.000,00	-	27.205.500,00	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	9.038.943.551,68	132.950.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.775.584.630,68	129.255.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat	6.155.542.097,51	2.111.606.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.759.003.700,00	394.736.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	20.261.139.906,33	6.748.590.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.995.875.430,84	361.401.599,00	-	-	-	-	-	855.000.000,00	-	-	-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.092.780.676,00	644.326.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sekretariat DPRD	23.662.322.535,63	1.242.639.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	6.953.116.825,86	940.976.846,00	-	-	-	7.290.000,00	-	1.126.390.000,00	-	-	-	11.700.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	8.877.095.128,63	1.073.412.338,00	-	-	-	-	-	974.390.000,00	-	-	-	23.400.000,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	10.320.570.546,88	1.242.918.771,00	-	-	8.000.000,00	56.650.000,00	6.438.000,00	1.468.910.000,00	-	-	-	42.250.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	8.495.017.394,17	398.225.746,00	-	-	-	-	-	1.662.300.000,00	-	-	-	5.850.000,00
36	Sekretariat Daerah	38.992.432.064,94	14.559.358.633,00	22.400.000,00	-	-	-	-	4.216.569.506,58	-	-	-	-
	Jumlah	1.146.484.985.917,67	185.238.091.071,00	19.732.097.730,05	4.088.821.768,00	6.460.380.357,00	1.779.640.000,00	963.123.000,00	12.418.253.356,58	115.744.685,80	440.250.000,00		

No	SKPD	Mutasi Kurang				Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel		Saldo Akhir Tahun 2025
		Koreksi Saldo Awal	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Antar SKPD	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Perolehan TA 2025	
		Reklasifikasi ke Aset Lainnya					Perolehan Sebelum TA 2025	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	-	-	6.303.509.866,82	-	115.744.685,80	22.444.700,00	204.633.102.365,78
2	Dinas Kesehatan	-	13.817.700,00	31.201.497.940,85	-	-	61.725.378,00	328.004.128.762,61
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	771.801.869,00	-	-	194.539.998,00	62.058.559.218,02
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	3.275.050.243,00	17.500.000,00	-	-	15.169.236.353,24
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	-	-	89.175.000,00	188.774.050,00	-	-	8.080.151.475,68
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	1.658.897.015,52	-	-	-	37.271.169.162,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	5.119.027.453,84
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	667.805.050,00	-	-	14.999.985,00	9.001.178.273,52
9	Dinas Sosial	-	-	386.918.000,00	-	-	-	4.654.416.027,76
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	173.480.000,00	-	-	-	3.163.368.209,85
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	450.000,00	6.819.712.242,08
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	11.095.469.700,00	4.626.990.000,00	-	2.152.000.006,00	177.170.681.841,20
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	441.298.130,00	-	-	-	13.208.540.370,68
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	57.475.000,00	-	-	-	7.709.024.702,84
15	Dinas Perhubungan	48.947.000,00	96.207.818,00	774.184.950,00	-	-	-	136.202.749.446,61
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	721.313.500,00	-	-	-	24.222.038.201,13
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	286.122.870,00	-	-	4.900.000,00	2.777.449.053,84
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	331.595.000,00	-	-	-	12.596.303.267,44
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	987.269.695,00	67.265.000,00	-	-	5.343.240.800,84
20	Dinas Kebudayaan	-	-	256.519.633,84	-	-	270.000,00	5.775.499.799,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	7.136.412.974,19
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	184.566.461,00	-	-	-	4.095.664.261,68
23	Dinas Pariwisata	-	-	329.541.137,11	-	-	-	27.975.005.867,40
24	Dinas Pertanian	-	-	412.000.000,00	-	-	-	8.759.893.353,68
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	282.413.500,00	-	-	-	8.622.427.078,68
26	Inspektorat	-	-	421.505.182,00	-	-	-	7.845.642.942,51
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	3.153.740.394,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	34.875.000,00	901.329.800,00	-	8.999.991,00	26.064.525.455,33
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	259.169.414,00	2.101.000.000,00	-	-	10.852.107.615,84
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	212.128.180,00	-	-	-	5.524.978.949,00
31	Sekretariat DPRD	-	-	3.336.048.260,80	-	-	-	21.568.913.356,83
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	499.596.887,36	285.000.000,00	-	279.720,00	8.254.597.064,50
33	Kecamatan Denpasar Timur	-	11.000.000,00	217.169.883,00	-	-	600.000,00	10.719.527.583,83

No	SKPD	Mutasi Kurang								Saldo Akhir Tahun 2025
		Koreksi Saldo Awal		Reklasifikasi ke Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Antar SKPD	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel		
		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Kurang Lainnya					Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025	
34	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	433.480.928,00	-	-	-	-	12.712.256.389,88
35	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	814.273.867,00	320.000.000,00	-	-	-	9.427.119.273,17
36	Sekretariat Daerah	-	-	-	2.138.804.349,00	3.910.394.506,58	-	41.399.959,50	-	51.700.161.389,44
	Jumlah	48.947.000,00	62.099.878,00	121.025.518,00	69.054.956.513,30	12.418.253.356,58	115.744.685,80	2.502.609.737,50	5.200.000,00	1.293.392.551.196,92



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah										
			Belanja Modal	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Penerimaan Hibah		Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Mutasi Masuk Antar SKPD	Reklasifikasi dan Kapitalisasi dari Ektrakomptabel	Reklasifikasi dan Kapitalisasi ke Gedung Induk	Mutasi Tambah Nonbelanja Modal Lainnya
							Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025					
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	713.298.839.040,10	179.819.807.727,00	-	2.320.834.200,00	67.787.000,00	2.589.643.820,00	1.309.387.750,00	2.650.205.093,64	2.106.246.863,51	286.597.000,00	-	698.640.869,00
2	Dinas Kesehatan	192.942.290.313,27	3.798.848.317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.794.100.683,00	33.861.310.038,00	6.660.058.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.605.062.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	20.281.383.092,24	2.773.416.194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.337.465.000,00	295.586.004,00	-	-	-	-	-	-	-	10.710.000,00	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	3.270.874.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1.877.709.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	11.943.706.950,44	-	-	-	-	7.722.000,00	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	2.613.837.300,00	186.413.594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.380.258.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48.839.720.378,07	13.370.257.149,00	-	-	-	3.457.944.000,00	-	-	395.297.500,00	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	328.632.101,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	29.397.533.422,48	991.223.740,00	96.207.818,00	-	-	-	-	-	-	1.612.033.802,00	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	82.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.959.465.925,76	-	-	-	-	-	-	-	996.834.000,00	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.182.456.987,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.017.087.600,00	-	-	-	-	-	-	-	79.327.465,00	-	-	-
20	Dinas Kebudayaan	17.449.040.530,04	418.670.843,00	-	-	-	-	-	-	356.074.000,00	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.318.813.813,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	3.494.630.478,14	28.877.442,00	-	-	-	-	-	-	1.038.056.000,00	13.900.000,00	54.450.000,00	-
23	Dinas Pariwisata	122.667.088.344,24	-	-	-	1.427.774.472,61	-	-	-	2.854.924.500,00	-	-	-
24	Dinas Pertanian	7.948.001.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.194.999.557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat	2.534.921.302,00	2.818.396.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	188.356.216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	6.961.544.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.946.448.863,51	269.132.738,00	-	19.385.649,00	98.500.000,00	-	84.197.000,00	-	-	-	-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.284.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sekretariat DPRD	23.148.582.429,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	3.203.342.490,47	243.828.121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Denpasar Timur	1.739.539.248,00	97.213.582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Denpasar Selatan	15.185.463.550,22	674.027.766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Denpasar Utara	10.779.573.936,00	19.197.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Sekretariat Daerah	5.190.172.630,00	31.302.000,00	-	-	-	-	-	-	19.185.332.000,00	-	-	-
Jumlah		#####	239.885.865.559,00	6.756.265.818,00	2.340.219.849,00	1.594.061.472,61	6.055.309.820,00	1.393.584.750,00	2.650.205.093,64	27.012.092.328,51	311.207.000,00	1.666.483.802,00	4.099.640.869,00

No	SKPD	Mutasi Kurang								Saldo Akhir Tahun 2025
		Koreksi Saldo Awal	Belanja Modal TA 2025 Tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Mutasi Keluar Antar SKPD	Reklasifikasi ke Ektrakomptabel		
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain						Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	-	2.200.649.000,00	12.746.807.534,59	21.826.559.655,08	2.650.205.093,64	-	135.719.077,35	301.760.749,00	865.286.288.253,59
2	Dinas Kesehatan	-	490.147.917,00	-	3.494.666.439,00	-	177.803.465,00	-	-	195.979.520.809,27
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	545.600.000,00	59.123.181,43	-	49.710.745.539,57
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	18.605.062.501,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	-	95.487.000,00	76.195.062,00	-	-	5.542.710.000,00	-	-	17.340.407.224,24
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	193.344.684,00	-	-	-	-	-	-	1.450.416.320,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	-	-	-	-	-	-	-	-	3.270.874.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.709.550,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	7.722.000,00	-	11.943.706.950,44
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.250.894,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	2.380.258.400,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	47.634.801,89	-	-	-	-	66.015.584.225,18
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	328.632.101,71
15	Dinas Perhubungan	-	328.278.883,00	-	995.254.520,00	-	-	-	-	30.773.465.379,48

No	SKPD	Mutasi Kurang								Saldo Akhir Tahun 2025
		Koreksi Saldo Awal	Belanja Modal TA 2025 Tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Mutasi Keluar Antar SKPD	Reklasifikasi ke Ektrakomptabel		
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain						Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	82.060.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	3.956.299.925,76
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	77.182.456.987,71
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	38.580.000,00	-	-	-	-	2.057.835.065,00
20	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	18.223.785.373,04
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.318.813.813,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	28.980.000,00	-	-	-	-	4.600.933.920,14
23	Dinas Pariwisata	-	-	5.699.778.226,40	1.211.145.190,01	-	-	-	71.960.000,00	119.966.903.900,44
24	Dinas Pertanian	-	-	-	59.318.000,00	-	-	-	-	7.888.683.400,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	61.354.071,00	-	-	-	-	2.133.645.486,00
26	Inspektorat	-	13.941.841,60	-	-	-	-	-	-	5.339.375.876,40
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	188.356.216,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	6.961.544.415,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	20.745.978.863,51	0,00	-	6.671.685.387,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284.040.000,00
31	Sekretariat DPRD	457.200,00	-	-	-	-	-	-	-	23.148.125.229,31
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	3.447.170.611,47
33	Kecamatan Denpasar Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1.836.752.830,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	-	29.917.623,00	-	-	-	-	24.750.424,00	-	15.804.823.269,22
35	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	10.798.771.608,00
36	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	6.660.000,00	-	24.400.146.630,00
Jumlah		457.200,00	3.351.766.948,60	18.522.780.822,99	27.763.492.676,98	2.650.205.093,64	27.012.092.328,51	233.974.682,78	373.720.749,00	#####



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang				Saldo Akhir Tahun 2025
			Belanja Modal	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	Penerimaan Hibah		Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Reklasifikasi dan Kapitalisasi ke Induk	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal TA 2025 Tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	
					Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025								
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	4.795.950.366,73	401.166.000,00	10.455.015.736,94	475.964.059,00	15.000.000,00	72.270.898,00	-	-	-	-	229.658.012,42	72.270.898,00	15.913.438.150,25
2	Dinas Kesehatan	7.387.153.852,02	227.063.109,00	13.817.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.628.034.661,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.688.113.662.825,55	311.871.006.669,00	-	-	-	-	-	-	1.563.989.150,00	4.978.907.200,00	834.367.736,75	-	1.992.607.405.407,80
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	4.961.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.961.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	11.897.285.053,42	2.449.801.655,00	-	-	-	-	99.354.102,00	-	-	-	5.514.099,12	-	14.440.926.711,30
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	44.750.000,00	4.934.302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.684.302,00
9	Dinas Sosial	27.841.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.841.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	123.770.969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.770.969,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	2.400.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.930,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	565.576.476,00	3.666.680.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232.256.615,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	28.980.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.980.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.740.000,00	4.664.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.404.220,00
15	Dinas Perhubungan	5.143.118.170,00	9.561.151.690,00	-	-	-	-	-	-	-	9.534.918.498,00	-	-	5.169.351.362,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	974.559.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.559.665,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810.157.349,00	4.930.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815.088.109,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92.562.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.562.800,00
20	Dinas Kebudayaan	515.221.660,00	9.867.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.088.857,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.450.000,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	89.449.800,00	9.879.422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.329.222,00
23	Dinas Pariwisata	14.316.033.724,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501.179.600,00	329.284.258,60	-	12.485.569.865,70
24	Dinas Pertanian	551.246.050,10	24.771.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.438.000,00	-	553.579.220,10
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.740.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.740.300,00
26	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	279.990.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.990.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	263.641.500,00	202.267.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.908.919,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.829.000,00	4.902.612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.731.612,00
31	Sekretariat DPRD	2.250.839.947,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.839.947,80
32	Kecamatan Denpasar Barat	6.183.921.850,04	848.223.676,00	-	-	-	-	9.164.160,00	-	101.800.480,00	-	-	-	6.939.509.206,04
33	Kecamatan Denpasar Timur	1.859.265.622,00	191.324.610,00	11.000.000,00	-	-	-	5.716.500,00	-	-	-	-	-	2.067.306.732,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	13.762.307.474,78	2.269.036.302,00	-	-	-	-	124.591.770,00	-	124.955.024,00	-	-	-	16.030.980.522,78
35	Kecamatan Denpasar Utara	6.213.153.256,02	1.165.776.700,00	-	-	-	-	103.161.761,75	10.000.000,00	133.767.000,00	-	-	-	7.358.324.717,77
36	Sekretariat Daerah	38.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000.000,00
Jumlah		1.766.433.199.211,76	332.924.809.582,00	10.479.833.436,94	475.964.059,00	15.000.000,00	72.270.898,00	341.988.293,75	10.000.000,00	1.924.511.654,00	16.015.005.298,00	1.421.262.106,89	72.270.898,00	2.091.320.015.524,56

9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang						Saldo Akhir Tahun 2025
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah		Mutasi Antar SKPD	Belanja Modal TA 2025 tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Kapitalisasi dari Aset Renovasi ke Induknya	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Antar SKPD	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel Perolehan TA 2025	
				Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025								
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	18.642.893.058,91	4.208.666.896,00	30.223.000,00	24.300.000,00	-	-	-	-	4.050.185.375,35	-	990.000,00	18.854.907.579,56
2	Dinas Kesehatan	339.527.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.527.725,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.514.000,00	3.863.741.938,00	-	-	-	1.624.485.938,00	2.239.256.000,00	-	-	-	-	323.514.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.200.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.200.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	21.288.174.512,65	-	-	-	-	-	-	-	-	8.275.077.312,65	-	13.013.097.200,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.025.747.971,00	52.503.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.078.250.971,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	80.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.600.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	71.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.500.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.985.532.200,00	-	-	-	8.275.077.312,65	-	-	-	-	-	-	12.260.609.512,65
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	17.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.400.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.625.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.249.922.173,00	488.260.629,00	-	-	-	-	-	1.612.033.802,00	-	-	-	126.149.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	43.946.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.946.650,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	372.782.200,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	-	370.382.200,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.925.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.900.000,00
20	Dinas Kebudayaan	2.968.749.500,00	292.180.000,00	-	-	-	-	-	-	448.566.500,00	-	-	2.812.363.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.007.746.370,64	60.697.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.469.588,00	1.027.974.370,64
22	Dinas Perikanan dan Ketahananana Pangan	54.450.000,00	-	-	-	-	-	-	54.450.000,00	-	-	-	-
23	Dinas Pariwisata	347.763.370,00	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	339.763.370,00
24	Dinas Pertanian	505.388.920,80	265.565.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.954.917,80
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	217.803.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.803.470,00
26	Inspektorat	12.079.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.079.525,00
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	211.225.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.225.700,00
28	Badan Pendapatan Daerah	6.095.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.095.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	247.053.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.053.500,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.022.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.022.400,00

9

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang						Saldo Akhir Tahun 2025
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah		Mutasi Antar SKPD	Belanja Modal TA 2025 tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Kapitalisasi dari Aset Renovasi ke Induknya	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Antar SKPD	Reklasifikasi ke Ektrakomptabel Perolehan TA 2025	
				Perolehan TA 2025	Perolehan Sebelum TA 2025								
31	Sekretariat DPRD	73.210.000,00	19.869.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.079.000,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	57.940.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.940.896,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	103.981.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.981.060,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	231.267.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.267.500,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	56.443.651,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.443.651,46
36	Sekretariat Daerah	976.357.260,00	147.650.000,00	-	-	-	-	22.400.000,00	-	91.150.000,00	-	-	1.010.457.260,00
Jumlah		54.715.768.614,46	9.419.135.048,00	30.223.000,00	24.300.000,00	8.275.077.312,65	1.624.485.938,00	2.261.656.000,00	1.666.483.802,00	4.600.301.875,35	8.275.077.312,65	41.459.588,00	53.995.039.459,11



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			Saldo Akhir Tahun 2025
			Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Reklasifikasi dan Kapitalisasi ke Aset Induknya	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	3.839.604.700,00	2.200.649.000,00	-	-	477.765.000,00	2.320.834.200,00	1.293.714.000,00	477.765.000,00	2.425.705.500,00
2	Dinas Kesehatan	1.761.994.000,00	490.147.917,00	-	-	-	-	-	-	2.252.141.917,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.937.393.869,88	-	1.563.989.150,00	1.624.485.938,00	-	-	700.639.800,00	-	6.425.229.157,88
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	123.637.102,00	95.487.000,00	-	-	-	99.354.102,00	-	-	119.770.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	193.344.684,00	-	-	-	-	-	-	193.344.684,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	1.044.953.346,00	328.278.883,00	-	-	-	47.729.346,00	-	-	1.325.502.883,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98.598.775,00	-	-	-	-	-	98.598.775,00	-	-
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat	-	13.941.841,60	-	-	-	-	-	-	13.941.841,60
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	29.689.000,00	-	-	-	-	-	-	-	29.689.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.385.649,00	-	-	-	-	19.385.649,00	-	-	-

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			Saldo Akhir Tahun 2025
			Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Mutasi Masuk Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Reklasifikasi dan Kapitalisasi ke Aset Induknya	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar Internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	27.682.320,00	-	101.800.480,00	-	-	9.164.160,00	9.164.160,00	-	111.154.480,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	5.716.500,00	-	-	-	-	5.716.500,00	-	-	-
34	Kecamatan Denpasar Selatan	153.156.970,00	29.917.623,00	124.955.024,00	-	-	124.591.770,00	-	-	183.437.847,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	119.695.592,00	-	133.767.000,00	-	-	103.161.761,75	16.533.830,25	-	133.767.000,00
36	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		11.161.507.823,88	3.351.766.948,60	1.924.511.654,00	1.624.485.938,00	477.765.000,00	2.729.937.488,75	2.118.650.565,25	477.765.000,00	13.213.684.310,48



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan yang akan dilanjutkan dan tidak dilanjutkan
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	Jenis Barang	Nomor		Nama Aset	Nilai Kontrak (Rp)	Status (akan dilanjutkan/ tidak)
			Kode Barang	Register			
1	Kecamatan Denpasar Utara	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	40	Jalan lainnya	65.884.000,00	Akan Dilanjutkan
2	Kecamatan Denpasar Utara	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	10	Saluran Drainage	34.287.000,00	Akan Dilanjutkan
3	Kecamatan Denpasar Utara	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	4	Jalan lainnya	33.596.000,00	Akan Dilanjutkan
4	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.09.010	34	Jalan Khusus Lain-lain	8.347.000,00	Akan Dilanjutkan
5	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.09.010	35	Jalan Khusus Lain-lain	10.109.100,00	Akan Dilanjutkan
6	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.09.010	36	Jalan Khusus Lain-lain	10.109.100,00	Akan Dilanjutkan
7	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	6	Jalan lainnya	30.855.700,00	Akan Dilanjutkan
8	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	24	Jalan lainnya	7.004.907,00	Akan Dilanjutkan
9	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.08.01	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	22.572.787,00	Akan Dilanjutkan
10	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	1	Pagar Permanen	7.344.836,00	Akan Dilanjutkan
11	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	8	Saluran Drainage	13.322.952,00	Akan Dilanjutkan
12	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.03.01.05.05	5	Sumur Resapan	4.588.984,00	Akan Dilanjutkan
13	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	1	Jalan lainnya	11.401.698,00	Akan Dilanjutkan
14	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	17	Saluran Drainage	19.525.566,00	Akan Dilanjutkan
15	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	2	Jalan lainnya	12.756.608,00	Akan Dilanjutkan
16	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.03	2	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	11.314.541,00	Akan Dilanjutkan
17	Kecamatan Denpasar Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	3	Jalan lainnya	14.184.068,00	Akan Dilanjutkan
18	Kecamatan Denpasar Barat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.05.01	41	Jalan Desa	9.354.000,00	Akan Dilanjutkan
19	Kecamatan Denpasar Barat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	6	Jalan lainnya	34.903.000,00	Akan Dilanjutkan
20	Kecamatan Denpasar Barat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	14	Jalan lainnya	33.448.740,00	Akan Dilanjutkan
21	Kecamatan Denpasar Barat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	15	Jalan lainnya	33.448.740,00	Akan Dilanjutkan
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	95.233.300,00	Akan Dilanjutkan
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	99.496.500,00	Akan Dilanjutkan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	52	Bangunan Gedung Kantor Permanen	97.895.340,00	Akan Dilanjutkan
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	54	Bangunan Gedung Kantor Permanen	92.432.000,00	Akan Dilanjutkan
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	99.392.591,00	Akan Dilanjutkan
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	92.555.800,00	Akan Dilanjutkan
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	99.392.591,00	Akan Dilanjutkan
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.030.05	10	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	96.585.000,00	Akan Dilanjutkan
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.012.04	22	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	96.351.000,00	Akan Dilanjutkan
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.011.04	1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	972.795.938,00	Akan Dilanjutkan
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.030.05	12	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	96.374.000,00	Akan Dilanjutkan
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	69.457.000,00	Akan Dilanjutkan
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	75	Bangunan Gedung Kantor Permanen	98.194.000,00	Akan Dilanjutkan
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	97.095.000,00	Akan Dilanjutkan
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.09.01	7	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	97.634.000,00	Akan Dilanjutkan
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1893	Jalan kota	26.750.000,00	Akan Dilanjutkan
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1894	Jalan kota	17.872.015,00	Akan Dilanjutkan
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1895	Jalan kota	18.573.090,00	Akan Dilanjutkan
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1896	Jalan kota	49.005.000,00	Akan Dilanjutkan
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	114	Jembatan pada jalan kota	97.702.000,00	Akan Dilanjutkan
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1897	Jalan kota	61.351.418,48	Akan Dilanjutkan
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1898	Jalan kota	70.767.728,40	Akan Dilanjutkan
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	1899	Jalan kota	57.041.626,00	Akan Dilanjutkan
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	123	Saluran Drainage	99.552.600,00	Akan Dilanjutkan
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.04.02	3	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	75.912.800,00	Akan Dilanjutkan
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2029	Jalan kota	29.295.000,00	Akan Dilanjutkan
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	137	Saluran Drainage	99.525.236,00	Akan Dilanjutkan

NO.	SKPD	Jenis Barang	Nomor		Nama Aset	Nilai Kontrak (Rp)	Status (akan dilanjutkan/ tidak)
			Kode Barang	Register			
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2103	Jalan kota	39.818.000,00	Akan Dilanjutkan
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	152	Saluran Drainage	72.138.633,00	Akan Dilanjutkan
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	153	Saluran Drainage	83.673.354,00	Akan Dilanjutkan
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	62	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	96.714.688,00	Akan Dilanjutkan
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	154	Saluran Drainage	93.865.984,00	Akan Dilanjutkan
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	63	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	87.442.800,00	Akan Dilanjutkan
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	155	Saluran Drainage	84.009.900,00	Akan Dilanjutkan
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	156	Saluran Drainage	84.139.043,00	Akan Dilanjutkan
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	157	Saluran Drainage	74.613.000,00	Akan Dilanjutkan
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	158	Saluran Drainage	89.063.636,00	Akan Dilanjutkan
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	159	Saluran Drainage	79.243.600,00	Akan Dilanjutkan
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2076	Jalan kota	24.176.020,00	Akan Dilanjutkan
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2079	Jalan kota	98.752.300,00	Akan Dilanjutkan
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2086	Jalan kota	98.645.600,00	Akan Dilanjutkan
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2087	Jalan kota	98.645.600,00	Akan Dilanjutkan
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2088	Jalan kota	98.556.900,00	Akan Dilanjutkan
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2089	Jalan kota	98.556.900,00	Akan Dilanjutkan
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2093	Jalan kota	99.440.238,00	Akan Dilanjutkan
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.04.01	2094	Jalan kota	99.440.238,00	Akan Dilanjutkan
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	118	Jembatan pada jalan kota	98.457.000,00	Akan Dilanjutkan
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	119	Jembatan pada jalan kota	98.457.000,00	Akan Dilanjutkan
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.03.01.05.06	5	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	59.157.000,00	Akan Dilanjutkan
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	195	Saluran Drainage	95.345.059,00	Akan Dilanjutkan
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	196	Saluran Drainage	95.238.499,00	Akan Dilanjutkan
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	197	Saluran Drainage	95.403.057,00	Akan Dilanjutkan
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	198	Saluran Drainage	67.518.880,00	Akan Dilanjutkan
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	199	Saluran Drainage	67.518.880,00	Akan Dilanjutkan
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	200	Saluran Drainage	67.468.930,00	Akan Dilanjutkan
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	201	Saluran Drainage	72.187.024,00	Akan Dilanjutkan
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	202	Saluran Drainage	72.187.024,00	Akan Dilanjutkan
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	203	Saluran Drainage	68.286.334,00	Akan Dilanjutkan
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	204	Saluran Drainage	67.518.880,00	Akan Dilanjutkan
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	205	Saluran Drainage	72.229.759,00	Akan Dilanjutkan
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	206	Saluran Drainage	73.307.324,00	Akan Dilanjutkan
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	223	Jembatan pada jalan kota	98.125.700,00	Akan Dilanjutkan
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	224	Jembatan pada jalan kota	97.537.900,00	Akan Dilanjutkan
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	225	Jembatan pada jalan kota	98.295.600,00	Akan Dilanjutkan
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	226	Jembatan pada jalan kota	67.686.300,00	Akan Dilanjutkan
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	227	Jembatan pada jalan kota	97.510.000,00	Akan Dilanjutkan
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	228	Jembatan pada jalan kota	93.114.000,00	Akan Dilanjutkan
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.02.04.01	229	Jembatan pada jalan kota	97.510.000,00	Akan Dilanjutkan
90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	23	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	24.283.000,00	Akan Dilanjutkan
91	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.011.04	9	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	95.487.000,00	Akan Dilanjutkan
92	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.013.010	1	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	98.009.004,00	Akan Dilanjutkan
93	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.013.010	2	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	95.335.680,00	Akan Dilanjutkan
94	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.2.018.01.01.01	93	Traffic Light	21.890.000,00	Akan Dilanjutkan
95	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.2.018.01.01.01	94	Traffic Light	29.898.000,00	Akan Dilanjutkan
96	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.2.018.01.01.01	95	Traffic Light	19.877.000,00	Akan Dilanjutkan
97	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.2.02.04.03.01	2	Ponton	95.998.794,00	Akan Dilanjutkan
98	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.018.01	28	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	480.200.000,00	Akan Dilanjutkan
99	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	1	Pagar Permanen	19.702.000,00	Akan Dilanjutkan
100	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	391.350.000,00	Akan Dilanjutkan
101	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.05	2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	19.304.000,00	Akan Dilanjutkan
102	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15.003.000,00	Akan Dilanjutkan

NO.	SKPD	Jenis Barang	Nomor		Nama Aset	Nilai Kontrak (Rp)	Status (akan dilanjutkan/ tidak)
			Kode Barang	Register			
103	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.013.01	4	Gedung Pos Jaga Permanen	7.019.962,00	Akan Dilanjutkan
104	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.018.01	32	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	18.017.631,00	Akan Dilanjutkan
105	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.018.01	33	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	88.577.511,00	Akan Dilanjutkan
106	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.018.01	34	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	6.098.065,00	Akan Dilanjutkan
107	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.018.01	35	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	5.415.646,00	Akan Dilanjutkan
108	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.018.01	36	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	94.832.850,00	Akan Dilanjutkan
109	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12.318.424,00	Akan Dilanjutkan
110	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	98.064.948,00	Akan Dilanjutkan
111	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96.850.053,00	Akan Dilanjutkan
112	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	98.064.948,00	Akan Dilanjutkan
113	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	98.064.948,00	Akan Dilanjutkan
114	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.06.01	36	Bangunan Rumah Sakit Umum	402.200.000,00	Akan Dilanjutkan
115	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.05	24	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	498.139.000,00	Akan Dilanjutkan
116	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.05	26	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	469.594.000,00	Akan Dilanjutkan
117	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.05	31	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	392.061.000,00	Akan Dilanjutkan
118	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.06.01	37	Bangunan Rumah Sakit Umum	99.103.020,00	Akan Dilanjutkan
119	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	2	Pagar Permanen	59.237.000,00	Akan Dilanjutkan
120	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	12	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	231.699.460,00	Akan Dilanjutkan
121	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.05	5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	53.190.000,00	Akan Dilanjutkan
122	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	4	Pagar Permanen	47.474.000,00	Akan Dilanjutkan
123	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	138.887.222,00	Akan Dilanjutkan
124	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	2	Pagar Permanen	29.284.000,00	Akan Dilanjutkan
125	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	20	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	78.955.000,00	Akan Dilanjutkan
126	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	111.109.778,00	Akan Dilanjutkan
127	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	2	Pagar Permanen	24.640.000,00	Akan Dilanjutkan
128	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	127.285.540,00	Akan Dilanjutkan
129	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	48.877.000,00	Akan Dilanjutkan
130	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.04.01.04.01	2	Pagar Permanen	24.640.000,00	Akan Dilanjutkan
131	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	10	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	48.738.500,00	Akan Dilanjutkan
132	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	48.877.000,00	Akan Dilanjutkan
133	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	73.216.000,00	Akan Dilanjutkan
134	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.591.000,00	Akan Dilanjutkan
135	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.632.000,00	Akan Dilanjutkan
136	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.602.000,00	Akan Dilanjutkan
137	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	73.205.000,00	Akan Dilanjutkan
138	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	10	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.635.000,00	Akan Dilanjutkan
139	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.616.000,00	Akan Dilanjutkan
140	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.607.000,00	Akan Dilanjutkan
141	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.618.000,00	Akan Dilanjutkan
142	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	10	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	35.057.000,00	Akan Dilanjutkan
143	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.596.000,00	Akan Dilanjutkan
144	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.624.000,00	Akan Dilanjutkan
145	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	13	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.586.000,00	Akan Dilanjutkan
146	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.580.000,00	Akan Dilanjutkan
147	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	97.646.000,00	Akan Dilanjutkan
148	Badan Pendapatan Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.05	6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	29.689.000,00	Akan Dilanjutkan
149	Inspektorat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13.941.841,60	Akan Dilanjutkan
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dilanjutkan						13.213.684.310,48	
150	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	31	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	48.398.000,00	Tidak Dilanjutkan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	122	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.370.000,00	Tidak Dilanjutkan
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	22	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	98.996.000,00	Tidak Dilanjutkan
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	20	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	99.379.000,00	Tidak Dilanjutkan
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	21	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	99.379.000,00	Tidak Dilanjutkan
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	19	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	99.456.000,00	Tidak Dilanjutkan

NO.	SKPD	Jenis Barang	Nomor		Nama Aset	Nilai Kontrak (Rp)	Status (akan dilanjutkan/ tidak)
			Kode Barang	Register			
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	1	Saluran Drainage	99.500.000,00	Tidak Dilanjutkan
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.037.01	18	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	99.544.000,00	Tidak Dilanjutkan
8	Kecamatan Denpasar Utara	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.010.01	1	Jalan lainnya	16.533.830,25	Tidak Dilanjutkan
9	Kecamatan Denpasar Utara	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.01.01.05.01	34	Jalan Desa	9.164.160,00	Tidak Dilanjutkan
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.01.01	28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	97.504.000,00	Tidak Dilanjutkan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.05.01	1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	99.494.600,00	Tidak Dilanjutkan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	98	Saluran Drainage	49.335.000,00	Tidak Dilanjutkan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	103	Saluran Drainage	49.736.000,00	Tidak Dilanjutkan
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	53	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	43.359.000,00	Tidak Dilanjutkan
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.06.09	2	Warning System	43.711.000,00	Tidak Dilanjutkan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	57	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	49.014.000,00	Tidak Dilanjutkan
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	58	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	73.879.000,00	Tidak Dilanjutkan
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	59	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	23.545.000,00	Tidak Dilanjutkan
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.04.04.02	120	Saluran Drainage	44.614.000,00	Tidak Dilanjutkan
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	60	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	56.638.100,00	Tidak Dilanjutkan
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.03	61	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	10.103.600,00	Tidak Dilanjutkan
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.4.02.01.03.04	3	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	59.706.500,00	Tidak Dilanjutkan
23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	89.623.000,00	Tidak Dilanjutkan
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	94.618.000,00	Tidak Dilanjutkan
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	94.626.000,00	Tidak Dilanjutkan
26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	93.291.000,00	Tidak Dilanjutkan
27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	10	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	94.623.000,00	Tidak Dilanjutkan
28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	13	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	93.992.000,00	Tidak Dilanjutkan
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.583.000,00	Tidak Dilanjutkan
30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.271.000,00	Tidak Dilanjutkan
31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	88.242.000,00	Tidak Dilanjutkan
32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.562.000,00	Tidak Dilanjutkan
33	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.249.000,00	Tidak Dilanjutkan
34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.800.000,00	Tidak Dilanjutkan
35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	94.634.000,00	Tidak Dilanjutkan
36	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	94.800.000,00	Tidak Dilanjutkan
37	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	79.153.000,00	Tidak Dilanjutkan
38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.559.000,00	Tidak Dilanjutkan
39	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.288.000,00	Tidak Dilanjutkan
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.010.01	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	29.800.000,00	Tidak Dilanjutkan
41	Dinas Perpus dan Kearsipan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.3.01.01.016.01	1	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	98.598.775,00	Tidak Dilanjutkan
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan						2.812.672.565,25	
TOTAL						16.026.356.875,73	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BIDANG TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANAAN (TPBP/STUP) DIPEROLEH DARI PELAKSANAAN KONSOLIDASI LAHAN (LC)
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	DESA/KELURAHAN	KEC	NO KAPLING	LUAS (m2)	Luas Peta (±m2)*	PENGUSAHAAN	PENGUNAAN	KETERANGAN	NILAI TANAH	ALAMAT
1	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	1531A	215	175	Pemkot Denpasar	Tanah Kosong		5.663.000,00	Jalan Tukad Badung XXI
2	Kelurahan Renon	Denpasar	1141E	320	258		Pos Induk Kamling Br Kelod Renon		5.663.000,00	Jalan Tukad Badung XVII A
3	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	1286	100	102	Pemkot Denpasar	Warung Semi Permanen		5.491.000,00	Jalan Tukad Badung XVI D
4	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	1240	245	335		Tanah Kosong		5.491.000,00	Jalan Tukad Citarum
5	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	1176	530	512		Tanah Kosong		5.491.000,00	Jalan Tukad Citarum Gang O
6	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	711	145	146	Pemkot Denpasar	Tanah Kosong		5.491.000,00	Jalan Tukad Badung XB
7	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	506A	165	207	Pemkot Denpasar	Warung Permanen		6.852.000,00	Jalan Tukad Barito Timur
8	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	574	275	374		Tanah Kosong		6.852.000,00	Jalan Tukad Badung X
9	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	519	300	336	Pemkot Denpasar	Depo Sampah		6.852.000,00	Jalan Tukad Barito Timur
10	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	534B	290	301	Pemkot Denpasar	Balai Banjar		4.917.000,00	Jalan Tukad Badung XI
11	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	657A	95	95	Pemkot Denpasar	Tanah Kosong		4.917.000,00	Jalan Tukad Yeh Aya IX
12	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	495	180	191	Pemkot Denpasar	Parkiran Semi Permanen		4.917.000,00	Jalan Tukad Badung XI Gang K
13	Kelurahan Renon	Denpasar	495C	98	81		Taman di Dalam Pekarangan Rumah		4.917.000,00	Jalan Tukad badung IX B Gang K
14	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	292A	120	126	Pemkot Denpasar	Tanah Kosong		4.917.000,00	Jalan Tukad Badung VII
15	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	167A	85	87		Rumah Permanen		4.917.000,00	Jalan Tukad Badung III
16	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat	616	190	168		Sawah		7.516.000,00	Jalan Gunung Lebah IV, Gang Sandat
17	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat	597	175	185		Tanah Kosong	Dimohon Desa Tegal Harum	5.308.000,00	Jalan Labak Indah
18	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat	511	180	247		Tanah Kosong		5.308.000,00	Jalan Pura Demak Lange 3

NO.	DESA/KELURAHAN	KEC	NO KAPLING	LUAS (m2)	Luas Peta (±m2)*	PENGUASAAN	PENGUNAAN	KETERANGAN	NILAI TANAH	ALAMAT
19	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat	15A	150	176		Jalan Aspal		5.308.000,00	Jalan Kubu Bias I
20	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	390A	130	149		Tanah Kosong		7.932.000,00	Jalan Laksamana XV
21	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	321D	300	226		Tempat Parkir		7.932.000,00	Jalan Moh Yamin V
22	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	383B	150	168	Pemkot Denpasar	Tanah Kosong		7.932.000,00	Jalan Moh Yamin V
23	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	330A	210	255		Balai Pertemuan Dharma		7.932.000,00	Jalan Moh Yamin VIII
24	Kelurahan Tonja	Denpasar Utara	228	100	143		Warung Permanen		4.617.000,00	Jalan Gatot Subroto I, Gang Intansari
25	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	538A	400	349		Bangunan Tidak Permanen		8.765.000,00	Jalan Angsoka Cargo Permai I
26	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara		85	87		Pura		6.075.000,00	Jalan Pondok Indah
27	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	431A	400	1132		Tanah Kosong/Tegalan		6.075.000,00	Jalan Sari Dana C
28	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	446A	150	126		Tanah Kosong		6.075.000,00	Jalan Sari Dana II
29	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	304	225	256		Koperasi Lumbung Sari Dana		6.075.000,00	Jalan Cargo Kenanga X
30	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	171C	300	508		Bangunan		6.075.000,00	Jalan Cargo Taman IV
31	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		2075	2075		Tanah Kosong		6.366.000,00	Jalan Nuansa Indah Selatan Utara I
32	Kelurahan Tonja	Denpasar Utara		197	198		Bangunan Rumah Dan Tanah		4.607.000,00	Jalan Bedahulu
33	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan	102	600	607		Tanah Kosong		5.710.000,00	Jalan Tukad Yeh Sungai
34	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur		120	124		Warung Permanen		15.661.000,00	Jalan Moh Yamin VI
35	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	93	1136	1302		Tanah Kosong		6.075.000,00	Jalan Kargo Indah III
36	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	130B	205	206		Tanah Kosong	Tanah Pengganti I Kt Suanta	6.075.000,00	Jalan Kargo Indah IV
37	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	9A	100	138		Tanah Kosong		6.075.000,00	Jalan Gunung Catur IV
38	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	119A	200	200		Tanah Kosong		6.075.000,00	Jalan Gunung Catur IV (Belakang Perumahan Kargo)
39	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	185A	100	150		Tanah Kosong Dan Bangunan		6.075.000,00	Jalan Pondok Indah
40	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	208A	150	151	Desa Adat Ubung	Bank Sampah		6.075.000,00	Jalan Cargo Indah II
41	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	218	280	592		Pura Taman Gangga Sariti		6.075.000,00	Jalan Cargo Indah II
42	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	394A	150	184	Yayasan Al Maruf	Sekolah		8.765.000,00	Jalan Angsoka Cargo Permai I
43	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara		195	196		Tanah Kosong	Dimohon Banjar	6.371.000,00	Jalan Pidada I
44	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara		600	600		Tanah Kosong	Tanah Pengganti Sukasari	6.075.000,00	Jalan Cargo Indah

9

NO.	DESA/KELURAHAN	KEC	NO KAPLING	LUAS (m2)	Luas Peta (±m2)*	PENGUSAHAAN	PENGUNAAN	KETERANGAN	NILAI TANAH	ALAMAT
45	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		1100	1112	Pemkot Kota Denpasar	Tanah Kosong Dan Tempat Parkir	Dimohon PU	6.371.000,00	Jalan Bung Tomo I
46	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		500	520	Pemkot Kota	Koperasi Putra Jaya Raya	Sudah Dimohon I Gst Ngr Suparta	11.764.000,00	Jalan Gatot Subroto Barat
47	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		290	292		Gudang Barang Bekas		6.371.000,00	Jalan Bung Tomo V
48	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		240	250		Tanah Kosong		5.553.000,00	Jalan Cempaka Indah I
49	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		200	210		Tanah Kosong	Tanah Pengganti Pemprov	8.765.000,00	Jalan Cempaka Indah
50	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara	107F	1300	1340		Tanah Kosong		8.765.000,00	Jalan Cempaka Indah
51	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		100	102		Rumah Semi Permanen		6.371.000,00	Jalan Kusuma Bangsa II
52	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat		150	150		Tanah Kosong		6.366.000,00	Jalan Tegal Dukuh V
53	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat		210	220		Tanah Kosong		6.366.000,00	Jalan Tegal Dukuh V
54	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat		200	216		Bangunan Rumah Permanen		6.366.000,00	Jalan Karang Sari III
55	Kelurahan Padangsambian	Denpasar Barat		150	151		Bangunan Warung	Tanah Pengganti Desa Adat	8.765.000,00	Jalan Mahendradatta
56	Desa Padangsambian Klod	Denpasar Barat		140	144		Bangunan Semi Permanen		8.765.000,00	Jalan Teuku Umar Barat
57	Desa Padangsambian Klod	Denpasar Barat		80	80		Bangunan Semi Permanen		8.765.000,00	Jalan Pura Duwe
58	Desa Padangsambian Klod	Denpasar Barat		340	345		Sawah, Gardu PLN		8.765.000,00	Jalan Teuku Umar Barat
59	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat		150	148		Pura		5.308.000,00	Jalan Gunung Kalimutu XXI
60	Desa Penatih	Denpasar Timur		340	387		Bangunan Semi Permanen		11.764.000,00	Jalan Gatot Subroto Timur
61	Desa Penatih	Denpasar Timur		160	160		Bangunan Semi Permanen		11.764.000,00	Jalan Gatot Subroto Timur
62	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	126	80	96		Bangunan Permanen		6.213.000,00	Jalan Badak Sari II
63	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	186	450	478		Banjar Badaksari		7.350.000,00	Jalan Drupadi VI
64	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	468B	80	102		Tanah Kosong		6.213.000,00	Jalan Drupadi XIV A
65	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur	468B	450	465		Bangunan Semi Permanen		7.078.000,00	Jalan Merdeka III
66	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Barat		1200	1189		Gudang		11.764.000,00	Jalan Gatot Subroto Barat
67	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara		150	185		Tanah Kosong/Tegalan		6.075.000,00	Jalan Sari Dana C
68	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat		260	263		Bangunan Penginapan		6.366.000,00	Jalan Bukit Indah
69	Kelurahan Padangsambian	Denpasar Barat		116	117		Tanah Kosong		5.189.000,00	Jalan Padang Lepas

NO.	DESA/KELURAHAN	KEC	NO KAPLING	LUAS (m2)	Luas Peta (±m2)*	PENGUASAAN	PENGUNAAN	KETERANGAN	NILAI TANAH	ALAMAT
70	Kelurahan Padangsambian	Denpasar Barat		165	165		Tanah Kosong		8.765.000,00	Jalan Padang Mekar II
71	Kelurahan Padangsambian	Denpasar Barat		94	95		Tanah Kosong		8.765.000,00	Jalan Mahendradatta Utara
72	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat		-	816		Tanah Kosong / Sawah		5.308.000,00	Jalan Labak Indah
73	Desa Pemecutan Klod	Denpasar Barat		-	160		Tanah Kosong/Sawah		5.308.000,00	Jalan Labak Indah
74	Desa Dauh Puri Kaja	Denpasar Utara		-	125		Garasi Dan Taman		5.423.000,00	Jalan Gatot Subroto VI D
75	Desa Sumerta Klod	Denpasar Timur		-	141		Sumur Bor Produksi Pdam		7.350.000,00	Jalan Badak Agung VIII
76	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		-	925		TK. Kumara Jati		5.553.000,00	Jalan Wibisana, Br Semilajati
77	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		-	468		Banjar Mekar Manis		6.371.000,00	Jalan Bung Tomo X / Gang Mekar
78	Desa Pemecutan Kaja	Denpasar Utara		-	452		Banjar Tunggul Aji		5.553.000,00	Jalan Bung Tomo IX
79	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan		-	600		Tanah Kosong & Gudang		6.852.000,00	Jalan Pemuda VI



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir Tahun 2025	Nilai Penyusutan Tahun 2025	Saldo Setelah Penyusutan Tahun 2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6+7
1	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	2.354.564.893,00	933.379.950,00	2.354.564.893,00	933.379.950,00	-	933.379.950,00
	- Sewa Kapal KM Benawa Nusntara 63	2.354.564.893,00		2.354.564.893,00	-	-	-
	- Sewa LPJU		48.947.000,00		48.947.000,00		
	- Sewa Kios Terminal Ubung		884.432.950,00		884.432.950,00		
2	Aset Tak Berwujud	12.177.149.939,00	686.773.446,00	117.950.000,00	12.745.973.385,00	(10.743.318.359,00)	2.002.655.026,00
3	Aset Lain-lain	137.064.753.644,78	279.842.658.355,34	284.358.135.768,25	132.549.276.231,87	(102.605.165.164,55)	29.944.111.067,32
	Aset Rusak Berat	82.823.063.524,78	104.074.230.787,77	57.454.070.080,68	129.443.224.231,87	(102.605.165.164,55)	26.838.059.067,32
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	54.241.690.120,00	175.768.427.567,57	226.904.065.687,57	3.106.052.000,00		3.106.052.000,00
4	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.896.502.000,00	-	2.896.502.000,00	-	-	-
Jumlah		154.492.970.476,78	281.462.811.751,34	289.727.152.661,25	146.228.629.566,87	(113.348.483.523,55)	32.880.146.043,32



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR NILAI ASET LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	NILAI PERALATAN DAN MESIN	NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN	NILAI ASET TETAP LAINNYA	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.436.061.180,17	338.642.506,02	8.186.665.676,72	10.961.369.362,91
2	Dinas Kesehatan	377.833.163,93	-	-	377.833.163,93
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	358.440.150,00	15.231.081,43	-	373.671.231,43
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.581.100,00	-	-	7.581.100,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	85.895.800,00	-	-	85.895.800,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.375.000,00	-	-	1.375.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.500.650,00	-	26.250,00	2.526.900,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.410.000,00	-	-	3.410.000,00
9	Dinas Sosial	900.000,00	-	-	900.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	19.980.700,00	-	-	19.980.700,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	164.829.450,00	-	-	164.829.450,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.872.500,00	-	-	7.872.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	625.000,00	2.500.000,00	-	3.125.000,00
15	Dinas Perhubungan	39.702.570,00	6.600.000,00	-	46.302.570,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	20.881.186,40	-	-	20.881.186,40
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3.350.000,00	-	2.970.000,00	6.320.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.010.000,00	-	-	19.010.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	870.000,00	-	-	870.000,00
20	Dinas Kebudayaan	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.114.000,00	-	-	1.114.000,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.202.130,00	-	-	6.202.130,00
23	Dinas Pariwisata	1.051.200,00	-	-	1.051.200,00
24	Dinas Pertanian	21.369.000,00	595.000,00	-	21.964.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000,00	-	-	500.000,00
26	Inspektorat	9.555.499,00	-	-	9.555.499,00
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.876.250,00	-	-	2.876.250,00
28	Badan Pendapatan Daerah	3.944.500,00	-	-	3.944.500,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.508.149,00	-	37.500,00	19.545.649,00

NO.	SKPD	NILAI PERALATAN DAN MESIN	NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN	NILAI ASET TETAP LAINNYA	TOTAL
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.817.000,00	-	-	5.817.000,00
31	Sekretariat DPRD	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	45.837.148,00	-	23.750,00	45.860.898,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	24.169.663,67	-	-	24.169.663,67
34	Kecamatan Denpasar Selatan	27.195.249,00	-	961.810,00	28.157.059,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	18.291.398,00	18.800.000,00	81.190,00	37.172.588,00
36	Sekretariat Daerah	7.949.300,00	-	120.000,00	8.069.300,00
Jumlah		3.753.498.937,17	382.368.587,45	8.190.886.176,72	12.326.753.701,34



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Register	Harga
	Nomor	Tanggal							
1	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	18608	897.000,00
2	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	005221	2.744.000,00
3	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	18829	897.000,00
4	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	16197	897.000,00
5	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	11631	793.000,00
6	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	008873	3.278.000,00
7	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	11632	793.000,00
8	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	11633	793.000,00
9	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	005505	793.000,00
10	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	014874	6.486.000,00
11	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	017235	793.000,00
12	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	005841	793.000,00
13	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	015548	8.747.000,00
14	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	011115	604.000,00
15	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	012040	604.000,00
16	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	000687	5.866.000,00
17	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	012891	604.000,00
18	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	017479	897.000,00
19	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	015826	2.492.000,00

No	Perjanjian		Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	Register	Harga
	Nomor	Tanggal							
20	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota Denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	017498	924.000,00
21	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota Denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	012497	897.000,00
22	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota Denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	016770	793.000,00
23	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023	7 agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota Denpasar dengan PT Bali Towerindo Sentra tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	017760	897.000,00
24	551.11/2002/LPJU /DISHUB/XIII/2023	8 Agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota Denpasar dengan PT Istana Kohinoor tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	005533	709.000,00
25	551.11/2076/LPJU /Dishub/VIII/2023	23 Agustus 2023	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan kota Denpasar dengan PT Tower Bersama tentang sewa utilitas PJU	5 Tahun	Peralatan dan Mesin	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1.3.02.18.01.03.001	008844	4.956.000,00
26	900.1.13.1/071 /UPT.PNP/DISHUB	13 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewa kios di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.3.03.01.01.12.001	00001	196.928.000,00
27	900.1.13.1/060/UPT.PNP/DISHUB	13 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewa kios di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.3.03.01.01.18.001	000002	29.899.800,00
28	900.1.13.1/118/UPT.PNP/DISHUB	13 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewa kios di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.3.03.01.01.18.001	000020	144.278.400,00
29	900.1.13.1/093 /UPT.PNP/DISHUB	13 Januari 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewa kios di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.3.03.01.01.18.001	000004	194.320.000,00
30	100.3.7/ 1547 /DISHUB	30 Juni 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewaToilet di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.3.03.01.01.18.001	000011	23.927.750,00
31	100.3.7/ 1548/DISHUB	30 Juni 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewaToilet di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.03.01.01.10.005	000001	148.000.000,00
32	100.3.7/1549/DISHUB	30 Juni 2025	Perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan dengan penyewaToilet di Terminal Ubung	1 Tahun	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.3.03.01.01.30.001	000014	147.079.000,00
TOTAL									933.379.950,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah Realisasi Belanja Modal TA 2025	Mutasi Kurang Penghapusan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	326.074.000,00	99.086.536,00	117.950.000,00	307.210.536,00
2	Dinas Kesehatan	786.032.800,00	-	-	786.032.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	345.187.736,00	-	-	345.187.736,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.952.097.731,00	-	-	1.952.097.731,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	198.382.197,00	-	-	198.382.197,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	69.102.000,00	-	-	69.102.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	455.893.750,00	41.936.910,00	-	497.830.660,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	34.000.000,00	-	-	34.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	300.000.000,00	200.000.000,00	-	500.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	464.998.000,00	-	-	464.998.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	1.046.180.745,00	-	-	1.046.180.745,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	922.914.900,00	-	-	922.914.900,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	315.976.000,00	45.900.000,00	-	361.876.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.400.000,00	-	-	353.400.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.848.000,00	-	-	34.848.000,00
20	Dinas Kebudayaan	198.632.500,00	-	-	198.632.500,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	477.570.000,00	-	-	477.570.000,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	85.006.000,00	-	-	85.006.000,00
23	Dinas Pariwisata	64.082.000,00	-	-	64.082.000,00
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
26	Inspektorat	99.500.000,00	-	-	99.500.000,00
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	2.461.053.200,00	299.850.000,00	-	2.760.903.200,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	440.973.380,00	-	-	440.973.380,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.140.000,00	-	-	52.140.000,00
31	Sekretariat DPRD	56.000.000,00	-	-	56.000.000,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	-
33	Kecamatan Denpasar Timur	48.800.000,00	-	-	48.800.000,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
36	Sekretariat Daerah	484.305.000,00	-	-	484.305.000,00
	Jumlah	12.177.149.939,00	686.773.446,00	117.950.000,00	12.745.973.385,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Tanah				Peralatan dan Mesin				Gedung dan Bangunan			
			Reklasifikasi dari Aset Tetap	Penghapusan Aset yang Dihibahkan	Penghapusan Aset yang menjadi Penyertaan Modal	Penghapusan Aset	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Penghapusan Aset	Penghapusan Aset yang dihibahkan	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Karena Pengembalian Belanja	Penghapusan Aset
A. ASET RUSAK BERAT														
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	29.933.784.273,59	-	-	-	-	6.303.509.866,82	1.100.856.875,00	5.373.021.786,86	-	21.826.559.655,08	67.787.000,00	753.734.984,47	9.161.240.294,79
2	Dinas Kesehatan	13.794.173.117,08	-	-	-	-	31.201.497.940,85	-	10.946.620.997,66	-	3.494.666.439,00	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.238.325.754,97	-	-	-	-	771.801.869,00	-	-	-	-	-	-	1.106.246.045,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	537.725.000,00	-	-	-	-	3.275.050.243,00	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.389.417.592,70	-	-	-	-	89.175.000,00	-	-	-	-	-	-	94.383.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	37.997.000,00	-	-	-	-	1.658.897.015,52	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	58.563.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	425.262.498,00	-	-	-	-	667.805.050,00	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	322.015.833,34	-	-	-	-	386.918.000,00	-	26.195.000,00	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	245.005.968,01	-	-	-	-	173.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	1.035.611.073,00	-	-	-	-	-	-	58.725.000,00	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	238.590.000,00	-	-	-	-	11.095.469.700,00	382.000.000,00	-	238.590.000,00	47.634.801,89	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	539.565.000,00	-	-	-	-	441.298.130,00	-	235.175.000,00	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	158.376.500,00	-	-	-	-	57.475.000,00	-	2.300.000,00	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	3.361.746.281,91	-	-	-	-	774.184.950,00	166.400.000,00	-	-	110.821.570,00	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	1.259.278.161,66	-	-	-	-	721.313.500,00	-	641.587.000,00	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	267.482.000,00	-	-	-	-	286.122.870,00	-	188.012.000,00	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.813.635.387,84	-	-	-	-	331.595.000,00	-	1.086.526.940,00	-	-	-	-	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.545.000,00	-	-	-	-	987.269.695,00	-	-	-	38.580.000,00	-	-	-
20	Dinas Kebudayaan	51.550.000,00	-	-	-	-	256.519.633,84	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	507.660.000,00	-	-	-	-	-	-	278.139.625,00	-	-	-	-	-
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	93.273.440,00	-	-	-	-	184.566.461,00	-	5.500.000,00	-	28.980.000,00	-	-	-
23	Dinas Pariwisata	330.432.282,60	-	-	-	-	329.541.137,11	-	-	-	1.211.145.190,01	1.427.774.472,61	-	55.000.000,00
24	Dinas Pertanian	860.773.670,00	-	-	-	-	412.000.000,00	-	-	-	59.318.000,00	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	985.000,00	-	-	-	-	282.413.500,00	-	-	-	61.354.071,00	-	-	-
26	Inspektorat	0,00	-	-	-	-	421.505.182,00	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	149.370.471,84	-	-	-	-	-	-	23.760.000,00	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	1.260.195.449,68	-	-	-	-	34.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.803.165.432,00	-	-	-	-	259.169.414,00	-	-	5.704.330.000,00	98.500.000,00	-	-	-
30	Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	135.499.446,56	-	-	-	-	212.128.180,00	-	17.650.000,00	-	-	-	-	-
31	Sekretariat DPRD	15.685.000,00	-	-	-	-	3.336.048.260,80	-	2.632.705.880,80	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Denpasar Barat	300.916.000,00	-	-	-	-	499.596.887,36	-	-	-	-	-	-	115.186.000,00
33	Kecamatan Denpasar Timur	526.056.076,00	-	-	-	-	217.169.883,00	-	234.615.076,00	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Denpasar Selatan	359.437.000,00	-	-	-	-	433.480.928,00	-	97.950.000,00	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Denpasar Utara	91.162.000,00	-	-	-	-	814.273.867,00	-	88.433.175,00	-	-	-	-	-
36	Sekretariat Daerah	662.802.814,00	-	-	-	-	2.138.804.349,00	-	332.693.198,00	174.425.000,00	-	-	-	-
Jumlah Aset Rusak Berat		82.823.063.524,78												
B. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH														
1	Dinas Kesehatan	479.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.638.120,00	5.368.427.567,57	5.250.167.567,57	118.260.000,00	21.638.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.626.512.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kecamatan Denpasar Barat	51.114.000.000,00	-	-	-	51.114.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	170.250.000.000,00	-	-	170.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Tanah Lain-lain		54.241.690.120,00												
Jumlah		137.064.753.644,78	175.768.427.567,57	5.250.167.567,57	118.260.000,00	221.535.638.120,00	69.054.956.513,30	1.734.256.875,00	22.434.768.679,32	6.142.345.000,00	26.879.059.726,98	1.594.061.472,61	753.734.984,47	10.532.055.339,79

No	SKPD	Jalan, jaringan dan Irigasi			Aset Tetap Lainnya			Konstruksi Dalam Pengerjaan		Saldo Akhir Tahun 2025	
		Reklasifikasi dari Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Karena Pengembalian Belanja	Penghapusan Aset	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Karena Pengembalian Belanja	Penghapusan Aset	Penghapusan Aset yang Dibiayakan	Reklasifikasi dari Aset Tetap		Penghapusan Aset
	A. ASET RUSAK BERAT										
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	229.658.012,42	-	2.119.900,00	4.050.185.375,35	4.300.000,00	3.334.195.217,79	-	1.293.714.000,00	-	43.840.155.124,35
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.543.716.499,27
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	834.367.736,75	238.665.000,00	-	-	-	-	-	700.639.800,00	7.763.409.229,00	4.436.814.886,72
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.622.617.243,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.514.099,12	-	-	-	-	2.556.491.882,70	-	-	-	1.833.231.809,12
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696.894.015,52
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.563.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.067.548,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682.738.833,34
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.485.968,01

9

Lampiran 28
Hal. 2 dari 2

No	SKPD	Jalan, jaringan dan Irigasi			Aset Tetap Lainnya				Konstruksi Dalam Pengerjaan		Saldo Akhir Tahun 2025
		Reklasifikasi dari Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Karena Pengembalian Belanja	Penghapusan Aset	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Karena Pengembalian Belanja	Penghapusan Aset	Penghapusan Aset yang Dihibahkan	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Penghapusan Aset	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.886.073,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.761.104.501,89
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.688.130,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.551.500,00
15	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.080.352.801,91
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.004.661,66
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	367.992.870,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.058.703.447,84
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.043.394.895,00
20	Dinas Kebudayaan	-	-	-	448.566.500,00	-	-	363.666.500,00	-	-	392.969.633,84
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	98.598.775,00	-	328.119.150,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.319.901,00
23	Dinas Pariwisata	329.284.258,60	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	725.628.395,71
24	Dinas Pertanian	22.438.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.354.529.670,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.752.571,00
26	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.505.182,00
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.610.471,84
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295.070.449,68
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.259.504.846,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.977.626,56
31	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.027.380,00
32	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	-	-	-	-	9.164.160,00	-	694.491.047,36
33	Kecamatan Denpasar Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.610.883,00
34	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694.967.928,00
35	Kecamatan Denpasar Utara	-	-	-	-	-	-	-	16.533.830,25	-	833.536.522,25
36	Sekretariat Daerah	-	-	-	91.150.000,00	-	-	-	-	-	2.385.638.965,00
	Jumlah Aset Rusak Berat										129.443.224.231,87
	B. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH										-
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.540.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.626.512.000,00
4	Kecamatan Denpasar Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Tanah Lain-lain										3.106.052.000,00
	Jumlah	1.421.262.106,89	238.665.000,00	2.119.900,00	4.600.301.875,35	4.300.000,00	5.890.687.100,49	363.666.500,00	2.118.650.565,25	7.763.409.229,00	132.549.276.231,87

9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR NILAI PENYUSUTAN ASET TETAP, ASET LAIN-LAIN DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	NILAI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	NILAI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	NILAI PENYUSUTAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN	NILAI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	NILAI AMORTISASI ATB	NILAI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(135.622.546.302,94)	(169.337.197.888,55)	(1.194.557.475,00)	(2.352.109.862,00)	(177.724.224,00)	(28.557.311.618,97)
2	Dinas Kesehatan	(251.524.565.670,61)	(43.497.220.441,00)	(2.759.840.640,00)	(275.914.750,00)	(753.062.753,00)	(30.474.866.712,27)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(23.130.560.570,02)	(2.270.193.726,00)	(1.428.444.013.738,53)	(32.800.000,00)	(290.341.882,00)	(2.693.315.579,75)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12.373.307.822,24)	(3.337.270.104,00)	(82.684,00)	(21.033.332,00)	(1.952.097.731,00)	(3.521.654.908,00)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(7.385.565.900,68)	(5.705.230.729,00)	(10.105.884.671,00)	(1.639.798.350,00)	(69.512.946,00)	(1.227.496.317,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(13.666.034.017,00)	(489.714.819,00)	-	(5.000.000,00)	-	(1.679.492.850,52)
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	(3.801.453.444,84)	(1.003.068.027,00)	-	(933.833.344,00)	-	(43.604.100,00)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.628.998.646,52)	(56.331.286,00)	(18.664.037,00)	-	-	(1.008.067.548,00)
9	Dinas Sosial	(4.292.828.555,96)	(3.627.347.630,00)	(8.429.638,00)	(63.878.958,00)	(69.102.000,00)	(682.738.833,34)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	(2.919.622.478,85)	(525.145.654,00)	(28.046.062,00)	(65.500.000,00)	(447.478.135,00)	(418.485.968,01)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	(5.355.807.931,08)	(724.025.030,00)	(20.008,00)	-	(34.000.000,00)	(975.682.948,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(84.646.993.772,20)	(11.551.115.908,00)	(141.781.302,00)	(4.529.771.869,00)	(108.333.334,00)	(10.607.517.556,00)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(10.176.442.607,68)	-	(11.714.466,00)	(17.400.000,00)	(452.164.667,00)	(745.688.130,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(6.948.887.958,84)	(122.255.090,00)	(7.963.613,00)	(11.625.000,00)	-	(213.551.500,00)
15	Dinas Perhubungan	(87.459.401.025,29)	(10.859.082.062,00)	(2.394.683.743,00)	-	(1.004.090.093,00)	(3.551.915.175,91)
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	(22.305.510.479,13)	(71.973.458,00)	(299.349.871,00)	(32.482.500,00)	(922.914.900,00)	(1.339.004.661,66)
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	(2.332.816.403,84)	(1.677.185.872,00)	-	(333.182.542,00)	(220.872.600,00)	(367.144.953,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(11.589.496.193,44)	(8.537.572.249,00)	(188.925.468,00)	(96.135.000,00)	(313.124.999,00)	(1.993.478.083,84)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.600.317.130,84)	(525.414.606,00)	(29.285.322,00)	(14.100.000,00)	(34.848.000,00)	(1.002.661.355,00)
20	Dinas Kebudayaan	(4.396.657.941,00)	(1.806.790.895,00)	(67.291.623,00)	(1.994.520.250,00)	(198.632.500,00)	(392.969.633,84)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(6.365.587.194,19)	(979.009.394,00)	(8.306.771,00)	(118.568.000,00)	(477.570.000,00)	(221.753.653,00)
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	(3.690.004.837,68)	(1.456.202.736,00)	(43.807.435,00)	-	(69.487.433,00)	(231.346.901,00)
23	Dinas Pariwisata	(22.827.416.272,30)	(19.972.508.498,00)	(3.360.955.028,00)	(238.763.370,00)	(64.082.000,00)	(486.754.792,00)
24	Dinas Pertanian	(8.386.910.546,68)	(2.755.703.521,00)	(123.007.901,00)	(88.134.210,00)	-	(1.237.378.146,00)
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.293.657.543,68)	(614.777.732,00)	(15.366.169,00)	(47.928.559,00)	-	(310.243.004,00)
26	Inspektorat	(5.446.180.199,51)	(119.258.092,00)	-	-	(44.775.000,00)	(383.556.693,00)
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	(2.694.057.213,00)	(1.569.635,00)	-	(211.225.700,00)	-	(125.151.513,84)
28	Badan Pendapatan Daerah	(14.527.832.119,33)	(2.684.532.463,00)	(74.142.854,00)	-	(1.931.192.199,00)	(1.087.046.900,68)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(9.784.270.998,84)	(1.600.115.508,00)	(53.536.232,00)	(222.408.000,00)	(440.973.380,00)	(981.308.561,00)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.418.251.610,00)	(1.328.549.933,00)	(966.175,00)	(43.744.000,00)	(52.140.000,00)	(329.977.626,56)
31	Sekretariat DPRD	(15.699.280.336,83)	(5.345.684.190,00)	(695.983.307,00)	(70.195.709,00)	(35.685.417,00)	(702.257.287,00)
32	Kecamatan Denpasar Barat	(5.789.859.649,00)	(1.131.983.237,00)	(2.642.505.350,00)	(47.621.000,00)	-	(630.289.299,36)
33	Kecamatan Denpasar Timur	(8.064.118.716,83)	(652.115.760,00)	(640.638.339,00)	(73.860.000,00)	(42.136.666,00)	(507.318.859,00)
34	Kecamatan Denpasar Selatan	(9.100.664.437,88)	(3.979.521.609,00)	(5.983.080.711,00)	(34.170.000,00)	(100.000.000,00)	(690.235.071,00)
35	Kecamatan Denpasar Utara	(7.526.209.251,63)	(1.980.392.667,00)	(2.502.362.909,00)	(24.420.000,00)	(4.000.000,00)	(806.169.358,00)
36	Sekretariat Daerah	(32.093.333.632,94)	(10.704.048.907,00)	(1.187.500,00)	(698.628.657,00)	(432.975.500,00)	(2.377.729.066,00)
Jumlah		(864.865.449.413,32)	(321.030.109.356,55)	(1.461.846.381.042,53)	(14.338.752.962,00)	(10.743.318.359,00)	(102.605.165.164,55)



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PROPERTI INVESTASI TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Perjanjian		Tercatat pada Pengguna Barang/Pengelola Barang	Identitas Pihak Ketiga	Masa Berlaku Perjanjian (Tahun)	Jenis Aset Tetap	Objek Perjanjian	Kode Barang	No Register	Luas Yang Disewakan (M2)	Luas Pada Simda (M2)	Nilai Sewa (Rp) per 20 Tahun (9 Nop 2005 - 9 Nop 2025)	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)		Nilai Retribusi dari bulan Nopember 2025 - Desember 2025 (Rp)	Nilai Pada Catatan Simda (Rp)
	Nomor	Tanggal											Nomor	Tanggal		
1	593.1/464/Perleng	9-Nov-2005	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Wan We Yiong	20	Tanah	Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 67 m2 dari total luas tanah 2850 M2	1.3.1.1.2.2	17	67	2850	26.800.000,00	000.2.3.2/ 8128 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	18.023.000,00	6.412.500.000,00
	593.1/465/Perleng			Siulamin			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 68 m2 dari total luas tanah 2850 M2			68	2850	27.200.000,00	000.2.3.2/ 8131 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	18.292.000,00	
	593.1/467/Perleng			Susanna Siada, SH			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 78 m2 dari total luas tanah 2850 M2			78	2850	31.200.000,00	-	-	-	
	593.1/468/Perleng			Fera Darwiko			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 80 m2 dari total luas tanah 2850 M2			80	2850	32.000.000,00	000.2.3.2/ 8132 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	21.250.000,00	
	593.1/469/Perleng			Troy Yamen Sugiaman			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 81 m2 dari total luas tanah 2850 M2			81	2850	32.400.000,00	000.2.3.2/ 8133 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	21.789.000,00	
	593.1/470/Perleng			Ketut Budiana			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 74 m2 dari total luas tanah 2850 M2			74	2850	29.600.000,00	000.2.3.2/ 8134 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	39.812.000,00	
	593.1/471/Perleng			Ketut Budiana			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 74 m2 dari total luas tanah 2850 M2			74	2850	29.600.000,00	000.2.3.2/ 8134 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	39.812.000,00	
	593.1/472/Perleng			I Made Indrawan			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 78 m2 dari total luas tanah 2850 M2			78	2850	31.200.000,00	000.2.3.2/ 8135 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	20.982.000,00	
	593.1/473/Perleng			Lie Tonny Mulyadi			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 104 m2 dari total luas tanah 2850 M2			104	2850	41.600.000,00	000.2.3.2/ 8136 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	44.096.000,00	
	593.1/474/Perleng			Budi Mulyono			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 103 m2dari total luas tanah 2850 M2			103	2850	41.200.000,00	000.2.3.2/ 8127 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	43.668.000,00	
	593.1/475/Perleng			Budi Mulyono			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 104 m2 dari total luas tanah 2850 M2			104	2850	41.600.000,00	000.2.3.2/ 8127 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	44.095.998,00	
	593.1/476/Perleng			Tjje Strong			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 79 m2 dari total luas tanah 2850 M2			79	2850	31.600.000,00	000.2.3.2/ 8130 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	21.251.000,00	
	593.1/477/Perleng			Budianto			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 105 m2 dari total luas tanah 2850 M2			105	2850	42.000.000,00	000.2.3.2/ 8095 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	44.520.000,00	
	593.1/478/Perleng			Juhan Setiabudi			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 100 m2 dari total luas tanah 2850 M2			100	2850	40.000.000,00	-	-	-	
	593.1/480/Perleng			Sofyan Noor			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 80 m2 dari total luas tanah 2850 M2			80	2850	32.000.000,00	-	-	-	
	593.1/481/Perleng			Ir. Nyoman Suryawinata			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 36 m2 dari total luas tanah 2850 M2			36	2850	14.400.000,00	000.2.3.2/ 8137 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	10.440.000,00	
				Denny Susanto			Sewa Tanah Hpl Milik Pemerintah Kota Denpasar (Ruko Jl. Thamrin) dengan luas 105 m2 dari total luas tanah 2850 M2			105	2850		000.2.3.2/ 9322 /BPKAD	November 2025 - Desember 2025	7.420.000,00	
TOTAL												524.400.000,00		395.450.998,00	6.412.500.000,00	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	SKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa BMD	5 SKPD (terlampir pada lampiran 32)	1.256.909.333,35	866.578.833,37
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi (Utilitas LPJU)	Dinas Perhubungan	326.193.952,69	408.513.758,83
3	Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame	Badan Pendapatan	2.823.616.031,91	2.429.177.395,12
	JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA		4.406.719.317,95	3.704.269.987,32
	UTANG BELANJA PEGAWAI			
A	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			
1	Utang Belanja Gaji Pokok PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	44.550.300,00	2.418.964,00
2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	5.833.266,00	313.880,00
3	Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	720.000,00	-
4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	1.095.000,00	-
5	Utang Belanja Tunjangan Beras PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	2.607.120,00	-
6	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	4.249.240,00	256.352,00
7	Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	1.457,00	23,00
8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	90.373.130,00	109.306,00
9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	101.944.160,00	-
10	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	19.361,00	5.804,00
11	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7 SKPD (terlampir pada lampiran 33)	58.105,00	17.419,00
	Jumlah Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		251.451.139,00	3.121.748,00
B	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2	Badan Pendapatan	1.265.625.000,00	810.000.000,00
2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB	Badan Pendapatan	1.940.504.208,00	2.406.100.120,00
3	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Badan Pendapatan	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00
4	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan (BLUD)	-	63.838.585,00
5	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal	Dinas Perhubungan	-	41.743.404,00
6	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	21.909.600,00	7.417.845,00

NO.	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	SKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
7	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	Dinas Perhubungan	45.566.248,00	-
8	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	7.312.500,00	6.187.500,00
9	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	41.175.000,00	40.500.000,00
10	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan (BLUD)	8.924.070.217,00	7.689.820.832,67
11	Utang Belanja TPG PNSD	Dikpora	85.373.700,00	8.847.155.200,00
12	Utang Belanja TPG PPPK	Dikpora	175.984.800,00	4.735.098.800,00
13	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Dikpora	38.000.000,00	99.000.000,00
14	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	Dikpora	709.000.000,00	998.000.000,00
	Jumlah Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		17.254.521.273,00	28.844.862.286,67
C	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			
1	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Sekretariat Daerah	250.549.740,00	172.406.220,00
	Jumlah Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		250.549.740,00	172.406.220,00
	JUMLAH UTANG BELANJA PEGAWAI		17.756.522.152,00	29.020.390.254,67
	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA			
A	Utang Belanja Barang			
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	DLHK	-	111.689.850,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan (Wangaya)	8.129.000,00	6.560.000,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Dinas Kesehatan (Wangaya)	402.500,00	-
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	Dinas Kesehatan (Wangaya)	18.086.189.567,39	20.094.209.191,25
	Jumlah Utang Belanja Barang		18.094.721.067,39	20.212.459.041,25
B	Utang Belanja Jasa			
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Dinas Kesehatan (Wangaya)	1.987.159.967,00	1.350.407.709,13
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Dinas Kesehatan (BLUD)	54.827.923,00	-
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	Dinas Kesehatan (BLUD)	1.988.010,00	4.320.713,00

NO.	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	SKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	Kecamatan Densel	70.000,00	70.000,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	36 SKPD (terlampir pada lampiran 34)	52.661.472,00	60.287.781,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	36 SKPD (terlampir pada lampiran 34)	82.750.010,00	91.932.555,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	36 SKPD (terlampir pada lampiran 34)	2.359.446.224,00	2.295.378.101,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36 SKPD (terlampir pada lampiran 34)	21.064.520,00	19.217.591,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	Kecamatan Densel	70.000,00	70.000,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	Sekretariat Daerah	70.000,00	70.000,00
11	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Dinas Kesehatan	22.400,00	-
12	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Dinas Kesehatan (Wangaya)	-	103.511.948,00
13	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	-	3.468.445,00
14	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	Dinas Sosial	-	865.531,00
15	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Dinas Sosial	-	1.081.913,00
	Jumlah Utang Belanja Jasa		4.560.130.526,00	3.930.682.287,13
C	Utang Belanja Pemeliharaan			
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	DLHK	-	28.432.500,00
	Jumlah Utang Belanja Pemeliharaan		-	28.432.500,00
D	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
1	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Dinas Kesehatan (Wangaya)	2.813.046.335,40	1.682.759.825,40
	Jumlah Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		2.813.046.335,40	1.682.759.825,40
	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA		25.467.897.928,79	25.854.333.653,78
	UTANG BELANJA BAGI HASIL			
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	BPKAD	16.448.009.452,00	-
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	BPKAD	246.798.304,00	-
	JUMLAH UTANG BELANJA BAGI HASIL		16.694.807.756,00	-
	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA			
A	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak			
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan	10.193.870,00	10.173.046,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan	1.087.739.696,00	1.497.593.979,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	Badan Pendapatan	53.987.746,90	62.353.705,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	Badan Pendapatan	591.926.440,00	493.077.927,00
5	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	Badan Pendapatan	3.241.639,81	271.361.482,01

9

NO.	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	SKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
6	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	Badan Pendapatan	490.418,00	490.418,00
7	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	Badan Pendapatan	7.028.368,00	-
8	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	Badan Pendapatan	-	74.540.092,00
9	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	Badan Pendapatan	1.309.000,00	43.026.500,00
10	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	Badan Pendapatan	-	66.066.500,00
11	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	Badan Pendapatan	-	30.000.000,00
12	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	Badan Pendapatan	-	11.846.000,00
13	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	Badan Pendapatan	2.037.500,00	1.937.500,00
14	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	Badan Pendapatan	91.111.391,00	91.111.391,00
	Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		1.849.066.069,71	2.653.578.540,01
B	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi			
1	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	144.000,00	-
	Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi		144.000,00	-
C	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah			
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS - Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta	BPKAD	-	7.145.417,38
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	BPKAD	1.775.000,00	-
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	BPKAD	93.013.129,00	-
4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	BPKAD	10.820.364,00	-
5	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	BPKAD	25.890.000,00	-
	Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah		131.498.493,00	7.145.417,38
D	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Pemerintah Pusat			
1	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - BOS Reguler	BPKAD	-	99.085.000,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - BOS Kinerja	BPKAD	-	75.000.000,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	BPKAD	62.102.000,00	-
4	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	BPKAD	15.000.000,00	-
5	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	BPKAD	120.397.200,00	-
	Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Pemerintah Pusat		197.499.200,00	174.085.000,00
E	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Antar Daerah			
1	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	BPKAD	400.400.000,00	-

NO.	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	SKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Antar Daerah		400.400.000,00	-
	JUMLAH UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA		2.578.607.762,71	2.834.808.957,39
	TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		66.904.554.917,45	61.413.802.853,16



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
SEWA BARANG MILIK DAERAH (SEWA TANAH)
PER 31 DESEMBER 2025**

NO.	SKPD	PENGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rumah ATM	Jalan Majapahit Lumintang Denpasar	415.4/736/DPMPTSP/2022	12 Mei 2022 s/d 12 Mei 2027	60	112.500.000,00	1.875.000,00	44	82.500.000,00	16	30.000.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koperasi Pegawai Negeri Dharma Wiguna	Gedung Milik Pemerintah Kota Denpasar	Jalan Majapahit Lumintang Denpasar	028/645/DPMPTSP/2023	3 April 2025 s/d 3 April 2026	12	12.500.000,00	1.041.666,67	9	9.375.000,00	3	3.125.000,00
3	Sekretariat Daerah	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rumah ATM	Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar	011/19/11/PPK/II/2022	11 April 2022 s/d 11 April 2027	60	131.250.000,00	2.187.500,00	45	98.437.500,00	15	32.812.500,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bumdes Saka Mandiri Sanur Kaja	Lahan Milik Pemerintah Kota Denpasar	Desa Sanur Kaja Denpasar	030/3354/BPKAD 007/PS.Bumdes.SM/XI/2022	8 Nopember 2022 s/d 8 Nopember 2027	60	19.680.000,00	328.000,00	38	12.464.000,00	22	7.216.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bumdes Saka Mandiri Sanur Kaja	Lahan Milik Pemerintah Kota Denpasar	Desa Sanur Kaja Denpasar	030/461/BPKAD 008/PS.Bumdes.SM/I/2023	6 Pebruari 2024 s/d 6 Pebruari 2028	48	15.744.000,00	328.000,00	23	7.544.000,00	25	8.200.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ni Nengah Wijih	Sewa Kantin Puskesmas I Dentim	Jl. Pucuk No. 1 Denpasar Timur	000.2.3.2/313/Pusk I DT/2024	7 Maret 2024 s/d 6 Maret 2025	12	1.200.000,00	100.000,00	10	1.000.000,00	2	200.000,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Nyoman Saparnaya	Sewa Kantin BPKAD	Jl. Gatot Subroto VI E No. 2 Denpasar	000.2.3.2/1141/BPKAD	12 Pebruari 2024 s/d 12 Pebruari 2029	60	2.500.000,00	41.666,67	23	958.333,33	37	1.541.666,67
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koperasi Konsumen Tri Bhoga Gandamay	Tanah Milik Pemerintah Kota Denpasar	Jl. Gunung Krakatau Denpasar	100.3.7/4140/DLHK	25 Oktober 2025 s/d 24 Oktober 2026	12	1.000.000,00	83.333,33	3	250.000,00	9	750.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KPN SEDANA WERDHI/ Ketut Merta, S.Pd.SD., M.Pd	Sewa Kantin	Jalan Raya Sesetan No.264, Sesetan, Denpasar Selatan	000.3/159/Disdikpora 500.3.10.2/07/KPN-SW/2025	16 Februari 2025 s/d 16 Februari 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	11	5.500.000,00	1	500.000,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 PEMECUTAN/Nyoman Suri	Sewa Kantin	Jalan Gunung Batukaru, Pemecutan, Denpasar Barat	000.3/1206/Disdikpora	3 April 2025 s/d 3 April 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	9	2.625.000,00	3	875.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 DANGIN PURI/Ni Komang Cintya Paramita	Sewa Kantin	Jalan Veteran No. 87, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara	000.3/1447/Disdikpora	3 April 2025 s/d 3 April 2026	12	6.600.000,00	550.000,00	9	4.950.000,00	3	1.650.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 28 DANGIN PURI/Putu Candrawati	Sewa Kantin	Jalan Kamboja No. 4, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.3/1991/Disdikpora	3 April 2025 s/d 3 April 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	9	3.750.000,00	3	1.250.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 33 DANGIN PURI/Nyoman Tapayasa	Sewa Kantin	Jalan Gatot Subroto VI F, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara	000.3/1992/Disdikpora	1 April 2025 s/d 1 April 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	9	1.800.000,00	3	600.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 SUMERTAN/Ni Wayan Sudiani	Sewa Kantin	Jalan Plawa, Gang IX A No. 2, Sumerta Kauh, Denpasar Timur	000.2.3.2/16100/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	2	583.333,33	10	2.916.666,67
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 SESETAN/I Made Sujana	Sewa Kantin	Jalan Mayangsari, Sidakarya, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16101/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	2	583.333,33	10	2.916.666,67
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 PENATIH/Dewa Gede Astika Putra	Sewa Kantin	Jalan Nagasari No. 3, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16102/Disdikpora	29 November 2025 s/d 29 November 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	2	500.000,00	10	2.500.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 PENATIH/Ni Wayan Sariati	Sewa Kantin	Jalan Nagasari No. 3, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16103/Disdikpora	29 November 2025 s/d 29 November 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	2	500.000,00	10	2.500.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 RENON/Ni Wayan Rapini	Sewa Kantin	Jalan Tukad Balian No.37, Renon, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16104/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	1.000.000,00	83.333,33	2	166.666,67	10	833.333,33
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 KESIMAN/Putu Srititi	Sewa Kantin	Jalan Surabi No. 21, Kesiman, Denpasar Timur	000.2.3.2/16105/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 SANUR/Gusi Kompiang Susanawati	Sewa Kantin	Jalan Tukad Bilok No. 48, Sanur Kauh, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16106/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	750.000,00	62.500,00	1	62.500,00	11	687.500,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 SUMERTAN/I Made Ariani	Sewa Kantin	Jalan Hayam Wuruk No. 132, Sumerta Kelod, Denpasar Timur	000.2.3.2/16107/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	2	1.000.000,00	10	5.000.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 SUMERTAN/Ni Wayan Suparni	Sewa Kantin	Jalan Katrangan No. 17B, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16108/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	2	1.000.000,00	10	5.000.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 SESETAN/Ni Made Yesi Mariani	Sewa Kantin	Jalan Raya Kertha Petasikan, Sidakarya, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16109/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	2	333.333,33	10	1.666.666,67
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 PENATIH/I Kadek Suadnyana	Sewa Kantin	Jalan Trenggana No. 167, Penatih, Denpasar Timur	000.2.3.2/16110/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	5.500.000,00	458.333,33	1	458.333,33	11	5.041.666,67
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 PENATIH/Ni Ketut Rai	Sewa Kantin	Jalan Kaswari, Gang VI No. 4, Penatih, Denpasar Timur	000.2.3.2/16111/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	5.500.000,00	458.333,33	1	458.333,33	11	5.041.666,67
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 SESETAN/Luh Made Santini	Sewa Kantin	Jalan Tegal Wangi No. 54, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16112/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	3.600.000,00	300.000,00	2	600.000,00	10	3.000.000,00

NO.	SKPD	PENGGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 19 DANGIN PURI/Desak Putu Anna Costariani	Sewa Kantin	Jalan Letda Made Putra, Gang Kartika I No. 26, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16113/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 RENON/I Gusti Ayu Nik Setiati	Sewa Kantin	Jalan Tukad Balian No.37, Renon, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16114/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	1.000.000,00	83.333,33	2	166.666,67	10	833.333,33
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 SUMERTA/I Wayan Wardana	Sewa Kantin	Jalan Narakusuma, Gang VII No. 8, Sumerta Kelod, Denpasar Timur	000.2.3.2/16115/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 SESETAN/I Ketut Ardana	Sewa Kantin	Jalan Cenigan Sari No.8, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16116/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	2	1.000.000,00	10	5.000.000,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 SESETAN/Sagung Anniek Anom Sari	Sewa Kantin	Jalan Kertha Winangun II No.5, Sidakarya, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16117/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	4.560.000,00	380.000,00	2	760.000,00	10	3.800.000,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 SESETAN/Siti Fadilatin	Sewa Kantin	Jalan Tukad Buaji No.18, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16118/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	12.000.000,00	1.000.000,00	2	2.000.000,00	10	10.000.000,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 PENATIH/Ni Made Sri Purnama Sari	Sewa Kantin	Jalan Trenggana No. 8, Penatih, Denpasar Timur	000.2.3.2/16119/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	3.310.000,00	275.833,33	2	551.666,67	10	2.758.333,33
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 SUMERTA/Ayu Trisna Juniati	Sewa Kantin	Jalan Raya Puputan No. 186, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16120/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	2	1.000.000,00	10	5.000.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 RENON/Ni Ketut Suci	Sewa Kantin	Jalan Tukad Balian Gang Pura Dalem, Renon, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16121/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	500.000,00	41.666,67	2	83.333,33	10	416.666,67
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 13 SESETAN/Dewa Ayu Nyoman Armiti	Sewa Kantin	Jalan Kresek No. 7, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16122/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	2	1.000.000,00	10	5.000.000,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 PEDUNGAN/Ni Made Padmini	Sewa Kantin	Jalan Diponegoro-Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16123/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 PEDUNGAN/Mulyanto	Sewa Kantin	Jalan Diponegoro-Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16124/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 PEDUNGAN/Ni Kadek Sumariani	Sewa Kantin	Jalan Pulau Moyo No. 63, Pedungan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16125/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	1	291.666,67	11	3.208.333,33
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 SESETAN/Ni Luh Sugiantini	Sewa Kantin	Jalan Pulau Saelus I/a, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16126/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 DAUH PURI/Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi	Sewa Kantin	Jalan Pulau Batanta No. 83, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	000.2.3.2/16127/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 19 DAUH PURI/Misrikatin	Sewa Kantin	Jalan Teuku Umar 61X, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	000.2.3.2/16128/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	2	583.333,33	10	2.916.666,67
43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 SUMERTA/Ni Komang Tirtawati	Sewa Kantin	Jalan Kenyeri, Gang Merak No. 2, Sumerta Kaja, Denpasar Timur	000.2.3.2/16129/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 14 DAUH PURI/Misrikatin	Sewa Kantin	Jalan Pulau Ayu No. 29, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	000.2.3.2/16130/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
45	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 DAUH PURI/Ni Luh Nana Ariyani	Sewa Kantin	Jalan Diponegoro No. 155, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	000.2.3.2/16131/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	2	500.000,00	10	2.500.000,00
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 SUMERTA/I Made Anjasmara	Sewa Kantin	Jalan Hayam Wuruk, Banjar Bengkel, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16132/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 PEDUNGAN/I Ketut Samudi Putra	Sewa Kantin	Jalan Raya Pemogan Gang Dauh Desa No.5, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16133/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 PEDUNGAN/I Made Gatra	Sewa Kantin	Jalan Raya Pemogan Gang Dauh Desa No.5, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16134/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 SANUR/Ni Nyoman Fatima	Sewa Kantin	Jalan Mertasari No. 14, Sanur Kauh, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16135/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 PEDUNGAN/Ni Made Suji	Sewa Kantin	Jalan Pulau Moyo No. 63, Pedungan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16136/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	1	291.666,67	11	3.208.333,33
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 DAUH PURI/I Wayan Merta	Sewa Kantin	Jalan Pulau Batam No. 28 Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	000.2.3.2/16137/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 13 PEDUNGAN/Sang Ayu Permastari	Sewa Kantin	Jalan Gelogor Carik No.94, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16138/Disdikpora	14 Desember 2025 s/d 14 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 18 SESETAN/Ni Luh Ariyani	Sewa Kantin	Jalan Batas Dukuh Sari Gang Beo, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16139/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	2	400.000,00	10	2.000.000,00
54	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 8 SUMERTA/Luh Suwini	Sewa Kantin	Jalan Kecubung No. 34, Sumerta Kaja, Denpasar Timur	000.2.3.2/16140/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
55	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 DAUH PURI/I Gusti Ayu Wiadnyani	Sewa Kantin	Jalan Pulau Misol Gang I No. 5, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	000.2.3.2/16141/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 23 PEMECUTAN/I Made Erik Harpenas Putra	Sewa Kantin	Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Bubuh, Pemecutan Klod, Denpasar Barat	000.2.3.2/16142/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67

Lampiran 32
Hal. 3 dari 9

NO.	SKPD	PENGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 PEMECUTAN/Komang Dianawati	Sewa Kantin	Jalan Gunung Batur Gang Nangka II, Pemecutan, Denpasar Barat	000.2.3.2/16143/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
58	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 SESETAN/Ni Ketut Sri	Sewa Kantin	Jalan Batas Dukuh Sari No.16, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16144/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	4.800.000,00	400.000,00	1	400.000,00	11	4.400.000,00
59	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 24 DAUH PURI/Ni Made Srinathi	Sewa Kantin	Jalan Serma Made Pili No. 35, Dauh Puri Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16145/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
60	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 SUMERTA/lin Marliyah	Sewa Kantin	Jalan Hayam Wuruk, Gang II No. 8, Sumerta Kauh, Denpasar Timur	000.2.3.2/16146/Disdikpora	23 November 2025 s/d 23 November 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	2	250.000,00	10	1.250.000,00
61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 24 DAUH PURI/i Wayan Suardana Sana	Sewa Kantin	Jalan Serma Made Pili No. 35, Dauh Puri Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16147/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 DAUH PURI/Ni Made Srinathi	Sewa Kantin	Jalan Serma Repot No. 5, Dauh Puri Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16148/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	2	500.000,00	10	2.500.000,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 13 PEMECUTAN/Ni Made Widiyati	Sewa Kantin	Jalan Imam Bonjol No. 436, Pemecutan Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16149/Disdikpora	24 November 2025 s/d 24 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	2	833.333,33	10	4.166.666,67
64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 SESETAN/i Nengah Tusti Yasa	Sewa Kantin	Jalan Raya Sesetan No.264, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16150/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	14.040.000,00	1.170.000,00	2	2.340.000,00	10	11.700.000,00
65	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 32 PEMECUTAN/Ni Nengah Metri	Sewa Kantin	Jalan Gunung Lempuyang Gang Bromo VII, Tegai Kertha, Denpasar Barat	000.2.3.2/16151/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	4.800.000,00	400.000,00	2	800.000,00	10	4.000.000,00
66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 27 PEMECUTAN/i Nyoman Pujana	Sewa Kantin	Jalan Gunung Cemara No. 23, Tegai Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16152/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	3.150.000,00	262.500,00	1	262.500,00	11	2.887.500,00
67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 PENATHI/Ni Wayan Ayun Sukarni	Sewa Kantin	Jalan Sangalangit No. 11, Penathi, Denpasar Timur	000.2.3.2/16153/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
68	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 SESETAN/i Nyoman Sena	Sewa Kantin	Jalan Raya Sesetan No.264, Sesetan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16154/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	5.850.000,00	487.500,00	2	975.000,00	10	4.875.000,00
69	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 21 DAUH PURI/Choirun Nisa Indah Istikomah	Sewa Kantin	Jalan Pulau Yapen No. 18, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	000.2.3.2/16155/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
70	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 DAUH PURI/Ni Nyoman Wiasih	Sewa Kantin	Jalan Teuku Umar Gang Pluto No. 4, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	000.2.3.2/16156/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	2	416.666,67	10	2.083.333,33
71	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 14 PADANGSAMBIA/Ni Gusti Ayu Riskariyanti	Sewa Kantin	Jalan Gunung Andakasa Gang Matahari No. 8A, Padangsambian, Denpasar Barat	000.2.3.2/16157/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	7.000.000,00	583.333,33	1	583.333,33	11	6.416.666,67
72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 PADANGSAMBIA/Ni Ketut Asrini	Sewa Kantin	Jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 58, Padangsambian Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16158/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	7.000.000,00	583.333,33	1	583.333,33	11	6.416.666,67
73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN TULANGAMPIANG/Nyoman Indawati	Sewa Kantin	Jalan Merthayasa No. 4, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16159/Disdikpora	1 Desember 2025 s/d 1 Desember 2026	12	7.500.000,00	625.000,00	1	625.000,00	11	6.875.000,00
74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 16 PEMECUTAN/Ni Nengah Yuniari	Sewa Kantin	Jalan Bukit Tunggal Gang VII No.22, Pemecutan, Denpasar Barat	000.2.3.2/16160/Disdikpora	27 November 2025 s/d 27 November 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	2	333.333,33	10	1.666.666,67
75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 25 PEMECUTAN/Lutfi Ayu Wagianingsih	Sewa Kantin	Jalan Marlboro No. 15, Pemecutan Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16161/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	4.880.000,00	406.666,67	2	813.333,33	10	4.066.666,67
76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 DENPASAR/Ni Nyoman Wati	Sewa Kantin	Jalan Gatot Subroto Barat, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16162/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	12.500.000,00	1.041.666,67	1	1.041.666,67	11	11.458.333,33
77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 TONJA/Ni Luh Putu Fajarwathi	Sewa Kantin	Jalan Seroja Gang Nanas No. 2, Tonja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16163/Disdikpora	1 Desember 2025 s/d 1 Desember 2026	12	4.800.000,00	400.000,00	1	400.000,00	11	4.400.000,00
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 15 PEMECUTAN/Desak Made Oka	Sewa Kantin	Jalan Gunung Karang No. 3, Pemecutan Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16164/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	1.750.000,00	145.833,33	2	291.666,67	10	1.458.333,33
79	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 PENATHI/Ni Ketut Sri Wahyuni	Sewa Kantin	Jalan Siulan No. 112, Penathi Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16165/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	1	291.666,67	11	3.208.333,33
80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 SANUR/Ni Nyoman Suratni	Sewa Kantin	Jalan Tukad Blok No. 48, Sanur Kauh, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16166/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	350.000,00	29.166,67	1	29.166,67	11	320.833,33
81	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 18 PADANGSAMBIA/Ni Luh Gede Rini	Sewa Kantin	Jalan Gunung Lumut No. 75, Padangsambian Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16167/Disdikpora	13 Desember 2025 s/d 13 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
82	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 PANJER/Ni Made Sudarti	Sewa Kantin	Jalan Tukad Pancoran IV/17, Panjer, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16168/Disdikpora	22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
83	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 8 KESIMAN/Ni Made Primawati	Sewa Kantin	Jalan Sedap Malam 1, Kesiman, Denpasar Timur	000.2.3.2/16169/Disdikpora	26 Desember 2025 s/d 26 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
84	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 PEDUNGAN/i Wayan Suardika	Sewa Kantin	Jalan Pulau Bungin, Desa Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16170/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
85	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 PEDUNGAN/Ni Luh Putu Arini	Sewa Kantin	Jalan Pulau Belitung Gg. I/3, Pedungan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16171/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	6.500.000,00	541.666,67	1	541.666,67	11	5.958.333,33

NO.	SKPD	PENGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
86	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 PEDUNGAN/Ni Nyoman Rumi	Sewa Kantin	Jalan Griya Anyar, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16172/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
87	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 PEGUYANGAN/Ni Putu Putri Suriani	Sewa Kantin	Jalan Cekomaria No. 01, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16173/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 9 DENPASAR/Ida Bagus Putu Wardana	Sewa Kantin	Jalan Bypass Ngurah Rai No. 177, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16174/Disdikpora	15 Desember 2025 s/d 15 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
89	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 13 KESIMAN/Ni Nyoman Muryati	Sewa Kantin	Jalan Sedap Malam No. 36B, Kesiman, Denpasar Timur	000.2.3.2/16175/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	10.000.000,00	833.333,33	1	833.333,33	11	9.166.666,67
90	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 PEMECUTAN/Ngakan Kompiang Artawan	Sewa Kantin	Jalan Gunung Krakatau No.41, Pemecutan Klod, Denpasar Barat	000.2.3.2/16176/Disdikpora	30 November 2025 s/d 30 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
91	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 PEGUYANGAN/Ni Ketut Resni	Sewa Kantin	Jalan Singasari Gang Angsa No. 4, Peguyangan, Denpasar Utara	000.2.3.2/16177/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	4.200.000,00	350.000,00	1	350.000,00	11	3.850.000,00
92	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 PEGUYANGAN/Anak Agung Adi Dharmawati	Sewa Kantin	Jalan Tunjung Tutur No 11, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16178/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	4.000.000,00	333.333,33	1	333.333,33	11	3.666.666,67
93	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 SANURI/Gst Kompiang Sariani	Sewa Kantin	Jalan Hangtuah No. 1, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16179/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	4.000.000,00	333.333,33	1	333.333,33	11	3.666.666,67
94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 Tonja/Rusminingsih	Sewa Kantin	Jalan Kenyeri No. 59, Tonja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16180/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	4.880.000,00	406.666,67	1	406.666,67	11	4.473.333,33
95	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 20 DANGIN PURI/Ketut Sritami	Sewa Kantin	Jalan Gatot Subroto VI/76, Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara	000.2.3.2/16181/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 UBUNG/Gede Yuda Swastika Putra	Sewa Kantin	Jalan Tunggal Ametung No. 15, Ubung Kaja, Denpasar	000.2.3.2/16182/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
97	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 SANUR/Ni Ketut Sukerni	Sewa Kantin	Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Nuri I/12, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16183/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	1.000.000,00	83.333,33	1	83.333,33	11	916.666,67
98	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 SANUR/Ayu Adi Prabawati	Sewa Kantin	Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Nuri I/12, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16184/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	1.000.000,00	83.333,33	1	83.333,33	11	916.666,67
99	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 26 Dangin Puri/Ni Ketut Suliasih	Sewa Kantin	Jalan Letda Jaya No. 1, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16185/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	3.500.000,00	291.666,67	1	291.666,67	11	3.208.333,33
100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 PEGUYANGAN/Ni Kadek Karyati	Sewa Kantin	Jalan Ahmad Yani Utara No. 332, Peguyangan, Denpasar Utara	000.2.3.2/16186/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
101	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 8 PADANGSAMBIAN/Ni Nyoman Picahyanti	Sewa Kantin	Jalan Kebo Iwa No. 20, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	000.2.3.2/16187/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	4.800.000,00	400.000,00	1	400.000,00	11	4.400.000,00
102	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 SANUR/Pande Komang Juliantari	Sewa Kantin	Jalan Sekuta No. 9, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16188/Disdikpora	14 Desember 2025 s/d 14 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
103	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 PANJER/Ni Putu Nevi Ruspita Dewi	Sewa Kantin	Jalan Waturenggong Gang. XVII C/2, Panjer, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16189/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
104	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 KESIMAN/Ni Made Pradnya Dwi Anggraeni	Sewa Kantin	Jalan Noja, Gang III No. 4, Kesiman Petilan, Denpasar Timur	000.2.3.2/16190/Disdikpora	22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
105	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 22 DAUH PURI/Ngurah Putu Susma Ari Surya, S.H	Sewa Kantin	Jalan Mataram, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16191/Disdikpora	28 Desember 2025 s/d 28 Desember 2026	12	10.000.000,00	833.333,33	1	833.333,33	11	9.166.666,67
106	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 17 DANGIN PURI/Ni Wayan Soka	Sewa Kantin	Jalan Melati No. 19, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16192/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	3.600.000,00	300.000,00	1	300.000,00	11	3.300.000,00
107	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 18 DANGIN PURI/Ni Luh Made Wageati	Sewa Kantin	Jalan Sandat No. 5, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16193/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	7.000.000,00	583.333,33	1	583.333,33	11	6.416.666,67
108	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 PADANGSAMBIAN/Ida Ayu Dodi Widiasni	Sewa Kantin	Jalan Kebo Iwa No. 11, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	000.2.3.2/16194/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
109	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 PEGUYANGAN/Ni Luh Putu Astaryanti	Sewa Kantin	Jalan Antasura, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16195/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	4.880.000,00	406.666,67	1	406.666,67	11	4.473.333,33
110	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 33 DANGIN PURI/Muchlis Nurrahmansyah	Sewa Kantin	Jalan Gatot Subroto VI F, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16196/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
111	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 Sanur/Ida Ayu Oka Karmini	Sewa Kantin	Jalan Danau Beratan No. 3, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16197/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	4.000.000,00	333.333,33	1	333.333,33	11	3.666.666,67
112	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 PEGUYANGAN/I Wayan Winarta	Sewa Kantin	Jalan Lembusora, Peguyangan, Denpasar Utara	000.2.3.2/16198/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
113	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 UBUNG/Ni Nyoman Sariani	Sewa Kantin	Jalan Irawan No. 16, Ubung Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16199/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
114	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 PEDUNGAN/Ni Wayan Darmiati	Sewa Kantin	Jalan Griya Anyar, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16200/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00

NO.	SKPD	PENGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
115	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 UBUNG/Ni Wayan Simpen	Sewa Kantin	Jalan Tunggul Ametung, Ubung Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16201/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
116	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 PADANGSAMBIAN/Ni Nyoman Murni	Sewa Kantin	Jalan Gunung Soputan No. 228, Padangsambian Klod, Denpasar Barat	000.2.3.2/16202/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
117	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Ni Wayan Kerti	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16203/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
118	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Gusti Ayu Putri Pramita	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16204/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
119	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Kadek Daysi Olivera M.	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16205/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
120	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Ni Wayan Seriasih	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16206/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
121	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Ketut Cindi Lestiana	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16207/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
122	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Gusti Made Janurati	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16208/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
123	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 4 DENPASAR/Ni Wayan Rindiasih	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16209/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
124	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 8 PEGUYANGAN/Nyoman Budiarta	Sewa Kantin	Jalan Sentanu No. 24, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16210/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	4.200.000,00	350.000,00	1	350.000,00	11	3.850.000,00
125	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 UBUNG/Suriati	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16211/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
126	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 PEDUNGAN/Ni Made Sulandri	Sewa Kantin	Jalan Pulau Galang No. 50, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16212/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	14.400.000,00	1.200.000,00	1	1.200.000,00	11	13.200.000,00
127	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 SANUR/Ni Wayan Eka Sidi Adnyana	Sewa Kantin	Jalan Batur Sari IV, Gang Dura, Sanur Kauh, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16213/Disdikpora	13 Desember 2025 s/d 13 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
128	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 12 DENPASAR/Lenny Irawati	Sewa Kantin	Jalan Dam Peraupan I, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16214/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
129	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 26 PEMECUTAN/Ni Putu Wiwik Widiani	Sewa Kantin	Jalan Gunung Abang No. 2, Tegal Kertha, Denpasar Barat	000.2.3.2/16215/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	2	1.000.000,00	10	5.000.000,00
130	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 23 DANGIN PURI/Ni Putu Dwi Jayanti	Sewa Kantin	Jalan Nangka Selatan Gang Gelatik, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16216/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	2.100.000,00	175.000,00	1	175.000,00	11	1.925.000,00
131	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 TONJA/Ni Luh Sumartini	Sewa Kantin	Jalan Gatot Subroto I/IV No. 2, Tonja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16217/Disdikpora	4 Desember 2025 s/d 4 Desember 2026	12	7.320.000,00	610.000,00	1	610.000,00	11	6.710.000,00
132	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 PEGUYANGAN/Nyoman Arya	Sewa Kantin	Jalan Apit Telaga, Peguyangan, Denpasar Utara	000.2.3.2/16218/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
133	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 PEDUNGAN/Ni Wayan Darni	Sewa Kantin	Jalan Pulau Bungin, Desa Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16219/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
134	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 5 UBUNG/Sri Ngatin	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Melati, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16220/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	7.630.000,00	635.833,33	1	635.833,33	11	6.994.166,67
135	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 PADANGSAMBIAN/Ketut Martini	Sewa Kantin	Jalan Gunung Sangiang Gang Sriwijaya, Padangsambian, Denpasar Barat	000.2.3.2/16221/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
136	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 11 DENPASAR/Intan Rusmayanti	Sewa Kantin	Jalan Tukad Punggawa No. 14, Serangan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16222/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
137	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 11 DENPASAR/Nyoman Sukreni	Sewa Kantin	Jalan Tukad Punggawa No. 14, Serangan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16223/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
138	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 11 DENPASAR/Komang Eka Kumala Sari	Sewa Kantin	Jalan Tukad Punggawa No. 14, Serangan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16224/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
139	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 11 DENPASAR/Putu Aryangga	Sewa Kantin	Jalan Tukad Punggawa No. 14, Serangan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16225/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
140	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 14 DENPASAR/Ni Nyoman Suandendra	Sewa Kantin	Jalan WR Supratman No. 18, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16226/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
141	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 12 DENPASAR/Ni Wayan Martini	Sewa Kantin	Jalan Dam Peraupan I, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16227/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
142	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 12 DENPASAR/Ni Ketut Dewik Adnyani	Sewa Kantin	Jalan Dam Peraupan I, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16228/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
143	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 PANJER/Ni Luh Wersiw	Sewa Kantin	Jalan Tukad Banyu Poh No.38, Panjer, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16229/Disdikpora	22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
144	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 2 DENPASAR/Ketut Wahyu Suprayoga	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung No. 112, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16230/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00

NO.	SKPD	PENGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
145	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 2 DENPASAR/Ni Wayan Warni	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung No. 112, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16231/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
146	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 2 DENPASAR/Ni Kadek Sri Maryati	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung No. 112, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16232/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
147	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 2 DENPASAR/Ni Komang Rastini	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung No. 112, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16233/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
148	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 2 DENPASAR/Nuraini Sari	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung No. 112, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16234/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
149	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 PADANGSAMBIAH/I Gusti Ngurah Ardana	Sewa Kantin	Jalan Gunung Guntur No. 17, Padangsambian, Denpasar Barat	000.2.3.2/16235/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	5.490.000,00	457.500,00	1	457.500,00	11	5.032.500,00
150	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 28 DANGIN PURI/Gusti Nyoman Yulastini	Sewa Kantin	Jalan Kamboja No. 4, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16236/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
151	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 PADANGSAMBIAH/Muhamad Basiru	Sewa Kantin	Jalan Gunung Sangiang Gang Sriwijaya, Padangsambian, Denpasar Barat	000.2.3.2/16237/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
152	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 PEGUYANGAN/I Gusti Ayu Agung Lestari	Sewa Kantin	Jalan Cekomaria No. 109, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16238/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	3.600.000,00	300.000,00	1	300.000,00	11	3.300.000,00
153	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 PADANGSAMBIAH/Ni Made Winiadi	Sewa Kantin	Jalan Gunung Sangiang Gang Sriwijaya, Padangsambian, Denpasar Barat	000.2.3.2/16239/Disdikpora	8 Desember 2025 s/d 8 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
154	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 14 KESIMAN/Ni Luh Sundari Astuti	Sewa Kantin	Jalan Sulatri, Gang VI No. 11, Kesiman Petilan, Denpasar Timur	000.2.3.2/16240/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	4.500.000,00	375.000,00	1	375.000,00	11	4.125.000,00
155	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 22 DANGIN PURI/Ni Nyoman Wirni	Sewa Kantin	Jalan Kapten Japa, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur	000.2.3.2/16241/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
156	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 1 DENPASAR/Ni Ketut Joni Astiti	Sewa Kantin	Jalan Surapati No.2, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16242/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
157	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 SANUR/Pande Wayan Suicari	Sewa Kantin	Jalan Betngandang I/10, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16243/Disdikpora	11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
158	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 SANUR/Ni Made Hariani	Sewa Kantin	Jalan Betngandang I/10, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16244/Disdikpora	11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
159	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 SANUR/Ni Wayan Sudani	Sewa Kantin	Jalan Sekuta No. 9, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16245/Disdikpora	13 Desember 2025 s/d 13 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
160	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 SANUR/Ni Ketut Damiyanti	Sewa Kantin	Jalan Sekuta No. 9, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16246/Disdikpora	13 Desember 2025 s/d 13 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
161	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 SANUR/Anak Agung Bagus Manik	Sewa Kantin	Jalan Sekuta No. 9, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16247/Disdikpora	14 Desember 2025 s/d 14 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
162	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 14 DENPASAR/Ngakan Gede Bagus Bargawa	Sewa Kantin	Jalan WR Supratman No. 18, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16248/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
163	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 14 DENPASAR/Ni Nyoman Parwati	Sewa Kantin	Jalan WR Supratman No. 18, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16249/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
164	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 DAUH PURI/Ermy Pertamawati	Sewa Kantin	Jalan Ahmad Yani, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16250/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
165	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 DAUH PURI/Sulastris	Sewa Kantin	Jalan Ahmad Yani, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16251/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
166	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 12 DENPASAR/A. A. Made Widya Guna Dewi	Sewa Kantin	Jalan Dam Peraupan I, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16252/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
167	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KPN SATYA DHARMA/Drs. I Made Sasrawan, M.Si	Sewa Kantin	Jalan Surapati No. 6, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16253/Disdikpora	22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2026	12	3.600.000,00	300.000,00	1	300.000,00	11	3.300.000,00
168	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 3 DENPASAR/Didik Catur Aswan	Sewa Kantin	Jalan Jepun No. 5, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16254/Disdikpora	26 Desember 2025 s/d 26 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
169	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 3 DENPASAR/Ni Made Seri Widiani	Sewa Kantin	Jalan Jepun No. 5, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16255/Disdikpora	26 Desember 2025 s/d 26 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
170	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 7 DENPASAR/Ni Luh Tia Paramita Dewi	Sewa Kantin	Jalan Gunung Rinjani, Tegal Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16256/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
171	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 7 DENPASAR/Ali Padi	Sewa Kantin	Jalan Gunung Rinjani, Tegal Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16257/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
172	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 7 DENPASAR/Ni Nengah Kariasih	Sewa Kantin	Jalan Gunung Rinjani, Tegal Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16258/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
173	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 7 DENPASAR/Ni Wayan Puspawati	Sewa Kantin	Jalan Gunung Rinjani, Tegal Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16259/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00

NO.	SKPD	PENGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
174	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 1 DENPASAR/I Made Suwamba	Sewa Kantin	Jalan Surapati No.2, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16260/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	10.000.000,00	833.333,33	1	833.333,33	11	9.166.666,67
175	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 1 DENPASAR/Ni Gusti Ayu Komang Alit Arista	Sewa Kantin	Jalan Surapati No.2, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16261/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
176	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 1 DENPASAR/I Putu Irianono	Sewa Kantin	Jalan Surapati No.2, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16262/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
177	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 1 DENPASAR/Arif Hidayat	Sewa Kantin	Jalan Surapati No.2, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16263/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
178	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 1 DENPASAR/Sulasmi	Sewa Kantin	Jalan Surapati No.2, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16264/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
179	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 PADANGSAMBIA/Anak Agung KOMPIANG Tika Juniati	Sewa Kantin	Jalan Perum Buana Permai No. 11, Padangsambian, Denpasar Barat	000.2.3.2/16265/Disdikpora	11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2026	12	5.250.000,00	437.500,00	1	437.500,00	11	4.812.500,00
180	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 14 DANGIN PURI/Ni Nengah Wirati	Sewa Kantin	Jalan Surapati No. 6, Dangin Puri, Denpasar Timur	000.2.3.2/16266/Disdikpora	12 Desember 2025 s/d 12 Desember 2026	12	7.000.000,00	583.333,33	1	583.333,33	11	6.416.666,67
181	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 PADANGSAMBIA/Anak Agung Putu Sriasih	Sewa Kantin	Jalan Kebo Iwa Gang Kepundung No. 4, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	000.2.3.2/16267/Disdikpora	13 Desember 2025 s/d 13 Desember 2026	12	4.300.000,00	358.333,33	1	358.333,33	11	3.941.666,67
182	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 17 PADANGSAMBIA/ Putu Aris Sutayawan	Sewa Kantin	Jalan Tangkuban Perahu Gang Padang Galeria No. 10, Padangsambian Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16268/Disdikpora	15 Desember 2025 s/d 15 Desember 2026	12	2.200.000,00	183.333,33	1	183.333,33	11	2.016.666,67
183	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 12 DENPASAR/Ni Nyoman Sekarini	Sewa Kantin	Jalan Dam Peraupan I, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16269/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
184	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 3 DENPASAR/Nurudin	Sewa Kantin	Jalan Jepun No. 5, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16271/Disdikpora	26 Desember 2025 s/d 26 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
185	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 7 DENPASAR/Ni Ketut Nilawati	Sewa Kantin	Jalan Gunung Rinjani, Tegal Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16272/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
186	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 7 DENPASAR/Achmad Baliono Sugito	Sewa Kantin	Jalan Gunung Rinjani, Tegal Harum, Denpasar Barat	000.2.3.2/16273/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
187	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 PEGUYANGAN/Ni Nyoman Padmi	Sewa Kantin	Jalan Pertulaka No. 1, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16274/Disdikpora	7 Desember 2025 s/d 7 Desember 2026	12	3.600.000,00	300.000,00	1	300.000,00	11	3.300.000,00
188	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 SANUR/Ni Ketut Suamiti	Sewa Kantin	Jalan Sekuta No. 9, Sanur, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16275/Disdikpora	11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
189	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 PEDUNGAN/Rafifah	Sewa Kantin	Jalan Pulau Yoni No.94 A, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16276/Disdikpora	11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2026	12	4.800.000,00	400.000,00	1	400.000,00	11	4.400.000,00
190	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 9 PEDUNGAN/A.A. Kt. Gd. Santika	Sewa Kantin	Jalan Pulau Yoni No.94 A, Pemogan, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16277/Disdikpora	11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2026	12	4.800.000,00	400.000,00	1	400.000,00	11	4.400.000,00
191	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 KESIMAN/Ni Luh Ayu Sri Lestari	Sewa Kantin	Jalan Pucuk Bang No. 8, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16278/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
192	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 12 DENPASAR/Ni Komang Lilayanti	Sewa Kantin	Jalan Dam Peraupan I, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16279/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
193	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 3 DENPASAR/Ngakan Gede Bagus Bargawa	Sewa Kantin	Jalan Jepun No. 5, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara	000.2.3.2/16280/Disdikpora	26 Desember 2025 s/d 26 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
194	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 2 DENPASAR/Luh Putu Marta Diana	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung No. 112, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16281/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.400.000,00	200.000,00	1	200.000,00	11	2.200.000,00
195	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 17 DAUJ PURI/Nyoman Suasini	Sewa Kantin	Jalan Kahuripan No. 3, Dangin Puri, Denpasar Utara	000.2.3.2/16282/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	10.000.000,00	833.333,33	1	833.333,33	11	9.166.666,67
196	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 6 KESIMAN/Ni Wayan Mariati	Sewa Kantin	Jalan Sulatri II, Kesiman Petilian, Denpasar Timur	000.2.3.2/16283/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	10.000.000,00	833.333,33	1	833.333,33	11	9.166.666,67
197	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 10 KESIMAN/Ni Komang Sandra Lestari	Sewa Kantin	Jalan Soka, Gang Kertapura III, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16284/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
198	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 PANJER/Ni Wayan Indra Dewi	Sewa Kantin	Jalan Tukad Pancoran Gang II No.4 Panjer, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16285/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	4.500.000,00	375.000,00	1	375.000,00	11	4.125.000,00
199	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 1 KESIMAN/Ni Putu Tutik Rasmini	Sewa Kantin	Jalan WR. Supratman No. 174, Kesiman, Denpasar Timur	000.2.3.2/16286/Disdikpora	22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2026	12	7.200.000,00	600.000,00	1	600.000,00	11	6.600.000,00
200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 2 PANJER/Desak Putu Rijasawitri	Sewa Kantin	Jalan Tukad Pancoran No 1, Panjer, Denpasar Selatan	000.2.3.2/16287/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	4.000.000,00	333.333,33	1	333.333,33	11	3.666.666,67
201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 17 KESIMAN/Dewa Ayu Putu Sari Kantini	Sewa Kantin	Jalan Gemtir No. 64, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16288/Disdikpora	22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2026	12	6.000.000,00	500.000,00	1	500.000,00	11	5.500.000,00
202	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 16 KESIMAN/Ni Wayan Wariati	Sewa Kantin	Jalan Bakung No. 73, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16289/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33

NO.	SKPD	PENGGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
203	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 7 KESIMAN/Indah Maha Sari	Sewa Kantin	Jalan Gunitir No. 36, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	000.2.3.2/16290/Disdikpora	21 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
204	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 DAUH PURI/Eka Sari Yuliawati	Sewa Kantin	Jalan Ahmad Yani Gang II/2, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16291/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	2.500.000,00	208.333,33	1	208.333,33	11	2.291.666,67
205	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 18 PEMECUTAN/Ni Ketut Adi Dhamayanti	Sewa Kantin	Jalan Merthayasa No. 1, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16292/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	7.500.000,00	625.000,00	1	625.000,00	11	6.875.000,00
206	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 5 DENPASAR/Siti Zulaikah	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16293/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	4.000.000,00	333.333,33	1	333.333,33	11	3.666.666,67
207	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 5 DENPASAR/Ni Made Murniasih	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16294/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
208	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 5 DENPASAR/Ni Ketut Muliani	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16295/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	3.000.000,00	250.000,00	1	250.000,00	11	2.750.000,00
209	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 5 DENPASAR/Siti Raudhatul Novita	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16296/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
210	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 5 DENPASAR/Sri Sartini	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16297/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
211	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 5 DENPASAR/Ni Wayan Mariani	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka, Ubung, Denpasar Utara	000.2.3.2/16298/Disdikpora	5 Desember 2025 s/d 5 Desember 2026	12	4.000.000,00	333.333,33	1	333.333,33	11	3.666.666,67
212	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 4 TONJANI/Kadek Sukrinawati	Sewa Kantin	Jalan Antasura No. 4X, Tonja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16299/Disdikpora	6 Desember 2025 s/d 6 Desember 2026	12	4.500.000,00	375.000,00	1	375.000,00	11	4.125.000,00
213	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 29 PEMECUTAN/Ni Made Rapiani	Sewa Kantin	Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16300/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	7.500.000,00	625.000,00	1	625.000,00	11	6.875.000,00
214	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 12 PEMECUTAN/Jero Menuh	Sewa Kantin	Jalan Sutomo Gang III, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16301/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
215	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 24 PEMECUTAN/Anggara Kusuma Anka	Sewa Kantin	Jalan Cokroaminoto Gang Gelatik No. 7, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16302/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	5.000.000,00	416.666,67	1	416.666,67	11	4.583.333,33
216	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 3 PEMECUTAN/Ni Nyoman Sukarini	Sewa Kantin	Jalan Gunung Penulisan No. 11, Pemecutan, Denpasar Barat	000.2.3.2/16303/Disdikpora	1 Desember 2025 s/d 1 Desember 2026	12	2.000.000,00	166.666,67	1	166.666,67	11	1.833.333,33
217	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 8 DAUH PURI/II Made Wirjadi, S.Pd.	Sewa Kantin	Jalan P.B. Sudirman No. 8, Dauh Puri Klot, Denpasar Barat	000.2.3.2/16304/Disdikpora	14 Desember 2025 s/d 14 Desember 2027	12	8.000.000,00	666.666,67	1	666.666,67	11	7.333.333,33
218	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 21 PEMECUTAN/Ni Nyoman Wartini	Sewa Kantin	Jalan Merthayasa, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	000.2.3.2/16305/Disdikpora	19 Desember 2025 s/d 19 Desember 2026	12	7.200.000,00	600.000,00	1	600.000,00	11	6.600.000,00
219	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 8 DENPASAR/Diah Irma Savitri	Sewa Kantin	Jalan Meduri No. 2, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16306/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	7.750.000,00	645.833,33	1	645.833,33	11	7.104.166,67
220	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 8 DENPASAR/Siti Aisyah	Sewa Kantin	Jalan Meduri No. 2, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16307/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	7.750.000,00	645.833,33	1	645.833,33	11	7.104.166,67
221	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 8 DENPASAR/Desak Nyoman Sriwati	Sewa Kantin	Jalan Meduri No. 2, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16308/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	7.750.000,00	645.833,33	1	645.833,33	11	7.104.166,67
222	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 8 DENPASAR/Ni Putu Ariyati	Sewa Kantin	Jalan Meduri No. 2, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16309/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	7.250.000,00	604.166,67	1	604.166,67	11	6.645.833,33
223	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SMPN 8 DENPASAR/Ni Kadek Widiastini	Sewa Kantin	Jalan Meduri No. 2, Sumerta, Denpasar Timur	000.2.3.2/16310/Disdikpora	27 Desember 2025 s/d 27 Desember 2026	12	7.250.000,00	604.166,67	1	604.166,67	11	6.645.833,33
224	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SDN 11 PEMECUTAN/Made Warsini	Sewa Kantin	Jalan Gunung Batukaru, Pemecutan, Denpasar Barat	000.2.3.2/16311/Disdikpora	28 November 2025 s/d 28 November 2026	12	1.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00	11	1.375.000,00
Total Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD (Lain-Lain PAD yang Sah)												888.299.333,35	
1	Dinas Kesehatan (RSUD Wangaya)	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Gedung Pelayanan Kesehatan Hemodialisa	Jalan R.A. Kartini No. 133, Desa Dauh Puri Kaja	100.3.7/6112/RSUDW	6 Nopember 2025 s.d 6 Nopember 2026	12	9.300.000,00	775.000,00	2	1.550.000,00	10	7.750.000,00
2	Dinas Kesehatan (RSUD Wangaya)	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Ruang Capem BPD Bali	Jalan R.A. Kartini No. 133, Desa Dauh Puri Kaja	Nomor Akta: 189	30 September 2024 s.d 30 September 2029	60	364.500.000,00	6.075.000,00	15	91.125.000,00	45	273.375.000,00
3	Dinas Kesehatan (RSUD Wangaya)	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rumah ATM	Jalan R.A. Kartini No. 133, Desa Dauh Puri Kaja	100.3.7/6119/RSUDW	30 September 2024 s.d 30 September 2029	60	112.500.000,00	1.875.000,00	15	28.125.000,00	45	84.375.000,00
Total Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD (Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain)												365.500.000,00	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Serifikasi Kompetensi	Ni Ketut Suparni	Sewa Kantin	Jl. Gatot Subroto IV/J No. 32 Denpasar	000.4.7.1/654/DTKSK	3 Maret 2025 s/d 3 Maret 2026	12	660.000,00	55.000,00	10	550.000,00	2	110.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ni Luh Rai Suseni	Sewa Kantin (Setda)	Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar	000.2.3.2/1305/BPKAD	27 Februari 2025 s/d 27 Februari 2026	12	12.000.000,00	1.000.000,00	11	11.000.000,00	1	1.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ni Wayan Kariawati	Sewa Kantin (Setda)	Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar	000.2.3.2/1306/BPKAD	27 Februari 2025 s/d 27 Februari 2026	12	12.000.000,00	1.000.000,00	11	11.000.000,00	1	1.000.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ni Ketut Martini	Sewa Kantin (Setda)	Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar	000.2.3.2/1281/BPKAD	27 Februari 2025 s/d 27 Februari 2026	12	12.000.000,00	1.000.000,00	11	11.000.000,00	1	1.000.000,00
Total Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD (Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah)												3.110.000,00	

NO.	SKPD	PENGGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA (Rp)	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - SEWA BMD												1.256.909.333,35	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
SEWA BARANG MILIK DAERAH (SEWA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI)
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	PENGGUNA	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	AWAL DAN AKHIR KONTRAK	MASA KONTRAK (bulan)	NILAI KONTRAK		JUMLAH YANG SUDAH DITERIMA DIMUKA		SISA PENDAPATAN SEWA	
								KESELURUHAN	PER BULAN	MASA KONTRAK SD 31 DES 2025/bulan	NILAI (Rp)	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13=8-11	14=10x13
1	Dinas Perhubungan	PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk.	Utilitas Penerangan Jalan Umum	Kota Denpasar	551.11/1480 ZLPJU/Dishub/XII/2021 Tel.175/HK 810/J DMT- 1064000/2021	11 Desember 2021 s/d 10 Desember 2026	60	401.521.000,00	6.692.016,67	49	327.908.816,67	11	73.612.183,33
2	Dinas Perhubungan	PT. Tower Bersama	Utilitas Penerangan Jalan Umum	Kota Denpasar	551.11/1480 LPJU/Dishub/XII/2021 060/TBG-TBE/05/ROM/04/XII/2021	11 Maret 2021 s/d 11 Maret 2026	60	708.682.418,00	11.811.373,63	58	685.059.670,73	2	23.622.747,27
3	Dinas Perhubungan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk	Utilitas Penerangan Jalan Umum	Kota Denpasar	551.11/2001/LPJU/Dishub/VIII/2023 161/BTS-PEMKOT DENPASAR/VIII/2023	07 Agustus 2025 s/d 07 Agustus 2026	12	142.370.885,00	11.864.240,42	5	59.321.202,08	7	83.049.682,92
4	Dinas Perhubungan	PT.ISTANA KOHINOR	Utilitas Penerangan Jalan Umum	Kota Denpasar	551.11/2002/LPJU/DISHUB/VIII/2023 LGL-BAL-BAL-0004-Y-P/RNW-I/AMD-I	13 Juni 2025 s/d 13 Juni 2026	12	6.182.115,00	515.176,25	7	3.606.233,75	5	2.575.881,25
5	Dinas Perhubungan	PT. TOWER BERSAMA	Utilitas Penerangan Jalan Umum	Kota Denpasar	551.11/ 2076 /LPJU /Dishub/VIII/2023 387/TBG-TBE-00/PRJ/VIII/2023	23 Agustus 2025 s/d 22 Agustus 2026	12	6.192.995,00	516.082,92	5	2.580.414,58	7	3.612.580,42
Total Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD (Lain-Lain PAD yang Sah)													186.473.075,19
1	Dinas Perhubungan	PT. TOWER BERSAMA	Utilitas Penerangan Jalan Umum	Kota Denpasar	100.3.3/2389/DISHUB	07 Juli 2025 s/d 07 Juli 2026	12	279.441.755,00	23.286.812,92	6	139.720.877,50	6	139.720.877,50
Total Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD (Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah)													139.720.877,50
TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - SEWA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (UTILITAS LPJU)													326.193.952,69



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - PAJAK REKLAME
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame	3	11.0001589.01	PT. Indo Dialektika Madani	Jl. Teuku Umar No. 140 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat	55.195,47
2	Reklame	3	11.0001590.01	CV. Beruang Mas Putra	Cv. Pelangi Nusantara, Jl. Seroja No, 72A, Denpasar	381.539,58
3	Reklame	1	11.0001592.01	PT Atika Kencana Mandiri	Jalan Tukad Yeh Aya No.143 B Denpasar kota Denpasar-Bali	10.047,95
4	Reklame	1	11.0001591.01	PT. Europe Baliservice	Jl. Danau Toba No 1	7.535,96
5	Reklame	1	11.0001593.01	Yayasan Sinar Harapan Mulia	Jalan Waribang No 28, Keldesa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali	7.751,13
6	Reklame	3	11.0001536.01	PT. Expo Pariwisata Utama	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 60 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara	71.915,24
7	Reklame	2	11.0713.01	PT. Bank Bumi Arta, Tbk. Cabang Denpasar	Jl. Raya Puputan No. 1, Desa Dangin Puri Klod, Denpasar Timur	285.057,71
8	Reklame	4	11.0000816.01	PT. Richeese Kuliner Indonesia	Jl Raya Sesetan No 12	370.021,31
9	Reklame	4	11.0629.01	PT. Richeese Kuliner Indonesia	Jl. Gatot Subroto No. 449, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	7.740.067,49
10	Reklame	1	11.0001508.01	PT. Blue Ocean Heart	Mutiara Cell Tukad Yeh Aya Jl. Tukad Yeh Aya No.148, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80239	5.023,97
11	Reklame	2	11.0754.01	PT. Astra International Tbk, Cabang Denpasar	Jl. Hos Cokroaminoto No. 81, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	461.359,82
12	Reklame	2	11.0001594.01	Agus Perwira Dwi Adnyana Yoga (Perseorangan)	Jl Tukad Yeh Aya No 31 Renon, Denpasar	124.861,66
13	Reklame	1	11.0001348.01	PT Asuransi Bri Life	Jl Setia Budi No 12 Pemecutan Kaja Denpasar Utara	67.684,93
14	Reklame	3	11.0001457.01	PT Ardaya	Jl. Teuku Umar No.241, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar. Kota Denpasar, Bali 80113	163.712,95
15	Reklame	5	11.0001517.01	PT Supra Primatama Nusantara	Komplek Pertokoan Graha Mahkota, Jl. Teuku Umar No.208 - 210	23.829.603,97
16	Reklame	24	11.0000897.01	PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa	Jl. Lbc. Sunset No.2	8.197.528,88
17	Reklame	5	11.0001561.02	PT Nipsea Paint And Chemicals	Jalan Raya Cargo No. 888 Ubung Denpasar	1.424.515,06
18	Reklame	18	11.0001596.01	PT. Indo Dialektika Madani	Jl. Pulau Yapen No. 14 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat	4.747.944,61
19	Reklame	1	11.0001600.01	Famili Mm	Tokom Family Mm	33.493,15
20	Reklame	2	11.0001328.01	PT. Djingga Media Teknokreatif	Jl. Suli No 108 C	6.166,85
21	Reklame	1	11.0001356.01	PT Bank Ibk Indonesia, Tbk	Jalan Raya Puputan No 9 Denpasar	460.257,58
22	Reklame	11	11.0001599.01	PT. Wook Global Technology	Jl. Nangka Utara, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	7.136.396,92
23	Reklame	3	11.0703.01	PT. Bank Ocbc Nisp, Tbk. Cabang Denpasar	Jl. Buluh Indah No. 101, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	4.133.336,53

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
24	Reklame	1	11.0682.01	PT. Estetika Prima Bali Utama	Jl. Raya Puputan No. 166, Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur	96.602,90
25	Reklame	6	11.0001533.01	Yan Murtanu (Perseorangan)	Jl. Pulau Moyo No. 54, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	3.301.080,82
26	Reklame	2	11.0797.01	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.	Jl. Udayana No. 1, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat	303.533,69
27	Reklame	4	11.0001434.01	PT. Bank Uob Indonesia	Jl. Gatot Subroto No. 100X, Kav. 10, Dangin Puri Kaja, Kota Denpasar	4.904.807,60
28	Reklame	1	11.0716.01	PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk.	Jl. Thamrin, Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat	407.314,29
29	Reklame	1	11.0356.01	PT. Prima Master Bank	Jl. Pb Sudirman No. 7X Ruko Blok D, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	743.186,13
30	Reklame	1	11.0001603.01	Perumda	Jl. Akasia No 2 Sumerta Denpasar Timur	81.505,62
31	Reklame	3	11.0001353.01	CV. Bali Jaya Swalayan	Jln. Teuku Umar No. 35X Denpasar Barat	531.108,76
32	Reklame	1	11.0001602.02	PT. Bank Hibank Indonesia	Ruko Mahendradatta Unit Sh-C, Jl. Mahendradatta Selatan, Desa Padangsambian Klod, Kec. Denpaasar Barat, Kota Denpasar, Bali	247.708,09
33	Reklame	1	11.0001066.01	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	Jl. Gatot Subroto No. 89D, Denpasar	18.252,74
34	Reklame	1	11.0001091.01	PT. Citra Batavia	Jl Imam Bonjol 508	671.209,00
35	Reklame	1	11.0001092.01	PT. Citra Batavia (B Hotel)	Jl. Imam Bonjol No.508	71.930,96
36	Reklame	3	11.0001606.02	Bdn. Jaba P Rahguslyani Budarsana, S.Tr.Keb (Perseorangan)	Jl. Gandapura Iii D No. 11, Keldesa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	37.594,80
37	Reklame	3	11.0001350.02	CV. Platinum Jaya Makmur	Jl. Cargo Permai No. 5X Ubung Kaja Kec Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80116	581.748,29
38	Reklame	4	11.0001155.02	CV Gng Promotion	Jl Kebo Iwa, Br Pagutan, Padang Sambian Kaja	2.696.696,72
39	Reklame	2	11.0001605.01	Rudi Hartono (Perseorangan)	Jl. Waturenggong Dauh Puri Klod, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	203.994,87
40	Reklame	4	11.0001125.01	Perorangan	Jl Surapati No 35	3.292.977,70
41	Reklame	1	11.0001597.01	PT. Abhaya Eka Astiti	Klinik Utama Sos Medika	49.364,38
42	Reklame	18	11.0000853.01	PT Sari Burger Indonesia	Jl Teuku Umar No1 Level 21	6.940.234,42
43	Reklame	1	11.0794.02	PT. Amindoway Jaya	Jl. Moh. Yamin 28, Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur	28.892,16
44	Reklame	2	11.0001062.01	PT. Damai Sejahtera Berlimpah	Jl. Cokoaminoto No. 47 A	3.709.134,25
45	Reklame	9	11.0001062.02	PT. Damai Sejahtera Berlimpah	Jl. Cokoaminoto No. 47 Pemecutan Kaja, Denpasar Barat	13.477.234,67
46	Reklame	1	11.0001346.01	PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk	Komplek Pertokoan Puri Bali Ayu, Jl. Patimura No. 32, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80235	127.849,32
47	Reklame	11	11.0001501.01	CV. Mitra Media Sejahtera	Jl. Diponegoro No. 99-A Dauh Puri Denpasar Barat	8.318.458,34
48	Reklame	4	11.0001610.01	Javier Ang (Perseorangan)	Jl. By Pass Ngurah Rai Suwung Kawuh No. 659	1.258.065,08
49	Reklame	1	11.0001351.01	CV Bali Bagus	Reklame Berada Di Atas Pintu Masuk Toko Roti Purimas 3 Cake Bakery Yang Beralamat Di Jl. Teuku Umar No. 246 Denpasar	124.089,04

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
50	Reklame	1	11.0661.02	CV. Karya Subur Furniture	Jl. Gatot Subroto Barat No. 492, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	634.687,50
51	Reklame	4	11.0001609.01	I Wayan Agus Setiawan (Perseorangan)	Warung Mina Renon	3.501.240,00
52	Reklame	6	11.0001377.01	PT Boga Makmur Mandiri	Yakiniku Likemall Living World Denpasar, Lt. Lower Ground, Unit No. Lg-17, Lg-17T, Lg-17A, Jl. Gatot Subroto Timurkel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	1.974.420,61
53	Reklame	1	11.0001036.01	PT.Ruang Raya Indonesia	Jl.Mahendradata No 4A	230.805,62
54	Reklame	1	11.0001582.01	Stephanus Hartanto / CV. Neo Platinum (Perseorangan)	Jl. Diponegoro No. 99-A Dauh Puri Denpasar Barat	1.159.246,58
55	Reklame	3	11.0001611.01	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	Trans Studio Mall Bali, Jl. Imam Bonjol No. 440 Lt. 1 Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar, Kota Denpasar	1.174.098,58
56	Reklame	1	11.0001366.01	PT Jaya Digital Properti	Jl Raya Puputan No 148 Renon, Denpasar Selatan	142.890,41
57	Reklame	1	11.0001365.01	PT Jaya Digital Properti	Jalan Raya Puputan No 148 Renon Denpasar Selatan	285.780,82
58	Reklame	2	11.0001379.01	PT Astra International Tbk	Jl. By Pass I Gst Ngurah Rai No. 395 Sanur, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	1.976.484,83
59	Reklame	1	11.0001378.01	PT Badan Astra International Tbk	Jl. By Pass I Gst Ngurah Rai No. 395 Sanur, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	253.873,97
60	Reklame	1	11.0001064.01	PT. Astina Persada	Jl Kusumasari No 1	33.395,01
61	Reklame	2	11.0001063.01	PT Astina Persada	Jl. Kusumasari No 1	254.950,17
62	Reklame	1	11.0001056.01	PT. Catur Mitra Sejati Sentosa	Jl. Gatot Subroto Barat No 405	2.320.811,70
63	Reklame	1	11.0001614.01	PT Dior Linen Sentosa	Jl. Mahendradatta Selatan, Keldesa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali	89.494,52
64	Reklame	6	11.0001612.01	Pusat Gadai Gufron	Pusat Gadai Jl. Waturenggong No 129 Panjer ,	3.087.472,18
65	Reklame	2	11.0001256.01	CV. Sinar Gemilang Lestari	Ple Susu Asli Enaaak Cv. Sinar Gemilang Lestari, Jl. Nangka Selatan No. 163 Denpasar	3.345.965,76
66	Reklame	2	11.0001617.01	PT. Dentologi Sukses Gemilang	Jalan Teuku Umar Barat No. 170 A Rt. 000 Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Bali.	537.293,84
67	Reklame	9	11.0001088.01	PT. Tiga Dua Delapan	Living World Denpasarjl. Gatot Subroto Timur, Br. Oongan, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali	7.670.014,26
68	Reklame	1	11.0001469.01	PT Tiga Dua Delapan	Jl. Gatot Subroto Timur No 173, Tonja, Denpasar Timur	2.361.569,33
69	Reklame	1	11.0001613.01	CV Karya Teknik Indonesia	Jl. Gatot Subroto Timur, No. 279 Kesiman Kertalangu, Denpasar Utara	376.027,40
70	Reklame	1	11.0001391.01	Bank Mega Syariah Kc Denpasar	Jln. Gatot Subroto Tengah No 89 D Dangin Puri Kaja Denpasar Utara	431.491,44
71	Reklame	1	11.0782.01	PT. Bank Victoria International, Tbk.	Jl. Imam Bonjol No.117, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat	205.120,88
72	Reklame	1	11.0001086.01	Perorangan	Jl. Nusa Kambangan No.28 B	795.797,26
73	Reklame	1	11.0001544.01	I Wayan Sumirta (Perseorangan)	Jl Cok Agung Tresna No 6	394.241,33
74	Reklame	2	11.0001620.01	I Putu Ariadi Darma Putra (Perseorangan)	Jl. Ahmad Yani No. 192 B Denpasar	173.047,81
75	Reklame	4	11.0001626.02	PT Maxxis International Indonesia	Jl Taman Pancing No 72 A	2.614.724,39
76	Reklame	2	11.0001615.01	Dr. Anak Agung Gd Putra Dananjaya, M.Biomed, Sp.B (Perseorangan)	Jl. Buana Raya No. 22 C, Keldesa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali	275.481,17
77	Reklame	3	11.0001624.01	I Made Tony Hermawan (Perseorangan)	Jl Antasura No 34 Peguyangan Kangin Denpasar Utara	546.742,37

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
78	Reklame	1	11.0001623.01	PT. Cobra Dental Indonesia	Jl. Tukad Yeh Aye No 89	131.531,75
79	Reklame	1	11.0000989.01	PT. Unggul Sukses Makmur	Komplek Lihur Artha Kencana Blok A5, Jl. Diponogoro No. 176-178, Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat	648.346,44
80	Reklame	1	11.0000825.02	PT. Satya Langgeng Santosa	Jl Cokroaminoto No 160	4.226.849,41
81	Reklame	1	11.0001618.01	PT. Bank Cimb Niaga, Tbk.	Ji. Mh. Thamrin No. 77, Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar	12.290.104,11
82	Reklame	5	11.0001625.01	Gde Suardiana (Perseorangan)	Jalan Tukad Barito No.35D Panjer, Denpasar Selatan, Denpasar	1.187.559,72
83	Reklame	2	11.0667.01	PT. Bank Keb Hana Indonesia	Jl. Teuku Umar No. 169, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	1.144.001,37
84	Reklame	3	11.0001094.01	PT. Home Center Indonesia Retail	Jl Gatot Subroto Timur	817.775,46
85	Reklame	1	11.0001629.01	Baginda Zandy Bramantyo (Perseorangan)	Jl. Antasura No. 86 Peguyangan Kangin, Denpasar Utara	175.882,19
86	Reklame	1	11.0001633.01	Chandra Indrawati (Perseorangan)	Jln Cok Agung Tresna No. 85 Sumerta Kelod Denpasar Timur	131.609,59
87	Reklame	1	11.0001630.01	Moch Machrus (Perseorangan)	Jl. Nangka Utara, Tonja Denpasar	351.678,08
88	Reklame	15	11.0001302.01	CV Sinar Logam	Jl. Teuku Umar No. 8 Denpasar, Bali	22.092.896,29
89	Reklame	1	11.0001632.01	I Nyoman Arya (Perseorangan)	Jl. Seroja No. 49 Tonja Denpasar Utara	131.911,64
90	Reklame	1	11.0371.01	PT. Multindo Auto Finance	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 1A Pemecutan Kaja Denpasar Utara	1.928.664,15
91	Reklame	1	11.0784.02	PT. Kurnia Natakencana	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 599, Desa Pemogan, Denpasar Selatan	2.370.708,93
92	Reklame	7	11.0001604.01	PT. Badan Aldmic Coopn Digital	Jl. Hayam Wuruk 158, Panjer. Denpasar Selatan	152.882,86
93	Reklame	1	11.0001473.01	CV Kartika Acc Bali Tiga Puluh Empat	Jl Teuku Umar No.77 Kel. Dauh Puri Klod Kec. Denpasar Barat Kab. Denpasar Bali	9.643.835,62
94	Reklame	1	11.0001634.01	CV. Otto Prima Lestari	Jl. Buluh Indah No.46, Denpasar, Bali	243.719,01
95	Reklame	14	11.0000888.01	PT. Circleka Indonesia Utama	Jl. Diponegoro No. 181-183 Dauh Puri Kelod Denpasar Barat	15.198.611,64
96	Reklame	1	11.0001456.01	PT.Circleka Indonesia Utama	Jl. Surapati No. 9 Dangin Puri Denpasar Timur	352.602,74
97	Reklame	1	11.0001503.01	PT. Circleka Indonesia Utama	Jl. Surapati No.9, Keldesa Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur	125.630,14
98	Reklame	4	11.0001375.01	PT. Bank Permata, Tbk	Sesetan, Jl. Raya Sesetan No.B.12, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar	6.498.619,32
99	Reklame	5	11.0001345.01	PT. Bank Permata Tbk	Jl. Danau Tamblingan No. 36, Sanur, Denpasar Selatan - 80228	2.417.053,25
100	Reklame	2	11.0758.01	PT. Monex Investindo Futures	Jl. Teuku Umar No. 188, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	495.325,50
101	Reklame	2	11.0001049.01	Kaneshiro	Jl. Cokroaminoto No 48	1.530.356,30
102	Reklame	4	11.0001497.01	PT. Grha Hatten Duasatu	Jl. Danau Tamblingan No. 27, Sanur, Denpasar Selatan	8.339.624,49
103	Reklame	2	11.0001388.01	I Putu Edy Untung Pramana (Perseorangan)	Jl. Teuku Umar No. 155 A, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar, Bali-80113	614.709,99
104	Reklame	4	11.0001607.01	Yayasan Cahaya Tunas Indonesia Bali	Jalan Hayam Wuruk No. 242, Desakelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	770.705,95

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
105	Reklame	1	11.0000826.01	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	Jl Gatot Subroto No 312	569.806,03
106	Reklame	1	11.0561.01	PT. Puri Santrian	Jl. Cemara No. 35, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan	382.057,89
107	Reklame	2	11.0001068.01	PT. Laris Chandra	Pt Laris Chandra Jalan Gagtot Subroto Timur No 88 D Penatih	465.929,26
108	Reklame	2	11.0001635.01	Ni Made Surya Purnamawati (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito, No. 5C	135.462,78
109	Reklame	1	11.0000918.01	CV. Ananta Promosindo	Jl. Letda Tantular No. 6, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	518.326,03
110	Reklame	2	11.0001472.01	PT Suryamas Lumisindo Dwidaya	Jl. Tukad Yeh Aya No. 143B Renon Denpasar Selatan	510.058,35
111	Reklame	1	11.0756.01	PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 1 Blok A 17-20, Desa Dangin Puri Klod, Denpasar Timur	432.431,51
112	Reklame	3	11.0001128.01	PT. Bpr Partakencana Tohpati	Jl Gatot Subroto Timur No 49	1.228.037,66
113	Reklame	7	11.0000909.01	PT. Adikarya Pangan Freshindo	Jalan Tukad Yeh Aya 100Z, Panjer Denpasar Selatan	22.396.803,71
114	Reklame	1	11.0001622.01	Danian Aries Arbianta (Perseorangan)	Lapis Kukus Tugu Malang Jl. Nangka Utara No.236, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80234,	87.919,52
115	Reklame	1	11.0733.01	PT. Bank Mandiri Taspen Pos	Jl. Teuku Umar No. 123 Denpasar Barat	1.408.320,74
116	Reklame	1	11.0001123.01	Perorangan	Jl Teuku Umar No 8 A	466.273,97
117	Reklame	1	11.0795.01	PT. Bank Sahabat Sampoerna	Jl. Pb. Sudirman, Pertokoan Sudirman Agung, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan	623.265,45
118	Reklame	4	11.0001251.01	CV Waja Motor	Jl. Ahmad Yani No. 259, Keldesa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali	991.161,24
119	Reklame	2	11.0001395.01	Kin Liong (Perseorangan)	Jl. Teuku Umar No.187	917.977,01
120	Reklame	1	11.0001639.02	CV. Bali Nippon Edutama	Obkg, Pertokoan Agung Kavling No.8, Jl. Teuku Umar 200, Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar- Bali.	88.855,89
121	Reklame	1	11.0000833.01	Ksp Sahabat Mitra Sejati	Jl Pb Sudirman Pertokoan Sudirman Agung Blok A4	467.551,23
122	Reklame	5	11.0721.01	Mcd Cokroaminoto (Dibawah Pengelolaan PT. Rekso Nasional Food)	Jl. Cokroaminoto No. 464, Ubung Kaja, Denpasar Utara	2.810.669,15
123	Reklame	2	11.0001117.01	PT. Mahayana Asia Talenta	Jl. Tantular Barat	230.179,07
124	Reklame	1	11.0001394.01	CV. Agung Motor Centre	Jl. Cokroaminoto No.18, Denpasar Utara	954.566,14
125	Reklame	1	11.0000822.01	PT. Equity Finance Indonesia	Jl Diponegoro No 100	436.793,42
126	Reklame	2	11.0000854.01	PT. Bank Sinar Mas, Tbk	Jl Tantular No 8	1.048.213,97
127	Reklame	1	11.0001381.02	PT Electronic City Indonesia Tbk	Electronic City Ruko Teuku Umar Bali, Jl. Teuku Umar No.187, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113	12.224.315,07
128	Reklame	1	11.0001381.01	PT Electronic City Indonesia Tbk	Jl. Teuku Umar No.187, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	693.300,59
129	Reklame	7	11.0360.02	PT. Vista Media	Jl. Mahendradata, Desakel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat	63.082.914,75
130	Reklame	4	11.0607.01	PT. Damai Sejahtera Berlimpah	Jl. Imam Bonjol No 143	3.987.506,12
131	Reklame	4	11.0761.01	CV. Margo Budiono	Jl Imam Bonjol No. 386	1.847.107,72
132	Reklame	1	11.0001145.01	PT. Sari Rasa Nusa Timur	Jl. Gatot Subroto Timur No.173/177 Mall Living World	254.630,86
133	Reklame	2	11.0000843.01	PT. Internasional Lestari Utama	Jl. Diponegoro B1-B2 No. 100 Komp. Pert Diponegoro Megah Lt 1	819.739,72
134	Reklame	1	11.0001642.02	PT. Signify Commercial Indonesia	Jalan Tukad Barito, No.36 C	373.758,90

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
135	Reklame	3	11.0674.01	PT. Wahana Wirawan	Jl. Gatot Subroto Barat No. 416 Xx, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara	963.725,19
136	Reklame	4	11.0728.01	PT. Bank Oke Indonesia	Jl Teuku Umar No 173 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat Kota Denpasar	3.055.534,77
137	Reklame	3	11.0726.01	PT. Rekso Nasional Food	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 109, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan	2.480.680,91
138	Reklame	1	11.0001390.01	PT Sunlife Financial Indonesia	Jl Cok Agung Tresna,Sumerta,Denpasar Timur	1.304.345,19
139	Reklame	1	11.0001642.01	PT. Signify Commercial Indonesia	Jalan Tukad Barito, No. 24, Panjer, Denpasar , Bali	399.405,97
140	Reklame	1	11.0001400.01	PT. Sukses Pratama Jaya	Jl. Teuku Umar Komplek Graha Wankota Blok A No. 48	364.943,84
141	Reklame	2	11.0000881.01	PT Bank Of India Indonesia, Tbk	Jl.Diponegoro No.135-137 Blok 27 Denpasar Bali	886.860,76
142	Reklame	1	11.0000858.01	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jl Raya Diponegoro No 341	1.191.254,79
143	Reklame	3	11.0001467.01	PT.Kimia Farma Apotek	Jl. Teuku Umar No 246, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat	1.790.661,48
144	Reklame	4	11.0001044.01	PT. Dharmama Bali Putera	Kota Denpasar	151.688,22
145	Reklame	3	11.0001643.01	PT Global Retailindo Pratama	Jl. Waturenggong No. 172 C Dan 172 D	1.628.494,68
146	Reklame	2	11.0001644.01	Freddy Sulaeman (Perseorangan)	Jl. Tukad Batanghari Panjer Denpasar Selatan	985.951,99
147	Reklame	1	11.0001418.01	PT. Harum Indah Sari Tours & Travel	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 732, Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali- 80222	2.084.695,89
148	Reklame	1	11.0001188.01	PT. Axa Financial Indonesia	Jl.Raya Puputan No.46 C Dangin Puri Klod Denpasar Timur.	515.157,53
149	Reklame	3	11.0001428.02	Ervana Nurmelia Ramdhani Firmansyah (Perseorangan)	Kota Denpasar	2.960.113,32
150	Reklame	2	11.0001069.02	PT. Gajah Tunggal Tbk	Kota Denpasar	279.303,68
151	Reklame	3	11.0001181.01	PT Toko Hero Bali Nusa	Kota Denpasar	2.005.075,48
152	Reklame	3	11.0001155.01	CV Gng Promotion	Jl Teuku Umar No 155	2.160.175,88
153	Reklame	1	11.0000925.01	PT. Bank Perkreditan Rakyat Sandi Raya Utama	Jl. Gatot Subroto Barat No. 327 Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	345.475,32
154	Reklame	2	11.0001645.01	PT. Sensatia Botanicals	Jl. Padang Galak No.11, Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237 Sensatia - Sales Marketing Office Distribution Center Httpsmaps.App.Goo.Glu1Snqeehuk6Idbac6	240.550,57
155	Reklame	1	11.0000836.01	PT. Yakult Indonesia Persada	Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar Selatan, Bali, 802228	333.167,28
156	Reklame	7	11.0001118.01	PT. Yakult Indonesia Persada	Pt Yakult Indonesia Persada, Jl By Pass Ngurah Rai No.546 Sanur	4.483.163,83
157	Reklame	1	11.0001190.01	PT. Jinom Network Indonesia	Jl. Wr Supratman No.311	572.534,52
158	Reklame	1	11.0001651.01	I Made Adisapoetra (Perseorangan)	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 385	962.630,14
159	Reklame	4	11.0001120.01	PT Boga Makmur Dinasti	Jl. Gatot Subroto Timur No.173/177 Mall Living World	3.682.608,48
160	Reklame	1	11.0001397.01	PT. Boga Makmur Dinasti	Trans Studio Mall Bali, Unit No. Gf-03, Lantai Dasar, Jl. Imam Bonjol No. 440., Kel. Pemecutan Kelod, Denpasar Barat	328.201,52
161	Reklame	2	11.0001650.01	Dave Anthony Chandra (Perseorangan)	Jalan Merdeka No. 49, Desakelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	428.712,32
162	Reklame	7	11.0563.01	PT. Sarimelati Kencana	Jl. By Pass Ngr Rai No. 15, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan	7.651.450,08

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
163	Reklame	5	11.0001636.01	I Wayan Olog (Perseorangan)	Jl. Teuku Umar Barat, Keldes Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali	1.935.015,90
164	Reklame	1	11.0001648.01	PT Berkat Langgeng Sekawan	Jl. Danau Poso No.100	428.712,33
165	Reklame	12	11.0000838.01	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Jl. Segina 3B No.7 Kertapura Pekandelan Pemecutan Klod Dnpasar Barat	7.607.529,44
166	Reklame	3	11.0001149.01	PT. Asuransi Central Asia	JI Cokroaminoto No 32 D-E	2.453.515,65
167	Reklame	2	11.0001652.01	CV Iwaka Darma Jaya	Jl. Antasura Peguyangan Kangin Denpasar Utara	1.051.490,11
168	Reklame	1	11.0001101.01	PT. Bank Permata, Tbk	JI.Dewi Sartika No.88	2.155.765,07
169	Reklame	3	11.0000847.01	PT.Exertainment Indonesia	Jl. Teuku Umar No 1 Level 21	2.018.076,55
170	Reklame	1	11.0001404.01	PT. Riadimix	Jl.Raya Sesetan,Denpasar Selatan	4.127.276,71
171	Reklame	10	11.0001054.01	PT. Jco Donut & Coffee	Jl. Wr Supratman, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237	4.796.966,36
172	Reklame	1	11.0001412.01	PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	JI Diponegoro No 57	705.910,68
173	Reklame	1	11.0597.02	PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	JI. Diponegoro No. 57, Denpasar	947.589,04
174	Reklame	2	11.0001649.01	PT Pura Pura Ponsel	Jl. Subur No.4, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	1.632.322,28
175	Reklame	2	11.0000820.01	PT. Fast Retailing Indonesia	Icon Bali Mall	569.974,10
176	Reklame	1	11.0001657.01	PT. Fast Retailing Indonesia	Icon Bali Mall	290.963,47
177	Reklame	1	11.0000844.01	PT. Classic Fine Foods Indonesia	Pt. Classic Fine Foods Indonesia	98.619,66
178	Reklame	1	11.0001136.01	PT. Kawan Lama Solusi	Jl. Gatot Subroto Barat No 380	936.590,42
179	Reklame	1	11.0001132.01	PT. Asuransi Raksa Pratikara	JI Tantular Barat No 6	782.183,90
180	Reklame	4	11.0001656.01	PT Warna Abadi Mitra Bersama	Jalan Imam Bonjol No 350 Pemecutan Kelod Denpasar Barat	11.686.985,96
181	Reklame	2	11.0001659.01	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Jl. Cokroaminoto St Kel No.140, Ubung, Denpasar Barat	3.031.391,96
182	Reklame	3	11.0001654.02	PT Damai Sejahtera Berlimpah	Jl. Imam Bonjol 264 Pemecutan Klod Denpasar	10.553.926,76
183	Reklame	1	11.0001658.01	I Made Artana (Perseorangan)	Jl. Antasura No. 89, Penguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Denpasar	247.849,32
184	Reklame	2	11.0001662.01	I Wayan Sanjaya (Perseorangan)	Jl. Hang Tuah, Gang Dewi Bunga Sanur Kaja Denpasar Selatan	370.027,83
185	Reklame	1	11.0001663.01	Ratna Dewi Katarina Panudiana Kuhn (Perseorangan)	Jl. Danau Tamblingan No. 75 Sanur Denpasar Selatan	67.424,44
186	Reklame	1	11.0001087.01	CV. Plastik Indah	Jl. Kartini No. 114, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar	271.780,71
187	Reklame	2	11.0001672.01	PT. Pomodoro Indonesia	Jl. Gatot Subroto Barat No. 371 Pemecutan Kaja Denpasar Utara	977.319,86
188	Reklame	1	11.0001669.01	PT. Gading Dewata Properti	Jl. Gatot Subroto Barat 371	521.287,89
189	Reklame	2	11.0001140.01	PT. Naavagreen Indonesia	JI Melati No 37	2.294.613,08
190	Reklame	1	11.0001396.01	PT Pesona Natasha Gemilang	JI Melati No 37 Dangin Puri Kangin Denpasar Utara	868.623,29
191	Reklame	1	11.0001661.01	PT. Bintang Dewata Gas	Agen Lpg Pt. Bintang Dewata Gas	66.935,74
192	Reklame	1	11.0001660.01	PT Bintang Dewata Gas	Gudangkantor Agen Lpg 3 Kg Pt. Bintang Dewata Gas	85.126,98
193	Reklame	1	11.0001170.01	PT. Toys Games Indonesia	Jl. Gatot Subroto Timur No.173/177 Mall Living World	582.970,32
194	Reklame	2	11.0001670.01	CV. Gerihadi Sarana	Jl. Nuansa Indah No.2, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	3.056.082,74
195	Reklame	2	11.0001671.01	CV. Karya Anyar	JI Gunung Salak	2.024.493,70
196	Reklame	1	11.0001666.01	CV. Jaya Abadi	JI Raya Pemogan 88	867.472,60

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
197	Reklame	1	11.0001667.01	CV Jaya Abadi	Jl. Raya Pemogan 88	1.078.144,72
198	Reklame	2	11.0001668.01	CV Sejahtera Bersama	Jl. Kebo Iwa Utara	2.443.911,66
199	Reklame	1	11.0001263.01	CV. Ayu Mart	Jl. Gunung Soputan	867.472,60
200	Reklame	1	11.0001665.01	CV Ayu Mart	Jl. Gunung Soputan	1.078.144,72
201	Reklame	65	11.0000873.01	PT. Indomarco Prismatama	Jl. By Pass Ngurah Rai 269	92.142.147,00
202	Reklame	1	11.0001676.01	Yusena Kusmawan (Perseorangan)	Jl. Antasura No.100, Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	419.501,71
203	Reklame	2	11.0001507.01	PT. Mitra Internasional Indonesia	Jl. Teuku Umar No.73, Dauh Puri Klod, Kota Denpasar, Bali	863.453,14
204	Reklame	3	11.0001173.01	CV Nadhira Bali	Jl. Nangka Utara No 315	2.256.164,39
205	Reklame	1	11.0001177.01	CV.Nadhira Bali	Jl. Kartini No 128 D	813.159,25
206	Reklame	2	11.0001678.02	PT Bintang Internasional	Jl. Gatot Subroto Tim. No.250, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80234	3.610.803,09
207	Reklame	2	11.0001680.01	Aesculapius Medika Bali	Jl. Teuku Umar No.7, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 Aesculapius Medika Bali Samping Bank Sinaya Btpn Kcp Teuku Umar	3.756.513,70
208	Reklame	3	11.0001674.01	PT. Dekoruma Niaga Sejahtera	Jl. Teuku Umar No. 12G Dauh Puri Klod Denpasar Barat	2.682.916,31
209	Reklame	2	11.0001684.01	PT. Bpr Sandi Raya Utama	Jl. Gatot Subroto Barat No. 327 Pemecutan Kaja, Denpasar	882.212,06
210	Reklame	1	11.0001683.01	Bank Permata ĐĐĐĐĐ	Jl. Danau Tamblingan No. 178 Sanur Denpasar Selatan	67.120,27
211	Reklame	2	11.0001679.01	I Putu Wawan Sutaryawan (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito No 36X, Dauh Puri Kelod, Denpasar Selatan	1.726.948,83
212	Reklame	1	11.0635.01	PT. Asuransi Jiwa Sequis Life	Jl. Raya Puputan No 83	1.198.587,56
213	Reklame	1	11.0001677.01	PT. Graha PradiPTa Pratama	Jl. Danau Tamblingan No.65, Sanur, Denpasar, Bali	36.916,15
214	Reklame	4	11.0001682.01	CV. Bali Stars	Jl. Tukad Batanghari No 42	3.791.901,08
215	Reklame	1	11.0001675.01	PT Dream Dare Discover	Jl. Tukad Barito No. 80 Panjer Denpasar Selatan	481.315,07
216	Reklame	2	11.0001616.01	Boby Tegar Halim (Perseorangan)	Jl. Tukad Yeh Aya No.41, Dauh Puri Klod, Kota Denpasar, Bali	134.616,82
217	Reklame	9	11.0001685.01	PT Mount Scopus Indonesia	Jalan Gatot Subroto Barat No.333, Pemecutan Kaja , Denpasar Utara, Kota Denpasar	14.771.545,94
218	Reklame	1	11.0001681.01	PT. Wahana Wirawan	Jl. Gatot Subroto Barat No. 416 Ubung Denpasar Utara	3.308.416,87
219	Reklame	1	11.0001109.01	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Komplek Rukan Dewata Square A21-A23 Jl. Letda Tantular No.1	445.592,47
220	Reklame	1	11.0000859.01	PT. Bpr Sentral Ekonomi Nusantara	Jl. Thamrin No. 23	647.848,08
221	Reklame	1	11.0001687.01	PT Vic Indonesia	Jl. Hayam Wuruk No. 242, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar	468.186,34
222	Reklame	1	11.0764.01	PT. Astra International, Tbk. (Auto 2000)	Jl. Cokroaminoto No. 81, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	2.392.448,49
223	Reklame	2	11.0001017.01	PT. Eka Boga Inti	Jl. Teuku Umar No. 52 Denpasar Barat	928.326,54

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
224	Reklame	6	11.0796.01	PT. Eka Bogainti	Jl. Mahendradatta Denpasar Barat	4.394.332,82
225	Reklame	6	11.0001060.01	PT. Eka Boganti	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 279 Denpasar	2.144.390,67
226	Reklame	1	11.0001664.01	PT. Samsonite Ritel Indonesia	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 80 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara	359.030,96
227	Reklame	1	11.0001690.01	PT. Mandiri Utama Finance	Jl. Gatot Subroto Timur No. 78 A-B Kesiman Kertalangu Denpasar Timur	842.544,25
228	Reklame	1	11.0804.01	PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk	Komplek Luhur Artha Kencana Blok A/5, Jl. Diponegoro No. 176-178, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	819.540,87
229	Reklame	3	11.0001696.01	I Komang Manik Sumardika (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur No. 32 Panjer Denpasar Selatan	1.787.194,52
230	Reklame	1	11.0001695.01	PT. Juta Berlian Culinary	Jl. Cok Agung Tresna No. 29, Kel. Danginpuri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali	702.476,21
231	Reklame	1	11.0001694.01	CV. Omega Perdana	Jl. Tukad Batanghari No. 54, Panjer, Renon	924.410,96
232	Reklame	1	11.0001698.01	PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Jl. Tukad Badung No.126 Renon Kota Denpasar, Bali	813.255,44
233	Reklame	2	11.0001167.01	PT. Michelin Indonesia	Jl.Cargo Permai No.47 Ubung Denpasar Utara	2.192.239,97
234	Reklame	2	11.0001406.02	PT Sentrum Promosi Indonesia	Jl. Dewi Sartika Kav.88, Denpasar, Bali	102.555.890,41
235	Reklame	2	11.0001688.01	CV. Pintu Rejeki Bersama	Jl Raya Puputan, No 142 , Sumerta Kelod, Denpasar Timur Bali	4.978.281,02
236	Reklame	2	11.0001703.01	PT. Elizabeth Hanjaya	Jalan Gatot Subroto Timur No 240 Tonja, Denpasar Utara	2.086.952,06
237	Reklame	2	11.0001646.01	Komang Apriana (Perseorangan)	Jalan Gunung Agung 140A, Denpasar Utara, Bali, 80116 Rumah Gadget	1.112.983,50
238	Reklame	1	11.0737.01	PT. Bank Victoria International Tbk	Jl. Imam Bonjol No. 117, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat	427.115,48
239	Reklame	1	11.0565.01	PT. Lotte Shopping Indonesia	Jl. By Pass Ngurah Rai 222X, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan	20.923.763,74
240	Reklame	7	11.0740.01	PT.Sari Melati Kencana	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 15, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan	9.155.593,06
241	Reklame	1	11.0000849.01	PT. Puri Boga Supra	Jalan Hayam Wuruk No 181, Sumerta Kelod, Denpasar Timur	1.384.664,72
242	Reklame	1	11.0001704.02	CV Nusantara Perkasa	Jalan Teukun Umar 146, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	118.301.797,95
243	Reklame	1	11.0001692.01	PT. Circle K Indonesia	Jl. Gatot Subroto No. 187 X Tonja Denpasar Utara	2.828.666,10
244	Reklame	1	11.0001693.01	PT Circle K Indonesia	Jl. Gatot Subroto Timur No. 187 X Tonja Denpasar Utara	1.476.563,58
245	Reklame	4	11.0000875.01	PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali	Jl. Gatot Subroto No 356	3.220.589,91
246	Reklame	4	11.0000842.01	PT. Bpr Lestari Bali	Jl. Teuku Umar No. 110	3.469.886,61
247	Reklame	3	11.0001303.01	PT. Jaya Digital Properti	Jl. Gatot Subroto Tim. No.252-246, Tonja, Kota Denpasar, Bali	5.369.106,97
248	Reklame	8	11.0001002.01	PT. Imperia Media Kreasi	Jl Gatot Subroto Barat No 466	9.164.087,63
249	Reklame	1	11.0000885.01	PT May Bank Indonesia Finance	Jl Gatot Subroto Tengah No.279	469.282,19

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
250	Reklame	1	11.0001286.01	PT. Samudra Estetika Perkasa	Jl. Gatot Subroto No 340	1.925.260,27
251	Reklame	1	11.0001700.01	I Gede Sumerta (Perseorangan)	Jalan Tukad Barito Barat No. 3 Dewata Store	198.279,45
252	Reklame	1	11.0574.01	PT. Astra Sedaya Finance	Jl. Gatot Subroto Barat No. 992, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara	392.746,15
253	Reklame	1	11.0001201.01	PT Mitra Pramita Medika	Jl. Diponogoro No 148	2.075.671,23
254	Reklame	2	11.0000889.01	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk	Jl.Thamrin No.33-35 Pemecutan Denpasar Barat	3.053.925,16
255	Reklame	6	11.0001236.01	PT. Bank Permata, Tbk	Jl. Danau Tamblingan No 136	1.825.138,78
256	Reklame	1	11.0001701.01	CV. Sinar Mulia Bali	Jl. Teuku Umar No 150 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat	1.383.780,82
257	Reklame	2	11.0001702.01	CV Sinar Mulia Bali	Jl. Teuku Umar No. 150 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat	3.140.138,96
258	Reklame	2	11.0001216.01	PT Internasional Budi Artha	Jl. Raya Sesetan No 99	1.706.224,65
259	Reklame	1	11.0001697.01	PT. Udayana Bali Ambassador	Jl. Tukad Barito No. 18E Panjer, Denpasar Selatan	757.782,53
260	Reklame	1	11.0001453.01	PT. Diagnos Laboratorium Utama, Tbk	Jl.Diponogoro,147 Dauh Puri Klod Denpasar Barat	842.301,37
261	Reklame	1	11.0000899.01	PT. Diagnos Laboratorium Utama	Jl.Diponogoro No.147 Dauh Puri Klod Denpasar Barat	842.301,37
262	Reklame	1	11.0000924.01	PT Tokohero Bali Nusa	Jl. Cokroaminoto No.1 Ubung	2.786.125,81
263	Reklame	1	11.0000923.01	PT. Tokohero Bali Nusa	Jl. Cokroaminoto No.1 Ubung	5.616.967,19
264	Reklame	1	11.0001712.01	CV. Ketut Bintang Ashiva	Jl. Patih Nambi Ubung Denpasar Utara	1.522.263,70
265	Reklame	1	11.0001713.01	CV Ketut Bintang Ashiva	Jl. Patih Nambi Ubung Denpasar Utara	2.029.684,93
266	Reklame	2	11.0763.02	PT. Ardaya	Jl. Mahendrata No. 100X, Denpasar Barat - Denpasar - Bali	5.504.434,93
267	Reklame	1	11.0001711.01	Heriawati (Perseorangan)	Jl. Mahendradatta No. 105, Desa Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	379.787,67
268	Reklame	2	11.0001037.01	PT Puri Niki	Jalan Gatot Subroto No.283, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	2.475.040,14
269	Reklame	1	11.0001709.02	PT. Petraco Prima Utama	Jl Cargo Permai No. 888X	23.416.780,82
270	Reklame	1	11.0001706.01	PT Trimedia Manual Indonesia	Jalan Raya Puputan No 120 Sumerta Klod Denpasar Timur	1.466.506,85
271	Reklame	2	11.0000887.01	PT. Sunindo Indah Hotel	Jl. Teuku Umar Barat No 183, Dauh Puri Kauh	1.755.239,77
272	Reklame	3	11.0364.01	PT. Sari Melati Kencana	Jl. Gatot Subroto Barat No. 12B, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	11.399.450,88
273	Reklame	5	11.0001156.01	PT. World Innovative Telecommunication	Jl. Corkoaminoto Ubung Kaja Denpasar Utara	4.270.669,10
274	Reklame	1	11.0001478.02	PT. Primalayan Citra Mandiri	Komplek Pertokoan Agung Raya, Jl. Teuku Umar No.200 Kav-15. Lt.2, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113	1.461.994,52
275	Reklame	2	11.0000934.01	PT. Bumi Mas Bali Mulia	Jalan Gatot Subroto Barat No 789 Padangsambian Kaja Denpasar Barat, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	1.959.253,15
276	Reklame	3	11.0000904.01	PT. Griya Miesejati	Level 21 Mall Lt Ug 53-54 Jl.Teuku Umar No.1 Denpasar Barat.	1.195.400,64

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
277	Reklame	2	11.0001313.01	PT. Matahari Departement Store Tbk	Duta Plaza Mall Matahari Department Store	4.519.256,95
278	Reklame	14	11.0000916.01	CV. Nadi Mart	Jl.Raya Sesetan No. 93, Sesetan Denpasar Selatan	12.746.374,65
279	Reklame	3	11.0001722.01	PT Foods Beverages Indonesia	Chatime Teuku Umar Jl.Teuku Umar No. 7-11, Desakelurahan Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos 80119	665.479,55
280	Reklame	5	11.0000896.01	PT Surya Dewata Abadi Citra Rasa	Gatot Subroto	2.960.884,85
281	Reklame	2	11.0001719.01	CV. Angkasa Office	Jl. Tukad Barito Timur No. 7Fpanjerdenpasar Selatan	1.215.877,36
282	Reklame	1	11.0000961.01	PT. Agung Mulia Perkasa	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 165 Sanur Denpasar Selatan	4.586.053,64
283	Reklame	1	11.0000943.01	PT. Aia Financial	Jl Melati No 69	1.569.839,18
284	Reklame	5	11.0001707.01	Dr. Ir. Bob Foster, M.M (Perseorangan)	Jl Melati No 57	12.252.536,04
285	Reklame	6	11.0001162.01	CV. Platinum Jaya Makmur	Jl Imam Bonjol No 339	10.514.393,65
286	Reklame	2	11.0001724.01	Angeline Aprilna (Perseorangan)	Gurita Playground Batanghari	745.574,57
287	Reklame	6	11.0000869.01	Kfc Sudirman	Jl. Pb. Sudirman No 50	3.370.070,59
288	Reklame	2	11.0000903.01	Kfc Gatot Subroto	Jl Gatot Subroto No 356	2.285.024,79
289	Reklame	1	11.0001474.01	PT. Bank Muamalat Indonesia	Jalan Teuku Umar No. 82 Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	505.521,67
290	Reklame	1	11.0001459.01	Bank Muamalat	Bank Muamalat Cabang Denpasar	1.737.246,58
291	Reklame	37	11.0699.01	PT. Fast Food Indonesia, Tbk	Jl Hasanudin No 59	39.505.676,57
292	Reklame	5	11.0000895.01	PT. J. Co Donuts & Coffee	Jl Gatot Subroto Tengah No 11-15	2.372.450,86
293	Reklame	1	11.0001233.01	PT. J.Co Donut & Coffee	Jl. Gatot Subroto Tengah No 11-15	420.398,63
294	Reklame	2	11.0001727.01	Kadek Okta Surya (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito, No. 16, Panjer - Denpasar	1.105.030,59
295	Reklame	1	11.0792.01	PT. Arthaasia Finance	Jl. Teuku Umar No. 208-210, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	1.668.857,14
296	Reklame	3	11.0001221.01	Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur	Jl Cok Agung Tresna	1.417.169,24
297	Reklame	2	11.0001723.01	CV. Murni Cahaya Nusantara	Jl Gunung Sanghyang No 132Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat	25.494.312,44
298	Reklame	1	11.0001730.01	Wiyono (Perseorangan)	Jl. Raya Puputan No.148, Sumerta Kelod, Renon, Denpasar Timur, Bali	1.631.958,90
299	Reklame	3	11.0001728.01	I Made Dwi Saputra (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur No. 32 Panjer Denpasar	1.185.849,12
300	Reklame	2	11.0001718.01	CV Hoki	Jl. Gatot Subroto No. 888 Pemecutan Kaja Denpasar Utara	3.268.832,62
301	Reklame	1	11.0000900.01	PT. Bank Perkreditan Rakyat Duta Bali	Jl. Raya Sesetan No.48	1.572.264,86
302	Reklame	2	11.0000851.01	PT. Warna Warni Media	Kota Denpasar	3.088.356,16
303	Reklame	1	11.0001721.01	PT. Global Retailindo Pratama	Jl. Wr Supratman No. 9 Dangin Puri Kangin Denpasar Timur	854.522,54
304	Reklame	2	11.0744.01	PT. Bursa Efek Indonesia	Jl Cok Agung Tresna No 163	2.305.988,02
305	Reklame	2	11.0001222.01	PT. Internasional Budi Angkasa	Jl Letda Made Putra	1.857.575,34
306	Reklame	1	11.0001732.01	Atmadjaya (Perseorangan)	Jl. Antasura	300.098,63
307	Reklame	1	11.0000883.01	Hotel Mutiara Indah	Thamrin No 63 A	154.016,88
308	Reklame	2	11.0001699.01	Alfamed Jaya Abadi	Apotek Alfamed, Jln Antasura No 80B., Peguyangan, Denpasar Utara, Kota Denpasar	831.969,87
309	Reklame	1	11.0001733.01	I Made Astu Darma (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito No 20 E Panjer Denpasar Selatan	844.027,70
310	Reklame	1	11.0001531.01	PT. Bali Gen	Jalan Danau Buyan Sanur	98.222.465,75
311	Reklame	1	11.0000939.01	PT. Bank Sinarmas Tbk	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 100 C - 100 D	1.370.619,86
312	Reklame	1	11.0000955.01	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jl. Hayam Wuruk No. 246 Sumerta Kelod Denpasar Timur	1.350.443,84

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
313	Reklame	1	11.0000898.01	PT. Estetika Medika Utama	Jl.Kapten Agung No.8 Dangin Puri Denpasar Timur	1.060.134,04
314	Reklame	1	11.0001735.01	CV. Happy Barito	Jl Tukad Barito Timur No 102	341.253,48
315	Reklame	1	11.0001736.01	CV, Happy Barito	Jl. Tukad Barito Timur No 102	1.645.016,10
316	Reklame	2	11.0001726.01	Dedy Gunawan (Perseorangan)	Jl. Antasura 33Y, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar	615.659,79
317	Reklame	1	11.0638.01	CV. Kenanga Jaya Bali	Jl. Gatot Subroto No. 390, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur	8.843.255,20
318	Reklame	1	11.0001739.01	I Gusti Agung Alit Kencana (Perseorangan)	Jl. Danau Tamblingan No. 166, Gang Taman Agung, Sanur, Denpasar Selatan, Denpasar	79.523,88
319	Reklame	4	11.0001737.01	PT Tata Bejana Indonesia	Jl. Raya Puputan No. 166 Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali	18.810.521,87
320	Reklame	3	11.0001421.01	Alat Bantu Dengar Indonesia	Alat Bantu Dengar Indonesia	1.245.144,53
321	Reklame	20	11.0001708.02	Haris Harun (Perseorangan)	Jl By Pass Ngurah Rai, Kesiman Kertalangu Denpasar Timur	25.171.273,96
322	Reklame	2	11.0001511.01	Tjiong Chandrawati (Perseorangan)	Jl. Teuku Umar No. 33 Denpasar Barat	1.270.276,05
323	Reklame	2	11.0001423.01	Sugeng Santoso (Perseorangan)	Jl. Mahendradata Denpasar, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat-80117	3.616.233,54
324	Reklame	1	11.0001743.02	CV Tujuh Tiara Utama	Jl. Tukad Barito No. 21 D Panjer Denpasar Selatan	585.292,81
325	Reklame	2	11.0000957.01	Koprasi Simpan Pinjam Jasa	Jl. Teuku Umar No.8 Dauh Puri Klod	2.360.511,99
326	Reklame	1	11.0001729.01	Pande Ketut Gede Karmawan (Perseorangan)	Jl. Dewi Madri X No. 27, Keldesa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	1.407.572,91
327	Reklame	2	11.0001392.02	PT Cerita Wajah Bercahaya	Jl. By Pass Ngurah Rai No 622	3.092.006,11
328	Reklame	1	11.0001746.01	Yorih Aprillianto (Perseorangan)	Jl. Antasura No. 90, Peguyungan Kangin, Denpasar Utara	390.195,21
329	Reklame	1	11.0001187.01	PT. Adikarya Pangan Freshindo	Jalan Cokroaminoto No. 467Z Ubung Kaja Denpasar Utara	3.186.832,19
330	Reklame	1	11.0001490.01	PT Axa Financial Indonesia	Jl. Pulau Mayo No. 17 E Banjar Ambengan Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar	1.318.792,64
331	Reklame	1	11.0001225.01	PT Mega Auto Finance	Jl. Cok Agung Tresna Pertokoan Alamanda Blok 2	887.424,66
332	Reklame	3	11.0001445.01	PT. Juragan Store Bali	Jl. Teuku Umar No. 229 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat	2.092.451,31
333	Reklame	5	11.0000837.01	PT. Dom Pizza Indonesia	Jl.By Pass Ngurah Rai No.86 Denpasar Selatan	3.779.054,43
334	Reklame	9	11.0001057.01	PT. Sari Coffee Indonesia	Jl. Kawasan Resort Pt. Btid Serangan	4.161.174,24
335	Reklame	4	11.0001058.01	PT. Sari Coffee Indonesia	Jl.Danau Tamblingan No.47 Sanur Denpasar Selatan	1.501.345,78
336	Reklame	4	11.0000942.01	PT. Casa Loka	Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar Selatan	6.183.770,54
337	Reklame	2	11.0001756.01	CV Dahlia Indonesia Gemilang	Jl.Badak Agung No.13 Denpasar	3.047.525,76
338	Reklame	3	11.0001753.01	PT Akari Ramen Indonesia	Akari Ramen Berlokasi Di Living World Mall Denpasar Menjadi Tenant.Beralamat Di Jl. Gatot Subroto Tim. No.2, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80235	713.092,35

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
339	Reklame	1	11.0001750.01	Ni Luh Sri Dewi Laksmi (Perseorangan)	Jl Tukad Barito Timur No 88A, Panjer	1.147.877,26
340	Reklame	8	11.0001423.02	Sugeng Santoso (Perseorangan)	Jl. Mahendradata Denpasar, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat-80117	10.814.306,32
341	Reklame	1	11.0001471.01	CV Jaya Keramik	Jl. Wr. Supratman No. 311, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur	3.504.575,34
342	Reklame	1	11.0001757.01	PT Bank Ina Perdana Tbk	Jl. Gatot Subroto No. 334 Tonja Denpasar Utara	1.948.005,46
343	Reklame	2	11.0001752.01	I Ketut Ranem (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur No 99 Panjer Denpasar Selatan	1.634.489,45
344	Reklame	5	11.0001106.01	PT. Sari Burger Indonesia	Jl. Gatot Subroto Barat	3.454.366,29
345	Reklame	1	11.0001748.01	Hendy Setiawan (Perseorangan)	Jalantukad Barito Timur No 88	1.291.361,92
346	Reklame	3	11.0001755.01	PT Sarimelati Kencana Tbk	Jl Diponegoro No 122 Dauh Puri Klod Denpasar Barat	4.474.726,03
347	Reklame	2	11.0001749.01	Abdul Qadir Jailani (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Panjer, Kec. Denpasar Barat	1.813.486,97
348	Reklame	2	11.0684.01	PT. Astra International, Tbk.	Jl. Cokroaminoto No. 52, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	13.847.371,72
349	Reklame	2	11.0738.01	PT. Astra International Tbk.	Jl. Cokroaminoto No. 52, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	1.325.656,97
350	Reklame	4	11.0001235.01	PT. Fast Retailing Indonesia	Jl. Gatot Subroto Timur Living World Denpasar	3.143.965,16
351	Reklame	1	11.0001608.01	PT Cgs International Sekuritas Indonesia	Cgsi Sekuritas Indonesia Jl. Teuku Umar Barat No. 341B, Padang Sambian, Denpasar Barat 80119	124.089,04
352	Reklame	1	11.0001758.01	PT. Karya Satria	Shinhan Indo Finance	894.945,21
353	Reklame	1	11.0001385.01	Klinik Pratama Raja Khayangan Bali	Jalan Raya Sesetan No 45 , Denpasar Selatan	962.630,14
354	Reklame	2	11.0001207.01	PT. Internasional Budi Harapan	Jl Letda Made Putra	1.349.394,66
355	Reklame	1	11.0000807.01	PT. Astra International Tbk Cabang Denpasar	Menara Astra, Lantai 58. 59, 60, 61, 62, 63, Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6. Jakarta Pusat 10220, Prop. Dki Jakarta	745.165,38
356	Reklame	1	11.0001761.01	Djuna Laujanto (Perseorangan)	Jl. Kalimutu, Pemecutan Klod, Denpasar Barat	173.661,82
357	Reklame	3	11.0001514.01	Fanny Irawati Sandra (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Blok 3, Panjer Denpasar Selatan Kota Denpasar	10.394.599,64
358	Reklame	2	11.0000969.01	PT. Chubb Life Insurance Indonesia	Jl. Raya Puputan Perkantoran Duta Wijaya No.7 Renon	2.910.136,19
359	Reklame	2	11.0001483.01	PT Komeda Coffee Indonesia	Jl. Raya Sesetan No. 789, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali-80223	2.693.484,25
360	Reklame	1	11.0576.01	PT. Megadepo Indonesia	Jl. Teuku Umar No. 388, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat	18.598.901,10
361	Reklame	3	11.0001751.01	Achmad (Perseorangan)	Jl. Tukad Petanu	1.151.148,94
362	Reklame	1	11.0001041.01	Perorangan	Toko Juwita	2.023.779,45
363	Reklame	1	11.0579.01	PT. Bali Surya Dewata	Jl. Teuku Umar No. 145, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	73.131.868,13
364	Reklame	3	11.0001745.01	PT Wiryamanta Sadina	Living World Denpasar, Jl. Gatot Subroto Tim. Lantai 2, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80235	1.235.362,81
365	Reklame	1	11.0001741.01	PT. Pohon Biru Jaya	Jl. Raya Puputan No.190 A, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80226	2.281.671,17

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
366	Reklame	2	11.0099.02	Infinity	Jl. Mahendradata Selatan No. 168, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat	9.892.180,64
367	Reklame	5	11.0000906.01	PT. Bpr Lestari Bali	Jl. By Pass Ngurah Rai No.101 X Sanur	5.176.873,63
368	Reklame	1	11.0000929.01	PT. Bank Index Selindo	Jl. Thambin No.41 A	1.057.577,40
369	Reklame	4	11.0000905.01	PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali	Jl. Diponogoro	3.504.575,34
370	Reklame	1	11.0001299.01	PT. Aia Financial	Jl. Teuku Umar No.19 Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat	1.079.198,63
371	Reklame	1	11.0000946.01	PT. Aia Financial	Jl Raya Puputan No 122 Abc Renon	7.550.750,79
372	Reklame	3	11.0001763.01	Aditya Fachresa, Sh (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	3.007.166,13
373	Reklame	1	11.0354.01	PT. Charoen Pok Phand Indonesia	Jl. Gatot Subroto No. 330 X Kesiman Petilan Denpasar Timur	1.988.245,25
374	Reklame	1	11.0001228.01	Hotel Kubu Alit	Perum Permata Gatot Subroto li No 3	409.493,84
375	Reklame	1	11.0696.01	PT. Bank Ocbc Nisp, Tbk.	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 328 A, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara	1.153.804,95
376	Reklame	1	11.0766.02	PT. Banoli Motor	Jl. Buluh Indah No.75 Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	13.491.642,86
377	Reklame	1	11.0000797.02	PT. Banoli Motor	Jl. Buluh Indah No.81	3.177.148,14
378	Reklame	1	11.0578.01	PT. Propan Raya Industrial Coating Chemicals	Jl. Gatot Subroto Barat No. 688, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara	3.571.425,00
379	Reklame	3	11.0001673.01	CV Boga Lestari	Amanda Brownies Denpasar, Jalan Gatot Subroto 345 Dauh Puri Kaja Kota Denpasar	4.178.110,68
380	Reklame	3	11.0000914.01	PT. Jakarta Setia Budi Internasional Tbk	Jl.Mertasari No.3 Sanur Kauh Denpasar Selatan	3.864.589,71
381	Reklame	4	11.0001022.01	Perorangan	Jl. Wr Supratman No. 287	1.762.555,22
382	Reklame	3	11.0001464.01	PT Eka Grafis Bali	Jl W.R. Supratman No 168, Kesiman, Denpasar Timur	2.788.623,29
383	Reklame	1	11.0001762.01	PT. Trimedia Manual Indonesia	Jalan Buluh Indah, Ruko Blok A No 194 X	1.428.507,85
384	Reklame	1	11.0001764.01	PT. Berkah Bersama Taraphone	Jl. Tukad Barito No. 9, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan	583.283,57
385	Reklame	1	11.0001466.01	PT. Bank Btpn Syariah	Jl. Gatot Subroto , Tonja Denpasar Timur	642.347,08
386	Reklame	4	11.0000870.01	PT. Fast Food Indonesia (Kfc), Sanur	Jl Hang Tuah	4.815.783,52
387	Reklame	1	11.0001765.01	PT Garasi Inti Grup	Jalan Tukad Badung No 106 A Renon Denpasar Selatan	313.949,71
388	Reklame	45	11.0001437.01	PT Surganya Motor Indonesia	Jl. Buana Raya, Padangsambian, Denpasar Barat, Denpasar, Bali	77.871.168,96
389	Reklame	1	11.0001725.01	Djaya Raya Utama	Jalan Nangka Selatan No. 173	958.374,25
390	Reklame	2	11.0001498.01	PT. Grha Hatten Duasatu	Jl. Danau Tamblingan No. 27, Sanur, Denpasar Selatan	10.178.303,19
391	Reklame	2	11.0001720.01	CV Selalu Suka Hebat	Jl. Cok Agung Tresna No.19, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	4.063.916,10
392	Reklame	1	11.0001768.01	Made Ngurah Ananda Dwita (Perseorangan)	Jl Raya Puputan 289 Sumerta Klod, Denpasar Timur	343.872,30
393	Reklame	4	11.0000983.01	PT. Elizabeth Hanjaya	Jl. Letda Made Putra Pertokoan Kartika Udayana Blok 30 A	4.689.376,24
394	Reklame	1	11.0001769.01	PT.Karma Artha Bhuana	9729Ph3, Jl. Bakung I, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali	2.072.897,26

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
395	Reklame	5	11.0798.01	PT. Bhakti Idola Tama	Jl. Hayam Wuruk No. 187 Sumerta Kelod, Denpasar Timur	5.307.658,53
396	Reklame	4	11.0798.02	PT. Bhakti Idola Tama	Jl. Gatot Subroto Timur 711 Kesiman Kertalangu Denpasar Timur	2.213.781,04
397	Reklame	2	11.0000938.02	PT. Catur Mitra Sejati Sentosa	Jl. Gatot Subroto Barat No 405	8.012.556,21
398	Reklame	2	11.0000938.01	PT. Catur Mitra Sejati Sentosa	Jl. By Pass Ngurah Rai No.840-842	10.956.498,29
399	Reklame	1	11.0001528.01	CV. Santrian Beach Cottages	Jl. Danau Tamblingan No. 47, Sanur Denpasar Selatan	483.976,03
400	Reklame	1	11.0001771.01	Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali	Jl. Terompong No.24 A	413.260,34
401	Reklame	3	11.0001772.01	Yus Adrian Arianito (Perseorangan)	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 336 Dauh Puri Kaja Denpasar Utara	1.816.606,97
402	Reklame	2	11.0001774.01	Yayasan Kesejahteraan Ukhuwwah Bali	Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan li Nomor 7, Banjar Monang-Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar	375.948,18
403	Reklame	2	11.0001777.01	Nanang Anggoro (Perseorangan)	Jl. Mahendradatta No. 678, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat	2.326.481,51
404	Reklame	1	11.0368.01	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Denpasar	2.075.671,23
405	Reklame	2	11.0001516.01	CV Eka Print	Jl Waturenggong No 64, Panjer, Denpasar Selatan	2.035.818,08
406	Reklame	1	11.0001542.01	PT. Bhakti Idola Tama	Jl. Suradipa No.104, Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	2.276.418,08
407	Reklame	2	11.0001781.01	Ida Ayu Adnyani Dewi (Perseorangan)	Jl. Tjok Agung Tresna No 37,Keldesa Dangin Puri Kelod,Kec.Denpasar Timur	2.559.129,66
408	Reklame	5	11.0001773.01	Didik Hermanto (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito No 7 D Panjer Denpasar Selatan	3.233.382,01
409	Reklame	4	11.0001773.02	Didik Hermanto (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito No 87 Denpasar	3.519.125,34
410	Reklame	3	11.0001786.01	CV Duta Anugerah Bangunan	Jl. Nakula No.11, Pemecutan Klod Denpasar Barat	4.558.886,72
411	Reklame	2	11.0001783.02	PT Rajabungsu Pilar Perkasa	Kota Denpasar	220.252,93
412	Reklame	1	11.0799.01	PT. Prodia Widyahusada, Tbk.	Jl. Puputan No. 56, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan	433.619,51
413	Reklame	1	11.0001784.02	PT Tri Media Sarana	Jl. Gatot Subroto Barat No. 340 Denpasar	19.957.589,04
414	Reklame	1	11.0001785.01	CV Eka Grafis	Jl. Gunung Rinjani , Blok - No. 4 Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar	900.965,75
415	Reklame	2	11.0001250.01	PT. Muda Mandiri Berjaya	Jl. Cokroaminoto No.61	3.132.308,03
416	Reklame	1	11.0001780.01	PT. Bank Smbc Indonesia Tbk	Jl. Teuku Umar No. 9, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	758.801,10
417	Reklame	1	11.0001775.01	PT. Bali Duta Cahay Lestari	Jl. Teuku Umar No. 135 Dauh Puri Kauh Denpasar Barat	4.804.690,07
418	Reklame	9	11.0000861.01	PT. Mitra Bali Sukses	Jl. Gatot Subroto No. 337	33.121.507,85
419	Reklame	1	11.0001384.01	Klinik Pratama Raja Khayangan	Jalan Raya Sesetan No 45 Denpasar Selatan	1.443.945,21
420	Reklame	1	11.0001787.01	Ida Ayu Manik Sumire (Perseorangan)	Mixue Nangka Utara	305.055,62
421	Reklame	1	11.0001738.01	PT. Mitra Amertha Sejahtera	Toko Bayu Jaya Abadi Jl. Antasura Peguyangan Kaja Denpasar Utara	545.234,79
422	Reklame	2	11.0001653.01	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	Jl. Teuku Umar No.93, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113	3.949.519,90
423	Reklame	2	11.0001255.01	CV Sinar Gemilang Lestari	Jl. Nangka No 163	577.757,23
424	Reklame	3	11.0801.01	PT. Bank Hsbc Indonesia	Jl Pb. Sudirman .Panjer.Denpasar Selatan	3.803.859,18
425	Reklame	7	11.0746.01	PT. Bank Dbs Indonesia	Jl. Teuku Umar No. 10 Blok A1-3 , Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	20.063.769,15

9

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
426	Reklame	1	11.0001532.01	PT. Rasa Coklat Indonesia	Icon Bali Mall Ground Floor Unit Gf-15, Jl. Danau Tamblingan No. 27, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	1.117.985,02
427	Reklame	2	11.0001788.01	Dr. Ni Nyoman Purniati (Perseorangan)	Jalan Tunjung Biru No.9, Kesiman Timur, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali	844.027,40
428	Reklame	10	11.0001488.02	PT. World Innovative Telecommunication	Jl. Gunung Agung No. 39D, Denpasar	20.813.443,14
429	Reklame	1	11.0001793.02	Teguh Purnomo (Perseorangan)	Jalan Setiabudi No 9 Denpasar Bali Warung Nasi Gonde Cik Swi	847.249,64
430	Reklame	1	11.0772.01	PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya	Jl. Pb. Sudirman No. 10, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	2.188.503,00
431	Reklame	4	11.0001790.01	Wayan Prema Pawitra (Perseorangan)	Jl. Nangka Utara No. 294, Tonja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali	3.154.423,72
432	Reklame	10	11.0001050.01	PT Indomarco Prismatama	Jl Sidakarya	9.682.384,46
433	Reklame	2	11.0001794.01	CV. Waribang Makmur Kencana	Jl. Waribang Br, Kedaton, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	5.011.664,25
434	Reklame	14	11.0001789.01	PT. Fore Kopi Indonesia Tbk	Jl. Raya Sesetan No.210, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80223	23.803.942,06
435	Reklame	1	11.0001650.02	Dave Anthony Chandra (Perseorangan)	Jalan Merdeka No. 49, Desakelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	1.085.178,48
436	Reklame	2	11.0001795.01	PT Dewata International Medika	Jalan Moh Yamin, Keldesa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali	5.427.203,42
437	Reklame	1	11.0001797.01	Paramitha Handayani Gumi (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur No. 07 Panjer Denpasar Selatan	677.633,42
438	Reklame	2	11.0001185.01	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Jl. Cok Agung Tresna No.15	1.489.264,04
439	Reklame	4	11.0001115.01	PT. Foods Beverages Indonesia	Jl. Gatot Subroto Timur No.173/177 Tonja	1.996.985,74
440	Reklame	2	11.0001095.01	PT.Pratama Sadya Sadana	Jl Imam Bonjol No 467,Pemecutan Kelod, Denpasar Barat	1.878.595,28
441	Reklame	3	11.0001806.01	PT Balimedika Farmasindo	Jalan Tukad Barito Timur No.7B, Panjer, Denpasar Selatan	2.215.571,92
442	Reklame	1	11.0001383.01	PT Trimedia Manual Indonesia	Jalan Raya Puputan Ii Kav. C1, Denpasar Timur, Bali	2.150.876,71
443	Reklame	2	11.0001804.01	CV. Pratama Kreasi Andayani	Jl. Tukad Nyali Lingk. Banjar Wirasana Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	5.088.279,85
444	Reklame	2	11.0001803.01	Paulus Chairy (Perseorangan)	Jl. Cargo Permai No.49, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80111	8.915.207,68
445	Reklame	2	11.0001805.01	CV. Berkas Sukacita Bersama	Jl. Raya Sesetan No. 232 Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	6.389.457,53
446	Reklame	1	11.0001802.01	Jimmi Mulyadi (Perseorangan)	Jl. Cargo Permai No.49, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80111	4.042.943,01
447	Reklame	2	11.0001807.01	I Made Agus Dwipayana (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur No 99, Renon, Denpasar Selatan Mahligai Bakery	1.227.688,90
448	Reklame	1	11.0774.01	CV. Viskom Pro	Jl. Gatot Subroto Timur No. 88 A, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur	1.380.748,01
449	Reklame	3	11.0001283.01	Perorangan	Jl. Nangka Utara No 229	1.765.561,34
450	Reklame	1	11.0000964.01	PT. Bpr. Hari Depan	Jl. Hayam Wuruk No. 242 Komplek Pertokoan Hayam Wuruk Orchid	730.433,22
451	Reklame	1	11.0001801.01	PT Pegadaian Syariah Ups Nangka	Pegadaian Syariah Ups Nangka No 85	1.202.739,04
452	Reklame	2	11.0001810.01	CV Oriana Eyewear	Jl Tukad Barito Timur No 7 Renon Denpasar	2.038.477,49

9

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
453	Reklame	2	11.0001512.01	PT Cokroaminoto Sari Motor	Jalan Cokroaminoto No 16862 Pemecutan Kaja Denpasar Utara	8.579.505,48
454	Reklame	7	11.0768.02	PT. Sarana Marga Persada	Gerbang Tol Bali Mandara	20.493.150,68
455	Reklame	1	11.0001811.01	PT Pande Agung Segara Dewata	Jl. Cargo Permai Ubung Denpasar Utara	2.671.298,63
456	Reklame	2	11.0000907.01	PT. Asuransi Wahana Tata	Jl Hayam Wuruk No 248	2.504.342,46
457	Reklame	8	11.0001800.02	PT. Tangkas CiPTa OPTimal	Jl. Cokroaminoto St. No. 298 Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali	6.760.911,35
458	Reklame	1	11.0001812.01	Krisna Rahayu (Perseorangan)	Jl. Gunung Mas No.12, Br. Tegal Buah, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat Bali	208.244,52
459	Reklame	2	11.0001220.01	Perorangan	Jl. Cargo Permai No 45 A	1.621.972,60
460	Reklame	3	11.0001813.02	PT. Rejeki Abadi Berjaya	Jl By Pass Ngurah Rai, Pemogan Denpasar Selatan	86.121.670,13
461	Reklame	1	11.0001814.02	PT Xing Yue Global Trade	Jl Cargo No 200A Ubung Kaja Denpasar Utara	3.384.246,58
462	Reklame	1	11.0001596.02	PT. Indo Dialektika Madani	Jl. Noja Saraswati Kesiman Petilan Denpasar Timur	364.076,14
463	Reklame	1	11.0001641.02	PT Indo Dialektika Madani	Jl. Ahmad Yani Utara No. 309 Peguyangan Denpasar Utara	404.844,36
464	Reklame	2	11.0001815.01	Theja Kustedja (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Barat No 21 B Panjer Denpasar Selatan	1.007.038,56
465	Reklame	1	11.0001817.01	PT. Narayana Bali Utama	Jl. Tukad Barito Timur, No. 18 Renon Denpasar Selatan	1.835.860,48
466	Reklame	1	11.0706.01	PT. Bangunan Ekspres Indonesia	Jl. Gatot Subroto Barat No. 20 E, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	3.369.977,68
467	Reklame	1	11.0000990.01	PT. Nusantara Surya Sakti	Jl Teuku Umar Barat Denpasar Barat	5.704.388,89
468	Reklame	1	11.0001006.01	CV. Agung Motor	Jl Gatot Subroto Barat No 394	1.760.192,88
469	Reklame	1	11.0000920.01	PT. Ruang Raya Indonesia	Jl. Melati No.67, Dangin Puri Kangin Denpasar Utara	1.393.181,51
470	Reklame	1	11.0001819.01	Made Ayu Srirahayu (Perseorangan)	Jl. Cokroaminoto No. 14 D Denpasar	356.530,79
471	Reklame	1	11.0769.01	PT. Astra International, Tbk.	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 395, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan	4.938.390,41
472	Reklame	1	11.0001818.01	G. Ayu Martha Winingsih (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Timur No. 57, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	3.035.224,11
473	Reklame	1	11.0793.01	PT. Seafood Inspection Laboratory	Jl. Bedugul No. 37 B Desa Sidakarya Denpasar Selatan	2.247.526,29
474	Reklame	1	11.0001290.01	PT. Eka Jaya Agung	Jl. Teuku Umar No. 1	2.280.418,15
475	Reklame	3	11.0001821.02	PT Sanur Mahardhika Medika	Jl. Antasura Ruko No. 1 Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Denpasar, Bali	2.540.522,46
476	Reklame	3	11.0001224.01	PT. Expo Pariwisata Utama	Jl. Teuku Umar No, 135	6.798.575,34
477	Reklame	2	11.0001465.01	I Ketut Ariada (Perseorangan)	Jl. Waturenggong No. 93, Brlink. Kaja, Panjer, Denpasar Selatan	1.987.410,08
478	Reklame	32	11.0001782.02	PT Karya Satria	Jl Raya Pemogan, Pemogan, Denpasar Selatan	17.880.714,21
479	Reklame	1	11.0568.02	PT. Warna Warni Media	Jl. Gatot Subroto Barat No 351	52.438.356,16
480	Reklame	1	11.0001823.01	PT Kemenangan Abadi Indonesia	Jl. Gatot Subroto Barat N0. 335, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar	1.328.607,12
481	Reklame	1	11.0001796.01	PT. Gree Electric Appliances Indonesia	Jl. Antasura No. 99, Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara	1.082.958,90
482	Reklame	2	11.0001799.01	CV Mitra Putera Panjer	Jln Tukad Pakerisanno. 56	4.521.575,54
483	Reklame	2	11.0001798.01	CV Kawanku Maju Sejahtera	Jl. Waturenggong No.139	4.521.575,54
484	Reklame	1	11.0001455.01	PT. Inti Idola Anugerah	Saybread, Jl. Hos Cokroaminoto No. 33, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar	424.993,86

9

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
485	Reklame	3	11.0001206.01	PT. Inti Idola Anugrah	Jl. Cokroaminoto No. 32	912.919,67
486	Reklame	1	11.0607.02	PT. Elok Manis	Jl. Gatot Subroto Timur 177 A, Tonja, Denpasar Utara-80239	1.903.398,42
487	Reklame	3	11.0001826.02	CV. Waja Motor	Jl. Hayam Wuruk No. 72C, Kelurahan Panjer	9.473.268,17
488	Reklame	2	11.0001825.01	Ni Komang Ari Darmayanti (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito No 12, Panjer, Denpasar	2.392.694,58
489	Reklame	1	11.0001791.01	PT Erha Clinic Indonesia	Jl. Raya Puputan No.58A, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234	3.579.780,82
490	Reklame	2	11.0001792.01	PT. Erha Clinic Indonesia	Jl. Raya Puputan No.58A, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234	8.790.518,69
491	Reklame	1	11.0001354.01	PT Asuransi Buana Independent	Jl. Gatot Subroto Barat No. 408, Ubung, Denpasar Utara, Bali - 80116	130.085,85
492	Reklame	4	11.0001827.01	PT. Samudra Sakti Utama	Jl. Tukad Barito Timur No 7G, Panjer, Denpasar Selatan, Denpasar	6.139.444,30
493	Reklame	4	11.0001822.02	CV. Sinar Logam	Jl. Teuku Umar No. 8 Denpasar, Bali	7.368.294,45
494	Reklame	1	11.0001824.01	PT Sensatia Botanicals	Jl. Padang Galak No.11, Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80237 Sensatia - Sales Marketing Office Distribution Center Httpsmaps.App.Goo.Glu1Snqeehuk6Idbac6	1.066.985,80
495	Reklame	2	11.0001548.01	PT Audy Mandiri Harapan Indah	Jalan Mahendradata Ruko Nomor 2A, Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar	1.246.324,21
496	Reklame	1	11.0001513.01	CV. Berkas Dps	Jl. Teuku Umar No.242	2.060.630,14
497	Reklame	1	11.0000866.01	PT. Mitra Dewata Sakti	Jl Gatot Subroto Tengah No 336	1.413.863,01
498	Reklame	1	11.0001832.02	PT.Citra Inti Antarnusa	Jl Gatot Subroto Timur No 99, Denpasar Timur	434.406,58
499	Reklame	2	11.0001484.01	PT Rodalink Indo Tama	Jl. Teuku Umar No.202, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114	1.480.578,90
500	Reklame	1	11.0001484.02	PT Rodalink Indo Tama	Jl. Teuku Umar No.202, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114	3.135.343,56
501	Reklame	3	11.0001202.01	Perorangan	Jl. Padma No 101	3.364.786,85
502	Reklame	2	11.0001830.01	Ni Nyoman Supadmika (Perseorangan)	Jl Hayam Wuruk No 220 Sumerta Kelod Denpasar Timur	1.626.913,27
503	Reklame	2	11.0001831.01	CV. Arumi Pangan Makmur	Jl. Kamboja No. 2A, Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Denpasar, Bali	5.788.722,15
504	Reklame	1	11.0001836.01	Pierre James Jr.Gunawan (Perseorangan)	Jl. Hayam Wuruk No. 244, Sumerta Kelod , Denpasar Timur Denpasar Bali	3.443.515,01
505	Reklame	2	11.0001833.01	PT Semua Karena Anugerah	Jl. Gatot Subroto Tim. No.89, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231	9.692.390,29
506	Reklame	2	11.0001837.01	CV. Nawasena Sari Utama	Jl. Tukad Bilok, Desakel. Renon,Kec. Denpasar Selatan	4.655.632,13
507	Reklame	1	11.0001839.02	Tri Media Sarana	Jl By Pass Ngurah Rai No 67 Pedungan	19.185.530,82
508	Reklame	3	11.0588.01	PT. Catur Mitra Sejati Sentosa	Jl. Gatot Subroto Barat No.405, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat	81.794.479,73
509	Reklame	1	11.0588.02	PT. Catur Mitra Sejati Sentosa	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 840-842, Desa Pamogan, Denpasar Selatan	35.802.884,62
510	Reklame	3	11.0001834.01	PT Bank Ganesha	Jl Raya Puputan, Pertokoan Duta Wijaya No 4-5, Renon , Denpasar Selatan	800.746,36

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
511	Reklame	2	11.0745.01	PT. Kharisma Perkasa Dewata	Jl. Gatot Subroto Barat No.496 Padangsambian Kaja Denpasar Barat	6.166.849,31
512	Reklame	1	11.0001122.01	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Jl. Raya Puputan No 122C	1.399.127,67
513	Reklame	3	11.0001031.01	PT. Mitra Dewata Sakti	Jl Teuku Umar No 104-110	7.582.818,08
514	Reklame	2	11.0001382.01	PT Karya Satria	Makmoer Stell	1.688.110,28
515	Reklame	2	11.0001205.01	PT. Ragam Karya Bersama	Mister Donut, Jl. Cokroaminoto No. 32, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar	547.349,14
516	Reklame	3	11.0001578.01	PT Tata Bejana Indonesia	Jl. Teuku Umar Barat No. 0 - 22 Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali	8.774.881,81
517	Reklame	2	11.0001581.01	PT Tata Bejana Indonesia	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 230, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali	13.128.365,67
518	Reklame	2	11.0001843.01	PT. Monang Sianipar Abadi	Jl. Hayam Wuruk No.238, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235	7.962.794,38
519	Reklame	1	11.0001567.01	PT, France Valege International (Fiori)	Fiori Jalan Gatoto Subroto Iv , Jalan Jala Suci	833.979,45
520	Reklame	1	11.0001840.02	PT. TjiPTo Pariwara Mandiri	Jl Gatot Subroto Barat, Padang Sambian Kaja ,Denpasar Barat	19.185.530,82
521	Reklame	1	11.0001844.01	PT. Vic Indonesia	Jl. Hayam Wuruk No. 242, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar	516.654,39
522	Reklame	1	11.0001552.01	Gani Wijaya (Perseorangan)	Jalan Nangka Selatan No 65 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara	1.184.486,30
523	Reklame	3	11.0001237.01	Perorangan	Jl Nangka Selatan No 166	2.012.250,95
524	Reklame	4	11.0576.02	PT. Megadepo Indonesia	Jl. Teuku Umar Barat No. 388, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat	47.427.197,80
525	Reklame	1	11.0583.02	PT. Sentrum Promosi Indonesia	Jl. Gatot Subroto Barat No 500, Padang Sambian Kaja	46.907.753,42
526	Reklame	2	11.0001324.01	CV. Suka Boga	Jl. Mahendradata No. 100 Tegal Harum Denpasar Barat	3.807.277,39
527	Reklame	1	11.0001557.01	PT OPTik Tunggal Sempurna	Optik Tunggal Living World Denpasar Lt. 1-22, Jl. Gatot Subroto Timur No. 173177, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali	818.776,48
528	Reklame	1	11.0001838.01	PT. Emas Mudiana Suwitri Abadi	Jl. Waturenggong No. 62	1.243.433,67
529	Reklame	12	11.0001846.02	CV Jaya Solutions	Jl Tukad Barito Timur, Renon, Denpasar Selatan	5.170.936,44
530	Reklame	1	11.0001496.01	Steven Eka Halim (Perseorangan)	Jl. Wr Supratman No. 178 Banjar Kusumajati Kesiman Denpasar Timur	481.315,07
531	Reklame	2	11.0001569.01	Yayasan Widya Rikma Nawasena	Jl Tukad Batanghari	5.094.308,22
532	Reklame	3	11.0001841.01	CV. Putra Jaya	Jl. Gatot Subroto Timur. No.99 Ab, Keldesa Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali	12.545.293,91
533	Reklame	4	11.0720.01	Mcd Gatot Subroto-Nangka (Dibawah Pengelolaan PT. Rekso Nasional Food)	Jl. Gatot Subroto No. 238, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara	4.344.755,20
534	Reklame	2	11.0001847.01	PT Padma Bahtera Medika	Jalan Hayam Wuruk No. 240, Denpasar - Bali	3.262.344,23
535	Reklame	1	11.0709.01	PT. Chandra Sakti Utama Leasing Cabang Denpasar	Csul Finance	810.809,55
536	Reklame	1	11.0001431.01	CV Gang Djangkrik Mesar	Jl. Gatot Subroto Barat No. 45, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Bali - 80117	975.424,64

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
537	Reklame	1	11.0001432.01	CV Gang Djangkrik Mesari	Jl. Gatot Subroto Barat No. 45, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Bali - 80117	685.310,15
538	Reklame	1	11.0001262.01	PT Coca Cola Distribution Indonesia	Jl Nangka 196	2.394.877,81
539	Reklame	1	11.0552.01	PT. Graha Sastra Loka	Jl.Gatot Subroto,Desa Padangsambian Kaja,Denpasar Barat	3.880.602,74
540	Reklame	1	11.0001848.02	PT. Trakindo Utama	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 31 Sanur Denpasar Selatan	1.934.660,96
541	Reklame	2	11.0001845.02	Kadek Arik Permana Putra (Perseorangan)	Jl. Tukad Barito Panjer Denpasar Barat	3.067.483,33
542	Reklame	3	11.0001829.01	PT Niaga Indoguna Yasa	Ruko, Jl. Teuku Umar Jl. Teuku Umar Barat, Padangsambian, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113	4.878.958,91
543	Reklame	4	11.0001828.01	PT Daya Indah Anugerah	Jalan Buluh Indah, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	7.411.674,48
544	Reklame	5	11.0601.01	PT. Rekso Nasional Food	Jl. Raya Seseetan, Kelurahan Seseetan, Denpasar Selatan	6.561.645,03
545	Reklame	1	11.0001779.01	PT. Bhinneka Life Indonesia	Jl. Cut Nyak Dien No.1, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali	1.013.586,84
546	Reklame	4	11.0000967.02	CV. Bali Stars	Denpasar	2.126.007,31
547	Reklame	2	11.0001311.01	PT. Timuraya Karunia Multi	Kota Denpasar	3.058.985,35
548	Reklame	2	11.0001574.02	PT. Pariwara Utama Rizal Insani	Jl Buluh Indah No 114,Pemecutan Kaja , Denpasar Utara	9.296.095,89
549	Reklame	3	11.0001574.01	PT. Pariwara Utama Rizal Insani	Jl. Tukad Yeh Aya No. 99 A Renon Denpasar Selatan	10.145.408,21
550	Reklame	2	11.0000796.01	PT. Pariwara Utama Rizal Insani	Jl Cargo Permai No 77 Ubung Kaja Denpasar Utara	7.280.363,44
551	Reklame	1	11.0000796.02	PT. Pariwara Utama Rizal Insani	Jl Cargo Permai No 77 Ubung Kaja Denpasar Utara	508.201,46
552	Reklame	4	11.0659.01	PT. Bank Mega, Tbk.	Jl. Teuku Umar No. 263, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	13.259.272,27
553	Reklame	2	11.0001211.01	Perorangan	Jl. Nangka Selatan No 156	2.001.288,40
554	Reklame	1	11.0001550.01	CV Aki	Aki Klinik	557.464,93
555	Reklame	2	11.0001849.02	PT Yadea Sukses Dewata	Jl Gatot Subroto Tengah No 334,Tonja,Denpasar Utara	10.021.619,14
556	Reklame	1	11.0001331.01	Warung Gosha	Jl. Tukad Gangga No 28	12.696,00
557	Reklame	1	11.0001337.01	CV. Goje Lestari	Jl. Gatot Subroto Barat No 99	17.414,77
558	Reklame	1	11.0001338.01	CV. Goemerot Jaya Lestari	Jl. Tukad Gangga No 8	5.023,97
559	Reklame	1	11.0001336.01	CV. Gosha Jaya Lestari	Jl. Gatot Subroto Barat No. 53 Padangsambian Kaja	2.529.724,32
560	Reklame	1	11.0001335.01	CV. Gosha Jaya Lestari	Jl. Gunung Catur li Padangsambian Kaja	693.308,22
561	Reklame	1	11.0001327.01	PT. Langgeng Makmur Kencana	Jl. Baja Taki Ili No 5	531.842,47
562	Reklame	1	11.0001850.03	Yayasan Naresy Indonesia	Ihms Culinary Jl Kebo Ireng No 7	103.600,00
563	Reklame	1	11.0001573.02	PT Nuansa Dharma CIPta	Jl. Gatot Subroto Barat No. 408 Denpasar Utara	5.820.904,11
564	Reklame	1	11.0662.01	PT. Nav Jaya Mandiri	Jl. Teuku Umar Blok A No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 Dan 17, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat	36.558.000,00
565	Reklame	2	11.0001767.03	PT Yamaha Indonesia Motor Mfg	Jl Diponegoro No. 57 Denpasar	3.942.400,00

NO.	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI/ JUMLAH TITIK REKLAME	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
566	Reklame	1	11.0377.02	CV. Gng Promotion	Jl Gatot Subroto Timur - Simpang Kenyeri Gatot Subroto	8.253.835,62
567	Reklame	2	11.0001853.01	Pers Robert And Partners	Robert And Partners, Jl. Hayam Wuruk No.206C Denpasar	616.577,39
568	Reklame	2	11.0001855.01	Dwita Herna Primayanti (Perseorangan)	Jalan Hayam Wuruk No. 214, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	1.510.330,07
569	Reklame	1	11.0001854.01	I Ketut Jaya Artawan (Perseorangan)	Jl. Hayam Wuruk No. 150 Sumerta Kelod Denpasar Timur	1.788.973,15
570	Reklame	1	11.0001852.01	PT Bpr Hari Depan	Jalan Hayam Wuruk No. 242 Denpasar	1.004.212,60
571	Reklame	2	11.0000841.01	PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk	Jl. Gatot Subroto Tengah No 288X Tonja Bank Maspion	2.188.761,74
572	Reklame	1	11.0001851.01	PT Bank Maspion Indonesia, Tbk	Jalan Gatot Subroto Tengah No 288 X Tonja Denpasar	1.342.417,81
573	Reklame	1	11.0001601.01	Ronny Febrianto Basuki (Perseorangan)	Jl. Gatot Subroto Barat, Padangsambian Kaja, Denpasar, Bali	116.568,49
574	Reklame	2	11.0001860.02	CV Najwa	Jl Wr Supratman No 114, Sumerta, Denpasar Timur, Denpasar	1.446.341,18
575	Reklame	2	11.0001857.02	Lesmana Putra/Jus Masa Lalu	Jl Hayam Wuruk No 142, Sumerta Kelod	3.372.824,50
576	Reklame	2	11.0001858.02	PT Elea Derma Sejahtera	Jl Raya Puputan No 150, Sumerta Kelod	2.475.330,41
577	Reklame	1	11.0000933.01	PT. Astra International Tbk	Jl. Gatot Subroto Timur No. 168 A	3.384.246,58
578	Reklame	2	11.0001856.01	PT. Sayang Indopet	Jl. Danau Toba, No. 7 Sanur Denpasar Selatan	1.214.446,51
579	Reklame	1	11.0001859.02	CV Gng Promotion	Pertigaan Jl Gunung Agung - Gunung Sanghyang	13.243.232,88
580	Reklame	1	11.0001862.02	Danang Setiadi / Smailing Dmc	Jl By Pass Ngurah Rai No 145, Sanur	2.737.479,45
581	Reklame	1	11.0001863.01	Sarita Simon (Perseorangan)	Jln. Hayam Wuruk No. 244, Desa Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur Denpasar Bali	365.745,21
TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - PAJAK REKLAME						2.823.616.031,91



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN UTANG BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	Utang Belanja Gaji Pokok PNS	Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Utang Belanja Tunjangan Beras PNS	Utang Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Utang Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Total
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	2.263.688,00	-	-	-	2.263.688,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	86.021.512,00	101.944.160,00	-	-	187.965.672,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.632.500,00	1.628.550,00	-	540.000,00	869.040,00	-	222,00	552.042,00	-	-	-	15.222.354,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	-	-	-	-	-	3.946.036,00	-	-	-	-	-	3.946.036,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.177.900,00	375.930,00	-	-	-	152.460,00	621,00	142.155,00	-	7.632,00	22.887,00	3.879.585,00
6	Kecamatan Denpasar Timur	14.355.100,00	1.982.610,00	-	555.000,00	869.040,00	150.744,00	66,00	675.709,00	-	465,00	1.394,00	18.590.128,00
7	Kecamatan Denpasar Selatan	15.384.800,00	1.846.176,00	720.000,00	-	869.040,00	-	548,00	718.024,00	-	11.264,00	33.824,00	19.583.676,00
TOTAL		44.550.300,00	5.833.266,00	720.000,00	1.095.000,00	2.607.120,00	4.249.240,00	1.457,00	90.373.130,00	101.944.160,00	19.361,00	58.105,00	251.451.139,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN UTANG TELEPON, UTANG AIR, UTANG LISTRIK DAN UTANG INTERNET
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Total
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	583.847,00	1.074.310,00	20.873.955,00		22.532.112,00
2	Dinas Kesehatan	13.958.824,00	39.657.300,00	226.123.766,00	9.674.370,00	289.414.260,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156.225,00	4.442.550,00	35.981.011,00		40.579.786,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	355.110,00	91.700,00	14.742.327,00		15.189.137,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	923.750,00	279.950,00	-		1.203.700,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	164.205,00	437.100,00	-		601.305,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	261.298,00	282.100,00	5.991.447,00		6.534.845,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	24.200,00	91.700,00	6.725.644,00		6.841.544,00
9	Dinas Sosial	734.365,00	958.860,00	19.414.187,00		21.107.412,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	596.226,00	257.800,00	7.005.194,00		7.859.220,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.017.308,00	285.100,00	3.465.549,00		4.767.957,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	714.055,00	3.070.000,00	72.629.513,00		76.413.568,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.598,00	91.700,00	7.630.961,00		7.759.259,00
15	Dinas Perhubungan	258.533,00	574.850,00	1.485.669.931,00		1.486.503.314,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	91.528,00		1.538.216,00		1.629.744,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	111.339,00	4.352.350,00			4.463.689,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.608.773,00	169.700,00	96.213.300,00		97.991.773,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	319.248,00	1.084.000,00	12.531.238,00		13.934.486,00
20	Dinas Kebudayaan	132.969,00	912.400,00	14.123.525,00		15.168.894,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	533.415,00	540.900,00	10.161.321,00		11.235.636,00
22	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	94.798,00	769.400,00	1.566.624,00		2.430.822,00
23	Dinas Pariwisata	512.600,00		45.038.118,00		45.550.718,00
24	Dinas Pertanian	486.429,00	576.640,00	22.609.454,00		23.672.523,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	475.421,00	131.700,00	4.116.178,00		4.723.299,00
26	Inspektorat	384.621,00	531.750,00	11.904.912,00		12.821.283,00
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.068.959,00	427.900,00	8.212.053,00		10.708.912,00
28	Badan Pendapatan Daerah	532.823,00	881.950,00	21.236.834,00		22.651.607,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.618.954,00	510.800,00	14.798.411,00		16.928.165,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	780.394,00	598.000,00	5.738.217,00		7.116.611,00
31	Sekretariat Daerah	8.928.262,00	9.690.800,00	94.378.116,00	9.417.900,00	122.415.078,00
32	Sekretariat DPRD	262.782,00	5.131.350,00	24.905.516,00		30.299.648,00
33	Kecamatan Denpasar Barat	2.327.062,00	1.809.850,00	10.738.826,00		14.875.738,00
34	Kecamatan Denpasar Timur	4.368.129,00	644.200,00	9.898.956,00		14.911.285,00
35	Kecamatan Denpasar Selatan	5.347.858,00	1.707.500,00	25.909.036,00	1.972.250,00	34.936.644,00
36	Kecamatan Denpasar Utara	1.890.564,00	683.800,00	17.573.888,00		20.148.252,00
						-
	TOTAL	52.661.472,00	82.750.010,00	2.359.446.224,00	21.064.520,00	2.515.922.226,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS PAJAK	KLASIFIKASI	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Air Tanah	Usaha Kebutuhan Primer Lainnya	8.0000035.01.04	PT. Catur Mitra Sejati Sentosa	Jl. Baja Taki No. 7	23.104,00
2	Air Tanah	Pondok Wisata dan Hotel Melati	8.0000139.01.09	Hotel Mawar II	Jl. Sutoyo No. 16	141.750,00
3	Air Tanah	Pondok Wisata dan Hotel Melati	8.0000191.01.08	Hotel City of Aventus Teuku Umar	Jl. Teuku Umar 74	8.317.440,00
4	Air Tanah	Perkantoran	8.0000238.02.06	Gedung Keuangan Negara II	Jl. Kapten Tantular No. 4	3.040,00
5	Air Tanah	Restoran I (Rumah Makan)	8.0000268.03.06	Rumah Makan Bundaran Renon	Jl. Raya Puputan 212	418.652,00
6	Air Tanah	Pertokoan	8.0000270.03.09	PT Arabikatama	Jl. By Pass Ngurah Rai 92 XX	92.612,00
7	Air Tanah	Pondok Wisata dan Hotel Melati	8.0000367.03.01	Hotel Sanur Agung	Jalan I Gusti Ngurah Rai 174	147.744,00
8	Air Tanah	Restoran II	8.0000449.03.03	Restoran Swastika I	Jl. Danau Tamblingan 46	91.200,00
9	Air Tanah	Pondok Wisata dan Hotel Melati	8.0000462.03.03	Simon Home Stay & Dona Home Stay	Jl. Danau Tamblingan No. 164	25.536,00
10	Air Tanah	Villa dengan Private Pool	8.0000483.03.03	The Zen Villa	Jl. Kesari Gg. II No.3 B	87.500,00
11	Air Tanah	Perkantoran	8.0000570.04.04	CV. Maharani Fresh Pasta	Jl. Jaya Pangus Gang Taman Baru	75.392,00
12	Air Tanah	Perkantoran	8.0000576.04.03	Pabrik Roti Vanesa	Jl. Astasura I/46	3.648,00
13	Air Tanah	Restoran I (Rumah Makan)	8.0000668.02.11	Rumah Makan Bali Utama	Jl. WR. Supratman 229	32.500,00
14	Air Tanah	Pondok Wisata dan Hotel Melati	8.0000812.02.02	Villa II	Jl. Sekar Gadung	109.440,00
15	Air Tanah	Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya	8.0001024.02.06	PT. Putra Husada Jaya Utama	Jl. Merdeka VII No.2 Br. Sebu	80.000,00
16	Air Tanah	Perkantoran	8.0001164.02.06	Gedung Keuangan Negara I	Jl. Dr. Kusuma Atmaja	92.720,00
17	Air Tanah	Perawatan Tubuh dan Kecantikan I	8.0001173.04.11	Natasha Skin Clinic Centre	Jl. Gatot Subroto No. 155 C	3.648,00
18	Air Tanah	Usaha Jasa Cuci Kendaraan	8.0001194.01.05	Gear Monkey Car Wash	Jl. Mahendradata No. 687	401.280,00
19	Air Tanah	Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya	8.0001197.03.08	Platinum Executive Club	Jl. Suwung Batan Kendal No. 20	22.344,00
20	Air Tanah	Pabrik Es dan Produsen Air Mineral	8.0001211.04.11	Nexa Water	Jl. Kecak No.11A	24.320,00
TOTAL UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH						10.193.870,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Perolehan Hak	NOP	Nomor Booking	Nama Pembeli / Penerima Hak	Luas (m2)		Harga Transaksi (Rp)	Tanggal Bayar	No Bayar	Nilai BPHTB (Rp)
					Tnh	Bgn				
1	Jual beli	517101000502500090	202104114372	INTANI PURNAMASARI	150	90	858.000.000,00	03/05/2021	12216362	39.900.000,00
2	Hibah	517103000803000450	202203783067	NI WAYAN EKA SUSANTI	120	75	-	24/10/2022	18189100	4.314.000,00
3	Hibah	517104000101104030	202210505220	I GEDE PUTRA MAHARDIKA, DKK	200	0	183.200.000,00	29/12/2022	19132058	6.160.000,00
4	Waris	517101000900800230	202306656446	I WAYAN DARSANA, DKK	1250	0	-	11/07/2023	21844299	6.113,00
5	Jual beli	517101000500300550	202312392762	I KETUT SUDARSANA	150	36	350.000.000,00	22/12/2023	4169875614	14.500.000,00
6	Jual beli	517102001500102470	202312379122	ARIE PRASETYA S. KUSUMAYANA	60	0	120.000.000,00	27/12/2023	4169887907	3.000.000,00
7	Waris	517104000601600240	202406006774	I GEDE AGUS SUARJANA	2470	0	-	01/07/2024	4171512642	14.366,00
8	Jual beli	517101000602701260	202408221673	ERMIN	59	50	513.150.000,00	22/08/2024	4172014739	21.657.500,00
9	Waris	517101000102500280	202410452870	I KETUT KESUMAJAYA, DKK	2750	0	-	12/06/2025	4174242959	37.942,00
10	Jual beli	517102000700202770	202511051663	I GUSTI AGUNG ANGGA PUTRA	60	0	250.000.000,00	29/12/2025	4176147347	8.500.000,00
11	Hibah	517103001103203600	202510984482	NI MADE SRIASIH,SE	100	0	264.000.000,00	14/11/2025	4175771146	9.200.000,00
12	Jual beli	517103001700902390	202510998876	I MADE MANUYAMA	59,5	60	250.000.000,00	24/12/2025	4176136726	10.146.125,00
13	Jual beli	517101000102306130	202511091158	YANTI	100	0	300.000.000,00	11/12/2025	4176003852	11.000.000,00

No	Jenis Perolehan Hak	NOP	Nomor Booking	Nama Pembeli / Penerima Hak	Luas (m2)		Harga Transaksi (Rp)	Tanggal Bayar	No Bayar	Nilai BPHTB (Rp)
					Tnh	Bgn				
14	Jual beli	517101000301302100	202512161682	I WAYAN WIRATA	100	55	330.000.000,00	18/12/2025	4176083221	12.500.000,00
15	Jual beli	517103001101104240	202512122245	DEDDY ARYAWAN	99	45	350.000.000,00	16/12/2025	4176053918	13.500.000,00
16	Pemisahan hak yang mengakibatkan	517101000300105320	202511048575	I NENGAH SUGAMIA, BSC	96,8	80	365.920.000,00	14/11/2025	4175776174	14.296.000,00
17	Jual beli	517104000600903250	202511017397	I NYOMAN SUKARATA	125	0	325.000.000,00	01/12/2025	4175878275	15.375.000,00
18	Jual beli	517101000300301280	202511064516	I GEDE SUARDIKA	171	0	455.000.000,00	17/12/2025	4176069773	18.750.000,00
19	Jual beli	517103000103403540	202508657503	BILLY DWIANTO PRASODJO	0	21,3	500.000.000,00	20/08/2025	4174942901	21.000.000,00
20	Jual beli	517101000101909530	202510893706	NI PUTU YANTI	100	70	500.000.000,00	27/10/2025	4175614676	21.000.000,00
21	Jual beli	517102001401900840	202505222518	I WAYAN SUKRIADA BERATA	150	192	400.000.000,00	10/06/2025	4174207376	22.998.300,00
22	Jual beli	517101000303105490	202512160727	I KETUT SANDRA	184	0	550.000.000,00	29/12/2025	4176148621	23.500.000,00
23	Jual beli	517101000300104940	202510912619	I MADE SUKANTA	141	75	550.100.000,00	15/12/2025	4176041898	23.505.000,00
24	Jual beli	517104000602403510	202506359407	I WAYAN SUBRATA	250	0	600.000.000,00	12/06/2025	4174232899	26.000.000,00
25	Jual beli	517104000401600780	202508632087	I PUTU BAGUS DIVA AISWARYA	135	59	610.000.000,00	23/09/2025	4175304625	26.500.000,00
26	Hibah	517104000102502560	202509784864	I NYOMAN ARJANA	225	48	614.592.000,00	06/10/2025	4175427198	26.729.600,00
27	Hibah	517103000100600530	202510940381	KETUT NOVIYANTI SUSILAWATI, ST	200	90	905.070.000,00	01/12/2025	4175879325	41.253.500,00
28	Penunjukan pembeli dalam lelang	517101000500700250	202508716629	I PUTU GEDE ABDI SUDIATMIKA	200	240	950.000.000,00	09/12/2025	4175975020	43.500.000,00
29	Jual beli	517103001101103770	202503993854	I WAYAN SUARTANA	136	128	1.000.000.000,00	11/09/2025	4175175980	46.000.000,00
30	Jual beli	517103000100200310	202512153367	ANDRE AGUSTAMA GASALI	338	214	1.700.000.000,00	29/12/2025	4176144742	81.000.000,00

No	Jenis Perolehan Hak	NOP	Nomor Booking	Nama Pembeli / Penerima Hak	Luas (m2)		Harga Transaksi (Rp)	Tanggal Bayar	No Bayar	Nilai BPHTB (Rp)
					Tnh	Bgn				
31	Jual beli	517104000200100570	202505310948	I PUTU GDE ARTHA YUDANA	664	126	1.400.000.000,00	18/07/2025	4174592949	103.330.000,00
32	Jual beli	517102000201900460	202509828049	SANBORNE YOE LANDERS MT	2200	275	281.120.400,00	16/12/2025	4176055586	378.566.250,00
TOTAL UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)										1.087.739.696,00



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS PBJT	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PBJT TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1	Restoran	3.0010374.02.09	Arundina Restaurant	Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati No. 21X, Denpasar	83.000,00
2	Restoran	3.0009982.02.06	Warung Cinta	Jl. Raya Puputan Renon	11.000,00
3	Restoran	3.0010617.02.06	CV. Wahyu Arsa Lestari	Jl. Drupadi Vi/1B Denpasar	100.000,00
4	Restoran	3.0008227.03.02	Gardenia Guesthouse & Cafe	Jl. Mertasari, Sanur, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80228	1.959.700,00
5	Restoran	3.0010368.03.10	Warung Bu Rini	Jl. Tukad Punggawa No. 27, Denpasar	743.290,00
6	Restoran	3.0011294.01.07	UD. Kian Jaya	Jl. Pulau Menjangan No. 37 Denpasar	0,90
7	Restoran	3.0009656.02.02	Warung Nindya Sari	Jl. Padma No. 19 X	9.310.000,00
8	Restoran	3.0009983.01.04	Terrazza Steak House	Jl. Gatot Subroto Barat No. 336 D	600.000,00
9	Restoran	3.0009776.02.08	Bron	Jl. Hayam Wuruk No. 36	1.460.855,00
10	Restoran	3.0007717.04.02	Warung Subak	Jl. Astasura	2.182,10
11	Restoran	3.0009011.03.07	Loving Hut	Jl. PB Sudirman Pert. Sudirman Agung Blok B12A	400.000,00
12	Restoran	3.0008284.04.03	Warung Jepun	Jl. Ahmad Yani 587	0,50
13	Restoran	3.0009129.01.03	Babi Guling Pak Agus	Jl. Tangkuban Perahu	0,60
14	Restoran	3.0002468.02.02	Warung Lawar Penatih	Jl. Saba Penatih	4.392.000,00
15	Restoran	3.0002473.02.11	Warung Nikmat	Jl. WR Supratman	0,40
16	Restoran	3.0008842.04.04	Laklak Kablet	Jl. Singasari Utara Gg. Sandat No.1	0,30
17	Restoran	3.0010783.04.06	Exitotreat	Jl. Cokroaminoto No. 216 Denpasar	1,00
18	Restoran	3.0008980.03.02	Cafe Place 2 Be	Jl. Danau Poso No.52	8.727.000,00
19	Restoran	3.0011357.01.11	UD. Baris	Jl. Gunung Mangu I No. Iia Denpasar	641.510,00
20	Restoran	3.0011342.04.01	PT. Amerta Sedana Yasa	Jl. Sutomo No. 53 Denpasar	0,30
21	Restoran	3.0008302.02.11	Catering Nyonya Wartu Buleleng	Jl. Ganitri 4	0,40
22	Restoran	3.0009788.02.07	Bumdesa Sari Merta Dana Utama	Jl. Rijasa No. 1	0,40
23	Restoran	3.0009079.01.02	Ud. Kartini	Jl. Gunung Batur No. 91	4.925.000,00
24	Restoran	3.0009672.01.08	Bumdes Amertha Nadi	Jl. Teuku Umar No. 66	5,00
25	Restoran	3.0009585.03.02	Bumdes Segara Giri Sanur Kauh	Jl. Batur Sari No. 35 A	10.128.000,00
26	Restoran	3.0010148.04.07	Bumdes Sapta Mandiri	Jl. Gatot Subroto VI J No. 34	1.815.200,00

NO	JENIS PBJT	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PBJT TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
27	Restoran	3.0011205.04.11	UD. Nitya	Jl. Ratna Gg.Flamboyan No.1	60.000,00
28	Restoran	3.0008957.01.05	CV. Eka Pradinata	Jl. Gunung Andakasa Gg. Rama I No.3B	3.209.000,00
29	Restoran	3.0009591.02.06	Bumdesa Dasa Kriya Loka Amerta	Jl. Drupadi No. 14	4.265.000,00
30	Restoran	3.0008843.01.02	UD. Shinta	Jl. Bukit Tunggal No.7	1.155.000,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran					53.987.746,90
1	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008302.02.11	Catering Nyonya Wartu Buleleng	Jl. Ganitri 4	57.634.500,00
2	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008303.03.07	Catering Sari Yoga	Jl. Tukad Irawadi 23	19.234.000,00
3	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008843.01.02	UD. Shinta	Jl. Bukit Tunggal No.7	13.486.000,00
4	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008845.02.06	UD. Mekar Jaya Abadi	Jl. Pandu No. 46	1.855.000,00
5	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008848.01.07	UD. Surya Paksi	Jl. Merpati Gang Aroma No. 10 A	5.390.000,00
6	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008873.04.08	UD. Lestari	Jl. Nangka No. 3	817.500,00
7	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008878.02.09	UD. Ami	Jl. Sekar Jepun V No. 21	3.823.900,00
8	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008880.02.06	UD. Tamba	Jl. Pakisaji Gg. Cenggana Sari II No.1	46.315.000,00
9	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008882.02.11	UD. Guntur	Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Pasar Kerta	1.899.500,00
10	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008888.04.11	Warung Mawar	Jl. Ratna Gg. Mawar No. 3	12.493.000,00
11	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008890.03.05	UD. Mamasjaya	Jl. Raya Pemogan Gg. Nusa Indah 6	24.422.500,00
12	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008924.04.08	CV.Sri Khrisna Catering	Jl. Banteng No.28	1.695.000,00
13	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008939.03.05	UD Rai	Jl. Geria Anyar Br. Kajeng	745.000,00
14	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0008957.01.05	CV. Eka Pradinata	Jl. Gunung Andakasa Gg. Rama I No.3B	6.838.600,00
15	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009039.01.01	Warung Kusuma	Jl. Imam Bonjol Gg. Palapa II/9	2.376.500,00
16	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009079.01.02	UD. Kartini	Jl. Gunung Batur No. 91	21.600.000,00
17	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009228.01.11	Catering Bu Mila	Jl. Gunung Muliawan IX/19	3.915.000,00
18	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009325.01.05	UD. Jaya Laksana	Jl. Tangkuban Perahu Gg.I No.4	860.000,00
19	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009340.03.08	UD. Putra Dalem	Jl. Sidakarya Gg. Taman Suci No.25	1.112.500,00
20	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009393.04.05	Bumdes Ubung Kaja Mandiri	Jl. Kendedes No. 7	7.911.817,00
21	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009401.04.01	Bumdes Pemecutan Kaja Mandiri	Jl. Setiabudi Gg.B No. 3	8.629.400,00
22	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009413.01.11	Bumdesa Kertha Mandala	Jl. Gunung Batukaru No. 27	4.805.600,00
23	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009415.04.10	Bumdesa Panca Artha Mandiri	Jl. Yudistira No. 12	6.931.500,00
24	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009440.03.05	Bumdes Sari Sedana Mertha	Jl. Raya Pemogan No. 1	5.485.800,00

NO	JENIS PBJT	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PBJT TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
25	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009442.01.04	Bumdesa Bhuwana Sari Jaya	Jl. Karang Sari No. 1	7.937.292,00
26	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009482.01.03	Bumdesa Sadha Sari Sedana	Jl. Gunung Soputan No. 82	31.289.350,00
27	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009541.03.07	UD. Ananda	Jl. Tukad Badung XVI A No. 9	9.249.700,00
28	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009560.03.04	Sari Amreta Sudha	Jl. Sidakarya No. 191	5.665.000,00
29	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009566.04.03	Bumdes Maju Mandiri	Jl. Apit Telaga Peguyangan Kaja	21.001.000,00
30	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009569.02.01	Bumdesa Kerta Lestari Mandiri	Jl. Siulan No. 130	7.411.800,00
31	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009583.02.10	Bumdes Sima Sari Dana Desa Kesiman Petilan	Jl. Sulatri II No. 9A	14.082.100,00
32	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009585.03.02	Bumdes Segara Giri Sanur Kauh	Jl. Batur Sari No. 35 A	10.318.500,00
33	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009591.02.06	Bumdesa Dasa Kriya Loka Amerta	Jl. Drupadi No. 14	33.545.500,00
34	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009601.02.05	Bumdes Amertha Jati	Jl. Kecubung Gang Merak No.4	10.999.500,00
35	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009604.04.03	Bumdes Agung Karya	Jl. Padma No. 92	8.491.716,00
36	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009640.02.03	Bumdesa Sadana Amertha	Jl. Letda Kajeng No. 35	9.694.500,00
37	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009641.01.10	Bumdesa Puspa Harum Sejahtera	Jl. Gunung Rinjani No. 99X	4.374.500,00
38	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009648.04.09	Bumdesa Sapta Karya Jaya	Jl. Anggrek No. 16	6.086.500,00
39	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009649.04.08	Bumdesa Asta Giri Sadhana	Jl. Patimura No. 25	6.264.000,00
40	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009654.02.09	Bumdes Kerta Sari Utama	Jl. Bakung No. 71 Tohpati	8.935.000,00
41	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009663.03.01	Biyang Ayet	Jl. Danau Beratan Gg. XI, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80227	807.500,00
42	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009672.01.08	Bumdes Amertha Nadi	Jl. Teuku Umar No. 66	6.907.500,00
43	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009685.01.06	Warung Pradnya	Jl. Pulau Kalimantan No. 2	490.500,00
44	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009788.02.07	Bumdesa Sari Merta Dana Utama	Jl. Rijasa No. 1	5.834.600,00
45	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009942.01.07	Bumdesa Bintang Sari Mertha	Jl. Serma Repot No. 15	3.839.000,00
46	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0009985.01.10	CV. Rahayu	Jl. Buana Kubu No. 24	4.808.500,00
47	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010013.01.01	Bumdesa Eka Panca Lestari	Jl. Imam Bonjol No. 180 Denpasar	6.861.500,00
48	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010118.03.06	Arka Kitchen	Jl. Tukad Bilok No. 77	960.000,00
49	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010148.04.07	Bumdes Sapta Mandiri	Jl. Gatot Subroto VI J No. 34	7.565.000,00
50	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010163.01.06	Bumdes Kerthi Sari Sedana	Jl. Diponegoro Gg. IV No. 3	1.327.500,00
51	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010164.02.09	UD. Krisna Sari Bunga	Perum. Graha Liva Blok B No. 5 Kesiman Kertalangu	8.376.000,00
52	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010192.03.09	Warung Artini	Jl. Pulau Singkep No. 18 Denpasar	75.000,00
53	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010217.02.09	Cawan Catering	Jl. Sekar Jepun V No. 9 Denpasar	8.156.465,00
54	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010255.03.01	Bumdesa Saka Mandiri	Jl. By Pass Ngurah Rai No.59	7.147.750,00

NO	JENIS PBJT	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PBJT TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
55	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0010638.02.02	Sinar Merta	Jl. Kaswari No. 23 Denpasar	7.186.000,00
56	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011013.03.09	Mrs. Tans Catering	Jl. Pulau Singkep Gg 12 D No. 6 Denpasar	18.000,00
57	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011205.04.11	UD. Nitya	Jl. Ratna Gg.Flamboyan No.1	61.653.550,00
58	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011244.04.08	Tisna Sejahtera Mesari	Jl. Blambangan Gg II No. 1 Denpasar	1.332.000,00
59	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011342.04.01	Pt. Amerta Sedana Yasa	Jl. Sutomo No. 53 Denpasar	1.350.000,00
60	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011357.01.11	UD. Baris	Jl. Gunung Mangu I No. IIA Denpasar	346.500,00
61	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011680.01.09	CV. Pesona Pancadatu Mesari	Jl. Pulau Buru No.32 Denpasar	510.000,00
62	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.0011939.04.06	PT. Batukaru Sari Lestari (Catering)	Jl. Pidada XIII No.14 Denpasar	750.000,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering					591.926.440,00
1	Hotel	3.0006250.04.06	Wisma Jaya Dipa	Jl. Pidada XII/1	5.000,00
2	Hotel	3.0009611.03.05	Sylvia Bali Suite Residence	Jl. Tukad Baru Timur	0,80
3	Hotel	3.0009659.03.03	Alley City Hotel	Jl. By Pass Ngurah Rai Pertok. Sanur Raya No.20-21	3.236.639,01
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel					3.241.639,81
1	Pondok Wisata	3.0008601.03.03	Pondok Wisata Kembali Lagi	Jl. Kesari No.36 Sanur	490.418,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata					490.418,00
1	Wisma Pariwisata	3.0008362.03.03	Villa Selaras	Jl. Kesari II No. 3 B	1.002.727,00
2	Wisma Pariwisata	3.0008744.02.09	Villa Leha-Leha	Jl. Sekarsari Gg.VI No.19X	6.025.641,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata					7.028.368,00
1	Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	4.0011747.04.09	Ukm Sb Promosindo	Jl. Lely No.1F Denpasar	877.000,00
2	Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	4.0010015.02.09	Duta Orchid Garden	Jl. By Pass Ngurah Rai, Tohpati No. 21x	432.000,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana					1.309.000,00
1	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	4.0008204.02.03	To Days Salon & Body Treatment	Jl. Jayagiri III/22	750.000,00
2	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	4.0008677.04.08	Royal Gym	Jl. Gatot Subroto 4 No 6X	1.187.500,00
3	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	4.0008107.03.08	Salon Bela	Jl. Diponegoro (pesanggaran)	100.000,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi					2.037.500,00
1	Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa	4.0008603.03.08	New Bahari Karaoke	Jl. Gurita 21 X	91.111.391,00
Total Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa					91.111.391,00
TOTAL UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PBJT					751.132.503,71



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	SKPD	2025			2024		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa
Peralatan dan Mesin							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.373.021.786,86	5.265.607.971,86	107.413.815,00	1.365.568.082,00	1.294.803.292,00	70.764.790,00
2	Dinas Kesehatan	10.946.620.997,66	9.058.041.493,00	1.888.579.504,66	4.979.279.417,67	4.972.592.750,67	6.686.667,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.158.000,00	173.074.667,00	17.083.333,00	-	-	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	156.691.750,00	156.691.750,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	283.885.000,00	283.885.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	205.571.000,00	204.837.666,00	733.334,00
7	Dinas Sosial	26.195.000,00	26.195.000,00	-	185.445.750,00	179.028.563,00	6.417.187,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	58.725.000,00	57.881.666,00	843.334,00	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	238.590.000,00	115.220.990,00	123.369.010,00	290.670.000,00	152.828.541,00	137.841.459,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	235.175.000,00	235.175.000,00	-	85.040.500,00	85.040.500,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	151.984.500,00	143.177.952,00	8.806.548,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	641.587.000,00	641.587.000,00	-	-	-	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	188.012.000,00	188.012.000,00	-	11.905.920,00	11.905.920,00	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.086.526.940,00	1.061.326.782,00	25.200.158,00	-	-	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	695.688.500,00	693.902.767,00	1.785.733,00
17	Dinas Kebudayaan	-	-	-	118.470.000,00	115.390.000,00	3.080.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	278.139.625,00	277.677.125,00	462.500,00	-	-	-
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	154.684.000,00	151.531.168,00	3.152.832,00
20	Dinas Pariwisata	-	-	-	69.985.000,00	69.051.667,00	933.333,00
21	Inspektorat	-	-	-	550.101.319,00	539.857.109,00	10.244.210,00
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.760.000,00	23.760.000,00	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.704.330.000,00	5.307.619.166,00	396.710.834,00	468.703.781,00	468.703.781,00	-
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.650.000,00	17.650.000,00	-	229.069.033,00	225.094.033,00	3.975.000,00
25	Sekretariat DPRD	2.632.705.880,80	2.145.848.742,80	486.857.138,00	-	-	-
26	Kecamatan Denpasar Timur	234.615.076,00	232.762.576,00	1.852.500,00	-	-	-
27	Kecamatan Denpasar Selatan	97.950.000,00	97.727.250,00	222.750,00	-	-	-
28	Kecamatan Denpasar Utara	88.433.175,00	88.316.892,00	116.283,00	-	-	-
29	Sekretariat Daerah	507.118.198,00	442.769.656,00	64.348.542,00	438.255.220,00	409.204.471,00	29.050.749,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		28.577.113.679,32	25.464.053.977,66	3.113.059.701,66	10.440.998.772,67	10.157.526.930,67	283.471.842,00
Gedung dan Bangunan							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.914.975.279,26	4.812.593.129,00	5.102.382.150,26	7.157.913.993,75	3.835.574.253,00	3.322.339.740,75
2	Dinas Kesehatan	1.106.246.045,00	193.929.935,00	912.316.110,00	375.999.600,00	84.404.319,00	291.595.281,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	4.048.140.674,00	1.150.440.990,00	2.897.699.684,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.383.000,00	26.427.240,00	67.955.760,00	-	-	-
5	Dinas Kebudayaan	-	-	-	178.400.000,00	40.140.000,00	138.260.000,00
6	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	55.000.000,00	8.066.667,00	46.933.333,00	-	-	-
7	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	180.127.000,00	57.940.852,00	122.186.148,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	1.096.410.875,00	522.013.829,00	574.397.046,00
9	Kecamatan Denpasar Barat	115.186.000,00	39.509.410,00	75.676.590,00	-	-	-
10	Kecamatan Denpasar Selatan	-	-	-	3.485.010.672,00	692.876.254,00	2.792.134.418,00
Jumlah Gedung dan Bangunan		11.285.790.324,26	5.080.526.381,00	6.205.263.943,26	16.522.002.814,75	6.383.390.497,00	10.138.612.317,75

No	SKPD	2025			2024		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa
Jalan, Jaringan dan Irigasi							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.119.900,00	924.517,00	1.195.383,00	29.009.000,00	10.092.714,00	18.916.286,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	238.665.000,00	-	238.665.000,00	178.234.727,00	178.234.727,00	-
Jumlah Jalan, jaringan dan irigasi		240.784.900,00	924.517,00	239.860.383,00	207.243.727,00	188.327.441,00	18.916.286,00
Aset Tetap Lainnya							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.338.495.217,79	162.589.362,00	3.175.905.855,79	106.828.244,00	19.787.000,00	87.041.244,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.556.491.882,70	-	2.556.491.882,70	-	-	-
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	767.729.000,00	767.729.000,00	-
4	Dinas Kebudayaan	363.666.500,00	214.412.441,00	149.254.059,00	-	-	-
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	421.856.700,00	-	421.856.700,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		6.258.653.600,49	377.001.803,00	5.881.651.797,49	1.296.413.944,00	787.516.000,00	508.897.944,00
Aset Lannya - Aset Tidak Berwujud							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	117.950.000,00	117.950.000,00	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainya - Konstruksi Dalam Pengerjaan		117.950.000,00	117.950.000,00	-	-	-	-
Aset Lain-Lain - Konstruksi Dalam Pengerjaan							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.763.409.229,00	-	7.763.409.229,00	-	-	-
Jumlah Aset lain-lain - Konstruksi Dalam Pengerjaan		7.763.409.229,00	-	7.763.409.229,00	-	-	-
TOTAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH		46.480.292.504,07	31.040.456.678,66	15.439.835.825,41	28.466.659.258,42	17.516.760.868,67	10.949.898.389,75



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PENGELUARAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	POTONGAN					PAJAK					TOTAL
		Pot.ASKES	Pot.IWP 1%	Pot.IWP 8%	Pot.JKK	Pot.JKM	Pjk. PPN	Pjk. PPh 21	Pjk. PPh 22	Pjk. PPh 23	Pjk. PPh Final	
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA	1.754.310.578,00	8.537.468.031,00	7.016.724.893,00	356.411.778,00	1.069.212.182,00	20.046.941.974,00	6.136.387.422,00	218.001.147,00	70.243.859,00	3.363.596.084,00	48.569.297.948,00
2	DINAS KESEHATAN	885.901.236,00	4.770.227.824,00	3.543.599.899,00	177.181.131,00	531.540.000,00	5.901.643.238,00	4.851.090.081,00	735.232.149,00	38.257.965,00	61.155.079,00	21.495.828.602,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	131.144.459,00	657.120.248,00	524.576.431,00	26.920.914,00	74.914.902,00	41.717.781.904,00	1.003.161.489,00	366.269.758,00	5.213.368,00	7.251.987.040,00	51.759.090.513,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	39.869.393,00	239.839.126,00	159.477.504,00	8.157.129,00	24.471.278,00	5.241.592.397,00	576.607.984,00	12.659.946,00	16.051.364,00	1.034.823.933,00	7.353.550.054,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35.782.484,00	184.502.221,00	143.129.658,00	8.353.659,00	43.274.081,00	293.558.849,00	440.082.639,00	23.964.213,00	30.439.280,00	18.637.304,00	1.221.724.388,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70.882.034,00	421.948.810,00	283.527.498,00	14.504.521,00	43.513.097,00	103.691.798,00	977.984.730,00	13.958.528,00	6.899.629,00	-	1.936.910.645,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	54.410.352,00	300.050.486,00	217.640.779,00	11.045.412,00	33.135.620,00	1.515.785.852,00	597.484.750,00	204.559.845,00	10.131.886,00	-	2.944.244.982,00
8	DINAS SOSIAL	35.131.012,00	182.463.128,00	140.523.924,00	7.218.539,00	21.655.252,00	434.833.718,00	513.270.152,00	35.560.672,00	25.171.109,00	21.950.464,00	1.417.777.970,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	21.193.048,00	116.375.612,00	84.772.115,00	4.258.414,00	12.775.069,00	130.403.221,00	364.922.512,00	5.997.672,00	41.733.862,00	3.157.513,00	785.589.038,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.150.968,00	159.211.343,00	104.603.729,00	5.253.322,00	15.759.996,00	263.478.844,00	950.478.195,00	37.486.819,00	12.911.584,00	652.989,00	1.575.987.789,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	170.335.821,00	923.395.943,00	681.220.268,00	35.106.635,00	105.318.171,00	8.353.402.202,00	1.154.289.519,00	849.908.082,00	113.023.396,00	259.050.411,00	12.645.050.448,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	42.855.408,00	242.656.976,00	170.975.711,00	8.735.745,00	26.206.934,00	183.252.656,00	763.130.998,00	25.388.235,00	440.541,00	-	1.463.643.204,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.634.844,00	99.747.038,00	74.539.256,00	3.648.773,00	10.946.207,00	414.418.167,00	376.392.095,00	35.973.172,00	53.572.545,00	-	1.087.872.097,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	151.102.600,00	716.620.946,00	604.409.462,00	31.083.938,00	93.249.126,00	5.366.608.885,00	1.032.703.888,00	610.155.967,00	58.068.809,00	105.598.820,00	8.769.602.441,00
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	32.969.624,00	162.345.443,00	131.878.454,00	6.619.779,00	19.858.938,00	383.573.468,00	480.249.477,00	12.967.214,00	49.072.999,00	-	1.279.535.396,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	22.064.259,00	139.192.850,00	88.214.757,00	4.358.228,00	13.074.717,00	268.628.192,00	546.078.071,00	8.956.942,00	60.557.337,00	-	1.151.125.353,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50.173.517,00	296.752.740,00	200.648.752,00	10.318.241,00	30.954.494,00	279.675.052,00	888.455.726,00	8.329.582,00	37.833.701,00	10.800.000,00	1.813.941.805,00
18	DINAS KEBUDAYAAN	33.155.609,00	160.938.903,00	132.622.370,00	6.704.113,00	20.111.904,00	646.851.783,00	1.655.898.970,00	55.847.539,00	84.507.890,00	-	2.796.639.081,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	31.790.949,00	188.994.632,00	127.163.653,00	6.342.190,00	19.026.450,00	66.593.645,00	616.178.528,00	6.750.479,00	9.248.154,00	-	1.072.088.680,00
20	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.499.420,00	175.166.975,00	117.997.614,00	5.870.535,00	17.611.416,00	136.582.706,00	531.415.183,00	6.802.333,00	10.713.117,00	3.092.748,00	1.034.752.047,00
21	DINAS PARIWISATA	39.317.176,00	205.497.130,00	157.268.624,00	7.906.744,00	23.719.858,00	1.763.574.242,00	648.272.414,00	14.517.232,00	296.131.309,00	-	3.156.204.729,00
22	DINAS PERTANIAN	38.391.404,00	215.789.465,00	153.565.547,00	7.639.988,00	22.919.754,00	703.914.378,00	667.645.976,00	20.964.064,00	12.224.660,00	93.309.262,00	1.936.364.498,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38.137.350,00	207.596.209,00	152.549.251,00	7.672.356,00	23.016.717,00	177.435.147,00	626.183.200,00	7.715.345,00	25.857.400,00	-	1.266.162.975,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	147.438.334,00	803.082.743,00	589.752.760,00	30.075.381,00	90.224.888,00	4.151.466.397,00	2.619.242.979,00	584.374.070,00	474.537.517,00	124.746.164,00	9.614.941.233,00
25	SEKRETARIAT DPRD	33.953.286,00	212.680.057,00	135.873.052,00	6.747.408,00	20.242.187,00	382.827.930,00	9.942.702.089,00	39.647.734,00	22.204.090,00	-	10.796.877.833,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.593.977,00	126.364.261,00	86.376.007,00	4.226.362,00	12.678.997,00	137.562.968,00	644.147.659,00	6.838.793,00	536.939,00	5.340.073,00	1.045.666.036,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	67.755.204,00	372.569.834,00	271.020.700,00	13.897.941,00	41.693.247,00	1.435.951.127,00	2.193.951.745,00	106.834.739,00	112.058.834,00	-	4.615.733.371,00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.667.039,00	223.163.609,00	162.668.133,00	8.448.578,00	25.345.431,00	346.144.150,00	761.782.433,00	25.333.122,00	22.776.507,00	-	1.616.329.002,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	32.086.454,00	212.978.523,00	128.345.763,00	6.422.096,00	19.266.366,00	224.634.204,00	886.911.546,00	16.373.041,00	21.991.493,00	-	1.549.009.486,00
30	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	22.344.324,00	144.986.567,00	89.376.272,00	4.530.893,00	13.592.690,00	116.413.418,00	389.420.753,00	11.293.470,00	6.199.391,00	66.805,00	798.224.583,00
31	INSPEKTORAT	48.561.637,00	313.312.957,00	194.246.277,00	9.326.970,00	27.981.120,00	653.426.204,00	1.838.036.607,00	38.207.920,00	83.799.777,00	-	3.206.899.469,00
32	KECAMATAN DENPASAR BARAT	33.988.830,00	218.448.222,00	135.955.308,00	6.990.392,00	20.971.186,00	615.369.625,00	672.232.275,00	71.941.210,00	24.143.629,00	36.613.428,00	1.836.654.105,00
33	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	42.441.608,00	262.968.045,00	169.766.348,00	8.689.580,00	26.068.589,00	512.809.091,00	866.784.794,00	68.329.807,00	24.913.902,00	15.555.112,00	1.998.326.876,00
34	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	46.045.473,00	286.517.285,00	184.181.729,00	9.300.375,00	27.901.150,00	924.198.743,00	865.979.593,00	67.635.998,00	30.942.354,00	84.257.690,00	2.546.960.390,00
35	KECAMATAN DENPASAR UTARA	41.414.782,00	263.052.632,00	165.659.045,00	8.582.079,00	25.746.250,00	524.595.075,00	679.571.149,00	47.673.741,00	15.769.833,00	39.909.710,00	1.811.974.296,00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.601.002,00	119.800.912,00	86.403.936,00	4.282.609,00	12.847.677,00	367.154.266,00	541.527.074,00	36.736.172,00	42.733.490,00	-	1.233.087.138,00
	JUMLAH	4.353.095.495,00	22.863.827.726,00	17.411.255.479,00	882.832.748,00	2.660.825.941,00	104.786.775.516,00	49.300.654.695,00	4.459.186.752,00	1.950.913.520,00	12.534.300.629,00	221.203.668.501,00

9